BAHASA DAN SUSASTRA DALAM GUNTINGAN

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 118 MEI 1995



PERPUSTAKAAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV
Jakarta 13220, Telepon 4896558, 4706287, 4706288

DAFTAR ISI

BAHASA

BAHASA INDONESIA-ISTILAH

Lelucon di Seputar Wabah Nama-nama Asing 1
Akhir Juni, Rekalme di Bekasi Berbahasa Indonesia 3
Giliran Grup Lippo Ganti Istilah-istilah Asing 4
Berkenalan dengan Kata dan Istilah Baru 6
Pejabat dan Intelektual Mesti Hindari Penggunaan Istilah-istilah Asing 7
Istilah Asing Masih Dominan 8
Nama Jaya Bank Diganti Menjadi Bank Jaya 9
Semua Nama Asing di DKI harus Diganti, Jalur Blok M Pasar Ikan Prioritas Utama 10
52 Lokasi Perumahan Memakai Nama Asing di Kotif Depok harus Segera Ganti Nama 11
Sanggar Bahasa: Kalimat Terlalu Panjang 12
Ditertibkan, Papan Reklame yang Masih Gunakan Istilah Asing 16
PHRI Bali Kebereatan Ganti Nama Asing ke Dalam Bahasa Indonesia 17

BAHASA INDONESIA=PELAJARAN

Bahasa Kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-1606 18
Bahasa Kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-1604 21
Bahasa Kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-103: Ketepatan, Kebenaran, dan Kelazinan dalam Pemilihan Kata 24
Bahasa Kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-1588 27
Bahasa kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-1589 30
Bahasa Kita-Bahasa Indonesia: Pelajaran ke-1590 33

BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

PHBI Akan Kirim Hasil Koreksi Pemakaian Bahasa Kepada Pers 36
3,5 % Warga Belum Bisa "Berbahasa Indonesia" 37
Pengusaha Wajib Mempelopori Penggunaan Bahasa Indonesia .. 38
Diperbanyak, Baliho Kampanye Bahasa Indonesia 39

Majalah dan Radio Berbahasa "Prokem" Akan Ditertibkan 40
Dr Riris K. Toha Sarumpaet: Penggunaan Bahasa Menunjukkan Kepribadian 41

BAHASA INDONESIA-PENGAJARAN

Problematika Pengajaran Bahasa Indonesia Baku di SMA 43

BAHASA INDONESIA-ULASAN

Ebtanas: Studi Kasus Tentang Bahasa Indonesia 46
Menpen Harmoko: Bahasa Indonesia Pemersatu Bangsa 49
Menpen: Bangsa Indonesia Tetap Bersatu Karena Bahasa Indonesia 50
Sanggar Bahasa: Menyusuri Kata Menelusuri..... 51
Ada Kegenitan Dalam Berbahasa Indonesia: "Saya Heran Masih Ada yang Gunakan Bahasa Asing" 52
40 juta Orang Indonesia Belum Berbahasa Indonesia 53
Aspek Kebahasaan dalam Era Globalisasi 54
Bahasa: Sikap Bahasa dan Jati Diri Bangsa 55
Kembali ke Bahasa Indonesia 57
Bahasa Kita: Cinta Berlebihan Kepada "daripada"..... 58
"Yang Dipertaruhkan adalah Martabat Bangsa!' 59
Pramunikmat: Tidak Tepat dari Segi Morfologis..... 60
Tentang Pengindosiaan 61
Lukman Ali: Lafal Daerah 63
Close-Up: Membangun Bahasa Indonesia 66
Asal Usul Kata Preman 67
Bahasa Kita: "Laras": Samakah dengan "Logat"? 69
Kepedulian Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia 70
Masyarakat Tidak Hormat Kepada Bahasa Nasionalnya: Penguasaan Bahasa Indonesia Merosot 71
Gangguan Berbahasa dapat Terjadi Pada Anak Sejak Balita .. 72
Presiden Canangkan Disiplin Nasional: Ada Tanda-tanda Merisaukan dalam Bahasa Indonesia 73
Nasionalisme dan Sikap Masyrakat pada Bahasa Indonesia ... 75
Bahasa Kita: Ciri-ciri Bahasa dalam Judul Berita 77

Bahasa dan Kebudayaan 78
Presiden Soeharto: Perubahan takkan Bahayakan Persatuan .. 80
Menko Polkam: Menteri Perlu Ditatar Bahasa Indonesia 81
Linguistik Indonesia Condong Berkiblat ke Eropa-Amerika .. 82
Untuk Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar Perlu Ada Penataran bagi Para Menteri 83
Pak Soes: Para Menteri Perlu Ditatar: Agar Tidak Pakai Akhiran "Ken" 84
Presiden Canangkan Gerakan Disiplin Nasional: Pelihara dengan Baik Negara Kebangsaan 86
Soesilo: Menteri Perlu Ditatar Bahasa Indonesia 88
Menteri Penerangan Harmoko: Akan Ditertibkan, Majalah dan Radio Berbahasa Prokem 89
Jalan Protokol Blok M-Pasar Ikan Bebas Bahasa Asing Sebelum 17 Agustus 90
Idealisme dalam Berbahasa Masih Bayangan Cermin Retak 91
Gubernur Jambi Canangkan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 92
Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 93
Soal Disiplin Menggunakan Bahasa Kita 94
Menko Polkam: Pejabat Tinggipun Perlu Ditatar Bahasa Indonesia 95
Masalah AKtual Bahasa 96
Language Reflects National Character 98
Disiplin Nasional dan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 100
Orang Baik Berbahasa Baik 102
Penggunaan Bahasa Tidak Konsisten Timbulkan Kerugian Cukup Besar 104
Bahasa Kita: Dari Saudara-saudari Sampai dengan Remaja-Remaji 105
Banyak yang Merasa Bangga Menggunakan Bahasa Gado-gado ... 106
Jangan Terjebak Sloganisme 107
Riwayat Bahasa Pemersatu 108
Buang Penggunaan Kalimat yang Membingungkan 109

Jangan Cuma Kesadaran 110
Bangsa Indonesia Seharusnya Bersyukur 112
Nona Park, Ahli Bahasa Indonesia dari Korea 114

BAHASA JAWA-KONGRES

Suarabaya Tuan Rumah Kongres Bahasa Jawa II 117

BAHASA SANSEKERTA-PEMAKAIAN

Prof Dr JS Badudu: Penggunaan Bahasa Sansekerta Sebaiknya Mulai Dihindari 118

KEBUDAYAAN-ULASAN

Pemahaman Konsep Budaya 119
Manifesto yang Terlupakan 120
Bisakah Kebudayaan Dipisahkan dari Politik? 121
Emha Ainun Najib: Mereka Tetap punya Naluri untuk tidak Termakan 123
Dialog dan Potret Kebudayaan Kita 126

SUSASTRA

KESUSASATRAAN INDONESIA-ULASAN

Sastra Berpotensi Lahirkan Revolusi Sosial 128
Jurnalistik Bergaya Sastra, Mangapa Tidak? 129
Bingkai: Sastra di Negri Perdagangan 130
Hadiah Sastra dan Bias Turutannya 131
Karya Sastra Sebagai 'Haram Jadah' 132
Pluralitas Sastra dan Kompleksitas Zaman 133
Masa Depan Sastra Ditentukan oleh Minoritas 135
Kenangan Haji dari Seorang Sastrawan 137
Konteks Tema Novel Indonesia (2): Dominasi Problem Sosial Dekade '20-an 138
"Manikebu" Tidak Mati 140
Chairil Anwar: Perjuangan Menguasai Konvensi 142
Danarto: "Semuanya Tidak Laku" 145

Banyak Buku yang Terlalu Jelek untuk Dibaca 148
Arief Budiman, Goenawan Mohamad dan Emha Bikin "Pernyataan Mei" 150
Sastrawan dan Persoalan Sosial 152
"Palung-palung Kesusastraan" 154
Sastrawan Mestilah Seorang Orator 155
"Sastrawan Besar Tak Mewakili Kelas" 157
Globalisasi Wacana Sastra 159
Pernyataan Nostalgik di Bulan Mei 161
Bingkai: Sastra Profetik, Sastra yang Dilakoni 162
H.B. Jassin: "Pernyataan Mei" Mewakili Hati Nurani dengan Catatan 163
Walisongo, Mitos atau Realitas 164
Menuju Dunia Sastra yang Demokratis dan Kompetitif 165
Sastra Baru: Metafiksi 167
Kritik Apresiatif, Kritik Palsu 169
Menuju Dunia Sastra yang Demokratis dan Kompetitif 172
Sastra dalam Kesetaraan Dunia 173
Mungkin Kita Cuma Butuh 'Sastra tak Senonoh' 175
Setiap Orang adalah Penyair 176
Wacana (Ke)-Wanita-(an) dalam Kesusastraan 177

NOVEL-ULASAN

Konteks Tema Novel Indonesia (3): Kritik di Zaman Kolonial Belanda Kian Tajam 179
Konteks Tema Novel Indonesia (4): Terbitnya Naskah-naskah 'Sisa' Zaman Kolonial 181
Konteks Tema Novel Indonesia (5): Isu Revolusi Justru Merebak Pasca Kemerdekaan 183

PUISI-ULASAN

Bila Dua Wanita Melahirkan Puisi 185
Memakai Cinta Tuhan Melalui 'Angin' 187
Theomorphic Being Puisi-puisiEmha Ainun Nadjib 188

Apa dengan Sajak Protes Saja Kita Bicara? 189
Jujuk di Gelar Puisi Multimedia 191
Mencari Makna Puisi di Tengah Modernisasi 192
Sajak-sajak Azwina Aziz Miraza 193
Puisi, Satu Kata, Kata Berikutnya 195
Bingkai: Puisi Indonesia, Sejarah yang Terputus 197
Sajak-sajak Yvone De Fretes 198
Puisi, Menoleransi juga Menyerap 201

SASTRA-BIOGRAFI

Arifin C. Noer Telah Tiada 205
In Memoriam Arifin C Noer: Kekuatannya tak Tertandingi
Sebagai Penulis Naskah Drama 207

BAHASA INDONESIA-ISTILAH

Lelucon di Seputar Wabah Nama-nama Asing

"Pak tolong antar ke *The Garden City*."

"Maaf Pak di mana itu *Gardan Siti*?"

"Bukan Gardan, tapi Garden. Itu lho di Bintaro."

"Oh...Kota Satelit Bintaro Jaya."

Dialog antara penumpang dan sopir taksi itu terdengar lucu. Adalah Tomo, sang sopir, yang memiliki pengalaman yang mengundang senyum itu. Ia bukan saja tak tahu letak nama pemukiman yang terdengar asing tersebut, tapi sekaligus juga terpeleset mengucapkannya.

Garden jadi Gardan, City jadi Siti. Dan untungnya, Tomo mengetahui tempat yang hendak dituju si penumpang, setelah penumpang itu menyebut lokasi pemukiman. The Garden City ternyata tak beda dengan Kota Satelit Bintaro Jaya.

Tomo, barangkali menjadi salah seorang dari banyak pengemudi taksi lainnya yang juga sering kebingungan dan terpeleset dengan nama-nama asing perumahan atau Real Estate di Jakarta. Pasalnya, ada ratusan nama kawasan perumahan di Jabotabek yang menggunakan nama-nama asing, terutama dalam bahasa Inggris.

Tengoklah deretan nama-nama ini: Villa Orchid Garden Estate, Freeway Mainsion, Palm Spring Village, Lippo Village, Lippo City, Spring Garden, Citra Grand City, The Garden City, Golfview Condominium, Modernland Golf Estate, Rainbow Hill Golf Leissure & Residential Resort, Westwood Tower Condominium, Century Garden Estate, Pamulang Estate, Bogor River Valley, Bogor Lake Side, dan banyak lagi nama yang bisa dideretkan. Belum lagi nama-nama campuran seperti Duta Harapan Lake View Estate, Taman Galaxy Indah Estate.

Tak heran, jika salah seorang penyair, Jose Rizal Manua, kemudian mengambil imaji dari berderetnya nama-nama asing di kawasan perumahan itu untuk sebuah puisinya, sambil memberi kata kunci dalam puisi itu: *rumah masa depan* rumah pensiunan *rumah gengsi*.

Di Jabotabek kini memang bertaburan nama-nama asing. Papan-papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan papan-papan reklame di kompleks perumahan, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan jalan-jalan dalam waktu 2-3 tahun ini dipenuhi nama-nama asing itu. Perda DKI No.1 Tahun 1992, yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia pada papan-papan nama itu pun seolah tak berdaya menghadapi polusi nama-nama asing tersebut.

Pakar bahasa Indonesia, Lukman Ali, menyebut polusi kata asing dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi wabah. Nama-nama toko, hotel, mal, perumahan, bahkan sampai toilet —masih banyak yang menggunakan kata *gents* dan *ladies* ketimbang *laki-laki* dan *wanita*— menggunakan bahasa asing.

Polusi itu, kata Lukman, bahkan telah menggejala tak hanya pada penamaan tempat, tapi juga dalam pergaulan di bidang ekonomi dan politik. "Kalau polusi itu dibiarkan akan membawa akibat pada persoalan jati diri bangsa," katanya.

Inilah agaknya muara persoalan dari menggejalanya istilah-istilah asing itu. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyebutkan bahwa sebenarnya bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang telah 'elas. Peristiwa Sumpah Pemuda, UUD 45 dan GBHN telah mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi dan mengamanatkan agar bahasa Indonesia dimasyarakatkan secara luas kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, semestinya bahasa Indonesia menjadi pilihan utama bagi penamaan dan komunikasi di berbagai bidang dalam masyarakat.

Masalah gengsi

Dengan merebaknya penggunaan istilah-istilah asing itu, kata Hasan, menjadi tanda —bukan karena tak diketahuinya kedudukan bahasa Indonesia itu— tapi lebih karena tak dimilikinya kebanggaan berbahasa Indonesia.

Kebanggaan itu, kata Lukman, kelihatan makin menipis, lantaran sering digoyang oleh sikap tak mau ambil pusing. "Pemakaian padanan dalam bahasa Indonesia untuk istilah asing dianggap merendahkan gengsi para pemakainya yang takut dikatakan tak terpelajar," ujar Lukman.

Masalah gengsi ini, kata Hasan, menyangkut soal sikap berbahasa. Muncul kecenderungan menunjukkan 'rasa gagah' berbahasa. Dan celakanya 'rasa gagah' itu, katanya, tidak dilakukan oleh orang yang benar-benar menguasai bahasa asing, melainkan orang yang setengah-setengah.

Hasan memberi contoh pada pemasangan *billboard* di salah satu sudut Jl. Sudirman Jakarta. Di sana terpasang papan bertuliskan "Total Vakansi Resort". Yang menggelikan, kata *vacancy* ditulis *vakansi*. Ada pula papan nama sebuah gedung, yang tertulis "Economic and Bisnis Center" (bukan Economic and Business Centre).

Ada juga contoh sebuah nama kawasan perumahan yang memperlihatkan ketaksesuaian nama dengan isi yang ditawarkan. Sebut saja X River Valley, sebuah kawasan perumahan yang ternyata tak memiliki sungai yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam label namanya.

Pada giliran berikutnya, penggunaan nama-nama asing itu pun mengarah kepada simbol status sosial. Nama-nama asing pada kawasan perumahan itu, misalnya, selalu dikaitkan dengan persoalan status sosial itu. Seorang konsultan properti, yang turut memasarkan perumahan di Bogor, pernah menyebutkan bahwa dengan mengubah nama ke dalam nama asing tingkat laku bisnis propertinya menjadi tinggi. Apalagi jika sasaran konsumennya lebih ditujukan kepada orang asing.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo, misalnya, lebih senang memberi nama proyek pusat perbelanjaannya di kawasan Pluit dengan nama Megamall Leissure & Shopping Center. "Kalau menggunakan bahasa Indonesia, orang asing tak akan tahu proyek saya. Proyek ini kan ditujukan untuk orang asing," ujarnya, seperti dikutip Majalah *Properti*.

Berbeda pendapat dengan konsultan properti itu, Johannes Tulung, PR Manager Bumi Serpong Damai (BSD) yang juga Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Real Estate Indonesia (REI), mengemukakan bahwa tingkat lakunya perumahan yang ditawarkan kepada konsumen tidak bergantung pada asing tidaknya nama sebuah kawasan perumahan. "Konsumen akan membeli rumah lebih karena konsistensi janji yang diucapkan developer kepada mereka. Jadi, berkaitan dengan kepuasan pelayanan yang diberikan," katanya.

Soal merebaknya nama-nama asing pada kawasan perumahan itu, disebut Tulung lebih karena persoalan trend. Pada periode 1980-an, misalnya, kawasan pemukiman masih menggunakan nama-nama dalam bahasa Indonesia. Nama-nama seperti Bumi Serpong Damai, Kelapa Gading Permai lazim digunakan. Tapi, pada kurun berikutnya tahun 1990-an muncul trend nama-nama asing.

Tulung menyebut, masuknya desainer-desainer asing sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya nama-nama asing itu. Adalah Bintaro Jaya, misalnya, yang kemudian mengubah nama menjadi *The Garden City*. Dan kawasan-kawasan lain juga ramai-ramai 'membombardir' masyarakat dengan nama-nama asing.

Selain itu, kawasan-kawasan hunian pun kemudian mengenal pemilah-milahan kalangan. "Hunian menengah ke atas paling banyak disodori nama-nama asing itu. Diciptakan *image* bahwa kalangan menengah ke atas suka nama yang eksklusif dan trendi. Dan itu ada pada nama-nama asing. Padahal nama-nama asing itu tak punya nilai apa-apa, kecuali kesan wah sesaat," katanya.

Kesan wah sesaat itu yang agaknya kemudian membawa wabah istilah-istilah asing pada tahun-tahun belakangan ini. Pakar bahasa S. Effendi menyebut para pengguna nama dan istilah asing itu —juga konsumen yang mengotakkan diri dalam kalangan menengah ke atas karena memilih nama asing itu— mengalami rasa rendah diri terhadap apa yang dimiliki.

Adalah banyak negara, kata Effendi, yang tetap setia dengan bahasa mereka. Thailand, Jepang dan Prancis, adalah beberapa contoh negara yang terhitung setia menggunakan dan memasyarakatkan bahasanya sendiri. Kecenderungan tak digunakannya bahasa sendiri di Indonesia itu bahkan disebut Prof. Dr. Anton M. Moeliono sebagai pelecehan terhadap bahasa Indonesia. "Mereka mengidap tuna harga diri dan rasa minder berbahasa," kata guru besar bahasa Fak. Sastra UI itu.

Karena itu, tak heran jika gerakan pengindonesiaan nama dan istilah asing yang dimotori Mendikbud Wardiman Djojonegoro itu mendapat respon positif banyak kalangan. Menpera Akbar Tanjung pun berkomentar, jika pemerintah tidak mengimbau penggantian nama-nama asing di banyak proyek perumahan bukan tidak mungkin wilayah Jabotabek akan didominasi nama-nama asing itu. Dan Jabotabek seolah tidak berada di Indonesia lagi, tapi sudah seperti di tengah daratan Eropa.

REI lewat sidang pleno keenamnya di Manado, Maret 1995, pun mengeluarkan pernyataan agar semua anggotanya mengubah nama proyek-proyeknya yang menggunakan nama asing dengan nama Indonesia. Proyek baru diwajibkan menggunakan nama Indonesia, sementara proyek lama diberi tenggang waktu sampai Agustus 1996 untuk proses pengalihan nama. Jika sampai batas waktu itu tak ditepati, Ketua Umum DPP REI Enggartiasto Lukita pun mengancam tak akan memperpanjang keanggotaan pemakai nama-nama asing di tubuh REI.

Inilah agaknya angin baru dari gerakan kembali mencintai bahasa Indonesia dengan dukungan kemauan politik dari para pengambil keputusan. Meski untuk pengalihan nama-nama asing itu kabarnya Ciputra Development mengeluarkan koceknya sekitar Rp 2 milyar. Tapi, itu bukan alasan, karena kemudian grup Ciputra pun dikenal sebagai salah satu pelopor pengindonesiaan nama-nama itu. Dan dana itu pun, kata Tulung, bisa saja sekaligus masuk dalam pos promosi. Hasan Alwi, Lukman Ali dan S. Effendi tampaknya satu suara dalam soal ini, bahwa persoalan-jati diri dan martabat bangsa jauh lebih mahal dari biaya yang harus ditanggung dalam pengindonesiaan nama-nama asing itu. ■ yos rizal suriaji

Republika, 7 Mei 1995

Akhir Juni, Reklame Di Bekasi Berbahasa Indonesia

BEKASI (Suara Karya): Pemda Bekasi memberikan batas waktu hingga akhir Juni 1995 terhadap papan reklame dan sejenisnya yang menggunakan istilah asing untuk mengganti atau mengubahnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Bekasi, Drs Memet Rochmat, pekan lalu.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi pemasang reklame untuk menolak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena hal itu sudah merupakan kebijakan pemerintah. "Untuk itu Dinas yang dipimpinnya telah mengeluarkan surat edaran kepada para pemasang iklan di wilayah Kabupaten Bekasi untuk segera menggantinya atau mengubahnya," tutur Memet.

Pelaksanaan untuk mengubah papan reklame dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak dikenakan biaya, kecuali jika papan reklame tersebut berubah bentuk dan ukuran.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata Memet, tidak hanya berlaku untuk jenis reklame tertentu, tetapi juga untuk semua jenis reklame baik yang sudah maupun belum terpasang di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sementara Ketua DPRD Bekasi H Abdul Manan ketika dimintai keterangan tentang upaya ini menyatakan sangat mendukung. Sewajarnyalah kita menggunakan bahasa kesatuan dalam kegiatan hidup sehari-hari di bumi pertiwi ini. "Siapa lagi yang membudayakan kalau bukan masyarakat Indonesia sendiri".

Menurut Abdul Manan, tidak mudah mengganti nama dan istilah asing pada papan reklame dan sejenisnya, karena bukan hanya mengubah tetapi harus mengganti secara keseluruhan. "Untuk itu diharapkan pihak eksekutif memberikan penyuluhan kepada para pemasang reklame di wilayah kota patriot ini," katanya. (Id)

Suara Karya, 8 Mei 1995

Giliran Grup Lippo Ganti Istilah-istilah Asing

Himbauan Presiden Soeharto untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih khusus lagi agar mengubah istilah-istilah asing pada nama-nama kawasan pemukiman (perumahan) ke dalam istilah Indonesia, kini terus bergulir memenuhi realisasinya. Gema himbauan tersebut telah banyak membuahkan hasil dan mendapat sambutan positif bahkan langsung diwujudkan oleh beberapa perusahaan **pengembang kawasan** *(developer)*. Ketua Umum DPP REI (Real Estate Indonesia - kemudian mungkin menjadi Lahan Yasan Indonesia), Drs Enggartiasto Lukita juga terus mendesak para anggotanya untuk segera mengakhiri pemakaian atau penamaan istilah-istilah asing pada nama-nama kawasan perumahan. Ia meminta agar pemerintah menolak jika ada permohonan dari pengembang (kawasan) perumahan baru yang memakai istilah asing untuk nama kawasan perumahannya. REI meminta agar perumahan yang baru tidak lagi memakai istilah asing, sedangkan yang sudah terlanjur agar segera diganti dengan istilah Indonesia yang baik.

Aparat pemerintah daerah pun langsung mengambil langkah-langkah konkret. Pada bulan Juli ini Pemda Tangerang berjanji sudah hilang semua istilah-istilah asing untuk tempat-tempat umum dan kawasan perumahan. Pemda Kodya Bogor pun demikian halnya. Di sini tentu Pemda setempat bisa bekerja sama dengan para pengembang perumahan tadi, ataukah pengusaha-pengusaha lainnya yang membangun tempat-tempat umum dengan nama-nama asing, seperti restoran, hotel, pertokoan, dan lain-lain.

Kalau sejak awal April 1995 yang baru lalu Grup Ciputra (dulunya Ciputra Group-**Red**) telah mempelopori pengindonesiaan nama-nama kawasan perumahan yang dibangunnya, maka menyusul sejak Selasa siang (9/4) lalu, Grup Lippo (dulunya Lippo Group) pun bertekad untuk mengindonesiakan semua nama-nama perusahaan, termasuk perusahaan properti yang dibangunnya. Sebutlah contoh misalnya Lippocity, Lippo Citimall, Lippo Bank, Lippo Life, Lipoland Development, dan lain-lain. Komitmen dengan Grup Lippo ini ditandai dengan penandatanganan kerja samanya dengan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Lihat halaman VIII kol.5



SEPAKAT GANTI NAMA — *Grup Lippo sepakat melakukan ganti nama untuk nama-nama kawasan perumahan yang dibangunnya, termasuk bangunan-bangunan lainnya yang selama ini menggunakan kata-kata asing. Tampak Pimpinan Grup Lippo, Dr Mochtar Riady menyalami Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Dr Hasan Alwi seusai penandatanganan Piagam Kesepakatan tersebut, disaksikan Mendikbud Wardiman Djojonegoro dan Menpera Akbar Tanjung serta Ketua Umum DPP REI Drs Enggartiasto Lukita. (Suara Karya/Martin Sallis Say)*

Bahasa Depdikbud, DR Hasan Alwi, disaksikan oleh dua orang menteri yakni Mendikbud Prof Dr Ing Wardiman Djojonegoro dan Menpera Ir Akbar Tanjung serta Ketua Umum DPP REI, Drs Enggartiasto Lukita, Selasa siang kemarin itu.

Peristiwan penandatanganan itu sendiri menunjukkan betapa tinggi komitmen grup Lippo ini untuk mengganti semua istilah-istilah asingnya. Grup ini tampak tidak main-main dengan perubahan nama-nama tersebut, yang notabene tentu akan menelan biaya yang cukup tinggi. Lembaga Pusat Bahasa itu memang pihak yang paling tepat untuk mengganti istilah-istilah asing itu secara tepat, baik, dan benar, terlepas dari apakah hubungan kemitraan itu sekadar sebagai konsultan atau bentuk hubungan lainnya.

Alat Pemersatu

Sambutan Dr Mochtar Riady, pimpinan Grup Lippo, pada saat penandatanganan tersebut, sungguh memperlihatkan tingginya pemahaman Mochtar Riady dan para stafnya akan arti bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, sekaligus keutuhan rasa nasionalisme mereka. Apalagi penandatanganan komitmen para pihak ini berlangsung di Gedung Kebangkitan Nasional, persis di Ruang Budi Oetomo, tempat di mana rapat pendirian organisasi tersebut pada 20 Mei 1908.

Dengan memberi contoh Cina, di mana negara tersebut dua kali mengalami peperangan dengan bangsa lain, tetapi karena besarnya peran bahasa Cina sebagai bahasa pemersatu, maka negara dengan penduduk sekitar satu milyar ini terus berdiri kokoh hingga saat ini. "Bahasa Indonesia pun sungguh-sungguh penting sebagai alat pemersatu bangsa ... dan sangatlah tepat dan karena itu kita sambut dengan gembira upaya pemerintah untuk mengganti istilah-istilah asing ini saat kita merayakan 50 tahun kemerdekaan negara kita," kata Mochtar Riady.

Lebih jauh ia mengatakan, perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia di Divisi Pengembangan Kota Grup Lippo. Grup Lippo akan mengindonesiakan kata dan istilah asing dengan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk menunjukkan kecintaan akan bahasa bangsa sendiri.

Kata dan istilah-istilah asing untuk nama tempat-tempat umum dan kawasan perumahan, kata Drs Enggartiasto Lukita, sudah merebak di mana-mana. Pihaknya sudah meminta kepada semua anggota REI untuk segera mengindonesiakan seluruh proyek properti, baik itu gedung, kawasan perumahan, pusat belanja dan lain-lainnya. Para pengembang ini diharapkan sudah mulai mencari nama atau padanan baru bagi proyek-proyek yang semula menggunakan istilah asing.

Menpera Ir Akbar Tanjung sendiri sampai-sampai merasa *risih* ketika membaca nama-nama perumahan atau tempat-tempat umum itu dengan kata-kata asing. "Rasanya seperti saya tidak lagi berada di bumi Indonesia," katanya. Ia memberi contoh, *Bogor Lake Side* di mana danaunya tidak ada dan baru akan dibangun (lake = danau), *Beverly Hills,* dan lain-lain.

Nama-nama dengan kata-kata asing itu memang sudah terjadi. Apa boleh buat ... tapi sudah ada kehendak di hati untuk menggantikannya. "Yang paling penting bahwa pemakaian istilah-istilah asing itu tidak berarti kecilnya rasa nasionalisme para pengembang, sama sekali tidak ... dan kalaupun sekarang ada keinginan untuk mengganti ke bahasa Indonesia, itu karena adanya rasa bangga di dalam hati sebagai bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar," kata Enggartiasto Lukita.

Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia, kata Mendikbud Wardiman Djojonegoro. Ini karena bahasa Indonesia benar-benar telah menjadi bahasa pemersatu bangsa. Dan selain itu, ternyata bahasa kita sudah mulai dipelajari di 29 negara untuk anak-anak tingkat SD sampai SLTP. Dan wujud dari kebanggaan itu mestinya dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana dan pada kesempatan apa saja sejauh kondisi tidak mengharuskan kita menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi ... (Martin Sallis/Say)

Suara Karya, 11 Mei 1995

Berkenalan Dengan Kata Dan Istilah Baru

Mulai terbitan ini dalam kolom Sanggar Bahasa kami sajikan daftar padanan kata dan ungkapan Indonesia untuk mengganti kata dan ungkapan asing dan pemakaiannya untuk nama badan usaha, kawasan, dan gedung. Daftar ini dikutip dari buku Pedoman Penggunaan bahasa Indonesia Serta Pengalihan nama dan Kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia Pada Tempat Umum terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi lebih lanjut dapat diminta pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jl.Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220, telepon (021) 4894564, 4706287, 4706288, dan faksimile (021) 4880407.

Redaksi

Bentala

Kata ini dipakai untuk menggantikan kata Inggris *estate*, dan berarti 'tanah, bumi'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang semuanya susunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta diterbitkan oleh Balai Pustaka, diterangkan bahwa kata itu ditemukan dalam karya sastra lama atau klasik. Berdasarkan bentuknya dapat diduga kata itu berasal dari kata Sansekerta *patala* yang berarti 'tanah, bumi', dan sekarang masih hidup di dunia pewayangan yang menyebutkan bahwa ada tujuh lapis bumi, disebut *saptapatala*.

Dalam *Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pengalihan Nama dan Kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia pada Tempat Umum* (disingkat *Pedoman*) dicontohkan perubahan nama *Bogor Country Estate* menjadi *Bentala Janapada Bogor* atau *Bumi Janapada Bogor*. Patut disayangkan Pedoman masih memberikan peluang untuk sekedar mengindonesiakan ejaan *estate* menjadi *estat* yang nampaknya, berdasarkan kecenderungan selama ini, akan lebih disukai daripada kedua kata yang lain *(bumi, tanah)*. Alangkah baiknya jika *Pedoman* memberikan pedoman yang benar-benar dapat dijadikan pegangan.

Bantaran

Kata *bantaran* digunakan untuk menggantikan kata Inggris *valley*. Kata lain yang juga digunakan untuk menggantikan *valley* adalah *lembah* dan *lebak*. Ketiga kata pengganti itu berasal dari bahasa daerah, Jawa dan Sunda.

KBBI mendaftarkan *jejar* kata *bantaran* yang diberi makna sebagai 'jalur tanah pada kanan dan kiri sungai' (h. 91), sedangkan kata *bantar* yang seharusnya merupakan dasar kata itu diberi makna (hanya bentuk kuna dalam *membantar*) 'menolak (mencegah) penyakit dsb)'.

Dari makna kedua kata itu jelas kiranya bahwa sumber ambilan kedua *jejar* itu tidak sama. *Bantar* diambil dari bahasa Melayu, sementara *bantaran* dari bahasa Jawa atau Sunda. Dalam bahasa Sunda, kata *bantar* atau *babantar* yang dipungut dari bahasa Jawa itu bermakna 'bagian sungai di tempat yang alirannya deras' (Satjadibrata, *Kamus Basa Sunda* (1954):44).

Dengan demikian terlihat adanya perbedaan atau pergeseran makna. Jika dalam bahasa aslinya kata itu bermakna (bagian) sungai, dalam bahasa Indonesia menjadi jalur tanah sepanjang sungai.

Nampaknya ada jaminan kata ini "tidak laku" dipasarkan.

Dukuh

Kata dukuh dimunculkan untuk menggantikan kata Inggris *village*. Selama ini padanan kata Inggris *village* adalah *desa*, bukan *dukuh*. Dalam KBBI, *dukuh* yang tercantum sebagai *jejar* adalah sebuah homonim. *Dukuh* yang pertama bermakna 'dusun atau kampung kecil; bagian dari desa', sedangkan *dukuh* yang kedua bermakna 'orang yang pekerjaannya menyembelih ternak (di Bali, Lombok)' (KBBI: 246).

Dukuh dalam makna yang pertama diduga berasal dari bahasa Jawa atau Sunda, mengingat di wilayah kedua bahasa itu ditemukan banyak tempat yang bernama dukuh, sedangkan di daerah bahasa Melayu tidak ada nama tempat yang mengandung unsur kata *dukuh* itu.

Mengingat dalam bahasa Indonesia dikenal kata *dukuh* yang lain, dengan bentuk bakunya *duku*, yang bermakna '1 pohon tinggi, berbatang lurus, bergetah, kulit batangnya abu-abu, cabang - cabangnya sedikit berbulu halus; bunganya putih - karang tersusun dalam untaian, *Lansium domesticum*'; '2 buah pohon duku, bentuknya kecil - kecil bulat telur sampai bulat dan bergerombok, berwarna cokelat susu, berdaging putih dan berbiji, kadang - kadang bergetah' (KBBI: 245-6), nampaknya kata *dukuh* tidak akan "laku" menggantikan *village!*

Keterangan :

a. Tanda ( ) digunakan untuk mengapit bentuk manasuka atau bentuk yang dapat ditambahkan. Sebagai contoh, *toko (barang) antik* dapat dibaca *toko antik* atau *toko barang antik*.
b. Tanda < > digunakan untuk mengapit penjelasan tentang lingkup penggunaan ungka-

Lihat halaman XI kol.5

pan atau kata di depannya. Misalnya, pada *cruiser <tourism>* bentuk *cruiser* yang dimaksud adalah yang digunakan di bidang pariwisata.

Tanda / digunakan untuk menandai pilihan. Misalnya, *galeri (seni/budaya)* dapat dibaca *galeri seni* atau *galeri budaya* jika bentuk yang ada di dalam kurung itu digunakan.

d. Tanda ; digunakan untuk memisahkan bentuk alternatif yang bersinonim. Misalnya, pada *pelengkap; aksesori* baik bentuk *pelengkap* maupun *aksesori* dapat dipilih.
e. Tanda [ ] digunakan untuk mengapit bentuk pengucapan kata yang di depannya. Misalnya, *jalan bentar* [bentar].

Bersambung Besok

Suara Karya, 17 Mei 1995

Pejabat dan Intelektual Mesti Hindari Penggunaan Istilah-istilah Asing

YOGYA (KR) - Para pejabat dan kaum intelektual seyogyanya menghindari penggunaan istilah-istilah asing. Mereka justru perlu memelopori penggunaan istilah dalam Bahasa Indonesia, baik dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam forum resmi. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki *panutan* dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dosen Fakultas Sastra UGM, Dr Siti Chamamah Soeratno mengemukakan hal tersebut kepada *KR* di kediamannya, Minggu. Hal tersebut dinyatakan sehubungan dengan pencanangan Presiden Soeharto untuk disiplin menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam Peringatan Harkitnas, Sabtu lalu.

"Kita harus bangga. Karena Bangsa Indonesia memiliki keakuan identitas sendiri melalui Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Mengingat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa dan lebih dari 370 bahasa daerah memiliki bahasa persatuan," tambah Chamamah Soeratno.

Selama ini ada kecenderungan orang menggunakan bahasa yang dicampur dengan bahasa asing, supaya terlihat gagah dan intelek. Tetapi menurutnya, kalau istilah itu sudah ada dalam Bahasa Indonesia, sebaiknyalah digunakan istilah Indonesianya.

Greget untuk menggunakan istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia tampaknya kembali disemarakkan melalui ajakan Presiden Soeharto saat memperingati Harkitnas. Meski pembakuan istilah-istilah asing ke dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan Pusat Bahasa dan melibatkan para pakar termasuk dari UGM, telah dicanangkan tahun 1988 lalu.

Bagi Bangsa Indonesia, menurut dr Chamamah, ajakan Kepala Negara untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menunjukkan pada dunia luar bahwa Bangsa Indonesia memiliki identitas sendiri.

Untuk itulah, Dr Siti Chamamah yang sering memberikan penyuluhan Bahasa Indonesia di instansi itu berharap, para pemimpin dapat memberikan keteladanan dalam hal ini. Menurutnya, Bangsa Indonesia harus bangga karena di forum internasional Kepala Negara juga selalu menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidatonya.

"Ini identitas bangsa yang harus dibanggakan. Terlebih mengingat peran Bangsa Indonesia yang makin besar baik di tingkat regional maupun internasional," lanjutnya. Dengan keadaan ini menurut ahli Bahasa Indonesia tersebut sekarang tinggal memotivasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, benar dan rapi. (Fsy)-z

Kedaulatan Rakyat, 22 Mei 1995

Istilah Asing Masih Dominan

Jakarta, Kompas

Istilah-istilah asing untuk nama-nama kawasan permukiman yang dibangun para developer swasta di sekitar Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi), masih dominan. Selain untuk rumah-rumah mewah dan kondominium, istilah-istilah asing itu juga terlihat masih dipakai untuk nama-nama perumahan sederhana.

Demikian pengamatan *Kompas* pada Pemeran Rumah Ideal 1995, Kamis, di Jakarta. Pameran berlangsung di Jakarta Hilton Convention Centre sejak 12 Mei 1995 lalu, berakhir pada tanggal 21 Mei 1995 mendatang.

Presiden Soeharto pada awal bulan April 1995 minta kepada para developer segera mengganti istilah-istilah asing untuk kompleks perumahan. REI (Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia) juga sudah berjanji segera mengganti dengan istilah-istilah Indonesia. Nasionalisasi istilah asing itu diharapkan sudah dilaksanakan sebelum bulan Agustus 1995 mendatang.

Banyak developer yang memakai istilah-istilah yang ditemui dalam Bahasa Inggris. Di antaranya, Garden, Villa, Valley, Park, View, Regency, City, Paradise, Highway, dan sebagainya.

Tercacat misalnya, nama-nama kompleks permukiman seperti Serpong City Paradise, Cibubur Highway, Golf View Condominium, Bogor Regency, Pandan Valley, Jasmine Garden, Villa Lotus Garden, Billabong Park View.

Hadiah

Di pameran perumahan itu juga terlihat, untuk mempromosikan rumah menengah atas, developer tak segan-segan memberi embel-embel hadiah. Menurut informasi, hadiah atas pembelian sebuah rumah yang harganya ratusan juta rupiah adalah AC, peralatan eklektronik sampai telepon genggam, pembuatan taman dan *kitchen set.*

Bahkan diskon atau potongan harga juga masih jadi alat promosi. Diskon ini berkisar antara 10 - 30 persen, bahkan bisa lebih lagi. Sayangnya, promosi diskon ini seperti tidak jujur.

"Selain terbatas pada harga tanah yang letaknya di pojok, jumlah kapling yang didiskon pun sangat terbatas. Paling-paling tinggal 3 atau 4 kapling rumah pojok," kata seorang karyawan peserta sebuah stan. Jumlah kapling, tak sesuai dengan besarnya tulisan diskon.

Di masa lalu, jalan tol masih bisa "dijual" dalam upaya memasarkan unit hunian untuk menarik minat pembeli. Namun kini, istilah 15 menit dari Semanggi ke lokasi lewat jalan tol, sepertinya sudah menjadi ejekan. Sehingga dalam promosi selama pameran tersebut tidak lagi terlihat gembar-gembor adanya lokasi permukiman yang bisa ditempuh hanya beberapa menit ke Jakarta Pusat lewat jalan tol. (ira).

Kompas, 19 Mei 1995

Nama Jaya Bank Diganti Menjadi Bank Jaya

Jakarta, (Buana) - Bertempat di halaman Jaya Bank Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, Senin (22/5) meresmikan penggantian nama Jaya Bank menjadi Bank Jaya. Penggantian nama tersebut didampingi Presiden Direktur Bank Jaya Ir Hanafi L, Ketua DPRD DKI Jakarta, MH Ritonga, Wakil Ketua DPRD dr Djufrie SKM serta para pejabat teras Pemda DKI Jakarta dan Bank Jaya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Surjadi mengatakan, bahwa kedudukan dan peranan bahasa sangat strategis dan penting bagi kelangsungan hidup, stabilitas dan kejayaan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, hampir semua bangsa dan negaa di dunia ini memasukkan masalah bahasa nasionalnya di dalam kontitusi negara masing-masing.

Untuk itu, gubernur menyambut baik dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan Bank Jaya yang cepat tanggap terhadap kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dengan kesadaran sendiri mengganti nama badan usahanya dari Jaya Bank menjadi Bank Jaya.

"Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Seperti hari ini dilaksanakan penggantian nama-nama asing kedalam bahasa Indonesia, secara serentak (simbolik) di lima wilayah kota," kata Gubernur Surjadi.

Pertama hari satu yang diganti secara simbolis oleh para walikota, tambahnya. Tetapi nantinya akan disusul oleh seluruh perusahaan maupun nama-nama papan reklame, toko, industri dan lain sebagainya untuk mengganti namanya dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik.

Untuk Jakarta Pusat, dilakukan di Fresh Fruit di Jl Sabang diganti menjadi Pusat Pasarr Buah Segar. Jakarta Barat Citra Land di Grogol menjadi Citra Raya, Jakarta Selatan Blok M Mall di Blok M Kebayoran Baru menjadi Mal Blok M, Jakarta Timur Concord 2000 Vilage di Pulo Gebang menjadi Perumahan Era Emas 2000 dan Jakarta Utara, Kelapa Gading Maall di Kelapa Gading diganti menjadi Mal Kelapa Gading.

Bank Jaya yang saat ini memiliki asset Rp 771 miliar merupakan perusahaan dibawah payung Pembangunan Jaya Group. Saham terbesarnya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya yang sebagian sahamnya (40%) dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. Sedang selaku Presiden Komisaris Bank Jaya adalah Ir Ciputra.

Sementara itu, Walikotamadya Jakarta Barat, Drs H Sutardjianto dalam sambutannya antara lain mengatakan, tekad sejumlah pengusaha di Jakarta Barat yang diwakili Mal Citra Raya untuk mematuhi anjuran pemerintah melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak menggunakan bahasa asing untuk perusahaannya hendaknya, dicontoh oleh perusahaan lainnya di Jakarta Barat.

Dijelaskan, penggantian istilah asing nama perusahaan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk wilayah Jakarta Barat selambat-lambatnya sudah selesai sebelum tanggal 17 Agustus 1995 dan harus diikuti dengan segala aspek hukumnya.

Menurut Walikota, di Jakarta Barat masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan istilah asing antara lain, PT Ometraco (Tropic Apartement), PT Alfa Gold Land dan PT Tropics. Perusahaan tersebut agar menyesuaikan nama perusahaannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, tegas walikota.

Pencanangan tersebut ditandai dengan dibukanya selubung nama Mal Citra Raya dengan penggantian nama Citra Garden menjadi Taman Citra begitu pula Citra Land Hotel menjadi Hotel Cintra Raya. Penggantian nama ini sudah dikonsultasikan dengan pakar bahasa Indonesia dari Depdikbud. Sedangkan untuk beberapa nama perusahaan, seperti Citra Regency tidak dapat diubah karena kata Regency merupakan nama suatu group Internasional dimana pengusaha Indonesia terlibat kerja sama di dalam-nya.

Di Jakarta Utara, PT Sumarecon Agung yang menginvestasikan modalnya dalam berbagai bentuk pembangunan perumahan serta pertokoan di wilayah Kelapa Gading, Senin kemarin memprakarsai perubahan istilah-istilah asing di wilayah Jakarta Utara. Awal perubahan nama-nama asing itu, diterapkan kepada 'Gading Mall' menjadi 'Mal Gading' yang disaksikan oleh Walikotamadya Jakarta Utara, H Suprawito serta pejabat teras lainnya.

Pada kesempatan itu, Lexy yang mewakili direksi PT Summarecon Agung melaporkan, pihaknya sudah menetapkan perubahan istilah-istilah asing yang terdapat di wilayah Kelapa Gading. Seluruhnya, akan dirubah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk nama Jalan Boulevard, akan diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Peresmian perubahan seluruh pemakaian istilah-istilah asing itu, menurut Suprawito

merupakan bukti bahwa seluruh warga Jakarta Utara siap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Dan perubahan nama-nama asing itu, diharapkan tidak hanya dilakukan di wilayah Kelapa Gading, tapi harus dilakukan oleh para developer lainnya di Jakarta Utara.

Seperti yang terdapat di wilayah Kecamatan Penjaringan, masih banyak terdapat istilah-istilah asing yang digunakan khususnya dalam usaha industri wisata. Di tempat-tempat keramaian seperti karaoke, diskotek dan bar yang menggunakan istilah asing, seluruhnya akan diganti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.**(w-bas/mi/rr/hnd/non)**

Berita Buana, 23 Mei 1995

Semua nama asing di DKI harus diganti, jalur Blok M Pasar Ikan prioritas utama

-JAKARTA (Bisnis): Semua papan nama badan usaha yang ada di DKI Jakarta, khususnya di jalur Blok M hingga Pasar Ikan pada bulan Agustus sudah harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar.-

Kepala Kantor Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta, Khusaeni Budiantoro kemarin mengungkapkan mulai akhir bulan ini, instansi yang dipimpinnya akan memberikan penyuluhan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar pada papan nama badan usaha.

Tahap pertama penyuluhan yang melibatkan beberapa instansi tersebut akan diberikan kepada pimpinan perusahaan yang berada di sepanjang jalur Blok M hingga Pasar Ikan, kata dia.

Sedangkan bagi perusahaan yang berada di kawasan bisnis lainnya, lanjut Khusaeni, akan dilaksanakan pada tahap berikutnya secara bertahap. "Pemda memprioritaskan penyuluhan jalur Blok M- Pasar Ikan, karena di kawasan ini termasuk kawasan bisnis," ujar Khusaeni.

Menurut dia, pada 17 Agustus 1995, papan nama badan usaha di sepanjang Blok M- Pasar Ikan, harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jika tidak, Pemda akan menurunkan papan namanya dan tidak menandatangani perpanjangan undang-undang gangguan (UUG) perusahaan bersangkutan, tegasnya.

Di tempat terpisah, Walikota Jakarta Timur, Sudarsono pada peresmian perubahan papan nama Concord 2000 menjadi Eramas 2000 memerintahkan camat di wilayahnya, supaya bertindak sebagai koordinator penertiban nama perumahan yang menggunakan bahasa atau istilah asing.

Dalam kesempatan yang sama, Group Managing Director Kaestindo Group-developer Concord 2000- Ferdinand Boedi Poerwoko mengemukakan penggantian nama Concord 2000 merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan yang dipimpinnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang benar.

Walikotamadya Jakarta Utara Suprawito, pada peresmian perubahan nama Kelapa Gading Plaza menjadi Mal Kelapa Gading, kemarin, mengatakan pengubahan pusat perbelanjaan itu dalam upaya mendukung program pemerintah, tidak saja menganti nama dengan nuansa ke Indonesiaan tetapi lebih jauh untuk memberikan pembinaan bagi masyarakat menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Langkah itu patut diteladani, kata Suprawito, mengingat arus globalisasi tidak dapat dihindari. Apalagi Jakarta Utara berada pada gerbang dunia internasional dengan Pelabuhan Tanjung Priok-nya.

Perubahan nama yang berkonotasi asing dengan maksud untuk memberikan opini eksklusif terhadap masyarakat, sudah selayaknya dihindari, kata Suprawito. "Jika sasaran pemasaran yang dimaksud untuk memberikan nilai tambah tertentu, rasanya sudah waktunya masyarakat boleh bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia," ujarnya.

Lexy Tumiwa, Direktur PT Summarecon Agung (SA) pengelola Mal Kelapa Gading mengatakan diubahnya pusat perbelanjaan itu sesuai dengan keinginan manajemen. Selain Mal Kelapa Gading, PT SA akan mengubah nama 4 lokasi lainnya, a.l. Kelapa Gading Sport, Jl. Boulevard Raya.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata laksana (HOT) Jakarta Utara, J. Pakpahan mengatakan di wilayahnya terdapat sedikitnya 31 developer akan mengikuti langkah serupa untuk mengantikan nama kawasan real estate.

Sementara itu, Walikota Jakarta Barat meminta perusahaan swasta seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, real estate dan lainnya yang belum mengganti nama asing ke Indonesia segera menggantinya dalam upaya melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

"Perusahaan swasta di Jakarta Barat yang hingga kini masih menggunakan nama asing masih cukup banyak seperti PT Ometraco, Alfa Gold Land, Maruya Grand Villa, Sunrise Garden, Permata Hijau Regency, Green Garden, Puri Garden, Down Town, Rainbouw, King Town dan lainnya," kata Sutardjianto, Walikota Jakbar ketika mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Mal Citraland, kemarin.

Acara pencanangan penggunanaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di Jakbar yang ditandai dengan peresmian pengubahan nama dari Citraland Mall menjadi Mal Citraland, Citraland Hotel menjadi Hotel Citraland, dilakukan seusai acara apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor Walikota Jakbar.

Sutardjianto meminta kepada aparatnya memberikan kemudahan bagi perusahaan yang mengurus permohonan penggantian nama tersebut. (san/mtm/nms)

Bisnis Indonesia, 23 Mei 1995

52 Lokasi Perumahan Memakai Nama Asing di Kotif Depok Harus Segera Ganti Nama

Jakarta, Pelita

Sebanyak 52 lokasi perumahan di Kota Administratif (Kotif) Depok yang selama ini menggunakan nama bahasa asing diharuskan untuk segera ganti nama dengan nama Indonesia sesuai dengan budaya bangsa, kata Walikota Depok.

Pergantian nama bagi semua nama-nama yang berbau asing tersebut sebagai upaya tumbuhnya kebanggaan setiap pribadi terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa tanah air, kata Walikota Depok Drs H Syofyan Safari Hamim kepada wartawan di kantornya, Selasa (23/5) bersamaan dengan surat edaran Bupati Kabupaten Bogor tanggal 16 Mei 1995, tentang pencanangan penggunaan Bahasa Indonesia dan pengalihan nama asing kepada nama dan kata Indonesia pada tempat-tempat umum.

Pengalihan nama-nama yang berbau asing itu sesuai dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional (GDN) 1995 dan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Presiden Soeharto pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 1995 tanggal 20 Mei lalu.

Menurut Walikota, sesuai pendataan awal di lapangan sebanyak 52 nama asing telah diberikan surat edaran kepada pemilik atau pengelolanya. Ia memperkirakan jumlah nama-nama yang berbau asing di Depok masih banyak. Pihaknya melalui Kantor Kelurahan yang melibatkan RT/RW masih terus melakukan pendataan.

"Pokoknya bagi semua badan usaha, kantor, dan bangunan, serta promosi iklan dengan penggunaan kata bahasa asing agar segera diubah ke Bahasa Indonesia yang telah ada kesepadanannya," kata Walikota.

Sementara itu ketika disinggung soal 34 bangunan kios di atas bantaran Kali Baru, Jl Dewi Sartika, Walikota mengatakan tetap akan dibongkar oleh petugas terpadu Muspida Kotif Depok. Keberadaan ke-34 bangunan kios itu tidak memiliki izin dan menimbulkan berbagai kerawanan di kawasan itu, misalnya kemacetan lalu lintas.

Menurut Walikota, kepada pemilik kios telah diberikan surat peringatan agar membongkar sendiri. Tapi bila tidak diindahkan dengan terpaksa dalam waktu dekat ini pihaknya akan membongkar.(y)

Pelita, 24 Mei 1995

SANGGAR BAHASA

Kalimat Terlalu Panjang

Dalam sebuah laporan penelitian karya seorang pengajar Fakultas Sastra UI, terdapat kalimat, *"Ayahnya adalah seorang muslim yang saleh, sekalipun ia seorang yang miskin dengan usaha bertenun wol, dia termasuk orang yang tekun mengikuti majlis para ulama dan pencinta ilmu yang selalu berdo'a agar putranya kelak menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasehat"*.

Dari kalimat itu, yang segera menarik perhatian adalah panjangnya dan ketidakjelasan amanat yang dikandung kalimat panjang itu. Kalimat yang panjang biasanya digunakan dalam kecenderungan untuk merangkum sejumlah gagasan yang kadang-kadang beragam ke dalam satu "nafas". Tidak jarang maksud itu tercapai; artinya, kalimat yang panjang itu benar-benar dapat merangkum gagasan-gagasan yang beraneka tanpa menyebabkan kening berkerut.

Namun, kalimat panjang pada kutipan di atas, telah gagal mencapai tujuannya itu. Ketidakjelasan itu terutama disebabkan oleh munculnya kata ganti *dia* dan *ia*, di samping kata ganti milik-*nya*. Jika saja kata ganti itu digunakan dalam kalimat yang lain, mungkin ketidakjelasan itu tidak ada. Tidak seperti dalam kalimat tunggal yang "beranak bercucu" itu.

Kalimat panjang itu sebenarnya mengandung beberapa gagasan yang dirangkaikan begitu saja tanpa memperhatikan ketunggalan subyek. Gagasan pertama adalah (a) ayahnya adalah seorang muslim yang saleh. Itu berarti bahwa subyeknya adalah *ayahnya*. Gagasan kedua, berdasarkan wujudnya, seharusnya telah terjadi peralihan subyek, yaitu (b) ia seorang yang miskin dengan usaha bertenun wol. Subyek penggalan kalimat itu seharusnya sudah bukan *ayahnya* lagi, melainkan *ia*. Demikian juga halnya dengan gagasan ketiga, (c) dia termasuk orang yang tekun. Di sini terjadi penggantian kata ganti orang ketiga dari *ia* menjadi *dia*. Gagasan yang terakhir, (d) yang selalu berdo'a agar putranya kelak (...). Dapat dipastikan bahwa *yang selalu berdo'a* adalah keterangan atau pengganti kata ganti *ia* atau *dia* itu. Gagasan ini berhubungan dengan *putranya;* artinya tentulah seharusnya anak dari tokoh yang tersembunyi itu.

Ternyata, seluruh kelimat itu seharusnya mengacu kepada subyek yang sama, yaitu *ayahnya*. Agar amanat kelimat itu jelas dan tidak membingungkan, seyogianya kalimat itu "dipenggal-penggal" menjadi:

(1) Ayahnya adalah seorang muslim yang saleh dan miskin walaupun bekerja sebagai penenun wol.

(2) Ayahnya termasuk pencinta ilmu dan tekun mengikuti majlis para ulama.

(3) Ayahnya selalu berdoa agar ia kelak menjadi ulama yang pandai dan suka memberikan nasihat.

Kalimat-kalimat itu terpaksa harus diubah demikian rupa untuk menghindarkan ketidakjelasan amanat. Bandingkan kalimat pertama itu dengan penggalan aslinya,

(1a) Ayahnya adalah seorang muslim yang saleh, sekalipun ia seorang yang miskin dengan usaha bertenun wol.

Kata *sekalipun* yang "mempertentangkan" pada penggalan kalimat itu dapat menyiratkan bahwa sebenarnya hak untuk menjadi seorang yang saleh itu adalah hak orang yang tidak miskin; hanya orang kaya dan usahanya bukan bertenun wol yang berhak menjadi saleh.

Penggal kelimat kedua juga diubah, agar pengertian tidak bercabang. Penggalan aslinya berbunyi,

(2a) Dia termasuk orang yang tekun mengikuti majlis para ulama dan pencinta ilmu.

Penggal kalimat itu mengarahkan kita pada tafsiran bahwa si tokoh itu tekun mengikuti (a) majlis para ulama dan (b) pencinta ilmu. Padahal, yang sebenarnya ingin disampaikan adalah bahwa tokoh itu tekun dan pencinta ilmu. Dengan pengubahan kalimat seperti pada (2), diharapkan kerancuan iu dapat dihindarkan.

Dalam pada itu, penggal asli kalimat ketiga berbunyi,

(3a) Yang selalu berdo'a agar putranya kelak menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasehat.

Sudah kita lihat bahwa kalimat panjang itu mengandung kata ganti milik-*nya* pada *ayahnya* dan *putranya*. Jika yang dimaksud dengan *ayahnya* adalah 'ayah si Tokoh', dengan sendirinya *putranya* juga seharusnya adalah 'anak si Tokoh'. Namun ternyata bahwa kalimat itu hanya berbicara mengenai dua tokoh, yaitu ayah si Tokoh dan si Tokoh itu sendiri. Itu berarti bahwa sebenarnya yang muncul pada penggal terakhir kalimat itu bukan *putranya*, tetapi *dia* atau *ia*.

Jika begitu, konsekuensi lanjutnya adalah penggunaan kata ganti dia dan ia pada gagasan (b) dan (c) harus diluruskan: Siapa yang dimaksud, *ayahnya* atau ia (si Tokoh). Ternyata penggalan itu masih mengacu kepada *ayahnya* sehingga dengan demikian seyogianya kata itu pula yang ditampilkan.

Dalam pada itu, tidak tertutup kemungkinan untuk memenggal kalimat panjang itu (antara penggalan 1a dan 2a) menjadi,

(2b) Sekaligus miskin (...), ayahnya termasuk orang yang tekun (...).

Bentukan kalimat (2b) ini mempertentangkan

keadaan si ayah yang miskin dengan ketekunannya mengikuti majlis.

Ayatrohaedi

Daftar Padanan Kata/ (lanjutan)

Luxury Senopati Apartments	(Gedung) Apartemen Mewah Senopati
Luxury Prapanca Apartments	(Gedung) Apartemen Mewah Prapanca
Luxury Kemang Apartments	(Gedung) Apartemen Mewah Kemang
Menteng Park Apartments	(Gedung) Apartemen Taman Menteng
Metro Park Apartments	(Gedung) Apartemen Taman Metro
Palace View Apartments	(Gedung) Apartemen Panorama Istana; (Gedung) Apartemen Tamasya Istana
Permata Hijau Apartments	(Gedung) Apartemen Permata Hijau
Rainbow Plaza Apartments	(Gedung) Apartemen Plaza Pelangi
appearance	penampilan; tampilan
appetizer	umpan tekak; pembangkit selera
apple	apel
applicant	pelamar (kerja); pemohon
apricot	aprikot
apron <airport>	apron <bandara>
apron <clothings>	celemek <busana>
arcade	lorong; arkade
arch bridge	jembatan lengkung
archery	(olahraga) memanah
architecture	arsitektur
area code	kode wilayah
art director	penata artistik <iklan>
art gallery	galeri seni
art shop	toko barang seni
artichoke	articok
artwork	gambar kerja; gambar model
asbestos shingle	atas asbes
ascot tie	dasi askot
asked price; asking price	harga minta
asparagus	asparagus
asphalts shingle	atap aspal
assembling editor <film>	perakit gambar
assessment (tax)	pajak; penaksiran (pajak); penetapan (pajak)
asset	aset
associate; partner	mitra (usaha); rekan (usaha)
athletic shirt	singlet; kaus dalam
athletics	olahraga; atletik
atrium	atrium
attache case	tas atase
attorney and counsellor-at-law	pengacara dan penasihat hukum
auction	lelang
audience	khalayak
audiotape	pita suara
audiovisual	audiovisual; pandang dengar
audiovisual equipment & supplies	bekalan dan peralatan audiovisual
audiovisual production-service	layanan produksi audiovisual
audiowaves	gelombang suara
audit	audit <iklan>
auditor	pengaudit; auditor
authorized dealer	penyalur resmi
authorized workshop	bengkel resmi
autobiography	autobiografi
automatic control <film>	kendali otomatis
automatic cord reel	penggulung kabel otomatik
automatic teller machine	otomat pembilang
automatic tweezers	pinset otomatis
avocado	avokad
awning	bidai

B

baby accesories	aksesori bayi
baby bed	ranjang bayi
back cover	kulit belakang
baby product	perlengkapan bayi
baby shop	toko perlengkapan bayi
baby sitter	pramusiwi
back belt	sabuk punggung
background	latar (belakang)
backhoe	serok belakang
backhoe loader	(kendaraan) pemuat belakang
backing copy	kopi cadangan
back pack	tas punggung
back-up	cetak depan belakang
badminton	bulu tangkis
baggage allowance	jatah bagasi
baggage service	layanan bagasi
Bailey bridge	jembatan Bailey
bakery	toko roti; bakeri
balcony	balkon <teater>
ballerina (shoes)	sepatu balet
balloon pants	celana gelembung
ballet slippers	kasut balet
ballroom	balai dansa
baluster	birai
balustrade	langkan; balustrade
ban <press>	berangus; bredel
bank	bank
Alita Bank	Bank Alita

Andromeda Bank	Bank Andromeda
Arta Niaga Kencana Bank	Bank Arta Niaga Kencana
Aspac Bank	Bank Aspac
Berlian Bank	Bank Berlian
BHS Bank	Bank BHS
Delta Bank	Bank Delta
Dipo International Bank	Bank Dipo Internasional
Executive International Bank	Bank Eksekutif Internasional
Global Bank	Bank Global
Haga Bank	Bank Haga
Harmoni Bank	Bank Harmoni
Hastin Bank	Bank Hastin
Jaya Bank	Bank Jaya
Lippo Land	Bumi Lippo
Media Bank	Bank Media
Modern Bank	Bank Modern
Nusa Bank	Bank Nusa
Panin Bank	Bank Panin
PSP Bank	Bank PSP
Sake Bank	Bank Sake
Sangga Kencana Bank	Bank Sangga Kencana
Shinta Bank	Bank Shinta
Sino Bank	Bank Sino
Subentra Bank	Bank Subentra
Swansan Bank	Bank Swansan
Tamara Bank	Bank Tamara
Yama Bank	Bank Yama
bank clearing	kliring bank
bank credit	kredit bank
bank discount	potongan bank; diskon bank
bank statement	pernyataan bank
banner	tajuk rawal; kain rentang
banquet	andrawina, banket
banquet room	ruang andrawina
bar	bar
bar waiter; bar waitress	pramubar
bar & restaurant	bar dan restoran
barbeque	barbekyu
barber & beatury salon	salon pangkas dan kecantikan
barber comb	sisir cukur
barbet shop	pemangkas rambut
barrel	tas silinder
barrier material	bahan sawar
bartender	pramutama bar
bascule bridge	jembatan jungkit
base	alas; dasar
baseball	bisbol
basement	ruang bawah tanah; basemen
basic slag	terak basa
basic solvent	pelarut basa
basketball	bola basket
bath-tub	bajan mandi
bathing wrap	kerudung mandi; kerudung handuk
bathrobe	gaun mandi; jas mandi
bay leaf	daun salam
bazaar	bazar
super bazaar	bazaraya
beach bag	tas pantai
beam bridge	jembatan balok
beater	perontok <tani>; pengocok <rt>; pengayun <tenun>
beauty case	tas rias
beauty salon	salon kecantikan
beauty clinic	klinik kecantikan
beauty gallery	galeri kecantikan
beauty- & hairdressing school	sekolah kecantikan dan andam rambut
bed cover	tutup ranjang
bedroom community	komunitas tempat tidur
bedside lamp	lampu samping ranjang
bellboy	pramutamu; belboi
belt	sabuk
belt buckle	gesper; timang
bench	bangku
beneficiation	pengolahgunaan; pemaslahatan
benzene	benzena
beret	baret
bergere	kursi besar berlengan
Bermuda shorts	celana (pendek) bermuda
berry fruits	buah buni
best seller	pelarap; pelaris
beveled lamp	kaca sayung; kaca berprofil
beverage	minuman
biased news	berita memihak
bib necklace	kalung susun
bib	cukin; alas dada
bid price	harga tawar
bikini	bikini
bikini briefs	celana dalam mini
bilateral contract	kontrak bilateral
billboard	papan reklame
billfold	dompet lipat
billiard	biliar
biscuit	biskuit
black currant	kismis hitam
blackhead remover	penghilang bintik
blackout	(1) cegah siar; (2) awawarta (pers)
blade	bilah pisau
blade injector	injektor silet
blanket sleeper	pakaian tidur terusan
blazer	(jaket) blazer
blender	pemadu lumat; blender
blind embosing; embos printing <graphics>	cetak buta
blind image	gambar buta
block plan	rencana blok
bloomers	celana pof
blouse	blus
blow up <film>	pembesaran
blucher	sepatu bot pendek
blue film	film biru

blueberry	bluberi
blurb	ringkasan pengantar
blush brush	kuas pipi
boa	stola bulu; boa
board of directors	dewan direksi
boarding pass	pas naik
bobby pin	jepit rambut
body language	bahasa badan
body suit	baju dalam kombinasi
body shirt	baju kaus ketat
body stocking	baju kaus sebadan
Bogor Riviere	Tirta Bogor; Tirtanadi Bogor
bolero	bolero; blus pendek
bolster	guling
bonnet	(topi) bonet
book publisher & -distributor	penerbit dan penyalur buku
booking	penempahan
bookkeeper	penata buku
bookkeeping	pembukuan
boom; booming	bum; mengebum
boot	sepatu bot
bob	yongen; potong pendek
boulevard	adimarga; bulevar; baluarti
bourse; exchange	bursa
boutique	butik
bowl	bola gelinding
bowling	(olahraga) gola gelinding; boling
bowling alley	lorong boling
bowtie	dasi kupu-kupu
box office	biro tiket
box pleat	lipit melingkar
box pallet	palet kotak
box bag	tas kotak
boxer shorts	celana bokser
boxing	tinju
bra	beha; bra
bracelet	gelang
brainstorming	sumbang saran; curah pendapat
brainwashing	cuci otak
branch manager	manajer (kantor) cabang
brasserie	braseri
bridal make-up	rias pengantin
bridal salon	salon pengantin
bridge	bridge
queen	ratu
jack	budak
ace	as
joker	badut
diamond	wajik; ubin; ret
spade	sekopong
heart	hati; hart
club	cengkih; keriting
king	raja
briefcase	tas kerja; tas kantor
briefelette	korset kulot
briefing	taklimat; santiaji
briefs	celana dalam pendek
brisket (meat)	(daging) dada
broadcaster	penyiar
broadcasting <radio, TV>	penyiaran
broadcasting satelite <radio, TV>	satelit penyiaran
broccoli	brokoli
broiler	(ayam) peranggang; pedaging
broker	pialang
brokerage house	perusahaan pialang

Suara Karya, 24 Mei 1995

Ditertibkan, Papan Reklame Yang Masih Gunakan Istilah Asing

BANDUNG (Suara Karya): Sampai Senin (22/5), sekitar seratus papan reklame di kota Bandung ditertibkan oleh Dinas Pertamanan bekerja sama dengan Humas Pemda Bandung, Mawil Hansip dan Dinas Sosial Politik.

Kahumas Pemda Bandung, Jaja Sutardja, SH ketika dihubungi *Suara Karya*, Senin (22/5) di ruang kerjanya, mengatakan, penertiban ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran tanggal 19 April 1995. Penggantian nama atau istilah asing di papan perusahaan, gedung, papan petunjuk perumahan, kain rentang dan papan reklame dilaksanakan di ruas jalan Suci, Sukarno - Hatta, Pasteur dan Buah Batu dengan mengerahkan dua puluh personil.

Lebih lanjut Jaja mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu diupayakan dan dibiasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Selambat - lambatnya tanggal 20 Mei 1995.

Istilah asing harus diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. "Bagi yang belum dapat menggantinya sampai tanggal yang ditetapkan agar menurunkan atau membongkarnya," ujar Jaja Sutardja.

Dikatakan, surat edaran mengenai penggantian nama dan istilah asing telah dikirimkan kepada para pemimpin organisasi dan pengusaha pada awal Mei lalu. Namun dari hasil pemantauan pihak Pemda Kodya Bandung ternyata papan reklame belum diganti," maka kami tertibkan papan reklame tersebut," ujar Jaja.

Sementara itu penertiban papan nama perusahaan dan papan reklame di wilayah Bandung sampai Senin kemarin masih diwarnai kebandelan para pengusaha pemilik papan reklame. Di wilayah pembantu Bupati Margahayu misalnya, sejumlah papan reklame dan papan nama perusahaan masih berbau asing. Papan reklame dan nama perusahaan itu masih yang lama.

Para pengusaha masih belum sadar untuk segera mengganti. Di papan nama perusahaan Gading Tutuka Estate, misalnya, kendati sudah dikirim surat resmi dari pihak Pemda Bandung yang menyatakan untuk segera menutup istilah asing sampai kemarin masih tetap seperti semula.

Tim penertiban papan nama dan reklame Bandung saat melakukan penertiban, sempat adu mulut dengan pihak pengusaha Gading Tutuka. Hal ini antara lain disebabkan pihak Gading Tutuka merasa belum menerima surat resmi untuk penggantian papan nama dari pihak Pemda. Padahal menurut Humas Pemda Kab Bandung H. Wan Marwan BA surat itu sudah dikirim dan diterima pada Kamis pekan baru.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bandung Drs H Dede S Oeron yang turun langsung dalam operasi penertiban itu, sempat berang saat menyaksikan adu mulut anggota tim-nya dengan pengusaha itu. Maka Tim ini memutuskan dan meminta agar pihak Gading Tutuka untuk sementara menutup kata atau tulisan dalam bahasa asing, "Estate".

Disebutkan Dede S Oeron, sampai Senin kemarin masih belum bisa didaftar jumlah papan nama yang sudah ditertibkan. Namun yang jelas, papan nama yang harus ditertibkan yang berada di wilayah Bandung tak kurang dari 2000 buah, itu meliputi 1.566 papan reklame dan sisanya papan nama perusahaan.

(KC-19/PTW)

Suara Karya, 26 Mei 1995

PHRI Bali Keberatan Ganti Nama Asing Ke Dalam Bahasa Indonesia

JAKARTA – Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali merasa keberatan jika Pemda Bali mengharuskan mengganti nama-nama hotel yang memakai nama asing menjadi nama Indonesia. Sebab, perubahan nama dikhawatirkan akan mempengaruhi pemasaran hotel dan restoran yang telah dilakukan sejak lama dan memakan dana promosi yang besar.

Penegasan itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Bali, Tommy Raka AFCIA didampingi Humasnya H Marmo Oetomo di Denpasar, baru-baru ini sehubungan dengan pencanangan penggantian istilah asing ke dalam bahasa Indonesia oleh Gubernur Bali Ida Bagus Oka.

"Sebagai warga negara Indonesia kita sebenarnya sangat mendukung kebijakan tersebut tetapi harus diberikan waktu yang lebih lama untuk mensosialisasikan", ujar Tommy Raka kepada wartawan.

Kata Tommy, nama sebuah hotel dan restoran yang sudah menjadi "*trade name*" tidak gampang diubah sebab untuk mempopulerkannya memakan waktu yang lama serta dana yang banyak. Karena itu setiap hotel dan restoran yang ada mesti berusaha menjaga nama yang dipromosikan ke luar negeri.

"Jika dipaksakan harus secepatnya kebijakan ini berlaku anggota kami sangat keberatan dan tidak mungkin dilakukan," kata Tommy seraya menambahkan banyak keluhan disampaikan para anggotanya dengan adanya kebijakan pergantian nama asing ke dalam bahasa Indonesia ini.

"Sekali lagi kami katakan, kita bukannya menolak kebijakan pergantian nama tersebut karena masalahnya terkait pada pemasaran", kata orang nomor satu di jajaran PMRI Bali yang juga pemilik Kuta Beach Club Hotel. Kalaupun pergantian nama asing ke bahasa Indonesia tidak dapat dielakkan lagi kata Tommy Raka, PHRI Bali mengajukan beberapa usulan antara lain, diberikan tenggang waktu yang cukup, disosialisasikan terlebih dulu dan memberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran PB I sekitar tiga persen sehingga dananya untuk membayar PB I dapat digunakan promosi.

Dikatakan, karena keputusan pergantian nama-nama hotel dan restoran asing ke dalam bahasa Indonesia merupakan instruksi dari Presiden, maka PHRI Bali segera akan memberikan masukan kepada PHRI Pusat sehingga permasalahan yang dihadapi di Bali bisa disalurkan. (MDK/H-4)

Suara Pembaruan, 30 Mei 1995

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1606

Kata umum juga dapat dipakai untuk mengacu balik pada kata khusus yang sudah digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang membosankan. Perhatikan contoh berikut ini.

(16) Saya mempunyai seekor *anjing. Binatang* itu merupakan satu-satunya binatang yang saya pelihara di rumah.

Kata *anjing* pada kalimat yang pertama merupakan kata khusus yang maknanya tercakupi oleh kata *binatang*. Penggunaan kata *binatang* pada kalimat berikutnya dapat menghindarkan pengulangan kata *anjing* yang, jika digunakan, terlalu dekat dengan letak kata *anjing* yang pertama.

2.4 Makna Konkret dan Abstrak

Dalam pilihan kata perlu diperhitungkan seperangkat kata bermakna konkret dan abstrak. Kata yang bermakna konkret dan kata yang bermakna abstrak tidak perlu sama dengan kata umum dan kata khusus.

Kata konkret mengacu pada barang yang bersifat khusus di dalam penggunaan kata. Kata konkret akan efektif digunakan pada kisahan dan pemerian.

Kata abstrak mengacu pada sifat *(gagah, berani, takut, baik, buruk)* dan gagasan *(kemakmuran, keadilan, kebahagian, kebijaksanaan)*.

Kata abstrak dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang runut dan pelik serta mampu menjelaskan perbedaan-perbedaan kecil, terutama yang teknis dan khusus.

Pemakaian kata abstrak yang tidak pada tempatnya akan menyebabkan karangan menjadi samar dan tidak cermat. Apalagi kalau salah pakai, bukan saja isinya akan kabur atau samar, melainkan juga karangan akan tampak kaku.

2.5 Idiom

Idiom merupakan faktor yang penting dalam pilihan kata. Karangan yang cermat, tepat, dan kuat dalam pilihan katanya sebaiknya bersifat idiomatik.

Idiom berwujud ungkapan yang pekat yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Bahasa yang idiomatik mempunyai arti bahasa yang wajar yang dipakai oleh penutur. Kita tidak dapat menjawab mengapa bentuk idiom harus demikian, misalnya *sesuai dengan, terdiri atas, berbeda dengan, bergantung pada, panjang tangan, tinggi hati, masuk sekolah,* dan *jam bicara.*

2.6 Majas

Salah satu aspek dalam lingkup makna adalah

majas. Majas digunakan untuk mengkonkretkan dan menghidupkan karangan. Dengan demikian, dalam lingkup makna kita dapati makna majas.

Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Istilah *majas* itu acap kali dikacaukan dengan istilah *gaya bahasa*. *Gaya bahasa* adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan. *Majas* pada dasarnya berisikan (1) perbandingan, (2) pertentangan, dan (3) pertautan.

2.6.1 Majas Perbandingan

Majas perbandingan terbagi atas *Penginsanan, kiasan,* dan *perumpamaan.*

a. *Penginsanan (Personifikasi)*

Jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insansi kepada barang yang tidak bernyawa dan gagasan yang abstrak.

Contoh:

a. Angin *berbisik*
b. Harima *tertawa*
c. Pohon nyiur *melambai-lambai.*
d. Topan *menyapu* rumah penduduk.
e. Auman harimau *memecah* kesunyian.

b. *Kiasan (Metafor)*

Jenis majas berupa perbandingan yang implisit, tanpa kata *seperti* atau *seumpama.*

Contoh:

a. *sumber ilmu*
b. *kuli di antara bangsa*
c. *buah hati*
d. *mata jarum*
e. *anak emas*

c. *Perumpamaan*

Jenis majas yang berisikan perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang dengan sengaja kita anggap sama.

Contoh:

a. Wajahnya seperti *bidadari turun mandi.*
b. Jalannya *bagaikan Bima.*
c. Hidup ini *ibarat roda,* kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah
d. Hidupnya *seumpama burung dalam sangkat, mata lepas badan terkurung.*
e. Gadis lepas pingitan itu *laksana kijang lepas di hutan.*

2.6.2 Majas Pertentangan

Majas pertentangan terbagi atas *hiperbol, litotek,* dan *ironi.*

a. *Hiperbol (Ungkapan Pengeras)*

Jenis majas yang berupa ungkapan yang melebih-lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam jumlah, ukuran atau sifatnya.

Contoh:

a. Dia sangat *terkejut setengah mati* mendengar berita itu.
b. Karena memikirkan keadaan anaknya, orang tua itu *tidak mengejapkan mata barang sedikit pun.*
c. Saya ucapkan *beribu-ribu* terima kasih
d. Perkataanmu sungguh *menyayat hati.*
e. Suaranya *mengguntur* memecahkan angkasa.

b. *Litotes (Ungkapan Pelemah/Pengecil)*

Jenis majas yang berupa ungkapan yang menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Dengan majas litotes ini akan mengurangi atau melemahkan kekuatan pernyataan yang sebenarnya.

Contoh:

a. Dia mencari *sesuap nasi* untuk menyambung hidupnya.
b. Hasilnya *tidak mengecewakan.*
c. Orang itu sama sekali *tidak bodoh.*
d. Dalam *beberapa detik* saya sudah akan berada di sini lagi.
e. Datanglah ke *gubukku.*

c. *Ironi (Sindiran)*

Jenis majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok.

Contoh:

a. Bukan main bersihnya di sini, di mana ada sampah.
b. Hai, sudah pulang engkau, baru pukul dua pagi?
c. Merdu benar suaramu hingga saya tidak dapat tidur.

d. Karena pandainya, ia selalu mengantuk-ngantuk di kelas.
e. Teruskan kamu memukul-mukul bangku, biar ayam-ayam menari.

2.6.3 *Majas Pertautan*

Majas pertautan terbagi atas *metonimia, sinekdoke,* dan *eufemisme (ungkapan pelembut).*

a. *Metonimia*

Jenis majas dengan cara memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal, sebagai penggantinya.

Contoh:
a. Chairil Anwar dapat kita nikmati sekarang. ('karya')
b. Persikasi hanya mendapat perka. ('medali')
c. Apakah kamu sudah menonton The Ten of Commandement? ('film')

b. *Sinekdone*

Jenis majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya atau sebaliknya.

Contoh:
a. *Tiga atap* ('rumah')
b. Jakarta lawan Medan ('kesebelasan')

c. *Eufemisme (Ungkapan Pelembut)*

Jenis majas yang digunakan untuk memperhalus kata-kata yang dirasakan kasar atau tidak pantas diucapkan (didengar).

Contoh:
a. Orang gila —> sakit jiwa
b. penjara —> lembaga pemasyarakatan
c. penonton —> pemirsa
d. penganggur —> tunakarya
e. mau berak —> mau ke belakang

III. ASPEK BENTUK

Kata dalam bahasa Indonesia dapat berbentuk dasar dan dapat pula berbentuk jadian. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses apapun. Kata jadian adalah kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan atau pengulangan.

Imbuhan dalam bahasa Indonesia berupa awalan, sisipan, akhiran dan konfiks. Wujud konfiks adalah gabungan dari awalan dan akhiran, tetapi hakikatnya merupakan satu bentuk. Contoh awalan adalah *ber-, meng-, ke-, -i,* dan *se-*. Contoh sisipan adalah *-em-* dan *-el-*. Contoh akhiran adalah *-kan, -i,* dan *-an*. Contoh konfiks adalah *per-an, Peng-an,* dan *ke-an.*

Di antara imbuhan-imbuhan itu ada beberapa yang berubah bunyi bila dilekatkan pada bentuk kata tertentu, seperti yang dicontohkan pada Bagian 3.2.2. Uraian tentang perubahan bentuk yang lebih lanjut dan tentang makna imbuhan-imbuhan itu, yang dapat ditemukan pada buku-buku tata bahasa, dan tidak disajikan di sini.

Pada bab ini akan dibicarakan salah satu bentuk yang dapat pengaruh bahasa daerah dan bentuk yang menyimpang. Bentuk yang menyimpang itu mungkin dibenarkan, mungkin pula perlu diluruskan.

3.1 Pengaruh Bahasa Daerah: *Ketemu, Ketukar,* dan Kedorong

Ada beberapa imbuhan dalam bahasa daerah yang fungsi dan maknanya mirip dengan fungsi dan makna imbuhan tertentu dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang lebih dikuasai oleh penutur tertentu sering berpengaruh pada pemakaian bahasa Indonesia. Akibatnya, dalam bahasa Indonesia kita temukan beberapa kata yang merupakan bentukan bahasa daerah.

Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kata berikut: *ketawa, ketemui, ketukar, dan kedorong.* Dalam contoh-contoh itu, bentuk dasarnya kebetulan adalah kata yang dapat kita temukan dalam bahasa Indonesia. Yang mirip fungsi dan maknanya dengan imbuhan *ke-* di situ adalah imbuhan *ter-*. Dengan kata lain, kita seharusnya menggunakan bentukan *tertawa, tertemukan* (dapat juga *ditemukan* atau *bertemu*— bergantung pada konteksnya), tertukar dan terdorong.

BERSAMBUNG

Harian Indonesia, 3 Mei 1995

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1604

anggap bermakna hampir sama itu sebenarnya belum tentu sama penun. Di dalam hal inilah kita dituntut memahami perbedaan kecil itu sehingga kita dapat memakainya dengan tepat.

Kita tentu mengenal kata *hamba, saya,* atau *aku.* Ketiga akta itu merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Namun, dalam pemakaiannya ketiga kata itu mempunyai makna khusus. Kita pun tidak akan menggunakan kata *aku*kepada atas kita. Demikian pula, kalau kita memakai kata *hamba* pada waktu berkomunikasi dengan orang lain, tentulah kita akan dimasukkan ke dalam kelompok orang yang sedang sakit (jiwa) atau kelompok pemain komedi.

Kata *mat, wafat, meninggal,* dan *gugur* merupakan kata yang bermakna sama. Namun, dalam pemakaiannya haruslah tepat. Adakah di antara kita yang suka memakai kata *wafat, gugur, meninggal* untuk binatang, seperti *Kambing saya kemarin meningal. Kucing itu gugur ditabrak mobil. Anjing tetangga saya telah wafat dengan tenang.*

Demikain pula, kata *besar, agung, raya* merupakan kata yang bermakna sama atau hampir sama. Kita dapat mencatat kata *hari besar* dan *hari raya,* tetapi tidak pernah kita jumpai kata *hari agung.* Kata *jaksa agung* merupakan hal yang lazim, tetapi kata *jaksa raya* belum ada atau memang tidak ada. Kata *jalan raya* atau *jalan besar* memang ada, tetapi *jalan agung* sama sekali tidak ada.

Kata yang maknanya hampir sama atau yang disebut sinonim harus dapat dipilih dengan baik. Berikut ini pembahasan beberapa contoh kata yang maknanya mirip.

2.1.1 Kata Pekerjaan, Profesi, dan Jabatan

Kata *pekerjaan* bermakna apa saja yang dikerjakan atau dilakukan seseorang. *Pekerjaan* adalah jenis perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh imbalan. Dengan ciri makna pokok penghidupan.

Kata *profesi* bermakna yang menuntut pendidikan dan keahlian khusus. Yang dapat digolongperoleh imbalan. Dengan ciri makna demikian, pekerjaan dapat juga disebut mata pencarian atau pokok penghidupan.

2.1.2 Beberapa Jenis Pertemuan

Kita mengenal beberapa kata yang maknanya kurang lebih mengenai pertemuan resmi. Berikut ini ulasan perbedaan masing-masing.

Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas sesuatu. *Rapat dinas* adalah rapat yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi secara berkala untuk membahas masalah

kedinasan atau jawatan. *Rapat kerja* adalah rapat yang diselenggarakan oleh inistansi atau organisasi untuk membahas masalah dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan cara tertentu. *Rapat umum* adalah rapat berkala (tahunan, dwitahunan) yang dapat diikuti oleh semua anggota organisasi untuk membahas kepentingan umum demi lancarnya organisasi; rapat itu juga merupakan tempat pemgursnya memberikan pertanggungjawabannya.

Sidang adalah rapat anggota dewan. *Sidang umum* adalah sidang yang bersifat lengkap diikuti oleh semua bagian dewan. *Sidang terbatas* adalah sidang yang hanya mengudang beberapa anggota dewan. *Sidang pleno*adalah sidang yang diikuti oleh semua bagian atau komisi dewan.

Musyawarah adalah rapat yang sifatnya mencari mufakat atau kata sepakat. Di sini lebih ditekankan unsur perundingan yang menghasilkan putusan dengan cara bulat. *Musyawarah nasional* adalah musyawarah yang diselenggarakan suatu organisasi dan diikuti oleh wakil-wakilnya dari berbagai daerah kepengurusan. *Musyawarah besar* adalah musyawarah yang diikuti semua unsur organisasi.

Konferensi adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama.

Kongres adalah pertemuan yang diikuti para wakil organisasi atau golongan berbagai kelompok masyarakat dan yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Muktamar adalah kata lain untuk *konferensi; muktamar akbar* sama dengan *kongres.*

Seminar memiliki dua arti: (1) Pertemuan mahasiswa tingkat lanjut dengan bimbingan profesornya. Peserta seminar melaporkan perkembangan atau hasil studinya yang kemudian didiskusikan. Karena itu,.seminar disebut juga kuliah kerja. (2) Pertemuan sekelompok pakar (para ahli) atau peminat yang membahas masalah tertentu setelah pengajuan prasaran atau makalah.

Simposium adalah pertemuan yang membahas satu masalah atau beberapa masalah yang berkaitan, yang diajukan oleh pengantar diskusi yang merupakan pakar di bidangnya.

Diskusi panel (bukan *panel diskusi*) adalah pertemuan yang mendiskusikan suatu topik yang menjadi perhatian umum. Topik yang dibahas. biasanya mengenai masalah politik atau masalah sosial. Pembahasan topik dilakukan oleh beberapa pakar yang membentuk kelompok (panel) di hadapan hadirin atau melalui siaran radio/televisi.

Lokakarya adalah program pendidikan dan pelatihan yang padat dan singkat. Kepada peserta pemimpin lokakarya memberi tugas yang harus dikerjakan pada waktu itu juga.

Sarasehan adalah pertemuan yang tidak bersifat formal. (Perhatikan penulisannya. Jika *trap* diindonesiakan menjadi *terap*, kata *srasehan* seharusnya menjadi *sarasehan*). Kegiatan ini tidak terikat tertib aturan pembicaraan yang ketat. Peserta bebas mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah yang dihadapinya. *Jakarta Informal Meeting* dapat disebut juga *Serasehan Jakarta.*

2.1.3 Penggunaan Kata *Untuk, Agar* dan *Supaya*

Kata *untuk, agar,* dan *supaya* digunakan untuk menyatakan tujuan, alasan, atau maksud suatu tindakan dilakukan. Karena fungsinya hampir sama, orang kadang-kadang tidak dapat membedakan pemakaiannya secara baik sehingga yang dihasilkannya tidak baik.

Perlu ditegaskan lebih dahulu bahwa kata *untuk* juga dapat dipakai seperti pada kalimat *Ia membeli buku untuk saya* atau *Sumbangan untuk para korban bencana alam telah dibagikan.* Singkatnya, kata *untuk* dapat diikuti kata benda. Yang akan dibicarakan di sini bukan konstruksi *untuk* dan kata benda, tetapi *untuk* dan kata kerja.

Kalimat yang menunjukkan kemiripan pemakaian kata *untuk, agar,* dan *supaya* itu, misalnya, kalimat yang berikut.

(1) Makanan itu dibawa ke laboratorium *untuk/agar/supaya* diteliti.

Pada kalimat itu, kata *untuk, agar,* ataupun *supaya* dapat digunakan. Akan tetapi, tentu saja maknanya agak berbeda. Kalau kita menggunakan

kata *untuk*, maka unsur kalimat *untuk diteliti* merupakan tujuan dibawanya makanan itu ke laboratorium. Jika kita menggunakan *agar* atau *supaya*, makna yang terkandung pada *agar diteliti* dan *supaya diteliti* adalah alasan mengapa makanan itu dibawa ke laboratorium.

Kalau ditanyakan, *Untuk apa makanan itu dibawa ke laboratorium?*, jawabannya adalah *Untuk diteliti.* Namun, jika pertanyaannya *Mengapa makanan itu dibawa ke laboratorium?*, jawabnya adalah *Agar diteliti* atau *Supaya diteliti.*

Perbedaan yang lain, jika kita menggunakan kata *untuk*, kita tidak dapat menempatkan kata benda langsung sesudahnya. Kita tentu tidak dapat membuat kalimat *Obat ini harus dibawa ke laboratorium untuk diteliti khasiatnya.* Berbeda halnya jika kita menggunakan kata *agar* dan *supaya*, kita dapat membuat kalimat *Obat ini harus dibawa ke laboratorium agar/supaya khasiatnya dapat diteliti.*

Perbedaan itu menyangkut perbedaan struktur informasinya pula. Kalau kita menggunakan *untuk*, dapat dipastikan kata kerja sesudah kata itu menyatakan hal yang dialami atau dilakukan oleh subjek kalimat seperti pada kalimat yang dicontohkan di atas, yakni

(2) *Obat ini harus dibawa ke laboratorium untuk dapat diteliti khasiatnya.*

Pada kalimat (2) dinyatakan bahwa yang dapat diteliti adalah obat ini. Akan tetapi, jika kita menggunakan *agar* atau *supaya*, belum tentu apa yang dinyatakan oleh kata kerja yang ada sesudah kedua kata itu merupakan hal yang dilakukan atau dialami oleh subjek kalimat induk. Kita perhatikan kalimat berikut.

(3) Secara berkala tanaman itu disemprot *agar/supaya bebas dari hama.*

(4) *Agar/supaya kemacetan itu tidak terjadi*, Pemerintah bermaksud membuat jalan raya.

Pada contoh (3) yang bebas dari hama memang subjek kalimat, yakni *tanaman itu*, tetapi pada contoh (4), yang tidak terjadi adalah *kemacetan*, bukan *Pemerintah* yang menjadi subjek induk kalimat.

Seperti telah dinyatakan di atas, bagian kalimat yang diantar oleh kata penghubung seperti *untuk*, *agar*, dan *supaya* menyatakan hal yang menjadi tujuan, alasan, atau maksud tindakan yang dinyatakan pada predikat induk kalimat. Sesudah kata *untuk* kita harus menempatkan kata kerja yang menyatakan tindakan yang disengaja. Kata keadaan atau kata sifat cenderung tidak dapat digunakan sesudah kata *untuk.* Contohnya seperti yang terdapat pada kalimat ini.

(5) * Minumlah obat ini *untuk* segar.

(6) Minumlah obat ini *untuk* memperoleh kesegaran baru.

Di sini kalimat (5) dapat kita terima, sedangkan kalimat (6) dapat diterima karena pernyataan *untuk memperoleh kesegaran baru* dinyatakan perihal yang diinginkan atau disengaja. Jika kita menggunakan kata *agar* atau *supaya*, kata sifat *segar* dapat mengikutinya.

(7) Minumlah obat ini *agar/supaya* segar.

Jadi, perlu diingat, tidak semua kata kerja dapat dipakai sesudah kata *untuk.* Kata kerja itu harus mengundang unsur makna kesengajaan, baik aktif maupun pasif. Kata kerja pasif yang mengandung unsur makna kesengajaan adalah kata kerja yang berafiks *di-*. Contohnya sudah diberikan di atas. Kata kerja yang berafiks *ter-* dan *ke-an* tidak menyatakan kesengajaan yang kuat. Pada contoh-contoh berikut kalimat (8) dan (9) ditolak karena unsur makna kesengajaan sangat rendah.

(8) * Kita perlu berbicara terus terang untuk *terbuka* masalahnya yang sebenarnya.

(9) * Barang-barang itu perlu diuji untuk *kelihatan* mutunya.

Dalam konstruksi kalimat seperti itu, kata *untuk* harus diganti dengan *agar* atau *supaya*, atau kata kerja yang mengikutinya diubah menjadi *membuka* dan *dilihat.* Jadi, kalimat (8) diubah menjadi *Kita perlu berbicara terus terang untuk membuka masalah yang sebenarnya* dan kalimat (9) menjadi *Barang-barang itu perlu diuji untuk dilihat mutunya.*

(Bersambung)

HARIAN INDONESIA, 13 Mei 1995

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1603

KETEPATAN, KEBENARAN, DAN KELAZIMAN DALAM PEMILIHAN KATA

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan komunikasi. Sebagai sarana komunikasi digunakan bahasa. Bahasa merupakan pelambang pengertian. Setiap anggota masyarakat yang terikat dalam kegiatan komunikasi berusaha agar orang lain dapat memahami gagasan yang dikemukakannya, sedangkan ia harus mampu memahami gagasan orang lain. Untuk melaksanakan kegiatan itu, diperlukan persyaratan tertentu. Persyaratan itu, antara lain, ia harus menguasai sejumlah kosakata yang dimiliki oleh anggota masyarakat bahasanya dan mampu pula memakai kosakata itu dalam kalimat yang jelas dan efektif sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk menyampaikan gagasan itu kepada anggota masyarakat lainnya.

Persyaratan yang lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa bahasa yang dipakai dapat berbentuk bahasa tulis dan dapat pula berbentuk bahasa lisan. Pemakaian kedua bentuk bahasa itu bertalian erat dengan ragam, yaitu bentuk bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri kebahasaan tertentu, seperti tata bunyi, tata bentuk kata, dan tata kalimat serta ciri nonkebahasaan seperti, lokasi pemakaian lingkungan sosial pemakaianya, serta lingkungan keprofesian pemakai bahasa yang bersangkutan.

Dengan adanya kedua bentuk bahasa itu, kita dapati dua buah ragam bahasa, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Perbedaan utama kedua ragam bahasa itu adalah bahwa ragam bahasa tulis salah satu unsurnya adalah ejaan, sedangkan ragam bahas lisan salah satu unsurnya adalah lafal. Unsur yang lain pada kedua ragam itu adalah sama, yaitu unsur struktur kalimat, bentuk kata, dan kosakata. Perbedaan yang lain adalah bahwa ragam bahasa lisan terikat oleh ruang dan waktu sehingga ragam bahasa lisan lebih kaya daripada ragam bahasa tulis. Bahasa lisan tidak menuntut unsur kebahasaan dinyatakan secara tersurat. Sebaliknya, ragam bahasa tulis tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga unsur-unsur bahasa harus dinyatakan secara tersurat. Ketidak hadiran penulis menuntut pernyataan yang dikemukakan dalam tulisannya jelas, dalam segi struktur kalimatnya

luntas, serta dari segi maknanya berterima dari segi sosial budayanya sehingga gagasan yang disampaikan kepada pebacanya komunikatif.

Dalam karang-mengarang, beberapa faktor, seperti siapa penulis, kepada siapa karangan itu ditujukan, tentang apa isi karangan itu atau apa tujuan penulisan karangan itu merupakan faktor yang turut menentukan pemilihan ragam bahasa, baik struktur kalimatnya maupun bentuk dan pilihan katanya. Demikian pula dalam percakapan faktor, seperti siapa pembicara merupakan faktor yang menentukan pemilihan ragam bahasanya. Kenyataan menunjukkan pula anggota masyarakat Indonesia ini terdiri atas berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan budaya. Hal itu akan menentukan pula ragam bahasa yang dipakai. Dengan demikian, pilihan kata seharusnya mengikuti ragam bahasa yang digunakan dalam bentuk bahasa tertentu. Dalam bentuk bahasa tulis, karangan dianggap kurang berarti jika pilihan kata kurang tepat walaupun, misalnya, organisasi penyajiannya baik, pemakaian paragrafnya cermat, susunan kata dalam kalimat teratur dan runtut, serta gaya bahasanya baik. Kekurangtepatan pilihan kata akan mengakibatkan karangan kurang berbobot dan kurang bernilai. Bahkan, pembaca akan menilai bahwa penulis kurang mampu menggunakan kosakta bahasanya. Kekurangmampuann itu kemungkinan besar disebabkan oleh kurang luasnya pengusanaan kosakata dan makna katanya. Makin sedikit penguasaan kosakata berarti makin sempit ruang lingkup pilihan kata. Hal itu bukan berarti bahwa seorang penulis wajib menguasai kosakata seperti yang terdapat di dalam kamus, melainkan bagaimana penulis itu mampu menggunakan kata secara cermat dan tepat yang jumlahnya sesuai dengan tujuan dan keperluannya.

Demikian pula dalam bentuk bahasa lisan, pembicaraan dianggap kurang berarti jika pilihan katanya kurang cermat walaupun misalnya bahan yang disajikan baik, lafal yang digunakannya baik, susunan katanya runtut, serta gaya bahasanya baik.

Dengan demikian, ragam bahasa mempunyai hubungan timbal balik dengan pilihan kata. Ragam bahasa menentukan pilihan kata dan pilihan kata memberi corak ragam bahasa.

Dalam bab ini akan dibicarakan (1) pengertian pilihan kata, (2) tujuan pilihan kata, dan (3) urutan pembahasan.

1.1 Pengertian Pilihan Kata

Orang yang akan menyatakan pikiran atau gagasannya dengan bahasa, baik secara lisan maupun sercara tertulis, biasanya menimbang-nimbang kata apa yang sebaiknya digunakan. Hasilnya "tampak pada bahasa yang digunakan orang itu". Jika gagasan orang dapat dipahami dengan cepat dan tepat, dapat dikatakan pilihan kata orang itu baik. Pilihan kata juga dapat menimbulkan kesan tertentu terhadap pemakaianya, misalnya apakah orang itu suka berkelakar, memiliki tenggang rasa, atau bersikap ragu-ragu.

Oleh karena itu, yang harus diperhatikan dalam pilihan kata adalah maknanya. Bentuk kata yang sama dapat bermakna lain dalam konteks yang berbeda. Perhatian contoh berikut ini.

(1) Amir memberikan *kaki tangannya* yang kotor.

Kata *kaki tangan* pada kalimat di atas artinya anggota tubuh yang biasa dipakai untuk berjalan dan untuk memegang sesuatu. Kata *kaki tangan* pada kalimat yang berikut ini berbeda maknanya.

(2) *Kaki tangan* gembong perampok itu juga sudah ditangkap.

Kata *kaki tangan* pada kalimat di atas berarti para 'pembantu' atau 'anak buah'.

Informasi yang sama dapat disampaikan dengan cara yang berbeda. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara tertentu, antara lain, dengan mempertimbangkan siapa penerima informasi itu. Jika tidak, dapat terjadi bahwa informasi itu tidak tertangkap dengan baik. Sekadar contoh, pada sebuah cerita anak-anak, terdapat terjemahan teks yang harfiah. Seorang polisi meminta penjelasan dari seorang pengendara mobil yang menabrak toko dengan kalimat berikut ini.

(3) *Engkau harus punya penjelasan terhadap*

kejadian ini, Pak.

Kalimat itu terasa aneh bagi anak-anak. Bandingkan itu dengan kalimat berikut.

(4) Engkau harus menjelaskan kejadian ini, Pak.

Contoh di atas diharapkan dapat memberi gambaran sekilas tentang pengertian pilihan kata dan bagaimana pemakaiannya.

1.2 Tujuan Memilih Kata

Kadang-kadang kita menemukan kalimat yang tidak cermat yang disebabkan oleh pilihan kata dan sekaligus nalar bahasa yang tidak benar. Perhatikan kalimat berikut.

(1) *Pembangunan* pasar yang akan menelan biaya sekitar Rp 5 miliar itu mulai *dibangun* tahun depan.

Pada kalimat (1) terdapat kejangalan. Kalau kita sederhanakan, kalimat itu menjadi.

(2) *Pembangunan* pasar *dibangun* tahun depan.

Kita dapat menyatakan *membangun pasar,* bukan *membangun pembangunan pasar.* Oleh karena itu, kata *dibangun* kita ganti dengan *dilaksanakan* atau dimulai. Jadi, kalimat (1) di atas dapat diperbaiki sebagai berikut.

(3) Pembangunan pasar yang akan menelan biaya sekitar Rp 5 miliar itu mulai dilaksanakan tahun depan.

(4) Pembangunan pasar yang akan menelan biaya sekitar Rp 5 miliar itu dimulai tahun depan.

Pengulangan bentuk yang bermiripan secara terus-menerus, selain membosankan, juga kadang-kadang menjadi berlebihan dan tidak diperlukan. Perhatikan contoh berikut.

(5) *Perjuangan* para pahlawan yang *beruang* melawan penjajah patut kita kenang dan kita hargai.

Kalimat itu dapat kita ubah sebagai berikut.

(6) *Perjuangan* para pahlawan melawan penjajah patut kita kenang dan kita hargai.

(7) Para pahlawan yang *berjuang* melawan penjajah patut kita kenang dan kita hargai.

Kalimat (6) dan (7) berbeda makna, tetapi lebih cermat daripada kalimat (5).

Dengan contoh di atas diperlihatkan bahwa tujuan pilihan kata, selain mempercepat peng-ungkapan gagasan, juga dapat menjadikan bahasa yang kita gunakan lebih hidup, menarik, dan tidak membosankan.

1.3 Urutan Pembahasan

Untuk mengkaji lebih jauh tentang bentuk dan pilihan kata, penyajian disusun dalam urutan (1) aspek bentuk, (2) aspek makna, (3) ciri pilihan kata yang baik, dan (4) pilihan kata dalam karya sastra dan dalam karya ilmiah.

II. MAKNA KATA

Kemampuan orang untuk menggunakan kata secara tepat, cermat, dan benar, berbagai perbedaan dan persamaan makna kata sesuai dengan tujuan dan gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain, serta kemampuan memperoleh bentuk yang sesuai dan nilai rasa yang dimiliki akan tercapai jika orang itu menguasai pengetahuan makna kata.

Pengetahuan tentang makna kata akan mempermudah seseorang dalam memilih dan memakai kata secara tepat untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain.

Pengetahuan tentang makna kata perlu ditunjang oleh pengembangan makna berdasarkan faktor sosial, antara lain jenis kelamin dan etnisitas.

Dalam bab ini, ruang lingkupnya dibatasi dalam bagian, yaitu (1) persamaan kata (sinonim), (2) makna denotasi dan konotasi, (3) makna umum dan khusus, (4) makna konkret dan anstrak, (5) Idiom, dan (6) majas.

2.1 Persamaan Kata (Sinonim)

Kita harus berhati-hati dalam memilih satu di antara dua buah kata atau lebih yang bermakna hampir sama atau mirip. Kedua kata yang kita

BERSAMBUNG

Harian Indonesia, 17 Mei 1995

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1588

242. Menurut *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XV, Pasal 36 bahasa Indonesia adalah bahasa negara.

243. Kata bilangan tidak dapat digunakan sebagai awal sebuah kalimat.

244. Kata *belas* pada *dua belas ribu* dituliskan terpisah dari kedua kata yang mengapitnya.

245. Untuk menyatakan tingkat, kata *pertama* tidak dapat digunakan sebab kita memiliki kata *kesatu* yang baku.

246. Unsur-unsur seperti *belas, puluh, ratus, ribu,* dan *juta* dirangkai penulisannya dengan kata bilangan yang mendahuluinya.

247. Unsur *maha* dirangkaikan penulisannya dengan kata yang mengikutinya, kecuali untuk kata *maha esa* pada sila pertama Pancasila.

248. Kota *Bogor* harus ditulis dengan awal huruf kapital walaupun di tengah kalimat.

249. Kata *Bali* yang sudah tidak digunakan sebagai nama geografi seperti untuk nama salah ditulis dengan huruf kecil.

250. *Kota ini terkenal dengan oncom bandungnya.* Kata *Bandung* pada kalimat tadi ditulis dengan awal huruf kapital.

251. *Jangankan apel, jeruk pun asal dari Malang pasti disukainya.* Kata *Malang* harus ditulis dengan huruf awal kapital.

252. Perulangan dwipurwa biasanya ditandai perubahan bunyi vokal dari (a, u, i, o) menjadi (e).

253. Untuk menyatakan pesona selain dapat dibentuk dengan cara menambahkan awalan *pe-* pada kata kerja, juga dapat menggabungkan kata *tukang* dengan kata kerja.

254. Dilihat dari keseringannya melakukan pekerjaan, persona *pencuri, perokok, penari* harus dibedakan dengan *tukang sapu* dan *juru ketik*.

255. Baik *berpukul-pukulan, pukul-memukul* maupun *berpukulan* disebut kata kerja resiprokal.

256. Kata kerja seperti *memberikan* memerlukan dua konstituen, yaitu subjek dan objek untuk membentuk sebuah kalimat lengkap.

257. Kepaduann sebuah paragraf sebenarnya hanya ditentukan pemakaian penghubung antarkalimat.

258. Bentuk *antar* selalu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

259. Kata *Anda* harus ditulis dengan awal huruf kapital walaupun berada di tengah kalimat.

260. Awalan *pe-* pada kata *pendinginan* selain dapat membentuk makna persona, juga membentuk makna alat atau penyebab.

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk pernyataan-pernyataan berikut.

261. Yang tidak termasuk kata ulang adalah
   a. tergesa-gesa
   b. bercubit-cubitan
   c. anai-anai *
   d. tetangga

262. Penyerbuan tentara Serbia ke Bosnia dikecam banyak negara.
Pernyataan tersebut dapat digambarkan dengan kata
   a. intervensi
   b. invasi *
   c. integrasi
   d. infleksi

263. *Saya sudah tahu bahwa tahu Sumedang enak rasanya.*
Kata tahu pada kalimat di atas termasuk
   a. homonim
   b. homofon
   c. homograf *
   d. poliseme

264. *Wartawan asing banyak yang memonitor perkembangan di Bosnia akhir-akhir ini.* Terjemahan kata *memonitor* dalam bahasa Indonesia ialah.
   a. pemantauan
   b. memantau *
   c. dipantau
   d. terpantau

265. Kalimat yang benar di bawah ini adalah
   a. Saya sangat *optimis* bahwa hasil ulangan kali ini tidak akan mengecewakan lagi.
   b. Saya sangat *optimistis* bahwa hasil ulangan kali ini tidak akan mengecewakan lagi. *

266. Kalimat yang benar di bawah ini adalah
   a. Walaupun ayahmu sakit keras, kamu jangan *pesimistis* seperti itu. *
   b. Walaupun ayahmu sakit keras, kamu jangan *pesimis* seperti itu.

267. Dia *masih hijau* dalam pekerjaannya itu. Makna yang tersirat dalam ungkapan *masih hijau* adalah
   a. belum berpengalaman *
   b. kurang menyenangi
   c. kurang memahami
   d. belum menekuni

268. Kalimat di bawah ini yang paling benar adalah
   a. Saya akan *membicarakan tentang* fungsi bahasa daerah.
   b. Saya akan *berbicara hal* fungsi bahasa daerah.
   c. Saya akan *berbicara tentang* fungsi bahasa daerah.

269. Salah satu kalimat berikut ini mengandung frase idiomatis
   a. Jangan menulis di kertas basah.
   b. Jangan bermain di tengah hujan nanti kau basah dan kedinginan.
   c. Ia *tertangkap basah* ketika sedang menyontek temannya.
   d. Meskipun sudah membawa payung, ia masih basah juga.

270. *Psychology* dalam bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi
   a. psykologi.
   b. psikhologi.
   c. psikologi. *
   d. psikhology.

271. *Factuur* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi
   a. faktir.
   b. paktur.
   c. faktur. *
   d. factur.

272. Inti frasa pada *tidak akan menguntungkan*

semua pihak adalah
a. tidak akan
b. akan menguntungkan
c. menguntungkan *
d. semua pihak

273. Perulangan kata majemuk di bawah ini yang benar adalah
a. rumah sakit-rumah sakit
b. warung Tegal-warung Tegal
c. rumah-rumah makan *

274. Kalimat berikut yang paling benar penulisannya adalah
a. Setiap hari saya selalu naik *bis* kota.
b. Setiap hari saya selalu naik *bus* kota. *
c. Setiap hari saya selalu naik *bes* kota.

275. Kata *supermarket* dapat diindonesiakan menjadi
a. pasar swalayan *
b. pasar serba ada
c. toko serba ada
d. toko swalayan

276. Kata *departemen store* dapat diindonesiakan menjadi
a. toko serba ada *
b. pasar swalayan
c. pasar raya
d. pasar serba ada

277. Pilihlah kata berikut ini yang tidak sejenis benar dengan kata yang lain.
a. kawasan
b. wilayah
c. kota *
d. daerah

278. Pilihlah kata berikut ini yang tidak sejenis benar dengan kata yang lain.
a. melihat
b. memandang
c. melitik
d. menoleh *

279. Pilihlah kata berikut ini yang tidak sejenis benar dengan kata yang lain.
a. membawa
b. mengajak *
c. menjinjing
d. memikul

280. Pilihlah kata berikut ini yang tidak sejenis benar dengan kata yang lain.
a. menyalak
b. mencicit
c. menangis *
d. mengembik

281. Pilihlah kata berikut ini yang tidak sejenis benar dengan kata yang lain.
a. tertawa
b. tersenyum
c. tergelak
d. tersedak *

282. Frasa pada *lukisan Abdullah* mempunyai
a. satu makna
b. dua makna
c. tiga makna
d. empat makna *

283. Bunyi sumpah pemuda yang ketiga adalah
a. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan, bahasa Indonesia. *
b. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia.
c. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa nasional, bahasa Indonesia.
d. Kami putra dan putri berbahasa satu, bahasa Indonesia.

(BERSAMBUNG)

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1589

284. Karangan yang berusaha meyakinkan orang disebut
   a. argumentasi *
   b. eksposisi
   c. deskripsi
   d. narasi

285. Karangan yang berusaha melukiskan suatu kejadian tanpa ditambah dan atau dikurangi disebut
   a. argumentasi
   b. eksposisi
   c. deskripsi *
   d. narasi

286. Kata-kata berikut yang benar adalah
   a. ilmuwan *
   b. ilmuawan
   c. standarisasi
   d. ilmuwan

287. Pemakaian bentuk *isasi* yang benar di dalam bahasa Indonesia adalah
   a. betonisasi
   b. neonisasi
   c. turinisasi
   d. organisasi *

288. Frasa yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia adalah
   a. Grand Menteng Hotel
   b. Mariamah Salon
   c. Hotel Indonesia *
   d. Subentra Bank

289. Kalimat berikut yang benar adalah
   a. Tidak ada orang tua yang tidak *mencintai* anaknya. *
   b. Tidak ada orang tua yang tidak *menyintai* anaknya.
   c. Tidak ada orang tua yang tidak *cinta* anaknya.

290. Kalimat di bawah ini tidak efektif, kecuali
   a. Dalam obat itu mengandung racun.
   b. Obat itu mengandung racun. *
   c. Obat itu terkandung racun.

291. Subjek kalimat *Dalam keterangan itu terdapat hal-hal yang ganjil* adalah
   a. keterangan itu
   b. dalam keterangan itu

c. hal-hal
d. hal-hal yang ganjil *

292. Gabungan kalimat *Sapu tangan orang itu putih* dan *sapu tangan itu lebar* adalah
a. Sapu tangan orang itu putih dan lebar.*
b. Sapu tangan orang itu putih dan sapu tangan orang itu lebar.
c. Sapu tangan orang yang putih itu lebar.

293. Kita harus menggalang *persatuan* dan kesatuan bangsa.
Imbuhan *per- ...-an* pada *persatuan* sejalan dengan *per-...-an* yang terdapat pada kata
a. pertambangan
b. perbuatan
c. persamaan *
d. perhatian

294. *Santunan peringan beban yang diberikan daripada petugas berwenang diharapkan dapat memperlancar proses penyelesaian masalahnya.* Kalimat tadi kurang efektif karena alasan-alasan berikut ini, kecuali
a. Kalimat terlalu banyak menggunakan gaya bahasa. *
b. Penggunaan *daripada* kurang tepat.
c. *nya* pada kata *masalahnya* tidak berfungsi.
d. Frasa *peringan beban* tidak perlu ditulis.

295. Keterangan subjek pada kalimat *Pendidikan sebagai prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar pada kebudayaan masyarakat,* yaitu
a. pendidikan sebagai prasarana ilmu pengetahuan.
b. sebagai prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. *
c. teknologi dan kebudayaan masyarakat.
d. ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar.

296. Kalimat yang berpola SPO adalah
a. Wijayanti mengirim surat kemarin pagi.
b. Ali naik ke kelas enam.
c. Menurut cerita, adik saya pernah datang kemari.
d. Penggunaan pupuk menaikkan hasil panen. *

297. *Guru itu mempertemukan kedua siswa yang berkelahi.*
Makna gramatikal kata *mempertemukan* adalah
a. membuat bertemu *
b. menyuruh bertemu
c. supaya bertemu
d. membuat pertemuan

298. Ungkapan idiomatis *setali tiga uang* digunakan untuk menyatakan
a. sesuatu yang tidak berbeda *
b. sesuatu yang berhubungan
c. sesuatu yang bertentangan
d. sesuatu yang tidak sama

299. Kalimat yang bermakna idiomatis adalah
a. Ia menghibur diri di taman itu.
b. Ia dijadikan kambing hitam dalam kejadian itu. *
c. Nasibnya memang jelek.
d. Orangtuanya tinggal di pulau seberang.

300. Ciri-ciri bahasa yang denotatif adalah sebagai berikut, kecuali
a. memberikan informasi faktual
b. bebas dari interpretasi, asosiatif, dan sugestif
c. biasa dipakai dalam penulisan ilmiah
d. memberikan informasi menurut selera pengusaha. *

301. Kalimat *Langkah berikutnya ialah membuang bau kedelai yang kurang sedap. Caranya mudah saja ...* menunjukkan kalimat yang dikutip dari karangan yang berbentuk
a. deskripsi
b. argumentasi
c. eksposisi *
d. narasi

302. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat *Bergembiralah ... bersama kelompok lawak itu.* adalah

a. sejenak *
b. sepintas
c. sekejap
d. sejurus

303. Nilai rasa yang tidak konotatif terdapat dalam kalimat
a. Lima tahun lamanya ia menjadi kaki tangan penjajah.
b. Tangan mencencang bahu memikul.
c. Tangan kirinya luka terkena pisau. *
d. Sudah lama ia menjadi bunga di desa itu.

304. *Adik jatuh dari atap teras rumah.* Makna kata *jatuh* dalam kalima di atas bersifat
a. denotatif *
b. konotatif
c. persuatif
d. spesifik

305. *Ini merupakan suatu tanda bahwa aku masih tetap mencintaimu.* Kalimat di atas akan lebih efektif jika kata berikut ini dihilangkan
a. tetap
b. masih *
c. bahwa
d. suatu

306. Gabungan dari ketiga kalimat (1) *Laki-laki itu tua,* (2) *Laki-laki itu membawa buku,* dan (3) *Laki-laki itu guru saya* adalah
a. Laki-laki tua itu membawa buku guru saya.
b. Laki-laki yang membawa buku tua itu guru saya.
c. Guru saya itu laki-laki yang membawa buku tua itu.
d. Laki-laki tua yang membawa buku itu guru saya. *

307. *Dia selalu datang terlambat.* Inti frasa verba tersebut adalah
a. datang
b. terlambat
c. selalu
d. selalu datang *

308. Padanan kata *borg* adalah
a. penjamin
b. agunan *
c. menjamin
d. penjaminan

309. Kata *jiran* semakna dengan kata
a. tetangga
b. bersebelah
c. berdekatan
d. bertetangga

310. Kita tidak perlu menggunakan kata *shopping* sebab bahasa kita telah mempunyai padanan kata itu, yaitu
a. ke toko
b. ke pasar
c. belanja/berbelanja * *
d. berjalan jalan ke toko

311. Kita tidak perlu menggunakan kata *plaza* sebab bahasa kita telah mempunyai padanan kata itu, yaitu
a. pasar
b. depot
c. toko *
d. warung

312. Pencampuradukan pemakaian kata-kata asing dengan kata-kata Indonesia oleh sekelompok orang saat ini disebabkan
a. Bahasa asing lebih bergengsi.
b. Bahasa Indonesia kurang lengkap.
c. Kesadaran bangsa berbahasa Indonesia masih kurang. *
d. Kesadaran berbahasa asing sebagai bahasa internasional semakin tinggi.

bersambung

Harian Indonesia, 24 Mei 1995

RUANGAN

BAHASA KITA-BAHASA INDONESIA
印度尼西亞語文園地

DIASUH OLEH : DRS. FARID HADI

PELAJARAN KE - 1590

313. Kalimat yang paling benar di bawah ini adalah
a. Pertandingan itu akan berlangsung antara A dengan B.
b. Pertandingan itu akan berlangsung antara A dan B. *
c. Pertandingan itu akan berlangsung A dan B.
d. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dan dengan regu B.

314. Predikat adalah kalimat *Orang yang duduk di pojok ruangan itu adalah guru adik saya* adalah
a. guru adik saya *
b. adik saya
c. adalah guru adik saya
d. orang yang duduk di pojok

315. *Jika kamu unggul di pertandingan ini, hadiah pasti ada di tanganmu.* Subjek induk kalimat pada kalimat tersebut adalah
a. kamu
b. hadiah *
c. pertandingan
d. tanganmu

316. *Apabila nanti sore tidak hujan, pastilah saya ke rumahmu.* Subjek induk kalimat pada kalimat tersebut adalah
a. tidak hujan
b. pastilah
c. saya *
d. rumahmu

317. Kalimat yang mengandung bentuk klitika adalah
a. Dia telah kuanggap sebagai kakaku sendiri. *
b. Dia telah saya anggap sebagai kakak sendiri.
c. Saya menganggap dia kakak sendiri.
d. Dia saya anggap kakak sendiri.

318. Kalimat yang menggunakan bentuk *proklitik* adalah
a. Tolong ambilkan buku itu.
b. Dilemparkanlah buku itu kepadaku.
c. Bagaimana juga jasa-jasanya tak dapat kaulupakan. *
d. Kamu boleh melupakanku tapi jangan melupakannya.

319. Kalimat yang mengandung bentuk *enklitik* adalah
a. Tolong tutupkan pintu itu.
b. Dilemparkanlah buku itu kepadaku. *
c. Bagaimanapun juga jasa-jasanya tak dapat kaulupakan.
d. Kamu boleh melupakan dia tapi jangan melupakan saya.

320. *Kemarin terjadi kecelakaan yang mengerikan.* Subjek kalimat itu adalah
a. kecelakaan
b. kecelakaan yang mengerikan *
c. kemarin
d. kecelakaan mengerikan

321. Keterangan penjelas pada kalimat *Kemarin terjadi kecelakaan yang mengerikan* adalah
a. kemarin
b. terjadi kecelakaan
c. kecelakaan
d. yang mengerikan *

322. Keterangan aposisi pada kalimat *Menteri Penerangan RI, Harmoko, melarang beredarnya surat kabar berbahasa asing* adalah
a. Harmoko *
b. Menteri Penerangan
c. Menteri Penerangan RI
d. Surat kabar

323. *Saya berharap kalian memenangkan pertandingan itu. Oleh karena itu, kalian harus berusaha yang sungguh-sungguh.* Ungkapan penghubung antarkalimat pada kalimat tadi adalah
a. berharap
b. harus
c. yang sungguh-sungguh
d. oleh karena itu *

324. *Dia tidak mau menerima surat ini. Padahal, surat ini sangat penting.* Penghubung antarkalimat pada kalimat tadi adalah
a. tidak mau
b. sangat penting
c. padahal *
d. sangat

325. Penghubung intrakalimat pada *Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional ditujukan untuk mempertinggi derajat dan martabat bangsa.* adalah
a. ditujukan
b. dan *
c. untuk
d. ditujukan

326. Bunyi Pasal 36 UUD 1945 adalah
a. Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia. *
b. Bahasa Nasional adalah bahasa Indonesia.
c. Bahasa Persatuan adalah bahasa Indonesia.
d. Bahasa Kesatuan adalah bahasa Indonesia.

327. Kata-kata di bawah ini mengandung fonem serapan, kecuali
a. syarat
b. aktif
c. ijazah
d. harmonis *

328. Penambahan imbuhan pada bentuk dasar disebut
a. afiksasi *
b. reduplikasi
c. konfiksasi
d. pemajemukan

329. Kata *Depdikbud* merupakan singkatan kata yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata yang wajar. Bentuk singkatan ini disebut
a. antonim
b. sinonim
c. akronim *
d. hiponim

330. Pembentukan kata jadian yang benar berdasarkan proses asimilasi ialah
a. pengetrapan
b. penterapan
c. penetrapan
d. penerapan *

331. Bentuk kata yang berafiks *me-...-kan* dan mempunyai makna kausatif terdapat pada kalimat-kalimat berikut, kecuali
a. Kami berusaha menyatukan pendapat kami.
b. Ia membacakan cerita untuk adiknya.
c. Bapak sedang membetulkan atap rumah.
d. Kita tidak boleh mengecewakan seseorang.

332. Makna reduplikasi yang menyatakan *superlatif* terdapat pada kalimat
a. Ia mencoba bekerja sebaik-baiknya. *
b. Sekarang sedang musim buah-buahan.
c. Mereka sedang berbincang-bincang.
d. Barang itu rusak karena terbanting-banting dalam perjalanan.

333. Penambahan afiks yang benar pada kata majemuk adalah seperti berikut ini, kecuali
a. pertanggungan jawab *
b. penitikberatan

c. keikutsertaan
d. pengalihbahasaan

334. Kalimat yang berpola SPK adalah
a. Dalam rapat itu, hadir beberapa orang siswa.
b. Ia mempelajari peta itu kemarin.
c. Pertemuan itu berlangsung di Cipayung. *
d. Mereka membahas isi masalah itu.

335. Gabungan kalimat (a) *Mobil itu dirakit di Indonesia* (b) *Konstruksi mobil itu sederhana* adalah sebagai berikut, kecuali
a. Mobil yang berkonstruksi sederhana itu dirakit di Indonesia.
b. Mobil yang dirakit di Indonesia dan konstruksinya sederhana.
c. Mobil yang dirakit di Indonesia itu konstrukisnya sederhana.
d. Mobil itu di rakit di Indonesia yang konstruksinya sederhana.

336. Pola frasa *buku tulis* sama dengan pola frasa berikut ini, kecuali
a. mesin cuci
b. lemari makan
c. mesin gelas
d. meja hijau *

337. Ungkapan penghubung yang menyatakan *relasi akibat* ialah
a. untuk itu
b. dengan demikian
c. sehubungan dengan itu
d. sehingga *

338. Imbuhan *ber-* yang bermakna 'mempunyai' terdapat pada kalimat
a. Adik bersepeda ke sekolah.
b. Saya bermaksud ke rumahmu. *
c. Petinju itu berkeringat selama bertanding.
d. Saya bertindak sebagai pewara (pembawa acara).

339. Kata *pejuang* diturunkan dari kata kerja *berjuang*. Kata benda berikut yang dibentuk berdasarkan pola di atas adalah
a. pedagang, petinju, pejalan *
b. petunjuk, pembawa, pemotret
c. pesilat, petatar, pemain
d. pemohon, penyuluh, pelukis

340. Pembantu kami yang baru itu berwajah aduhai. Kata *aduhai* dalam kalimat di atas menunjukkan makna yang
a. kausatif
b. akusatif
c. denotatif
d. konotatif

341. Ayah tersenyum-senyum ketika Ibu menggodanya. Makna kata ulang *tersenyum-senyum* sama dengan kata ulang pada kalimat
a. Jangan membuang-buang kesempatan yang baik.
b. Adik sedang membaca-baca koran di ruang depan.
c. Napasnya terengah-engah setelah dikejar-kejar polisi *
d. Anak itu sedang bermain-main di halaman.

342. Kalimat yang tersusun dengan baik adalah
a. Sambutan berikutnya dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu kami persilakan.
b. Meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, ia tidak ingin mengingkari janji. *
c. Bagi yang menemukan dompe supaya segera diserahkan kepada polisi.
d. Untuk orang yang membeli ayam supaya diikat kakinya.

343. *Dia sebenarnya tidak hanya menganjurkan, melainkan menyarankan,bahkan mendorong kita semua untuk selalu mengembangkan pengetahuan'kita.* Gaya bahasa yang terdapat dalam kalimat di atas disebut.
a. tautologi
b. hiperbola
c. klimaks *
d. sarkasme

bersambung

Harian Indonesia, 27 Mei 1995

BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

HPBI Akan Kirim Hasil Koreksi Pemakaian Bahasa Kepada Pers

Jakarta, 1 Mei

Memasuki 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ternyata ditemukan banyak hambatan dalam penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Hal itu dikemukakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pariwisata, Drs Andi Mappi Sammeng selaku Ketua Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI); seusai melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI HPBI kepada Mendikbud, Wardiman Djojonegoro, hari Kamis (27/4).

Menurut Andi, salah satu hambatan penggunaan bahasa tersebut karena pengembangan teknologi yang memasukkan unsur bahasa asing. Oleh karena itu usaha-usaha untuk mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, perlu semakin digalakkan.

Sementara itu, Prof Dr Anton M Moeliono yang mendampingi Dirjen menambahkan, usaha penggalakan atau kampanye tersebut bukan usaha untuk memerangi bahasa asing, tetapi menumbuhkan kesadaran lebih mencintai bahasa Indonesia dari pada bahasa asing.

Menyangkut program kerja, Dirjen menjelaskan, HPBI akan menjadi pendukung utama dan bila perlu sebagai kelompok pendesak (*Pressure Group*) untuk penggunaan Bahasa Indonesia. Pelaksanaannya dengan mengoreksi atau mencermati pemakaian Bahasa Indonesia oleh masyarakat.

Masyarakat umum yang dimaksud, semua kalangan baik instansi, pejabat maupun media massa. Hasil koreksi tersebut akan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan melalui surat.

Munas HPBI IV menetapkan Prof Dr Sabarti Akhadiah MK sebagai Ketua I untuk periode 1994 sampai 1997. Saat ini ada 31 cabang HPBI di seluruh Indonesia, yang menurut rencana akan diaktifkan. (RES/H-4)

Sinar Pagi, 1 Mei 1995

3,5% Warga Belum Bisa "Berbahasa Indonesia"

Walikota: Minat Baca dan Daya Beli Kurang

BANDUNG, (PR).-

Sekitar 3,5% penduduk Kotamadya Bandung yang berusia 5 tahun ke atas belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Selain itu, sekitar 5,65% dari 1.886.716 penduduk Bandung usia membaca, masih buta huruf.

Hal tersebut diungkapkan Walikotamadya Bandung, H. Wahyu Hamijaya, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekotda Bandung, Drs. Diding Kurniadi, pada sarasehan Sabtu (6/5). Sarasehan diselenggarakan untuk memperingati HUT Perpustakaan Prof. Dr. H. Doddy A Tisna Amidjaja dan dua tahun wafatnya mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

Banyaknya penduduk yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan buta huruf, menurut Walikota, disebabkan minat baca dan daya beli terhadap buku masih kurang. Selain itu, keenggan masyarakat, terutama anak sekolah, untuk membaca juga menjadi salah satu penyebabnya. "Anak-anak sekolah lebih terpengaruh oleh budaya lisan," paparnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, penduduk Bandung harus lebih berperan dalam meningkatkan minat baca di lingkungannya. Dengan cara demikian, diharapkan, perbendaharaan ilmu pengetahuan serta informasi masyarakat makin luas dan dalam. Sehingga, pada akhirnya Kotamadya Bandung bebas dari buta aksara, bahasa dan buta ilmu pengetahuan.

Salah satu cara menumbuhkan minat baca, antara lain dengan memfungsikan perpustakaan yang lengkap koleksinya. Yakni perpustakaan yang memiliki koleksi beraspek informasi, etnik dan dapat memotivasi munculnya kreatifitas. "Fungsi perpustakaan erat kaitannya dengan upaya membina dan mengembangkan bahasa dan sastra, serta meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar," tegas Walikota.

Kelemahan perpustakaan

Pada kesempatan yang sama, staf pengajar IKIP Bandung, Drs. H. Ase S. Muchyidin, MA menyarankan pendirian perpustakaan yang memiliki layanan khas dan nilai unggulan tertentu. Dengan kata lain, perpustakaan bukanlah sebagai sosok yang "biasa" dikenal masyarakat saat ini.

Pada kenyataannya, ungkap Ase, perpustakaan umumnya masih mempunyai kelemahan, yaitu terbatasnya sumber informasi. Untuk mengatasinya. ada dua cara yang mesti ditempuh. Yakni ketersediaan petugas perpustakaan yang berkualitas dan sistem jaringan informasi antarperpustakaan sejenis. Hal tersebut harus dilengkapi wawasan pengetahuan dan keahlian petugas, terutama tentang area kajian yang ditawarkan dalam layanan informasi, sehingga dapat membantu kualitas layanan yang diberikan. "Hal demikian akan besar pengaruhnya terhadap apresiasi masyarakat tentang perpustakaan," katanya.

Sedangkan, penerapan jaringan informasi antar perpustakaan sejenis akan membantu mengatasi kekurangan sumber informasi. Hal yang tak kalah pentingnya, promosi sistematis dan berkesinambungan.

Di sisi lain, Ketua dan Pengurus Perpustakaan Prof. Dr. H. Doddy A. Tisna Amidjaja, Ny. Dien Tisna Amidjaja mengemukakan, sejak dibuka 5 Mei 1994, koleksi perpustakaannya terus bertambah. Yakni dari semula sekitar 10.000 eksemplar atau 6.000 judul, menjadi sekitar 18.000 eksemplar atau 10.600 judul.

Pada kesempatan itu, Ny. Dien memberikan hadiah kepada pengunjung setia perpustakaan. Mereka adalah, Gamia Dewanggamanik (TK), Emma Jamillah (SD), Asep Yayat (SLTP), Flora (SLTA), Renny (mahasiswa) dan Legino (umum).

Pembicara lain dalam sarasehan tersebut terdiri dari. staf pengajar Fakultas MIPA ITB, Dra. Hasiana Ibkar Kramadibrata. MSc dan Dekan Fakultas Sastra Unpad, Prof. Dr. H. Edi S. Ekadjati.***

Pikiran Rakyat, 8 Mei 1995

Pengusaha wajib mempelopori penggunaan bahasa Indonesia

JAKARTA -- Mendikbud Wardiman Djojonegoro menyatakan, momentum 50 tahun Proklamasi RI harus digunakan untuk menyadarkan pengusaha *real estate* untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada pemberian istilah di proyek-proyeknya. Hal ini juga sebagai langkah mendukung pencanangan gerakan nasional *penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar* tanggal 20 Mei oleh Presiden Soeharto.

"Saya minta seluruh pengusaha memiliki tekad yang sama dalam penggunaan istilah-istilah bahasa Indonesia, dan bukan lagi bahasa asing, bahasa Inggris seperti yang selama ini terjadi," tegas Wardiman, usai menyaksikan penandatanganankerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud dengan Divisi Pengembangan Kota Grup Lippo di Jakarta, Selasa.

Ditegaskan, bila pengusaha tak mempelopori pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam papan nama proyek dan iklan, maka sangat mungkin generasi mendatang akan mengalami kemunduran dalam berbahasa Indonesia, dan tak lagi mengenal akar budaya nasional.

"Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bila hal ini bisa dimasyarakatkan maka Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang besar," ujarnya.

Dalam acara tersebut baik Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun Mochtar Riadi, CEO Grup Lippo menyadari bahwa sangatlah tepat bila mulai saat ini pemakaian istilah asing pada papan nama proyek dan nama lain dihindari. Sebaliknya membudayakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia.

"Kami mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada proyek-proyek pengembangan kota kami. Jadi nantinya tak ada lagi Lippo Vilage atau Lippocity," kata Mochtar tanpa menyebut berapa dana untuk mengganti istilah-istilah asing tersebut. **(sib)**

Terbit, 11 Mei 1995

Diperbanyak, Baliho Kampanye Bahasa Indonesia

Surabaya, JP.-

Ada dua hal yang menandai pencanangan kampanye penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pertama, berupa baliho bertuliskan "Gunakan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar" berikut tiga contohnya (seperti gambar di atas). Baliho ini kemarin dibuka bersamaan dengan pemencetan bel tanda dimulainya pencanangan kampanye bahasa Indonesia oleh Gubernur Basofi Soedirman di sela peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Grahadi kemarin.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan buku pedoman penggunaan bahasa Indonesia serta pengalihan nama dan kata asing ke nama dan kata Indonesia, dari Gubernur Basofi Soedirman kepada Walikotamadya Surabaya Sunarto Sumoprawiro, mewakili para bupati/walikotamadya lainnya di Jatim.

Menurut Kepala Ditsospol Jatim Drs Soeryadi Setiawan selaku penanggung jawab kampanye ini untuk wilayah Jatim, baliho kampanye bahasa Indonesia yang dipasang persis di muka Grahadi, yakni di Taman Apsari, untuk mengingatkan masyarakat bahwa kampanye telah dimulai. "Nantinya, baliho ini akan diperbanyak dan dipasang hingga ke seluruh pelosok Jatim," katanya, seusai upacara kemarin.

Setelah dicanangkan, Soeryadi optimistis kampanye ini akan berhasil. "Soalnya, ini menyangkut rasa kebangsaan. Saya lihat rasa itu sudah semakin baik, khususnya yang saya amati di Jatim. Masalahnya, mungkin mereka selama ini tidak tahu," ujarnya.

Dia kembali mengingatkan, bagi para pengguna nama dan kata asing khususnya di tempat-tempat umum, jika ingin mengganti bisa berkonsultasi dengan kepala Kantor Sospol atau kepala Kantor Depdikbud setempat. "Termasuk, untuk sekadar bertanya bagaimana kata dan istilah yang benar, menurut pedoman dari Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia Depdikbud."

Sementara itu, Walikota Sunarto setelah menerima pedoman dari gubernur mengenai kampanye penggunaan BI secara baik dan benar ini berjanji akan meneruskan di seluruh wilayah kerjanya. "Di Surabaya memang banyak tempat umum yang masih menggunakan nama dan kata asing. *Pokoke, mari ngene kaidu diganti kabeh iku* (Pokoknya, setelah ini semua harus diganti, Red)," kata walikota yang kalau berbicara lebih suka dengan dialek *Suroboyo*-an itu.

Karena itu, dia meminta kalangan pengusaha maupun pengguna istilah, kata, dan nama asing lainnya, untuk tidak segan-segan berkonsultasi dengan stafnya. Khususnya, dari Kakansospol dan Kakandepdikbud yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di tiap daerah tingkat II.

"Pedoman ini segera diperbanyak, supaya masyarakat yang butuh bisa mendapatkan dan bisa mengerti pedoman yang benar," tambahnya. (pam)

Jawa Pos, 23 Mei 1995

Majalah Dan Radio Berbahasa "Prokem" Akan Ditertibkan

SURABAYA (Suara Karya): Menpen Harmoko menegaskan, majalah dan radio non-RRI yang dalam kegiatannya banyak menggunakan kata-kata atau bahasa prokem / *slank* akan ditertibkan.

"Namun, sebelumnya akan dibina terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahannya," kata Menpen menjawab pertanyaan peserta sarasehan antargenerasi berkaitan dengan peringatan Harkitnas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, malam.

Dalam sarasehan berkaitan dengan gerakan disiplin nasional dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Menpen bertindak selaku moderator, sedangkan pembicaranya Menko Polkam, Soesilo Soedarman dan Mendikbud, Prof Dr Ing. Wardiman Djojonegoro.

Mendikbud menjelaskan, pihaknya beserta Deppen sudah memanggil para pimpinan radio swasta nasional untuk memperbaiki atau memperbaharui kata dan bahasanya dalam proses penyiaran.

"Mereka juga protes bahwa kalau menggunakan bahasa Indonesia baku akan "kering" dalam penyajian siaran. Namun saya jawab bahwa penggunaan bahasa "prokem" tidak dilarang selama sifatnya kreatif dan tidak rancu atau campur aduk dengan bahasa Indonesia," kata Mendikbud.

Begitu juga majalah, utamanya majalah remaja, boleh saja menggunakan bahasa "prokem" agar komunikatif, asalkan sesuai dengan kaidah dan tidak merusak tatanan kosa kata bahasa Indonesia, mengingat majalah mempunyai golongan pembacanya sendiri.

"Radio dan majalah berbahasa daerah juga berkembang baik dan diperbolehkan siaran atau terbit. Tetapi, ya itu tadi jangan campur aduk, yang cenderung mengobrak - abrik kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar," katanya.

Sesuai Keperluan

Baik Mendikbud maupun Menpen berpendapat, penggunaan kata atau bahasa apapun ada penempatannmya sesuai dengan keperluannya, asalkan tidak mengotak - atik kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Kita risau, di masa mendatang akan kehilangan jati diri bangsa. Dalam arus persaingan dan globalisasi ini, bahasa Indonesia mulai ada yang otak - atik. Kalau tidak dihentikan mau jadi apa generasi mendatang kita kelak," kata Menpen menegaskan.

Kekuatiran itu cukup beralasan, yang menurut Mendikbud, diperlukan kesadaran semua pihak mulai aparat pemerintah, swasta hingga seluruh masyarakat.

Wardiman mencontohkan, sepanjang pinggir jalan tol Jagorawi dipenuhi baliho raksasa dengan kata - kata asing, sehingga sopirnya ketika disuruh membaca kata *"lakeside"* bukan dibaca "leiksaid" tapi "la-ke-side".

"Sopir saya tidak salah, karena membaca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Padahal padanan dalam bahasa Indonesia seperti *lakeside* sudah ada yaitu "tepian danau", katanya sambil tersenyum.

Wardiman mengemukakan, Pusat Bahasa merupakan tempat bertanya bagi siapa saja yang memerlukan dan ingin mengetahui kosa kata atau secara luas bahasa Indonesia, selain itu juga tempat berdiskusi atau menyampaikan saran.

"Bahasa Indonesia akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Jadi untuk mempertahankan jati diri bangsa salah satunya adalah dari keteguhan dalam berbahasa nasional. Karena itu perlu kesadaran semua pihak dan sifatnya bukan pemaksaan," demikian Wardiman.

Sikap Modern

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Soesilo Soedarman menegaskan, sikap modern sangat penting dimiliki Bangsa Indonesia guna menghadapi era persaingan. "Jika kita menggabungkan sikap modern yakni disiplin, teliti dan mengembangkan Iptek dengan sikap kepribadian Indonesia yakni bersahaja, demokratis dan toleran, maka Insya Allah kita akan dapat memasuki era persaingan dan memenangkannya," ujar Menko Polkam.

Menko Polkam mengingatkan, jika Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang handal dengan memiliki persyaratan berupa sikap modern, tentu akan kalah dalam era persaingan dan hanya menjadi "bangsa penonton."

"Kita jangan mau jadi penonton, termasuk dalam olahraga. Karena itu, kita harus meningkatkan kehandalan diri sebagai bangsa. Kita harus menghilangkan sikap kalah dalam era persaingan," katanya di hadapan sekitar 300 peserta sarasehan.

Menko Polkam, selaku Koordinator Gerakan Disiplin Nasional menjelaskan, sikap disiplin merupakan salah satu dari sikap modern yang mendesak untuk dimiliki Bangsa Indonesia.

"Kita akan coba kembangkan budaya disiplin melalui beberapa tahap. Budaya disiplin yang akan kita kampanyekan pertama kali adalah budaya tertib atau antri, budaya bersih dan budaya tepat waktu. Misalnya, bayar pajak harus antri dan tepat waktu sesuai dengan peraturan," katanya.

Menurut Menteri, sikap modern itu harus dikembangkan bersama dengan sikap kepribadian Indonesia. Sikap kepribadian Indonesia dapat mengacu pada hal-hal yang mendukung suksesn PJP I. (Ant)

Suara Karya, 22 Mei 1995

Dr Riris K. Toha Sarumpaet

Penggunaan Bahasa Menunjukkan Kepribadian

"SAYA tidak tahu sampai kapan Bahasa Indonesia itu bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, karena kalau orang Indonesia itu hanya menggunakan hahasa asing, saya merasa sedih dan tersinggung. Sebab penggunaan bahasa asing, seperti pada perumahan-perumahan, toko dan lain sebagainya itu, adalah suatu kelatahan."

Demikian Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Dr Riris K Toha Sarumpaet, ihwal penjajahan Bahasa Indonesia oleh bahasa asing.

Sebab, sambungnya, perkara pemakaian Bahasa Indonesia itu adalah persoalan harga diri dan kepribadian bangsa. "Contohnya, Anton Moeliono, walaupun dia mampu menggunakan berbagai jenis bahasa asing tapi jika saatnya dia harus menggunakan Bahasa Inggris dia memakai Bahasa Inggris dan pada saatnya harus memakai Bahasa Indonesia digunakanlah Bahasa Indonesia," kata Riris.

"Tapi, menurut saya, soal Bahasa Indonesia yang masih belum bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, agaknya masih perlu diadakan penelitian dari pemerintah. Justru yang saya khawatirkan sekarang adalah bahasa kita itu lama kelamaan akan lenyap, bahkan tidak tertutup kemungkinan pada saatnya nanti orang akan belajar Bahasa Indonesia ke Belanda atau ke Australia," tegasnya lagi.

Riris Sarumpaet, memang akan berang apabila mendengar orang Indonesia tak mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam arti, penggunaan Bahasa Indonesia itu sama saja, baik di pasar, di acara resmi kenegaraan ataupun pada pergaulaan sehari-hari. Sebab, baginya, Bahasa Indonesia yang baik itu pemakaiannya harus melihat kondisi yang ada. Sedangkan yang benar adalah yang sesuai dengan kaedah tata bahasa.

"Bahasa resmi dan bahasa prokem itu memang baik tapi khusus untuk kalangan sendiri. Tapi bahasa prokem itu tidak lebih baik lagi ketika dibawa ke dalam kelas. Begitu juga sebaliknya ketika kita berada di pasar, tak mungkin digunakan Bahasa Indonesia majemuk bertingkat," tukas wanita kelahiran Tarutung, Tapanuli Utara, 24 Februari 1950, ini.

•••

PENGASUH acara *Pembinaan Bahasa Indonesia* di TVRI ini, mengawali karirnya di Universitas Indonesia sebagai Sarjana Muda Fakultas Sastra tahun 1972. Dari Kampus Perjuangan Orde Baru ini, tahun 1975 dia menyelesaikan kuliah dengan meraih gelar Sarjana Sastra. Tiga tahun kemudian gelar *Master of Science* dari *University of Wisconsin*, Madison, Amerika Serikat diraihnya. Dan terakhir, dua tahun lalu, Riris meraih gelar *Doctor of Philosophy* universitas ini.

Pengalaman dosen tetap Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk mata kuliah Drama, Metode Penelitian Sastra dan Pengkajian Cerita Anak ini, memang tak diragukan lagi. Dari pengamatan yang dilihatnya, ia meragukan apakah orang Indonesia itu menghargai bahasanya sendiri. Sebab, yang dilihatnya, masyarakat tidak menganggap Bahasa Indonesia itu penting. Padahal, itu adalah gambaran dari pikiran, bobot keilmuan seseorang dan kepintarannya.

"Saya tidak tahu, mungkin ini adalah karena kesalahan pengajaran atau pemerintah. Tapi kita juga perlu mengetahui mungkin saja karena kita sering menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Toh, dengan Bahasa Indonesia yang buruk sekalipun kita masih bisa berkomunikasi. Jadi orang masih belum melihat gunanya berbahasa Indonesia yang baik itu," ungkap dosen luar biasa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini.

Ihwal perubahan nama asing, dosen di Lemhanas ini melihat hal itu bukan barang baru lagi tapi sudah merupakan proses yang begitu lama dikerjakan sejak kongres pertama Bahasa Indonesia. "Saya akan melihat lebih dulu jika ini dapat berlangsung terus, sebab yang diperlukan bukan hanya soal perubahan nama asing itu saja akan tetapi yang penting juga adalah untuk selalu bersikap konsisten," tegasnya.

Sejauh ini, ibu tiga anak ini melihat penggunaan Bahasa Indonesia

yang baik dan benar itu, tidak penting. Tugas berat memang ditujukan kepada Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang selalu mengingatkan agar kembali ke nilai dan kaedah tata bahasa yang benar agar bahasa ini tak dijadikan sebagai bahasa gado-gado.

Riris juga melihat pergeseran terjadi karena pengaruh globalisasi. Sehingga, ada anggapan pengguna Bahasa Indonesia dianggap kurang hebat jika dibandingkan dengan penggunaan Bahasa Inggris. Padahal, penggunaan Bahasa Inggris itu adalah hanya mengejar status.

Tugas Sastra Indonesia, tutur Riris, hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang bergelar sarjana dan kemudian melahirkan ahli-ahli bahasanya. Sedangkan lembaga yang betugas untuk membetulkan dan meluruskan semua kesalahan soal penggunaan Bahasa Indonesia adalah lembaga Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa," ujar Riris.

Jadi tampaknya, mempertahankan Bahasa Indonesia di zaman sekarang ini agaknya lebih sulit dari zaman dulu. Di mata pemerhati bahasa ini, dia melihat bahwa yang penting pada zaman sekarang ini adalah mendalami ilmu matematika, komputer dan Inggris. Bahasa Indonesia belum dilihat kegunaannya. Padahal, seharusnya, anjur istri Dr Ir FX Toha yang kini sebagai salah satu dosen di ITB, penggunaan Bahasa Inggris itu adalah untuk memperkaya khasanah Bahasa Indonesia.

"Saya memang tidak mampu untuk bekerja secara sendiri karena saya juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam hal kekuatan. Saya tidak bisa bicara keras karena saya tidak bisa berbuat banyak. Makanya saya bersyukur masih ada menteri (Wardiman-red) yang mau menggebrak soal penjajahan Bahasa Indonesia ini oleh bahasa asing," aku Riris.

•••

RIRIS Sarumpaet kini terbenam dalam berbagai obsesi. Di satu sisi ia ingin menjadi guru lagi tapi di sisi yang lain dia ingin berusaha secara maksimal agar Bahasa Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Demikian juga jika dia berhadapan dengan muridnya di kampus.

Sebagai dosen, wanita yang banyak memberikan ceramah dan lokakarya dalam berbagai bidang, dinilai tegas tak ubahnya seperti kebanyakan orang-orang yang dilahirkan di Sumatera Utara. Bukan hanya itu, selain ketegasan —yang mungkin tak disukai oleh mahasiswanya— Riris juga tidak *pelit* memberikan nilai A apabila memang mahasiswanya itu mempunyai kelebihan-kelebihan.

Bagaimana dengan di rumah? Sebagai ibu rumah tangga, Riris tidak melupakan tugas sehari-harinya. Dia harus menyiapkan makanan untuk suami dan ketiga anaknya dan jika sore harus harus mengantarkan anaknya les privat. Baginya pembagian waktu antara tugas di rumah dan tugas di kampus adalah sama pentingnya.

Pukul 06.45, Riris sudah berangkat ke Universitas Indonesia di Depok. Bila libur, pekerjaan rutinitas itu dihabiskannya dengan membaca buku dan mendengar musik di rumah, di samping masak bersama anggota keluarga. Praktis bagi anggota keluarga memang jarang keluar rumah jika hari libur.

Sebagai praktisi Bahasa Indonesia, Riris memang akan senang berlama-lama jika diwawancarai atau berbicara soal kebenaran dan kaedah tata bahasa. Karena itu, lewat keilmuan yang dimilikinya, Riris banyak mendapat tawaran untuk berbicara pada berbagai seminar dan lokakarya di samping juga duduk sebagai pengasuh di berbagai majalah dan penerbitan. Misalnya, dia pernah duduk sebagai pengasuh di majalah anak *Pelangi*, *Bobo*, dan *Gadis*. Di luar itu, dirinya juga banyak membantu instansi-instansi pemerintah dan swasta sebagai penilai penulisan buku pelajaran, juri penulisan bahkan pembacaan dan pementasan puisi, novel dan drama serta penulisan cerita anak.

■ *RAYA TUAH*

BAHASA INDONESIA-PENGAJARAN

Problematika pengajaran bahasa Indonesia baku di SMA

BAHASA Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional oleh para pemuda di seluruh Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu sudah menjadi milik bangsa dan negara Indonesia.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Bab XV, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi dan berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam hubungan resmi dan kenegaraan. Sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia pun berfungsi sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya kehadirannya sebagai medium komunikasi bangsa Indonesia, bahasa ini berkedudukan dan berfungsi sebagai bahasa nasional.

Proses sejarah telah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diangkat dari satu bahasa yang tidak berasal dari satu kelompok etnis yang dominan, melainkan satu bahasa yang telah populer di antara bangsa itu, ialah *lingua franca* di kawasan Nusantara. Bahasa yang telah populer ini tidak lain adalah bahasa Melayu. (Vreeland, 1975 : 84).

Sebagai *lingua franca* bahasa Melayu sangat berperan dalam hubungan antara pedagang dan pelaut, terutama di kalangan Kepulauan Nusantara dan Asia (Richard, 1872

Oleh Dandang A. Dahlan

: 9). Bahasa ini merupakan bahasa yang komunikatif dengan struktur dan kosakata yang tidak formal serta dapat digunakan dengan mudah oleh pemakainya. Ciri lain yang ada pada bahasa ini frekuensi pemakaiannya yang tinggi dalam hubungan informal. Dapatlah dikatakan bahwa pada saatnya *lingua franca* tidak lebih dari ragam basilek Melayu atau yang lebih terkenal dengan Melayu pasar (*Bazar Malay*). Pada saat ini *linguafranca* semacam ini merupakan kode yang kurang diwarnai ikatan norma gramatikal yang harus ada pada kode situasi formal. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *restricted code.*

Menilik asumsi di atas dalam perkembangan selanjutnya orang merasa perlu memiliki medium komunikasi untuk situasi yang lebih formal dan dikaitkan dengan tingkah laku bahasa. Dari sinilah pada hakekatnya kehadiran suatu variasi bahasa Melayu *lingua franca* diperlukan semacam variasi baku.

Di antara dialek Melayu yang ada, bahasa Melayu dialek Riau yang terpilih menjadi dialek baku. Dalam perkembangan selanjutnya, dialek Riau ini diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia. Walaupun akhirnya timbul berbagai variasi, namun demikian variasi yang dianggap baku yang diterima ke dalam bahasa Indonesia.

Untuk menumbuhkembangkan bahasa Indonesia sudah dibicarakan sejak Kongres II Bahasa Indonesia di Kota Medan tahun 1954. Salah satu keputusan yang terpenting ialah mengakui bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Walaupun demikian tidak semua bahasa daerah dan bahasa asing dapat dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing dapat dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, bila dirasa di dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata untuk kata-kata tersebut. Maka sangatlah menggembirakan digulirkannya peraturan pemerintah untuk mengindonesiakan kata-kata asing, yang kini sudah dimulai di Jakarta. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sekaligus dapat menyadarkan arti pentingnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi.

Pengajaran bahasa Indonesia

BETAPA pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat kita amati dalam isyarat yang tersirat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978. Dalam pembangunan di bidang kebudayaan dinyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaan bahasa secara baik dan benar.

Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia pada hakekatnya sejalan dengan jiwa ketetapan MPR, yang merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dalam kurikulum 1994, peng-

ajaran bahasa Indonesia mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada kurikulum 1984, mulai dari SD sampai SLTA.

Berkaitan dengan hal di atas, fungsi pengajaran bahasa Indonesia adalah, sebagai media untuk pelaksanaan pembinaan penguasaan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu : dimensi status dan dimensi korpus. Dimensi status mengacu pada pembinaan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Sedangkan dimensi korpus mengacu pada unsur-unsur materi bahasa, misalnya pembentukan istilah-istilah baru, pembakuan ejaan dan tanda baca, dan pembakuan sistem kode.

Dalam kurikulum SMU (SMA) 1994, secara umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara; (2) Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan; (3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan sosial; (4) Siswa menikmati, menghayati, memahami dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.

Memperhatikan butir-butir di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa, pendidikan bahasa Indonesia lebih ditekankan atau diutamakan pada sikap positif (rasa bangga) terhadap bahasa dan sastra nasional. Dalam hal ini segi efektif harus lebih didahulukan daripada segi psikomotorik dan keterampilan. Karena anak didik sebagai warga negara harus menjunjung tinggi bahasa nasionalnya, guna pembentukan sikap berbahasa dan sikap terhadap bahasa nasional. Sedangkan pemahaman dan keterampilan anak didik menggunakan bahasa akan menyusul bersama dengan proses pengajaran bahasa.

Kendala

BERBAGAI kendala yang dapat menghambat pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di SMA, sulit dipecahkan oleh guru bahasa Indonesia. Sehingga membawa dampak yang negatif terhadap pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia. Akibatnya, tujuan pengajaran tidak tercapai secara optimal. Hal ini bila dibiarkan sampai berlarut-larut, akibatnya bahasa Indonesia yang kita akui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, akan kehilangan pamornya di mata bangsanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi dari berbagai pihak.

Adapun kendala-kendala yang merupakan problem klasik dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, di antaranya :

1. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia lebih banyak berlangsung dalam situasi formal, yakni berlangsung di sekolah. Proses belajar mengajar dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu serta materi yang dibahaspun sangat terbatas.
2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan bahasa kedua yang dipelajari sesudah bahasa ibu. Hanya anak-anak didik di beberapa daerah saja yang mempunyai kebiasaan berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, seperti daerah Riau, Medan, Banjarmasin dan Padang. Sedangkan anak-anak tersebut sudah mempunyai pola-pola bahasa ibu mereka. Dengan demikian kadang-kadang terjadi suatu intervensi dalam belajar praktek belajar bahasa kedua dan ini merupakan salah satu kesukaran. Yang sudah pasti adalah penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama akan jauh lebih baik, dari pada penguasaan terhadap bahasa Indonesia baku.
3. Penguasaan terhadap bahasa Indonesia baku, tidak dapat menaikkan status sosial (prestise) atau memberikan nilai tambah. Lain halnya dengan orang yang menguasai bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, dianggap dapat mengangkat status sosial, karena yang bersangkutan dianggap mempunyai nilai lebih, baik di lingkungan masyarakat, maupun dalam mencari pekerjaan. Orang yang mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik di zaman globalisasi informasi sekarang ini, akan lebih mudah mendapatkan kesempatan kerja, dibandingkan dengan orang yang hanya menguasai bahasa indonesia. Hal ini tentunya dapat menurunkan motivasi siswa, terhadap pelajaran bahasa Indonesia, lebih-lebih bahasa baku, yang dianggapnya terlalu kaku.
4. Adanya anggapan mempelajari bahasa Indonesia itu mudah, dan merasa sudah menguasainya. Sehingga belajar bahasa Indonesia dianggap membuang-buang waktu, pikiran, tenaga dan biaya saja, karena itu lebih baik melakukan kegiatan yang lain. Seperti belajar matematika, bahasa Inggris, kimia dan kegiatan lain yang dianggapnya lebih berarti dan memberikan masa depan yang cerah.
5. Guru bahasa Indonesia dan guru mata pelajaran lain. Rata-rata guru bahasa Indonesia bekerja sendiri dalam membina dan memperhatikan kebahasaan siswa tanpa didukung guru-guru bidang studi yang lain. Apalagi kalau guru bahasa Indonesia itu kurang menguasai materi pelajaran, akibatnya pelajaran bahasa kurang menarik, karena apabila seorang guru kurang menguasai pelajaran, maka metode dan cara penyampaiannya kurang tepat. Hal ini tentunya akan mengurangi rasa simpati siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia.

Selain itu, proses pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia di lingkup pendidkan formal, tidak ada dukungan dari guru bidang studi lain. Tidak sedikit di antara mereka yang mau mengindahkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Karena mereka berasumsi pembinaan berbahasa yang baik itu bukan tugasnya, dan apabila mereka menggunakan bahasa baku dalam proses belajar mengajar, maka pelajaran yang disam-

paikannya kurang komunikatif. Sehingga terjadi semacam antagonisme antara pendidikan bahasa Indonesia dan berbagai hal. Keberadaan pendidikan bahasa Indonesia yang formal masih juga berhadapan dengan situasi bahasa di luar kelas. Pemakaian dialek yang cukup luas, khususnya dialek Jakarta, yang dianggapnya lebih keren, bahasa yang digunakan para pedagang, terutama keturunan Cina, ikut pula mendorong penyimpangan dari arah pola baku.

Fenomena di atas akan terus berlangsung, terus menghimpit dan mempecundangi pendidikan bahasa Indonesia baku, apabila komponen-komponen yang terlibat tidak bisa mengendalikan diri. Semoga dengan adanya kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tahun 1995, akan memberikan angin segar, khususnya bagi guru bahasa Indonesia dan masyarakat yang menjunjung dan membanggakan bahasanya.

Penutup

MEMPERHATIKAN hal-hal di atas, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sampai saat ini pendidikan bahasa masih mengalami hambatan, baik kesukaran di dalam proses belajar mengajar secara teknis. Hambatan efektif berupa sikap negatif terhadap bahasa baku, yang dianggap tidak dapat menambah status dan peran serta tidak pulau substraktif. Artinya tidak akan mengurangi status dan peran seseorang.
2. Adanya saingan yang berat dari dialek Jakarta yang lebih sederhana strukturnya.
3. Keluwesan bahasa Indonesia yang memungkinkan kecerobohan menerima unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing. (2.8).

Penulis adalah guru SMAN 7 Padang, Sumbar.

Angkatan Bersenjata, 8 Mei 1995

Ebtanas: Studi Kasus tentang Bahasa Indonesia

Sebuah Catatan Menyambut Hari Pendidikan Nasional



Dr. A Chaedar Alwasilah

Ketua Balai Bahasa IKIP Bandung dan Konsultan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Dikbud di Jakarta

MULAI 24 April 1995 lalu secara serempak para siswa SLTA mengikuti EBTANAS, yakni sebagai alat untuk mengukur keberhasilan belajar. Berdasarkan skor EBTANAS, kita dapat mengetahui posisi (baca: penguasaan) seorang siswa akan materi suatu bidang studi dibadingkan dengan siswa lainnya. Lebih dari itu, dengan menghitung dan membandingkan nilai rata-rata yang diperoleh, kita dapat mengetahui posisi kelas, sekolah, kabupaten dan bahkan provinsi dalam peta pendidikan nasional. Akan nampaklah kelas, sekolah, kabupaten, dan provinsi yang kurang atau lebih berhasil dibandingkan dengan yang lainnya.

Fungsi Ebtanas

Ebtanas sejak 1980-an merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional kita. Sedikitnya ada enam fungsi yang diperankan oleh sebuah tes. *Pertama* untuk menentukan kesiapan siswa untuk mengikuti program pengajaran tertentu. Tes kasarnya memisahkan dua kelompok yang siap atau tidak siap untuk mengikuti program tersebut, misalnya masuk PTN. *Kedua*, untuk mengklasifikasikan siswa mengikuti program tertentu. Berdasarkan hasil tes, kita dapat menempatkan sekelompok siswa mengikuti kelas tertentu.

Ketiga, untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa. Berdasarkan skor tes, kita dapat membuat profil performansi siswa dalam bidang studi tertentu. *Keempat*, untuk mengukur potensi siswa untuk belajar. *Kelima*, untuk mengukur sejauh mana tujuan instruksional sudah dicapai siswa. *Keenam*, untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran. Pada dasarnya Ebtanas dimaksudkan untuk memenuhi tiga fungsi, yakni sertifikasi kelulusan siswa, seleksi siswa, dan kontrol kualitas khususnya bagi pembuat kebijakan pendidikan.

Kriteria tes yang baik

Ketiga fungsi di atas akan tercapai bila tes disusun memenuhi tiga syarat, yaitu (1) mudah atau praktis untuk diteskan (2) handal atau terpecaya, dan sahih yakni tepat untuk mengetes apa yang dites. Ketiga syarat ini satu sama lain saling terkait, sehingga pelanggaran akan salah satunya akan mengurangi bobot syarat lainnya. Obyektivitas suatu alat ukur hasil belajar akan tercapai manakala ketiga syarat tersebut dipenuhi

Tes yang baik dicirikan antara lain oleh keterpolaan bukannya keacakan dalam respon siswa terhadap soal-soal tes. Akan lebih banyak siswa menjawab benar soal yang mudah ketimbang soal yang sulit. Bila terjadi banyak siswa yang tidak dapat menjawab soal mudah atau banyak siswa yang dapat menjawab soal sulit, maka soal-soal tersebut patut diragukan kesahihan, obyektivitas, dan kehandalannya. Bila ini terjadi, alangkah tidak adilnya tes. Ketidaktepatan sertifikasi kelulusan, kesalahan

seleksi siswa untuk pendidikan lanjutan, dan kekeliruan pengambilan keputusan mungkin terjadi hanya karena ketidakcermatan pengkalimatan butir-butir soal.

Bahasa Indonesia yang baik

Seperti disebut di atas, Ebtanas berfungsi sertifikasi kelulusan, seleksi siswa, dan pengendali kualitas pendidikan. Dengan kata lain, Ebtanas ikut menentukan nasib siswa, nasib sekolah, dan nasib bangsa. Karnea Ebtanas itu sendiri diteskan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (BI), maka kemampuan berbahasa tulis para penyusun Ebtanas sejauh tertentu menentukan nasib anak bangsa. Sebagai contoh, cermatilah contoh kalimat yang terdapat dalam soal BI dan IPS Ebtanas berikut ini: (1) *Hutan adalah merupakan tempat tumbuhnya pohon-pohon dan rumput-rumput..... dst.* dan (2) *Salah satu contoh dari akibat perbuatan yang tidak menghormati orang lain, akan menimbulkan....*

Contoh pertama memperlihatkan gejala berlebihan (*redundancy*), sedangkan contoh kedua menunjukkan lemahnya logika. Masih banyak jenis kesalahan lain, namun pada garis besarnya kesalahan itu dapat dikategorikan seperti tampak dalam tabel 1.

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kekeliruan dalam menggunakan kata merupakan jenis kekeliruan yang paling banyak muncul pada Ebtanas, diikuti oleh kekeliruan penggunaan struktur kalimat dan cacat soal. Kekeliruan penggunaan tanda baca juga relatif banyak ditemukan. Dilihat dari bidang studi yang dikaji ternyata PMP dan IPS menunjukkan jumlah kekeliruan yang relatif lebih banyak daripada bidang studi lainnya. Jumlah kekeliruan yang terkecil ditemukan pada bidang studi Matematika. Tafsiran ini juga berlaku jika kita melihat rasio jumlah kekeliruan terhadap jumlah soal pada masing-masing bidang studi.

Tabel 1
Kekeliruan Penggunaan Bahasa Indonesia pada Soal Ebtanas 1993/1994

Bidang Studi & juml Soal	B.Ind 45	PMP 45	IPS 45	IPA 45	Matika 35	Juml
Kekeliruan						
a. Kata	13	19	14	8	2	56
b. Frase	0	0	0	0	0	0
c. Kalimat	2	10	14	9	2	37
d. Tanda baca	6	11	5	4	0	26
e. Cacat soal	5	18	6	4	4	37
f. Angka	2	0	0	0	0	2
g. Lain-lain	0	0	1	4	0	5
Jumlah	28	58	40	29	8	162

Pola jawaban siswa

Dalam banyak hal, soal yang baik ditandai oleh peluang lebih besar bagi siswa yang pandai daripada siswa yang kurang pandai dalam menjawab soal tes dengan benar. Soal-soal yang pola jawabannya bersifat acak akan ditandai oleh statistik soal yang kurang baik, seperti daya bedanya rendah atau bahkan negatif. *Modified caution index* (MCI) merupakan salah satu ukuran dalam teori klasik tentang keacakan pola jawaban siswa terhadap suatu soal relatif terhadap soal-soal lainnya pada tes yang bersangkutan. Soal yang pola jawabannya acak akan memiliki nilai MCI yang besar, dan sebaliknya.

Tabel 2 menyajikan jumlah soal yang pola jawabannya relatif acak dilihat dari jenis kekeliuruan penggunaan BI dalam soal yang bersangkutan. Jumlah soal untuk setiap bidang studi yang pola jawabannya acak terdapat pada kolom 2 sampai dengan kolom 6. Angka dalam kurung menunjukkan jumlah soal pada bidang studi yang bersangkutan yang mengandung jenis kekeliruan terkait.

Pada tabel 2 terlihat bahwa kekeliruan penggunaan kata berkontribusi paling besar terhadap pola jawaban soal yang acak. Hampir setengah (45%) dari soal yang mengandung kekeliruan penggunaan kata menunjukkan pola jawaban yang acak. Kekeliruan struktur kelimat dan penggunaan tanda baca juga menunjukkan kontribusi yang substansial. Sebanyak 38% soal yang mengandung kekeliruan dalam struktur kalimat dan tanda baca juga menunjukkan pola jawaban acak yang hampir sama, yakni sekitar 32%.

Tampak bahwa kekeliruan penggunaan kata, struktur kalimat, dan tanda baca dalam soal tes memberikan dampak yang tidak lebih ringan daripada soal yang cacat terhadap keacakan pola jawaban siswa. Secara keseluruhan, nampak bahwa sekitar 40% soal tes yang mengandung kekeliruan penggunaan BI menunjukkan pola jawaban yang acak. Jika kaitan antara kekeliruan penggunaan BI dengan keacakan pola jawaban siswa di-bedakan berdasarkan bidang studi, maka terlihat jelas bahwa bidang studi BI paling menonjol. Hampir 70% soal yang mengandung kekeliruan penggunaan BI pada soal tes bidang studi BI menunjukkan pola jawaban yang acak. Hal ini berarti bahwa

Tabel 2
Jumlah soal yang Pola Jawabannya Acak pada Tes Ebtanas karena Kekeliruan Bahasa

Kekeliruan	B Ind	PMP	IPS	IPA	Matika	Juml
a. Kata	9 (13)	5 (19)	7 (14)	4 (8)	0 (2)	25 (56)
b. Frase	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
c. Kalimat	2 (0)	6 (10)	4 (14)	1 (9)	1 (2)	14 (37)
d. Tanda baca	4(6)	3 (11)	2 (5)	1 (4)	0 (0)	10 (26)
e. Cacat soal	2 (5)	6 (18)	1 (6)	0 (4)	3 (4)	12 (37)
f. Angka	2(2)	0 (0)	0(0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)
g. Lain-lain	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (4)	0 (0)	1 (5)
Jumlah	19 (28)	20 (58)	15 (40)	6 (29)	4 (80)	64 (162)

kekeliruan penggunaan BI dalam soal tes B memberikan dampak negatif yang palin nyata terhadap keacakan pola jawaban siswa

Catatar

Apa yang dilaporkan di sini merupakar bagian kecil dari penelitian ihwal penggunaar BI dalam soal Ebtanas yang masih dalar proses penyelesaian. Dari uraian di atas dapat dikemukakan tiga hal: (1) para penyusun (dan lembaga pengembangan) tes mempunyai tanggungjawab moral untuk menyusun soal-soal Ebtanas yang baik, antara lain keharusan menggunakan BI yang baik dan benar; (2) penulisan tes yang baik mest melibatkan pihak yang betul-betul mampu berbahasa Indonesia tulis dan bekerja sama dengan pihak yang memahami evaluasi dan pengukuran; dan (3) penyelenggaraan tes Ebtanas perlu ditangani secara profesional; yaitu terencana, melembaga, otonom, dan mendapat dukungan semua pihak.***

Media Indonesia, 2 Mei 1995

Menpen Harmoko: Bahasa Indonesia Pemersatu Bangsa

Jakarta, Pelita

Secara universal, bahasa adalah alat berkomunikasi dan menentukan budaya bangsa. Manusia sebagai makhluk sosial bisa eksis dan berkembang karena mempunyai bahasa. Dalam konteks itu, bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa, karena bangsa Indonesia dapat eksis dan berkembang.

Hal tersebut ditegaskan Menpen H Harmoko di ruang kerjanya Selasa (2/5) pagi ketika menerima 5 orang pengurus Pusat Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) yang dipimpin ketua umumnya Drs Andi Mappi Sammeng, yang juga Dirjen Pariwisata Depparpostel. Kedatangan pengurus HPBI tersebut untuk melaporkan hasil Munas VI HPBI di Ujungpandang dan memperkenalkan susunan pengurus HPBI periode 1994-1997.

Menurut Harmoko, kita harus bersyukur karena 17 tahun sebelum memproklamirkan kemerdekaan, kita sudah menyatakan lebih dulu menyatakan bahwa kita berbahasa satu yakni Bahasa Indonesia.

Untuk itu, lanjut Harmoko, memupuk dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah kewajiban kita bersama. Menggunakannya secara baik dan benar adalah salah satu cara agar bahasa Indonesia tetap hidup dan lebih berkembang. "Untuk itu pada kesempatan ini saya mengimbau HPBI agar mampu menciptakan iklim agar masyarakat tergerak dan terbiasa menggunakan bahsa Indonesia secara baik dan benar," sambungnya.

Usai diterima Menpen, Andi Mappi Sammeng menjelaskan, sesuai program HPBI akan menjadi pendorong utama dan bila diperlukan akan menjadi kelompok pendesak untuk penggunaan bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan itu HPBI sudah menyusun program kerja, antaranya mengadakan gerakan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di tempat-tempat umum, seperti papan nama, iklan, dan petunjuk di jalan-jalan. Selain itu membina kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan program jangka panjang, mengusahakan sistem dan metode pengajaran bahasa Indonesia yang efektif. "Tapi untuk itu HPBI mengharapkan dukungan semua pihak, terutama instansi seperti Depdagri, Deppen, Depdikbud, Menpora, DPR, Ormas, serta tokoh-tokoh masyarakat," ujar Andi.

Persatuan melalui film

Siangnya di tempat yang sama, Menpen H Harmoko ketika menerima 6 orang Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PP PPFI) dipimpin Turino Junaidy, menegaskan bahwa film selain mengandung unsur teknis, seni, dan bisnis, juga mempunyai fungsi menyebarluaskan informasi guna mendukung makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena film mempunyai fungsi yang strategis, lebih jauh Harmoko mengharapkan agar dalam Kongres PPFI bulan September mendatang, yang dilaporkan oleh Turino Cs, tidak keluar dari komitmen nasional dimaksud. Juga Menpen mengharapkan agar Festival Film Asia Pasific ke-40 di Indonesia nanti berlangsung sukses dan tetap dapat menampilkan citra Indonesia.

Menyinggung kondisi film nasional di bioskop-bioskop tidak begitu cerah, Menpen mengharapkan agar para produser film Indonesia dapat memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Misalnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman atau penentuan cerita yang lebih sesuai dengan keinginan khalayak.

Menurut Turino, FFAP ke-40 direncanakan berlangsung tanggal 22-27 Juli 1995 di Balai Sidang Jakarta. **(ris)**

Pelita, 3 Mei 1995

Menpen: Bangsa Indonesia tetap Bersatu Karena Bahasa Indonesia

Jakarta, (Buana) -- Secara universal, bahasa adalah alat berkomunikasi dan menentukan budaya bangsa, diman manusia sebagai makhluk sosial bisa eksis dan berkembang karena mempunyai bahasa.

Demikian pula bangsa Indonesia dapat eksis dan berkembang bahkan tetap bersatu karena mempunyai bahasa Indonesia.

Untuk itu kita bersyukur karena 17 tahun sebelum memproklamirkan kemerdekaan, kita sudah menyatakan lebih dulu bahwa kita berbahasa satu: Bahasa Indonesia.

Hal itu dikatakan Menteri Penerangan H. Harmoko di ruang kerjanya Selasa (2/5) ketika menerima lima orang Pengurus Pusat Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) yang dipimpin Ketua Umumnya Drs. Andi Mappi Sammeng yang juga Dirjen Pariwisata Depparpostel. Mereka bermaksud melaporkan hasil Munas VI di Ujung Pandang dan pemperkenalkan susuan Pengurus HPBI periode 1994-1997.

Oleh karenanya, lanjut Menpen, memupuk dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah kewajiban kita bersama. Menggunakannya secara baik dan benar adalah satu-satunya jawaban agar bahasa Indonesia tetap hidup dan lebih berkembang.

Untuk itulah pada kesempatan tersebut Menpen Harmoko menghimbau Himpunan Pembina Bahasa Indonesia mampu menciptakan iklim agar masyarakat tergerak dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Seusai diterima Menpen, Ketua Umum HPBI Drs. Andi Mappi Sammeng menjelaskan, sesuai program, HPBI akan menjadi pendorong utama dan apabila diperlukan menjadi kelopok pendesak untuk penggunaan bahasa Indonesia.

Untuk itu HPBI telah menyusun program kerja diantaranya mengadakan gerakan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di tempat-tempat umum seperti papan nama, iklan dan petunjuk di jalan-jalan.

Selain itu membina kerjasama dengan media cetak dan elektronika untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Program jangka panjangnya mengusahakan sistem dan metode pengajaran yang efektif untuk pernguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ditambahkan, untuk merealisir program tersebut, HPBI mengusahakan keikutsertaan dan dukungan semua pihak/ instansi seperti Depdagr, Deppen, Dekdikbud, Menpera, DPR, Ormas, tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya. **(w-sun)**

Beriat Buana, 3 Mei 1995

SANGGAR BAHASA

Menyelusuri Kata Menelusuri

Setiap Rabu, mulai hari ini Suara Karya *menyajikan karangan mengenai bahasa, baik bahasa nasional, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Berkenaan dengan itu kami menerima sumbangan karangan dari para peminat dan pemerhati bahasa. Dikehendaki karangan yang diketik dengan dua spasi, dengan jumlah kata 550 sampai dengan 750, atau sekitar 3-4 halaman kertas kuarto. Sebagai pembuka kami sajikan tulisan Ayatrohaedi.*

Redaksi.

Hampir setiap hari kita membaca atau mendengar kalimat, "Mereka sibuk *menelusuri* kesemerawutan pemberangkatan jemaah haji tahun ini". Kata *menelusuri* pada kalimat itu bermakna 'mengusut, menelaah, menyelidiki'.

Jika kita buka *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi kedua cetakan kedua (1993), akan kita temukan *jejar* (= entri, kata kepala), *telusur* di halaman 1029. Menurut KBBI, ada dua makna kata itu, yaitu (1) 'berjalan sepanjang tepi (sungai, jalan, dsb)'; dan (2) 'menelaah; menjajaki; mengusut'. Dalam pada itu, kata *penelusuran* diberi makna 'penelaahan, penjajakan'.

Keterangan itu tidak salah, jika hanya bersifat perian mengenai apa makna dan bagaimana kata itu digunakan. Dari kedua makna itu, makna yang pertama adalah makna yang bersifat harfiah, yang diperjelas dengan contoh, *ia menelusuri sungai itu sampai ke hulu.* Makna yang kedua lebih bersifat "kiasan", menggambarkan kegiatan yang dianggap memiliki kesamaan, yaitu "menjalani atau menempuh".

Namun keterangan itu akan menjadi kurang lengkap, jika kita didera rasa ingin tahu, apa kira-kira kata yang menjadi dasar terbentuknya kata telusur itu. Apalagi jika diperhatikan KBBI cukup banyak mencantumkan jejar yang dapat lebih lanjut dilacak asal-usulnya.

Sebagaimana sudah dianggap sebagai pengetahuan umum, kata dasar bahasa (-bahasa) Indonesia pada umumnya terdiri atas kata bersuku dua. Jika ada kata yang bersuku lebih dari dua yang tidak dapat dikembalikan kepada asalnya yang bersuku dua, patut "dicurigai" keasliannya. Jika kata itu milik pribumi, hampir dapat dipastikan bahwa kata bersuku tiga dapat dikembalikan kepada asalnya yang bersuku dua yang memperoleh imbuhan, sedangkan yang bersuku empat dapat "dipecah" menjadi dua kata. Untuk kelompok kedua, contohnya adalah *matahari, bilamana, kadangkala,* dan *bagaimana.*

Dalam pada itu, kata-kata bersuku tiga umumnya dapat "dikembalikan" ke asalnya yang bersuku dua. KBBI antara lain mencantumkan kata-kata *telangkup* (h. 1026) 'telungkup', sementara jejar *tangkup* (h. 1007) antara lain bermakna 'menelungkup'. Kata lain yang sejenis adalah *telapak* (h. 1027) dengan imbangannya *tapak* (h. 1009–10), *telekap* (h. 1027) dengan *tekap* (h. 1023), dan *telunjuk* (h. 1028) dengan *tunjuk* (h. 1086).

Berdasarkan itu, tentu tidak salah jika kita juga mengharapkan ada kemungkinan bahwa jejar *telusur* itu akan ada imbangannya berupa jejar *tusur.* Namun sayang, kata *tusur* sama sekali tidak tercantum, baik sebagai jejar maupun sukujejar atau dalam taraf yang lebih rendah sekalipun.

Kenyataan itu menyebabkan kita menduga ada kemungkinan lain, yaitu kesalahan pembentukan kata, entah sejak kapan. Kecenderungan untuk menduga demikian cukup besar, apalagi mengingat bahwa kata *telusur* itu bermakna 'berjalan sepanjang tepi'.

Dalam tulisan lama, katakanlah yang berasal dari sebelum tahun enampuluhan, kata yang biasanya kita temukan adalah *menyusur(i) pantai* yang bermakna 'berjalan sepanjang tepi pantai'. Tidak pernah ada ungkapan atau perkataan *menelusur(i) pantai* sebagaimana dijadikan contoh dalam *KBBI.* Kata *susur* tercantum sebagai jejar dalam KBBI (h. 982) dengan makna 'pinggir atau tepi sebelah luar', sedangkan kata *menyusur* bermakna 'berjalan (berlayar dsb) sepanjang; menuruti bagian tepi', dan kata *menyusuri* bermakna 'menuruti bagian tepi dari...'. Hanya, aneh sekali, tidak ada kata *penyelusuran* di bawah jejar *susur* !

Mengikuti pola bentukan *tunjuk* menjadi *telunjuk* atau *tapak* menjadi *telapak,* sangat diharapkan dari kata *susur* ini pun akan muncul kata *selusur,* yang memang tercantum sebagai jejar (h. 902), walaupun dengan makna yang berbeda, 'menggelincir, meluncur'.

Dalam suasana kegairahan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ada baiknya jika kita mulai kembali "*menyelusuri*" sebab - musabab terjadinya kesalahan bentukan dari *susur* ke *selusur* yang dapat dilacak, menjadi *telusur* yang tidak jelas silsilahnya. * * * **(Ayatrohaedi)**

Suara Karya, 3 Mei 1995

Ada Kegenitan Dalam Berbahasa Indonesia

"Saya Heran Masih Ada yang Gunakan Bahasa Asing"

Jakarta, Selasa, Mdk Kampanye dan pembudayaan bahasa Indonesia harus terus dilakukan sebagai gerakan nasional karena sekitar 40 juta orang Indonesia sampai saat ini belum berbahasa Indonesia, kata ahli bahasa Prof Dr Anton Moeliono di Jakarta, Selasa.

"Sangat memprihatinkan, ternyata 17 persen dari 180 juta penduduk Indonesia belum berbahasa Indonesia. Mereka menjadi manusia marjinal yang tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan setelah 50 tahun Indonesia merdeka," katanya dalam diskusi tentang "Peranan Pers Dalam Pembudayaan Bahasa Indonesia" dengan wartawan *LKBN Antara*.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi I *LKBN Antara*, AJF Makiwawu itu, Prof Anton Moeliono menegaskan bahwa 40 juta orang itu karena tidak bisa berbahasa Indonesia menemui kesulitan untuk menelpon, menonton film, dan membaca buku-buku atau majalah berbahasa Indonesia.

"Karena sulit berkomunikasi dalam bahasa Indonesia mereka juga kesulitan untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau menikmati hasil-hasilnya," katanya.

Menurut mantan Kepala Pusat Bahasa itu, pers sangat berperanan dalam kampanye dan pembudayaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu.

Prof Anton merasa heran karena masih ada pers yang menulis, "Acara itu dilaksanakan di Jakarta Hilton Convention Centre" dan bukan "Acara itu dilaksanakan di Balai Sidang Hilton Jakarta".

"Saya juga heran mengapa jemaah calon haji yang tidak bisa berangkat disebut 'waiting list', bukan jemaah calon haji 'daftar tunggu'. Ini pasti karena ada kegenitan dalam berbahasa," katanya.

Ditertibkan

Mengenai maraknya penggunaan bahasa asing untuk nama-nama perusahaan atau permukiman, Anton Moeliono mengatakan, pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menertibkannya. Alasan nama-

"Ini bukan tugas Pusat Bahasa saja," tegasnya.

Menurut dia, pers dan media massa harus ikut menciptakan kebanggaan menjadi bangsa dan orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, katanya, sulit dipahami jika pers masih terus menulis kata-kata asing dalam berita dan tulisannya.

nama berbau asing akan menarik perhatian pembeli, tidaklah tepat, sebab yang menentukan laris tidaknya suatu perumahan adalah lokasinya dan bukan namanya.

"Meskipun namanya 'paradise' (surga, red), kalau terus-terusan kebanjiran, ya tidak laku. Sebaliknya, meski namanya Pondok Cabe, kalau lokasinya strategis, pasti jadi rebutan pembeli," katanya.

Prof Anton juga menyindir perilaku orang Indonesia yang suka melayani orang asing dengan mengikuti berbahasa asing jika mereka sedang bertamu ke Indonesia.

"Mereka berada di Indonesia, jadi harus belajar berbahasa Indonesia. Kalau kita terus ikut-ikutan berbahasa asing, kapan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri?" demikian Anton Moeliono.

Mengenai semrawutnya penggunaan akronim dan singkatan, Prof Anton menunjuk pada kebiasaan orang Indonesia yang cenderung mau menjelaskan secara mendetail suatu hal, sehingga tidak irit dalam berbahasa.

Sebagai contoh disebutkan singkatan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. "Mengapa yang pertama tidak disebut saja Panitia Perburuhan Pusat dan yang kedua Departemen Transmigrasi saja," katanya.

Merdeka, 3 Mei 1995

40 Juta Orang Indonesia Belum Berbahasa Indonesia

Jakarta, (Sinar Pagi).

Kampanye dan pembudayaan bahasa Indonesia harus terus dilakukan sebagai gerakan nasional karena sekitar 40 juta orang Indonesia sampai saat ini belum berbahasa Indonesia, kata ahli bahasa Prof Dr Anton Moeliono di Jakarta, Selasa.

"Sangat memprihatinkan, ternyata 17 persen dari 180 juta penduduk Indonesia belum berbahasa Indonesia. Mereka menjadi manusia marjinal yang tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan setelah 50 tahun Indonesia merdeka," katanya dalam diskusi tentang "Peranan Pers Dalam Pembudayaan Bahasa Indonesia" dengan wartawan.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi I LKBN ANTARA, AJF Makiwawu itu, Prof Anton Moeliono menegaskan bahwa 40 juta orang itu karena tidak bisa berbahasa Indonesia menemui kesulitan untuk menelpon, menonton film, dan membaca buku-buku atau majalah berbahasa Indonesia.

"Karena sulit berkomunikasi dalam bahasa Indonesia mereka juga kesulitan untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau menikmati hasil-hasilnya," katanya.

Menurut mantan Kepala Pusat Bahasa itu, pers sangat berperanan dalam kampanye dan pembudayaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu.

"Ini bukan tugas Pusat Bahasa saja," tegasnya.

Menurut dia, pers dan media massa harus ikut menciptakan kebanggaan menjadi bangsa dan orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, katanya, sulit dipahami jika pers masih terus menulis kata-kata asing dalam berita dan tulisannya.

Prof Anton merasa heran karena masih ada pers yang menulis "Acara itu dilaksanakan di Jakarta Hilton Convention Centre" dan bukan "Acara itu dilaksanakan di Balai Sidang Hilton Jakarta".

"Saya juga heran mengapa jemaah calon haji yang tidak bisa berangkat disebut 'waiting list', bukan jemaah calon haji 'daftar tunggu'. Ini pasti karena ada kegenitan dalam berbahasa," katanya.

SEDANG DITERTIBKAN

Mengenai maraknya penggunaan bahasa asing untuk nama-nama perusahaan atau permukiman, Anton Moeliono mengatakan, pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menertibkannya. Alasan nama-nama berbau asing akan menarik perhatian pembeli, tidaklah tepat, sebab yang menentukan laris tidaknya suatu perumahan adalah lokasinya dan bukan namanya.

"Meskipun namanya 'paradise' (surga, red), kalau terus-terusan kebanjiran, ya tidak laku. Sebaliknya, meski namanya Pondok Cabe, kalau lokasinya strategis, pasti jadi rebutan pembeli," katanya.

Prof Anton juga menyindir perilaku orang Indonesia yang suka melayani orang asing dengan mengikuti berbahasa asing jika mereka sedang bertamu ke Indonesia.

"Mereka berada di Indonesia, jadi harus belajar berbahasa Indonesia. Kalau kita terus ikut-ikutan berbahasa asing, kapan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri?" demikian Anton Moeliono.

Mengenai semrawutnya penggunaan akronim dan singkatan, Prof Anton menunjuk pada kebiasaan orang Indonesia yang cenderung mau menjelaskan secara mendetail suatu hal, sehingga tidak irit dalam berbahasa.

Sebagai contoh disebutkan singkatan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. "Mengapa yang pertama tidak disebut saja Panitia Perburuhan Pusat dan yang kedua Departemen Transmigrasi saja," katanya. (Ant/Eko)

Sinar Pagi, 3 Mei 1995

Aspek kebahasaan dalam era globalisasi

Oleh Deddy Daryan DB

ERA globalisasi yang senantiasa mendapat pembahasan dari berbagai sudut dan aspek dewasa ini kita terima sebagai suatu kenyataan sekaligus tantangan. Bagaimana kita mampu memanfaatkan era globalisasi ini bagi kemajuan dan perubahan bangsa kita ke arah yang lebih progresif. Untuk mencapai ini diperlukan kesiapan kita dalam berbagai bidang, agar kita ikut aktif dalam percaturan globalisasi tersebut.

Ciri utama globalisasi sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya dapat kita lihat pada hubungan antar negara, antar bangsa, antar masyarakat dan bahkan antar individu dalam berbagai aspek kehidupan saling terkait, yaitu paling tidak di bidang ekonomi, sosialbudaya. Dengan kata lain, antara dunia yang satu dengan dunia yang lain saling terkait dan saling tergantung. Kemudian akibat dari saling terkait itu, globalisasi juga berciri-kan makin luas dan melebarnya hubungan spesifik manusia, sebut saja perluasan hubungan produsen dan konsumen, yang tidak terlepas dari berbagai pengaruh sosial-budaya, ekonomi, politik dan bahkan kekuatan militer negara lain.

Akibat derasnya hembusan globalisasi yang memang ditun-[illegible] dewasa ini, setidaknya ada beberapa pin penting dalam kerangka antisipasi kesiapan kita dalam menghadapi sekaligus memanfaatkan era globalisasi yang kian semakin transparan keberadaannya.

Pertama, tidak ada suatu negara atau bangsa ayng terbebas dari pengaruh bangsa lain, hampir di semua aspek kehidupan.

Kedua, karena masing-masing negara memiliki identitasnya masing-masing, maka perlunya mengantisipasi perubahan dan pengaruh globalisasi itu agar tidak menjadi dampak negatif yang fatal.

Keempat, makin dituntut oleh suatu bangsa aspek persaingan yang semakin ketat, terutama dalam bidang ekonomi, yang ditandai dengan sistem pertukaran barang dan jasa. Artinya masing-masing negara harus mengutamakan unsur mutu atau kualitas, yang lebih kita kenal dengan apa yang disebut dewasa ini keunggulan komparatif.

Menyimak uraian singkat di atas, globalisasi tidak hanya kita pandang sebagai tantangan dan [illegible] sia, tetapi juga sebuah rahmat dalam arti bahwa era globalisasi sebagai peluang dalam meningkatkan segala ragam aspek kehidupan, yang notabene bagi kesejahteraan dan kemaslahatan segenap lapisan masyarakat.

***

SALAH satu kesiapan kita dalam rangka menghadapi dan memanfaatkan peluang globalisasi tersebut adalah aspek kebahasaan. Bahkan menurut DR. Untung Iskandar (1992) jauh lebih penting dari penguasaan iptek. Sebab aspek kebahasaan akan mampu membedah wilayah kultural suatu bangsa, dimana aspek kultural ini bagian yang amat penting untuk menjalin hubungan yang harmonis.

Tuntutan akan penguasaan bahasa asing ini adalah juga tuntutan semua bangsa di dunia. Di sini kita tidak lagi membicarakan bahasa apa-siapa atau bagaimana dalam kegunaannya yang spesifik. Bahasa tidak lagi kita pandang dalam pengertian sempit, yang hanya kita khususkan dalam manfaat dan makna tertentu, hanya pada permasalahan yang spesifik saja, maka kita tidak akan pernah beranjak dari persoalan yang paling mendasar. Misalnya, hanya bahasa Inggris saja yang mampu unggul dalam sistem kemajuan dna perubahan. Sedangkan bahasa lain, tidak. Anggapan ini yang saya maksudkan sempit. Bahasa harus kita pahami sebagai sarana komunikasi yang utuh, dan tidak menganggap sesuatu bahasa lebih unggul dengan bahasa yang lain.

Memang, kecenderungan di dunia internasional, hanya bahasa Inggris saja yang dianggap berperan. Sebenarnya peranan bahasa Inggris sebagai *international language* bukan karena hanya bahasa Inggris saja yang mampu mengakomodir segala bentuk pencarian dan penemuan serta penguasaan iptek, akan tetapi peranan bahasa Inggris di dunia internasional lebih dominan disebabkan oleh faktor historis. Pada masa lampau lebih dari dua pertiga bagian bumi ini pernah dijelajahi oleh Eropa Barat, khususnya bangsa Inggris di

Oleh karena itu, dewasa ini dan masa-masa mendatang tuntutan mempelajari bahasa, tidak hanya terfokus dalam bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya, yang kita pandang cukup penting dalam percaturan globalisasi. Sebab, globalisasi telah begitu rupa membuat antar negara dan bangsa saling terkait, dan saling tergantung.

Di samping itu, semangat globalisasi memang telah diisyaratkan secara monumental dalam ajaran agama Islam. Kita lihat saja misalnya dalam Al Qur an ada pertanyaan yang mengharuskan kita sebagai manusia untuk saling mengenal *(litaarafu)*, lalu berjalanlah di muka bumi *(sirru fil ardl)*, kemudian kita baca juga

yang artinya bertebaranlah di muka bumi *(fanta sirru fil ardl)*. Makna pengertian itu, mengharuskan kita untuk mampu mengetahui sesuatu bahasa.

***

DALAM konteks globalisasi di atas, dewasa ini ada pula kecenderungan suatu negara (bangsa) untuk lebih unggul dengan nguasaan iptek. Dengan predikat unggul ini suatu bangsa mengharapkan akan mampu membuat suatu bangsa lain semakin terkait dan tergantung dengan bangsa yang memiliki keunggulan tersebut.

Kecenderungan pasca perang dingin seperti ini, memang bisa diduga tujuannya untuk mendominasi terutama ketergantungan dalam bidang ekonomi bagaimana hubungan bahasa dalam hal ini. Hal ini dapat kita jelaskan, bahwa dalam sistem kebudayaan, faktor bahasa menurut para pakar merupakan salah satu identitas dan sekaligus bagian dari jiwa dan semangat bangsa dalam mewarnai corak kehidupannya, di samping memang faktor lain seperti faktor geografis. Keunggulan bangsa Jepang dalam bidang iptek dan etos kerjanya, memang selaras dengan karakteristik bahasa Jepang, yaitu ada pola keseimbangan antara pola pikir dan pola tindak. Oleh karena itu bangsa Jepang tidak asyik saja berpikir dan merenung, tetapi juga bagaimana mewujudkannya menjadi sebuah tindakan yang nyata. Hasilnya, seperti yang kita

Oleh karena itu, dalam hubungan antar bangsa, faktor mempelajari bahasa tidak saja sebagai sarana komunikasi *an sich*, tetapi juga sekaligus mempelajari watak bangsa yang apabila positip harus kita transformasikan dalam sistem kehidupan kita.

Semangat mempelajari bahasa pada bangsa kita pada umumnya, belum begitu semarak. Hal ini juga nampak pada kaum terpelajar kita, baik mereka sebagai akademisi, maupun praktisi dalam bidang-bidang strategis seperti dalam percaturan ekonomi, dan bidang-bidang lainnya yang mengharuskan kita ikut aktif dalam pergaulan globalisasi.

SEMUA itu adalah tantangan dan sekaligus tuntutan kita. Lebih-lebih dalam masa mendatang, di mana bangsa kita semakin memperlebar hubungan dengan bangsa-bangsa lain, untuk menjalin kerjasama dagang, sosial-budaya, politik dan kerjasama militer, yang saling menguntungkan.

Dewasa ini saja sudah amat terasa adanya hambatan karena faktor bahasa ini. Tidak sedikit kaum akademisi kita yang tidak bisa ikut dalam program studi di luar negeri, karena kendala bahasa asing. Begitu pula kaum bisnis yang ingin menjalin hubungan ekonomi di luar negeri, harus tidak sedikit pula mengeluarkan biaya untuk keperluan menjembatani faktor bahasa ini. Padahal bilangan ratusan juta itu misalnya, bisa digunakan untuk devisa negara dalam membiayai berbagai investasi yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak.

Aspek kebahasaan dalam era globalisasi bukan hal yang sepele, tapi peranannya amat penting. (2.8)

Angkatan Bersenjata, 4 Mei 1995

BAHASA

Sikap Bahasa dan Jati Diri Bangsa

SEORANG diplomat Italia berkata kepada gurunya, "Saya heran, orang Indonesia lebih suka berbahasa Inggris, tidak mau berbahasa Indonesia." Ia mengeluh sering merasa sia-sia belajar bahasa Indonesia.

Ketika Pemerintah sedang gencar berusaha mengindonesiakan kembali nama-nama perumahan dan perkantoran, dalam bulan Maret yang lalu ada dua cendekiawan yang menyatakan bahwa penggunaan nama-nama asing tidak ada hubungan dengan sikap anasional.

Sungguh menyedihkan, sudah 50 tahun kita merdeka, masih banyak orang Indonesia memperlihatkan sikap meremehkan perjuangan para perintis kemerdekaan untuk menyatukan dan memberi identitas kepada bangsa kita ini. Yang memalukan ialah sikap melecehkan kebudayaan sendiri

seperti itu bukanlah barang rahasia bagi orang asing di sini.

Sudah beberapa kali kita saksikan betapa orang lupa bahwa penghargaan kepada bahasa nasional adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kebangsaan kita. Pada masa-masa awal Orde Baru terjadi kejutan yang berpuncak pada peresmian Ejaan Yang Disempurnakan oleh Presiden Suharto. Kebijaksanaan itu telah berhasil menggugah kesadaran orang bahwa kita mempunyai bahasa persatuan yang harus dipelihara, dikembangkan, dan diunggulkan. Dalam tahun-tahun terakhir ini lagi-lagi banyak orang lupa akan jati dirinya: penggunaan nama-nama asing sudah mencolok sampai ke tingkat yang memuakkan, seolah-olah bangsa Indonesia sudah kehilangan harga diri. Maka dilaksanakanlah serangkaian tindakan terencana supaya hal itu tidak terulang lagi. Tidak dapat dibantah bahwa telah terjadi kerugian materiil, namun sebab-musababnya jelas terletak pada sikap negatif terhadap bahasa nasional itu.

Dalam rubrik Bahasa 8 April 1995 yang lalu telah dipaparkan bahwa penerimaan bahasa oleh suatu masyarakat bersangkutan dengan tata bahasa, penggunaan bahasa, maupun sikap bahasa. Jadi ketika bahasa Melayu diikrarkan menjadi bahasa persatuan Indonesia, yang disepakati bukan hanya tata bunyi, tata aksara, tata kata, maupun tata wacananya, melainkan juga di antara siapa, di mana, bilamana, dan dalam konteks apa sistem itu harus digunakan, dan sekaligus ditetapkan tata nilai bahasa dalam alam kemerdekaan. Pencetusan Sumpah Pemuda itu jelas didasarkan pada cita-cita agar bangsa kita mempunyai alat pengikat dan sekaligus ciri khas (yang sekarang kita sebut jati diri bangsa). Itulah yang menjadi landasan kesepakatan tentang sikap positif berupa kebanggaan atas kekayaan budaya itu dan tekad untuk memelihara dan mengembangkannya.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan kita sikap positif itu tidak hanya harus ditujukan kepada bahasa persatuan bahasa Indonesia, melainkan juga kepada bahasa-bahasa daerah, yang sudah disepakati sebagai kekayaan budaya bangsa kita. Walaupun bangsa kita sudah dipersatukan dengan bahasa nasional, adakah di antara kita yang rela kalau bahasa-bahasa daerah sirna? Pendek kata, bahasa-bahasa daerah juga harus dipelihara. Pemeliharaan itu hanya dapat terlaksana bila ada kecintaan dan kebanggaan di kalangan penuturnya, di samping apresiasi dan toleransi dari masyarakat bukan penuturnya. Yang penting adalah kesadaran bahwa sikap positif terhadap bahasa daerah tidak bertentangan dengan sikap positif terhadap bahasa nasional, karena dengan mengembangkan bahasa-bahasa daerah kita juga menegakkan kerukunan budaya dalam masyarakat kita.

Sebagai bangsa yang membangun kita pun perlu mendayagunakan bahasa-bahasa asing, karena kita masih harus banyak belajar IPTEK (= ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kebudayaan) dari bangsa lain. Jadi pengunggulan bahasa Indonesia dalam kehidupan nasional itu tidak berarti adanya sikap negatif terhadap bahasa asing. Justru karena kita sadar akan harga diri kita sebagai bangsa merdeka, kita tahu kapan bahasa nasional digunakan dan kapan bahasa asing dimanfaatkan. Dengan perkataan lain, kita mampu menghadapi bahasa asing — demikian pula jadinya, kebudayaan asing — dari posisi yang kuat.

Penertiban terhadap penggunaan nama-nama asing yang berlebih-lebihan akhir-akhir ini adalah upaya untuk menegakkan sikap positif terhadap bahasa sendiri, yang pada hakekatnya merupakan pemupukan rasa bangga menjadi bangsa merdeka yang berkepribadian.

(Harimurti Kridalaksana, guru besar Fakultas Sastra UI)

Kompas, 5 Mei 1995

Kembali ke Bahasa Indonesia

Simon M. Raja

Mahasiswa Fikom Univ.
Prof. Dr. Moestopo

Beberapa waktu lalu, pemerintah menganjurkan nama-nama perumahan, nama gedung, nama bank dan lain-lain yang menggunakan nama 'asing' untuk diganti dengan bahasa Indonesia. Ini merupakan suatu terobosan tepat walaupun agak terlambat. Terlambat dalam arti ketentuan yang dikeluarkan bukan pada saat yang tepat dimana gejala penggunaan bahasa 'asing' sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan bisa dibilang kebudayaan baru.

Apabila kita melintas untuk melihat suasana ibukota, maka akan terlihat hampir mayoritas papan nama perusahaan, nama gedung, tempat perbelanjaan dan hiburan, papan iklan yang dipajang semua menggunakan bahasa 'asing'.

Fenomena ini terjadi akibat sudut pandang dan persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia, bahwa nama asing lebih mempunyai nilai jual, harga diri dan kebanggaan bagi pemakaian (terkecuali nama perusahaan asing/lisensi Asing). Padahal jika mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai padanan atau pengganti tidaklah jelek maknanya dibandingkan dengan bahasa asing. Yang dimaksud bahasa asing disini adalah mayoritas bahasa Inggris dan disusul bahasa Mandarin.

Penggunaan bahasa asing juga bisa membuat ketidakpahaman dan ketidakmengerti masyarakat yang tidak mempunyai dasar/kemampuan bahasa Inggris atau Mandarin. Dan sering pula penggunaan bahasa asing itu tidak tepat atau relevan dengan makna dalam bahasa Indonesia, hanya sekedar gagah-gagahan.

Misalnya perumahan berembel-embel "Lake Side atau River Side" yang artinya tepi danau dan tepi sungai, namun kita tahu di Jakarta tidak ada danau, kalaupun ada hanya ada danau buatan atau waduk (contoh Danau Sunter, Kali Grogol, Kali Ciliwung). Kadang-kadang juga pinggir waduk ataupun kali dilarang atau tidak dapat didirikan pemukiman.

Juga istilah-istilah asing seperti "country, village, coffee shop, hall, convention, plaza, mall, condominium, apartment, departement store, dan banyak lagi lainnya yang dapat membuat orang berkerut kening memikirkan artinya, apalagi jika melihat orang dari daerah yang tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing.

Media cetakpun sering mengembangbiakkan istilah-istilah ini walaupun ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Khususnya istilah-istilah yang mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu dan wilayah pekerjaan, contoh: "link and match, press by trial, contemp of court, sales representative, consultan education, dll".

Media Massa elektronik (televisi dan radio) sepertinya bersikap sama. Menonjolkan bahasa asing dalam menarik minat pemirsa seperti dalam membawakan acara, berbincang-bincang sampai rayuan dalam tayangan iklan. Secara tidak langsung ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku berbahasa pemirsa. Contoh: ucapan "Hei Boys and girls", atau kata-kata "the best, creative generation, dan lainnya.

Kenyataan ini sepertinya bukan menjadi masalah namun apabila ditelusuri lebih jauh akibatnya, akan terjadi pengkaburan dasar (substansi) dari bahasa.

Penggeseran idiom "Bahasa menunjukkan Bangsa" akan terjadi secara cepat dan pengaruhnya akan terjadi di masa datang dimana anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Indonesia secara luas tetapi lebih mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan, bahasa bisnis, bahasa kerja, bahkan menjadi bahasa nasional. Dan dampak terakhir adalah bahasa Indonesia bisa punah jika tidak diantisipasi dari sekarang.

Penggunaan semboyan "berbahasa Indonesia yang baik dan benar" merupakan tantangan bagi zaman ini. Bagaimana bahasa Indonesia mampu menunjukkan keberadaannya ditengah gempuran teknologi informasi di abad global ini? Bagaimana bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri bukan nomor 3 setelah bahasa asing, bahasa ibu? Bagaimana tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia lebih banyak terpampang di papan nama perusahaan, nama-nama gedung, nama-nama tempat hiburan, yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia merasa berada negerinya sendiri bukan di negeri orang lain.

Ini harus disadari sebagai satu refleksi dan motivasi untuk merdeka dari serangan bahasa asing yang menjajah dan mengkungkung diri kita menjadi 'Barat-minded'. Momentum 50 tahun Indonesia merdeka harus merupakan langkah awal memperbaiki kebahasaan kita ini. Apakah setelah 50 tahun kita merdeka secara fisik namun dalam berbahasa kita masih dijajah dan diperkosa.

Kembali ke Bahasa Indonesia merupakan solusi tepat-untuk menunjukkan niatan tegas dan konkret kita yang pernah diucapkan 67 tahun lalu dalam Sumpah Pemuda, untuk berbahasa satu-bahasa Indonesia. ■

Republika, 6 Mei 1995

BAHASA KITA

Diasuh oleh **Lukman Ali dan Yayah B. Lumintaintang**

Cinta Berlebihan kepada "daripada"

Ada sebuah karikatur dalam buku G.M. Sudarta, *Indonesia 1967-1980*, (Gramedia, 1980, halaman 270) yang melukiskan tokoh Oom Pasikom berkali-kali menggunakan kata *daripada*,

"... Menyambut kongres ***daripada*** *Bahasa Indonesia, maka dhengen ini saya seruken untuk menggunakan* ***daripada*** *bahasa Indonesia yang baek itu! Maka dari itu wij sebage orang van voor oorlog, natuurlijk harus memberikan contoh* ***daripada*** *pamakean* ***daripada*** *bahasa Indonesia yang baek.*

Maka dari itu kepada generasi muda! Kerna ze zijn de tegenwoordige jongeren die de bahasa moeten tegakken demi kesatuan bahasa en ook de kesatuan bangsa **daripada** Indonesia!"

Ada lima kata *daripada* dalam teks tersebut. Tokoh karikatur itu mungkin terpengaruh oleh kata *van* dalam bahasa Belanda dan mungkin juga *of* dalam Bahasa Inggris.

Rupanya pemakaian *daripada* yang menandai kepemilikan seperti contoh di atas masih tetap banyak ditemukan sampai hari ini. Sejak lama orang sudah membicarakan hal ini tetapi pemakaiannya bukannya berkurang, malah makin bertambah-tambah.

Dalam *Sejarah Melayu* menurut terbitan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, Singapura 1831, ditentukan penggunaan *daripada* yang menandai hubungan *kepemilikan* dan hubungan *sebab*. Contoh,

Kata setengah riwayat, Raja Sulan itu ***daripada*** *anak cucu Raja Nusirwan Adil*

Dalam bahasa Indonesia sekarang akan berbunyi,

Kata setengah riwayat, Raja Sulan itu anak Raja Nusirwan Adil

Kata *daripada* dalam bahasa Indonesia bertugas menandai perbandingan, misalnya,

Mencela lebih mudah daripada berbuat.

Daripada tersalah menghukum lebih baik tersalah membebaskan.

Di Malaysia di samping menunjukkan *kepemilikan*, *daripada* juga digunakan untuk menunjukkan *asal* kedatangan. Contoh,

Encik daripada mana?

Saya daripada Melaka.

Dalam bahasa Indonesia cukup dipakai dari saja,

Encik dari mana?

Saya dari Melaka.

Tetapi dalam kenyataan di masyarakat kata *daripada* banyak dipakai dalam hubungan *kepemilikan* di samping hubungan yang menunjukkan *perbandingan* dan *asal*.

Meluasnya pemakaian *daripada* dalam menandai *kepemilikan* ini yang sebenarnya *tidak kena*, disebabkan oleh contoh yang diperlihatkan seseorang, lalu diikuti pula oleh yang lain. Terjadilah tiru-meniru. Jangan heran bila seorang pejabat berkata sebagai berikut,

"Rencana ***daripada*** *perintah yang akan memberlakukan kenaikan harga* ***daripada*** *semen, hendaknya mendapat pengertian* ***daripada*** *kita semua, terutama para pedagang dan pemakai* ***daripada*** *semen itu".*

Semua *daripada* dalam kalimat di atas sebenarnya dapat ditiadakan saja karena mubazir. Kalimat itu seharusnya berbunyi,

Rencana pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan harga semen, hendaknya mendapat pengertian kita, terutama para pedagang dan pemakai semen itu.

Pemakaina kata *daripada* yang kurang tepat itu tentu perlu kita luruskan demi penggunaan Bahasa Indonesia yang benar. Kalau tidak, dikuatirkan kita akan terus jadi "mangsa pelawak" seperti yang disindirkan oleh seorang pelawak baru-baru ini yang memperlihatkan "kegigihan"nya menggunakan *daripada* di televisi. ■ lukman ali

Republika, 7 Mei 1995

'Yang Dipertaruhkan adalah Martabat Bangsa!'

Hasan Alwi adalah Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Secarabercanda ia menyebut jabatannya itu sebagai mandor. Bapak dua anak itu aktif di Pusat Bahasa sejak tahun 1978 dan menjadi mandor sejak tahun 1992. Hasan Alwi meraih doktor di bidang linguistik dari UI tahun 1990.Berikut ini petikan wawancara dengan lelaki kelahiran Majalengka, 14 Juli 1940 itu:

Belakangan ini gencar ditempuh upaya pengindonesiaan nama-nama asing. Ini terutama pada nama-nama properti. Apa sebenarnya latar belakang pengindonesiaan itu?

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang jelas dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Peristiwa Sumpah Pemuda mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. UUD 1945 pasal 36 juga menyebutkan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Kemudian dalam GBHN sejak tahun 1978 selalu dicantumkan masalah bahasa Indonesia, bagaimana memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat. Disinggung pula secara eksplisit istilah asing. Disebut istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia agar tidak digunakan.

Persoalannya, sekarang ini banyak kosa kata kita yang tercemar bahasa asing. Sebenarnya kalau bahasa asing itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, apa boleh buat. Contoh yang sangat sederhana, ketika kita mulai berkenalan dengan hasil teknologi yang disebut *radio*. Kita tak ada pilihan lain mengatakan dalam bahasa lain. Dilihat dari umur, jika dibandingkan dengan bahasa Inggris yang telah mapan sejak abad 14-15, bahasa Indonesia masih sangat muda. Dengan beban yang sama dan harus dapat mengungkapkan apa saja, termasuk kehidupan modern, bahasa Indonesia jelas tak bisa melepaskan diri dari kontak dengan bahasa-bahasa lain. Terlebih dalam GBHN disebut bahasa asing diperlukan salah satunya untuk bisa dimanfaatkan bagi pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kata *radio* itu kita ambil alih. Kita tak usah mencari-cari kata yang baru kalau memang dalam khasanah budaya kita belum ada. Tapi, kalau sudah ada padanannya, harus menggunakan bahasa Indonesia. Kini yang terjadi justru marak dengan nama-nama asing yang telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu menggejala pula kaidah MD (Menerangkan-Diterangkan). Kaidah DM dalam bahasa Indonesia terbalik menjadi MD. Gejala ke arah itu sekarang sudah sangat kuat. Kita tak lagi bicara mengenai Bank X, Hotel Y, Plaza Z, tapi orang menyebutnya X Bank, Y Hotel dan Z Plaza.

Jadi semangatnya apa?

Kembali ke jati diri bangsa. Sebenarnya gerakan ini bukan sesuatu yang baru. Sejak tahun 1978, waktu Kongres Bahasa Ketiga, sudah disebut perlunya pengindonesiaan kata-kata asing. Tapi gemanya tak ada. Diberitakan media massa, satu dua hari, setelah itu menghilang. Tahun 1983 dan 1988 diulang lagi, juga sama. Pada waktu itu yang berbicara lantang adalah para peminat, pemerhati, dan bahasa saja, yang tak punya kekuatan politik apa-apa. Sekarang lain, yang bergerak secara serentak adalah kesepakatan kemauan politik yang kuat dari pengambil keputusan.

Apa pencemaran istilah-istilah asing itu sudah sangat mengkhawatirkan?

Ya. Karena, sekarang pemakaian bahasa asing dikaitkan dengan status sosial. Kecenderungan itu sangat kuat kalau Anda mencoba melihat iklan-iklan yang bertebaran. Iklan kendaraan bermotor berbunyi: *you are what you drive*. Jadi yang diiklankan jenis atau kendaraan yang mahal. Kalau ini dibiarkan, tak segera diluruskan kembali, maka apa yang pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda akan terulang. Orang akan dibedakan status sosialnya berdasarkan bahasa. Kelompok intelektual, bangsawan menggunakan bahasa Belanda. Rakyat kecil menggunakan bahasa Melayu atau daerah. Kalau kecenderungan itu dibiarkan, dalam satu atau dua generasi yang akan datang kelompok kecil akan menggunakan bahasa Inggris, kelompok yang lain menggunakan bahasa daerah. Ini tidak perlu terjadi mengingat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi.

Target penertiban akan sejauh apa?

Penertiban akan terpulang pada para pemakainya. Para pemakai akan dibina oleh induk organisasinya. Anggota-anggota REI, misalnya, akan dibina melalui kantor Menpera. Departemen P&K akan bertindak sebagai koordinator. Pusat Bahasa menjadi dapur, mencoba membuat, mengumpulkan istilah dan mencari padanannya. Lalu, ditawarkan kepada para pemakai. Jadi tidak dipaksakan sama sekali. Silakan pilih. Jadi gerakan ini meru-

pakan gerakan imbauan yang bersifat persuasif. Kecuali, departemen teknis yang bersangkutan atau Pemda yang mempunyai pandangan lain. Gubernur DKI, misalnya, mengatakan bahwa sampai 17 Agustus tahun depan jalan-jalan di Jakarta harus sudah bersih dari nama-nama asing. Selaku gubernur ia mempunyai hak. Pusat Bahasa tak punya hak apa-apa. Di DKI juga ada Perda yang mengharuskan pengubahan nama-nama asing itu. Jadi ada sanksinya.

Betapapun pengindonesiaan itu akan dihadapkan pada persoalan populer tidaknya nama baru di mata masyarakat, seperti dulu kata *sangkil* dan *mangkus* yang tak diterima dengan baik oleh masyarakat. Bagaimana menurut Anda?

Kata *sangkil* dan *mangkus* mengapa tidak laku? Karena masyarakat bahasa Indonesia sudah terlanjur akrab dengan *efektif* dan *efisien*. Masyarakat sudah terlanjur diperkenalkan dengan *berhasil guna* dan *berdaya guna*. Jadi begitu muncul *sangkil* dan *mangkus*, yang memang digali dari bahasa nusantara, itu terdengar lebih asing dari bahasa aslinya. Karena itu tidak ditoleh orang, tak laku. Tapi, coba lihat padanan *sophisticated* yang menjadi *canggih*, langsung disambar dan dipakai dalam berbagai kesempatan.

Jadi kata *real estate*, kalau memang mau digunakan kita ambil saja dengan menyesuaikan lafalnya dan tulisannya. Kalau Pusat Bahasa mengusulkan padanan *estate* dengan *lahan*, *bumi*, atau *bentalal*. Kalau tidak populer, bisa saja ambil kata *real estate*, lalu kita sesuaikan lafalnya menjadi *real estate* (dibaca *real es-ta-te*, bukan *ril estit*). Mengapa tidak didasarkan bunyi *ril estit*? Dalam UUD 45 sudah tercantum, bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, harus lewat apa yang tertulis. Bukan lewat apa yang terdengar. Untuk pertama kali, barangkali terdengar aneh atau janggal, seperti pada awal tahun 1970-an ketika diperkenalkan kata *suku cadang*. Waktu itu kata *suku cadang* aneh sekali. Tapi, dari hari ke hari, makin lama makin terbiasa. Jadi, soal penerimaan dari masyarakat, bahasa memang merupakan konvensi dari para pemakainya. Kalau *sangkil* dan *mangkus* tidak diterima, ya tinggalkan. Pusat Bahasa menganut cara yang tidak memaksakan.

Berarti tersedia revisi-revisi?

Ya. Bahasa selalu berkembang, berubah sesuai perkembangan zaman. Popularitas selalu dipertimbangkan. Untuk padanan-padanan di bidang properti kita bekerja sama dengan REI. Kita yang menyodorkan beberapa padanan, mereka yang memilihnya.

Ada yang mengatakan penggantian nama itu satu pemborosan biaya. Bagaimana menurut Anda?

Ada memang ahli hukum yang mengatakan itu tindakan pemborosan. Siapa yang akan menanggung biaya? Saya katakan bahwa yang dipertaruhkan adalah martabat bangsa. Mengapa yang bersangkutan tidak menyinggung berapa harga martabat bangsa?

■ yos rizal suriaji

Pelita, 7 Mei 1995

Pramunikmat: Tidak Tepat dari Segi Morfologis

Belum lama ini GATRA, 13 Mei 1995, memunculkan istilah baru, yakni pramunikmat, alih-alih pelacur dan wanita tunasusila. Bisa jadi, kata tersebut diciptakan untuk penghalusan. Namun, sayangnya, kata pramunikmat kurang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi bahasa (morfologis dan semantis) maupun dari segi sosial-budaya.

Dari segi morfologis, jelas, kata pramunikmat dibentuk berdasarkan analogi bentukan pramugari. Bentuk terakhir ini, yang sebenarnya hanya terdiri dari satu unsur, melahirkan kata pramuwisma, pramusiwi, pramuniaga, dan lain-lain. Paradigma itu memunculkan makna pramu "yang melayani". Lalu, apa makna pramu dalam pramunikmat? Bentuk pramu juga tak bisa bergabung dengan kata sifat (kelas kata dari nikmat). Jadi, tak akan ada bentukan pramucantik, pramumurah, pramupandai, dan lain-lain.

Dari segi semantis, kata pramunikmat juga tak logis, karena tak mewakili faktanya. Nikmat adalah hasilnya (?), bukan tindakannya. Bandingkan dengan pramusiwi dan pramuwisma.

Sementara itu, dari segi sosial-budaya, dengan menciptakan kata pramunikmat, kita berarti secara tersirat telah melegalkan "profesi" tersebut, sebagaimana pramuwisma, pramusiwi, dan pramuniaga. Efek psikologisnya pun amat buruk: apa yang terbayang dalam benak seorang anak saat dia menjumpai kata pramunikmat dan bagaimana pula kita menjelaskan kepadanya?

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, saya kurang setuju GATRA menciptakan kata pramunikmat untuk menyulih kata pelacur atau wanita tunasusila. Dua bentuk terakhir ini, saya pikir, lebih baik dilihat dari segi apa pun: bahasa maupun sosial-budaya.

GATRA, 10/6-95

YANWARDI
OCTIS AD Jakarta

Gatra, 10 Mei 1995



KURANG SAMBUNG. *Ini sebuah PR buat para ahli bahasa.* (Foto: Kiriman Anto Suranto, Bogor.)

Tentang Pengindonesiaan

Belakangan ini, untuk kesekian kalinya, bahasa Indonesia dibela dengan gigih. Banyak pendapat telah diungkapkan dan ditanggapi oleh yang berwenang. Memang tak dapat disangkal adanya serbuan istilah asing dalam berbahasa. Ada yang ikut diadopsi sebagai bahasa sendiri. Alasannya, antara lain karena faktor kepraktisan, ketepatgunaan, ketidaksempatan, atau mungkin karena tak ada yang pusing memikirkannya.

Pembelaan terhadap "anak sendiri" dari "anak angkat" ini memang wajar. Sebab seyogianya setiap bangsa membela bahasanya. Bila tidak, mungkin kata-kata asing akan meluncur terucap berselang-seling seperti di Filipina. Tapi mungkin hal itu sekarang telah dan terus terjadi pada kalangan tertentu yang menganggap menggunakan istilah kita sendiri kurang sreg. Atau mungkin mengganggap kurang keren bila menggunakan istilah sendiri untuk menyampaikan sesuatu.

Pemakaian istilah asing itu ada yang fana sifatnya dan ada yang memang perlu. Mungkin juga *overlap* dari keduanya. Yang fana tentunya untuk menaikkan gengsi. Misalnya, pemakaian istilah asing di kalangan *developer*. eh, kontraktor. Atau untuk mempercanggih *workshop paper* alias naskah lokakarya. Selain itu, ada yang merasa perlu memperkaya suatu maksud karena belum ada padanan yang pas dalam istilah bahasa Indonesia tertentu.

Yang ingin mempraktiskan juga banyak, terutama di kalangan perkantoran, manajemen, dan lain-lain. Juga untuk menginternasionalkan penyebutan, seperti di lingkungan perbankan dan asuransi.

Kita perlu menyadari beberapa fakta bahasa supaya dalam usaha membela bahasa ini kita tak frustrasi karena tak sanggup membendung invasi bahasa asing tersebut.

● Fakta pertama: Penggunaan istilah dari bahasa lain sudah ada sejak dulu dan bukan sesuatu yang bisa kita hapuskan sama sekali.

Hampir semua nama peralatan "baru" dan bagian-bagiannya pada zaman Belanda kita pakai. Misalnya pada *sepeda*, ada yang bernama *setang, ban, sadel, rem* sampai *ketengkas (ketting kast)*, Belanda yang menamainya. Kesulitan mengartikulasikan istilah ini membuat timbulnya kata baru.

Belanda bilang *domme kracht* (tenaga bodoh), lalu kita singkat jadi *dongkrak*. Meski saat itu sudah ada kata "mundur", tapi kernet kita lebih sreg meneriakkan *atret* yang terlalu memelintirkan lidah.

● Fakta kedua: Perlu ada pembatasan tegas (oleh Pusat Bahasa?) lingkungan mana saja yang perlu diluruskan kebiasaan berbahasanya.

Sekarang ini hanya perumahan dan pariwisata saja yang kena getah. Mungkin karena mereka kelewatan. Di Serpong, tukang ojek dan ibu-ibu bingung mengucapkan *Lakeside* dengan cara kita: la-ke-si-de. Anjuran pengindonesiaan ini seharusnya diterapkan pada semua pihak. Di sekeliling kita penuh dengan istilah seperti *Service station, One hour Photo Lab, Food Centre, Department Store, dan Supermarket* yang sebenarnya bisa diterjemahkan dengan praktis.

● Fakta ketiga: Kata-kata bahasa kita memang banyak suku katanya sehingga penggunaan sehari-harinya kurang praktis dan cepat.

Rupanya ahli bahasa kita sulit mencari akar bahasa Sansekertanya maka kata-kata Indonesia sedikit memakai satu atau dua suku kata. "Wisatawan" terlalu panjang, apalagi harus digabung dengan "mancanegara". Padahal "turis asing atau internasional" lebih mudah dipahami oleh orang berbahasa asing. Istilah bahasa Inggris sering hanya satu atau dua suku kata. Sudah saatnya ahli bahasa kita memunculkan kata baru: pendek, mudah diingat, dan aktual.

● Fakta keempat: Kata bahasa asing juga dipakai sebagai nama sehingga dianggap tak perlu diterjemahkan.

Nama hotel seperti *Citraland* tetap dipertahankan tetapi *Bali Cliff* sependengaran saya akan diterjemahkan. Apalagi dengan dunia asuransi yang sekarang berakhiran *Life* semuanya. Anjuran penterjemahan seyogianya mempertimbangkan apakah itu suatu bahasa menjadi nama atau bukan. Sehingga *Landmark Centre* tak perlu menjadi *Pusat Penanda*. Atau *Hero Supermarket* tak harus menjadi *Jagoan Pasar Besar*.

● Fakta kelima: Timbulnya akronim yang dianggap "merusak bahasa" harus dinilai ulang dengan kedewasaan. Ada yang tak tepat dan ada yang perlu diakronimkan.

Belakangan ini terdengar meruyaknya akronim seperti benalu yang mengaburkan istilah aslinya. Memang betul, tapi terbentuknya akronim alamiah sekali karena kebutuhan masyarakat untuk mempersingkat banyak kata yang terlalu panjang. Adanya wisman, misalnya, lantaran "Wisatawan mancanegara".

Orang Inggris sendiri menciptakan akronim tapi tak sekreatif kita. Kita mungkin tahu *Jeep* asalnya dari G.P. (*general purpose*). *Brunch* adalah makan antara pagi dan siang (*breakfast-lunch*). Selain itu, apa Anda tahu memberi *Tips* kepada pelayan adalah akronim dari *To Insure Prompt Service*?

● Fakta keenam: Istilah Indonesia sering terlambat dari kebutuhan penggunaannya, sehingga kita "telanjur mengangkat anak". Setelah sekian lama *Department Store* tetap bertahan, malah tenaga *sales* sering menyebutnya *Depstor*. Keterlambatan Pusat Bahasa mengantisipasi lebih terasa lagi dalam dunia teknologi tinggi (*hi-tech*). Semua istilah pada komputer terpaksa kita pakai asli mulai *byte, bit, CPU*, dan sebagainya. Sebab tak mungkin *hard disk* diganti dengan "cakram padat". Di luar negeri, istilah baru terus terbentuk sehubungan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Bagaimana kita mau menjelaskan *virtual reality* dan *voice mail* kalau istilah *CD ROM Drive* saja belum punya?

● Fakta ketujuh: Kita semua juga perlu mengglobalkan masyarakat supaya lebih ter-

buka pada dunia luar.

Ketika bangsa-bangsa saling mendekatkan diri dengan berbagai cara adalah kurang tepat menghambat pemakaian bahasa Inggris demi kebanggaan dan identitas nasional. Lebih baik masyarakat di daerah wisata terkena dampak dunia pariwisata sehingga mereka mengerti arti *homestay* ketimbang diganti *tinggal rumah*. *Laundry* bisa diganti penatu tetapi bagaimana dengan *drugstore, bellboy, concierge, mall*? Rasanya, itu semua belum "siap ganti". "*Guest house*" sudah diganti "wisma tamu", tapi tetap saja di bawahnya ditulis kata Inggrisnya.

Menyadari semua fakta ini lalu kita menyerah saja? Berikut ini ada beberapa usul jalan keluarnya:

- Penanganan pelurusan istilah ini perlu konsepsional. Itu dilakukan dengan segera, konsisten, dan berkelanjutan. Jadi, jangan hanya hangat- hangat tahi ayam.
- Anjuran mengganti istilah Inggris harus wajar, proporsional, dan memadai. Jangan terlalu memaksakan penggantian.
- Pencarian istilah yang belum ada padanannya sebaiknya dikerjakan sesegera mungkin sebelum terlambat. Bila perlu, buat sayembara. Bila suatu kata mudah dilafal-indonesiakan dan tak mengganggu, resmikan saja istilah itu dalam ejaan Indonesia sehingga tak rancu dipakai. Istilah *desain, atensi, properti, utilitas, komoditi, manajemen* adalah konsekuensi logis dari istilah atau lafal Inggrisnya. Bahkan banyak tak menduga, kata-kata jarang seperti *privilese* dan *prelude* sudah boleh dipakai. Jangan risi bila kita pakai *kantri klab* sebagai ganti *country club*, karena bila diganti dengan *kumpulan kampung* tak akan populer.
- Larangan penggunaan bahasa Indonesia yang salah dilakukan seluas-luasnya. Ajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dengan benar.

Belakangan ini terjadi salah kaprah yang menggelikan. Rupanya supaya *ngetrend*, banyak yang memakai semua akhiran *-ation* untuk menjelaskan suatu "proses pelaksanaan". Menggunakan *pipanisasi* jelas keliru, seharusnya *pemipaan*. Bahasa Inggris tak mengenal *pipanization*.

- Pembatasan pemakaian istilah asing di lingkungan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan.

Biarkan kalangan perkantoran memakai *meeting, on the line*, dan *appointment* kalau itu memudahkannya berkomunikasi dengan dunia global. Tetapi kalau kita bayar sate di restoran dan minta *bill* ke *cashier* untuk di-*charge* dengan *card*-ya itu karena kecengengan saja.

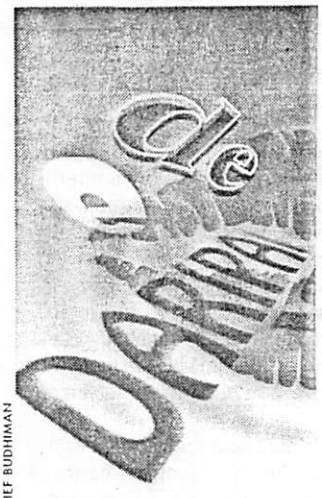
Juga dengan iklan berbahasa Inggris yang tersebar. Saya yakin sekali *How Low Can You*

Gatra, 10 Mei 1995

LUKMAN ALI *

Lafal Daerah

SECARA berkelakar tapi dengan maksud serius, Menko Polkam Soesilo Soedarman mengingatkan kita semua agar lafal *ken* dan *semangkin* dihindarkan dari pemakaian bahasa Indonesia (lihat *Merdeka* dan *Pikiran Rakyat*, 22 Mei 1995). Jadi, kita kembali kepada lafal baku *kan* dan *semakin*. Kita tahu bahwa *ken* dan *semangkin* itu adalah lafal bahasa Jawa untuk *kan* dan *semakin*. Selain lafal bahasa Jawa, itu juga diucapkan oleh orang Minangkabau (lihat *Kamus Bahasa Minangkabau - Bahasa Melajoe Riau*. Balai Pustaka, 1935, hal. 147 dan 149) dengan sinonimnya *mingkin* dan *mikin*. Jadi, *ken* dan *semangkin* telah menjadi terdakwa karena mengganggu ketertiban bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dihadapkan ke meja "peradilan bahasa".



ARIEF BUDHIMAN

Tentu saja anjuran Soesilo di atas — yang diucapkan sesudah Presiden mencanangkan pembudayaan disiplin nasional termasuk disiplin berbahasa yang baik dan benar tanggal 20 Mei 1995 yang lalu — amat melegakan. Mengapa? Karena sudah lama hal ini disentuh-sentuh tapi tak kunjung mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Bahkan orang takut-takut menyebut. Tetapi sekarang rupanya iklim sudah lain. Semua terbuka menerima kenyataan tanpa merasa dihinakan. Mudah-mudahan budaya kesediaan dikoreksi ini dapat tumbuh dengan subur dan penuh kejujuran.

Orang menyebut-nyebut pula soal penggunaan *daripada* yang sering salah, walaupun dilafalkan dengan betul. Penggunaan *daripada* maksudnya untuk menunjukkan *perbandingan*. Contoh: "Ini lebih baik *daripada* itu". Tetapi sekarang dipakai untuk menunjukkan *kepunyaan*. Contoh: "Maksud dari pada pemerintah" yang sebenarnya cukup dikatakan "Maksud pemerintah".

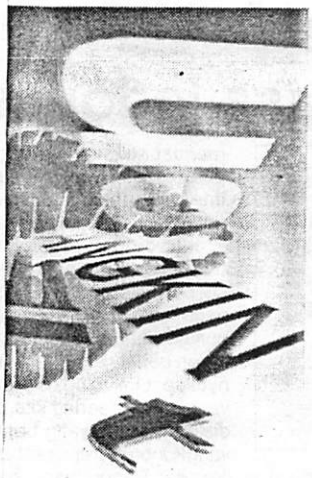
Ucapan *daripada* itu betul. Ia tidak diucapkan *daripado* atau *daripade*. Hanya penggunaannya yang tak betul. Sedangkan *ken* dan *semangkin* tak betul ucapannya tetapi tak salah maksudnya.

Sementara itu, tudingan telah bertubi-tubi diarahkan kepada *ken*, *semangkin*, dan *daripada*, seakan ketiga kata itu telah berbuat dosa tak berampun dan seolah-olah tak ada masalah lain dalam pembinaan bahasa Indonesia yang lebih penting lagi dan perlu mendapat perhatian utama.

Perlu diingat, banyak orang yang bertengger di punggung kata-kata itu untuk menembak sasaran lain di luar maksud kebahasaan. Para ahli bahasa tentu tak memaksudkan ini. Entah kalau mereka tak sadar diperalat.

Beberapa tahun yang lalu, di DPR, ada seorang anggota yang dengan keras mengecam penggunaan *ken* dan *semangkin* oleh para pejabat. Melihat yang bertanya ini, kita jadi merasa-rasa ada "sesuatu" di balik pertanyaan ini. Selain itu, disebut-sebut pula ada seorang penyiar rubrik bahasa di televisi "digeser" karena telanjur dalam ucapannya yang menyinggung masalah lafal tadi. Padahal, yang sebenarnya, bukan itu sebabnya dia keluar dari televisi.

Di samping itu semua, apakah memang ada pengaruh lafal daerah yang lain dalam bahasa Indonesia? Tentu ada. Misalnya lafal *e* lunak orang Batak pada *be* dalam kata *begitu*, diucapkan dengan *e* keras. Pada lafal Bali ada bunyi *t* yang berdetuk bunyinya. Juga lafal *t* bahasa Aceh dan bunyi *d* dalam lafal Jawa. Tetapi kita jangan lupa bahwa semuanya ini adalah bunyi-bunyi bahasa daerah yang secara sadar atau tidak dibaurkan dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia. Sudah terbawa dari "sono"-nya, menurut ungkapan Betawinya, sehingga sulit untuk dihilangkan. Dan yang penting lagi, bunyi-bunyi tersebut hanya dalam bahasa



lisan. Perlukah lafal daerah yang lain itu "dikutuki" pula? Jangan. Lafal daerah itu tak apa-apa. Itu adalah kekayaan kita berupa *warna lokal* (*local colour*) bahasa daerah kita yang perlu kita hormati.

Yang penting dalam ragam bahasa Indonesia tulis yang baku adalah penulisannya harus sama. Ucapannya dapat berbeda-beda sesuai dengan warna lokal tersebut. Herankah kita bila dalam lafal bahasa Indonesia baku (yang baik dan benar) ada pengaruh lafal bahasa daerah itu? Sebenarnya tak perlu heran. Banyak bunyi bahasa daerah bisa saja sewaktu-sewaktu menyelip dalam lafal bahasa Indonesia melalui lidah-lidah daerah.

Hanya, bila kita memang hendak menyeragamkan lafal bahasa Indonesia yang baku, kita tentu perlu "menghaluskan" lidah-lidah daerah itu untuk menipiskan pengaruh lafal daerah itu khususnya ketika kita berbahasa Indonesia. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan kesulitan terutama untuk bunyi-bunyi bahasa yang masih "kental" kedengarannya akibat pengaruh pendidikan dan lingkungan.

Bila kita mengidamkan lafal baku tersebut itu untuk bahasa nasional kita, baiklah kita usahakan saja melalui pengajaran di sekolah. Tapi jelas akan makan waktu lama. Murid-murid diajar mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang betul. Guru-guru perlu dibantu oleh semacam kamus berupa "kamus lafal" yang di dalamnya dimuat kata-kata yang dapat dilafalkan dengan tepat seperti pasangan kata *bebas* (*membebas semak*) dan *bebas* (*merdeka*), *perang* (*perang dunia*) dan *perang* (*rambutnya perang*). Juga demikian melafalkan *be* pada kata *begini* yang tentunya bukan dengan *e* keras (Batak).

Adanya lafal daerah yang dianggap mengganggu lafal Indonesia hendaknya jangan dianggap bahaya serius, karena saling mempengaruhi itu hal yang normal saja. Jadi, kita atasi saja secara pelan-pelan. Jangan langsung terus dibabat.

* *Bekas Kepala Pusat Bahasa, sekarang dosen Fakultas Sastra UI*

Gatra, 10 Mei 1995

CLOSE-UP

Membangun Bahasa Indonesia



KITA seluruh Bangsa Indonesia benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, karena selama setengah abad bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan dengan berbagai bidang pembangunan. Tidak terkecuali pembangunan bahasa Indonesia, malah jauh sebelum itu yakni sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Namun pada kenyataannya, mengenai pembangunan bahasa Indonesia ini masih saja menjadi pembicaraan yang hangat, terutama di kalangan yang amat peduli dengan penggunaan bahasa Indonesia. Masalahnya, baik dalam bahasa tulis maupun dalam pembicaraan formal di masyarakat masih saja belum pas penggunaan bahasa Indonesia tersebut dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Rasanya, wajar saja bila Mendikbud Wardiman mencemaskan hal ini, apalagi beliau dalam tugasnya memang sangat berkepentingan dengan masalah tersebut. Bahkan Pemerintah dan DPR merasa perlu untuk turun tangan dengan menyiapkan seperangkat hukum bagi yang melanggar kaidah bahasa Indonesia.

Sebenarnya usaha-usaha pembinaan bahasa Indonesia telah banyak dilakukan oleh Pemerintah melalui pendidikan di sekolah, media televisi dan media massa cetak. Lebih dari itu, juga melalui perlombaan-perlombaan tulisan dan pidato, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Dalam hubungan ini, kita sangat bangga karena Presiden Soeharto, telah membawa bahasa Indonesia ke pembicaraan tingkat internasional, baik formal maupun informal. Konsistensi dan tanggung jawab moral inilah yang perlu kita teladani.

Di samping itu, kelembagaan bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah cukup kuat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakannya dengan baik dan benar. Memang hingga saat ini dalam beberapa hal masih memprihatinkan penggunaan Bahasa Indonesia misalnya untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Contohnya, bagaimana para developer perumahan mewah seenaknya saja menggunakann istilah-istilah asing, demikian juga dengan restoran-restoran dan pertokoan. Dengan tuju-an untuk mendapatkan keuntungan semata, mereka tidak segan-segan 'mengingkari' penggunanaan bahasa sendiri.

Juga di dunia perfilman, kita juga dihadapkan pada penggunaan bahasa seenaknya, sehingga berpengaruh kepada keinginan mendasar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kata-kata seperti bokap, nyokap, plokis, bokis dan banyak lagi yang lainnya sering kita jumpai dalam dialog film-film yang bertema remaja, yang konon merupakan bahasa prokem (preman) di Jakarta. Penggunaan bahasa dalam periklanan pun boleh dikatakan tidak menggunakan kaidah yang benar, walaupun tidak semua begitu.

Dan yang cukup sulit dihindari dalam memuluskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah pengaruh dari berbagai bahasa daerah. Setidaknya bahasa daerah ini berpengaruh pada logat berbahasa Indonesia.

Kiranya, dalam menyambut setengah abad kemerdekaan Indonesia adalah waktu yang tepat untuk memulai era baru dalam upaya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar secara menyeluruh. Mulai dari daerah yang paling pelosok sampai ke kota-kota besar di Indonesia, terutama yang menyangkut pelayanan masyarakat, lingkungan pendidikan, arena pertemuan banyak orang seperti pasar dan sebagainya.

Menurut hemat saya, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan misi itu. HPBI secara berkesinambungan perlu menyelenggarakan penataran dengan peserta dari berbagai pihak terutama yang selama ini dinilai berpengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia seperti kalangan perfilman, bisnis, periklanan dan sebagainya. HPBI perlu pula melakukan aksi kampanye berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Pada akhirnya, dengan senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap waktu dan tempat, mudah-mudahan kita semua tidak salah informasi dan persepsi.

R. LUKMAN HERYADI
Jl Arief Rakhman Hakim No. 3, Jakarta Pusat

Media Indonesia, 11 Mei 1995

Asal Usul Kata Preman

Oleh N. Daldjoeni

ISTILAH preman dan premanisme tiba-tiba menjadi populer setelah seorang polisi dikroyok dan ditikam di Blok M Jakarta oleh sekelompok preman. Kesalahkaprahan penggunaan istilah premanisme dikritik oleh Prof Lukman Sutrisno, sosiolog dari UGM: *Sebaiknya media massa jangan menggunakan istilah premanisme dalam pemberitaan tentang penangkapan preman-preman yang akhir-akhir ini banyak dilancarkan.* (*Kompas*, 20/3-1995).

Adapun M. Choidin penulis artikel *Preman Gedongan* (*Kompas* 6/4-1995) menulis ini: *"Istilah preman, entah benar entah tidak, berasal dari kata* vrije man *(Belanda) atau* free man *(Inggris) yang artinya orang bebas."*

Ternyata dalam kamus-kamus Belanda tak saya temukan entri *vrije man*, meski *vrij* itu bebas dan *man* itu lelaki. Adapun dalam kamus Inggris Funks & Vagualls (Standard Dictionary) terdapat *free man*, yang artinya dua. Pertama: *One person not in bondage of any kind.* Kedua: *One having full political rights.* (Seorang tak terikat oleh sesuatu. Orang yang memiliki hak-hak politis sepenuhnya).

Tulisan berikut hendak mengajak pembaca menelusur asal-usul kata preman dalam bahasa kita dan perkembangan kritik terhadap premanisme sebagai kesalahkaprahan yang mesti dicari alasannya, apalagi di masa kini, di mana premanisme telah meningkat maknanya dari jenis jalanan menjadi jenis gedongan, halus atau bersih (*Kompas* 16/3-1995).

Informasi Rosihan Anwar

Sebenarnya sembilan tahun lalu, wartawan kawakan Rosihan Anwar sudah terlebih dulu *alok* adanya kerancuan pengertian premanisme yang waktu itu disebarluaskan oleh media massa dengan restu Kantor Berita *Antara*. Tulisnya demikian: *"Dari sudut teknis-jurnalistik istilah premanisme yang dipakai oleh media massa, terlalu banyak* loop holes *(lubang-lubang)nya. Latar belakangnya tak pernah diberitahukan. Macam dan luas cakupan kejahatan dalam premanisme juga tak dijelaskan. Apa semua penduduk Nusantara ini paham arti preman dan premanisme? Belum tentu."*

Alok Rosihan Anwar di atas saya baca dalam bab 10 *(Premanisme dan prasarana di Medan)* dari bukunya berjudul *Perkisahan Nusa: masa 1973-1986* terbitan Grafiti Pers, Jakarta, 1986. Waktu itu di Sumatera, Kodim II Bukit Barisan diwartakan oleh *Antara*, hendak memberantas premanisme yang cukup meresahkan masyarakat perkotaan.

Lain Sumatera lain Jawa. Dalam bahasa Jawa kata preman sejak dulu tak memuat kaitan dengan tindak kejahatan. Harian *Wawasan* terbitan Semarang memuat berita tentang preman, baru akhir tahun 1994. Di situ diwartakan bahwa oleh suatu kelompok yang sedang bertarung di kampus UKSW didatangkan beberapa orang preman dari Semarang untuk melabrak dosen-dosen yang dianggap berbahaya.

Membaca berita itu, pikir saya yang didatangkan itu polisi secara preman untuk menjaga keamanan di kompleks perumahan dosen di malam hari. Tetapi anehnya mengapa tugas mereka justru mau melabrak dosen segala? Sebaliknya para mahasiswa asal Sumatera paling cepat mengerti arti preman yang ditulis koran tadi, yaitu tukang kepruk bayaran yang sewaktu-waktu dibutuhkan dapat disewa. Adapun preman dalam bahasa Jawa itu, misalnya polisi atau militer yang ditugaskan tetapi tak berpakaian seragam dinas. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta) preman dalam bahasa Indonesia dapat berarti partikelir, bukan militer, kepunyaan sendiri; misalnya, mobil preman itu bukan taksi.

Di Sumatera sejak zaman penjajahan, preman berarti orang bebas, karena ia tak terikat suatu instansi tertentu. Jelasnya preman itu mereka yang bukan pegawai gubermen. Adapun di Batavia sejak abad ke-17 atau 18, orang-orang yang dibebaskan dari status budak belian disebut *vrije lieden* (orang-orang bebas) atau *mardijkers;* ini berasal dari kata Jawa *mardika*.

Dari Padang ke Medan

Istilah preman yang sekarang tiba-tiba populer ini, bukan dari kata preman dalam bahasa Jawa, tetapi menurut Rosihan Anwar dari bahasa daerah di Sumatera Barat, yaitu Padang. Dari situ kata preman kemudian menyebar luas ke kota-kota lain, khususnya Medan. Di Padang mereka yang tak bersedia bekerja sebagai pegawai negeri, karena kuatnya jiwa wiraswasta mereka justru disebut preman. Lalu bagaimana mereka itu menghidupi tanggungan mereka, karena itu mempunyai keluarga?

Di Padang di antara para preman tadi terdapat pula para pesilat dan tukang pencak; mereka itu beraksi sebagai jagoan di pasar-pasar pada siang hari. Apakah sang jagoan itu mem-

berikan perlindungan kepada para pedagang sehingga mereka ini dapat aman untuk berniaga, dan apakah untuk jasa tersebut sang jagoan bisa memungut semacam upeti liar, hal itu hanya dapat diterka.

Setengah abad lalu di kota Padang ada istilah "preman tualak". Karena beroperasi mereka pada malam hari di pasar-pasar kosong, di antara mereka terdapat pula orang-orang yang suka mempraktekkan tindak homoseksual; sebutan mereka itu "pa anak Jawi". Apa kaitannya dengan orang Jawa, Rosihan Anwar tak memberikan penjelasan. Padahal di waktu itu sebutan Jawi di Arab sana berlaku untuk semua orang yang berasal Nusantara, dalam konotasi yang baik.

Di kota Medan, di pasar, pertokoan, ringkasnya di jalan raya banyak premannya, tulis Rosihan Anwar. Kerja mereka mencopet, memeras, menodong bahkan di pinggiran kota mereka itu juga terkenal suka merampok. Segala macam kejahatan yang dilakukan di jalanan itulah di Medan sebutannya premanisme.

Definisi preman dan premanisme

Dalam rubrik "Pikiran Pembaca" *Kedaulatan Rakyat* (6/4-1995) dimuat usul seseorang, agar pemerintah menyusunkan definisi yang baku mengenai preman dan premanisme. Dengan cara itu bisa ditentukan sejauh mana seseorang pantas disebut preman, sehingga layak untuk diberantas, diamankan dan dibina. Tanpa itu, banyak orang takut, dirinya sewaktu-waktu dapat dijaring oleh operasi petugas, padahal ia tak bersalah. Misalnya orang sedang bersantai atau duduk-duduk di pinggir jalan untuk menjemput keluarga yang bepergian atau berbelanja, tahu-tahu dibekuk polisi dan diangkut ke kantor polisi sebagai seorang preman.

Sebenarnya definisi untuk preman dan premanisme telah disusun. Preman adalah gambaran dari seseorang atau kelompok orang, yang hidup dari mata pencarian mengandalkan kejagoannya dengan memberikan jaminan keamanan kepada para pedagang di kawasan kota tertentu. Lalu, premanisme yang sudah merupakan gejala nasional digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan perilaku berlandaskan tujuan menghalalkan segala cara yang modus operandinya menakut-nakuti korban supaya mau memberikan upeti dengan imbalan jasa pengamanan.

Layak sebagai isme?

Adanya *embel-embel* isme dibelakang kata preman, sudah dikritik oleh Rosihan Anwar pada tahun 1986 juga. Layakkah kepremanan itu dipandang sebagai paham, keyakinan atau ideologi seperti sosialisme komunisme, nasionalisme dan liberalisme? Isme-isme tersebut kan memiliki suatu landasan teoretis khusus, sedang "premanisme" 'kan sekadar brutalitas fisik di jalanan saja.

Sosiolog lain dari UI seperti Johannes Sutojo berkata: "Jika premanisme yang mengandung embrio organisasi mengikut organisasi kejahatan yang berkembang di lapisan atas, itu pasti akan merusak sistem hukum dan sistem sosial politik masyarakat. Ini diperkuat oleh Prof Iman Santosa yang mengatakan bahwa *counter control* yang diciptakan oleh premanisme terhadap sesama *peer group*, jauh lebih memiliki kekuatan memaksa. Artinya sudah memiliki *rule of the game* tersendiri yang diikuti oleh para korban, karena mereka itu lebih takut kepada premanisme daripada ketentuan hukum yang resmi.

Selama premanisme masih berupa premanisme "jalanan", itu masih mudah diberantas, tetapi jika sudah meningkat menjadi premanisme "gedongan" yang juga disebut "halus", "berdasi" dan sebagainya, makin sulitlah mengatasinya.

* *N Daldjoeni, dosen pensiunan UKSW, Salatiga.*

Kompas, 12 Mei 1995

BAHASA KITA

"Laras": Samakah dengan "Logat"?

Dalam sebuah kesempatan Sdr. Priyo Laksono, yang tinggal di Sewon, Bantul, Yogyakarta, memberi tanggapan atas tulisan saya yang dimuat dalam *Republika*, 26 Maret 1995, yang membahas tentang logat daerah. Dia membenarkan bahwa memang sanak saudaranya mengucapkan *mBali*, mBandung, *mBrebes* (untuk *Bali, Bandung, Brebes*). "Tetapi," katanya dengan penuh semangat, "kalau mereka menulis, tetap saja mereka menulis sebagaimana adanya, yakni *Bali, Bandung* dan *Brebes*. Jadi, kalau ditulis, ketiga nama tempat itu ditulis tanpa huruf M sama sekali."

Sdr. Priyo memang tidak salah. Simaklah kata-katanya: *kalau ditulis*. Ia mengemukakan tanggapannya dari segi *tulisan*, sedangkan pembahasan kita pada waktu itu seluruhnya, sayangnya, adalah mengenai *logat* yang lebih sering terwujud dalam bentuk *lafal* atau *ucapan*.

Yang dikemukakan Sdr. Priyo sebenarnya adalah juga mengenai ragam bahasa, tetapi lebih berkaitan dengan *laras* atau *register*, bukan *logat* atau *dialek*. Jika *logat*, seperti yang dikemukakan dalam tulisan terdahulu, berkaitan dengan orangnya, yakni penutur atau pemakai bahasanya, maka *laras* berkaitan dengan pemakaian bahasanya, bukan dengan orangnya. Pemakaian bahasa ini lebih lanjut dapat dikaitkan dengan tiga pertanyaan: dipakai di bidang apa, dipakai dengan gaya apa, dan dengan cara bagaimana.

Adakah pembaca pernah mendengar atau tahu akan kata-kata seperti *kenape, kasata,* dan *kaserol?* Tidak? Pembaca tidak usah kecewa karena kata-kata itu terbatas pemakaiannya, yakni hanya dipakai dalam bidang tata boga alias seni masak-memasak. Karena pembaca tidak berkecimpung dalam bidang tata boga, maka wajar jika pembaca tidak pernah mendengar kata-kata tersebut. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa sebagian besar di antara kita sering mendengar kata-kata seperti *gol*, kiper, tendangan bebas, *lob, net,* dan *out*. Memang kata-kata yang terakhir itu pemakaiannya terbatas pada bidang olahraga, khususnya sepak bola dan bulu tangkis, tetapi karena sering disiarkan secara meluas oleh media massa, kata-kata yang tadinya asing bagi kita sekarang menjadi tidak asing lagi. Semakin kita mendalami suatu bidang, semakin banyak kata dalam bidang itu yang kita kuasai.

Laras yang berkaitan dengan gaya lebih ditentukan oleh sifat hubungan antara peserta pembicaraan. Makin erat hubungan di antara mereka, makin besar kemungkinan mereka memakai bahasa dengan gaya yang santai, tidak resmi, misalnya: "Ayo, duduk dulu!" Sebaliknya, makin jauh hubungan antara keduanya, makin resmi gaya bahasanya, misalnya: "Silakan duduk."

Yang terakhir dalam pembicaraan kita kali ini adalah ragam bahasa yang ditanyakan oleh Sdr. Priyo. Ragam bahasa ini berkaitan dengan cara bagaimana bahasa itu disampaikan, apakah disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Keduanya tentu saja berbeda. Simak saja bunyi [i] dalam bahasa Inggris. Bunyi i itu ditulis dengan cara yang berbeda, seperti terlihat dalam kata *deep, he, key, sea*. Sebaliknya, tulisan yang sama, oo, misalnya mewakili ucapan yang berbeda-beda seperti yang terdapat dalam kata seperti *blood, book, door, poor*.

Karangan yang Bapak/Ibu baca sekarang, misalnya, adalah karangan dalam bidang bahasa yang disajikan secara tertulis dengan gaya yang tak resmi.

■ b. suhardi

Republika, 14 Mei 1995

Kepedulian terhadap eksistensi bahasa Indonesia

Oleh Deddy Daryan DB

BAHASA merupakan salah satu identitas bangsa yang dapat dikatakan permanen sifatnya. Oleh sebab itu, bahasa juga merupakan sebagai ciri khas suatu bangsa. Bahasa, dengan demikian, tidak saja dipandang sebagai alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, tetapi juga bahasa sebagai unsur budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Kita patut berbangga memiliki bahasa yang boleh disebut khas, artinya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yaitu bahasa Indonesia. Kebanggaan kita bertambah pula, oleh karena bahasa Indonesia mampu secara politis mempersatukan bangsa kita.

Persatuan dan kesatuan kita sadari sebagai modal dasar yang paling pokok untuk kita meraih kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin melalui proses pembangunan dari waktu ke waktu. Ini membawa konsekuensi logis, bagaimana meningkatkan kepedulian bersama terhadap eksistensi bahasa Indonesia.

Pengaruh globalisasi

GLOBALISASI kita rasakan sebagai fenomena umum yang melanda seluruh belahan bumi ini. Kita tidak mungkin menolak atau menghindarinya. Masalahnya karena globalisasi selalu memunculkan dampak, yang sering kita pandang sebagai negatif.

Dampak negatif globalisasi baru kita rasakan manakala menerpa unsur budaya masyarakat. Salah satunya adalah unsur bahasa (Indonesia). Globalisasi selalu menawarkan unsur baru, trend baru, dan penyebarangannya begitu dahsyat, karena ditunjang oleh teknologi canggih ; perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat pijakan dan eksistensi kita melemah, pengaruh globalisasi hampir sulit dikendalikan. Hal ini hampir di segala bidang dan aspek kehidupan dewasa ini; sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Hal ini pula yang kita rasakan dan alami terhadap bahasa Indonesia, baik dalam sistem komunikasi lisan, lebih-lebih dalam sistem komunikasi tulisan. Terutama kalangan masyarakat yang amat berkepentingan dengan momentum globalisasi, yang bergerak terutama di bidang bisnis dalam kerangka untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang maksimal.

Gejala ini, untungnya, telah kita sadari sebagai ancaman terhadap eksistensi bahasa Indonesia, yang akan berdampak pula terhadap budaya bangsa secara keseluruhan.

Kemudian kita akan diskusi, seminar, saresahan, baik dalam forum nonformal maupun forum formal. Semua ini sebagai wujud dari kepedulian kita terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Dan terakhir belum lama ini, diadakan "pengindonesiaan" istilah asing yang dipelopori pengusaha konglomerat Ir Ciputra terhadap perusahaan. Dalam acara ini turut ambil bagian Mendikbud Wardiman Djojonegoro yang dalam kata sambungannya berintikan pentingnya melestarikan keutuhan bangsa Indonesia dalam semua aspek dan dimensi kehidupan bangsa Indonesia.

Kepedulian

PERTUMBUHAN dan perkembangan bahasa Indonesia, kita ketahui bersama sebagai proses yang panjang. Ini selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat dan dinilai budaya di dalamnya. Indikasi perkembangan ini setidaknya da 2 jalur.

Pertama, secara alami. Artinya bahasa Indonesia berkembang begitu rupa dengan selaras seiring dengan tingkat profil perkembangan masyaraka. Di sini kita lihat misalnya pertambahan kosa-kata terutama dari unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Barangkali pula adanya perkembangan atau pergeseran dalam hal struktur, komposisi, dan dialek bahasa.

Kedua, secara resmi. Artinya perkembangan bahasa Indonesia ditunjang dan didorong secara resmi tertulis, seperti misalnya diterbitkannya beberapa kali buku pedoman bahasa Indonesia, dan yang terakhir sebuah buku fondamental sifatnya, yaitu "Ejaan Yang Disempurnakan", yang didalamnya dimuat secara baku tentang tata turan bahasa Indonesia.

Kemudian secara histros-polis, bahasa Indonesia sudah lama dicanangkan sebagai bahasa persatuan, ketika diikrarkannya "Sumpah Pemuda 1928", yang salah satu poin pentingnnya adalah mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Tanggung-jawab

UNTUK menyambut 50 tahun Indonesia merdeka, sudah selayaknya masalah bahasa Indonesia ini kita kedepankan. Sebab bahasa sebagaimana yang terungkap di atas, merupakan budaya sekaligus penentu eksistensi bangsa; unsur komunikasi dan unsur pemersatu.

Ini membawa keharusan kita untuk bertanggung jawab terhadap keutuhan bahasa Indonesia, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi, tanggung jawab itu bukan hanya pada kelembagaan belaka.^(2.8)

Angkatan Bersenjata, 17 Mei 1995

Masyarakat Tidak Hormat kepada Bahasa Nasionalnya

Penguasaan Bahasa Indonesia Merosot

BANDUNG, (PR).-

Kemerosotan penguasaan Bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dewasa ini, terjadi karena masyarakat tidak menaruh rasa hormat terhadap bahasa nasionalnya. Hal itu sebagai akibat dari kurang baiknya pengajaran bahasa dan sastra di sekolah. Demikian kesimpulan wawancara "PR" dengan Direktur Kesenian, Drs. Saini KM, penyair Taufiq Ismail, dan WS. Rendra, di Bandung dan Jakarta baru-baru ini.

Menurut Saini KM, kurangnya rasa hormat terhadap bahasa nasional bisa dilihat pada maraknya berbagai media reklame yang sarat dengan istilah asing. Bahkan cara penulisan istilah tersebut mengikuti pula gramatika bahasa asing. "Padahal sebetulnya semua itu bisa dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi perkembangan bahasa Indonesia selama 50 tahun mengalami berbagai kemajuan dalam pengayaan," ujarnya.

Pengayaan bahasa, bisa terasa pada munculnya berbagai istilah baru dalam bidang teknologi, dan ilmu lainnya. Namun demikian harus diakui, penggunaan bahasa Indonesia di bidang filsafat, masih terasa kaku, belum lentur.

Sedangkan terjadinya kemerosotan dalam penguasaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, umumnya terletak pada penguasaan gramatika, selain pada penguasaan kosa kata. Lemahnya penguasaan gramatika, menunjukkan kelemahannya dalam cara berpikir.

Pada titik tersebut, harus dibedakan antara penguasaan bahasa sehari-hari dan pengusahaan bahasa tulisan atau akademis. Terjadinya kedangkalan berbahasa di kalangan masyarakat, karena ia sangat lemah penguasaan bahasa bertuturnya.

"Contoh di SLTP, siswa seharusnya difokuskan pada pelajaran mendengar, belajar bicara, belajar menulis, dan belajar membaca dengan baik, bukan dipaksa belajar linguistik. Karena, belajar pengetahuan ilmu bahasa itu, urusannya nanti. Yang paling dasar, mereka harus menguasai bahasa yang kepentingannya bukan sebagai alat komunikasi saja, tapi juga sebagai alat ekspresi budaya," jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, belum waktunya anak-anak tingkat SLTP atau SLTA belajar linguistik. Berdasarkan pengalaman, Bahasa Inggris di IKIP Bandung, pelajaran linguistik baru dipelajarinya pada semester tujuh.

"*Masa* siswa SLTP atau SLTA diuji fonem itu apa? Seharusnya pada tingkat dasar difokuskan sepenuhnya pada penguasaan bahasa, penguasaan perbendaraan kata, entah lewat karya sastra, atau percakapan. Dan karya sastra merupakan kelanjutan dari pelajaran bahasa. Jadi ke duanya harus dipelajari secara seimbang," paparnya.

Tiga generasi

Di pihak lain, penyair Taufiq Ismail, mengatakan, lemahnya pelajaran sastra sebagai kelanjutan dari pelajaran Bahasa Indonesia, berlangsung selama tiga generasi. Hal itu bila diukur dari masa kemerdekaan Indonesia.

Pelajaran sastra di SLTP dan SLTA saat ini, perbandingannya tidak seimbang. Untuk pelajaran bahasa, perbandingannya 11/12, sedangkan untuk pelajaran sastra perbandingannya 1/12. Akibatnya, lulusan SLTP dan SLTA lemah apresiasinya terhadap karya sastra.

"Pelajaran sastra yang mereka dapatkan, melulu lewat ringkasan roman dan drama, tanpa diberi kesempatan membaca secara utuh karya sastra. Jadi bagaimana mungkin mereka akan menghargai sastra, bila hanya mengetahui judul buku tanpa membaca isinya," jelas Taufik.

Dengan demikian, belajar Bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya sebatas pada belajar linguistik dan gramatika bahasa. Tetapi juga belajar sastra, dan di dalam karya sastra yang baik, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, sosial, atau religius yang kelak bermanfaat bagi kehidupan pembaca di kemudian hari.

Sedangkan, budayawan sekaligus dramawan terkemuka Indonesia, WS. Rendra mengatakan, saat ini banyak orang menaruh curiga terhadap karya sastra. Khususnya bila karya tersebut mengungkap realitas sosial, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Karena itu, menjadi tugas semua pihak untuk meluruskan kembali pandangan bahwa sastra merupakan salah satu sarana ekspresi budaya bangsanya. Di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan yang dalam. Dalam titik tersebut, sastra bukan sebagai alat provokasi, tetapi sebagai wacana pencerahan nilai-nilai.***

Pikiran Rakyat, 20 Mei 1995

Gangguan berbahasa dapat terjadi pada anak sejak balita

Jakarta, (AB)

Gangguan berbahasa dapat terjadi pada balita dan anak yang disebut sebagai "disfasia perkembangan", di mana anak-anak itu mengalami gangguan wicara-bahasa sebelum memperoleh ketrampilannya dalam berbahasa. Demikian penuturan ahli neurologi Prof. Dr. Sudiarto Kusumoputro dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap FKUI di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, disfasia perkembangan bisa terjadi disebabkan oleh kelainan pada Disfungsi Minimal Otak (DMO) atau Minimal Brain Disfunction (MBD) di belahan bagian kiri otak (hemisfer kiri) serta kanan ataupun korpus kolosum. "Sehingga menyebabkan terjadinya hambatan proses literalisasi dari hemisfer kanan ke hemisfer kiri", ujarnya pula dalam sidang senat guru besar UI yang dipimpin langsung Rektornya, Prof. Dr. M. Kamil Tadjudin.

Menrutu Neurolog kelahiran Solo tahun 1933 ini, disfungsi yang minimal bisa terjadi sejak masa kecil. Sehingga seringkali sulit dilacak kembali keberadaannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dewasa ini lanjut dia, masalah DMO, patut mendapat perhatian yang besar dari kalangan neurolog. Karena dengan demikian bisa diharapkan lahir anak-anak jenius dikemudian hari. Dijelaskan bahwa wujud gejala DMO sangat bervariasi. Tapi yang paling menonjol pada usia dini adalah disfasia atau gejala tidak terampil dalam berbicara yang mulai tampak pada anak berusia sekitar 2 tahun.

Masalah disfasia karena DMO sebetulnya pernah dilontarkan kepada masyarakat awam maupun profesional di Indonesia di tahun 1989. Ketika itu diperkenalkan bahwa masalah DMO sangat berkait dengan masalah pembelajaran dan daya ingat (learning and memory) yang juga cukup besar mendapatkan perhatian.

Dikemukakannya, angka kejadian DMO di Amerika, misalnya, mengalami kenaikan 253 persen dalam kurun awkatu 9 tahun. Sebelumnya tercatat dalam tahun 1977-1978 hanya 1,89 persen lalu melonjak 4,8 persen tahun 1986-1987.

Angka kejadian DMO dinyatakan 10 persen berada pada populasi anak sekolah, papar Sudiarto Kusumoputro.

Sementara itu, sebuah kajian yang pernah dilakukan di Jakarta, lanjutnya, menunjukkan dari sejumlah kasus penyandang DMO, 68 persen di antaranya menderita disfasia. Umumnya terjadi pada anak usia 2 tahun yang mempunyai kemampuan berbahasa di bawah normal. Atau hanya 50 persen dari yang diharapkan. Kendati mereka bukan anak-anak yang mempunyai gangguan pendengaran, defisit motorik, gangguan mental atau kerusakan otak dan gangguan emosional.

Kusumoputro juga menjelaskan, akibat disfasia perkembangan yang berlanjut dapat mengakibatkan kesulitan belajar spesifik (specific Lerning Disabilities) pada kanak-kanak usia masuk sekolah. Gejalanya antara lain dapat diketahui dari kesulitannya menangkap satu atau dua mata pelajaran. Sementara untuk mata pelajaran yang lain baik-baik saja. "Misalnya anak itu hanya tidak pandai dalam membaca (disleksia), tidak pantai menulis (disgrafis) atau tak pandai berhitung (diskalkulia)", tuturnya. Padahal umumnya, anak-anak dengan kesulitan belajar ini memiliki intelegensia normal. Bahkan dapat di atas normal sampai jenius.

Menurutnya pula, kebanyakan dari mereka menunjukkan gejala yang universal yaitu heperaktifitas, defisit atensi dan perhatian cepat teralih. Selintas tampak nyata anak-anak itu tidak dapat diam, bergerak terus mengerjakan sesuatu dalam waktu yang pendek, seperti menggambar atau bermain. Tetapi sebetulnya mereka mengalami kesenjangan antara potensi dan prestasi.

Dibutuhkan penanganan khusus agar prestasi mereka dapat diaktualisasikan, kata Sudiarto Kusumoputro, ayah tiga orang anak ini. **(3.23/1.6)**

Angkatan Bersenjata, 20 Mei 1995

Presiden canangkan disiplin nasional

Ada tanda-tanda merisaukan dalam bahasa Indonesia

JAKARTA — Presiden Soeharto mengingatkan, akhir-akhir ini ada tanda-tanda yang merisaukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena itu, mengulangi ajakan yang disampaikan pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1972, Kepala Negara mengajak semua untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Penggunaan bahasa yang tertib menunjukkan cara berpikir dan bertindak yang tertib," kata Presiden dalam pidato peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-87 dan pencanangan disiplin nasional, di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (20/5).

Ketertiban dinilai sangat penting, sebab merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib. Ketertiban juga merupakan dasar bagi rasa tenteram dan sejahtera. Ketertiban pun dasar bagi masyarakat yang modern dan maju.

"Berpikir tertib, bersikap tertib dan bertingkah laku tertib itulah hakekat dari disiplin nasional," lanjut Presiden seraya menjelaskan, bangsa-bangsa yang maju dengan cepat adalah bangsa-bangsa yang berdisiplin tinggi. Artinya, hanya bangsa yang berdisiplin tinggilah yang mampu secara tertib dan terkendali melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.

Disiplin nasional menurut Kepala Negara tidaklah tumbuh sendiri. Disiplin nasional lahir dari disiplin pribadi, disiplin kelompok, disiplin golongan dan disiplin masyarakat. Semua ini harus ditumbuhkan, dipelihara dan ditegakkan secara lurus oleh diri sendiri.

Untuk itu, saat mencanangkan gerakan disiplin nasional, Presiden mengajak memulai dari kegiatan sehari-hari, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, antre, mematuhi jam kerja dan sebagainya.

Meredam tantangan

Pada bagian lain pidatonya, Presiden Soeharto mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia hidup di tengah-tengah dunia yang sedang berubah dengan cepat. Setiap bangsa dan negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Setiap perubahan selalu membuka peluang dan tangan.

"Untuk itu, kita harus menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya dan di lain pihak kita harus meredam sekecil-kecilnya tantangan-tantangan yang merugikan kita," kata Presiden.

Bersambung ke hal XV kol 7

PRESIDEN —

(Sambungan dari hal 1)

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia juga sedang mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Bangsa Indonesia sedang sibuk-sibuknya mengadakan serangkaian penataan diri, baik dalam tatanan pemerintahan maupun dalam tatanan kemasyarakatan.

"Sesuai dengan semangat zaman baru sekarang ini, maka kita harus memantapkan, mengembangkan dan meningkatkan peranan masyarakat yang lebih besar dan lebih aktif dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya," kata Kepala Negara.

Dijelaskan, kini bangsa Indonesia tengah melakukan ujicoba otonomi daerah sejumlah tingkat II, juga sedang menelaah sistem pemilihan umum dan sistem perwakilan yang lebih baik lagi untuk masa datang. Pada tahap berikutnya akan melanjutkan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi. Pendeknya, terus melakukan langkah-langkah untuk memberi bobot terhadap hak azasi manusia dan martabat kemanusiaan.

Dijelaskan, para pendiri negara tidak membangun negara kebangsaan yang berwawasan sempit. Para pendiri negara, membangun negara kebangsaan yang secara sadar menempatkan diri sebagai bagian dari dunia yang beradab. Pembukan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa dalam alam kemerdekan, bangsa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Untuk itu, tentu saja modal nasional yang telah kita miliki harus tetap kita pelihara, kita mantapkan dan kita kembangkan sebagai wahana bersama untuk memasuki tatanan dunia baru yang akan datang. Modal nasional itu adalah semangat kebangsaan dan negarra kebangsaan kita," kata Presiden.

Dijelaskan, globalisasi tidak akan menghilangkan peranan negara kebangsaan. Karena itu, bangsa Indonesia harus memelihara baik-baik negara kebangsaan ini. Bangsa Indonesia harus menghindari setiap langkah yang dapat membahayakan negara kebangsaan milik bersama ini. Bahkan bangsa Indonesia juga harus menjaga baik-baik lambang-lambang negara kebangsaan itu.

Generasi pendahulu

Sebelumnya Kepala Negara menjelaskan, bangsa Indonesia membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan secara bertahap dari bawah ke atas, mulai dari rakyat ke bentuk negara. Ini tidak lain, karena bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Dijelaskan, pada setiap tahapan perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, masyarakat perlu mengadakan penyesuaian diri. Dengan penuh keyakinan, semua memelihara khasanah terbaik dari budaya masa lampau. Dengan penuh kesadaran bangsa Indonesia meninggalkan adat kebiasaan yang telah usang.

"Karena memang itulah hakekat modernisasi. Itulah sebabnya, saya seringkali mengingatkan bahwa yang kita bangun adalah masyarakat modern yang berkepribadian sendiri," lanjut Presiden.

Bangsa Indonesia, menurut Pak Harto membangun tatanan nasional baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Rangkaian pembaharuan dan penyegaran terus dilakukan dan tidak terputus-putus.

"Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita saat ini adalah prestasi dari generasi demi generasi. Setiap langkah maju yang dicapai suatu generasi bertumpu pada prestasi yang dibangun oleh generrasi pendahulunya. Hars pula kita sadari bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan itu harus terus menerus kita pelihara dan kita mantapkan," katanya.

Memelihara kehidupan kebangsaan menurut Presiden adalah dengan menekuni dan menghayati semangat dan cita-cita kebangsaan. Semua saja — setiap kalangan, setiap golongan, setiap lapisan masyarakat — harus menempatkan diri sebagai bagian menyeluruh dari bangsa Indonesia yang besar ini. (yud)

Terbit, 20 Mei 1995

Nasionalisme dan Sikap Masyarakat pada Bahasa Indonesia

Oleh Teguh Setiawan

ADA pepatah, "bahasa menunjukkan bangsa". Akan tetapi tidak semua bangsa (negara) memiliki bahasa yang sekaligus menunjukkan bangsanya dan tidak semua bahasa menunjukkan bangsanya (negaranya). Untuk dapat memiliki bahasa yang dapat menunjukkan identitas bangsanya tidaklah mudah. Banyak sengketa dan peperangan antarsuku di suatu negara yang hanya memasalahkan bahasa. Masing-masing suku menganggap, bahwa bahasanyalah yang paling baik dan paling pantas dijadikan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Ketidakmampuan suatu bangsa untuk membentuk bahasa persatuan yang digali dari bangsanya sendiri mengakibatkan meng ambil bahasa dari negara lain untuk dijadikan bahasa persatuan. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya bangsa Indonesia bersyukur dan bangga memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pencanangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 secara nasional yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini bukan kebetulan. Ada kaitan yang erat antara bahasa Indonesia dan nasionalisme. Kaitan ini dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional atau bahasa persatuan.

Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meroke. Sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, butir ketiga, "Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia". Secara eksplisit ikrar Sumpah Pemuda itu tidak sekadar untuk mengangkat, mengakui, dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tetapi sekaligus menunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Secara tersirat hal itu mengandung makna, menggunakan bahasa Indonesia secara cermat dengan tetap memelihara agar bahasa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi yang mantap dan sekaligus lambang jati diri bangsa.

Selain secara politis sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, secara yuridis bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Konsekuensi ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidup an negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar resmi pada lembaga-lembaga pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai cara pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Maksudnya, rincian fungsi bahasa berlaku sepanjang masa selama bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia yang terhormat itu akan berfungsi sebagaimana mestinya, apabila adanya pembinaan bahasa yang berkelanjutan. Yakni, suatu upaya yang berkenaan dengan usaha membudidayakan pemakaian bahasa agar para pemakai bahasa Indonesia memiliki sikap positif. Sikap positif ini tercermin dengan adanya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran akan norma bahasa Indonesia.

Siapakah yang harus memelihara dan membina bahasa Indonesia yang hidup di antara sekian banyak bahasa daerah dan bahasa asing yang masuk ke Indonesia? Pertanyaan ini patut muncul dengan melihat penggunaan bahasa Indonesia yang sudah banyak menyimpang dari kaidahnya dan penggunaan kata-kata asing yang semakin marak oleh bangsa kita. Bukankah ini sebagai salah satu indikator menurun nya sikap positif sebagian masyarakat kita terhadap bahasa Indonesia?

Dalam Tap MPR No 2/1993 disebutkan, pemeliharaan dan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya merupakan tanggung jawab sekolah-sekolah atau para pakar bahasa, tetapi merupakan tugas kita bersama.

Pembinaan di sekolah merupakan tanggung jawab guru, baik guru bidang studi bahasa Indonesia maupun guru bidang studi yang lain. Adapun pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, kita tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai pembina penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi tertentu sesuai dengan jabatan dan profesi masing-masing. Namun, kenyataan yang ada tidaklah demikian. Pembinaan penggunaan bahasa Indonesia saat ini seakan-akan masih menjadi tanggung jawab guru dan ahli bahasa. Dengan kata lain, berhasil tidaknya penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seolah-olah hanya bergantung pada guru dan ahli bahasa.

Pembina Bahasa

Masyarakat Indonesia sebagai pemilik dan penutur bahasa Indonesia serta sebagai salah satu komponen yang harus membina penggunaan bahasa Indonesia harus memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif ini diwujudkan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, merasa ikut me-

miliki bahasa Indonesia, dan memiliki kemauan untuk membina penggunaan bahasa Indonesia.

Akan tetapi kenyataan yang ada tidaklah demikian. Masyarakat Indonesia saat ini belum menyadari bahwa dirinya itu sebagai pembina bahasa Indonesia. Mereka hanya mengetahui bahwa pembinaan penggunaan bahasa Indonesia adalah tugas sekolah dan para ahli bahasa. Anggapan ini merupakan kekeliruan yang besar. Ini terjadi karena tidak adanya dampak positif apabila seseorang itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kata lain, tidak ada imbalan yang diperoleh apabila seorang pegawai mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Sikap kurang peduli semacam itu terhadap penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulis tercermin pada sikap mereka terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walau ada sikap positif berupa rasa hormat kepada bahasa kita sendiri, tetapi hanya berhenti sampai pada rasa hormat saja. Tidak diwujudkan dengan semangat yang sama di dalam perilaku bahasa kita. Contoh yang paling konkret sudah banyak diekspos oleh berbagai media massa. Semaraknya penggunaan kata-kata asing khususnya untuk nama-nama hotel, bank, pertokoan, restoran, kawasan pemukiman, bahkan produk-produk *real estate*. Di tempat-tempat pariwisata pun demikian, hanya dengan keinginan untuk memberikan kemudahan kepada pelancong-pelancong mancanegara cenderung bahasa Indonesia dinomorduakan, misalnya dengan menuliskan dalam bahasa asing terlebih dahulu baru di bawahnya bahasa Indonesia.

Situasi semacam itu lebih marak lagi dengan adanya sifat latah masyarakat kita yang merasa bangga jika punya rumah, masuk restoran, atau menggunakan produk yang namanya berbau asing. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan cenderung akan menghambat pemasyarakatan bahasa Indonesia. Dan yang lebih celaka lagi, hal seperti itu dapat memberi kesan seakan-akan bahasa Indonesia tetap merupakan bahasa yang lebih rendah mutunya dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Inggris.

Perilaku semacam itu menunjukkan perilaku bangsa kita yang kurang menghargai bahasa sendiri. Sudah waktunya kita secara sungguh-sungguh berbenah diri dengan pemakaian bahasa kita sehingga kita dapat dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Rasa bangga ini harus dapat mengatasi pertimbangan komersial. Pemerintah sudah mulai mengambil langkah untuk menuju ke arah itu, yaitu dengan pencanangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dilakukan 20 Mei 1995 oleh Presiden Soeharto. Langkah pemerintah tersebut patut kita dukung bersama. Paling tidak, dengan pencanangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara nasional memberi harapan semakin sadarnya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita juga berharap, langkah pemerintah ini tidak hanya berhenti pada pencanangan saja tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret oleh berbagai pihak. Salah satu contoh yang sudah dilaksanakan Pemda DKI Jakarta, yaitu dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 1992 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame di wilayah Jakarta. Langkah Pemda DKI Jakarta yang positif ini akan lebih baik apabila diikuti pemda-pemda lain.

Sikap Kita

Untuk memperbaiki sikap masyarakat agar bersikap lebih positif terhadap bahasa Indonesia tidak hanya cukup ditempuh dengan cara mengeluarkan peraturan. Hal ini mengingat bahwa selama ini faktor sikap itu sendiri yang menjadi masalah sekaligus sebagai andalan utama menyadarkan masyarakat supaya ikut serta menyebarluaskan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, di samping adanya peraturan sebagai sarana untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menggunakan bahasa juga harus diikuti penanaman sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan Asim Gunawan dari Universitas Indonesia terhadap 126 subjek dari beberapa daerah dengan kriteria subjek dwibahasawa, dalam arti memiliki kemampuan yang seimbang antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan sebelas ciri yang dinilai, yaitu kepandaian, kebijaksanaan, kejujuran, keterpelajaran, rasa humor, kepercayadirian, kedudukan, keramahan, kepemimpinan, disiplin, dan rasa tanggung jawab, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan bahasa Inggris dinilai lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa subjek pada umumnya lebih "menghormati" atau "menunjung" tinggi bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ini bukanlah kabar yang menggembirakan bagi pembinaan bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan sikap dan keterkaitan sentimental. Jadi, ada petunjuk bahwa bahasa asing khususnya bahasa Inggris dapat menghalangi sikap dan rasa cinta kepada bahasa Indonesia.

Masalah sikap bahasa dan rasa cinta kepada bahasa Indonesia dapat dipecahkan dengan menanamkan sejak dini sikap yang baik terhadap bahasa Indonesia dan rasa menghargai bahasa Indonesia melalui pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, dimulai dari TK sampai dengan SMA, bahkan sampai PT. Hal yang harus diperhatikan, jangan sampai anak-anak sebagai generasi bangsa membagi cintanya kepada bahasa asing, apalagi sampai mereka mencintai dan menghargai lebih mendalam daripada mencintai dan menghargai bahasa Indonesia. Penanaman rasa cinta dan menghargai bahasa Indonesia tidak hanya diharapkan melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi dapat juga dengan menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak kita yang secara tidak langsung juga akan tertanam rasa cinta yang mendalam kepada bahasa Indonesia.

Rasa nasionalisme itu akan tampak di dalam sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, rasa cinta, dan rasa keterkaitan sentimental yang erat dengan bahasa Indonesia. Di dalam bentuknya yang sangat kuat, rasa nasionalisme itu dapat mewujud dalam pendirian bersedia mati demi membela bahasa Indonesia. Rasa nasionalisme semacam itu sudah seharusnya lebih meningkat seiring dengan umur bangsa kita yang setengah abad. Dan hanya

dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia itulah yang dapat kita lakukan saat ini untuk menghargai dan menghormati perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita, dalam usaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. ❑-b.

*) ***Drs Teguh Setiawan,***
Staf Pengajar FPBS IKIP Yogyakarta.

Kedaulatan Rakyat, 20 Mei 1995

BAHASA KITA

Ciri-ciri Bahasa dalam Judul Berita

Dalam bahasa surat kabar, khususnya dalam judul berita, awalan *me-* pada umumnya tidak digunakan agar judul itu lebih ringkas, lebih menarik, dan lebih hidup. Hal ini juga disebabkan awalan *me-* tidak berfungsi semantis, artinya tidak mengubah makna kalimat. Misalnya, kalimat ''Saya *beli* buku'', sama maknanya dengan kalimat ''Saya *membeli* buku''. Lain halnya dengan awalan *di-*. Awalan *di-* berfungsi semantis. Misalnya kalimat ''*Ia makan ikan*'', berbeda sekali maknanya dengan kalimat ''Ia *dimakan* ikan''.

Dalam hal ini, awalan *me-* itu hanya berfungsi gramatikal, artinya, hanya diperlukan untuk memenuhi aturan bahasa, terutama dalam penggunaan bahasa ragam resmi, atau ragam tulisan baku. Dalam bahasa ragam tulis resmi kita tidak dibenarkan meninggalkan awalan *me-* dalam kata kerja aktif. Penggunaan awalan *me-* itu merupakan keharusan tata bahasa, sebagai salah satu syarat ragam tulis resmi.

Misalnya:

''Saya sudah *terima* laporan mahasiswa itu.''

''Developer dianjurkan *bangun* rumah susun.''

''Mereka harus *punya* izin berusaha.''

Kalimat-kalimat itu hendaklah ditulis

''Saya sudah *menerima* laporan mahasiswa itu.''

''Developer dianjurkan *membangun* rumah susun.''

''Mereka harus *mempunyai* surat izin berusaha.''

Dalam judul berita pada surat kabar tidak diperlukan awalan *me-*. Namun, bila digunakan juga terasa mubazir, kurang menarik perhatian, dan tidak hidup. Hal ini masih sering kita jumpai. Perhatikan contoh ini

''Belanda akan *Mengakui* 50 Tahun Indonesia Merdeka''

''Televisi sudah *Menjadi* Ibu Kedua''

''Islam belum pernah *Menimbulkan* Riak di AS''

''Misi *Mendongkrak* Ekonomi Bawah''

''AD Argentina *Mengaku* Berperang Kotor''

Judul yang dikemukakan di atas akan lebih menarik dan lebih singkat bila kata yang berawalan *me-* itu ditulis tanpa awalan *me-*.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam judul berita itu ialah penggunaan huruf kapital. Dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dijelaskan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata kecuali kata partikel seperti *di, ke, dari, untuk*, dan *yang*, yang tidak terletak pada posisi awal, di dalam judul karangan, seperti judul berita ini.

Kesalahan kecil masih sering dijumpai, misalnya pada judul berikut.

''Dalam Menilai Hadis-hadis *Tentang* Perempuan''

Dalam judul ini terdapat kekurangcermatan penggunaan huruf kapital *t* pada *Tentang*, seharusnya dengan huruf kecil saja karena kata *tentang* tergolong kata tugas.

''Perlu Kerja *sama* Internasional *Memberantas* Kriminalitas''

Dalam judul ini terdapat kekurangcermatan menulis kata *sama* dengan huruf *s* dengan huruf kecil, seharusnya dengan *s* huruf kapital karena *sama* adalah kata yang bukan kata tugas. Kata *Memberantas* cukup ditulis *Berantas* saja, tanpa awalan *me-*. ■ Edwar Djamaris

Republika, 21 Mei 1995

Bahasa dan Kebudayaan

...sebuah rumah dekat perairan kelabu,
jendela-jendela senantiasa terbuka
menghadap laut yang bosan, kami tak memilih semua itu,
kami adalah apa yang kami ciptakan...

Derek Walcott

KITA akan bicara soal bahasa. Sebab, adalah tak terbayangkn, kebudayaan tanpa bahasa. Bahasa adalah titik sentral kebudayaan. Kebudayaan akan menjadi amburadul jika masyarakat mulai kehilangan "rasa hormat"-nya terhadap bahasa, saat kekayaan dan keragaman bahasa berubah menjadi seragam.

Tanpa melodramatisasi, bahasa itu jelas akan kehilangan makna. Tentu tak berarti bahasa itu musnah. Tetapi, bahasa itu menjadi kering, karena wujud akhir setiap proses penalaran muncul dalam bentuk ekspresi yang jelas, jujur, dan apa adanya. Kebudayaan juga ikut hancur, jika kata-kata bisa saling dipertukarkan. Sebagai misal, makna "taking out" yang berkaitan dengan seseorang (mengajak, Red) jelas tidak sama dengan *take out* dalam konteks makanan. Namun jika kita bisa sepakat untuk tidak memaknai kata-kata tersebut sebagai kematian atau pembunuhan, dan jika kita menerima kata-kata itu sebagai metafora umum yang konvensional, maka ada juga kandungan moralitas dan etika pada kata-kata tersebut.

Yang dimaksud di sini bukan pengembangan bahasa dalam kehidupan umum atau pada media, tetapi dalam konteks kesusasteraan. Jika mengamati negeri ini, maka orang selalu tertampar dengan suara hati republik ini sebagaimana terungkap pada puisi-puisi para penyair Amerika. Lihat saja, suara-suara itu begitu kental ditemukan pada karya Robert Lowell, yakni kepedulian terhadap republik —bukan pada tingkat nasionalisme atau jingoisme— sebagai perwujudan sesuatu yang dikenal dan referensial.

Jadi, semua berpusat pada soal moral. Namun, sedikit lebih menyentuh daripada itu. Jika Anda terpancang pada masalah moral, maka sebaiknya Anda memberikan kuliah dan khotbah. Usia republik ini semakin tua, sehingga integritasnya memperoleh tantangan semakin banyak. Pada puisi-puisi para penyair terkemuka Amerika, saya temukan kemarahan terpendam dan kebulatan tekad yang tak semestinya diungkapkan.

Kritik umum yang saya dengar dari para penulis Eropa, keterlibatan diri penulis dan penyair Amerika dianggap masih kurang. Mereka dinarapkan memiliki keterlibatan sosial yang tinggi, khususnya menyangkut masalah-masalah tertentu yang relevan dengan para penulis Eropa Timur —represi secara langsung, kawat berduri, polisi, dan sebagainya. Di sini hal itu tak terjadi. Tetapi justru karena itu, para penulis Amerika bahkan harus semakin terbuka kesadarannya. Karena problem itu tidak terjadi di sini, maka mereka sepertinya tak punya keharusan untuk mengungkapkan ancaman yang berlangsung di wilayah lain. Tetapi, ancaman bagi republik ini —sebagai akibat ancaman terhadap integritas pikiran— merupakan tema berkesinambungan dalam bahasa kesusasteraan Amerika belakangan ini.

Kita tahu, Plato mengesampingkan penyair dari gagasannya tentang republik. Kenapa bisa begitu? Begitulah pintarnya dia. Penyair senantiasa menciptakan gelombang, sehingga republik yang ideal tak bisa menoleransi keberadaan mereka. Bukankah para penyair suka menggerutu dan mengeritik? Mereka juga tak bisa menerima situasi yang disebut "kondisi sempurna seorang manusia". Dalam lingkungan rejim komunis, mereka bilang, "Apa *sih* yang Anda keluhkan? Anda sama sekali tak berbeda dengan orang lain. Jalanan sudah Anda nikmati, rumah, dan obat-obatan juga sudah Anda peroleh. Lantas, apa lagi mau Anda?" Demikian pandangan negara. Segala hal mesti berjalan lancar, sehingga siapa *sih* Anda *kok* sampai berani-beraninya mengeluh? Para penyair umumnya kesal terhadap arogansi pandangan tentang republik yang ideal, karena republik ideal itu jelas harus berarti rezim komunis ala Rusia atau demokrasi sepenuhnya sebagaimana yang berlaku di Amerika. Terus, kenapa orang mesti mengeluh? Penyair sebenarnya bukan mengeluh, tetapi mereka justru menumpahkan ketidakpuasan yang mengendap dalam batin mereka. Dan, unek-unek tersebut tak dapat dituntaskan sekadar dengan obat-obatan yang mujarab, jalan raya licin beraspal, dan rumah-rumah mewah.

Lalu, apa sebenarnya "kesempurnaan" yang dicari seorang penyair? Itulah masalahnya. Penyair sesungguhnya tidak menghendaki kesempurnaan. Bagi mereka, kesempurnaan semacam itu justru tak pernah ada. Baik secara materialistik maupun spiritual? Itu sebabnya Plato pernah bilang, "Menjauhlah kalian (para penyair, Red) dari sini. Kalian bakal merusakkan segalanya, seandainya sebuah republik benar-benar berdiri."

Sekadar diketahui, di masa Sophocles dulu penonton teater benar-benar luar biasa. Barangkali, untuk ukuran saat ini, mereka bisa memenuhi ruangan Broadway. Agaknya Anda telah memberikan contoh tentang nurani sebagai orang Amerika. Betapa kita masih perlu berbuat lebih banyak. Jika diambil rata-rata setiap kota memiliki universitas, dan anggaplah mereka yang berpendidikan tinggi tersebut juga menulis puisi, maka

gambaran itu jauh lebih menggembirakan daripada omongan orang.

Ada berbagai suara di sana. Para penyair berbicara dalam irama masing-masing, dan dengan pesan serta gaya mereka yang berbeda. Tentu saja. Itu terjadi di setiap kawasan. Jika Anda berada di wilayah Pacific Coast, ada syair-syair dari sana yang bisa Anda temukan. Di kawasan Midwest jenisnya lain lagi. Puisi yang sebenarnya memiliki akar yang sempit, yakni pengertian tempatnya ada dan jelas.

Penyair memang selalu penuh dengan obsesi. Obsesi itu adalah kemustahilan untuk menumpahkan ekspresi secara terbuka. Dante, misalnya, tak bakal pernah merasa puas dengan *Divina Comedia*. Kondisi seorang penulis ibarat kondisi seorang rendah hati yang sangat menderita. Karya-karya *masterpiece* tak pernah dimaksudkan sebagai karya-karya besar oleh para pengarangnya. Yang diketahui penulis adalah menciptakan karya-karya yang sama sekali tak mewakili visinya. Ketidakpuasan penyair demikian hebatnya.

Orang mungkin cemburu melihat kami, para penyair yang bisa begitu bagus menggambarkan berbagai hal dengan bahasa yang dapat dipahami. Itu memang pilihan moral. Kami selalu mencari dan menemukan kata yang pas sebagai aksi moral. Tetapi, tanggung jawab penyair juga luar biasa, termasuk di dalamnya tanggung jawab terhadap asal mula pemilihan kata. Menemukan kata-kata yang tepat bukanlah hal sederhana. Setiap kata juga memiliki sejarah tersendiri.

Tidak ada hiruk pikuk begitu banyak suara dari masa lalu yang mengiang-ngiang di telinga. Bagi penyair muda, memang ada kenikmatan tersendiri, jika semua gema ini berada di dekat telinga. Para kritisi cenderung mengatakan, "Oh, tulisan Anda mirip gaya Dylan Thomas." Atau, bisa juga, "Oh, gaya penulisan Anda persis tulisan setiap orang." Terus terang, penyair muda umumnya suka meniru gaya setiap penulis.

Apa sebenarnya yang kami mau ketika mencipta puisi? Kenikmatan estetik? Mudah-mudahan jawaban saya tak terdengar terlalu sederhana, yakni merumuskan apa kira-kira kata-kata selanjutnya. Jika Anda tahu persis apa yang bakal Anda goreskan saat menulis puisi, maka jawabannya memang serupa. Menciptakan puisi merupakan proses berkesinambungan untuk melukiskan kembali "kedunguan" Anda. Dalam arti, Anda tak harus mengetahui apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dari proses tidak tahu ini, Anda kemudian belajar kembali. Kata atau frase berikutnya yang ditulis harus terasa seolah-olah tengah ditulis untuk pertama kali, sehingga Anda menemukan makna kata tersebut sesuai dengan yang Anda kenakan. Begitulah "garis tangan" ideal penulisan puisi.

Anda harus mengaitkan praktik penulisan puisi itu dengan perisitiwa dalam puisi secara sublim. Yang terjadi, seolah-olah puisi tersebut dipraktikkan sebagai suatu keahlian. Anda tak bisa menganggapnya sebagai fenomena. Tak ada "penyair ajaib" dalam sejarah dunia. Berbeda dengan para "musisi ajaib"—di mana bakat musik itu datang kepadanya begitu saja. Bahkan, mungkin juga berlainan dengan pelukis dan tentu saja, para aktor panggung. Tetapi puisi bukan berarti bahwa bahasa merupakan bagian dari pengalaman. Rimbaud, yang menyelesaikan karya-karyanya pada usia sembilan belas tahun, malah "mengekor" sejarah kesusasteraan Prancis. Pengetahuan dan bacaannya memang menakjubkan. Dengan suatu keahlian, maka suatu peristiwa atau kejadian bisa disublimasikan. Tetapi, keahlian itu harus dipraktikkan.

Saya sendiri, unsur keberuntungan lebih banyak terjadi pada saya. Saya berasal dari keluarga miskin. Negara-negara miskin jelas mempunyai kondisi pas-pasan. Karya-karya klasik di perpustakaan maupun buku-buku komik sama sekali tak bisa dijumpai. Makanya, ketika saya mulai dewasa, akses itu justru saya peroleh secara langsung dari para penulis terkemuka.

Mula-mula saya membaca Dickens dan Shakespeare. Karena bersekolah, buku-buku itu saya baca dengan suka cita, bukan sebagai latihan atau hukuman. Orang dewasa biasanya ragu-ragu untuk memberikan kepada anak kecil buku-buku yang mungkin sulit mereka pahami, tetapi imajinasi saya justru tergerak untuk membaca segala hal. Saat membaca Dickens, saya memang tidak memahami keseluruhan isi buku itu. Tetapi, saya tertantang untuk menyelesaikan membacanya, karena ada kebanggaan bahwa saya baru saja selesai membaca Dickens.

Terkadang saya meminta para mahasiswa saya untuk menghafalkannya dalam hati. Nyatanya mereka menemukan kenikmatan tersendiri saat menyimak dan bertutur tentang isi antologi puisi itu, sehingga saya pun menyediakan berbagai karya untuk mereka baca. Membaca dan menyimak memang merupakan metode untuk mempertahankan penguasaan bahasa. Sesekali saya juga meminta mereka membacakannya di depan kelas. Mula-mula mungkin Anda agak ragu, karena dalam budaya semacam itu Anda tak harus bersuara. Sebaliknya, dalam kultur yang lain Anda justru perlu mengungkapkannya secara lisan.

Jawa Pos, 21 Mei 1995

Presiden Soeharto:

Perubahan takkan Bahayakan Persatuan

JAKARTA — Presiden Soeharto menegaskan, berbagai perubahan yang tengah dilakukan tidak akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang saat ini semakin kokoh. Pembangunan selama seperempat abad terakhir, telah memberikan pengalaman yang sangat kaya.

"Kita belajar dari keberhasilan maupun kegagalan yang kita alami," ujar Kepala Negara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Balai Sidang Senayan Jakarta kemarin. Karena itulah, menurutnya, dari waktu ke waktu bangsa Indonesia bertambah mampu merangsang, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan gerak pembangunan dalam suasana kebangsaan yang stabil.

Presiden kemudian menunjuk sejumlah langkah perubahan penting yang sedang dilakukan, seperti uji coba pemberian otonomi yang lebih luas di sejumlah daerah tingkat II, penelaahan sistem pemilu dan sistem perwakilan, deregulasi, dan debirokratisasi di bidang ekonomi. "Kita juga meneruskan langkah-langkah untuk memberi bobot terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan," katanya.

Perubahan yang dilakukan, menurut Presiden, tetap dengan memelihara khasanah terbaik dari budaya masa lampau dan dengan penuh kesadaran meninggalkan adat kebiasaan yang sudah usang. "Itulah hakikat modernisasi," tegas Kepala Negara seraya kembali mengingatkan bahwa yang kita bangun adalah masyarakat modern yang berkepribadian.

Selanjutnya Presiden mengatakan, saat ini kita membangun tatanan nasional baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Kita mengadakan rangkaian pembaruan dan penyegaran yang terus menerus dan tidak terputus-putus.

Perubahan dunia yang begitu cepat, kata Presiden, mengharuskan setiap bangsa dan negara menyesuaikan diri dengan perubahan yang selalu membawa peluang dan tantangan. "Sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa, kita juga sedang mengadakan penyesuaian, mengadakan serangkaian penataan diri baik dalam tatanan pemerintahan maupun dalam tatanan kemasyarakatan," ujar Presiden.

Sesuai dengan semangat zaman baru itu, lanjut Presiden, "Kita harus memantapkan, mengembangkan, dan meningkatkan peranan masyarakat yang lebih besar dan lebih aktif dalam kehidupan politik, sosial ekonomi, dan budaya."

Pada bagian lain, Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memelihara sebaik-baiknya negara kebangsaan yang telah diperoleh dengan susah payah, karena adanya globalisasi.

"Globalisasi tidak akan menghilangkan peranan negara kebangsaan. Karena itu kita harus memelihara baik-baik negara kebangsaan ini," ujar Presiden. Untuk memeliharanya, perlu dipelajari dasar filsafat dan ideologi negara, tugas pokok, sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara.

Sementara itu dalam peringatan Harkitnas yang dihadiri Wakil Presiden Try Sutrisno, para menteri Kabinet Pembangunan VI, serta ribuan undangan itu, Presiden mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional dan Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. "Bahasa Indonesia harus kita jaga baik-baik dengan tanggung jawab sebesar-besarnya," tegas Kepala Negara sembari menambahkan, akhir-akhir ini ada tanda-tanda yang merisaukan dalam penggunaan Bahasa Indonesia.

Tentang disiplin nasional, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa yang maju dengan cepat adalah bangsa yang berdisiplin tinggi. Disiplin nasional tidak tumbuh sendiri, ia lahir dari disiplin pribadi, kelompok, dan masyarakat. " Semua harus ditumbuhkan, dipelihara, dan ditegakkan secara lurus oleh seluruh masyarakat," tegas Presiden.

Karena itulah, dalam memperingati Harkitnas di tahun ke-50 Kemerdekaan RI, Presiden mengajak untuk menyegarkan kembali, dan membulatkan semangat kebangsaan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang benar dan baik serta dengan lebih meningkatkan disiplin nasional kita.

Menanggapi gerakan disiplin nasional, Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Juwono Sudarsono menilai gerakan disiplin harus dicontohkan oleh lapisan menengah dan atas. "Tidak adil menekankan disiplin nasional kepada kalangan masyarakat bawah saja," ucapnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, lapisan menengah ke atas memiliki prasarana dan sarana memadai untuk menegakkan disiplin nasional. Juwono mencontohkan, sangat sulit mengharapkan disiplin ketepatan waktu bagi pekerja yang mengejar kendaraan umum dengan jam pemberangkatan dan kedatangan yang tak tentu.

■ ahd/fen

Republika, 21 Mei 1995

Menko Polkam: Menteri Perlu Ditatar Bahasa Indonesia

SURABAYA (KR) - Menko Polkam Soesilo Soedarman, sambil berseloroh mengatakan, perlu ada penataran bagi para Menteri agar bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ucapan Menko Polkam itu dilontarkan tatkala berbicara dalam sarasehan antar generasi berkaitan peringatan Harkitnas dan pencanangan Gerakan Disiplin Nasional serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu malam (20/5).

Sekitar 400 peserta mulai Generasi'45 hingga pemuda dan mahasiswa serta pelajar, dalam sarasehan yang dipandu Menpen Harmoko itu, mengoreksi Menko Polkam, Menpen dan Mendikbud karena terkadang dalam pembicaraannya terlontar kata-kata yang tidak sesuai.

Ketiga Menteri itu, karena sudah terbiasa dialek/logat asal daerahnya, terkadang terselip perkataan "ken" yang semestinya "kan".

"Tapi susah juga ya, soalnya saya belajar bertutur bahasa Indonesia ketika zaman kemerdekaan. Jadinya logat daerah terbawa, selain itu masih banyak bahasa daerah yang susah atau terlalu panjang bila diartikan dalam bahasa Indonesia," kata Soesilo Soedarman.

Ia mencontohkan kata *untup-untup, gumun* dan *embut-embut* agak sulit di Indonesia-kan, sehingga dalam bertutur sering kata daerah itu terbawa.

Sedangkan Mendikbud Wardiman menjelaskan, bahasa Indonesia ibarat busa yang mudah menyerap kata-kata baru dari bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga kosakata bahasa Indonesia terus berkembang.

Dalam hubungan ini Mendikbud mengemukakan, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia terbitan tahun 50-an, baru terdapat sekitar 25 ribu kata, sedang pada terbitan terakhir tahun 1992, jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia sudah lebih dari 70 ribu.

Saat Menko Polkam kembali mengucapkan kata-kata dengan akhiran "ken", peserta sarasehan langsung mengkoreksi dengan mengatakan "kan, pak, bukan ken", yang serta merta disambut gelak tawa peserta lainnya.

Menanggapi koreksi itu, Menko Polkam berkata sambil tersenyum "oh iya .. kan".

Beberapa peserta sependapat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penuturan sehari-hari akan lebih mudah bagi masyarakat bila para pejabat memberi contoh terlebih dahulu.

Dalam sarasehan yang berlangsung hingga hampir tengah malam itu, ketiga menteri sepakat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berlaku untuk semua warga Indonesia, dan sifatnya himbauan berlangsung sesuai proses. (Ant)-

Kedaulatan Rakyat, 22Mei 1995

Linguistik Indonesia Condong Berkiblat ke Eropa-Amerika

Jakarta, Kompas

Linguistik yang berkembang di Indonesia adalah linguistik Eropa-Amerika karena tidak adanya kesinambungan dalam sejarah kajian bahasa Indonesia. Kekayaan dalam tradisi linguistik Sanskerta, Arab, dan Jawa kuno yang pernah dominan dalam bahasa Indonesia hampir-hampir tidak dikenali generasi masa kini.

Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) Prof Dr Harimurti Kridalaksana mengemukakan hal itu dalam seminar "Sejarah Studi Bahasa Indonesia" di Jakarta, Sabtu (20/5). Hadir pula sebagai pembicara Dr Kees Groeneboer, pengajar tidak tetap FSUI, dan pakar bahasa Indonesia Prof Dr Gorys Keraf.

Menurut Harimurti, bahasa Sanskerta pernah sangat kuat pengaruhnya dalam bahasa Indonesia. Karena itu semestinya linguistik bahasa Sanskerta di Indonesia lebih kuat peranannya ketimbang linguistik Eropa dan Amerika. Namun demikian saat ini pengaruh Sanskerta lama-lama tidak diketemukan lagi. Ini merupakan akibat dari kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kebudayaan lama yang berasal dari bangsa sendiri. Oleh karena itu Harimurti mengemukakan harapannya, agar linguis muda mengembangkan minatnya pada linguistik Sanskerta.

"Perkembangan linguistik di Indonesia juga sangat terlambat karena selama ini apa saja yang bersangkutan dengan bahasa dianggap masalah pengajaran bahasa dan tidak pernah ditanggapi dengan kritis-ilmiah," kata Harimurti.

Perkembangan di Indonesia

Menurut Harimurti, lingustik baru mulai menampakkan diri di Indonesia tahun 1950 dalam karya AA Fokker mengenai sintaksis Indonesia yang secara eksplisit menggunakan fungsionalisme aliran Praha. Sarjana daerah memang nula-mula didominasi oleh sarjana-sarjana Barat. Sejalan dengan perkembangan ilmu bahasa waktu itu, penelitian mula-mula diarahkan untuk menyediakan materi-materi yang ada hubungan dengan ilmu perbandingan bahasa, khususnya perbandingan historis," demikian kata Gorys Keraf. "Namun kemudian, sarjana-sarjana Indonesia juga mulai meramaikan penelitian bahasa-bahasa daerah," tambahnya.

Keraf mengatakan bahwa semua penelitian itu memang lebih merupakan kerja darurat yang harus dilakukan guna merekam pelbagai data kebahasaan daerah.

"Akibatnya, hasil penelitian-penelitian itu tidak mampu memberi satu gambaran menyeluruh mengenai kekerabatan dan keakraban antara bahasa-bahasa di seluruh Indonesia," demikian penjelasan Keraf. "Manfaat hasil penelitian itu memang sangat penting dilihat dari linguistik murni, tetapi tidak atau belum bermakna untuk kepentingan yang lebih luas," tambahnya.

Sadar akan kekurangan-kekurangan itu, Keraf menunjuk kembali pada upaya sejumlah sarjana Linguistik Historis dan Dialektologi untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai kekerabatan bahasa-bahasa Indonesia, sekaligus mengadakan pemetaan bahasa-bahasa dan dialek-dialek di seluruh Indonesia. **(wis)**

itu juga berpengaruh karena memiliki murid di UI dan Universitas Gajah Mada (UGM). Namun perkembangan politik, yang terjadi kemudian, telah menggagalkan kajian linguistik hasil kepeloporan Fokker itu.

Dewasa ini aliran linguistik yang dominan di Indonesia adalah aliran yang fungsionalistis meskipun tidak ada seorang pun yang mengusahakan atau merekaya aliran ini. Fungsionalisme, kata Harimurti, berkembang menjadi dominan secara alamiah karena aliran ini cocok dengan suasana kebahasaaan di Indonesia, tidak terbatas pada teori saja, mencakup banyak cabang, dan tidak bernuansa politik seperti aliran transformasi generatif (TG) yang dipelopori oleh A.N.Chomsky.

Bahasa daerah

Sementara Kees Groeneboer menguraikan politik bahasa di masa pemerintahan Belanda, Gorys Keraf mengemukakan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan mengenai bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, baik yang dikerjakan oleh sarjana-sarjana Barat maupun sarjana dari Indonesia sendiri.

"Penelitian bahasa-bahasa

Kompas 22 Mei 1995

Untuk Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Perlu Ada Penataran bagi Para Menteri

Surabaya, (Buana) - Menyadari *kesalahannya* Menko Polkam, Soesilo Soedarmah, sambil berseloroh mengatakan, perlu ada penataran bagi para menteri agar bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ucapan Menko Polkam ini dilontarkan tatkala berbicara dalam saresehan antar generasi berkaitan dengan peringatan Harkitnas dan pencanangan gerakan disiplin nasional serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, di Gedung Negara Grahadi Surabaya Sabtu (20/5) malam.

Sekitar 400 peserta mulai Generasi'45 hingga pemuda dan mahasiswa serta pelajar, dalam sarasehan yang dipandu Menpen Harmoko itu, mengoreksi Menko Polkam, Menpen dan Mendikbud karena terkadang dalam pembicaraannya terlontar kata-kata yang tidak sesuai.

Ketiga menteri yang berasal dari Jawa dan Madura itu, karena sudah terbiasa dialek/logat asal daerahnya, terkadang terselip perkataan *ken* yang semestinya *kan* atau kata *mangkin* yang seharusnya *makin*.

"Tapi susah juga ya, soalnya saya belajar bertutur Bahasa Indonesia ketika jaman kemerdekaan. Jadinya logat daerah terbawa, selain itu masih banyak bahasa daerah yang susah atau terlalu panjang bila diartikan dalam bahasa Indonesia," kata Soesilo Soedarman.

Ia menyontohkan kata "untup-untup", "gumun" dan "embut-embut" agak sulit diIndonesiakan, sehingga dalam bertutur sering kata daerah itu masih terbawa.

Sedangkan Mendikbud Wardiman menjelaskan, bahasa Indonesia ibarat busa yang mudah menyerap kata-kata baru dari bahasa daerah mau pun bahasa asing, sehingga kosa kata Bahasa Indonesia terus berkembang.

Dalam hubungan ini Mendikbud mengemukakan, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia terbitan tahun 50-an, baru terdapat sekitar 25 ribu kata, sedang pada terbitan terakhir tahun 1992, jumlah kosa kata dalam bahasa Indonesia sudah lebih dari 70 ribu.

Saat Menko Polkam kembali mengucapkan kata kata dengan akhiran *ken*, peserta sarasehan langsung mengkoreksi dengan mengatakan *kan, pak, bukan ken*, yang serta merta disambut gelak tawa peserta lainnya.

Menanggapi koreksi itu, Menko Polkam berkata sambil tersenyum *"oh iya .. kan"*.

Beberapa peserta sependapat, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penuturan sehari-hari akan lebih mudah bagi masyarakat bila para pejabat memberi contoh terlebih dahulu.

"Kalau bapak menteri dan gubernur sudah tidak menggunakan kata "mangkin" dan akhiran "ken" atau kata-kata lainnya yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya kira masyarakat akan lebih mudah mengikutinya," kata Mukayat (68) dari Generasi '45.

Dalam sarasehan yang berlangsung hingga hampir tengah malam itu, ketiga menteri sepakat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berlaku untuk semua warga Indonesia, dan sifatnya imbauan berlangsung sesuai proses.

Ditertibkan

Sementara itu, Menteri Penerangan, H Harmoko menegaskan, majalah dan radio non-RRI yang dalam kegiatannya banyak menggunakan kata-kata atau bahasa *prokem* atau *slank* akan ditertibkan.

"Namun, sebelumnya akan dibina terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahannya," kata Menpen menjawab pertanyaan peserta sarasehan antargenerasi berkaitan dengan peringatan Harkitnas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/5) malam.

Dalam sarasehan berkaitan dengan gerakan disiplin nasional dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Menpen bertindak selaku moderator, sedangkan pembicaranya Menko Polkam, Soesilo Soedarman dan Mendikbud, Prof Dr Ing. Wardiman Djojonegoro.

Mendikbud menjelaskan, pihaknya beserta Deppen sudah memanggil para pimpinan radio swasta nasional untuk memperbaiki atau memperbaharui kata dan bahasanya dalam proses penyiaran.

"Mereka juga protes bahwa kalau menggunakan bahasa Indonesia baku akan *kering* dalam penyajian siaran. Namun saya jawab, bahwa penggunaan bahasa *prokem* tidak dilarang selama sifatnya kreatif dan tidak rancu atau campur aduk dengan bahasa Indonesia," kata Mendikbud.

Begitu juga majalah, utamanya majalah remaja, boleh saja menggunakan bahasa "prokem" agar komunikatif, asalkan sesuai dengan kaidah dan tidak merusak tatanan kosa kata bahasa Indonesia, mengingat majalah mempunyai golongan pembacanya sendiri.

"Radio dan majalah berbahasa daerah juga berkembang baik dan diperbolehkan siaran atau terbit. Tetapi, ya itu tadi jangan campur aduk yang cenderung mengobrak-abrik kaidah bahasa Indonesia yang

baik dan benar," katanya.

Sesuai keperluan

Baik Mendikbud mau pun Menpen berpendapat, penggunaan kata atau bahasa apa pun ada penempatannya sesuai dengan keperluannya, asalkan tidak mengotak-atik kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Kita risau, di masa datang akan kehilangan jati diri bangsa. Dalam arus persaingan dan globalisasi ini, bahasa Indonesia mulai ada yang otak-atik. Kalau tidak dihentikan mau jadi apa generasi mendatang kita kelak," kata Menpen menegaskan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan, yang menurut Mendikbud, diperlukan kesadaran semua pihak mulai aparat pemerintah, swasta hingga seluruh masyarakat.

Wardiman mencontohkan, sepanjang pingir jalan tol Jagorawi dipenuhi baliho raksasa dengan kata-kata asing, sehingga sopirnya ketika disuruh membaca kata *lakeside* bukan dibaca *leiksaid* tapi *"la-ke-si-de"*. **(ant)**

Berita Buana, 22 Mei 1995

Pak Soes: Para Menteri Perlu Ditatar

Agar Tidak Pakai Akhiran "Ken"

Jakarta, Minggu, Mdk

Gagasan spontan Menko Polkam Soesilo Soedarman agar para menteri ditatar Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidaklah berlebihan. Sebagai pengendali harian Gerakan Disiplin Nasional, Soesilo Soedarman sendiri hendaknya bisa merealisasikan gagasannya tersebut. Ide itu tampaknya sepele tapi punya arti penting dalam penegakan disiplin di Indonesia.

Demikian tanggapan sejumlah anggota DPR ketika dimintai komentar tentang pernyataan Menko Polkam di Surabaya, Sabtu malam. Ide spontan itu muncul ketika ia menjadi pembicara dalam dialog antargenerasi dalam rangkat peringatan Harkitnas dan Pencanangan Gerakan Disiplin Nasional. Acara ini dipandu oleh Menpen Harmoko juga dihadiri Mendikbud Prof Dr Wardiman Djojonegoro.

Dalam acara dialog itu, para peserta yang terdiri dari generasi muda melontarkan kritik secara langsung karena para menteri yang berbicara di depan sering menggunakan "aksen" yang tidak baku. Misalnya, mengatakan "ken" untuk kata "kan" atau kata "mangkin" untuk mengganti semakin.

Dalam bahasa lisan kata-kata semacam itu sebenarnya lazim saja dipakai, apalagi untuk lidah orang tua yang di masa kecilnya dulu ssangat "akrab" dengan bahasa daerah.

"Susah juga ya, soalnya saya belajar bertutur Bahasa Indonesia ketika jaman kemerdekaan. Jadinya logat daerah terbawa, selain itu masih banyak bahasa daerah yang susah atau terlalu panjang bila diarfikan dalam bahasa Indonesia,' kata Soesilo Soedarman.

Menko Polkam mencontohkan kata "untup-untup", "gumun", dan "embut-embut" yang agak sulit di-Indonesiakan sehingga ia cenderung menggunakan kata aslinya.

Mendikbud Wardiman yang asli Madura kemudian menjelaskan, Bahasa Indonesia ibarat busa yang mudah menyerap kata-kata baru dari bahasa daerah dan bahasa asing sehingga kosa kata Bahasa Indonesia terus berkembang.

Dalam hubungan ini Mendikbud mengemukakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 50-an, baru terdapat sekitar 25 ribu kata. Sedangkan pada terbitan terakhir tahun 1992, jumlah kosa kata dalam bahasa

(Bersambung ke halaman 10 kolom 4)

Indonesia su.ah lebih dari 70 ribu.

Saat Menko Polkam kembali mengucapkan kata-kata dengan akhiran "ken", peserta sarasehan langsung mengkoreksi dan berkata,"*Kan*, Pak, bukan *ken*, yang serta merta disambut gelak tawa peserta lainnya. Menanggapi koreksi itu, Menko Polkam berkata sambil tersenyum berkata, "Oh ya *kan*."

Beberapa peserta sependapat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penuturan sehari-hari akan lebih mudah bagi masyarakat bila para pejabat memberi contoh terlebih dahulu.

"Kalau bapak menteri dan gubernur sudah tidak menggunakan kata *mangkin* dan akhiran *ken* atau kata-kata lainnya yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya kira masyarakat akan mengikutinya," kata Mukayat (68) dari Generasi'45.

Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR Mohammad Mansur kepada *Merdeka* mengatakan tekad menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar itu hendaknya diresapi betul oleh para pejabat. Sebab, program penggunaan bahasa yang baik dan benar itu dicetuskan oleh pemerintah. "Ya aneh ya kalau pejabatnya tidak memberi teladan," katanya.

Kebiasaan seperti itu memang biasa terjadi dalam masyarakat paternalistik yang seharusnya menyadari bahwa "orang tua akan ditiru orang muda", tapi kenyataannya ialah "kalau orang tua yang salah hendaknya bisa dimaklumi."

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Soetardjo Soerjoguritno. Dia menambahkan, karena kebanyakan orang kita paternalistik maka para pemimpinnya harus punya budaya malu untuk tidak berbuat yang tidak baik.

Karena itu, kata Mansur, kalau pemimpinnya aneh-aneh maka masyarakatnya akan ikut aneh-aneh pula. Kalau menterinya berbahasa Indonesia kurang baik dan benar, masyarakatnya pasti akan seenaknya..

Dikatakan pula oleh Sutardjo bahwa disiplin nasional yang dicanangkan Presiden Soeharto harus dilaksanakan dengan baik mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

Pencanangan tersebut juga harus disambut gembira. Satu hal yang sangat penting, disiplin itu harus dimulai dari atas yakni pribadi-pribadi pemimpinnya.

Masalah disiplin nasioanal itu sendiri diakui sudah sering diingatkan Kepala Negara tetapi kurang dilaksanakan aparat di tingkat bawah. Misalnya, tentang pola hidup sederhana yang dicanangkan pemerintah ternyata banyak yang tidak mematuhi.

"Kita harapkan para menteri mulai membiasakan diri dengan budaya malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji," kata Soetardjo. **(HPS/ANT)**

Merdeka, 22 Mei 1995

Presiden Canangkan Gerakan Disiplin Nasional /

Pelihara dengan Baik Negara Kebangsaan

***Modal Nasional yang Harus Dipertahankan Adalah Semangat Kebangsaan dan Negara Kebangsaan. *Kita Harus Menempatkan Diri sebagai Bagian Menyeluruh dari Bangsa. *Pergunakan Bahasa Indonesia yang Benar dan Baik.**

Jakarta, (Buana).- Presiden Soeharto mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memelihara sebaik-baiknya negara kebangsaan yang telah diperoleh dengan susah payah , karena adanya globalisasi.

"Globalisasi tidak akan menghilangkan peranan negara kebangsaan. Karena itu, kita harus memelihara baik-baik negara kebangsaan ini," kata Presiden di Balai Sidang Jakarta, Sabtu, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Pada acara yang dihadiri Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden Try Sutrisno dan Ibu Tuti Sutrisno serta para pejabat tinggi lainnya, Kepala Negara mengemukakan modal nasional yang harus dipertahankan adalah semangat kebangsaan dan negara kebangsaan.

"Kita malahan harus menjaga baik-baik lambang-lambang negara kebangsaan kita itu," kata Presiden yang kemudian menyebutkan salah satu di antaranya adalah Bahasa Indonesia.

Kepala Negara kemudian berkata, "Kita semua — setiap kalangan, golongan, setiap lapisan masyarakat — harus menempatkan diri sebagai bagian menyeluruh dari bangsa yang besar ini."

Karena pentingnya upaya memelihara negara kebangsaan dan semangat kebangsaan itu maka yang perlu dipelajari adalah mempelajari dasar filsafat dan ideologi negara, tugas pokok, sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara.

Ketika berbicara tentang makna peringatan Harkitnas, Kepala Negara menyatakan, karena acaranya bertepatan dengan akan diperingatinya HUT RI ke-50 maka masyarakat perlu merenungi langkah-langkah besar yang telah dilakukan serta menyiapkan diri menghadapi masa depan.

Kepada masyarakat diingatkan bahwa karena kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dibangun dari bawah ke atas, mulai dari rakyat hingga bentuk negara, maka kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan dijunjung tinggi.

Kepala Negara mengatakan pula untuk menjawab tantangan zaman maka perlu dibangun tatanan nasional baru. Dengan penuh keyakinan masyarakat perlu memelihara khazanah terbaik dari budaya masa lampau.

"Dengan penuh kesadaran, kita tinggalkan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah usang. Itulah hakekat modernisasi. Itulah sebabnya, saya seringkali mengingatkan bahwa yang kita bangun adalah masyarakat modern yang berkepribadian sendiri," kata Presiden.

Redam

Presiden Soeharto menyebutkan, karena bangsa ini hidup ditengah-tengah dunia yang sedang berubah secara cepat maka setiap bangsa harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu.

"Setiap perubahan selalu membuka peluang dan tantangan. Kita harus menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya. Di lain pihak, kita harus meredam sekecil- kecilnya tantangan-tantangan yang merugikan kita," kata Kepala Negara.

Khusus mengenai peyesuaian diri di dalam negeri, Kepala Negara menunjuk pada serangkaian penataan diri baik dalam tatanan,

(Bersambung ke hal 11 kol 7)

pemerintahan tatanan kemasyarakatan.

"Kita akan terus melanjutkan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi. Kita meneruskan langkah-langkah untuk memberi bobot terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan," kata Presiden.

Ketika mencanangkan "Gerakan Disiplin Nasional", Kepala Negara mengajak masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi jam kerja.

"Bangsa-bangsa yang maju dengan cepat adalah bangsa-bangsa yang berdisiplin tinggi. Hanya bangsa yang berdisiplin tinggilah yang mampu secara tertib dan terkendali melaksanakan apa yang telah disepakati bersama," kata Presiden.

Bahasa Indonesia

Ketika menyinggung penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar, Presiden menyampaikan rasa keprihatinannya karena bahasa persatuan ini telah dipakai secara tidak sebagaimana mestinya.

"Akhir-akhir ini ada tanda-tanda yang merisaukan dalam penggunaan Bahasa Indonesia. Karena itulah, saya ingin mengulangi lagi ajakan yang saya sampaikan melalui Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1972. Marilah kita menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik," kata Presiden.

Kepada masyarakat diingatkan bahwa penggunaan bahasa yang tertib menunjukkan cara berpikir dan bertindak yang tertib. "Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur Sumpah Pemuda yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Kita bangga, bahwa Bahasa Indonesia itu telah tumbuh dan berkembang. Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa pergaulan tapi sudah menjadi bahasa resmi, malahan bahasa ilmu pengetahuan," kata Presiden. **(wid)**

Berita Buana, 22 Mei 1995

Soesilo

Menteri perlu ditatar Bahasa Indonesia

SURABAYA – Menyadari "kesalahannya" Menko Polkam, Soesilo Soedarman, sambil berseloroh mengatakan, perlu ada penataran bagi para menteri agar bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ucapan Menko Polkam ini dilontarkan tatkala berbicara dalam saresehan antar generasi berkaitan dengan peringatan Harkitnas dan pencanangan gerakan disiplin nasional serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, di Gedung Negara Grahadi Surabaya Sabtu malam.

Sekitar 400 peserta mulai Generasi'45 hingga pemuda dan mahasiswa serta pelajar, dalam sarasehan yang dipandu Menpen Harmoko itu, mengkoreksi Menko Polkam, Menpen dan Mendikbud karena terkadang dalam pembicaraannya terlontar kata-kata yang tidak sesuai.

Ketiga menteri yang berasal dari Jawa dan Madura itu, karena sudah terbiasa dialek/logat asal daerahnya, terkadang terselip perkataan "ken" yang semestinya "kan" atau kata "mangkin" yang seharusnya "makin".

"Tapi susah juga ya, soalnya saya belajar bertutur Bahasa Indonesia ketika jaman kemerdekaan. Jadinya logat daerah terbawa, selain itu masih banyak bahasa daerah yang susah atau terlalu panjang bila diartikan dalam bahasa Indonesia," kata Soesilo Soedarman.

Ia mencontohkan kata "untup-untup", "gumun" dan "embut-embut" agak sulit di Indonesia-kan, sehingga dalam bertutur sering kata daerah itu masih terbawa.

Sedangkan Mendikbud Wardiman menjelaskan, bahasa Indonesia ibarat busa yang mudah menyerap kata-kata baru dari bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga kosa kata Bahasa Indonesia terys berkembang.

Dalam hubungan ini Mendikbud mengemukakan, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia terbitan tahun 50-an, baru terdapat sekitar 25 ribu kata, sedang pada terbitan terakhir tahun 1992, jumlah kosa kata dalam bahasa Indonesia sudah lebih dari 70 ribu.

Saat Menko Polkam kembali mengucapkan kata kata dengan akhiran "ken", peserta sarasehan langsung mengkoreksi dengan mengatakan "kan, pak, bukan ken", yang serta merta disambut gelak tawa peserta lainnya.

Menanggapi koreksi itu, Menko Polkam berkata sambil tersenyum "oh iya .. kan".

Beberapa peserta sependapat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penuturan sehari-hari akan lebih mudah bagi masyarakat bila para pejabat memberi contoh terlebih dahulu.

"Kalau bapak menteri dan gubernur sudah tidak menggunakan kata "mangkin" dan akhiran "ken" atau kata-kata lainnya yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya kira masyarakat akan lebih mudah mengikutinya," kata Mukayat (68) dari Generasi'45.

Dalam sarasehan yang berlangsung hingga hampir tengah malam itu, ketiga menteri sepakat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berlaku untuk semua warga Indonesia, dan sifatnya himbauan berlangsung sesuai proses. (ant/tbt)

Terbit, 22 Mei 1995

Menteri Penerangan, Harmoko:

Akan Ditertibkan, Majalah dan Radio Berbahasa Prokem

SURABAYA, (PR).-

Menpen Harmoko menegaskan, majalah dan radio non-RRI yang dalam kegiatannya banyak menggunakan kata-kata atau bahasa prokem/slank akan ditertibkan.

"Namun, sebelumnya akan dibina terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahannya," kata Menpen menjawab pertanyaan peserta sarasehan antargenerasi berkaitan dengan peringatan Harkitnas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu malam.

Dalam sarasehan berkaitan dengan gerakan disiplin nasional dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Menpen bertindak selaku moderator, sedangkan pembicaranya Menko Polkam, Soesilo Soedarman dan Mendikbud, Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro.

Mendikbud menjelaskan, pihaknya beserta Deppen sudah memanggil para pimpinan radio swasta nasional untuk memperbaiki atau memperbarui kata dan bahasanya dalam proses penyiaran.

"Mereka juga protes bahwa kalau menggunakan bahasa Indonesia baku akan 'kering' dalam penyajian siaran. Namun saya jawab bahwa penggunaan bahasa 'prokem' tidak dilarang selama sifatnya kreatif dan tidak rancu atau campur aduk dengan bahasa Indonesia," kata Mendikbud dikutip *Antara*.

Begitu juga majalah, utamanya majalah remaja, boleh saja menggunakan bahasa "prokem" agar komunikatif, asalkan sesuai dengan kaidah dan tidak merusak tatanan kosa kata bahasa Indonesia, mengingat majalah mempunyai golongan pembacanya sendiri.

"Radio dan majalah berbahasa daerah juga berkembang baik dan diperbolehkan siaran atau terbit. Tetapi, ya itu tadi jangan campur aduk yang cenderung mengobrak-abrik kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar," katanya.

Sesuai keperluan

Baik Mendikbud maupun Menpen berpendapat, penggunaan kata atau bahasa apa pun ada penempatannya sesuai dengan keperluannya, asalkan tidak mengotak-atik kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Kita risau, di masa mendatang akan kehilangan jati diri bangsa. Dalam arus persaingan dan globalisasi ini, bahasa Indonesia mulai ada yang otak-atik. Kalau tidak dihentikan mau jadi apa generasi mendatang kita kelak," kata Menpen menegaskan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan, yang menurut Mendikbud, diperlukan kesadaran semua pihak mulai aparat pemerintah, swasta hingga seluruh masyarakat.

Wardiman mencontohkan, sepanjang pingir Jalan Tol Jagorawi dipenuhi baliho raksasa dengan kata-kata asing, sehingga sopirnya ketika disuruh membaca kata *lakeside* bukan dibaca *leiksaid* tapi *lake-si-de*.

"Sopir saya tidak salah, karena membaca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Padahal padanan dalam bahasa Indonesia seperti *lakeside* sudah ada yaitu 'tepian danau'," katanya sambil tersenyum.

Wardiman mengemukakan, Pusat Bahasa merupakan tempat bertanya bagi siapa saja yang memerlukan dan ingin mengetahui kosa kata atau secara luas bahasa Indonesia, selain itu juga tempat berdiskusi atau menyampaikan saran.

"Bahasa Indonesia akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Jadi untuk mempertahankan jati diri bangsa, salah satunya adalah keteguhan dalam berbahasa nasional. Karena itu perlu kesadaran semua pihak dan sifatnya bukan pemaksaan," demkian Wardiman.***

Kompas, 22 Mei 1995

Jalan Protokol Blok M - Pasar Ikan Bebas Bahasa Asing Sebelum 17 Agustus

Jakarta, Kompas

Jalan-jalan protokol dari Blok M (Jaksel) ke Pasar Ikan (Jakut) yang dijadikan Kawasan Disiplin Sosial, harus bebas dari papan nama dan reklame bahasa asing selambat-lambatnya 17 Agustus 1995. Pemilik dan pengelola gedung yang tetap membandel, diancam bongkar oleh tim terpadu Pemda DKI Jakarta.

Kepala Kantor Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta Kusaeni Budiantoro kepada pers di ruang kerjanya Senin petang (22/5) mengatakan, Pemda DKI memberi prioritas pada jalan-jalan protokol dari Blok M menuju Pasar Ikan dan sebaliknya, untuk penertiban dengan sasaran penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama Jl Sisingamangaraja, Jl Sudirman, Jl Thamrin, Jl Medan Merdeka Barat, Jl Gajah Mada, Jl Hayam Wuruk, dan Jl Pintu Besar Selatan.

Meskipun demikian, bukan berarti gedung-gedung di jalan-jalan lainnya boleh bebas menggunakan bahasa asing.

Menurut Kusaeni, pada akhir 1995 semua gedung dan tempat usaha di Jakarta harus menggunakan papan nama dan reklame Bahasa Indonesia. "Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait di DKI termasuk instansi vertikal yang mengeluarkan perizinan. Jika pengusaha tetap membandel tidak mau menggunakan Bahasa Indonesia, semua perizinan tidak akan dikeluarkan atau diperpanjang," tandasnya.

Sejak tiga bulan silam, jelas Kusaeni, setiap permohonan baru tempat usaha hiburan yang ditandatanganinya diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia. "Sudah 43 tempat hiburan yang menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia," ujarnya.

Menurut Kusaeni, semua papan nama dan reklame yang tetap menggunakan bahasa asing diancam akan dibongkar. Jika pengusaha merasa bingung mengganti nama tempat usaha, bisa berkonsultasi dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jl Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220, dengan nomor faksimil (021) 4880407, dan nomor telepon (021) 4894564.

Ganti nama

Sementara itu Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja meresmikan penggantian nama Jayabank di Gedung Jaya Jl MH Thamrin Jakpus, menjadi Bank Jaya. Gubernur Surjadi menghargai usaha pimpinan Bank Jaya mengganti nama badan usaha ke dalam Bahasa Indonesia secara sukarela.

Pada saat bersamaan, lima badan usaha lainnya di lima wilayah DKI Jakarta juga mengganti nama ke dalam Bahasa Indonesia. **(ksp)**

Kompas, 23 Mei 1995

Idealisme dalam Berbahasa Masih Bayangan Cermin Retak

Oleh Herry Mardianto

PENTINGNYA peran bahasa dalam kehidupan setidaknya dapat dicermati dari pernyataan Paul Chauchard (1983) yang mengemukakan bahwa bahasa bukan sekadar sarana komunikasi antarmanusia, tetapi merupakan "alat" yang mampu memberikan suatu kesiapsiagaan intelektual yang memungkinkan manusia mencapai peringkat sosial tertentu. Dalam konteks ini disiapsiagakan intelektual diterjemahkan sebagai titik awal bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan strata sosial merupakan hasil yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat - semakin tinggi dinamisasi kehidupan bahasa dalam suatu kelompok masyarakat atau bangsa, semakin besar pula nilai kebudayaan yang dimiliki masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Dalam bahasa sederhana hal ini terungkap lewat pernyataan bahwa bahasa adalah cermin bangsa. Di Inggris, Perancis, Jepang, dan beberapa negara lain, para pemimpin budaya atau politik adalah orang orang yang menguasai bahasa secara luar biasa dan jauh di atas rata-rata orang kebanyakan. Penguasaan bahasa menunjukkan bahwa orang tersebut berbudaya dan terpelajar.

Pada tataran ini pertanyaan yang layak dikedepankan adalah sampai di mana bahasa Indonesia mampu dianggap sebagai cermin (kemajuan) bangsa? Benarkah persoalan bahasa Indonesia menjelang tahun 2000 menjadi kian transparan sehingga dengan membusungkan dada kita berhak menghitung kemungkinan bahwa tidak beberapa lama lagi bahasa Indonesia akan berubah wujud sebagai "bahasa dunia" - walau kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia "yang baik dan benar" masih merupakan "perjuangan dan doa"? Kecenderungan masyarakat memakai kosakata asing, pembentukan akronim secara serampangan, merupakan sekadar contoh betapa berat "perjuangan" yang harus dihadapi bahasa Indonesia.

Pada awal tahun 1990-an para peminat dan pemerhati masalah bahasa secara eksplisit menggariskan bahwa komunikasi bangsa (Indonesia) sedang sakit karena pergeseran makna kata yang semakin merajalela tanpa *juntrung*, munculnya akronim-akronim, kata-kata yang *diplesetkan*, dan hadirnya beragam eufemisme. Menurut Mudji Sutrisno (1993), hal tersebut terjadi akibat dari negara yang berpaham integralistik. Pergeseran makna, misalnya perubahan persepsi terhadap kata "sesama" yang dahulu berarti *saudara setanah air*, kini perlu dipertanyakan maknanya secara jernih, apakah itu berarti *setanah air, seagama atau segolongan* karena makna kata "sesama" menjadi semakin kabur jika berhadapan dengan sebuah kekuatan. Seperti dalam kasus Marsinah, kata "sesama" menjadi tidak berarti karena komunikasi yang dipakai tidak lagi menggunakan kata "sesama" tetapi dengan kata-kata keras, bahasa kekuasaan. Hari ini pun kita jadi merinding dan terperangah jika dihadapkan pada kata "diamankan" yang kini bernuansa negatif sekaligus menyeramkan. Kesediaan dan keterbukaan pemerintah untuk dapat menempatkan makna kata pada makna yang sebenarnya merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk menciptakan suasana komunikasi yang *gayeng* tanpa ada beban politis, tanpa maksud menciptakan suatu *linguistic distance* antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Persoalan terpenting yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang bahasa adalah menumbuhkan sikap *handarbeni* dan memberi penghargaan terhadap bahasa *awak* sendiri. Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pengindonesiaan nama-nama pemukiman seperti *Citra Grand City Tangerang* menjadi Kota Citra Raya Tangerang, *Legend City* menjadi Kota Legenda, atau *Citra Garden* menjadi Perumahan Citra, merupakan antisipasi terhadap pelecehan eksistensi bahasa Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar masyarakat Indonesia terlalu mendewa-dewakan produk luar negeri, termasuk juga dalam hal bahasa, sehingga banyak kata asing dicomot begitu saja tanpa upaya mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Celakanya lagi penggunaan bahasa asing sering dijadikan *trend*, menjadi semacam "legitimasi" status sosial dan gengsi. Menyinggung masalah ini, Darminto M. Sudarmo (1995) berpendapat bahwa penggunaan nama *Anu Village, Anu Regency, Anu Town* harus dikaji ulang karena hal tersebut merupakan pendiktean arah mata angin "kebudayaan" Indonesia yang sengaja digelindingkan untuk mewakili simbol popularitas sebuah keadidayaan dan kemenangan sebuah peradaban. Di samping itu, ketergagapan kita menerima arus globalisasi membuat bangsa ini hidup dalam alam mimpi, mengawang dalam obsesi sebuah "superioritas" (meminjam istilah Darminto) sehingga masyarakat banyak yang khilaf menafsirkan makna modernisme, keunggulan, kehebatan, kemajuan, dsb. Orang silau dengan label asing, akibatnya Polan yang seorang pengusaha dan membuka toko kaca mata menjejali papan nama tokonya dengan kosakata *We Serve Better Optical in Town*, Bedjo yang membuka toko tas dan kulit menghias papan namanya dengan tulisan *We Specialize Genuice Leather*, Gandrik yang bergerak dalam usaha biro pengiriman barang/paket tak segan menulis papan namanya dengan *Fast Reliable & Secure Desk to Desk - Courier Service World Wide - International & Domestic Document - Worldwide Parcel Express Air Cargo*, tanpa

sedikit pun memberi keterangan dalam bahasa Indonesia. Semua itu dilakukan hanya untuk memenuhi desakan arus globalisasi, demi menggapai "superioritas" agar usaha mereka bernuansa global sehingga mendapatkan promosi yang terkesan lebih "wah" dan "gagah".

Bukanlah merupakan suatu kebetulan jika bersamaan dengan gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebarkan *sticker* himbauan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama di tanah air kita. Setidaknya ini merupakan indikasi bahwa di Yogyakarta pun telah terjadi "polusi" dalam penggunaan kosakata bahasa asing. Penelitian kecil-kecilan pada tahun 1991 memberi bukti bahwa Malioboro telah terkepung oleh beraneka kosakata asing yang menghias papan nama toko sepanjang jalan itu. Gambaran ini kian mempersulit suasana andai ada pihak-pihak yang ingin mencari-cari hubungan relasional antara perilaku berbahasa dan sikap nasionalisme. Kenyataannya pelecehan terhadap bahasa Indonesia terus berlangsung: sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berteriak-teriak dengan gusar untuk mengubah nama pemukiman dengan nama-nama Indonesia, masih ada juga pengusaha yang menawarkan perumahan dengan iklan *Ciherang Glenside Resort: Living in the Beauty of Nature* dengan fasilitas *Tennis Court, Fitness Center, Children Play Ground, and Jogging Track:* sementara ada siaran pembinaan bahasa di TVRI agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, banyak dari masyarakat Indonesia yang terseret mode dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia dengan *semau gue* menggunakan kata daripada, semangkin, dan tidak dapat membedakan makna kata negeri dengan negara; sementara Presiden Soeharto dalam Kongres Bahasa Indonesia V menekankan bahwa semakin maju kehidupan budaya berarti harus semakin maju pula dalam pembinaan bahasa, nyatanya banyak dari kita yang bangga bisa bercas-cis-cus dalam bahasa asing walau *pating blasur* sekalipun. Apa pun jadinya, saat ini idealisme dalam berbahasa masih merupakan bayangan dalam cermin yang retak! ❑-b.

*) ***Herry Mardianto, alumnus Fakultas Sastra UGM, bekerja pada sebuah lembaga penelitian di Yogyakarta***

Kedaulatan Rakyat, 23 Mei 1995

Gubernur Jambi Canangkan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Jambi,(Buana) - Gubernur Jambi Drs.H.Abdurrahman Sayoeti mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang bertempat di lapangan Kantor Gubernur Senen (22/5).

Dalam sambutan Menteri Penerangan RI selaku Ketua Umum Harkitnas yang dibacakan Gubernur Jambi antara lain mengatakan, bahwa Tema Peringatan Harkitnas tahun 1995 ini berbunyi: "Dengan tekat semangat Persatuan dan Kesatuan Nasional kita wujudkan pembangunan yang berwawasan Kebangsaan", sekaligus dalam rangka menyongsong peringatan emas 50 Tahun Kemerdekaan RI.

Tema tersebut sangat penting diangkat kepermukaan, karena dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tahap kedua sebagai era Kebangkitan Nasional kedua ini, kita ingin meningkatkan jiwa dan semangat kebangsaan yang telah dipupuk bersama selama abad ini secara utuh kita terapkan dalam pembangunan nasional.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyerahkan kepada Walikotamadya Jambi Drs.S.Muhammad Sabki buku Pedoman Pengindonesiaan nama dan kata asing serta buku pedoman Pengindonesiaan nama dan kata Indonesia pada tempat umum.

Sedangkan pada saat yang sama Bupati Batanghari HM.Saman Chatib SH yang didampingi Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Batanghari Endardji SH menyerahkan sertifikat Prona Tahun Anggaran 1994/1995 kepada Desa penerima IDT masing-masing untuk Desa Malapari sebanyak 17 buah, Desa Rukam sebanyak 95 buah, Desa Manis Mato sebanyak 5 buah, Desa Simpang Talang Kerinci sebanyak 25 buah, Desa Tanjung Lebar sebanyak 25 buah.

Disamping itu menurut Endardji, pada hari yang sama bertempat dikantor BPN Batanghari juga telah diserahkan sebanyak 55 buah sertifikat tanah wakaf kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Batanghari.

(k-lik)

Berita Buana, 23 Mei 1995

Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

DALAM memperingati usia 50 tahun Indonesia, Presiden Soeharto mencanangkan Garakan Disiplin Nasional dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sebenarnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga termasuk suatu bagian dari disiplin nasional. Karena sejak 28 Oktober 1928, kita telah bersumpah memiliki tanah air, bangsa dan bahasa nasional: Indonesia. Semua pemimpin rakyat telah mulai menggunakan bahasa Indonesia itu dalam pidato-pidato resmi pada seluruh kegiatan pergerakan kemerdekaan bangsa. Muhammad Thamrin merintis penggunaaan Bahasa Indonesia. GPH Djatikusumo berpidato dalam bahasa Indonesia pertama kali dalam sidang-sidang Jong Java di Surakarta.

Namun demikian bahasa Indonesia pada masa itu masih berupa Bahasa Indonesia dalam pembentukan. Artinya meskipun dasarnya mengambil dari bahasa Melayu Riau, karena bahasa itulah yang paling tersebar di berbagai kepulauan Indonesia, namun harus dikembangkan dan memperkayanya dengan unsur-unsur bahasa daerah yang cocok, bahkan unsur-unsur bahasa asing.

Dalam proses inilah maka kita dapat memahami mengapa perlu ada gerakan penggunaan bahasa nasional yang baik dan benar, karena masih banyak pemimpin dan pejabat yang bahasa Indonesianya belum sepenuhnya baik dan benar. Di sana-sini masih membawa-bawa atau menggunakan kebiasan bahasa daerah asalnya sendiri.

Hal ini diungkap dalam sarasehan peringatan Harkitnas di Gedung Grahadi, Surabaya, 20 Mei lalu, yang dihadiri sekitar 400 peserta. Saresehan yang dipandu Menpen H.Harmoko, mendengarkan pengarahan dari Menko Polkam Soesilo Soedarman serta Mendikbud Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro.

Pembicaraan yang santai namun penuh semangat itu diwarnai kenyataan bahwa di kalangan pemimpin masih ada yang belum sepenuhnya bicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka lahirlah suatu kesimpulan, perlu ada penataran bagi para menteri dan gubernur mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Menko Polkam dengan penuh humor mengakui bahwa kemampuannya bertutur dalam bahasa Indonesia masih kurang, karena ia dan sejumlah pemimpin lainnya menggunakan bahasa Indonesia pada zaman peralihan kemerdekaan, sehingga unsur-unsur kebiasaan bahasa daerah masih terbawa-bawa.

Bagi masyarakat Jawa misalnya, memang ada kebiasaan lokal yang tidak dapat sekaligus dihilangkan. Seperti, "Bali" diucapkan dengan "mBali", "Bandung" diucapkan "mBandung" dan seterusnya. Juga bila mengucapkan kata "makin", meski yang tertulis dalam naskah resmi sudah betul, namun dalam pengucapannya berubah menjadi "mangkin", karena pengaruh kebiasaan mengucapkan "mBali" dan "mBandung" tersebut.

Itulah sebabnya, malahan ada kata "makin" yang diperkaya menjadi "semakin" dan diucapkan dengan "semangkin".

Namun demikian, apabila upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini kita lakukan terus menerus dengan mengutamakan kalangan pemimpin dan pejabat bersedia jadi suriteladan, maka tujuan gerakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti akhirnya akan tercapai.

Marilah kita mencintai bahasa sendiri.

Berita Buana, 23 Mei 1995

Kedaulatan Rakyat
TERBIT SEJAK 27 SEPTEMBER 1945

Soal Disiplin Menggunakan Bahasa Kita

BERSAMAAN dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional, 20 Mei 1995, pemerintah juga sekaligus mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara disiplin. Sudah berulang kali, memang, kita dengan kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga setiap kali kita peringati Bulan Bahasa pada bulan Oktober, konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak pernah dilepaskan. Bahkan Presiden Soeharto secara tegas dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1972, sudah mengajak masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kini, bahasa Indonesia seakan menemukan formatnya lagi, menemukan maknanya sekaligus dan kemantapan serta momentumnya untuk lebih mengukuhkan, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat dianjurkan daripada harus mengombinasikannya dengan kata asing. Meskipun, sesungguhnya untuk itu keadaannya masih belum menggembirakan. Sebab, kita masih melihat begitu banyak istilah asing, kata asing dengan gramatika asing, yang justru sangat mengganggu kaidah baku kita. Kenapa kita 'takut' mempergunakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, dengan baik dan benar ?

Apabila kita runut kembali sejarahnya, bukankah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu harus diakui sangat besar jasanya sebagai alat pemersatu bangsa?. Sehingga, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, artinya sama dengan mempertebal rasa nasionalisme kita. Kita yang mengaku bahasa Indonesia, yang dinyatakan sebagai bahasa persatuan dalam ikrar Sumpah Pemuda, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa kita sendiri terdiri atas beratus-ratus suku bangsa. Beratus-ratus suku bangsa itu memiliki bahasanya sendiri. Tanpa adanya bahasa persatuan, seperti apa jadinya? Kini, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga hidup di tengah-tengah bahasa asing. Mestinya, kekokohan ikrar tadi tidak begitu saja boleh 'dinodai' dengan istilah-istilah asing.

Tentu saja, yang kita inginkan dari disiplin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, adalah ketertibannya. Sehingga, diwaktu-waktu mendatang tidak perlu lagi kita merasa risau terhadap gejala yang membuat kaidah bahasa kita terganggu. Terhadap revolusi istilah atau kata asing, sebenarnya bisa kita atasi dengan penyesuaian yang mengacu pada kaidah bahasa Indonesia. Pertama-tama, seperti pedoman yang dikeluarkan pemerintah sehubungan dengan pencanangan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, haruslah dipakai kata (bahasa) Indonesia. Sebab, kita sudah punya kata gedung untuk *building*,, umpamanya. Begitu pula pantai, bukan *beach*. Baru apabila dalam bahasa Indonesia tidak ada, sumber kedua yang bisa dipakai adalah bahasa daerah, misalnya gria, asri, tirta.

Menurut pedoman yang dikeluarkan Depdikbud, bahasa asing itu bisa digunakan apabila sulit dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dalam kosakata bahasa Indonesia, kita juga banyak mencatat kata-kata pungutan seperti apartemen, impor, standar, plaza, bungalo, dengan penyesuaian ejaan. Justru bahasa Indonesia menjadi diperkaya kosakatanya. Dilihat dari daftar kosakata dalam kamus (terbitan) tahun 1962, baru terdapat sekitar 20 ribu kata. Tetapi dalam kamus tahun 1992, kosakata bahasa Indonesia sudah bertambah menjadi sekitar 75 ribu kata. Bertambahnya kosakata bahasa Indonesia ini, menunjukkan bahwa bahasa kita tidak kaku, tidak mati, tetapi sangat dinamis dalam perkembangannya. Kita bangga melihat kenyataan ini.

Sehubungan dengan pencanangan Presiden Soeharto untuk disiplin menggunakan bahasa Indonesia, seharusnya kita bangga mempergunakan bahasa Indonesia tanpa dicampur dengan bahasa asing. Karena itu, ajakan Prof Dr Siti Chamamah Soeratno melalui harian ini, agar pejabat dan intelektual menghindari penggunaan istilah asing, sangat tepat. "Mereka justru perlu memelo-

pori penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia, baik dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam forum resmi. Dengan demikian masyarakat akan memiliki *panutan* dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," kata Dr Siti Chamamah Soeratno, guru besar Fakultas Sastra UGM *(Kedaulatan Rakyat,* 22/5/1995).

Secara fisik, setelah pencanangan gerakan disiplin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, tentunya akan terjadi penggantian istilah asing yang masih dipergunakan untuk papan nama, nama bangunan, nama kawasan, nama badan usaha, dan seterusnya, ke bahasa kita, yang lebih menampilkan jati diri bangsa. Meskipun ini bisa dibilang bukan kerja murah, sebagai bangsa Indonesia ada konsekuensi ikut menyesuaikan dan menyokong gerakan tersebut. Untuk mencarikan padanannya, mereka bisa menghubungi Fakultas Sastra, Balai Penelitian Bahasa, atau berkonsultasi ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. □-g

Kedaulatan Rakyat, 23 Mei 1995

Menko Polkam: Pejabat tinggipun perlu ditatar bahasa Indonesia

Surabaya, (AB)–

Menyadari "kesalahannya" Menko Polkam, Soesilo Soedarman, sambil berseloroh mengatakan, perlu ada penataran bagi para menteri agar bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ucapan Menko Polkam ini dilontarkan tatkala berbicara dalam sarasehan antara generasi berkaitan denga peringatan harkitnas dan pencanangan gerakan disiplin nasional serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, di Gedung Negara Grahadi Surabaya Sabtu malam.

Sekitar 400 peserta mulai Generasi '45 hingga pemuda dan mahasiswa serta pelajar, dalam sarasehan yang dipandu Menpen Harmoko itu, mengkoreksi Menko Polkam, Menpen dan Mendikbud karena terkadang dalam pembicaraannya terlontar kata-kata yang tidak sesuai.

Ketiga menteri yang berasal dari Jawa dan Madura itu karena sudah terbiasa dialek/logat asal daerahnya, terkadang terselip perkataan "ken" yang semestinya "kan" atau kata "mangkin" yang seharusnya "makin".

"Tapi susah juga ya, soalnya saya belajar bertutur Bahasa Indonesia ketika jaman kemerdekaan. Jadinya logat daerah terbawa, selain itu masih banyak bahasa daerah yang sudah atau terlalu panjang bila diartikan dalam bahasa Indonesia," kata Soesilo

Ia mencontohkan kata "untup-untup", "gumun" dan "embut-embut" agak sulit di Indonesia-kan, sehingga dalam bertutur sering kata daerah itu masih terbawa.

(Ant/3.8)–

Angkatan Bersenjata, 26 Mei 1995

Masalah Aktual Bahasa

Inilah Bahasa Indonesia yang Benar (edisi iv), Dr JS Badudu, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, 216 halaman.



Salah satu ciri sebuah bahasa yang hidup adalah bahwa bahasa tersebut selalu berkembang. Perkembangan itu dapat terjadi baik karena pengaruh yang muncul dari bahasa asing di luarnya ataupun karena masalah-masalah teknis kebahasaan dalam bahasa itu sendiri. Untuk dapat menguasai bahasa dengan baik, perhatian terus-menerus terhadap perkembangan kebahasaan sangat penting dilakukan.

Dalam pemakaian Bahasa Indonesia belakangan ini, baik itu ragam bahasa lisan maupun tulisan, ada gejala menarik yang muncul. Masalah tersebut adalah semakin banyaknya penggunaan kata-kata asing yang dipakai pembicara atau penulis pada saat melakukan komunikasi memakai Bahasa Indonesia. Padahal, istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia sendiri dapat ditemukan untuk mengganti istilah asing yang digunakan.

Masalah lain yang muncul adalah terjadinya *salah kaprah* dalam penggunaan kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia, serta banyaknya kalimat yang dibuat yang tidak tepat nalar. Salah kaprah dimaknai sebagai suatu kesalahan yang sudah menjadi umum. Kesalahan tersebut terus terjadi karena pemakai bahasa tidak tahu bahwa apa yang digunakan itu salah.

Buku *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar* edisi ke empat ini merupakan kumpulan tulisan J.S. Badudu, yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Majalah Intisari. Buku ini juga merupakan kelanjutan dari tiga seri yang telah diterbitkan sebelumnya yang telah mendapat sambutan besar dari para pembaca.

***

Seperti yang tersirat dari judulnya, buku yang berisi 62 buah tulisan ini bermaksud menjelaskan kepada para pemakai bahasa kesalahan umum yang muncul dalam pemakaian bahasa. Dengan penjelasan itu, demikian harapan penulis, diharapkan para pemakai bahasa tahu dan mengerti mengapa bentuk-bentuk tertentu salah serta bentuk yang bagaimana yang benar dan seharusnya digunakan.

Oleh editor buku ini masalah-masalah yang dibahas penulis dikelompokkan ke dalam 6 bagian. Pembagian berdasar inti pokok permasalahan yang dibahas ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isi buku secara keseluruhan.

Bagian pertama buku ini membahas masalah umum bahasa. Selanjutnya secara berurutan tampil bahasan mengenai makna dan pemakaian kata dan frasa, kata berimbuhan dan maknanya, ungkapan Bahasa Indonesia dalam kata dan frasa, masalah kalimat dalam Bahasa Indonesia dan masalah lafal serta ejaan Bahasa Indonesia.

Salah satu sorotan penting penulis dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia adalah masih banyaknya kesalahan berbahasa yang terjadi di surat kabar. Kesalahan itu meliputi kesalahan dalam hal pemilihan kata, penggunaan tanda baca maupun ketepatan nalar kalimat. Kesalahan yang dibuat surat kabar akan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan bahasa. Hal ini terjadi karena surat kabar dibaca oleh berjuta orang setiap harinya.

Para wartawan, demikian pendapat penulis, mempunyai tanggung jawab besar dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Oleh karenanya para wartawan dan penulis harus terampil dalam menyusun kalimat yang baik. Untuk menghindari kesalahan dalam bahasa tulis sebe-

namnya tidaklah terlalu sulit sebab tulisan tersebut masih dapat diperiksa kembali.

Dalam bahasa koran dikenal apa yang disebut dengan ekonomi kata. Yakni usaha menyampaikan pesan dengan bahasa yang seringkas mungkin. Namun menurut penulis, ekonomi kata dalam surat kabar tidak berarti merusakkan bahasa dengan menghilangkan kata dengan sewenang-wenang, tetapi menggunakan kata setepat-tepatnya dalam susunan yang baik dan teratur (hal .35).

Dalam usaha mendukung pemakaian Bahasa Indonesia yang benar keberadaan kamus Bahasa Indonesia memegang peran yang penting. Hanya saja kamus Bahasa Indonesia masih sangat sedikit yang memilikinya. Ini berarti kesalahan berbahasa yang terjadi, seperti yang disebutkan Badudu, tidak sepenuhnya karena penulis malas membuka kamus, tetapi karena keberadaan kamus itu sendiri memang sulit didapat.

Buku yang membahas berbagai masalah teknis kebahasaan sangat jarang ditemukan. Padahal berbagai masalah baru bahasa terus muncul, dan perkembangan bahasa itu harus terus diikuti. Buku *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar* ini merupakan buku yang penting untuk menjelaskan berbagai masalah aktual bahasa yang ada. Kehadirannya dirasa sangat tepat, yakni disaat kita ingin menghidupkan kebanggaan untuk memakai Bahasa Indonesia.

Keragaman masalah yang dibahas dalam buku ini akan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan benar mengenai penggunaan Bahasa Indonesia. Karenanya buku ini layak untuk dimiliki baik oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia akademik, masyarakat umum pemakai bahasa ataupun orang asing yang mempelajari Bahasa Indonesia.**(F. Alkap Pasti)**

Suara Karya, 26 Mei 1995

Language reflects national character

By Prapti Widinugraheni

JAKARTA (JP): *Bahasa menunjukkan bangsa* is a popular Indonesian saying which more or less means "language reflects people". Ironically, however, it is ourselves who have to be repeatedly reminded of the importance of *bahasa* Indonesia in shaping the nation's identity.

Language, which to some people may not seem as important as general elections or as serious as bad debts, has lately become an issue that even President Soeharto, and later Education and Culture Minister Wardiman Djojonegoro, have addressed.

"Use *bahasa* Indonesia correctly and be proud of it," said Wardiman last February when he announced the theme of the official campaign to promote the proper usage of the national language.

The campaign was officially launched on National Awakening Day last Saturday.

So far, the first ones to feel the sting of the campaign have been real estate developers, apartment and shopping mall builders, who have been proudly using foreign names and terms for their projects, saying that it is "more eye-catching" to prospective customers.

This was quickly dismissed by language expert Anton Moeliono who quipped that people choose a house not by its name but by its location.

Next, the media was lashed at, with Moeliono saying that while on the one hand the press could become an effective means to introduce good and correct *bahasa* to its 190 million users, it could, on the other, cause widespread, massive mistakes every time it used the language incorrectly.

Why is the issue of *bahasa* Indonesia so important and why does it still have to be promoted even though it has been proclaimed the national language for almost 70 years?

Bahasa Indonesia was adopted from *bahasa Melayu*, which in ancient times was commonly used in Riau, Johor and areas around the Malay Peninsula.

It started out as a lingua franca and a language of trade used across the Indonesian archipelago and neighboring regions in Southeast Asia.

In was later enriched by local dialects from across the archipelago, such as those spoken in Java, Sunda, Madura, Ambon, Manado, Minang and Aceh.

It also received significant influence from foreign words and phrases which arrived on our shores with the colonialists.

In the late 1920s, *bahasa Melayu* was used by only 4.9 percent of the then 30 million population.

According to 1990 statistics, 24 million or 15 percent of the 180 million population spoke *bahasa* as a daily language, 107 million or 68 percent could speak the language but did not use it in daily communication and 27 million or 17 percent could not understand *bahasa* Indonesia at all.

The Central Bureau of Statistics predicts that by the year 2010, every Indonesian aged five years and older from an estimated total population of 215 million would master *bahasa*, albeit at various levels of skill.

To this day, the development of *bahasa* Indonesia has not yet come to a halt.

It has continued to receive, adopt and absorb new vocabularies on one hand while changing, standardizing and adjusting old ones on the other.

In the last 50 years, the Indonesian dictionary has added over 50,000 new words and terms to its contents.

Several months ago, for example, the *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia* (Center for Indonesian Language Development) published a guideline for the correct usage of *bahasa* Indonesia. Included in the guideline was a long list of foreign terms and their new, standardized

Indonesian translations.

The words condominium, concession, management and deregulation, for instance, are directly absorbed into *bahasa* Indonesia and become *kondominium*, *konsesi*, *manajemen* and *deregulasi*.

However, supermarket, high-rise building, data processor and awning become *pasar swalayan*, *bangunan jangkung*, *pengolah data* and *bidai* respectively.

The list also had the "correct" translation of foreign-named housing estates and shopping malls: Bogor Boulevard should be Adimarga Bogor or Bulevar Bogor, Cafe Batavia should be Kafe Betawi, Ratu Plaza should be Plaza Ratu and City Garden should be Taman Asripura or Taman Kota Permai.

Others included in the list were: *mus* (mousse), *baju senggang* (negligee), *benang pembersih gigi* (dental floss), *waralaba* or *francis* (franchise), *kentang jari goreng* (french fries), *mi spinasi* (spinach noodles) and *penempahan* (booking).

One of the disadvantages of being such a young and relatively simple language, is perhaps its "flexibility".

"*Bahasa* Indonesia goes by very loose guidelines," Anton once said. "Why can't we be more grammatically strict when we use *bahasa* Indonesia, like when people speak Arab, English or German, for instance," he said.

Anton considers *bahasa* Indonesia guidelines urgently needs to be tightened, its rules reinforced and, last but not least, popularized countrywide.

But Anton may have more to do than simply call on the public to use "*Bahasa Indonesia yang baik dan benar*" (good and correct *bahasa* Indonesia).

Although *bahasa* Indonesia is an egalitarian language which enables everyone to use it regardless of their social background, the dominant Indonesian culture of following — and bowing — to a senior, a respected public figure or an elder fellow-speaker in an excessive and sometimes irrational manner, does not always allow the language to remain egalitarian.

While written speeches by the country's top-most people in *bahasa* Indonesia are practically flawless, it is no secret that when it comes to speaking the language, except for a few exceptions, these people generally articulate very poorly in Indonesian.

Not only are their sentences not well-structured and therefore make no sense, but their pronunciation — of Indonesian and adapted foreign terms — is also often incorrect.

Aside from that, another dominant culture in the country is saying "yes" when you actually mean "no" and vice-versa — something that many long-time expatriates may be quite familiar with.

To do this, a speaker must go beating around the bush before he arrives at what he really wants to say.

The only way to do that, in Indonesian, is by making long, winding sentences where you have to slip in here and there words of respect, words of apology (if necessary) and, of course, your true intention, which should be neatly wrapped somewhere among the "flowery" phrases.

This causes unnecessary words and phrases which have no contribution to clarifying an idea. Instead, it results in very bad *bahasa* Indonesia.

If the top figures who are supposed to be role models for the country's 190 million *bahasa* users still fail to demonstrate their ability to conceive a good flow of ideas — for a good sentence is a spoken or written form of an idea — imagine where Moeliono must start his language campaign.

And imagine what the proud founding fathers would think if they saw their grandchildren's generation use a language they valued so highly in such a poor manner.

Jakarta Post 27 Mei 1995

Disiplin Nasional dan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Oleh Faruk

DARI nama dan banyak kegiatannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa dapat dikatakan merupakan pertama-tama dan terutama sebuah lembaga ilmu pengetahuan. Karena itu, di dalamnya yang memegang peranan penting adalah para ahli bahasa ataupun ahli sastra yang sudah mempunyai gelar akademis dari sarjana, sarjana utama, hingga doktor. Kegiatan-kegiatannya pun pertama-tama dan terutama merupakan kegiatan yang bersifat akademis seperti serangkaian penelitian, penataran tenaga ahli akademis, dan penerbitan karya-karya serta jurnal ilmiah. Meskipun di dalamnya terdapat pula kegiatan pengembangan bahasa (dan sastra), kegiatan itu tampaknya dilakukan dengan dasar hasil dari kegiatan yang pertama tadi, hasil kegiatan ilmiah. Itulah sebabnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa kemudian terintegrasi ke dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sebagai lembaga ilmu pengetahuan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pastilah berpretensi dan sekaligus mengklaim dirinya sebagai lembaga yang bersifat netral, universal, dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu. Lembaga tersebut akan tetap hidup dan bertahan terlepas dari kelompok politik manapun yang berkuasa. Mungkin hanya satu komitmen politiknya, yaitu politik kebangsaan dengan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

***

NAMUN, sejak sekitar sepuluh tahun terakhir ini mulai muncul banyak usaha membuka kedok sepihakan politik lembaga di atas. Kemunculan karya-karya Mangunwijaya, Linus Suryadi, dan juga karya-karya Darmanto Jatman di awal tahun 1980-an, tiba-tiba mengangkat ke forum "resmi" adanya sebuah bahasa Indonesia dari jenis yang lain, bahasa Indonesia yang selama ini dianggap tidak layak hadir di forum yang serupa itu. Pada tahun 1982 terbit buku Pramoedya Ananta Toer yang berjudul *Tempo Doeloe* yang juga membuka kesepihakan itu meskipun secara tidak langsung. Pada tahun 1985 terbit terjemahan buku Claudine Salmon, *Sastra Cina Peranakan*.

Meskipun peristiwa-peristiwa itu tampaknya hanya berlangsung di lingkungan kesusastraan, tetapi hubungannya dengan persoalan bahasa tidak dapat diabaikan. Di dalam buku Claudine Salmon terdapat beberapa tulisan khusus yang membicarakan persoalan bahasa Indonesia, khususnya dalam oposisi antara bahasa Melayu Tinggi dan bahasa Melayu Rendah. Itulah pula sebabnya, pada tahun 1989 majalah *Prisma* menampilkan sebuah edisi khusus mengenai aspek politis dari bahasa, yaitu edisi "Bahasa, Kekuasaan, dan Perubahan Sosial."

Tidak ada respon yang berarti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa mengenai hal itu. Di kalangan linguis yang ada di Fakultas Sastra UGM kegiatan penelitian dan diskusi mengenai bahasa Indonesia tetap berlangsung seperti biasanya. Seolah-olah semua hal yang dikemukakan di atas tidak pernah terjadi. Akhirnya, yang tampak terjadi hanyalah semacam segregasi dalam pemahaman mengenai bahasa antara pihak lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan bahasa yang resmi dengan forum-forum yang ada di luarnya.

Tapi, di bulan-bulan awal tahun 1995 ini tiba-tiba Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa membuat beberapa kejutan. Saat pertama lembaga tersebut berhasil mengajak Menteri Penerangan di televisi untuk membuat pernyataan mengenai perlunya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa. Kemudian, lembaga tersebut melakukan kritik yang keras terhadap berbagai nama pemukiman yang menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengemukakan perlunya penggunaan bahasa Indonesia seperti yang diinginkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu, 20 Mei 1995 lalu. Presiden memasukkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai salah satu bagian dari "Gerakan Disiplin Nasional".

Rupanya, itulah jawaban dari para penentu bahasa Indonesia yang duduk di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terhadap berbagai kritik tajam mengenai keberpihakan politisnya. Mereka menggunakan dasar kesepakatan politik nasional untuk meniadakan kesan keberpihakan mereka dengan menggunakan dan mencari dukungan

dari kekuatan-kekuatan politik nasional.

***

PRESIDEN Soeharto mengatakan bahwa disiplin dalam berbagai kegiatan yang kecil dapat menentukan keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang besar. Kegiatan-kegiatan yang kecil itu antara lain adalah disiplin dalam pembuangan sampah di tempat sampah, disiplin dalam antre, dan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kedisiplinan dalam semua kegiatan kecil tersebut, masyarakat dan bangsa Indonesia diharapkan akan pula disiplin dan setia dalam pelaksanaan kegiatan yang besar yang sudah menjadi kesepakatan nasional.

Kesepakatan nasional memang harus dilaksanakan dengan setia dan penuh disiplin. Akan tetapi, kegiatan sehari-hari yang kecil-kecil itu belum tentu harus dilaksanakan dengan cara yang sama. Yang menjadi pokok masalah dari kegiatan-kegiatan itu, apabila dipahami sebagai salah satu cara penanaman disiplin dalam pelaksanaan kesepakatan nasional, adalah sejauh mana kita sudah bersepakat mulai mengenainya.

Kedisiplinan dalam pembuangan sampah di tempatnya, misalnya, seringkali tidak dapat dilaksanakan secara berdisiplin karena penempatan tempat sampah itu tidak dilakukan melalui kesepakatan. Kalau sebuah tempat sampah ditempatkan di suatu tempat yang hanya dekat rumah para pejabat, bangsawan, orang kaya, atau orang terhormat lainnya, kedisiplinan untuk menempatkan sampah di tempat sampah itu pastilah hanya akan menyenangkan orang-orang terhormat itu dan menyusahkan orang-orang yang tidak terhormat yang harus berjalan jauh untuk menuju tempat sampah yang ada. Penempatan kompleks perumahan di tempat yang jauh dari pusat kegiatan hidup sehari-hari pastilah hanya akan menguntungkan mereka yang mempunyai kendaraan pribadi yang baik dan menyenangkan.

***

HAL yang sama berlaku pula bagi kedisiplinan dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang ditetapkan atas dasar kesepakatan nasional tidak perlu diragukan. Begitu juga halnya dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Akan tetapi, dalam soal gagasan yang biasa diakui mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu masih banyak yang ditentukan tidak atas dasar kesepakatan bersama. Sebagai misal, pedoman pelafalan bahasa Indonesia yang baik dan benar (-kan, ken; memiliki, memili'i, dan sebagainya), pedoman mengenai tata bahasa (masuk dari mana, masuknya dari mana, dan sebagainya), pedoman mengenai semantika (ibu dalam arti 'orang tua perempuan ego' dan ibu dalam arti 'istri ego', dan sebagainya).

Menurut pengamatan saya, setidaknya dilihat dari penggunaan para teladannya, yaitu para juru penerang bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti yang terdapat di televisi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu cenderung dipahami sebagai bahasa yang "ilmiah", yang mengandung pernyataan yang jelas dan lengkap (subjek, predikat, dan objeknya), yang menggunakan kosa kata yang mengandung makna tunggal, denotatif, dan sejenisnya.

Apabila perkiraan saya tadi benar, yang diuntungkan oleh tuntutan akan kedisiplinan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu akan hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Mereka yang sudah terbiasa dengan aktivitas berpikir dan berkomunikasi secara ilmiah, golongan cendekiawan, pastilah akan dengan mudah dan bahkan dengan otomatis dapat menggunakan bahasa Indonesia secara berdisiplin. Sebaliknya, golongan yang berada di luar lingkungan tersebut akan terus-menerus mengalami kesulitan melaksanakan kedisiplinan di atas.

Andaikata suatu saat nanti ada semacam pemberian hadiah bagi pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang dengan demikian dianggap paling berdisiplin, tentunya hadiah itu akan jatuh pada golongan akademis atau cendekiawan itu pula. Andaikata, di suatu saat nanti, dibuat Undang-Undang Bahasa Indonesia yang akan memenjarakan mereka yang dianggap melakukan penyimpangan dari pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, penjara pastilah akan penuh dengan mereka yang berasal dari luar golongan di atas.

Mudah-mudahan dengan tulisan ini, saya bukan bagian dari mereka. Amin. □-b.

**) Dr Faruk,*
dosen Fakultas Sastra
UGM.

Kedaulatan Rakyat, 27 Mei 1995

Orang baik berbahasa baik

Oleh Edgar Rosfianik

PADA puncak peringatan 'Hari Kebangkitan Nasional 95', Presiden Soeharto kembali menyadarkan masyarakat tentang perlunya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan hidup dalam era disiplin nasional yang rapi. Penegasan ini bahkan merupakan ulangan pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1972 (23 tahun lalu) dan sangat layak kita simak mengingat masalahnya senantiasa aktual dan sering dialpakan kepatuhannya.

Kita katakan alpa untuk patuh mengingat berbahasa dengan baik dan benar sebetulnya merupakan cermin jatidiri tiap individu. Ketinggian martabat dan intelektual orang akan mudah tercermin dari cara orang tersebut berbahasa. Hanya saja urusan penilaian dalam pergaulan lebih banyak permaklumannya.

Tepatnya, lawan bicara tidak akan menegur orang yang kurang baik cara bicara/bahasanya. Meski demikian cara bicara dalam pergaulan mudah kita nilai/apresiasi. Ini bisa jadi isyarat bahwa kemauan berbahasa dengan baik dan benar lebih mungkin ditumbuhkan dari kepedulian masing-masing orang.

Bahasa menunjukkan bangsa karena bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Kepedulian terhadap masalah ini pada dasarnya merupakan cermin kesadaran yang tinggi untuk menempatkan diri menjadi orang terhormat dalam tata pergaulan dan menjadi warga yang baik pada negaranya. Secara spesifik, individu pada tiap keluargalah yang baik untuk ujicoba berbahasa secara bagus.

Bahasa tulis

Berbahasa lisan dan berbahasa secara tulis umumnya sangat berbeda. Banyak bahasa lisan yang jika ditulis apa adanya menjadi tumpang tindih, struktur bahasanya berantakan, dan pengertiannya pun berbeda. Sampai pada titik ini, bahasa tulis yang baik dianggap mampu mewakili tingkat intelektualitas penulisnya. Karena lazimnya orang yang bisa menulis dengan baik akan berbicara tidak kurang baiknya.

Benarkah demikian?. Bahasa tulis pada dasarnya merupakan bahasa paling telanjang dari penulisnya. Penulis yang baik tidak selamanya merupakan pembaca yang baik. Di titik ini, pembaca yang baik menempati peringkat paling atas untuk berbahasa dengan baik. Sebab, pembaca yang baik umumnya merupakan penulis yang baik, dan pengertiannya tidak bisa dibalik.

Kita katakan bahasa tulis merupakan bahasa paling telanjang terutama jika menjadi media umum, seperti lewat koran/majalah, atau penulisan buku. Sebab, bahasa tulis disampaikan sudah dengan rencana dan sasaran yang jelas, dan tahu akan dibaca banyak orang. Ini menyangkut tingkat intelektual penulisnya.

Setiap tulisan akan mudah disimak (oleh pembaca yang baik) tingkat wawasan, dasar pengetahuan, kekayaan pengalaman, sampai cara menanggapi masalah, bahkan keputihan rambut, kejernihan otak, dan kebeningan hatinya.

Penulis akan mudah diketahui tidak saja gaya hidupnya. sikap dan perilakunya, juga cara berpikir dan watak atau sifat hidupnya. Jika penulisnya makin dikenal (meski lewat tulisan) moralitasnya juga tidak bisa disembunyikan. Tulisan yang bohong, serampangan, sok pinter, dll, pun pada dasarnya mudah diketahui, bahkan sering seketika tergantung dari pengetahuan pembacanya.

Bahasa lisan

Mulut itu sumber pertengkaran. Air beriak tanda tak dalam. Tong kosong berbunyi nyaring. Harga diri terletak pada mulut. Tutur kata yang baik merupakan cermin budi pekerti. Ingkar janji dibawa mati.

Demikian sederet pepatah tentang tingginya makna berbahasa secara lisan. Pertengkaran hanya terjadi karena mulut yang buruk, dan terbukti hampir tidak ada pertengkaran yang tidak diawali dengan perang mulut lebih dulu.

Orang banyak kekurangan (pengetahuan) akan banyak bicara karena menganggap lawan bicaranya sama kurangnya. Untuk menyampaikan sesuatu hal menjadi berbelit-belit, dan tidak bisa bicara ringkas dan sederhana, apalagi tepat sasaran. Bahkan pada pengajar/guru/penceramah juga berlaku karena harus menganggap murid/hadirinnya memang kurang pengetahuan/butuh pengetahuannya.

Yang membedakan, guru memang lebih berpengetahuan, dari muridnya. Penceramah biasanya ditunjuk karena ia dinilai layak menjabarkan pengetahuannya. Lain soal jika semua orang yang terlibat berada dalam pergaulan umum yang selayaknya tidak pamer kemampuan dan menggurui karena ia bisa terjebak menjumpai orang yang lebih mampu.

Itu sebab, berbahasa lewat bicara menyimpan rahasia dan harga diri pembicaranya. Orang yang dirinya ingin dihargai justru

Kita katakan alpa untuk patuh mengingat berbahasa dengan baik dan benar sebetulnya merupakan cermin jatidiri tiap individu. Ketinggian martabat dan intelektual orang akan mudah tercermin dari cara orang tersebut berbahasa.

harus pandai menempatkan diri dan menganggap lawan bicaranya adalah teman, atau paling tidak senantiasa memegang prinsip egalitarian, kesederajatan, dan persaudaraan.

Sekali ia bicara, akan ketahuan pengetahuan, dan budi pekertinya. Sekali ia ingkar janji, bohong, dan tidak mampu bertindak seperti bicaranya, ia akan kehilangan kepercayaan sepanjang umur.

Beranjak dari contoh tersebut, bisa kita pahami besarnya dampak berbahasa lisan dan tulis. Lewat bicara orang mudah saja menipu namun sebetulnya ia hanya menipu diri sendiri. Lawan bicaranya sekadar menerima informasi yang salah/keliru dan bisa seketika sadar pula terhadap tipuan yang terjadi.

Orang semacam ini tidak pernah tahu bahwa sebetulnya tiap orang tidak bisa berkata bohong pada orang lain, kecuali hanya menyampaikan informasi yang salah. Jika ini hendak dilanjutkan, pekerjaan yang serupa juga dilakukan orang yang sempit wawasan karena ia menganggap orang lain juga bodoh. Orang yang bodoh akan mencari (mencari-cari) kebodohan orang lain dan orang yang pinter akan mencari kepinteran orang, terutama lewat bicaranya (di samping lewat sikap dan perilaku).

Kepedulian untuk berbahasa dengan baik dan benar harus menjadi sikap hidup bangsa ini. Adalah memalukan jika kita berbahasa dengan buruk karena akan menjadi tanda kita kurang terpelajar.

Malu diri

Lewat tulisan ini, ada baiknya kita sama-sama membulatkan tekad untuk bangkit membenahi diri dalam berbahasa. Sebab, cara kita bicara akan jadi nilai kita sendiri di mata orang lain. Kita harus merasa risi diintip jatidiri kita hanya lewat bahasa.

Kita tidak tahu apakah bisa ada semacam program baru *Penataran Pengamalan dan Penghayatan Bahasa Indonesia*. Yang jelas sebaiknya ada semacam rambu yang membuat seseorang (pegawai/karyawan berikut pejabatnya) merasa malu jika berbahasa kurang baik dan kurang benar. Tidak saja bagi pegawai negeri namun juga baik seluruh masyarakat.

Kita mungkin sudah lelah dengan aneka slogan, namun gerakan demikian harus dijalankan agar semua sadar bahwa **Anda sedang memasuki negara/kawasan berbahasa baik.** Enaknya, tanpa rambu khusus tapi bisa sadar diri, bahwa citra hidup kita dipertaruhkan lewat cara berbahasanya.***

Penulis adalah peminat sastra.

Terbit, 27 Mei 1995

Penggunaan Bahasa Tidak Konsisten Timbulkan Kerugian Cukup Besar

Semarang, Pelita



Penggunaan bahasa yang tidak konsisten atau selalu berubah-ubah, justru mengakibatkan kerugian secara materil yang tidak sedikit jumlahnya atau bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

"Kalau kita konsisten menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan mendatangkan kehematan," kata Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Semarang, Drs. Sulistiyo di Semarang, Kamis (25/5).

Sebagai contoh, pemakaian kata "Kodya" yang sempat berubah menjadi "Kodia" dan kata ini akhirnya sering muncul di media cetak terbesar di Jawa Tengah, menyebabkan papan nama yang ada di Semarang tulisannya disesuaikan.

Namun setelah media tersebut menggunakan kata "Kodya" kembali sesuai dengan yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, yang diterbitkan Balai Pustaka, 1991, maka terlihat papan nama, baik yang ada instansi pemerintahan maupun swasta menggantinya kembali.

"Ini baru papan nama, kertas surat dan mencetak ulang buku pelajaran, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya," katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan, suratkabar, majalah, radio dan televisi memang mempunyai peranan sangat besar bagi pengembangan dan pembinaan bahasa, sehingga terkadang bahasa yang dibakukan adalah bahasa yang dipakai media masa, yang berarti bahasa yang dipakai masyarakat.

Ditentukan media massa

Ia menambahkan, wajar bila pembakuan bahasa kadang-kadang berganti-ganti, karena pembakuan bahasa sebenarnya diangkat dari bahasa yang dipakai masyarakat, yang secara kuantitas hanya dipakai di media massa.

"Diakui suka-tidak suka sebenarnya perkembangan bahasa suatu negara justru sebagian besar ditentukan oleh media massa," katanya.

Pusat bahasa pernah mengusulkan kata "Sangkil" dan "Mangkus" sebagai pengganti kata "efisien" dan "efektif", namun karena media massa jarang menggunakan kata itu tidak heran jika dua kata itu akhirnya tenggelam.

Hal itu kemungkinan disebabkan dalam kalangan media massa menganggap kata 'efisien' dan 'efektif' lebih komunikatif atau mudah dipahami masyarakat dibanding dua kata tersebut, katanya.

Sebaliknya, kata-kata seperti "solusi" (penyelesaian, pemecahan), "solid" (kukuh; kuat; berbobot) yang sering muncul di media massa justru sudah memasyarakat, sedang kata "solot" (gemas; marah sekali - red) malah "belum"-dikenal.

"Yang mengherankan bila masyarakat yang baru membaca kata itu menganggap istilah baru, padahal kata itu sudah ada sejak lama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia," katanya.

Apalagi isi kamus tersebut memuat 72 ribu kata, yang tentunya masih banyak yang belum diketahui masyarakat.

"Karena itulah peranan media massa dalam mengembangkan Bahasa Indonesia perlu ditingkatkan lagi," kata Sulistiyo.**(ant)**

Pelita, 27/28 Mei 1995

BAHASA KITA

Diasuh oleh Lukman Ali dan Yayah B. Lumintaintang

Dari Saudara-Saudari sampai dengan Remaja-Remaji

Ini terjadi pada suatu malam Rabu, ketika kami berkumpul mendengarkan ceramah kerohanian. Pada sambutan panitia penyelenggara meluncur kata-kata seperti tertera pada tajuk di atas. Saya agak terkejut juga karena selama ini kata *remaja-remaji* tidak pernah saya dengar. Lengkapnya, ungkapan pembuka sambutan itu berbunyi sebagai berikut:

Para hadirin sekalian, ...
Para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ...
Saudara dan Saudari semuanya, para pemuda dan pemudi, serta remaja dan remaji yang sangat saya cintai, ...

Ungkapan tersebut harus kita soroti. Sekurang-kurangnya kita berhadapan dengan tiga masalah pembentukan kata dalam ungkapan pembuka tersebut: (1) berkaitan dengan penjamakan sebuah kata benda (dalam hal ini berkaitan dengan orang) yang sudah menyatakan jamak, (2) berkaitan dengan pemakaian huruf *-a* dan *-i* yang dianggap menyatakan gender (perbedaan jenis kelamin), dan (3) berhubungan dengan faktor kehematan di dalam konteks pemakaiannya.

Masalah yang (1) berkaitan dengan pemakaian kata bantu bilangan *para* (penanda jamak) yang diikuti oleh kata penyapa serapan dari bahasa Arab yang menyatakan jamak pula: *para hadirin sekalian*. Menurut sistem tata bahasa kita, pemakaian kata bantu bilangan *para* tidak perlu diikuti oleh bentuk jamak lagi. Karena kata *hadirin* juga sudah merupakan bentuk jamak (dari *hadir*), kita sunting saja pemakaian kata para (kita buang). Begitu pula, kata *sekalian* juga bermakna jamak. Jadi, kita sunting pula. Yang benar kita cukup menyapa dengan *hadirin* saja; misalnya *Hadirin yang saya muliakan ...*

Penyapaan *para bapak-bapak* dan *para ibu-ibu sekalian* juga harus kita sunting. Ada dua pilihan penyuntingannya: kita buang kata *para* dan kata *sekalian* sehingga menjadi *Bapak-bapak dan Ibu-ibu* saja atau kita pakai kata *para*, tetapi diikuti oleh kata dasar saja, yaitu *para bapak dan ibu*, tanpa kata sekaian: misalnya *para bapak dan ibu yang saya hormati, ...* Demikian pula, penyapaan *para pemuda-pemudi dan remaja-remaji* yang diikuti kata *semuanya* itu kita sunting juga menjadi *para pemuda dan remaja* saja.

Masalah yang kedua berkaitan dengan pemakaian huruf *-a dan -i* yang berfungsi sebagai akhiran penanda gender (pembenda jenis kelamin). Memang, dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata seperti itu, tetapi pada umumnya merupakan pengaruh dari unsur serapan yang sudah lama kita pakai; misalnya dari kata *dewa-dewi* (bahasa Sansekerta) muncul kata-kata seperti di atas, yaitu kata *saudara-saudari* dan *remaja-remaji* (semoga tidak muncul pula kata-kata *teman-temin atau kawan-kawin* karena kata *kawin* itu sendiri sudah bermakna lain).

Tampaknya, sistem pembentukan kata sebagai pembeda gender seperti pada contoh-cntoh di atas tidak perlu kita kembangkan. Bahasa Indonesia sudah mempunyai sistem untuk itu: untuk nomina orang, kita memakai kata *laki-laki* dan *perempuan*, di samping kata *pria* dan *wanita*; untuk nomina binatang dan tumbuh-tumbuhan kita memakai kata *jantan* dan *betina*: ada kerbau jantan dan betina, di samping ada bunga jantan dan betina. Jadi, sekali lagi, kita tidak perlu mengembangkan sistem pemakaian akhiran *-a* dan *-i* sebagai penanda gender. Bukankah *Sumpah Pemdua 1929* itu juga dihadiri oleh pemudinya.

Masalah yang ketiga berkaitan dengan faktor kehematan (efisiensi). Pemakaian ungkapan sejenis contoh di atas tidak menunjukkan sikap hemat dalam bertutur. Pemakaian ungkapan pembuka sambutan seperti itu terasa bertele-tele alias tidak lugas. Apalagi, jika ungkapan itu kita pakai pada upacara yang memperlihatkan kadar keresmian tinggi, suasana menjadi kurang resmi (khidmat). Jadi, contoh ungkapan di atas tadi dapat disunting menjadi ungkapan yang hemat seperti berikut:

Hadirin, para ibu dan bapak, ...
Saudara, para pemuda serta remaja, yang sangat saya cintai, ...
atau
Hadirin, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, ...
Saudara, para pemuda serta remaja, yang sangat saya cintai, ...
atau
Hadirin, Ibu dan Bapak sekalian, ...
Saudara, pemuda dan remaja semua/sekalian, yang sangat saya cintai, ... ■ yayah b. lumi

Republika, 28 Mei 1995

Banyak yang Merasa Bangga Menggunakan Bahasa Gado-gado

Pengantar

Sepekan lalu Menko Polkam melemparkan ide segar. Para menteri perlu ditatar dalam menggunakan Bahasa Indonesia, karena dinilai mereka banyak yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam memakai Bahasa Indonesia. Ide yang terlihat sepele dan ringan tersebut sebenarnya mengandung makna yang dalam mengenai perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. *Merdeka* menyajikan tulisan soal ini dari beberapa tinjauan.

MASALAH penggunaan Bahasa Indonesia kini mulai diperdebatkan kembali, —Keberadaannya sendiri kian hari kian terpuruk— akibat seringnya terlontar kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan (EYD). Gejala ini muncul tidak saja dari kalangan masyarakat biasa, namun bahkan dari kalangan atas yang boleh dikatakan sebagai panutan masyarakat.

Mungkin, pemakaian atau penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan masyarakat biasa kurang menjadi perhatian karena pemakaian di tengah-tengah masyarakat biasanya hanya memakai bahasa keseharian yang tidak resmi.

Namun bagi kalangan atas, terutama di kalangan pejabat, hal ini menjadi soroton yang sangat menarik untuk diperbincangkan, apalagi sudah sebagian orang yang boleh dikatakan pejabat sering menggunakan istilah-istilah yang mungkin bagi masyarakat awan kurang bisa dipahami apalagi di mengerti, selain itu sering pula menggunakan kata-kata yang rancu yang tidak ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

"Sebenarnya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak susah," ujar pemerhati masalah sosial dan budaya Fadjar Ibnu Thufail, kepada *Merdeka*, baru-baru ini.

Jangan Meniru

Fadjar berpendapat bahwa untuk berbahasa baik dan benar harus timbul dari diri sendiri dan harus ditopang dengan kesadaran yang tinggi. Apalagi bagi seorang pejabat. Pejabat harus benar-benar memahami EYD, serta jangan meniru-niru ucapan seseorang, karena hal itu akan berakibat tidak baik di mata masyarakat luas.

Ibnu yang bekerja sebagai seorang peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslitbang PMB-LIPI) lebih lanjut mengatakan, bila penerapan penggunaan bahasa yang baik dan benar tidak cepat segera ditanggulangi lambat laun mereka (masyarakat-red) tidak akan memakai bahasa sesuai dengan slogan pemakaian bahasa dari pemerintah. Sebab mereka beranggapan, kalangan atas saja sering menggunakan pemakaian bahasa tidak sesuai dengan kaidah EYD.

"Bagaimana mereka akan menerapkan pemakaian bahasa yang benar, bila dilihat dari kalangan orang yang mengerti bahasa saja sering menggunakan pemakaian kata-kata yang tidak pada tempat ataupun sesuai EYD," jelasnya.

Kalau ini dibiarkan terus menerus, menurutnya, akan berakibat tidak baik, karena mereka bisa saja mengatakan percuma saja slogan-slogan penggunaan bahasa yang baik dan benar, jika kalangan atas saja sering tidak memakai. Sebab mereka akan berpikiran, kenapa kita saja yang harus menggunakan, sedangkan kalangan atas tetap dibiarkan.

Sebenarnya bila terjadi kesalahan pemakaian Bahasa Indonesia ini, tidak begitu saja timbul dari kalangan atas saja. Sebab hal ini saling berkaitan dengan dunia pendidikan.

Untuk itu, katanya, dunia pendidikan.

terutama untuk bidang Bahasa Indonesia harus sejak dini menerapkan suatu sistem kepada anak didik untuk menggunakan pemakaian bahasa yang baik dan benar sesuai dengan program yang diajarkan.

"Kalau itu diajarkan sedini mungkin kepada anak didik kesalahan dimasa mendatang dapat dihindarkan," tutur Ibnu

Sebenarnya, lanjut peneliti ini, untuk menggunakan bahasa sesuai EYD, bukan masalah yang susah. Sebab pada dasarnya hanyalah kemauan diri sendiri untuk mempelajari bahasa dan meneliti bagaimana menggunakan bahasa yang baik dengan sering melihat Kamus Bahasa Indonesia. "Karena dengan sering melatih serta memperhatikan penerapan kaidah bahasa yang benar itu merupakan suatu prinsip yang tidak sulit untuk dipelajari," tambahnya.

Merasa Bangga

Ketika ditanyakan pendapatnya mengenai langkah yang diambil Menko Polkam Soesilo Soedarman mengenai penerapan berbahasa yang baik di kalangan pejabat tinggi, Ibnu mengatakan, itu merupakan suatu langkah yang positif dan baik. Semua yang dilakukan Menko Polkam ini mungkin mengingat masih kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pejabat secara baik dan benar.

"Kitakan bisa melihat serta tidak memungkiri masih ada di kalangan pejabat yang bahasanya kacau dan memprihatinkan. Hal itu berkenaan masih banyaknya pejabat yang merasa bangga bila sudah menggunakan bahasa gado-gado dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa lain, baik bahasa asing maupun daerah," katanya menjelaskan.

Karena itu dia menilai langkah yang diambil Menko Polkam merupakan tindakan tepat untuk mengangkat citra Bahasa Indonesia. Sebab siapa lagi yang bisa membanggakan bahasa sendiri kalau bukan orang Indonesia juga," tandasnya.

Prinsip berbahasa tersebut bagaimana cara penyampaian sehingga mudah dimengerti bagi orang yang mendengar ataupun yang menjadi lawan bicara. Bila itu sudah berhasil berarti apa yang kita bicarakan sudah mencapai sasaran yang dimaksud.

"Mudah saja bila orang sudah mengerti apa yang kita bicarakan, pasti akan terjadi komunikasi yang baik. Itu berarti, kita sudah menggunakan kaidah bahasa," jelas Ibnu. **(Abdul Syukur Kusnadi)**

Merdeka, 28 Mei 1995

Jangan Terjebak Sloganisme

SUDAH sejak lama, dalam bahasa Indonesia dikenal pemakaian istilah *bahasa menunjukkan bangsa*. Dengan melihat bagaimana seseorang berbahasa, sudah dapat ditebak, bangsa seperti apa dia itu. Sehingga menjadi sangat memperihatinkan, kalau bahasa Indonesia sebagai petunjuk memahami bangsa Indonesia — harus dihadapkan pada pengrusakkan citra bangsa, yang sudah terlanjur besar ini.

Sangat naif memang, tindakan para perusak citra bangsa itu. Bahkan terasa ironis sekali, mengapa justru kenyataan itu yang harus terjadi, bahwa mereka adalah para putra terbaik pertiwi — yang mempunyai kelayakkan sebagai pengawal kebesaran citra ibundanya — sudah tidak dapat disangkal lagi, tapi ketika justru dari merekalah munculnya tradisi kebahasaan yang buruk, harus kembali dipertanyakan mengapa ini yang terjadi ?.

Terlepas dari berdebat, siapa yang salah, siapa yang memulai, dan siapa yang harus divonis, kebutuhan akan "berbahasa yang baik dan benar" menjadi semakin mendesak.

Bukan saja karena citra Indonesia yang besar harus dikembalikan, tapi lebih dari itu, tuntutan untuk — dengan ketulusan — mewariskan bahasa yang baik dan benar, kepada generasi masa depan, adalah sebuah kewajiban.

Sejarah sebenarnya sudah cukup menyediakan catatan, bahwa kepedulian bangsa Indonesia — dalam menjadikan bahasa adalah cermin besar melihat dirinya — besar sekali. Tidak bisa dikatakan tidak, bahwa itulah komitmen bangsa yang didukung oleh seluruh potensi strukturalnya.

Di awali dari zaman yang dinamakan *temoe doeloe*, sampai abad penuh ke-

mutakhiran ini, sudah tiga kali bahasa Indonesia mencatatkan periodenya. Sampai akhirnya tahun 1972, periode itu berhenti pada puncak penyempurnaan ejaannya.

Namun sekali lagi, ironisme benar-benar menjadi saksi, bahwa ketika bahasa Indonesia mencapai puncak penyempurnaannya, dan memasuki zaman yang bernama EYD, maka dengan serta merta pula banyak dipakai ejaan-ejaan yang jauh tidak sempurna.

Kenyataan ini, memang merupakan puncak-puncak pemahaman kata "bahasa menunjukkan bangsa" yang kondisinya terhenti pada kata slogan. Kalau sekedar berhenti pada utopia, masih bisa ditolerannya, bahwa sebuah cita-cita idial memang butuh proses pencapaian, tapi minimal sudah pernah ada cita-cita.

Berbeda halnya dengan berhenti pada slogan, karena problematiknya menjadi sangat lain. Di samping sudah menjadi tradisi bahwa slogan itu sekedar omong kosong, juga akan menempatkan potensi kita untuk selalu terjebak pada budaya slogan, yang biar bagaimanapun dalam perjalanan sejarah, kata slogan tidak pernah mendapat cukup simpatik dalam benak bangsa ini.

Pemakaian kembali bahasa yang baik dan benar, yang tidak sekedar slogan besar, akan menumbuhkan kepercayaan diri, bahwa pada saat diri mulai kehilangan citranya — yang sudah menjadi identivikasi itu — masih ada niat untuk tidak berlama-lama terhanyut di arus perusakan citra bangsa.

Meskipun agak terlambat, tapi masih lebih untung, karena masih ada keinginan untuk sadar. Berawal dari inilah semoga pamor bangsa yang berkepribadian dan berjati diri, dapat kembali berada dalam genggaman tangan. **(IWN)**

Merdeka, 28 Mei 1995

Riwayat Bahasa Pemersatu

PERKEMBANGAN Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia kurang lebih telah berkembang selama 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dikaji dari sejak jayanya zaman keemasan kerajaan Sriwijaya pada abad ke tujuh.

Untuk membuktikan Bahasa Melayu berkembang sebagai Bahasa Indonesia dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan Bahasa Melayu dalam prasasti-prasasti (inskripsi) seperti Prasasti Kedukan Bukit (680 M), Prasasti Talang Tuo dekat Palembang (684 M), Prasasti Karang Berahi (688 M) dan Prassasti kota Kapur (686) di Bangka Barat.

Bahasa Melayu itu berkembang luas dan akhirnya merupakan suatu dialek-dialek yang disebabkan Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di seluruh nusantara.

Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan yang menjadi negara maritim melalui perdagangannya yang pesat dan sampai ke semenanjung Malasyia secara langsung menyebarkan Bahasa Melayu tersebut ke daerah-daerah interaksinya. Akhirnya bahasa itu tersebar dan berkembang luas.

Disamping itu bahasa Melayu kuno telah dipakai oleh para sarjana untuk memperdalam pengetahuannya. Misalnya seperti I Tsing (dari Tionghoa kira-kira abad ke 7) yang mempergunakan bahasa anak negeri (Melayu) untuk mempelajari tatabahasa Sansakerta yang menterjemahkan kitab-kitab suci agama Budha, seperti yang dia pakai dalam piagam atau prasasti yang disebut tadi.

Oleh karena itu zaman I Tsing boleh di katakan sebagai permulaan perkembangan Bahasa Melayu yang kemudian sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan dan kebudayaan yang akhirnya menjelma menjadi Bahasa Indonesia.

Untuk mmembuktikan lebih lanjut perkembangan bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia dapat dilihat dengan ditemukannya di Aceh Nisan (1380) yang menurut Dr. Stutterheim (peneliti dari Belanda), bahwa batu nisan inilah yang mengandung contoh bentuk puisi tertua dalam Bahasa Melayu Kuno.

Yang membuktikan betapa luasnya penyebaran bahasa Melayu di nusantara adalah dengan timbulnya Bahasa Melayu dengan berbagai dialek, seperti Bahasa Melayu berdialek Deli (Medan), dialek Betawi, dialek Ambon, dialek Menado dan lain-lain.

Pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan suatu komisi yang disebut *Commissie voor de Volklecteuur* yang diketuai oleh Dr. G. A. J. Hazeu yang kemudian diubah namanya menjadi Balai Pustaka (1917).

Balai Pustaka inilah yang membantu penyebaran dan pendalaman Bahasa Melayu. Pada 25 Juli 1918 Raja Belanda membuat suatu ketetapan yang memperbolehkan Dewan Rakyat diberi kebebasan mempergunakan Bahasa Me-

layu dalam *Volksraad*.

Mengingat kesulitan-kesulitan untuk mempersatukan pelbagai suku bangsa di Indonesia, maka pada tahun 1926 *Jong Java* merasa perlu mengakui bahasa daerah sebagai media penghubung semua pemuda-pemudi di Indonesia dan dipilihlah Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Hal yang sama telah dicetuskan sebelumnya oleh pemuda-pemuda di Sumatera yaitu dalam Kongres II *Jong Sumatera*.

Dengan adanya berbagai macam masalah tersebut atau faktor-faktor susahnya untuk mempersatukan pelbagai suku, akhirnya pada pada 28 Oktober 1928 lahirlah Kongres Pemuda Indonesia atau yang lebih terkenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari sumpah tersebut adalah pengakuan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. **(ARN/Berbagai sumber)**

Merdeka, 28 Mei 1995

Buang Penggunaan Kalimat yang Membingungkan

JIKA manusia beranggapan bahwa penggunaan tatabahasa dalam usahanya untuk berkomunikasi cukup dilakukan senaknya saja, maka bersiap-siaplah manusia meraskan pedihnya bahaya fitnah. Bagaimana tidak? Bahasa yang diucapkan dengan baik dan benar akan memberikan pengertian yang benar pula bagi pendengarnya. Usaha perbaikan pengucapan akhiran "ken" misalnya menjadi "kan" hanyalah langkah awal dari proses pengucapan kalimat secara utuh dan lengkap. Selebihnya adalah pemasyarakatan ucapan secara sempurna, terutama ucapan-ucapan yang bernuansas politik.

Masyarakat umumnya telah mahfum bahwa penggunaan bahasa yang bernuansa politik biasanya menerapkan tatabahasa yang maknanya tersirat atau istilah kerennya biasa disebut bahasa rasa.

Bahasa rasa yang keberadaannya saat ini makin mendominasi ucapan-ucaapan yang bernuansa hanya akan efektif bilamana dapat ditafsirkan secara tepat oleh mereka yang berkepentingan menafsirkannya.

Kita sama mengetahui bahwa hampir tidak semua orang mampu dan mau menginterpretasikan bahasa rasa yang didengarnya ke dalam makana-makana yang konkreat sifatnya. Ketidakmauan dan ketidakmampuan itu dapat tergantung dari kekebalan atau kekritisan berpikir, dan kepentingan masing-masing bagi pendengarnya.

Bagi mereka yang memiliki sifat bebal, bahasa rasa yang begitu halus terucap dari mulut penguasa tidak akan mampu menembus relung hati dan tidak dapat menggetarkan nalar. Bahasa rasa yang terkesan mengajak kesadaran tersebut dianggap kurang tegas dan sekedar imbauan oleh mereka yang berpikir kritis. Bahkan oleh mereka yang terlampau kritis berpikir menganggap bahasa rasa merupakan wujud keplimplanan.

Strategis

Usaha memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar terutama bagi para pemimpin dan pejabat merupakan upaya yang sangat strategis karena manusia macam merekalah yang ucapan dan kalimat-kalimatnya sering didengar rakyat.

Jika para pemimpin dan pejabat telah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, jernih dan tegas isinya, serta mengandung makna kalimat yang tidak banyak menimbulkan penaf-

siran yang berbeda-beda, maka dapat diharapkan akan menimbulkan ketenangan dan ketidakbingungan bagi pengikutnya, pengusaha dan terutama sekali rakyatnya.

Mungkin para pembaca pernah melihat suatu tayangan televisi ketika salah seorang menteri ditanya reporter berkenaan dengan suatu kasus yang sedang ditangani dan menjadi tanggungjawabnya beberapa waktu yang lalu. Menteri tersebut menjawab, "Masalah itu *kan* sebenarnya begini, bukan yang digitukanitu, mestinya*kan* berembug, jangan begini, hehe..."

Dari jawaban tersebut di atas dapat kita mengerti betapa tidak jelas dan kaburnya informasi yang disampaikan Pak menteri kepada sang reporter.

Oleh sebab itu sangatlah dimaklumi bila Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Soesilo Soedarman sampai memberi gagasan spontan agar para menteri ditatar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana mungkin wibawa pemerintah dapat ditegakan sedangkan menteri sebagai tiang penyangganya tidak mampu mengucapkan kalimat yang tegas dan lengkap subyek.

Sebagai bangsa yang besar kita berharap semoga para pemimpin dan pejabat di tanah air mau merendahkan hatinya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar namun tetap tegas dan jelas, sehingga dapat dijadikan panutan bagi aparat di bawahnya. Sebab tidak dapat dipungkiri, penggunaan akhiran "ken" misalnya akan terkesan "minyayeni" terutama bagi mereka yang sekedar ikut-ikut menggunakannya.

Jangan Imbauan

Jika sekedar imbauan melulu yang dilontarkan para pejabat dan pemimpin dalam upayanya memasyaratkan kedisiplinan nasional secara umum dan kedisiplinan berbahasa khususnya, maka upaya itu hanya akan merupakan slogan belaka sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pemasyarakatan koperasi. Para konglomerat sepertinya enggan membina Koperasi Unit Desa (KUD) yang kondisinya agak rapuh. Kedisiplinan identik dengan teguran, dan teguran hanya akan efektif bila menggunakan bahasa yang jelas dan tegas.

Pesan Presiden Soeharto tentang penggunaan bahasa Indoensia secara baik dan benar yang disampaikan dalam memperingati Harkitnas beberapa hari lalu harus ditanggapi sebagai wujud keprihatinan. Kita sama mengetahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar adalah wujud dari kedewasaan berpikir, selanjutnya, kedewasaan berpikir merupakan wujud dari kematangan jiwa.

Kita *pun* sama mengetahui pula bahwa kematanganjiwa adalah salah satu modal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bijaksana. Siapakah diantara kita yang tidak menginginkan hadirnya pemimpin yang bijaksana?

(Bintoro)

Merdeka, 28 Mei 1995

Jangan Cuma Kesadaran

INI merupakan berita segar. Menko Polkam Soesilo Soedarman mengakui, di kalangan para petinggi negara (pejabat atau birokrat) ada yang masih menyalahi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Secara spontan Soesilo malah mengusulkan agar para menteri ditatar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soesilo menyatakan pendapatnya dalam kapasitasnya sebagai pengendali harian Gerakan Disiplin Nasional.

Ide segar menteri yang suka bercanda dengan pers tersebut dilontarkan ketika Soesilo menjadi pembicara dalam dialog antar generasi dalam rangka peringatan Harkitnas dan Pencanangan Gerakan Disiplin Nasional. Acara tersebut dipandu pula oleh menteri, yakni, Harmoko yang menjabat sebagai Menteri Penerangan (Menpen) dan dihadiri Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro.

Beri Teladan

Usul yang segar dan spontan tersebut langsung disambut berbagai kalangan. Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR Mohammad Mansur kepada *Merdeka* mengatakan bahwa tekad menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan benar hendaknya diresapi betul oleh para pejabat. "Sebab program penggunaan bahasa yang baik dan benar tersebut dice-tuskan oleh pemerintah. Yaa aneh kalau pejabatnya tidak memberi teladan," kata Mansur.

Menurut Mansur memang biasa terjadi dalam masyarakat *paternalistik* yang seharusnya menyadari bahwa, "orang tua akan ditiru orang muda" namun kenyataannya adalah, "kalau orang tua yang salah hendaknya bisa dimaklumi"

Kita sangat sependapat dengan Mansur yang pendapatnya memang tergolong benar secara universil. Tindakan orang

tua merupakan contoh tauladan bagi anak-anaknya.

Berbagai kalangan berpendapat, seharusnya bangsa Indonesia itu bersyukur karena mempunyai akar bahasa nasional dan pemersatu yakni Bahasa Indonesia. Ada negara yang sampai bersilang pendapat dan bertikai untuk menentukan suatu bahasa nasional, dan bahkan sampai detik ini negara tersebut belum mempunyai bahasa nasional sebagai identitas bangsa.

Indonesia sangat beruntung. Sejak 28 Oktober 1928 Bahasa Indonesia telah diikrarkan oleh para pemuda Indonesia sebagai bahasa nasional dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang legendaris tersebut. Namun kenyataannya, kita sangat prihatin bila melihat perkembangan penggunaan Bahasa Indonesia akhir-akhir ini.

Banyak kalangan masyarakat —terutama para pemudanya— yang sepertinya agak melecehkan penggunaan bahasa nasional tersebut.

Mereka cenderung lebih mantap dan bergaya bila menggunakan bahasa yang diembeli bahasa asing. Bila berbahasa Indonesia mereka terlihat seenaknya — bahkan di tempat-tempat resmi— tanpa memperhatikan kadiah yang ditetapkan sehingga berkesan menganaktirikan bahasa nasionalnya sendiri.

Banyak tinjauan dan analisa para pakar mengenai penggunaan Bahasa Indonesia saat ini yang dinilai perkembangnya makin memprihatinkan, namun temuan dari analisa tersebut terasa kurang menjawab kekhawatiran tersebut.

Jitu

Namun apa yang dikemukakan Menko Polkam Soesilo Soedarman di atas kiranya terasa jitu, meskipun spontan dan tanpa tinjauan yang rumit-rumit. Apa yang dikemukan Soesilo adalah ajaran kuno yang tetap ampuh sampai kini bahwa, kelakuan orang-orang tua (pemimpin) berpeluang sangat besar untuk dikuiti, dituruti, dicontoh oleh anak-anaknya.

Simak saja kata-kata Mansur. "Kalau pemimpinnya aneh-aneh maka masyarakatnya akan ikut aneh-aneh pula. Kalau menterinya berbahasa Indonesia kurang baik dan benar, masyarakat pasti akan seenaknya."

Dari pendapat Mansur yang menanggapi Menko Polkam logiskah kalau kita berpraduga bahwa, salah satu penyebab merosotnya penggunaan Bahasa Indonesia di masyarakat karena para pemimpin kita juga aneh-aneh dalam menggunakan Bahasa Indonesia.

Praduga tersebut tak jauh meleset bila Soesilo Soedarman dalam kapasitasnya sebagai pengendali harian Gerakan disiplin Nasional mengusulkan agar para menteri ditatar bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Ide yang terlihat sepele tersebut sebenarnya mempunyai arti penting dan dalam sebagai upaya menegakan disiplin di Indonesia.

Penting dalam arti, disiplin nasional memang harus benar-benar diterapkan secara konkreat, siapapun sebagai warga negara bila tidak mematuhi aturan ataupun ketetapan harus dibenahi, diperbaiki, dan ditingkatkan.

Dalam yang berarti, para pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan tepat kepada masyarakat sehingga masyarakat yang selalu melihat gaya, bicara, tindakan para pemimpin akan mencontoh dan mengikutinya.

Sebenarnya perkembangan Bahasa Indonesia sendiri kemajuannya sangat pesat. Mendikbud Wardiman menjelaskan bahwa, Bahasa Indonesia ibarat busa yang mudah menyerap kata-kata baru dari bahasa daerah dan bahasa asing sehingga kosa kata Bahasa Indonesia terus berkembang.

Wardiman mengemukakan, dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (KUBI) terbitan tahun 50-an, baru terdapat sekitar 25 ribu kata. Sedangkan pada terbitan terakhir tahun 1992, jumlah kosa kata dalam Bahasa Indonesia sudah lebih dari 70 ribu.

Kita senang mendengar penjelasan perkembangan yang cukup menggembirakan pada kosa kata Bahasa Indonesia, meski di satu sisi kita sebenarnya prihatin terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar oleh masyarakat pemakainya.

Namun kita tetap bersyukur, di tengah-tengah rasa apatisnya masyarakat dalam menggunakan bahasa ibu pertiwinya, masih ada tokoh yang menyadari bahwa kita telah menyimpang sedikit dari apa yang telah diikrarkan oleh para pendahulu, utamanya dalam soal penggunaan Bahasa Indonesia.

Tapi kesadaran saja tidak cukup. Kita perlu tindakan-tindakan sederhana, jitu, logis —buang sloganisme dan jargon-jargon yang jor-joran— dan bermanfaat yang berguna serta bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pemakaian bahasa nasional kita. **(Kusdaryanto)**

Merdeka, 28 Mei 1995

Bangsa Indonesia Seharusnya Bersyukur

PERNYATAAAN Menko Polkam Soesilo Soedarman yang menganjurkan agar para menteri jangan suka latah dan salah mengucapkan kata-kata wajar mendapat acungan jempol. Sebab Bahasa Indonesia sebagai salah satu ciri yang menunjukkan identitas bangsa. Bila Bahasa Indonesia diucapkan salah jelas akan menjelekkan identitas bangsa juga.

Apa lagi sekarang pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau masih ada kalangan pejabat yang memakai Bahasa Indonesia yang salah jelas namanya tidak ikut mendukung upaya pemerintah tersebut. Sementara kita ingin mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kita memerlukan tokoh-tokoh panutan sebagai teladan masyarakat.

Kalau kita melihat dan meneliti lebih jauh hanya beberapa negara yang mempunyai bahasa nasional. Dan kita tahu juga, akibat dari tidak adanya bahasa nasional (persatuan) di satu negara, sering mengakibatkan terjadi bentrokan antar suku di suatu negara. Seperti di India misalnya, salah satu penyebab sering terjadinya bentrokan antar suku di sana adalah karena adanya suku-suku yang saling memaksakan bahasa daerahnya sebagai bahasa nasional mereka. Dilihat dari perkembangan bahasa Indonesia, boleh dikatakan, pemakaiannya justru mengalami kemunduran. Itu bisa kita lihat dengan lahirnya bahasa-bahasa baru di kalangan kelas-kelas tertentu.

Misalnya seperti bahasa *prokem* di kalangan remaja dan pemuda. Begitu juga dengan bahasa tersendiri yang diciptakan oleh kalangan kaum waria.

Pemerintah sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya menganjurkan agar para pengusaha agar memakai bahasa Indonesia dalam pemakaian papan nama. Hal itu timbul disebabkan para pengusaha selalu memakai bahasa asing dalam papan nama perusahan mereka.

Pekan lalu Menko Polkam misalnya memperingatkan kalangan pejabat terutama para menteri agar jangan latah mengucapkan akhiran kan dengan salah. Kalau kita mau jujur anjuran ini sangat baik sekali guna menunjang anjuran pemerintah agar memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Disamping itu yang perlu diperhatikan lagi adalah latar belakang metode mengajar bahasa Indonesia, sebab bisa dikatakan yang namanya proses pengajaran bahasa Indonesia lisan itu tidak ada, atau dalam pembelajaran bahasa Inggris *comversation*.

Mulai dari proses pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, baik pendidikan formal atau non formal tidak ada yang mengajarkan Bahasa Indonesia lisan secara khusus. Umumnya pengajaran bahasa Indonesia di dominasi metode gramatika yang mengutamakan penghafalan kaidah-kaidah tatabahasa. Baik itu dari bahasa ibu atau bahasa asing dan sebaliknya.

Umumnya pengajaran Bahasa Indonesia lebih banyak terfokus pada pengetahuan yang mengajarkan pengetahuan bahasa, seperti bentuk-bentuk kalimat, pengetahuan mengenai kata dan lain-lain. Jarang ada yang mengajarkan pada siswa agar para siswa pandai menggunakan Bahasa Indonesia lisan. Atau dapat dikatakan umumnya para pengajar hanya mengajarkan agar siswa mengetahui tentang bahasa, tetapi bukan mengajarkan penggunaan bahasa terutama bahasa lisan.

Dialek

Selain itu yang sering membuat pemakain bahasa Indonesia jadi salah terutama dalam vokal adalah dialek. Seperti kita ketahui, bahwasannya di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam rumpun bahasa.

Dalam kenyataannya setiap pemakai bahasa daerah pasti terpengaruh oleh bahasa daerahnya karena kebiasaan. Ini yang kita sebut dialek.

Misalnya seperti suku Jawa. Bila seorang yang berdialek Jawa lalu menggunakan Bahasa Indonesia, dalam kata-

kata tertentu sewaktu mengucapkan Bahasa Indonesia akan terpengaruh dengan bahasa Jawa. Begitu juga suku yang lain, masing-masing mempunyai ciri tersendiri dalam pengucapan. Tidaklah salah kalau ada orang bisa menebak asal-usul seseorang melalui dialeknya kalau dia mempergunakan Bahasa Indonesia.

Agar seseorang bisa mempergunakan Bahasa Indonesia dengan baik, disamping dengan adanya kesadaran sendiri, perlu adanya suatu sanksi (katakanlah sanksi moral) bagi setiap orang yang salah dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Terutama bagi seseorang yang merupakan panutan bagi masyarakat. (ARN)

Merdeka, 28 Mei 1995

Nona Park, Ahli Bahasa Indonesia dari Korea

BAHASA Indonesia ternyata merupakan salah satu pilihan yang dianggap *prospectable* bagi para mahasiswa Korea Selatan yang ingin belajar bahasa asing dari negara-negara Asia. Alasannya, Indonesia adalah suatu bahasa yang dipakai oleh hampir 200 juta orang dan dimengerti oleh hampir 250 juta orang di Asia Tenggara.

Park Jin Ryeo, MA, adalah salah seorang di antara generasi muda Korsel yang memilih bahasa Indonesia bagi masa depan karier dan hidupnya. Ketika ia memilih jurusan bahasa Indonesia pada *University of Foreign Study* di Pusan, Korsel bagian selatan, pada awal 1980-an, ia memandang bahasa Indonesia menjanjikan hal yang cerah bagi masa depannya.

Pada waktu itu, kata Park, Cina masih merupakan negara yang tertutup dan banyak warga Korsel tidak dapat membayangkan keuntungan apa yang bakal mereka dapatkan jika belajar bahasa Cina. Korsel tak menjalin hubungan diplomasi dengan Cina, dan nyaris tak ada perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di sana. Karena itu, meskipun bahasa Cina merupakan bahasa penting dan dipakai lebih dari satu miliar orang, namun daya tarik untuk mempelajarinya sangat minim di kalangan mahasiswa Korsel.

Sebaliknya, pada saat yang sama hubungan diplomasi dengan Indonesia berjalan kian membaik dan kepentingan kedua negara serta rakyatnya semakin meningkat pula. Perusahaan-perusahaan Korea semakin banyak beroperasi di Indonesia.

"Itu semua mendorong banyak mahasiswa berminat mempelajari bahasa Indonesia, termasuk saya," katanya.

Di antara para mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia itu ada yang mendaftarkan diri jadi relawan (*volunteer*) Korea di Indonesia. Mereka bekerja secara sukarela dan ditempatkan oleh instansi yang terkait di Indonesia. Beberapa di antaranya ditempatkan di desa-desa dan membimbing penduduk desa sesuai dengan program relawan yang dipilihnya.

Menurut Park Jiin Ryeo, para lulusan dari jurusan kajian bahasa Indonesia tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia, pada umumnya perusahaan-perusahaan itu tidak pernah mempersoalkan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia dan langsung saja menerimanya sebagai karyawan yang ditempatkan di Indonesia.

***

PARK Jin Ryeo tidak mau berhenti di tengah jalan. Jika teman-teman sejurusannya memilih bekerja di perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia, ia bertekad meneruskan studinya untuk memperdalam bahasa Indonesia di universitas di Indonesia. Gadis Korea kelahiran tahun 1964 itu memutuskan mengambil gelar *master* di Universitas Gajah Mada.

Ia merupakan orang Korea pertama yang mendapatkan gelar tersebut dari universitas di Indonesia dengan jurusan bahasa Indonesia. Hal ini dianggapnya sebagai suatu hal istimewa.

Mengapa? Di kalangan orang-orang Korea sendiri, ia diklasifikasikan sebagai orang Indonesia. Sebab, ia berbahasa Indonesia hampir sama fasihnya dengan berbahasa Korea sendiri. Selain itu, ia juga memahami seluk-beluk adat-istiadat dan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa.

Berbeda dengan rekan-rekan senegaranya, ia lebih banyak bergaul dengan orang-orang Indonesia. "Teman-teman saya di sini lebih banyak orang Indonesia. Mungkin karena saya tinggal di Yogyakarta, di mana jarang sekali orang Korea tinggal di sana," katanya.

Sedangkan orang-orang Korea di Jakarta pada umumnya berkumpul di restoran-restoran Korea untuk makan bersama, dan semacamnya. Mereka tampaknya eksklusif, sehingga acapkali menimbulkan salah pengertian tentang Korea dan orang Korea di kalangan masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, katanya, orang Indonesia acapkali memandang orang Korea itu hanya sebagai orang yang berdisiplin tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Orang Korea sepertinya kesetanan dalam bekerja. Tak mempedulikan keadaan sekitarnya, dan lain-lain.

"Semua itu tentu hanyalah salah satu sisi dari anggapan yang tidak berdasarkan pengetahuan yang akurat. Hanya dengar-dengar saja dari orang lain," katanya.

Kurangnya pemahaman mengenai Korea dan orang Korea dapat juga menimbulkan semacam *gap* antara orang Indonesia dan orang Korea yang bekerja di perusahaan yang sama. "Perlu ditingkatkan saling pengertian mengenai watak masing-masing untuk menjalin kerjasama lebih erat dan menguntungkan di masa depan," katanya.

Sebagai seorang ahli dan sekaligus pengamat mengenai Indonesia, ia melihat bahwa pada umumnya orang Indonesia memelihara nilai-nilai budayanya dengan baik dan secara lebih sadar. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai asing dalam era globalisasi.

"Orang Indonesia lebih baik daripada warga Korea dalam memelihara nilai-nilai budayanya," katanya.

***

NAMUN, pada satu sisi Park juga menyimpan semacam obsesi dalam dirinya. Setelah bekerja di *Center for Korean Studies* di Universitas Nasional, Jakarta, ia berangan-angan untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara dan bangsa itu menuju era baru di masa depan.

"Jika ada peluang, saya ingin menjadi *pioneer* dalam meningkatkan hubungan Indonesia dan Korea," katanya.

Untuk itu tentu saja diawali dengan terciptanya suatu peningkatan pemahaman di antara kedua bangsa. Yang pertama, orang Indonesia hendaknya lebih memahami masalah-masalah yang menyangkut Korea dan orang Korea. Dan kedua, orang Korea juga harus lebih banyak mengerti tentang Indonesia dan orang Indonesia.

Ia memandang satu-satunya Pusat Kajian Korea di Unas masih kurang berkembang sebagaimana yang diinginkan. "Banyak para siswa yang berminat mengenai masalah Korea kurang mendapatkan dukungan dari badan tersebut," katanya.

Sementara itu, pihak universitas juga tampaknya terlalu sibuk mengurusi masalah-masalah yang timbul akhir-akhir ini, sehingga mereka belum sepenuhnya dapat mencurahkan perhatian memajukan pusat kajian tersebut.

"Kami harus berkembang demi kepentingan masa depan bersama," katanya menekankan.

Salah satu terobosan meningkatkan apresiasi mengenai Korea dan orang Korea di Indonesia adalah melalui lomba penulisan dengan tema Korea untuk para siswa SLTA. Lomba yang sudah mulai berjalan itu mendapatkan minat yang cukup luas. Menurut Park, dari tulisan-tulisan yang masuk ke pihaknya tampak bahwa para siswa untuk sementara ini lebih banyak memiliki informasi yang sama. Mungkin mereka peroleh dari buku-buku pelajaran sejarah dunia.

"Hal ini nantinya akan menjadi bahan kajian kami untuk merumuskan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan apresiasi ten-

tang Korea," katanya.

Penyelenggaraan lomba karya tulis itu merupakan langkah awal untuk menjajaki sejauh mana minat dan perhatian para siswa. "Kami ingin lebih banyak informasi mengenai besarnya minat mereka tentang Korea. Kami merencanakan memberikan bea-siswa kepada para siswa yang memang berminat besar mengenai masalah tersebut," katanya.

Mengenai jumlah dan besarnya bea-siswa ia mengatakan akan mengusulkannya kepada pemerintah Korea berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ia mengharapkan anak-anak pelajar SLTA lebih banyak mengerti dan memahami Korea. "Pada saatnya nanti mungkin perlu dibentuk suatu forum Indonesia-Korea agar kedua pihak dapat saling berdiskusi dan tukar pikiran mengenai masalah-masalah kedua negara dan rakyatnya," katanya. (jp)

Pelita, 30 Mei 1995

BAHASA JAWA-KONGRES

Surabaya Tuan Rumah Kongres Bahasa Jawa II

Semarang, 21 Mei

Kongres Bahasa Jawa II menurut rencana akan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 24 - 30 Oktober 1996, yang dikaitkan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang sekaligus juga memperingati Bulan Bahasa, demikian penjelasan Ketua Seksi Makalah dan Persidangan Prof Sardanto pada *Pembaruan* di Semarang baru-baru ini.

Menurut Guru Besar Sastra pada Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, meskipun nampaknya saat ini kegiatan bahasa Jawa tidak nampak di permukaan, namun sebenarnya para ahli bahasa Jawa terus berkarya. Dan karya-karyanya itu, dipublikasikan atau tidak, banyak memberikan warna dalam perkembangan bahasa daerah di tanah air.

Ia menjelaskan, sampai saat ini masih ada usaha-usaha untuk menggunakan bahasa *ngoko* secara populer. Yaitu, penggunaan bahasa Jawa pasar, atau yang dipakai dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dalam tatanan bahasa yang lebih luas. Masalahnya, para ahli masih belum sependapat, mengingat dalam bahasa Jawa terlihat jelas adanya perbedaan istilah bagi yang mempergunakannya.

Dalam Konggres Bahasa Jawa I di Semarang Juli 1991, usaha membudayakan bahasa Jawa *ngoko* didorong oleh usulan delegasi dari Suriname. Di negara pulau bekas jajahan Belanda di Afrika selatan itu, memang terdapat ratusan ribu orang memakai bahasa Jawa *ngoko*. (104)——

Sinar Pagi, 21 Mei 1995

,BAHASA SANSKERTA-PEMAKAIAN

Prof Dr JS Badudu :

Penggunaan Bahasa Sanskerta Sebaiknya Mulai Dihindari

Bandung, Kompas

Penggunaan bahasa Sanskerta untuk kepentingan penamaan atau kepentingan lain, yang sampai sekarang ini masih terjadi di sejumlah gedung DPR, lembaga pemerintahan sipil dan militer, sebaiknya dihindari. Hanya bahasa Sanskerta, yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia saja, boleh tetap dipertahankan.

Hal itu dikemukakan oleh Prof Dr JS Badudu kepada *Kompas*, Sabtu (20/5) lalu di Bandung, berkaitan dengan penghapusan bahasa Inggris untuk kepentingan promosi, propaganda maupun kepentingan lain yang dinilai sangat mengganggu rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

Menurut JS Badudu, penggunaan bahasa Inggris untuk iklan, promosi, propaganda maupun kepentingan lain seperti penamaan untuk kawasan perumahan, sudah sepatutnya dihapuskan dari bumi Indonesia. "Pemakaian bahasa Inggris dalam periklanan, promosi, propaganda maupun penamaan kepentingan bisnis maupun komersial, seperti penamaan kawasan perumahan serta rumah makan, tidak saja mengganggu identitas kebangsaaan tapi juga berdampak kurang baik terhadap bangsa itu sendiri," demikian kata Badudu. "Secara psikologis, penamaan dengan menggunakan bahasa Inggris itu sangat mengganggu rasa nasionalisme bangsa," tandasnya.

Mengenai bahasa Sanskerta, yang banyak dipakai untuk penamaan pelbagai gedung dan tempat di lembaga pemerintahan maupun militer, JS Badudu menyarankan agar penggunaannya dihindari. Alasannya, zaman sekarang ini sebagian besar anak-anak Indonesia kurang bisa mengertinya. "Sebaiknya penggunaan bahasa Sanskerta dihindari, kecuali yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata dosa, swasta dan bumi," ujarnya.

Namun penggunaan bahasa Sanskerta, demikian JS Badudu, secara psikologis memang tidak terlampau mengganggu, karena masih berdekatan dengan bahasa Indonesia.

Tentang tulisan bahasa lain

JS Badudu mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya juga terjadi penghapusan penggunaan huruf-huruf Cina maupun Arab yang dipakai dalam urusan komersial maupun bisnis, atau kepentingan lainnya. Penggunaan huruf-huruf asing itu tidak saja sulit dimengerti tapi juga mengganggu.

"Sekarang ini tulisan-tulisan Inggris saja sudah sangat menonjol sehingga kita sendiri seolah-olah berada di negeri orang. Orang asing yang datang ke Indonesia juga merasakannya. Mereka mengatakan tidak bisa merasakan suasana Indonesia, karena banyak tempat menggunakan bahasa Inggris," ujarnya.

Sebagai pakar bahasa Indonesia, JS Badudu menambahkan, penggunaan bahasa asing, seperti Inggris, Arab maupun Cina memang harus diganti dengan bahasa Indonesia. "Kalau memang terpaksa harus menggunakan bahasa Inggris, maka penulisannya harus di Indonesiakan, misalnya, resort harus ditulis resor," ujarnya. **(tif)**

Kompas, 22 Mei 1995

Kebudayaan-Ulasan

Pemahaman Konsep Budaya

KECIL sekali pemahaman orang terhadap konsep budaya. Banyak keputusan politik yang tidak dihubungkan dengan konsep tersebut. Kemiskinan, misalnya, kerapkali dikaitkan dengan pengertian uang. Hal itu dikemukakan Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono di sela-sela Diskusi Sastra di Fakultas Sastra Universitas Pakuan (Unpak), Jumat (17/2).

"Pengentasan kemiskinan terhadap desa tertinggal bukanlah semata persoalan uang, tetapi dibutuhkan pemahaman budaya di dalamnya," ujar penyair yang karyanya diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa ini, dengan nada prihatin. Guru Besar Fakultas Sastra UI ini menilai, kemiskinan akan menyangkut konsep, pemikiran, maupun alasan lain yang berhubungan dengan latar belakang dan problematika masyarakat desa tersebut. Pemberian uang 20 juta terhadap desa tertinggal bisa jadi berakibat membingungkan meski maksudnya untuk pengentasan kemiskinan.

"Jumlah uang yang demikian banyak, misalnya, menjadi barang aneh bila tingkat pemilikan mereka terhadap uang minim dan tentunya menyangkut akan diapakannya uang tersebut." Tambah penyair ini, menggarisbawahi pentingnya aspek budaya dalam hubungannya dengan politik.

Pentingnya pakar budaya dimanfaatkan agar tidak terjadinya kesenjangan pemahaman. Konsep musik rap, misalnya, baik-tidaknya harus dihubungkan dengan ihwal seni, yaitu sudut budaya itu sendiri, maka kacamata pakar budaya yang menilai, bukan diukur berdasarkan pemahaman lain.

Sapardi menambahkan, urusan berbicara menyangkut aspek budaya juga. Meskipun ada muatan politik di dalamnya, berbicara yang terlalu keras (vokal) bisa dianggap tidak berbudaya, padahal bisa memiliki maksud yang sama dengan orang yang berbicara biasa-biasa saja.

SDM Sastra

Dengan nada mempertanyakan, penyair yang menggeluti sastra selagi remaja ini, mengajak pemahaman budaya lebih dikedepankan. Ia mengambil misal dengan pemecahan masalah hukum yang ditanyakan pada Fakultas Hukum, masalah kedokteran ke Fakultas Kedokteran, orang tidak memanfaatkan Fakultas Sastra guna memperoleh informasi dan persoalan kebudayaan. Sastra lebih dilihat sebagai muatan sastrawan, padahal sastrawan maupun seniman bukan sektor yang dihasilkan Fakultas Sastra, melainkan suatu bias.

Menurut pria kelahiran Solo ini, di dalam Fakultas Sastra terliput masalah-masalah bahasa (linguistik), sastra, sejarah, bahkan kebudayaan suatu wilayah maupun negara. Itu sebabnya penyair ini mengusulkan Fakultas Ilmu-ilmu Budaya sebagai pengganti Fakultas Sastra.

"Di dalam Fakultas Ilmu-ilmu Budaya akan tercakup agama, filsafat, perpustakaan, arkeologi, antropologi, bahkan ilmu hukum." Menurut penyair romantik ini, hukum berhubungan dengan ilmu penafsiran. Itu tampak pada berbedanya suatu penafsiran kalimat antara seorang hakim dengan hakim lainnya, menyebabkan berbedanya suatu putusan. Penafsiran sendiri berhubungan dengan ilmu budaya.

Sumber daya manusia (SDM) yang mendalami sastra, ketika berada di bawah Ilmu-ilmu Budaya, lebih menunjukkan nilai tambah mengingat tidak dilihat sebelah mata. Masyarakat tidak terjebak pada kesastraannya, melainkan ruang lingkup dan juga berguna dalam hubungannya dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ini dibandingkannya dengan contoh Amerika.

Suatu kasus ditunjukkan Sapardi, lulusan Departemen Bahasa Inggris, meskipun itu di Amerika, tampak fleksibel masuk dalam segala jenis pekerjaan. "Lulusannya memiliki kapasitas dan kualitas berupa penguasaan bahasa yang sangat sempurna, baik lisan maupun tulisan. Hampir tak ada kesalahan sedikit pun. Hingga lulusannya begitu laku, bahkan keinginan pada bahasa Inggris menunjukkan no.2 dalam hal jumlah peminat".

Sastra dan benda budaya

Penyair yang baru menerbitkan "Hujan Bulan Juni" ini menilai, sastra merupakan suatu aspek rekaman yang tertulis ratusan bahkan ribuan tahun yang bisa diamati dan diperhatikan. Sastra merekam nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sastra lama, misalnya, menyangkut nilai-nilai, baik dalam bentuk hikayat, pantun, bahkan dalam prasasti. Novel Charles Dickens, menurut Sapardi, menunjukkan ihwal kisah nyata berupa revolusi industri di Inggris.

Dalam hubungan benda dan ilmu pengetahuan, penyair genre baru baru ini menyatakan bahwa benda-benda dibagi dalam dua jenis, berupa benda budaya maupun alam. Perbedaan ini menunjukkan adanya ilmu-ilmu tertentu. Benda alam merupakan apa-apa yang belum disentuh manusia, sebaliknya benda budaya adalah apa-apa yang sudah disentuh.

"Batu bukanlah benda budaya, tetapi ketika menjadi patung, batu menjadi benda budaya. Bunyi yang berasal dari realitas alam adalah benda alam, tetapi bila berwujud nyanyian sudah menjadi benda budaya." Itu sebabnya, ilmu alam menyangkut objektivitas, sedangkan ilmu budaya menyangkut subjektivitas. "Memilih sesuatu maupun seseorang termasuk subjektivitas, tak ada penilaian yang benar-benar objektivitas," ujarnya, menutup pembicaraan. (Dadan Suwarna)

Pikiran Rakyat, 21 Mei 1995

Manifesto yang Terlupakan

SUATU kurun waktu di sebuah negeri yang keras, bangsa kami pernah meyakini adanya koreksi terhadap wacana politik yang ada. Awalnya, kami memandang, bahwa otoritas intelektual bisa disemaikan sepanjang kekuasaan politik tidak berdiri di depan untuk mengurusi segala tetek bengek kreativitas.

Tetapi, seperti laiknya kekuasaan yang tegak terlalu lama (Lord Acton: *power tend corrupt*), birokrasi dapat menjadi sebuah struktur keningratan baru (*fetish*).

Di sini, seperti dikatakan Biodun Jeyifo, kecenderungan perubahan semacam revolusi kaum intelektual kota, selalu mungkin mengubah tubuhnya menjadi semacam "wacana penguasa"/ *master discourse* terhadap pandangan-pandangan yang berbeda (*The Nature of Things*, 1990).

Karena satu dan lain hal, apa pun yang diyakini sebagai "perjuangan bersama" senantiasa memiliki keabsahan tersendiri untuk menjadi formula-formula menyeleweng dari semangat awalnya. Acuan norma, ideologi, atau praktek pemerintahan yang membingkai teori perubahan awal, mengalami involusinya sendiri-sendiri.

Sebab, watak kekuasaan lebih bersifat elitis serta memiliki batas interpretasi yang longgar. Di antaranya, akan terjadi pilihan-pilihan antagonisme kekuasaan. Dan pada gilirannya menentukan lahirnya generasi revolusi, yang disebut sebagai "tuan yang siap diperbudak tuan lainnya" — (*enslaved master*). Maka dari itu, tidak terlalu mengejutkan, bila kesepakatan *Manifesto Kebudayaan* yang terbit tiga puluh satu tahun yang lalu telah menciptakan deviasi narasi. Di satu sisi yang memegang kendali birokrasi kekuasaaan memilih caranya sendiri dalam mengendalikan roda kebudayaan. Sementara di sisi lain, kalangan intelektual yang ada di luar struktur kuasa, diperlakukan sebagai entitas penanda yang mengambang (*free floating signifier*).

Semangat menjaga moral sosial dan menjaga akal sehat, menjadikan kelompok penanda yang mengambang menjadi kekuatasn korektif. Artinya, bentuk-bentuk yang diperbuat menyerupai "interogasi" terhadap wacana kekuasaan dominan.

Dengan perkataan lain, kekuatan intelektual sebagai kekuatan nilai mengambang, senantiasa memperlakukan wacana kekuasaaan sebagai tanda budaya yang telah disimpulkan tuntas — oleh sebuah rezim politik tertentu.

Dengan demikian, apabila *Pernyataan Mei* 1995, dikatakan bukan sebagai sebuah pengulangan artefak *Manifesto Kebudayaan*, saya kira sangat relevan. *Pernyataan Mei* merupakan ruang cakrawala, karena kondisi-kondisi politis yang ada telah bergerak begitu subjektif. Artinya, bahwa statemen kebudayaan, berangkat dari suatu kenyataan Indonesia baru yang berkelainan narasi.

Menyangkut kesadaran tersebut, harapannya *Pernyataan Mei* mampu terus bergulir menjadi wacana intelektual. Karenanya, *Pernyataan Mei* tidak berhenti sebatas statemen politik. Lebih dari itu, dapat menjadi wacana yang memungkinkan lebih kritis dan dialogis.

***

UPAYA menghadirkan semangat kebudayaan sebagai pledoi intelektual, menurut pendapat saya sangat penting kita pertimbangkan keberadaannya. Mengingat selama ini, seperti juga nasib *Memorandum Indonesia* 1994, tidak diperlakukan sebagai sebuah wacana yang siap diperdebatkan.

Upaya-upaya pledoi kebudayaan itu, sadar atau tidak, telah berhenti sebagai instrumen politik. Dan bukan bergerak sebagai paradigma yang bersiap mendialogkan sesuatu.

Oleh karena itu, bersamaan dengan lahirnya *Pernyataan Mei 1995*, saya kira sudah saatnya kita mempunyai keberanian diri untuk mempercakapkan tema yang terkandung dalam statemen tersebut.

Kesediaan untuk berdialog, melakukan eksplanasi terhadap gagasan dan keberanian diri menampilkan cara pandang yang penuh keberbedaan, kemungkinan besar bisa menjadi "bola salju" perdebatan intelektual publik. Karena itu pula, saya sangat sependapat dengan upaya Emha Ainun Nadjib dalam kolomnya berjudul "Kita Semua adalah Panglima" (*Media*, 14/05/1995) —yang secara bersemangat mencoba "menjelaskan" latar belakang lahirnya *Pernyataan Mei* 1995.

Persoalannya, benarkah upaya utopis yang menyatakan "kita semua adalah panglima" itu, memang, dapat dibuktikan keberadaannya? Jika tidak, sangat boleh jadi apa yang telah di-kabarkan Emha menyerupai sebuah *de javu* intelektual.

Hegemoni wacana yang dipaparkan melalui berbagai rubrikasi publik, sudah semestinya bisa membuka ruang-ruang persoalan baru. Selebihnya, bagaimana landasan pemikiran itu tidak terbatas bergerak pada level intelektual.

Artinya, bagaimana landasan pemikiran mampu mengilhami prosesi kebudayaan? Alasannya, bahwa kandungan nilai dari *Pernyataan Mei* 1995, menurut pendapat saya sangat relevan dengan kondisi objektif masyarakat kita saat ini. Misalnya, bagaimana nasib ma-

syarakat kita di tengah-tengah arus kebebasan informasi, justru mengalami halangan transformasi? Bahkan, ketika kita sering menyaksikan arus gelombang demokratisasi, di saat itu pula nilai-nilai kebudayaan yang berlangsung bergerak sebaliknya.

Semua itu, sudah pasti sangat kita butuhkan, terutama guna menjajaki lebih jauh; bagaimana nasib kita sebagai bangsa yang berkebudayaan dinamis? Karena menurut pendapat penulis, hanya melalui kesadaran berkebudayaan dinamik, kita dapat lebih banyak memberi arti terhadap makna dan hakekat jargon mengisi kemerdekaan".

Semangat yang termaktub dalam *Pernyataan Mei 1995*, tentu, laik kita pandang sebagai sumbangan pemikiran dinamik dalam bidang kebudayaan. Karena itu, tidak sepantasnya bila kekuatan-kekuatan tertentu menganggap tindakan kultural tersebut sebagai "penyakit negara".

Yang harus kita perdebatkan kemudian, apakah kandungan makna yang tersirat dan tersurat dalam *Pernyataan Mei 1995* bisa kita perdebatkan lebih jauh? Pasalnya, bukan karena kekuatan yang setuju *Pernyataan Mei 1995* tidak bersiap berdialog.

Karenanya, semangat berdialog, bukan tidak mungkin gagal menembus batas-batas publik yang terkonsentrasi media massa. Maka, jangan heran, banyak pemikiran kritis di negeri ini, kian hari kian menjadi tumpukan data di *file* komputer.

Mungkinkah kesadaran kritis dapat berjalan semestinya? Oleh sebab itu, konteks politik yang pernah terjadi, patut kita renungkan kembali. Kita beri jarak untuk bisa memberi koreksi.

Nor Pud Binarto T,
pemerhati masalah sosial-politik dan kebudayaan, tinggal di Jakarta

Media Indonesia, 28 Mei 1995

Bisakah Kebudayaan Dipisahkan dari Politik?

MEDIA Indonesia Minggu (14/5) memuat wawancara dengan HB Jassin. Wawancara itu cukup menarik, karena sudah lama kita tidak mendengar/membaca tulisan atau wawancara dengan Jassin. Bila sekarang Jassin berbicara, sudah pasti akan diperhatikan orang. Kenapa? Jassin adalah seorang empu dalam dunia kesusastraan Indonesia, khususnya dalam kritik. Bahwa Jassin jarang bicara, mungkin orang bisa memahaminya, karena tampaknya Jassin, "terpaksa" menyerah kepada desakan usia yang kian lanjut. Atau mungkin ada sebab lain? Kalau dugaan ini benar, harap Jassin memaafkannya. Tetapi kalau kita baca wawancara itu, dugaan itu terbantah sudah. Jassin belum "selesai" karena didera umur. Jassin masih tegas, pikiran dan pendapatnya masih segar.

Kita memahami mengapa *Media* mewawancarai Jassin. Suatu dugaan muncul dalam pikiran kita, wawancara itu dilakukan selain untuk memancing supaya Jassin mau berbicara, juga barangkali karena bertepatan dengan peringatan 31 tahun dilarangnya *Manifes Kebudayaan* oleh Presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964. Bertepatan dengan peringatan itu pula, oleh sejumlah sastrawan dan budayawan, di antaranya Jassin sendiri, dicetuskan *Pernyataan Mei*. Kenapa momentum peringatan itu dipakai untuk mencetuskan pernyataan tersebut, mungkin ada pendapat bahwa situasi 31 tahun yang lalu tatkala *Manifes Kebudayaan* dicetuskan kemudian dilarang, tampaknya terulang pula pada saat ini.

Ini dapat diketahui, bila kita membaca pernyataan-pernyataan para penandatangan dan pencetus *Pernyataan Mei* di surat-surat kabar. Ada semacam kerisauan, bahwa bangsa Indonesia memasuki suatu masa kehilangan toleransi untuk berbeda pendapat. Selain itu masalah politik telah disinggung pula. Malah ada yang mengkonstatir,

bahwa masalah politik sudah tidak beda dengan 31 tahun yang lalu. Benar tidaknya penilaian itu kita kembalikan saja pada para pengamat dan pencetus *Pernyataan Mei* tersebut.

Dalam hubungan ini, ada nasihat Jassin yang coba kita tangkap dari wawancara tersebut. Terutama mengenai pencekalan kegiatan kebudayaan, dan masalahmasalah lain, yang berhubungan dengan kekuasaan. Nasihat itu antara lain dikatakan, siapa pun hendaknya memahami bahwa pada kurun tertentu selalu akan terjadi pencekalan dan larangan terhadap sastra atau hasil kerja kreatif lain, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan waktu itu. Menghadapi kasus seperti ini, bagi mereka yang merasa daya kreatifnya dibatasi, tentu akan mengambil sikap. Misalnya seperti *Manifes Kebudayaan* 31 tahun yang lalu itu. *Manisfes Kebudayaan* merupakan sebuah pernyataan sikap terhadap kekuasaan waktu itu.

Apakah pernyataan itu dinilai sebagai sikap politik atau bukan, artinya murni sikap budaya semata, hal ini telah menimbulkan pendapat yang saling bertolak belakang. Pihak pertama mengatakan, pencetusan *Manifes Kebudayaan* merupakan sebuah sikap politik sedang pihak yang lain mengatakan, merupakan sikap budaya semata. Kemudian yang menimbulkan pertanyaan —baik di kalangan awam maupun para peminat— apakah *Pernyataan Mei* merupakan pernyataaan sikap terhadap situasi sekarang. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin bernada politik atau bernada kerisauan belaka. Dengan penekanan, jangan hendaknya situasi 31 tahun yang lalu itu berulanag kembali. Tegasnya dalam kasus ini sejarah tidak boleh berulang.

Dalam hubungan ini ada sesuatu yang menarik, yang patut diperhatikan dari pernyataan Jassin dalam wawancara tersebut. Katanya, kalau aspirasi seseorang disimpan terus, sekali waktu akan meletus juga. Dengan adanya larangan-larangan, kelak pasti akan terjadi ledakan. Siapa pun akan memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Suatu tekanan yang ber-lebihan terhadap suatu unsur akan mendorong unsur itu mencari jalan keluar dari tekanan tersebut. Ibarat kapundan gunung api yang tersumbat, tentu sekali waktu akan mencari penglepasan yang berupa ledakan.

Pernyataan itu kita yakin dikeluarkan oleh Jassin secara jujur. Kita tidak melihat motif apa pun di dalamnya, politik, misalnya. Dan mustahil dicetuskan kalau tidak berdasarkan kenyataan. Jassin melihat kurun terakhir, kita selalu hirukpikuk dengan larangan dan pencekalan terhadap kegiatan kebudayaan. Alasan yang selalu dikemukakan kadang-kadang terlalu banyak didasarkan kekhawatiran semata. Menganggu stabilitas nasional atau mengganggu kelancaran dan kelangsungan pembangu-nan. Alasan ini seakan sudah menjadi klasik, yang tidak jarang membing-ungkan awam. Dan ini paling dikhawatir-kan oleh para pemikir kebudayaan. Larangan itu dinilai sebagai pelumpuhan daya kreativitas mereka. Dan bila hal itu benar-benar telah menjadi patok mati yang sukar ditembus, dikhawatirkan bangsa Indonesia sampai kapan pun tidak akan memiliki karya-karya besar di bidang kebudayaan.

Seperti disinyalir, sastra dan budaya Indonesia tetap berjalan di tempat, tidak maju-maju. Para pengarang Indonesia tidak akan bisa berbuat banyak, karena pikirannya selalu dikontrol atau dihadang oleh ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Menyedihkan memang, namun apa mau dikata. Pembangunan ekonomi hendaknya tidak boleh diganggu oleh kegiatan yang tidak bersifat ekonomis. Pendapat atau argumentasi seperti itu, mungkin saja akan memunculkan reaksi, dengan mengatakan bahwa apa yang dikemukakan itu sama sekali tidak benar. Kebebasan mencipta di Indonesia tetap ada. Itu di satu pihak. Di pihak lain, mungkin ada yang tidak peduli dengan larangan atau ketentuan-ketentuan yang menghambat. Dia mencipta terus, apakah hasil ciptaan itu, sastra dan sebagainya, dapat dipublikasikan atau tidak, itu merupakan masalah kemudian.

Kita tidak mengesampingkan kedua sikap itu. Malah sikap terakhir patut diberi acungan jempol. Sebelum menutup catatan pendek ini, saya ingin mengutip pada bagian akhir wawancaranya. Dan itu saya kira, merupakan gambaran dari pribadi Jassin yang sebenarnya. "Keinginan saya janganlah kita mencampuradukkan politik dengan kebudayaan. Marilah kita berkarya sebagai panggilan hati nurani kita. Apalagi disinari dengan firman-firman Allah dalam pribadi kita."

Alangkah sejuk rasanya ajakan itu. Kebudayaan adalah kebudayaan, politik ada-lah politik. Tidak ada saling curiga-mencurigai antara keduanya. Keduanya berjalan seiring, saling isi-mengisi, dalam kebangunan Indonesia yang besar. Tidak satu pun ingin menguasai yang lain. Bila saja hal itu terwujud, betapa indahnya kehidupan kita, ya kehidupan Indonesia. Tetapi, serentak dengan itu muncul pula suatu pertanyaan, apakah mungkin? Kita hidup dalam suatu kekua-saaan politik dari pemerintah sebuah negara. Dan senang atau tidak, kebudayaan atau apa pun namanya, harus tunduk kepadanya.

AD Donggo, *sastrawan tinggal di Jakarta*

Media Indonesia, 28 Mei 1995

Emha Ainun Najib

Mereka tetap Punya Naluri untuk Tidak termakan



Banyak orang khawatir dengan membanjirnya budaya global. Peristiwa mutakhir seperti kasus La Toya Jackson, progresifnya MTV merambah Asia, maraknya film Barat di televisi, pertunjukan Phil Collins dan Bon Jovi yang menyedot perhatian dan uang, juga isu Rap beberapa waktu lalu mencuatkan kekhawatiran-kekhawatiran itu.

Berikut ini wawancara tertulis dengan penyair dan budayawan Emha Ainun Najib:

Menurut Anda, apa sebetulnya yang tengah berlangsung di kepala orang-orang yang begitu khawatir terhadap budaya global itu? Dan juga orang yang anteng (diam) dan memuja budaya global?

Kecemasan budaya itu sangat bisa dipahami. Manusia dan masyarakat — khususnya di negara yang secara formal sangat mementingkan agama seperti di Indonesia ini— lahir dengan tiga dimensi kesadaran yang bercampur: kesadaran natural, kesadaran kultural dan kesadaran religius. Jadi kecemasan itu sesungguhnya juga bermuara pada moralitas agama, di samping merupakan kegelisahan alamiah (eksistensi dan harga diri) serta kepanikan budaya.

Manusia dan masyarakat merasa sebagai 'diri' dan memiliki 'diri' itu, 'diri' yang terdiri atas tiga dimensi. Kalau ada sesuatu yang dirasakan mengancam, wajar muncul kekhawatiran. Permasalahannya adalah, seberapa kadar kekhawatiran yang layak kita tumpahkan terhadap kekhawatiran itu.

Dari perspektif ini, barangkali apa yang terjadi pada para "para pemuja budaya global" bisa kita asumsikan bahwa pada segmen masyarakat tertentu: harga diri alamiah, identitas kultur dan nilai-nilai moral tidak lagi merupakan fokus tindakan atau perilaku mereka. Bukannya mereka tidak bermoral atau tidak merasa butuh identitas budaya, tetapi hal-hal itu tidak primer pada kehidupan mereka.

Bagaimana Anda melihat fenomena budaya global itu? Apakah fenomena tersebut berarti juga sebuah fenomena dominasi di berbagai wilayah?

Dalam surat An-Nur 35 terdapat acuan tentang "la syarqiyah wa la ghorbiyah", serta "yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu naar", kemudian "nur 'ala nur".

Globalisasi adalah berlubang-lubang dan terpecahnya sekat-sekat (pakai juga idiom Quran mengenai "alhujurat", bilik-bilik, sekat-sekat). Bejana-bejana kebudayaan diterobos menjadi saling berhubungan yang untuk pada jangka waktu tertentu akan memproduk peradaban global. Persoalannya adalah bahwa ada cairan yang volume dan arusnya lebih besar dibanding cairan lain, sehingga semuanya dicampur, warna dan sifat yang terjadi pada semua bejana didominir oleh yang kuat dan besar itu.

Orang di Tulungagung tahu persis rumah-tangganya Richard Geere atau Lady Di serta alam budaya Brazil Mexico dll., melalui telenovela. Tapi apakah ketopraknya Pak Siswondo (Ketoprak Siswo Budoyo —red) ditonton di teve LA dan Finlandia? Ada lalulintas modal dan politik kebudayaan yang menentukan 'tidak adil'nya distribusi budaya semacam itu.

Sekarang kita bertanya: apakah itu mencemaskan? Sesungguhnya globalisasi adalah sebuah wujud dunia yang "la syarqiyah wa la ghorbiyah", tidak timur tidak barat. Melalui rekayasa atau tidak, melalui pertarungan politik, ekonomi dan militer atau tidak, dunia akan menjadi bersifat global. Melalui universalisme industri dan informatika atau tidak, dunia akan menjadi 'satu'. "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu naar": pelita itu menyala (oleh minyak dari pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur tidak di barat) meskipun seakan-akan tidak dinyalakan.

Menurut saya kita tidak perlu terlalu mencemaskan "jalan globalisasi" yang sekarang sedang berlangsung, sepanjang kita bersedia memahami dialektika kemakhlukan manusia. Hakekat hidup manusia memiliki kegilaannya sendiri, keterseretannya sendiri, tapi juga kejenuhan dan kejernihannya sendiri.

Selalu ada gelombang, ada pasang surut, ada lembah ada bukit. Yang dituntut pada makhluk manusia sesungguhnya sangat sederhana: transendensi. Etos kekhalifahan, personal maupun sosial. Ia mengatasi apa saja sepanjang bersifat alam. Kehancuran tidak selalu menghancurkannya, melainkan — dengan dialektika — bisa melahirkannya kembali, melungsungi dan membangkitkannya.

Kenapa kecemasan itu terjadi? Apa sesungguhnya yang dipersoalkan: dampak ekonomi, budaya atau agama?

Kalau hitungan kita adalah petak-petak budaya, kecemasan kita bisa membuat putus asa. Tapi kalau hitungan kita adalah peradaban dan kosmos, Tuhan sudah janji "wa la yauduhu hifdhuhuma" — tak ada yang bisa mengganggu gugat penjagaanNya atas keseimbangan ciptaanNya.

Memang kita perlu menggelisahkan kok masyarakat Indonesia menjadi "telenovela society", kok anak-anak lebih kenal Satria Baja Hitam dibanding Gatotkaca. Tapi takaran kegelisahan itu hanya sepetak dan sama sekali tidak perlu didramatisir atau diromantisir. Biarkan saya suatu hari jalan-jalan di Pondok Indah Mall dengan pakaian Gatotkaca campur Satria Baja Hitam, asalkan saya berbuat baik kepada siapa saja yang saya jumpai.

Apakah kekhawatiran tersebut menunjukkan ketertutupan kita terhadap budaya luar, semacam semangat antiketerbukaan?

Setiap manusia memiliki bakat dan keperluan untuk terbuka dan liberal pada soal-soal tertentu, namun tertutup dan konservatif pada hal-hal yang lain. Kalau berposisi sebagai suami, seseorang perlu bersifat konservatif sebagai laki-laki. Tetapi sebagai manusia, sebagai makhluk berpikir, sebagai makhluk sosial, ia perlu liberalisasi terbatas. Jangan bawa diri Anda dan istri Anda ke dalam suatu jenis demokrasi di mana ia berhak melakukan apa saja sebagai lelaki dan wanita. Konservatif sajalah. Keterbukaan ada tempatnya sendiri, sebagaimana ketertutupan ada proporsinya sendiri.

Bukankah dulu Sutan Takdir Alisjahbana (STA) pernah menyerukan agar kita belajar pada budaya Barat dan kemudian ditentang habis-habisan oleh mereka yang menganggap kita tak perlu meniru Barat. Apakah kecemasan orang belakangan ini dapat diidentikkan dengan sikap tradisionalisme semacam itu? Kalau berbeda, di mana bedanya?

Takdir (STA) memang manusia *gumunan*, juga lawan-lawannya dalam pemikiran. Gampang terpukau dan takjub. Yang satu mati-matian ke Barat, lainnya mati-matian mandeg dan menutup diri. Ya belajarlah ke barat, ke timur, utara selatan, atas, bawah, samping dan mana saja — sepanjang kita muarakan untuk kepentingan moralitas universal dan maksimalisasi potensi kemanusiaan. Hidup ini bersahaja: ada Tuhan yang mengepung dan mendekap ruang waktu kita, ada diri kita dan alam semesta. Soal-soal negara, budaya lokal, kecenderungan kedaerahan, etnik dll. itu soal managemen dan administrasi.

Bagaimana sebenarnya persoalan resistensi budaya kita. Kecemasan-kecemasan itu sepertinya menunjukkan bahwa budaya kita tampak inferior dan tak resisten, apa demikian? Juga seolah-olah kebudayaan lain menjadi tersangka?

Saya percaya pada resistensi budaya masyarakat. Sebagian keluarga dan tetangga saya adalah penonton setia telenovela, tapi mereka punya naluri untuk tidak termakan oleh apa yang kita cemaskan. Mereka tidak lantas berkelakuan buruk, tidak lantas tidak salat dan lain sebagainya. Telenovela bisa

berlalu begitu saja.

Dulu ketika menulis buku Indonesia: Bagian Penting dari Desa Saya, saya sangat romantik mencemaskan lunturnya budaya lokal oleh arus budaya televisi. Tapi beberapa tahun kemudian saya tidak menyaksikan apa yang saya cemaskan. Mereka bercanda-canda saja tentang segala sesuatu yang kita —kelas menengah— sangat terpukau dan panik. Memang ada yang bikin gubug mereka berlampu kerlip-kerlip seperti gedung perjudian di Reno Las Vegas, tapi nothing is wrong with that, ia tetap manusia yang baik, dan tetangga-tetangganya tahu bagaimana menertawakannya.

Tetapi seandainya resistensi budaya ini ambrol juga, saya menganjurkan agar tak usah terlalu cemas juga. Sebab ada resistensi akhir yang bersifat uluhiyah. Tuhan mengasihi hamba-hambaNya. Kalau masyarakat kita 'ditindas' oleh budaya global 'para terdakwa', Tuhan insya Allah tidak lantas menghukum kaum tertindas dan ''menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik''.

BAKHTIAR PHADA/REP



Bahkan ''nur 'ala nur'', cahaya-Nya, petunjukNya, hidayahNya, secara tak terduga muncul bisa tidak dari wilayah perlawanan atau counter culture, melainkan dari dalam tubuh ''para penindas'' itu sendiri. ''Min haiutsu la yahtasibu'': dari sesuatu yang mereka tak sangka-sangka. Lihatlah bagaimana ''yahdillahu man yasya'', bagaimana Allah menaburkan cahayanya semauNya, dan itu bisa jadi (dan sudah semakin nampak) justru berlangsung dari lubuk hati peradaban kaum penindas sendiri.

Budaya global itu terutama membanjir lewat TV, musik, film, laser disc dan komputer. Bagaimana Anda melihat gagasan-gagasan yang dibawa media tersebut? Apa gagasan yang mereka bawa (terutama televisi)? Dan mana yang perlu dipersoalkan?

Teve, budaya panggung musik, film, laser dan lain sebagainya menyeret massanya ke budaya superfisial dan artifisial. Budaya kedangkalan dan ''yang tidak-tidak''. Apakah Anda pikir semua manusia akan kenyang karenanya dan tertidur? Tidak. Setiap orang ''punya Tuhan'', artinya ada yang namanya naluri, nurani dan jiwa dalam yang memiliki kemandirian alamiah. Dari lubuk itulah pemberontakan peradaban muncul. Tuhan menciptakan kebodohan, tapi juga kepiawaian. Tuhan menciptakan keterlenaan, tapi juga kewaspadaan. Jadi kalau kebodohan dan keterlenaan memuncak, jangan pikir kepiawaian dan kewaspadaan menjadi puas.

Teve, budaya panggung musik, film, laser dan lain sebagainya menyeret massanya ke budaya superfisial dan artifisial. Budaya kedangkalan dan "yang tidak-tidak". Apakah Anda pikir semua manusia akan kenyang karenanya dan tertidur? Tidak. Setiap orang "punya Tuhan", artinya ada yang namanya naluri, nurani dan jiwa dalam yang memiliki kemandirian alamiah. Dari lubuk itulah pemberontakan peradaban muncul.

Oleh karena itu daripada Anda meributkan siaran teve tanpa Anda merencanakan bikin teve sendiri, mending didik anak-anak untuk menjadi insan, kemudian 'abdullah, kemudian khalifatullah dan terus ke derajat atasnya lagi — dengan perspektif dan terminologinya masing-masing.

Bagaimana proses dialektika bisa berlangsung dalam kebudayaan global itu, agar kita tak menjadi konsumen pasif?

Siapkan SDM rakyat dan umat untuk mampu bertarung dalam peperangan budaya, modal, politik dan peradaban. Bikin ICMITeve, TVNU, M(uhammadiyah)Teve dan lain sebagainya. Tapi juga percayalah bahwa tidak sedikit saudara-saudara kita di RCTI, SCTV, TPI, ANTeve, dan Indosiar yang berpikiran sama dengan kegelisahan Anda dan terus mencoba berjuang untuk itu.

Republika, 29 Mei 1995

Dialog dan Potret Kebudayaan Kita

Oleh Eros Djarot

MERAYAKAN ulang tahun yang ke-17, seorang anak ditanya oleh bapaknya, "Mau hadiah apa buat ulang tahunmu, Nak?"

Setelah berpikir sejenak, sang anak menjawab, "Kali ini, saya minta hadiah dialog saja."

Mendengar jawaban anaknya, sang bapak agak terperanjat. "*Lho*, kok dialog. *Mbok* ya sepatu, baju, atau apalah."

"Baju, sepatu, dan yang lainnya sudah banyak, Pak. Yang saya belum punya dialog."

Keteguhan sikap anaknya dalam mengajukan permintaan, membuat si bapak menjadi bingung. "Dasar kamu ini. Minta *kok* yang aneh-aneh."

Melihat ayahnya kebingungan si anak hanya dapat memandang wajah bapak dengan terkesima. Ia tak habis pikir, mengapa permintaan yang baginya begitu sederhana telah membuat bapaknya tergagap-gagap.

Sementara, sang bapak memandangi wajah anaknya dengan penuh tanda tanya, "Dialog? Di mana saya harus membelinya?"

***

ILUSTRASI di atas adalah gambaran dari sebuah peristiwa kebudayaan yang akhir-akhir ini sering kita dapati dalam kehidupan masyarakat kita. Sang anak yang merupakan simbol dari produk perkembangan zaman, dan sang bapak yang mewakili sosok budaya dari kemandekan zaman, masing-masing berdiri di atas dua kutub nilai yang saling berbeda. Sulit bagi sang bapak memahami bahasa sang anak, sementara sang anak terlalu hafal dan jenuh dengan bahasa-bahasa sang bapak yang berputar di tempat baku, dan membosankan.

Struktur pemahaman terhadap berbagai permasalahan pun berangkat dari bingkai pengalaman dan pandangan yang berbeda. Di antara mereka berdua terbentang jarak waktu, jarak pemikiran, dan jarak budaya. Padahal secara fisik keduanya tinggal di satu atap rumah. Mereka saling berpapasan, tapi tak pernah bertemu. Mereka saling merangkul, tapi tak pernah menjamah. Mereka saling berkata, tapi tak bicara apa-apa. Sementara rumah yang menjadi saksi, selalu dimuliakan sebagai legitimasi formal dari status mereka berdua sebagai sebuah keluarga.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Benarkah sang bapak menginginkan terjadinya hal ini, atau sebaliknya sang anakkah yang merekayasa sehingga keadaan yang demikian ini tercipta?

Logika sehat kita mengatakan, tak mungkin keduanya menginginkan terjadinya hal tersebut. Tak mungkin seorang bapak membiarkan diri anaknya berada dalam keterasingan dari jangkauan kebudayaan dirinya sebagai orangtua. Sementara sang anak tak mungkin pula membiarkan bapaknya sendiri terpenjara dalam kebekuan yang tak terjangkau oleh perasaannya sebagai anak.

Kalau toh di antara mereka terdapat mata rantai yang hilang dalam melakukan komunikasi dua arah, sebaiknya kedua belah pihak, baik sang bapak maupun sang anak, duduk di satu meja dan melakukan dialog terbuka dari hati ke hati. Hanya dengan cara ini kedua belah pihak akan dapat menelusuri jejak demi jejak hilangnya mata rantai yang telah membuat hubungan komunikasi mereka terputus.

Tanpa mau duduk bersama dan melakukan dialog, sulit dibayangkan bagaimana cara menemukannya kembali sesuatu yang selama ini hilang. Bahkan malah bisa terjadi, kedua belah pihak saling curiga dan saling tuduh, mencari kambing hitam atas hilangnya mata rantai yang sebenarnya berada tak jauh dari mereka, dalam keadaan tercecer karena menguatnya sikap *ignoran*.

Juga bila dialog tidak segera dilakukan, bisa jadi kedua belah pihak akan mengalami kondisi gagap bahasa dan kehilangan kata dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Dari sebuah kondisi yang gagap, sering lahir sesuatu yang membuat perasaan menjadi gamang dan tak pasti. Sementara suasana kehilangan kata-kata sering mengantar lahirnya keterasingan bagi keduanya. Sehingga ketika komunikasi harus dilakukan, yang tercipta seringkali hanyalah kesalahpahaman. Dan celakanya, pada saat kesalahpahaman itu terjadi, sang bapak seringkali menyelesaikan seluruh kesalahpahaman dengan menggunakan haknya sebagai orang tua (senior) yang memiliki legalitas budaya untuk memutuskan kata *benar* dan *salah*.

Terlebih lagi dalam struktur kehidupan keluarga di masyarakat Jawa. Bapak selalu benar dan bapak adalah segalanya. Sementara posisi sang anak dilekatkan pada predikat yang bandel, yang kurang ajar, yang harus dituntun dan diarahkan.

yang harus ini, yang harus itu, dan yang harus selalu siap untuk dipersalahkan.

Sebenarnya, budaya yang seperti ini bukan melulu monopolinya komunitas orang Jawa. Dalam pelataran kehidupan yang lebih luas, feodalisme pun telah mengajarkan pada kehidupan, suatu tata nilai yang menempatkan *Lordship* (kaum ningrat — majikan) sebagai agen tunggal kebenaran. Sehingga melakukan koreksi terhadap atasan dianggap sebagai dosa kebudayaan.

Dalam melakukan kerja pembangunan di berbagai bidang, pola mobilisasi (rakyat) menjadi satu-satunya pilihan. Sementara upaya menawarkan dan menumbuhkan pola partisipasi (rakyat) dianggap sebagai ancaman kebudayaan.

Dalam situasi seperti ini, cepat atau lambat, rakyat pasti akan kehilangan daya gerak, kreasi, dan inovasi yang berlanjut pada hilangnya kepercayaan diri, dan berakhir dengan lenyapnya harga diri sebagai manusia.

Dengan sendirinya sulit diharapkan bahwa dari masyarakat yang seperti ini, akan tumbuh etos dan semangat kerja yang melahirkan manusia-manusia yang memiliki nilai produktivitas tinggi. Sebagai akibatnya, kondisi rakyat yang melemah akan menciptakan hasil akhir: sebuah negara yang kaya akan segala kelemahan.

* * *

BERSYUKURLAH hal ini sepenuhnya belum terjadi dalam kehidupan kita. Kalau toh mulai terasa, ia baru sampai pada tahapan sebuah gejala.

Sebelum seluruh yang kita khawatirkan benar-benar terjadi, permintaan hadiah ulang tahun sang anak pada bapaknya (*dialog*), sudah mendesak untuk segera kita upayakan bersama. Agar kehidupan dalam rumah mereka tidak berjalan di atas keseolah-olahan yang penuh dengan polesan *make up* penutup wajah aslinya. Tanpa hadirnya dialog setiap ruang dalam rumah akan dipenuhi dengan hawa dendam yang berkepanjangan. Karena sang bapak selalu merasa kesal, sementara sang anak membalas kekesalan dengan menjadikan dirinya sebagai manusia pemberang.

Cerita tentang rumah mereka ini adalah kesaksian dari sekian juta rumah yang berderet di sepanjang kota-kota besar negeri ini.

"Berikan kami ruang untuk dialog. Demi cinta dan demi kehangatan rumah kami!"

Tuntutan ini adalah jeritan yang sering terdengar dari setiap jendela 'rumah bangsa' kita. Dan siapa pun yang mendengarnya, pasti akan tergugah merindukan suasana duduk bersama, berdialog, saling memberi dan saling menghangatkan, tanpa rasa curiga dan buruk sangka.

Rasa-rasanya, saat untuk menggelar sebuah *Dialog Nasional* telah sampai pada tingkat — menjadi kebutuhan kolektif. Paling tidak, terdorong oleh harapan agar lewat *Dialog Nasional* ini, proses rekonsiliasi yang bertujuan menggalang potensi-potensi bangsa untuk melakukan kerja menjabarkan arah kebudayaan sebagaimana diamanatkan cita-cita kemerdekaan, dapat segera terselenggara.

Begitu sulitkah berdialog?

Pertanyaan ini lahir dari keluguan dan ketulusan seorang Anak kepada Bapaknya.

* *Eros Djarot, sutradara.*

Kompas, 29 Mei 1995

Kesusastraan Indonesia-Ulasan

Sastra Berpotensi Lahirkan Revolusi Sosial

Medan, Pelita

Karya sastra berpotensi memicu lahirnya revolusi sosial, seperti dapat dilihat dalam karya novelis Harriet Beecher Stowe, "Uncle Tom's Cabin" yang dinilai Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln, sebagai turut mempengaruhi terjadinya perang saudara di Amerika.

Dosen sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (FS-USU) Drs Razali Kasim, MA — sebagaimana dilaporkan *Antara* mengatakan di Medan, Rabu (3/5), novel tersebut merupakan salah satu contoh klasik yang membuktikan adanya pengaruh sastra dalam masyarakat.

Berbicara di depan peserta Munas-I Mahasiswa Sastra Inggris se-Indonesia yang berlangsung di FS-USU, 1-8 Mei 1995 itu, ia mengatakan bahwa apa yang diutarakan Stowe dalam novel tersebut tidak lain dari gambaran sosial masyarakat AS saat itu.

"Perlakuan tidak manusiawi terhadap Uncle Tom, yang tidak lain merupakan refleksi atas tindakan diskriminatif masyarakat kulit putih di Selatan terhadap budak kulit hitam, sangat mempengaruhi cara berfikir masyarakat Utara yang mayoritas kulit hitam saat itu," katanya.

Menurut Razali, kehadiran setiap karya sastra tidak terlepas dari konteks waktu dan masyarakat ketika karya itu ditulis, dan karya itu berperan dalam membentuk watak dan pikiran masyarakat pembacanya.

Sebagai contoh, karya-karya Ernest Hemingway, seperti "The Old Man and The Sea" (Lelaki Tua dan Laut) diakui masyarakat Amerika sebagai yang telah mempengaruhi pandangan mereka mengenai makna kejantanan dan bagaimana bersikap jantan.

"Novel-novel Hemingway itu juga mempengaruhi cara pandang mereka yang belum pernah mendengar tentang dirinya," katanya mengutip sebuah tulisan dalam majalah "Titian" yang diterbitkan Pusat Penerangan AS (USIS) Jakarta edisi tahun 1976.

Pernah dilarang

Berkaitan dengan peran sastra dalam masyarakat tersebut agaknya sejumlah karya sastra pernah dilarang penerbitan atau pertunjukannya oleh penguasa, sebagaimana yang juga pernah terjadi di Eropa, khususnya Inggris dan Rusia.

Razali menyebut tiga dari banyak novel yang pernah dilarang di kedua negara Eropa itu, masing-masing karya George Bernard Shaw "Mr Warren's Profession", karya Leo Tolstoy "The Kreutzer Sonata", dan karya D.H. Lawrence "Lady Chatterley's Lover".

Pakar kesusastraan bandingan lulusan Universitas Ohio AS itu menambahkan, peran sastra dalam masyarakat tidak selalu menghasilkan reformasi sosial, namun, paling tidak, dapat memperluas cakrawala berfikir mereka tentang kehidupan manusia.

Seusai mengikuti ceramah sastra dari Drs Razali Kasim, MA, para peserta Munas-I Himsii yang terdiri atas mahasiswa sastra Inggris dari USU, Unand, UI, Unas, Undip, UNS, UGM, Unhas, Universitas Santa Thomas, dan UISU mengunjungi kantor USIS Medan.

Mereka disuguhi tontonan film tentang "Biografi Penulis Amerika, Mark Wain dan Edgar Alan Poe".■

Pelita, 4 Mei 1995

Jurnalistik Bergaya Sastra, Mengapa Tidak?

Oleh SOELAEMAN B. ADIWIDJAJA

KORAN masuk desa jelas diprogramkan. Apa yang diharapkan tentu saja agar informasi tersebar merata sampai ke pelosok kampung. Penguasaan informasi menentukan keberhasilan. Begitu ajar dan ujar para pendit dan para pakar. Contohnya, *Mitra Desa* dari *Grup Pikiran Rakyat*. Karena itu, di sana di samping struktur pimpinan dan staf redaksi terdapat staf ahli. Manfaatnya niscaya pulang maklum kepada sidang pembaca.

Karya sastra, seperti drama, novel, cerpen, puisi dsb., rasa-rasanya oleh negara mana pun belum pernah sempat diprogramkan masuk kampung di dalam rencana pembangunannya. Masalahnya mudah diduga, yaitu karya sastra bukan jaminan kesejahteraan material. Namun demikian, bahwa di dalam edisi koran masuk desa suka ada karya sastra tidak usah menjadi barang langka. Bahkan jurnalistik bergaya sastra sekalipun tidak perlu dipermasalahkan dan jangan dinafikan.

Sastra

Karya sastra pada dasarnya adalah fiksi sebagai wujud dari imajinasi lewat proses cipta sipenulisnya. Meski fiksi, jangan membenarkan sebuah novel atau cerpen boleh mengingkari kebenaran logika di dalam alur ceritanya. Kalau pun terjadi kelitan logika hingga mengakibatkan jalan pikiran yang menceng, niscaya disengaja oleh sipenulisnya, untuk mengundang konflik dan konflik lain yang membawa klimaks serta penyelesaian masalahnya.

Aristoteles, misalnya, mengemukakan tiga macam hukum logikanya. Pertama, hukum identitas: Suatu benda, hal atau orang adalah apa adanya. Misalnya, sebuah rumah adalah sebuah rumah; suatu keputusan adalah suatu keputusan dan Citra adalah (gadis) Citra.

Kedua, hukum menafikan yang tengah. Misalnya, sebuah benda itu adalah rumah atau bukan rumah; suatu hal itu adalah keputusan atau bukan keputusan; dan gadis itu adalah Citra atau bukan Citra.

Ketiga, hukum non-kontradiksi. Misalnya, tidak dimungkinkan gedung itu adalah rumah dan juga bukan rumah; begitu pula tidak dibenarkan hal itu adalah keputusan dan juga bukan keputusan; serta tidaklah masuk akal gadis tua adalah Citra dan juga bukan Citra.

Demikianlah kebenaran yang terdapat dalam karya sastra tidak perlu dicarikan buktinya di dalam kenyataan hidup masyarakat tertentu. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas, karya sastra adalah fiksi belaka, tegasya ciptaan semata-mata. Kalau pun dirasakan kebenaran karya sastra bersejajar dengan kebenaran kenyataan hidup sesungguhnya maka hanyalah merupakan asosiasi sipembaca yang larut dalam alur cerita yang dihayatinya secara intens.

Lagi pula, tidak dapat dipungkiri, dewasa ini, di sini, kebenaran karya sastra cenderung dipercayai dan bahkan diyakini sebagai kebenaran yang faktual. Padahal, kebenaran tersebut tak jauh dari mimpi.

Jurnalistik

Pernahkan Anda amati dan sadari bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah selalu ingin tahu dan mengerti? Justru inilah, konon, yang mendorong tumbuh dan berkembangnya bisnis berita, baik cetak maupun elektronik, dewasa ini. Wartawan menulis atau menyampaikan berita lewat surat kabar, majalah, radio dan tv adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya maka telah diperkembangkan konvesi mengenai bentuk dan caranya.

Penyajian berita dalam bentuknya yang optimum harus mudah dicerna. Itu berarti retorika yang singkat, jelas dan sederhana. Harap jangan dilupakan perbedaan antara retorika dan tata bahasa. Retorika adalah pengetahuan untuk menyatakan sesuatu dengan baik, sedangkan tata bahasa adalah pengetahuan buat menyatakan sesuatu dengan tepat. Jadi, antara tata bahasa dan retorika terjalin hubungan yang fungsional, yaitu satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi.

Efektivitas berita berkurang apabila penyajiannya menggunakan terlalu banyak kata-kata, tak teratur, dan membingungkan karena ambigu. Karena itu, penyajian berita mesti pendek tetapi tepat, langsung dan runtut, hingga jelas dan menarik bagai membaca atau mendengarkan cerita pendek karya pengarang yang mahir. Begitulah sesungguhnya apa yang disebut gaya jurnalistik.

Jurnalistik bergaya sastra

Sekarang, rasanya minat baca masyarakat akan karya sastra semakin surut saja. Minat itu agaknya telah direnggut oleh hobi lain, seperti memancing, main bulutangkis, tenis dan golf. Sementara masyarakat sudah merasa cukup terhibur dengan acara radio dan televisi. Walaupun para pendit dan pakar justru melihat kemudaratan dari acara televisi yang ditayangkan selama ini.

Kebutuhan akan tahu dan mengerti menjadikan orang haus berita. Mereka baca koran dan majalah. Mereka dengarkan radio atau mereka tonton televisi.

Dalam kesempatan demikian, bila karya sastra memang diperlukan guna memperkaya khasanah batin maka reportasi atau laporan khusus yang non-

fiksi itu bisa disajikan dengan teknik struktur novel dan artikel majalah serta koran dapat dihidangkan seperti cerita pendek.

Tentu saja jurnalistik bukan fiksi. Jurnalistik tidak nanti menggantikan fiksi karena jurnalistik lakukan sesuatu yang fiksi tidak perbuat, dan jurnalistik tidak perbuat apa yang fiksi lakukan.

Gaya sastra yang dipakai jurnalistik hanya terbatas pada dialog langsung, latar belakang peristiwa, pemanfaatan narator yang ikut serta berpartisipasi, dan tidak mustahil bisa ditimba pikiran-pikiran dari mereka yang memainkan berbagai peranan. Tetapi, metode fiksi yang paling mendasar, seperti distilasi, dramatisasi dan distorsi harus dihindari jauh-jauh oleh jurnalistik yang paling imajinatif sekalipun.

Distilasi itu tidak lain daripada abstraksi pengarang yang diangkat dari kenyataan sesungguhnya hingga menjadi kenyataan imajinatif dari karya ciptaannya. Dramatisasi ialah proses di mana imajinasi pengarang merangsang imajinasi pembaca untuk larut dalam alur cerita sehingga peristiwa-peristiwa yang diciptakannya dirasakan seolah-oleh benar-benar terjadi.

Distorsi adalah kenyataan ciptaan pengarang yang dilukiskan dengan kata-kata yang berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Distorsi artistik dalam karya sastra sama sekali tidak mempunyai sangkut-paut sedikit pun dengan jurnalistik yang objektivitasnya paling kecil sekalipun.

Penutup

Jurnalistik bergaya sastra diharapkan mampu meningkatkan minat baca menjadi lebih besar karena menarik dan mengasyikkan. Pada saatnya, karya sastra mudah-mudahan dibaca banyak orang lagi seperti semakin besarnya minat orang untuk memancing, main bulutangkis, tenis dan golf.

Masyarakat tidak mungkin menjadi pemimpin lagi karena mereka menjadi lebih realistik.***

Pikiran Rakyat, 5 Mei 1995

BINGKAI

Sastra di Negri Perdagangan

Sebagai negeri perdagangan, Singapura menjadikan bahasa Inggris, yakni *lingua franca* pedagangan sebagai "bahasa resmi" dan bahasa pengantarnya. Tradisi sastra Singapura dalam banyak hal berkait pula dengan tradisi sastra dari bahasa yang mereka gunakan.

Dalam *Second ASEAN Writer's Conference/Workshop (Poetry)* 1995 di Manila, Singapura mengirim empat penyair. Dua menulis dalam bahasa Inggris (Simon Tay dan Francis Lau), seorang menulis dalam bahasa Melayu (Abdul Samad Haji Salimin alias Asmin) dan seorang menulis dalam bahasa Cina (Teo Sum Lim).

Para penyair yang menulis dalam bahasa Inggris membangun tradisinya kurang lebih dari tradisi sastra Barat, khususnya sastra berbahasa Inggris. Kita mencium jejak T.S. Eliot dan William Carlos William pada puisi-puisi Simon Tay dan Francis Lau. Dalam pada itu, Theo Sum Lim, penyair dan prosawan muda Singapura yang menulis sepenuhnya dalam bahasa Cina, dalam papernya menyebut-nyebut tradisi sastra Cina dinasti Tang dan Sung. Abdul Samad bin Salimin yang menulis dalam bahasa Melayu, tidak bisa lain menjadikan tradisi sastra Melayu sebagai tradisi sastranya. Horison pandangannya mengarah ke Malaysia dan Indonesia.

Alhasil, para penyair Singapura merupakan para penyair tanpa tradisi pedalaman. Jika pun mereka ingin kembali pada tradisi sastra lamanya, maka apa yang disebut sebagai tradisi tersebut demikian panjang dan jauh jaraknya dengan mereka; jauh di luar Singapura. Tidaklah mengherankan jika kemudian kebanyakan penyair muda Singapura cenderung menulis sajak dalam bahasa Inggris.

Sejumlah penyair muda Singapura (usia 20-30 tahun) yang menulis dalam bahasa Inggris dan telah menerbitkan buku kumpulan puisinya secara tunggal adalah Simon Tay dengan *Prism* (1980) dan *"5"* (1985), Angeline Yap dengan *Collected Poems* (1986), Boey Kim Cheng dengan *Somewhere Bound* (1989) dan *Another Place* (1991), Koh Buck Song dengan *A Brief History of Toa Payoh* (1992), Heng Siok Tian dengan *Crossing teh Chopsticks* (1993), Desmond Sim dengan *Places I Have Been* (1993), Paul Tan dengan *Curious Road* (1993), Jeffrey TH Lee dengan *The Sea is Never Full* (1993) dan Ho Poh Fun dengan Katong and other Poems (1994).

Simon Tay, ketua delegasi Singapura, dalam makalahnya membangi sastrawan Singapura dalam tiga generasi. Generasi pertama sastrawan Singapura diwakili oleh Edwin Thumboo serta sastrawan lain seperti Goh Poh Seng dan Robert Yeo. Generasi kedua diwakili oleh Lee Tzu Pheng dan Arthur Yap. Sementara generasi ketiga diwakili oleh generasi Simon Tay dan kawan-kawan.

■ **Agus R. Sarjono**,
penyair dan eseis. Tinggal di Bandung.

Republika, 6 Mei 1995

Hadiah sastra dan bias turutannya

Oleh O'Galelano

DENGAN pertimbangan yang hanya dimaklumi oleh panitia, saya beruntung berada di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok Senin 20 Maret 1995 menghadiri Penyerahan Hadiah Sastra "Rancage". Untuk pertama kali saya diundang dan pertama kali saya mengetahui tentang Hadiah Sastra "Rancage", yang dalam perjalanan dari rumah ke UI Depok selalu mencuatkan tanya dalam hati: "kok saya ikut diundang?"

Namun setelah melihat ada Satyagraha Hoerip, Syaiful Rachim, Pramoedya Ananta Toer, Soekamto SA, tahulah saya bahwa "Rancage" yang berarti kreatif sedang lebih menasional. Saya juga lihat ada Prof DR Ayatrohaedi, serta Ramadhan KH yang kehadirannya tidak aneh di suatu kegiatan sastra berbau Sunda, yang selama ini barangkali diduga umum.

Ternyata Hadiah Sastra Rancage di Balai Sidang UI Depok ini adalah yang ketujuh. Sudah 7 tahun kegiatan ini berjalan, namun baru pada tahun 1993 hadiah sastra ini di yayasan-kan. Hadiah Sastra yang diberikan Badan Musyawarah Kebudayaan (BMKN) tahun 50-an konon hanya berjalan 4 kali. Hadiah Tahun Buku juga hanya berjalan 4 tahun. Sementara hadiah sastra majalah Sastra juga tidak mencapai angka tujuh tahun. Dengan begitu boleh dibilang Hadiah Sastra Rancage ini termasuk yang bertahan lama. Boleh dibilang pula Rancage memakukan dirinya sebagai hadiah sastra seadanya pada awal, sampai memadai pada gilirannya yang ketujuh ini.

Memadai karena di samping menerima piagam, juga ada tanda kasih berupa uang tunai sebesar Rp 2 juta. Di samping Rancage ada juga hadiah untuk bacaan anak-anak "Samsudi" yang pemenangnya menerima piagam dan uang tanda kasih sebesar Rp 1 juta. Kalau kita mau juga membandingkan dengan hadiah kebudayaan yang diberikan Departemen P dan K yang bernilai Rp 1 juta untuk sastra, maka Rancage sudah jelas tidak perlu merasa kecil hati.

Saya mengutip ini karena telah demikian banyak bahasa daerah yang sekarat dan yang lenyap sastranya.

Lebih memadai lagi dalam nilai literarinya, karena hadiah sastra Rancage yang tadinya hanya menilai sastra Sunda kini juga menilai sastra Jawa. Sayang untuk tahun 1995 ini hadiah sastra Jawa tidak diberikan karena menurut pakar penilaiannya Prod Dr Soeripan Hadi Utomo tidak ada buku sastra Jawa yang pantas diberi hadiah tahun ini.

Saya duduk berdekatan dengan Apip Mustafa yang cepat intim setelah diperkenalkan Ayatrohaedi. Ia ternyata baru pensiun tahun ini dari Indosat. Selama ini saya sering membaca cerpennya dalam bahasa Indonesia. Saya juga bersigera menyalami Pramoedya Ananta Toer, yang oleh Ajip Rosidi dalam awal pidatonya memasukkan "yang saya hormati" pada Pram dalam satu tarikan kalimat bersamaan dengan Dekan Fakultas Sastra Prof Dr Achdiati Ikram, Rektor UI Prof Dr Tadjuddin, Budiardjo (mantan Menpen) dan pejabat lainnya.

Hadir dalam sebuah acara sederhana seperti pemberian Hadiah Sastra Rancage dan Samsudi ini, terasa ada semacam kelapangan yang bersarang di sanubari kita. Karena di sebelah angka-angka keberhasilan pembangunan dengan mengerling angka RAPBN yang Rp 72,35 triliun; menyaksikan dan merasakan hadiah sastra Sunda dan Jawa yang hari itu bernilai sekitar Rp 8 juta, tentu meruak rasa syukur dan penghargaan serta rasa senang dan bangga kita pada Yayasan Kebudayaan "Rancage".

Angka Rp 8 juta dalam peta nusantara yang ber-RAPBN Rp 72,35 triliun memang sangat tidak ada artinya dalam jumlahnya.

Namun karena kecilnya jumlah itu justeru ia terlontar dan terduduk ke atas sebagai titik atau noktah yang penting. Sebab titik itu mencerminkan keteguhan segelintir orang untuk mau memikirkan sastra daerah, yang walaupun diakui oleh konstitusi kita sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945, tapi kita akui kini nyaris tidak tertangani oleh pemerintah.

Apalagi bila diingat bahwa amanat konstitusi sangat jelas. Pasal 36 UUD 1945 dalam penjelasannya mengatakan "di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda dan Madura dsb) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup"

Pembaca mohon maaf saya mengutip ini bukan hanya karena saya juga menginginkan berjayanya bahasa dan sastra Sunda, Jawa dan mungkin Madura dan bahasa daerah lainnya. Saya mengutip ini karena telah demikian banyak bahasa daerah yang sekarat dan yang lenyap sastranya. Seperti juga sastra Ternate (asal saya) yang tak sempat terbina dan tertuliskan, dan kini hanya tinggal kenangan yang mengenaskan. Barangkali ini bisa disebut sebagai "bias turutan (ikutan)" yang nampak dan terasa tatkala menghadiri pemberian Hadiah Sastra "Rancage".

Terbit, 6 Mei 1995

Karya Sastra sebagai 'Haram Jadah'

AGUS FAHRI HUSEIN

SASTRAWAN Agus Noor dengan tulisannya "Orientasi Penciptaan Seni" (KRM 30/4) membuat saya sungguh takjub dan terperangah. Padahal saya bukanlah orang yang mudah dibuat demikian. Dalam pemahaman saya, seniman yang paling banyak dituntut menggunakan akalnya adalah sastrawan, karena mereka menuangkan gagasan langsung ke dalam bahasa verbal. Demikian sebaliknya, apresiasi terhadap karya seni yang paling banyak menuntut pemahaman akal ada pada karya sastra. Dengan kekhasannya ini maka sastra adalah salah satu cabang seni yang paling niscaya diperalat atau sebaliknya untuk tujuan-tujuan di luar kesenian, baik material maupun meta-material. "Sastra dipolitikkan, politik disastrakan," kata 'Inspektur Agung' Butet Kertaradjasa.

Sebagai kesenian akal, sastra paling niscaya dikaji dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Namun akal, seperti diyakini banyak orang, dapat jauh melampaui kenyataan empirik pemiliknya. Maka jangan mudah percaya kepada akal, terutama yang tidak sehat.

Sastrawan bukan nabi, jelas tidak perlu dipersoalkan lagi. Apakah dengan demikian sastrawan itu setan? *Wallahua'lam.* Tetapi jangan dipersoalkan apa motivasi mereka menulis sastra. Rendra ketika masih *mualaf*, ditanya oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta: "Apa motivasi anda pindah agama?" Dengan berang Rendra menjawab: "Soal motivasi bukan urusanmu!" Itu urusan Rendra dan Tuhannya.

Sastrawan adalah manusia biasa, kebutuhan fisik minimumnya sama dengan manusia-manusia lainnya. Mempertanyakan atau menyatakan posisi (empirik) mereka dalam proses kreatif (gagasan) adalah kurang pekerjaan. Keduanya tidak selalu berhubungan. Dalam banyak teori sastra, karya sastra dianggap sebagai individu yang terpisahkan dari pengarangnya. Karya sastra tidak bersifat subyektif tetapi inter-subyektif (Kuntowijoyo); sastrawan tidak selalu penting bagi pemahaman suatu karya sastra karena pembaca akan memberikan maknanya sendiri. Posisi empirik sastrawan hanya penting bagi pemahaman diluar sastra, misalnya politik. Apa boleh buat, demikianlah adanya.

Dalam politik sastra (istilah Inspektur Agung), komunitas (katakanlah: 'partai') kesenian menjadi penting. Komunitas menciptakan konsep-konsep estetika yang tidak lagi intersubyektif, tetapi benar-benar subyektif. Ada estetika 'burung perkutut' dan ada estetika 'burung merpati' (Hamdy Salad); kedua burung itu sampai di hari-kemudian tidak pernah berada dalam satu sarang, kecuali jika Tuhan menghendaki. Di antara keduanya ada burung-burung lain yang karena mukjizat Tuhan dalam waktu-waktu tertentu dapat menjadi burung perkutut, dan di waktu lain menjadi burung merpati, atau kadang-kadang bisa menjadi keduanya atau bukan keduanya sekaligus. Tergantung situasi, kondisi, dan toleransi.

Burung-burung ajaib ini benar-benar mewakili independenisasi karya sastra. Bagi mereka eksistensi (dalam pengertian 'ada-nya') tidak penting; yang penting adalah karya (dalam pengertian survival dan popularitas). Eksistensi bagi mereka adalah 'ada-nya itu bukan': lihatlah karya.

Jangan berharap banyak kepada burung-burung jenis ini. Mereka adalah makhluk merdeka, sibuk mengamati sekeliling untuk mengambil manfaatnya. Ketika ada orang mengklasifikasi sastrawan sebagai Klas VIP, Klas I dan seterusnya sampai Klas Cakarayam (istilah Umar Kayam), mereka tidak peduli. Yang penting mereka sudah masuk Klas VIP, tak peduli apakah itu Klas VIP versi burung perkutut, merpati, keduanya atau sama sekali bukan keduanya, pokoknya: Klas VIP. Mereka juga tidak peduli apakah pengklasifikasian itu berdasar atau tidak dan masuk akal atau tidak.

Hubungan antara posisi empirik mereka dengan proses kreatifnya semakin hari semakin renggang. Mereka menggagas dalam karyanya (kreatif) tentang yang indah-indah (misalnya perjuangan HAM), tetapi sebenarnya mereka (empirik) tidak peduli mengenai hal itu. Karya sastra adalah anak haram-jadah mereka. "Hidup atau mati, hamba turut paduka yang sedang berkuasa." **Weleh-weleh!** □ - b.

Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 1995

Pluralitas Sastra Dan Kompleksitas Zaman

Oleh Harta Pinem

Ketika zaman semakin canggih, dengan mobilitas ekonomi, iptek, dan politik sebagai pemicunya, maka sastra juga lewat tangan sastrawan melakukan pencanggihan - pencanggihan, baik melalui pemekaran tema maupun teknik pengucapan. Sebagai salah satu hasil kebudayaan sastra sesungguhnya tak pernah ketinggalan zaman. Ketika para pengamat sastra meributkan adanya krisis di dunia sastra kita, sebenarnya isu tersebut hanyalah asumsi belaka untuk menutupi kegagalan para pengamat mencermati kehadiran karya sastra yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat.

Sastra pada dua dekade terakhir ini, di Indonesia, mengalami peningkatan jumlah media publikasi. Bukan lagi cuma melalui media penerbitan buku, majalah, dan surat kabar saja, tapi pun melalui jurnal-jurnal dan buletin swadaya, bahkan melalui penerbitan sederhana dengan biaya swadaya. Semua ini sulit dijangkau secara menyeluruh oleh para pengamat sastra kita, meskipun oleh para pengamat sastra setekun H.B. Jassin pada zamannya sekali pun. Bahkan kita sangat meragukan apakah sudah lahir seorang pengamat sastra setekun Jassin pada zaman secanggih sekarang. Jangan-jangan para pengamat sastra kita hari ini, mekanisme kerjanya, tidak lebih baik dan tidak lebih disiplin daripada para sastrawan itu sendiri.

Jika benar demikian, berarti para pengamat sastra kita pandainya cuma berkoar-koar lewat retorika yang sulit dipercaya karena mereka telah kehilangan objek pengamatan, entah sebab malas mendokumentasi karya sastra atau terlalu sibuk dengan pekerjaan lain di luar dunia pengamatan karya sastra. Siapa tahun mereka tak lebih sekadar memburu popularitas nama dan kemudian materi penambah biaya hidup, misalnya.

Pada iklim demikian maka karya sastra akan kehilangan juru bicara seriusnya. Karya sastra yang banyak dipublikasikan pada berbagai media publikasi di atas bukan tak mungkin akan dibiarkan begitu saja tanpa sentuhan tangan pengamat dan peminat sastra umumnya. Orang boleh bersungut-sungut kok tak pernah lagi muncul karya besar dalam dunia sastra Indonesia mutakhir, seraya menghardik, "Apakah tak ada lagi sastrawan yang benar-benar berbakat dan serius menggeluti dunianya?" Tetapi ketahuilah bukan mustahil prenyataan seperti ini terjadi karena si bersangkutan telah capek dan karenanya mengeluarkan penilaian yang sembarangan. Kita memaklumi semua itu, ketika banyak orang di zaman ini serba terburu-buru dan karenanya lebih cenderung mengambil jalan pints demi mencapai tujuan, daripada harus susah-susah mencari data.

***

PADA lembaran lainnya kita melihat penulisan karya sastra pada dua dekade terakhir ini tak lagi didominasi para penulis mapan, bahkan cenderung mulai dikuasai oleh kehadiran para sastrawan muda. Mereka yang kemudian terkenal sebagai sastrawan era '80-an dan '90-an. Mereka ini tak lagi "menghadirkan" para pembabtis seperti pada zaman sebelumnya. Boleh jadicap

seperti itu kini tak lagi dianggap penting. sebab semuanya akan berkembang menurut kreativitas dan proses kepenulisannya masing-masing. Mereka mungkin tak perlu lagi penobatan-penobatan, apalagi yang cenderung ngawur. Yang mereka butuhkan adalah pembicaraan / pengupasan karya-karyanya daritangan pengamat sastra yang benar-benar serius dan objektif. Inilah yang terasa sangat kurang dan kehilangan proporsinya. Antara penciptaan karya sastra dengan pengamatan karya sastra semakin timpang kehadirannya. Sementara sastrawan semakin bertambah terus jumlahnya. Kehadiran penyair muda dan cerpenis muda itu kini tengah didiamkan, dianggap ad dan tidak ada, sepertinya tak penting lagi. Sehingga kita sulit mengenali jagat perkembangan sastra Indonesia seutuhnya, bahkan secara umum sekali pun. Kita hanya bisa meraba-raba dan mendekatinya secara fragmentaris. Kita telah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri dan cenderung saling mengabaikan.

Di tengah iklim yang kurang menentu seperti ini, ditambah mobilisasi perubahan zaman kian cepat dan sulit dikenali, peranan individu yang perduli kepada pengamatan karya sastra semakin penting. Kekosongan kritik sastra pada dua dekade terakhir ini perlu diberi peluang pemuatannya pada media massa yang ada. Dan surat kabar yang akhir-akhir ini membuka diri sebagai tempat sosialisasi karya sastra, menjadi semakin penting peranannya. Bahkan boleh dikatakan surat kabarlah kini media alternatif yang paling diburu oleh para sastrawan kita karena kemampuan distribusinya jauh lebih luas dibandingkan dengan media publikasi lain semacam buku, majalah, buletin, atau jurnal-jurnal kebudayaan. Maka sastra yang dimuat di surat kabar-surat kabar akhir-akhir ini semakin digandrungi publik sastra dan tak akan sekadar dibaca dan lalu dibuang, tapi juga dikliping dan dijadikan dokumentasi sastra yang utama, atau paling tidak sejajar kedudukannya dengan buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal budaya yang ada. Bahkan beberapa surat kabar yang serius menangani ruang kebudayaannya, belakangan mulai serius pula mendokumentasi karya sastra, menerbitkan karya sastra dalam bentuk antologi karya sastra, seperti Kompas, Surabaya Post, Bernas, dan Riau Pos. Tradisi seperti ini tentu perlu dilanjutkan dan diikuti oleh penerbitan surat kabar lainnya. Artinya pihak sastrawan dengan pengelola surat kabar haruslah saling membantu dan meningkatkan martabatnya sebagai insan pendukung program pembangunan kebudayaan. Dengan bertambah makmurnya kehidupan penerbitan surat kabar dan kehidupan sastrawan, pada gilirannya akan memacu iklim berkesenian yang lebih baik lagi.

* * *

PADA belahan lainnya, kalau kita sedikit cermat, perkembangan indivual sastrawan dalam berkarya, sebenarnya terus berlanjut secara evolutif. Bahkan beberapa di antaranya mengalami penanjakan kemajuan menggembirakan, seperti pada karya-karya Seno Gumira Ajidarma, Acep Zamzam Noor, dan beberapa yang lain. Mereka kini terus bertumbuh dalam jalurnya masing-masing. Tema-tema sosial, kejiwaan, religi, dan seterusnya, bagi mereka tak jadi masalah. Yang penting adalah penggalian-penggalian yang lebih mendasar lagi. Semuanya akan relevan untuk manusia abad ini dan abad mendatang. Polemik-polemik yang memperdebatkan kesenian yang bagaimanakah yang akan relevan di abad mendatang dan seterusnya boleh saja kita sambut dengan gembira, tapi tak boleh kehilangan daya kritis. Perbenturan dan gesekan argumentasi akan terjadi, juga mungkin disertai berbagai kekeliruan, yang semua ini jelas akan menambah warna diskusi pada dunia kesenian kita, khususnya sastra.

Betapapun peranan sastrawan pada dekade ini dan dekade mendatang memang semakin penting dan ikut memancing kemunculan moralitas baru manusia. Kebudayaan sampah yang kini tengah melanda manusia sejagat harus ditanggapi secara serius oleh para sastrawan melalui karya-karya dan pemikiran-pemikirannya. Kebudayaan sampah yang dimaksud di sini yaitu kebudayaan karena ulah manusia, yang membuat jalan peradaban semakin ngawur dan gelap. Eksploitasi pada manusia, alam, dan segala isinya terjadi dengan dahsyat di situ. Maka perlu dibangkitkan sebuah kebudayaan baru yang dulu pernah dipakai oleh nenek moyang bangsa manusia, Adam dan Hawa, di Taman

Eden, yakni kebudayaan karena Allah. Bagaimanapun kita harus kembali pada dasar kebudayaan ini agar kehidupan ini dapat diselamatkan dari jurang kehancurannya. Sastra Indonesia mutakhir akan mengarah ke sana ketika para sastrawan semakin sadar pada makna kehadirannya sebagai pejuang kemanusiaan dan wakil-wakil Allah di bumi serba tak sempurna ini. Maka pluralitas karya sastra seperti telah disinggung di atas menjadi relevan pada kompleksitas perubahan zaman kini dan mendatang.***

Medan, 23 April 1995

Suara Karya, 7 Mei 1995

Masa Depan Sastra Ditentukan oleh Minoritas

POLEMIK

Kesastraan Indonesia dewasa ini memang selalu merefleksikan diri pada kebudayaan. Jelasnya, sastra selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari, meskipun refleksi atau pencerminan itu tidak selamanya langsung atau mengejawantah secara harfiah. Jika saya melihat keadaan sekarang ini, dan kemudian mengaitkan antara kesastraan dan kebudayaan, maka kita akan melihat kehidupan kita sekarang ini telah terkurung oleh multi-kesibukan dan multi-informasi.

Akibatnya kita terseret untuk ikut memacu diri dalam kondisi seperti itu. Pola hidup yang selalu tergesa-gesa juga sering memacu kita untuk tidak mampu melihat suatu masalah dengan benar. Dan memacu kita untuk tidak menyelesaikan suatu masalah yang sedang kita hadapi. Sebab, kita selalu dipacu untuk menghadapi masalah-masalah lain, sementara masalah baru selalu menghadang kita tanpa mampu dibendung.

Kehidupan sastra kita saat ini mirip dengan kehidupan musik. Para sastrawan dalam menulis karyanya banyak yang tidak pernah tahu arah dan tujuannya. Bagaikan seorang pendaki gunung, pengarang-pengarang sekarang ini tahu bahwa mereka sedang mendaki gunung. Mereka ingin mencapai puncak gunung. Tetapi ternyata mereka tidak pernah melihat puncak gunung itu, dan mereka tidak pernah sampai ke puncak gunung itu.

Itulah apa yang terjadi di dalam sastra kita sekarang. Tak ubahnya seperti apa yang terjadi dalam dunia musik kita. Dunia yang penuh kehingar-bingaran, tidak jelas mana ujung, mana pangkal, di mana tujuan, dan tujuan itu kira-kita dapat dicapai atau tidak.

Karena itulah sejak dekade terakhir ini banyak karya sastra, musik, maupun seni lukis yang sifatnya eksperimental. Dan pada tahap eksperimental itu karya-karya tersebut berhenti, tanpa dilanjutkan dengan tahap pengendapan yang membentuk kematangan. Inilah kecenderungan umum seniman kita, penyair, perupa, maupun musisi.

Lingkar kehidupan kita memang telah lekat dengan pola dan sifat kehidupan yang hanya berbau mode atau trend. Nilai esensial sudah banyak terlupakan. Ini bisa kita lihat secara konkret, misalnya, apa yang telah terjadi di tengah kita seperti mode dalam pakaian. Kondisi seperti ini juga terjadi dalam sastra kita, seperti kecenderungan-kecenderungan dalam pemikiran sastra, teori-teori sastra, teori-teori linguistik, dan sebagainya, yang semuanya hanya terjebak dalam mode.

Mode memang terlahir demi kepentingan mode itu sendiri. Jadi hanya untuk kepentingan supaya terlihat baru, tapi tidak menyangkut esensinya. Hal ini terjadi, tidak lain, karena kita hidup dalam keadaan yang selalu bergantung antara satu sama lain. Kalau kita mau berpikir secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini hidup dalam kebudayaan pop. Dalam kebudayaan pop penampilan lebih penting daripada esensi.

Sekarang kita melihat kecenderungan gedung-gedung yang masih fungsional dibongkar, agar mereka dapat mendirikan gedung baru yang penampilannya lebih mentereng. Pakaian-pakaian yang masih dapat

dipakai dibuang. lantaran mereka memerlukan mode baru agar penampilan mereka lebih terjamin. Kendaran-kendaraan yang sebenarnya masih berfungsi baik diganti. agar penampilan mereka lebih meyakinkan. Ini terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Jika tidak mengikuti kecenderungan zaman kita akan dikatakan tertinggal. Pengusaha muda yang tidak mau memakai telepon genggam. tidak mau berbicara bahasa Indonesia yang dicampuri bahasa Jakarta dan bahasa Inggris. tidak mau memakai dasi. maka ia akan tersingkir dari lingkungannya.

Peran sastra

Dalam konteks kehidupan seperti itu. apakah kita masih dapat mengharapkan peran sastra dalam ikut membangun kebudayaan Indonesia. khususnya kebudayaan masa depan? Dalam kehingarbingaran sehari-hari tentu kita masih dapat melihat adanya individu-individu tertentu yang tidak ikut larut ke dalamnya. Dan, minoritas tidak selamanya mencerminkan mayoritas. Minoritas inilah yang akan dapat melatakkan peran sastra dalam kehidupan.

Upaya pencerahan pemikiran biasanya memang hanya dilakukan oleh beberapa orang pemikir. Pada zaman pujangga baru, misalnya. majalah *Pujangga Baru* hanya bertiras 150 eksemplar. sedangkan bacaan lain pada waktu itu bertiras besar dan jangkauannya lebih luas. Namun hingga kini aspirasi Pujangga Baru masih tetap kita hormati, kita pelajari, dan kita dengarkan. Ini karena minoritas dalam dunia pemikiran punya daya jangkau yang lebih luas dibanding kehingarbingaran kehidupan sehari-hari.

Begitu juga jika kita berbicara soal sastra. Beberapa individu dalam dunia sastra, pemikiran, dan kebudayaan pun punya kemampuan yang besar untuk menentukan kehidupan masa depan bangsa kita. Juga masa depan kebudayaan dan kesastraan kita.

Pada abad ke-19 ada seorang pemikir di Inggris bernama Ruskin. Dia bertanya kepada para anggota parlemen Inggris: "Saudara-saudara anggota parlemen yang terhormat, pilih manakah kita sebagai bangsa Inggris, kehilangan India atau kehilangan Shakespeare?" Orang-orang yang berpikir jernih, berwawasan luas ke masa depan tentu akan menyatakan tidak mau kehilangan Shakespeare. Dan Ingris memang benar-benar kehilangan India sebagai negara jajahannya. Saya tidak bisa membayangkan jika Inggris tanpa Shakespeare, apa jadinya.

Sastra memang merefleksikan kebudayaan sekaligus bisa menjadi tonggak penting kebudayaan. Sastra dapat memberi warna khas pada kebudayaan. Sastra dapat memberi makna pada kehidupan. Demikian juga sastra Indonesia yang dibentuk oleh minoritas atau pemikir-pemikir yang tidak ikut larut dalam keingarbingaran kehidupan ini.

Kita tentu tidak bisa mengharapkan kehidupan kita di masa depan semata-mata pada sastra. Sastra hanya salah satu komponen. di samping komponen-komponen lainnya. Tapi bagaimanapun juga keadaan kita sekarang ini. di masa lampau dan di masa mendatang. apabila ada pemikiran yang bisa "memisahkan diri" dari trend atau mode zaman itu. dan memiliki pikiran jernih, dan wawasan luas, orang seperti inilah yang sebenarnya kita harapkan untuk mengembangkan sastra, kebudayaan, politik, ekonomi, di masa depan.

Sastra tanpa polusi

Sastra macam apa yang kita pelukan untuk membangun masa depan? Sastra yang kita perlukan adalah sastra yang tidak berpolusi. Sastra yang tidak tercemari oleh keadaan-keadaan sesaat yang sifatnya hanya mode. Atau sastra yang dapat membebaskan diri dari nilai-nilai instant (nilai-nilai sesaat). Dalam hal ini kita dapat melihat misalnya. sastra Balai Pustaka. sastra Pujangga Baru. dan sastra Angkatan 45.

Sastra Balai Pustaka ditulis pada waktu Indonesia dijajah Belanda, sastra Pujangga Baru ditulis pada waktu kita dijajah Belanda, sastra Angkatan 45 juga ditulis saat kita dijajah Belanda kemudian disambung Jepang. Pada saat itu para sastrawan menulis, situasi zaman mereka menuntut adanya nasionalisme yang sangat tinggi dan anti-penjajahan yang sangat tinggi. Namun kita tahu di dalam menulis mereka dapat membebaskan diri dari nasionalisme, dan kebencian terhadap kaum penjajah meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah orang-orang nasionalis. Mereka memiliki aspirasi nasionalisme, mereka mencintai Indonesia yang mau tidak mau nantinya akan merdeka penuh.

Tapi, sebagai penulis mereka bisa membebaskan diri dari aspirasi-aspirasi itu. Sehingga, seperti yang pernah dikatakan oleh Harsya W. Bachtiar, sastra nasional Indonesia itu justru terbentuk pada orang-orang yang tidak memasukkan nasionalismenya secara harfiah di dalam karya sastra mereka. Demikian juga untuk masa kini, dan masa depan, sastrawan yang baik adalah sastrawan yang bisa membebaskan diri dari nilai-nilai sesaat yang mengharu-biru kehidupan kita sekarang ini.

Akhir abad ke-20 ini adalah zaman yang serba pluralistis. Misalnya, jumlah koran kini banyak sekali, jumlah stasiun televisi kini banyak sekali, jumlah bintang film, jumlah penyanyi juga semakin banyak, jumlah negara juga banyak sekali. Ini, sebagai tanda bahwa kita berada dalam kehidupan yang pluralistis. Dengan kata lain, kita ini berada dalam dunia postmodernis. Dan salah satu ciri postmodernisme adalah kehidupan pluralistis.

Dalam kurun seperti ini, seolah tidak ada tokoh yang benar-benar tokoh, tidak ada standar estetika yang dapat dipegang, tidak ada satu pun pegangan yang dapat dipegang untuk waktu yang lama. Segala sesuatunya hanya dipegang dalam waktu yang singkat. Misalnya, tokoh ini muncul sebentar lalu tenggelam. Penyani ini muncul sebentar. Sementara itu banyak sekali penyanyi sehingga kita tidak bisa mengenal satu per satu. Kita tidak ingat lagu mereka satu per satu, karena begitu banyak lagu yang diciptakan, begitu banyak penyanyi, musisi, dan lain sebagainya.

Abad ke-21 permulaan tentunya merupakan sambungan abad ke-20 akhir ini. Pada abad ke-21 permulaan (tahun 2001) tidak akan terjadi pemisahan yang jelas antara abad ke-20 dan ke-21. Semuanya

akan berjalan tanpa garis pemisah yang tegas. Semuanya tidak akan berubah secara drastis, tapi akan berubah secara wajar, seperti pergantian hari ini dengan hari esok, dan seterusnya.

Masyarakat pada saat itu pun akan makin pluralistis. Sastranya pun lebih kurang sama. Pluralistisnya semakin tambah, fasilitas untuk menerbitkan semakin tambah, fasilitas untuk membaca semakin tambah, sumber-sumber informasi semakin tambah, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan semakin bertambah.. Sehingga dengan demikian kita musti lebih pandai untuk melihat mana yang hanya trend dan mana yang esensial.

Pada abad ke-21 sastra akan tetap tidak memiliki kejelasannya, tidak ada ujung pangkal, sastra-sastra eksperimental, satra yang hanya hidup sebentar kemudian mati, sastra dimana seolah setiap orang adalah pengarang; setiap orang adalah sastrawan, sastra dimana para sastrawannya menulis dengan mengacu pada tujuan akhir, jadi seorang pendaki gunung, tapi mereka merasa tidak pernah melihat puncak gunung, apalagi mencapai puncak gunung itu.

Sastra yang kita perlukan adalah sastra yang dapat mengendapkan semua masalah, sehingga memiliki dimensi masa depan. Kita memang tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu sastra profetik, tekstual, kritik sosial atau lainnya. Pokoknya jika kita melihat ke belakang, sastra yang kita perlukan itu seperti sastra *Belenggu*. Belunggu itu makin lama makin menonjol kehebatannya. Karena, *Belenggu* memiliki dimensi masa depan. *Belenggu* pada waktu diterbitkan dianggap sebagai sastra yang kontroversial, oleh karena itu tidak bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka.

Namun kalau kita kaji dan kira rasakan, sekarang ini *Belenggu* lebih menonjol ketimbang *Layar Terkembang*, atau *Salah Asuhan*. Karya sastra semacam itulah yang kita perlukan di setiap kurun perkembangan sastra, termasuk pada abad ke-21, dan pada masa-masa yang akan datang. Sastra yang berdimensi masa depan yang ditulis oleh orang-orang yang berpikiran tenang, bersih, dan jernih.

■ Wawancara dan transkrip
oleh m. anis fathoni

Republika, 7 Mei 1995

Kenangan Haji dari Seorang Sastrawan

Judul : SURAT DAN KENANGAN HAJI
Penulis : A.A. Navis
Penerbit : Gramedia, Jakarta, 1994
Tebal : 159 halaman

Pelaksanaan ibadah haji punya banyak dimensi. Rukun kelima Islam ini penuh muatan nilai baik religius, sosiologis, ekonomis, kultural, psikologis, antropologis, filsafat dan lainnya. Kerena luasnya dimensi cakupan yang terkadung nilai dalam ibadah haji itu, banyak memberikan inspirasi bagi penulis Islam untuk menuangkan pengamatan dan pengalamannya selama berhaji dalam bentuk buku.

Di samping berupa teks *kitab-kitab kuning*, belakangan ini bermunculan buku tentang haji. Misalnya, buku *Haji* terjemahan karya Dr Ali Shariati (1983), dengan sudut tinjauan sosiologi Islam. *Haji* Sebuah Perjalanan Air mata (1993). Buku ini merupakan pengalaman beribadah haji 30 tokoh. Rahasia Haji dan Umroh terjemahan buah pikir Al-Ghazali (1993). Buku klasik Al Ghazali yang diterbitkan Karisma ini lebih menekankan pada pendekatan filsafat dan syariat. Aku Datang memenuhi Panggilan-Mu, Ya Allah karya Prof Hendra Esmara. Sedangkan *buku Surat dan Kenangan Haji(SKH)* ini lebih banyak mengetengahkan pengalaman batin seorang sastrawan dan novelis A.A. Navis, tentu tetap dengan rujukan Alquran dan Hadits.

Pengalaman haji sastrawan ini dibagi dua bagian. Bagian pertama, *Surat Haji* berisi kesan-kesan perjalanannya di Mekkah dan Madinah. Bagian kedua *Kenang an Haji*. Menyimak isi buku SKH ini, kita seolah-olah berada dalam bagian jamaah haji. Gaya penulis an AA Navis mampu mendiskripsikan proses perjalanan haji dengan baik. Di sela-sela tulisannya itu disertai kritik. Misalnya, saat di atas pesawat, ketika calon jamaah agak lelah, tiba-tiba distel lagu keroncong. Kontan saja, calon jamaah haji protes. Lagu yang mendayu-dayu itu segera dimatikan. Usul sastrawan *gaek*, ada baiknya Garuda menyediakan kaset yang melantumkan ayat-ayat suci Alquran.

Memang tak gampang memaparkan prosesi ritual. Sebab, 'pertunjukan' riligius — meminjam istilah Dr Ali Shariati — secara bersamaan bernuansa "penciptaan", "sejarah", "keesahan" dan "idologi Islam" yang terekandung dalam ibadah haji. Belum lagi prosesi di luar Mekah dan Madinah. Apalagi kalau dikaitkan dengan tradisi. Dalam konteks ini AA Navis memberikan sedikit gambaran kontekstual di antara berbagai dimensi, terutama apa yang dilihat dan dialaminya.

Sebagaimana layaknya sebuah laporan perjalanan jurnalistik, apa yang disajikan AA Navis menggugah pembaca SKH ini untuk mengetahui khazanah kekayaan sejarah Islam. Buku yang muncul 'atas pesanan' Menteri Agama H Taher,

melukiskan tentang keadaan dari sejak berangkat hingga pulang kembali ke tanah air.Hal itu tergambar dalam tulisan Dari Pondok Gede ke Medinah hingga tulisan Sakit Derita Hilang, Bila Telah Pulang.

AA Navis juga coba memberikan interpretasi tersendiri dengan pendekatan ilmu pengetahuan di luar teologi Islam, terutama ilmu pengatahuan alam. Meskipun tanpa metodologi yang standar, apa yang dilakukan AA Navis termasuk langkah yang berani. Interpretasi AA Navis inilah yang merupakan nilai lebih buku ini yang mengajak pembaca buku ini berpikir.

Mengenai renungan pribadinya tentang kekuasaan Allah, dalam buku ini AA Navis tanpa ragu-ragu menyebut keagungan Allah yang terpancar dari peristiwa haji. Dalam realitas tampak betapa tak henti-hentinya jamaah haji yang memenuhi panggilan Allah mendengungkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Semua tunduk merunduk — merenung nasib dan kekuasaan Allah. AA Navis juga mengigatkan betapa beribadah jangan sekali-kali menghilangkan peran akal. Sebab, bila peran akal hilang, ibadahnya pun akan mengambang.

Dalam tulisan bergaya cerita, AA Navis juga menggambarkan pengembangan kota Mekkah dan Madinah serta fasilitas pendukungnya. Ternyata banyak pengembangan dan pembangunan kota dikaitkan dengan kepentingan jamaah haji. Kota yang penuh barakah ini yang berada di daratan kering dan tandus, masyarakatnya mampu terus hidup makmur berkat kemurahaan Allah. Bahkan, berjuta umat terus bernapak tilas atas apa yang pernah dialukan Rasul Rasul Allah. Kehadiran umat Islam di sini membuktikan manusia berposisi sama sebagai hamba. Tak ada kaya miskin, pangeran atau hamba semua sama sujud pada Allah. Hanya mereka yang takwa bakal diangkat derajatnya.

Buku ini hanya merekam sebagian kecil dari kekayaan khazanah pelaksanaan rukun kelima Islam. Namun demikian, cukup menggugah pembaca untuk menyimak lebih jauh, makna dan hakekat penyelenggaraan haji secara lebih gamblang berkat dukungan gaya penulisan AA Navis yang lugas dan enak dibaca.

(Abu Sairi)

Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 1995

KONTEKS TEMA NOVEL INDONESIA (2)

Dominasi Problema Sosial Dekade '20-an

Oleh JAKOB SUMARDJO

SEPERTI sudah diutarakan bahwa menentukan pokok pembicaraan utama dalam novel dapat menimbulkan perdebatan. Tema novel memang harus dibedakan dengan objek yang digarap oleh novel. Boleh dikatakan sebagian besar novel Indonesia bercerita tentang percintaan, tetapi tentu bukan berarti sebagian besar novel bertema percintaan. *Siti Nurbaya* bercerita tentang percintaan tokoh utamanya dengan Samsulbahri, namun yang dibicarakan adalah nilai pengorbanan Nurbaya kepada orangtuanya. Nurbaya memutuskan cintanya demi menolong ayahnya yang terbelit hutang akibat bangkrut usahanya. Di samping masih dibicarakan masalah bibit kelicikan, egoisme, kejahatan dalam diri manusia (Datuk Maringgih).

Begitu pula novel *Salah Asuhan* bercerita tentang percintaan Hanafi dengan Corrie, tetapi permasalahannya sekitar perbedaan kultur dan kelas sosial zaman kolonial Belanda, di samping masalah-masalah lain. Novel *Jeumpa Aceh, Azab dan Sengsara,* bercerita tentang percintaan dua asyik masyuk pula, tetapi bukan percintaan itu yang dipermasalahkan sebagai tema, melainkan gagalnya percintaan akibat minat orangtua terhadap darah kebangsawanan dan kekayaan. Nilai materialistis orangtualah yang dipermasalahkan dalam novel-novel tersebut.

Dalam karya seni lain pun terjadi pembedaan antara *subject matter* dengan pokok permasalahan seni. Orang dapat saja melukiskan sepasang sepatu tua, tetapi pokok gagasannya bukan semata sepatu itu. Dapat saja si pelukis ingin menyampaikan masalah kesengsaraan dan penderitaan manusia miskin, pemilik sepasang sepatu tadi. Ketika pelukis Affandi melukis "babi mati" tentu ia tidak hanya bicara soal babi, tetapi dapat berarti penggambaran kefanaan hidup ini, terutama peringatan untuk manusia.

Pandangan demikianlah yang ingin disaring dalam data tema novel dalam pengamatan sosiologis ini. Untuk memudahkan pembicaraan, diperlukan adanya penggolongan tema. Dan masalah penggolongan tema novel ini juga cukup rumit. Tak ada penggolongan tema yang final. *Warren dan Wellek* membagi tema dalam sastra menjadi 5 golongan besar, yakni Nasib, Agama, Alam, Manusia dan Sosial. Sedangkan De Witt Parker pada dasarnya hanya membagi tema seni menjadi 2 golongan saja, yakni Tema Menyenangkan dan Tema Tidak Menyenangkan. Lalu *Edwin Muir* juga hanya membagi tema novel menjadi dua golongan saja, yakni Tema Internal Manusia dan Tema Eksternal Manusia. Berdasarkan pembagian tema-tema tadi, pengamatan ini memutuskan

untuk membuat kategori tema novel menjadi dua golongan saja, yakni *Tema Batin* dan *Tema Sosial*, mengikuti pembagian Muir yang menekankan permasalahan dalam diri manusia itu sendiri (internal) dan permasalahan di luar diri manusia (eksternal) yang dapat meliputi persoalan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakatnya, manusia dengan alam.

Tema Batin lebih menyoroti pergolakan batin (perasaan, pemikiran dan kehendak) tokoh-tokohnya. Dapat dimasukkan di dalamnya masalah psikologi, kegoncangan kepercayaan, teka-teki takdir seseorang dll. Sedang Tema Sosial menyangkut permasalahan di luar diri manusia seperti masalah sosial, politik, adat kebiasaan suku, antropologi. Novel *Student Hidjo*, misalnya, juga bercerita tentang percintaan mahasiswa Hidjo dengan gadis Belanda, tetapi pokok pembicaraan novel itu sebenarnya kebejatan mental masyarakat kolonialis dan borjuis. Dengan demikian novel semacam ini dimasukkan kategori tema sosial. Juga *Layar Terkembang* lebih cenderung dimasukkan dalam tema sosial dari pada persoalan batin tokohnya, Tuti.

Novel-novel bertema batin lebih "universal" karena mencoba menggambarkan kondisi jiwa manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Hanya *setting* cerita (nilai pengetahuan novel) mungkin yang kontekstual. Tema batin menyiratkan adanya perenungan tentang hidup manusia sebagai individu universal, tentang ketidak berdayaan manusia menghadapi orang-orang lain yang lebih berkuasa, menghadapi tata sosial, menghadapi nafsu dan ambisinya sendiri. Bisa juga tentang harapan dan cita-cita manusia umumnya dalam menggapai kebahagiaan hidupnya. Juga tentang kesetiaan, kemuliaan, kepahlawanan, pengorbanan, keserakahan, kejahatan, megalomania dsb.

Novel-novel bertema sosial lebih punyai nilai kontekstual. Persoalan sosial sezaman menjadi tema novel. Ini merupakan reaksi terhadap kondisi sosial yang dinilai kurang menguntungkan bagi kebahagiaan manusia pada umumnya. Tema mengenai korupsi, mental kepemimpinan, watak-watak kolektif golongan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, adalah tema-tema yang menyangkut kondisi sezaman. Novel-novel demikian menjadikan dirinya bersifat universal apabila penggalian masalah mencapai sifat-sifat dasar watak kolektif manusia di suatu masa di suatu tempat.

Kecenderungan menggarap tema tertentu inilah yang ingin disampaikan dalam pengamatan ini. Mengapa pada suatu dasawarsa novel-novel lebih cenderung bertema sosial, mengapa tema semacam itu menipis dalam dasawarsa yang lain. Mengapa tema batin selalu hadir dan menjadi pusat perhatian penulis novel? Dan apakah arti gejala-gejala ini bagi hidup masyarakat sastra di Indonesia?

Novel Zaman Kolonial

Dalam dasawarsa 1920-an, yakni pada masa terbitnya novel novel Balai Pustaka yang mula-mula, dapat dikumpulkan 15 novel untuk diambil datanya, termasuk 2 novel luar Balai Pustaka karangan Mas Marco Kartodikromo *(Student Hidjo* dan *Rasa Merdika)*.

Dari jumlah itu tema sosial meliputi 9 novel (60%) dan tema batin 6 novel.

Kategori tema batin di sini meliputi novel *Sitti Nurbaya* yang berbicara tentang pengorbanan cinta Nurbaya demi membela nama baik dan kesulitan bisnis ayahandanya; novel *Tak Putus Dirundung Malang* yang mempermasalahkan semacam nasib atau takdir buruk yang menimpa dua kakak beradik dan keduanya tak kuasa menyandangnya sampai menemui ajalnya, yang satu bunuh diri dan yang lain oleh kecelakaan; *Sengsara Membawa Nikmat* mengambil tema tentang watak iri hati, dengki manusia terhadap manusia lain yang punya kelebihan dari pada dirinya; Novel *Si Jamin dan Si Johan* tentang nasib buruk dua anak pula akibat kelakuan orang tuaa yang tak bertanggung jawab; *Emas Disangka Loyang* (terjemahan Melayu dari novel berbahasa Madura?) berkisah tentang nilai kebaktian anak kepada orang tuanya, yakni nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya; dan akhirnya *Muda Teruna* yang mengambil tema didaktis mencari pengalaman hidup dengan mengembara.

Kiranya hanya novel *Sitti Nurbaya* yang berhasil muncul sebagai novel penting dalam sejarah, sedang novel-novel bertema batin yang lain kurang menonjol mutu sastranya. Pilihan tema kehidupan internal manusia yang kebanyakan tidak mencapai taraf sastra yang tinggi ini menunjukkan lemahnya pendalaman terhadap studi yang dipilihnya (nasib buruk manusia, kejahatan iri hati manusia). Kemungkinan ini disebabkan oleh taraf pendidikan pengarangnya sendiri yang kebanyakan tamatan sekolah guru rakyat saja.

Penggarapan tema demikian itu jelas tak ada hambatan sama sekali dari pihak penerbit pemerintah kolonial ini. Justru penerbit Balai Pustaka lebih bermisi pendidikan moral bagi anak-anak sekolah. Ini dapat dilihat dari diterbitkannya 2 novel yang sama sekali tidak berobyek kisah cinta *(Muda Teruna, Si Jamin* dan *Si Johan)*, artinya bacaan untuk anak-anak sekolah. Dalam novel *Tak Putus Dirundung Malang*, meskipun tokoh utama anak-anak remaja, namun ada peristiwa perkosaan.

Tema sosial sejak munculnya novel Indonesia memang mencolok. Novel pertama Indonesia yang berbahasa resmi, *Azab dan Sengsara*, adalah cerita tentang percintaan gadis desa Mariamin yang kandas akibat sikap orang tua yang lebih mementingkan pangkat sosial (kebangsawanan) dan kekayaan. Tema yang sama diolah novel *Jeumpa Aceh*. Protagonis kedua novel ini adalah wanita, dan keduanya meninggal akibat kandasnya percintaan oleh ambisi harta kekayaan orang tua. Kritik sosial rupanya ditujukan kepada karakter rata-rata orang tua yang menginginkan anak gadis atau anak perjakanya mendapatkan pasangannya yang derajat kebangsawanannya tinggi serta kekayaan yang menjamin kebahagiaan si anak.

Suatu kritik sosial yang bernilai universal, sebab kisah demikian bukan hanya monopoli masyarakat (Aceh dan Sumatera Barat) kontekstual, tetapi masih tetap ada di mana pun dan kapan pun. Pandangan bahwa kebahagiaan perkawinan ditentukan oleh faktor kekayaan dan gengsi keluarga akan naik atau merosot kalau menikah dengan orang yang bergensi sosial tinggi atau sebaliknya. Pandangan dan ma-

salah demikian masih terus ada sampai masa mutakhir novel Indonesia.

Kritik terhadap adat lokal dalam dasawarsa 1920-an terdapat dalam dua novel Adinegoro dengan *setting* Sumatra Barat dan Jawa Barat. Dua novel ini, *Darah Muda* dan *Asmara Jaya*, mengangkat masalah perkawinan antara dua pasangan dari dua kultur etnis yang berbeda. Ada hambatan adat lokal yang menyiratkan perkawinan sesama suku dengan segala hitungan prasyarat lokal, baik di tempat adat itu berada maupun di daerah lain. Dalam *Darah Muda*, percintaan itu kandas dengan kematian si gadis. Dan dalam novelnya yang lain, masalah ini dapat diatasi dengan bantuan fihak ketiga (Belanda). Novel terkenal yang membicarakan masalah ini pula adalah *Salah Asuhan*, hanya perbedaan kultur bukan etnis tetapi rasial, Belanda-adat. Masalah pelik ini ternyata tak dapat diselesaikan akibat struktur sosial zaman kolonial yang menempatkan golongan Belanda dan Indo di atas golongan pribumi. Hanafi hanya boleh memiliki "ilmu kolonial" tetapi bukan "gadis kolonial".

Persoalan adat lain menyangkut kedudukan rumah kaum wanita, yakni kawin muda *(Apa Dayaku Karena Aku Perempuan)* dan poligami serta perjudian *(Anak dan Kemenakan)*. Dengan demikian hanya sekitar 30% saja novel "Sumatra Barat" tahun 1920-an yang murni mempersoalkan "keburukan adat" yang bertabrakan dengan pandangan baru ("modern") dalam percintaan dan hidup kekeluargaan. Namun novel-novel Sumatra Barat yang lain tidak berarti tidak berbicara pula tentang adat, hanya fokus tema tidak semata-mata perkara adat Minangkabau.

Dengan demikian "masalah adat" yang muncul sebagai tema novel 1920-an adalah menggugat kebiasaan poligami, kedudukan wanita yang "dikuasai" orang tua, perkawinan antar suku dan antar ras, yang semua itu merupakan halangan bagi percintaan merdeka dan suka rela, suka sama suka ala pandangan baru.

Dua novel Mas Marco, yang diterbitkan di luar Balai Pustaka, bertema sosial politik secara lebih mendasar. Ia menggugat tata sosial berjuis-kolonialis yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, terutama dari pandangan sosialis. Ini berbeda dengan semangat kritik para penulis Balai Pustaka yang lebih empirik, yakni membahas soal kebiasaan lama sepanjang itu menyangkut kepentingan zaman baru (percintaan dan perkawinan).

Dari pengamatan sepintas ini nampak bahwa tema sosial lebih dominan dibanding tema batin dalam novel tahun 1920-an.

(Bersambung Minggu Depan)-c

Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 1995

"Manikebu" Tidak Mati

Para pencetus Manifes Kebudayaan beranggapan, pernyataan para budayawan itu masih relevan untuk zaman sekarang. Pelarangannya, 8 Mei, diperingati dengan mencetuskan "Manikebu" kedua.

SESEIS Arief Budiman, penyair Rendra, wartawan Goenawan Mohamad, dan kritikus HB Jassin, Kamis malam nanti akan menggelar *gawe* di *Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin*, TIM, Jakarta, dibantu oleh Forum Santri. Mereka sebagian dari 20 pencetus Manifes Kebudayaan yang ditanda-tangani 31 tahun lalu. Karena bertentangan dengan "realisme sosialis" yang berslogan "politik sebagai panglima" maka Manifes, begitu singkatannya, ditentang oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Juga lantaran namanya hampir mirip dengan Manifesto Politik — doktrin politik resmi ketika itu yang diangkat dari pidato Presiden Soekarno *(Penemuan Kembali Revolusi Kita*, 17 Agustus 1959) — maka Lekra, organ kebudayaan PKI itu, menyerang Manifes dengan sebutan mencemooh yang menimbulkan asosiasi jorok, yaitu: "manikebu", sementara pendukungnya diejek sebagai "manikebuis". Berkat lobi pimpinan PKI, 9 bulan kemudian, 8 Mei 1964, Manifes dilarang oleh Presiden Soekarno.

Sejak itu, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan kreatif terhambat. Kaum "manikebuis" — bukan saja di Jakarta, tetapi juga para pendukungnya di beberapa daerah — secara resmi diganyang. Mereka dicopot dari jabatan atau kantor tempat mereka bekerja. Istilah populernya ketika itu *diretool*, diambil dari pidato Bung Karno yang tengah menggebu-gebu membersihkan "anasir kontra revolusi". Karya-karya mereka haram dimuat di media massa. Buku-buku karangan mereka dibakar. Nama-nama mereka diumumkan. Mereka terpaksa menulis dengan nama samaran.

Para seniman Manifes menolak "politik sebagai panglima", karena dalam menciptakan karya-karya seni, mereka harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan politik. Dan politik itu ialah politik partai, dalam hal ini PKI. Meskipun slogan Lekra ialah "seni untuk rakyat", tetapi dalam praktiknya seni diciptakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik partai. Karena "politik sebagai panglima", maka partailah yang

mengontrol seniman, sementara Lekra menjadi penjaga gawang kebudayaan.

Ada satu hal yang ramai dibicarakan, dan ditentang habis-habisan oleh Lekra dkk ialah sikap Manifes terhadap *humanisme universal*. Manifes menolak *humanisme universal* bila hal itu merupakan pengaburan kontradiksi antagonis antara kawan dan lawan. Sebaliknya menerimanya, bila dimaksudkan bahwa kebudayaan dan kesenian bukanlah semata-mata temporal, tetapi juga menghayati nilai-nilai eternal. Lekra dkk menentangnya, sebab mereka mengabdikan kesenian untuk

Manifes bisa dibilang tidak mati

kepentingan politik partai.

Dokumentasi konflik ideologi dan budaya 31 tahun lalu itu, dengan lengkap dihimpun oleh dokumentator DS Moeljanto dan penyair Taufiq Ismail dalam buku *Prahara Budaya*, yang peluncurannya belum lama ini mendapat liputan luas. Tapi, sekarang ini, beberapa orang prihatin karena adanya gejala terlalu dominannya kekuasaan politik seperti 31 tahun lalu. Misalnya; adanya pelarangan terhadap karya-karya sastra tertentu, sementara hukum dan kebijakan perekonomian masih tunduk pada birokrasi.

Manifes menginginkan kesejajaran semua sektor kehidupan. Sektor politik misalnya, tidak menguasai sektor kehidupan yang lain seperti kesenian, atau pers. Tapi, yang terjadi kini hampir sama dengan 31 tahun lalu. Misalnya, yang belakangan ini terjadi di sektor pers. Para penandatangan *Deklarasi Sirnagalih* dipecat oleh PWI dan "diritul", karena *Deklarasi* yang "menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan" itu, sesungguhnya sama dengan semangat Manifes.

Beberapa wartawan, ketika itu, bukan saja diganyang karena menyetujui prinsip Manifes, tapi juga karena bergabung dalam Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), yang dipelopori oleh Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi itu, dan tokoh Murba Mr. Soemanang. Meskipun mencantumkan nama Soekarno, BPS yang ingin "menyelamatkan ajaran-ajaran Bung Karno" itu jelas-jelas berlawanan dengan PKI yang ketika itu dituduh "menunggangi" Soekarno untuk kepentingan politiknya.

Itu sebabnya, kini, beberapa pencetus Manifes merasa perlu mengumumkan Manifes Kebudayaan II. Kabarnya sudah ada beberapa seniman yang menyambut dan menanda-tanganinya, seperti sastrawan dan bekas penyiar BBC, Sori Siregar, sastrawan Waluyo Ds (kini mukim di Melbourne, Australia), dan beberapa seniman angkatan muda. Bagi HB Jassin, kini 78 tahun, Manifes Kebudayaan tidak mati, karena ia adalah ide-ide yang universal. "Karena itu Manifes selalu relevan dengan setiap kurun zaman," katanya.

Juga dengan masa kini. "Sekarang masih ada pelarangan-pelarangan dalam kegiatan kesenian dan karya-karya sastra. Di bidang pers juga masih ada pembreidelan. Gugatan TEMPO sudah dimenangkan di PTUN, tapi Menteri Penerangan masih naik banding. Lalu kapan selesainya? Kalau terus-menerus begini, berarti masalah-masalah seperti yang terjadi 31 tahun lalu masih akan ada terus. Jadi, di sinilah relevansinya Manifes, hingga bisa dibilang tidak mati", katanya.

Meski begitu, seperti halnya budayawan lain, Jassin juga tidak pernah menyimpan dendam — biarpun 31 tahun lalu ia diganyang habis-habisan. Bukan saja karya-karyanya, tetapi bahkan pribadinya pun dicaci-maki. Ketika itu, Jassin sempat menulis dengan nama samaran *Djamadi*, nama panggilan waktu kecil di rumahnya. Dan kini, dua tokoh sastrawan besar Indonesia yang dulu mengganyangnya, Pramoedya Ananta Toer dan Sitor Situmorang, pernah bersilaturahmi ke rumahnya. Dan Jassin, yang lemah-lembut itu, menjamu mereka dengan bahagia.

Tentang kedua sastrawan besar itu, Jassin bicara panjang-lebar. Katanya: "Setelah mengalami penderitaan dan tekanan, setelah hak asasi mereka diinjak-injak, rupanya Pramoedya dan Sitor merasakan sendiri apa yang dulu juga kita alami. Karena itu saya yakin, sebagai sastrawan besar mereka masih bisa jujur dengan diri-sendiri dalam menulis karya besar. Mereka sebenarnya tidak gampang terpengaruh politik, kecuali karena ambisi manusiawi untuk memperoleh kedudukan dan tepuk-tangan." **BSH**

Media Indonesia, 7 Mei 1995

Chairil Anwar: Perjuangan Menguasai Konvensi

Oleh Prof Dr Sapardi Djoko Damono

Penyair besar Chairil Anwar sering disebut "tambang emas" oleh kalangan akademikus. Karena, dari karya-karyanya telah "melahirkan" banyak sarjana. Penyair ini lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada 28 April 1949. Tulisan ini untuk memperingati hari kematian sang vitalis ini.

CHAIRIL ANWAR yang lahir pada 1922, mulai menulis puisi sejak zaman Jepang. Meskipun demikian, rupanya ia tidak mencari, atau tidak mendapat kesempatan untuk menyiarkan sajak-sajaknya pada zaman itu. Dalam buku *Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45* (1995) HB Jassin, mencatat, sajak Chairil Anwar —selanjutnya disebut CA— yang terbit pada zaman Jepang hanya "Kita Guyah Lemah" itu pun sebagai bagian dari pidato yang diucapkannya pada masa itu.

Sementara itu EU Kratz dalam *Bibliografi Karya Sastra Indonesia dalam Majalah. Drama, Prosa, Puisi* (1988) mencatat, sajak "Siap Sedia" pernah dimuat di *Keboedajaan Timoer* pada zaman Jepang. Sajak-sajak yang lain, antara lain sajak-sajaknya yang terkumpul dalam "Kerikil Tajam", yang ditulis pada zaman Jepang —setidaknya menurut keterangan yang ada di bawah setiap sajak— semuanya terbit sesudah Kemerdekaan.

Dalam pada itu perlu juga dicatat, pada zaman Jepang HB Jassin pernah menulis sebuah esai mengenai sajak-sajak CA dengan mengutip sejumlah sajaknya secara utuh. Hal itu mungkin sekali dilakukan Jassin untuk "menyelundupkan" sajak-sajak penyair yang digambarkannya sebagai ekspresionistis sebab tentunya sajak-sajak semacam itu tidak akan bisa dimuat di majalah yang menekankan pentingnya teknik propaganda dalam kesenian. Dalam esai itu HB Jassin menekankan faktor pembaruan yang ada dalam sajak-sajak CA, yakni cara pengungkapan yang langsung dari gejolak jiwa sang penyair.

CA, seperti juga Asrul Sani dan Rivai Apin, tidak banyak menghasilkan sajak. Ia, seperti juga kedua rekan sezamannya itu, banyak membaca sastra asing. Kuatnya pengaruh larik-larik sajak asing dalam sajak-sajak aslinya, perhatiannya pada saduran, dan ketekunan-nya menerjemahkan membuktikan hal itu. Dalam hubungannya dengan sastra asing, CA tidak menerima pengaruh itu secara pasif. Ia sengaja 'merebut' pengaruh dari apa saja yang dibaca, disadur, dan diterjemahkannya —dan kemudian dipergunakannya untuk tidak hanya mengembangkan tema, tetapi juga untuk menciptakan cara pengungkapan yang baru, "bahasa" yang baru, yang berbeda dari yang dipergunakan oleh para penyair yang sebelum perang menyiarkan sajak-sajaknya terutama dalam majalah *Poedjangga Baroe*, yang tetap juga dipergunakan oleh para penyair di zaman Jepang.

Pada dasarnya menerjemahkan adalah suatu proses menciptakan cara pengungkapan baru dalam bahasa sasaran bagi pengalaman yang terkandung dalam bahasa sumber. Jika pengalaman itu merupakan hal asing juga dalam kebudayaan bahasa sasaran, yang harus dilakukan penerjemah adalah menciptakan cara pengungkapan baru. Proses itulah yang kira-kira terjadi pada CA; dari proses itu lahir "bahasa baru" dalam puisi Indonesia.

Penyair yang berumur pendek ini menulis puisi dengan sejumlah tema yang juga digarap penyair-penyair lain. Ia menulis sajak perjuangan seperti "Siap Sedia", ia pun menulis beberapa sajak sosial, namun sebagian besar sajaknya mengungkapkan konflik batin. Ada suatu masalah yang harus disinggung dalam menafsirkan sajak-sajak penyair ini, terutama yang menurut HB Jassin ditulis di zaman Jepang. Sajak "Aku", misalnya, dijelaskan oleh Jassin bahwa sajak itu pertama kali disiarkan secara lisan dalam Pertemuan Angkatan Muda di

Pusat Kebudayaan bulan Juli 1943. Oleh Pusat Kebudayaan, judul sajak itu diganti menjadi "Semangat" agar temanya bisa dipertanggungjawabkan sebagai perjuangan kolektif. Penjelasan Jassin itu memungkinkan kita kemudian menafsirkannya berdasarkan dua perspektif yang berbeda; pertama sebagai sajak ekspresionis, kedua sebagai sajak sosial. Jika perspektif penafsiran kedua itu kita pakai, sajak itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap propaganda Jepang dalam rangka mengumpulkan kekuatan untuk cita-cita Asia Timur Raya.

"Aku" adalah sebuah sajak yang bertemakan keinginan untuk berjuang mempertahankan hidup, tidak dengan pasrah tetapi dengan cara menantang segala tantangan. *'Kumau tak seorang 'kan merayu'* merupakan ungkapan yang menunjukkan sikap menolak belas kasihan, sekaligus menolak ciri yang banyak ditemani dalam sajak-sajak penyair sebelum perang. Perlu juga dicatat bahwa dalam versi "Semangat", baris itu berbunyi *'kutahu tak seorang kan merayu'* yang tentunya memiliki konotasi kepasrahan.

Jika kita tafsirkan sajak itu dalam kaitannya dengan sajak "Siap Sedia", kita dapat saja menerapkan perspektif yang kedua. "Siap Sedia", yang diberi subjudul 'Kepada Angkatanku', adalah sajak yang mengungkapkan semangat sosial dan politik zaman Jepang, yakni berjuang bersama untuk *'Masyarakat Jaya'* menuju *'kemenangan'* dan *'Bahgia nyata'*, dan *'mengayun pedang ke dunia terang!'*.

Sajak itu, ditambah satu-dua sajak lain seperti "Diponegoro" dan "Persetujuan dengan Bung Karno" merupakan perkecualian dalam perkembangan kepenyairan Chairil Anwar. Tema perjuangan ternyata tidak menarik minatnya dan ia pun mengembangkan gaya penulisan lirik untuk mengungkapkan berbagai konflik batin yang sangat tajam.

***

YANG menarik perhatian da-lam kepenyairan CA adalah bahwa semakin jauh ia memasuki tema konflik batinnya itu, semakin mendekat ia ke bentuk penulisan konvensional. Ini sebenarnya merupakan bukti bahwa hanya setelah melalui tahap eksperimen bahasa yang sangat bebas seorang penyair bisa memiliki kemampuan untuk mempergunakan teknik penulisan konvensional secara baik. Pengertian penting yang terkandung dalam pernyataan itu adalah bahwa eksperimen bahasa bisa dilaksanakan dengan sangat baik dalam batas-batas konvensi yang ada. Hal ini justru merupakan ujian sesungguhnya bagi penyair —mengusahakan pembaruan dan kebebasan namun sengaja berpegang pada konvensi, dan semakin ketat konvensinya, semakin tinggi pula kemampuan kepenyairan yang dituntutnya.

Sajak-sajak seperti "1943", "Nocturno", "Betina-nya Affandi", dan "Situasi", bo-leh dianggap sebagai usahanya mengembangkan gaya penulisan puisi bebas. Namun sebenarnya ditinjau dari segi hasilnya, sajak-sajak itu tidak berbeda dari yang dicapai penyair-penyair sezamannya seperti St Nuraini, Asrul Sani, dan Rivai Apin. Bahkan, bisa dikatakan, dalam beberapa sajaknya, ketiga penyair itu menunjukkan taraf kematangan emosional yang lebih tinggi, meskipun perlu dicatat juga bahwa ketiga penyair itu menulis puisi lebih kemudian. Ada baiknya jika sajak "1943" dikutip secara utuh untuk menunjukkan kecenderungan ke bentuk bebas, salah satu ciri sajak ekspresionistis seperti yang diungkapkan Jassin dalam karangannya.

//Racun berada di reguk pertama/ membusuk rabu terasa di dada/ Tenggelam darah dalam nanah/ Malam kelam-membelam/ Jalan kaku lurus. Putus/ Candu./ Tumbang/Tanganku menadah patah/Luluh/ Terbenam/ Hilang/ Lum-puh./ Lahir/ Tegak/ Berderak/Rubuh/ Runtu/ Mengaum. Mengguruh/ Menentang. Menyerang/ Kuning/ Merah/ Hi-tam/ Kering/ Tandas/ Rata/ Ra-ta/ Rata/ Dunia/ Kau/ Aku/ Terpaku.//

Sajak ini memang merupakan bentuk bebas yang paling ekstrem yang pernah dicoba CA, dan oleh Jassin digambarkan sebagai usaha untuk mengungkapkan langsung apa yang ada di dalam jiwa penyair tanpa saringan maupun polesan apa pun. Ditinjau dari segi lain, sajak itu juga merupakan tanggapan terhadap situasi zaman yang sangat menekan. Kita juga dapat menyatakan bahwa sajak serupa itu, yang ditulis oleh beberapa penyair di awal masa Kemerdekaan sebagai ungkapan semangat perjuangan, jelas merupakan hasil luapan emosi yang tidak terkendali — yang erat kaitannya dengan sentimentalisme.

***

SEPERTI Rivai Apin dan Asrul Sani, CA juga menaruh perhatian terhadap gerakan modernis di Eropa; hal itu antara lain tampak dalam usahanya menerjemahkan sajak TS Eliot "Gerontion". Gerakan modernis yang mulai berkembang di Eropa Barat awal abad ini ter-nyata "baru" didengar oleh pa-ra penyair kita sesudah Kemer-dekaan. Asrul Sani dan Rivai Apin, misalnya, jelas membaca puisi kaum mordenis. Kecende-rungan ke arah modernisme juga tampak dari perhatian CA terhadap citraan visual yang tajam dan penggunaan referensi yang luas. Romeo, Juliet, Ahas-veros, Ave Maria, Tai Po, Eros, Affandi, Masyumi, Muhammadiyah, dan Isa membuktikan bahwa dalam banyak sajaknya penyair ini mempergunakan referensi untuk menyampaikan konsep tanpa banyak memper-gunakan kata.

Namun, hal yang tidak banyak ditekankan adalah perkenalan CA —dan perhatiannya yang sungguh-sungguh— terhadap puisi klasik. Ia tidak hanya menerjemahkan sajak TS Eliot, tetapi juga sajak RM Rilke; ia

tidak hanya menerjemahkan sajaksajak yang bebas gaya penulisannya, tetapi juga sajak-sajak yang disusun dalam bentuk-bentuk tetap seperti kwatrin.

Sajak "P.P.C" karya E Du Perron diterjemahkannya ke dalam kwatrin —seperti aslinya— dengan mempertahankan rimanya sepenuhnya. Rupanya dalam menerjemahkan bentuk-bentuk tetap itulah ia mendapat pengalaman yang berharga; mudah dibayangkan bahwa menerjemahkan bentuk tetap memberikan tantangan dan tuntutan yang lebih besar dibanding menerjemahkan bentuk bebas. Kwatrin lebih sulit diterjemahkan dari pada sajak bebas; pantun hampir tidak mungkin diterjemahkan; dan *wangsalan*, salah satu jenis puisi tradisional Jawa, sama sekali tidak bisa diterjemahkan. Itulah sebabnya CA sejak semula tidak meninggalkan usaha untuk mengungkapkan penghayatannya terhadap kehidupan dalam bentuk-bentuk tetap. "Kabar dari Laut" yang menurut Jassin ditulis pada 1946, mempergunakan bentuk soneta. Dalam sajak ini jelas sekali bahwa bentuk tetap itu mampu meredam gejolak emosi yang berlebihan. Kita kutip saja sajak itu sepenuhnya.

//Aku memang benar tolol
ketika itu,/ mau pula membikin
hubungan dengan kau;/ lupa
kelasi tiba-tiba bisa sendiri di
laut pilu./ berujuk kembali
cerita dan peristiwa berlaku/
beku //

Jika larik ke-4 digabungkan ke bait pertama dan larik ke-8 digabungkan ke bait kedua, sajak tersebut menjadi kwatrin yang sempur-mna aturannya, yakni berima a-b-a-b. Rahasia ter-penting dalam ke-hidupan, yakni maut, muncul dengan tegas dalam sajak ini, bebas dari emosi yang berlebihan, bebas dari sentimentalisme. Rahasia yang sama muncul dengan lebih tegas dalam sajak "Derai-derai Cemara," yang juga mempergunakan kwatrin yang boleh dikatakan sempurna. Jika dalam "Yang Terampas dan Yang Luput" masih dikatakannya *'aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu'* dalam "Derai-derai Cemara" ia menyadari bahwa *'ada yang tetap tidak dicapkan/sebelum pada akhirnya kita menyerah."* Sajak ini menutup pembicaraan tentang CA.

//cemara menderai sampai
jauh/ terasa hari jadi akan ma-
lam/ada beberapa dahan di
tingkap merapuh/ dipukul a-
ngin yang terpendam//

//aku se-karang orangnya
bisa tahan/ su-dah lama bukan
kanak lagi/ tapi dulu memang
ada suatu bahan/ yang bukan
dasar perhitungan kini//

//hidup hanya menunda ke-
kalahan/ tambah jauh dari cinta
sekolah rendah/ dan tahu, ada
yang tetap tidak diucapkan/ se-
belum pada akhirnya kita me-
nyerah//

Dalam sajak ini alam menjadi latar yang menciptakan suasana dan sekaligus berfungsi sebagai lambang. Pikiran dan renungan mengenai kehidupan disusun dalam bentuk tetap yang ketat, diungkapkan dalam bahasa yang jernih sehingga berubah menjadi penghayatan. Sajak ini adalah salah satu hasil tertinggi yang dicapai CA dalam kehidupan kepenyairannya karena ia telah berhasil menguasai konvensi dan memberinya jiwa dengan menciptakan citraan, majas, dan tema baru. Sajak ini merupakan bukti bahwa keunggulan seorang penyair, dan seniman pada umumnya, tidak terutama terletak pada usahanya membebaskan diri dari kungkungan konvensi, tetapi pada keberhasilannya dalam menciptakan ruang gerak untuk melaksanakan kebebasan dalam kungkungan konvensi.

*)*Guru besar FS-UI, penyair, kritikus sastra.*

dengan tujuan biru.//

//Di tubuhku ada luka
sekarang,/ bertambah lebar juga
mengeluar darah,/ di bekas dulu
kaucium nafsu dan garang;/ lagi
aku pun sangat lemah serta me-
nyerah.//

//Hidup berlangsung antara
buritan dan kemudi./ Pem-
batasan cuma tambah menya-
tukan kenang.// Dan tawa gila
pada wiski tercermin tenang//

// Dan kau? Apakah ker-
jamu sembahyang dan memuji,/
/Atau di antara mereka juga
terdampar,// Burung mati pagi
hari di sisi sangkar?//

Hal yang sama berlaku juga untuk sajak "Tuti Artic", sebuah sajak yang juga disusun dalam soneta. Bentuk kwatrin yang lengkap dengan rima dipergunakannya dalam sajak "Senja di Pelabuhan Kecil" yang ditujukan kepada Sri Ajati. Terasa sekali bahwa di dasar sajak ini, yang barangkali sumber il-hamnya tidak berbeda dengan "Kabar dari Laut", ada gejolak emosi yang sangat kuat, namun diredam dalam kwatrin yang ketat, yang memper-gunakan rima yang ketat pula. Dalam kedua sajak itu citraan laut juga sangat dominan; dalam sajak "Kabar dari Laut" hidup digambarkan berlangsung antara buritan dan kemudi, dalam "Senja di Palabuhan Kecil" laut digambarkan tidak bergerak, tidur, hilang ombak."

Dua sajak yang disiarkan dan ditulisnya pada 1949 adalah "Yang Terampas dan Yang Putus" dan "Derai-derai Cemara". Dalam kedua sajak itu tampaknya CA telah menemukan cara pengungkapan yang tepat untuk penghayatannya terha-dap kehidupannya. Sajak pertama kita kutip seluruhnya.

//Kelam dan angin lalu
mempesiang diriku,/ meng-
gigir juga ruang di mana dia
yang kuingin;/ malam tam-
bah merasuk, rimba jadi se-
mati tugu//

//di Karet, di Karet
(daerah-ku y. a. d.) sampai juga
deru/ angin//

//Aku berbenam dalam ka-
mar, dalam diriku jika kau
datang/ dan aku bisa lagi lepas-
kan kisah baru padamu;/ tapi
kini hanya tangan yang
bergerak lantang//

//tubuhku diam dan sendiri.

DANARTO

"Semuanya Tidak Laku"

Pengantar

MESKI menghasilkan cerpen dan naskah drama dengan judul aneh-aneh — sebuah cerpennya hanya bergambar jantung yang ditembus anak panah, sebagai judulnya — tapi hidup kesehariannya biasa-biasa saja, seperti "orang biasa" lainnya. Tidak bersikap sok nyentrik.

Tapi, dalam proses melahirkan karya, ***Danarto*** *memang punya keunikan. "Saya sendiri, biasanya, mulai dengan mencorat-coret membuat gambar, sketsa. Dari coret-coret ini lahir tema cerita, alur, tokoh-tokoh, tempat kejadian, hubungan antar tokoh, karakter tokoh, dan lain-lainnya," katanya, kepada wartawan* Merdeka, ***Irwan****, yang mewawancarai di ruang kerjanya di gedung Balai Budaya, Jakarta.*

Dilahirkan di Sragen, Jawa Tengah, 27 Juni 50 tahun lalu, Danarto pernah menekuni bidang seni lukis di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta. Selain panggung pementasan teater, beberapa film nasional juga pernah ditangani tata artistiknya.

Hingga kini, Danarto telah menghasilkan empat kumpulan cerpen, yakni Godlob *(1975),* Adam Ma'rifat *(1982),* Berhala *(1987), dan* Gergasi *(1993). Menurut pengakuannya sendiri, inilah bukti kemalasannya sebagai seorang penulis cerpen, jika dibandingkan dengan para penulis lain. Namun, penghargaan yang diterima Danarto bukan hanya dari dalam negeri. Pemerintah Thailand, misalnya, memberinya "SEA Writes" (1988).*

Selama empat bulan, pada 1976, sastrawan ini mengikuti International Writing Program *di Iowa City, Amerika Serikat. Kemudian, selama setahun (1989-1991) menulis novel berjudul* Asmaraloka *waktu berada di negeri sakura Jepang, atas bantuan Japan Foundation. Dan sebagai art dorector,* ***Sardono W. Kusumo****, pada 1974, membawanya melawat ke Eropa Barat dan Eropa Selatan serta Iran.*

Sejak tahun 1973 hingga 1984 Danarto mengajar di Institut Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (IKJ-TIM). Sekarang ia bekerja secara serabutan, di samping masih menyempatkan diri, sebagai kolumnis. Di sinilah, menurut pengakuannya, dia mendapatkan kebebasan.

Berikut petikan percakapan Danarto dengan Irwan.

Meditasi di sini bukan berarti masuk kamar sendirian, lalu ber*zikrullah*. Bermeditasi itu luas artinya. Sebenarnya semua penulis bermeditasi jika berangkat menulis. Artinya, memusatkan pikiran hanya untuk menulis katika ia duduk di depan komputer, atau menulis dengan tangan di atas kertas. Saya sendiri, biasanya, mulai dengan mencoret-coret membuat gambar. Sketsa. Dari coret-coret ini lahir tema cerita, alur, tokoh-tokoh, tempat kejadian, hubungan antar tokoh, karakter tokoh, dan lain-lainnya.

Sebagai sastrawan sufi, menurut Anda mengapa — semoga ini praduga yang salah — perkembangan sastra sufistik sedikit ketinggalan dengan sastra non sufi ?

Pertama, praduga Anda memang salah. *Kedua*, pertanyaan Anda juga kurang benar. Dalam dunia kesusastraan, maupun cabang kesenian yang lainnya, tidak ada ukuran bahwa sastra yang ini lebih maju dengan sastra yang itu. Begitu juga yang terjadi dalam dunia estetis lain seperti tari, film, teater, seni rupa, seni musik, ataupun seni multi media.

Misalnya saja gamelan film Suka Hardjana yang dikembangkan dalam filmnya Garin Nugroho, *Bulan Tertusuk Ilalang*, tidak dengan sendirinya lebih mundur dalam peta musik dunia, meski saat ini, musik dunia didominasi oleh musik-musik garda depan. Karena apa?

Karena grup-grup gamelan marak di seluruh dunia yang ditabuh oleh para musisi bule, merupakan konser-konser serius yang juga besar kontribusinya bagi pembaharuan jagad musik dunia.

Dewasa ini, di dunia, terjadi paralelisme pemikiran antara yang "tradisi" dengan yang "garda depan". Dalam dunia sastra di tanah air, alur sejarah sedang menyatu antara "sastra sufistik" dengan "sastra sosial".

Puisi *Tanah Air Mata* karya Sutardji Calzoum Bachri, contohnya, merupakan kemanunggalan antara sastra sufistik dengan sastra sosial. Karya-karya yang senapas dengan puisi ini, banyak ditulis oleh penyair tua maupun yang lebih muda.

Mengapa jarang sekali sastrawan yang menerjuni sastra sufisme?

Lho, Anda ini mengikuti perkembangan apa tidak? Sebenarnya para *jawara* penyair kita itu, adalah para penyair sufistik. Dalam kriteria *Angkatan 70*, telaah Abdul Hadi WM, mereka itu adalah Taufiq Ismail, Kuntowijoyo, Mohamad Fudoli, Sonny Farid Maulana, Sapardi Djoko Damono, Sutardji Calzoum Bachri, Hamid Jabbar, Slamet Soekirnanto, Emha Ainun Nadjib, Jamal Rachman, Ahmadun Hertanda, Abidah Chalieqy, Ulfatin, Ahmad Nurullah, Ahmad Subanuddin Alwy, Zawami Imron, dan masih sekian lagi.

Anda kurang produktif, khususnya menulis cerpen. Mengapa?

Wah, sejak dulu saya ini memang tidak produktif. Saya ini memang pemalas. Coba, saya yang sudah setua ini, cuma punya empat buku cerpen, *Godlob*, *Adam Ma'rifat*, *Berhala* dan *Gergasi* yang semuanya tidak laku. Meskipun diantaranya jadi buku pegangan di universitas, tapi tidak menarik minat para mahasiswa untuk mengoleksinya.

(Tatkala belajar di ASRI, Danarto sudah bergabung dengan "Sanggar Bambu", grup seniman yang aktif melakukan pameran keliling khususnya seni lukis.

Dan, sejak di Yogya, dia sudah mulai membantu-bantu pementasan, walaupun di belakang layar. Pengalamannya ini dikembangkan lagi sejak dia pindah ke Jakarta, khususnya di zaman Orde Baru. Banyak pementasan drama yang terpenting di TIM oleh tokoh-tokoh seperti Rendra, Arifin C. Noer dan Putu Wijaya, settingnya digarap Danarto.

Sedangkan di antara judul dramanya yang aneh, adalah, *Obrok Owok-owok, Ebrek Ewek-ewek dan Bel Geduwel Beh*. Dia pernah pula menggelar sebuah pameran lukisan. Tapi, pameran yang diberi nama "Kanvas Kosong" itu, semuanya serba putih.

Selain Amerika Serikat, negara lain yang dikunjungi — karena diundang — untuk keperluan yang berkaitan dengan puisi, adalah Belanda. Di Negeri Kincir Angin ini, Danarto menyaksikan International Poetry Reading di Rotterdam. Dari situ dia terus ke Paris, Perancis.)

Apakah dalam menggali ide, Anda juga melakukan meditasi?

Meditasi di sini bukan berarti masuk kamar sendirian, lalu berzikrullah. Bermeditasi itu luas artinya. Sebenarnya semua penulis bermeditasi jika berangkat menulis. Artinya, memusatkan pikiran hanya untuk menulis katika ia duduk di depan komputer, atau menulis dengan tangan di atas kertas.

Saya sendiri, biasanya, mulai dengan mencoret-coret membuat gambar. Sketsa. Dari coret-coret ini lahir tema cerita, alur, tokoh-tokoh, tempat kejadian, hubungan antar tokoh, karakter tokoh, dan lain-lainnya.

(Dalam makalahnya, berjudul tujuh kata "proses", Danarto mengemukakan, daerah penciptaan itu netral. Seperti ruang kosong di mana kita bisa mengisinya sebebas-bebasnya. Dengan apa saja. Ruang kosong itu murni. Ia tak terikat hukum. Ia tak tahu-menahu tentang ikatan dan ketidakterikatan. Ruang kosong itu mirip tembok. Duapuluh tahun wajah kita dihadapkan pada tembok yang dingin itu, dengan bersila. Boleh jadi. Tapi lalu kita berdalih bahwa penciptaan itu harus didasari oleh begini, oleh begitu. Karena itulah kita jadi terbatas.

Barang tentu kita harus belajar dari anak kecil. Yang habis menaburkan bunga di dalam tariannya yang seolah-olah seorang Hindu. Lalu mengenakan mukena karena dia sembahyang lima waktu. Kemudian menyanyi *happy birtday to you* di rumah temannya yang biasa membuat tanda salib di dadanya, hingga ia sepertinya tak beda dari temannya.

Itulah anak kecil dan itulah daerah penciptaannya? Ayah ibunya mensyukurinya, "Hmm, betapa anak kita". Begitu mengertinya. Begitu puasnya. Lalu lembaran-lembaran selanjutnya diisi kesuksesan. Daerah penciptaan itu seperti menyaksikan hal-hal sukses saja.

Siapa saja dapat menggunakannya. Daerah penciptaan itu tidak diperebutkan. Ia bebas. Ia tak habis-habisnya. Berapa saja kita kantongi daripadanya,

ia tak berkurang. Tak pernah. Ia tak perlu daripadanya seseorang mengklaim. Sebab daerah itu ada di depan hidung kita. Bukan. Maksudku di depan saku kita Hanya yang diperlukan ketangkasan dalam melipatnya. Menggunakannya. Ketika kita berusaha keras menjamahnya, ia hanya tersenyum. Ia begitu arif. Ia begitu menantang kita. "Apakah kamu kenal betul denganku," ujarnya, seolah mengingatkan kita, apakah kita sudah siap.

Perbedaan pendapat di antara kita hanya membuat daerah penciptaan itu semakin sederhana. Ia tangan yang terentang yang mau menerima kita. Ia hidung yang sujud mencium tanah, untuk mensyukuri. Ia kaki yang bersimpuh, ia kuat sekali untuk memberi hormat. Ia memberi contoh.

Apa bekal kita cukup untuk menggarapnya? Hingga ketika Budha menunjuk ke serumpun kembang liar, bukan hanya Mahakasyapa seorang yang siap menerima *satori*. "Cahaya itu untuk siapa saja. Kalian," serunya tanpa berkedip. Hingga bukan saja Al Hallaj saja seorang yang sanggup berteriak-teriak di pasar, "Sembunyikan aku dari Allah, hai orang-orang. Sembunyikan aku dari Allah. Ia mengambilku dariku dan tak mau mengembalikannya padaku ...."

Apakah daerah penciptaan itu selalu tersenyum. Hingga ia akan selalu mengusap batok kepala kita, kalau kita "mencoba macam-macam". Ia tak kenal "isme-isme Barat". Ia tak kenal "Borobudur", "Wayang kulit", atau "Bedoyo". Sebab, semuanya itu godaan. Barat dan Timur? Lupakanlah itu, barang itu tak pernah ada.

Mungkin yang dibutuhkan adalah kita yang tiba-tiba "datang dari langit". Seperti seorang bayi. Dan ruang kosong dengan seorang bayi memang mirip kertas putih. Tak berbicara apa-apa. Mereka sudah mengatakannya banya sekali, dengan diam.

Ia menyajikan banyak sekali, rumah tangga, protes sosial, lumut, awan dan juga yang tidak nampak. Ia tak memerlukan seseorang di antara kita untuk memberi ketegasan bahwa sebuah di antara sesajian itu adalah yang terbaik. Ia bahkan akan menukas, "Apakah di antara anggota badanmu ada sebuah yang terbaik?"

Di tangan seorang ahli, daerah penciptaan adalah daerah subur, di mana ia kenal betul, siap betul, untuk menjawab tantangannya. Bahwa yang dibutuhkan hanyalah sebuah karya yang baik. Dan suatu karya yang baik bukanlah untuk rakyat atau bukanlah untuk bukan rakyat. Atau bukan untuk lumut atau bukanlah untuk bukan lumut. Apakah ada semuanya itu?

Dan ketika Beethoven menulis komposisi musiknya dengan berkerut, tidak mungkin kita melontarkan keheranan kita dengan, "Bagaimana mungkin mencipta dengan berkerut?" Apakah ada berkerut dan tidak berkerut? Dan ketika Picasso melukis dengan api di udara melompong, tak mungkin kita melontarkan keheranan dengan, "Bagaimana mencipta seperti anak-anak?" Apa ada seperti kanak-kanak dan bukan seperti kanak-kanak? Semuanya cumalah hukum yang dibikin-bikin manusia saja.)

Sufisme membentangkan jalan bebas hambatan yang siapa pun bebas untuk melaluinya. Menjanjikan suatu udara, lapangan, ruangan dan alam yang bebas polusi. Dari sini pendekatan kita juga membawa syarat bahwa kita juga bebas dari kontaminasi "limbah budaya".

Daerah operasional sufisme itu seluas bumi dan langit. Ia membangun akhlak, moral, ketahanan, keyakinan, ilmu pengetahuan, keadilan, kemakmuran, hak asasi, demokrasi. Orang yang menyelam di dalamnya, tidak pernah merasa sebagai agen tunggal kebenaran.

Manusia adalah suci bagi manusia yang lainnya. Setiap orang memiliki kebenarannya sendiri-sendiri, sehingga pluralisme memberikan kewenangan setiap orang dapat menafsirkan Alquran dan Sunah Rosul menurut persepsinya sendiri.

Dalam karya-karya Anda seperti* Godlob, Berhala, Gergasi, *pembaca merasakan seperti diajak berenang ke samudera luas tanpa batas. Dalam berenang itu, tidak jarang dijumpai kejadian-kejadian* aeng-aeng, *aneh-aneh, sepertinya tidak berpijak di atas bumi. Apakah itu ciri sufisme — penuh dengan ketidakrealitaan?

Tidak. Hal itu cuma salah satu cara untuk mencapai suatu situasi tertentu. Masing-masing penulis punya gaya sendiri-sendiri. Gaya ini dikembangkan yang menjadikan seorang penulis berbeda dengan penulis lainnya. Semacam pandangan hidup penulis, atau filsafat penulis. Para pembaca lalu bisa mengenalinya, tanpa dicantumkan nama pengarangnya, pembaca mengetahui siapa penulisnya kerena dapat merasakan gaya berceritanya.

Sufisme adalah sikap hidup,

Saya mempunyai kisah nyata. Begini, saya naik bis kota mau Jumatan. Di dalam bis, saya lihat seorang ibu menangis karena kecopetan. Dua anak gadisnya yang kecil-kecil ikut menangis. Melihat pemandangan seperti itu saya tergetar. Di saku saya ada dua lembar Kartini (sepuluhribuan). Inilah "saat sufisme" yang menentukan. Haruskah saya bagi uang saya dengan ibu itu, atau tidak? Ternyata saya terenggut. Saya kalah oleh ketakutan akan kelaparan dan kemiskinan.

pandangan hidup. Dari kacamata sufisme, seorang penulis menyikapi dunianya. Karenanya, sufisme menjadi sikap sehari-hari dalam membangun keluarga dan lingkungan yang berkait dengan sosial budayanya. Puisi Tardji dengan puisi Taufiq jelas berbeda gayanya. Puisi Taufiq "puisi terang", sedang puisi Tardji "puisi gelap".

Dalam perjalanan pentasawufan diri Anda, langkah mudah mengawalinya, dulu, seperti apa?

Saya mempunyai kisah nyata. Begini, saya naik bis kota mau Jumatan. Di dalam bis, saya lihat seorang ibu menangis karena kecopetan. Dua anak gadisnya yang kecil-kecil ikut menangis. Melihat pemandangan seperti itu saya tergetar. Di saku saya ada dua lembar Kartini (sepuluhribuan). Inilah "saat sufisme" yang menentukan.

ngemukakan hal itu pada konferensi pers di Kairo, Jumat (5/5).

Sementara itu, sindikat kejahatan dari berbagai negara, seperti Mafia, Triad, dan Yakuza, di-laporkan telah membentuk aliansi internasional. Sasaran pertama yang "digoyang" adalah negara-negara di Afrika Utara, yang kini stabilitasnya menjadi terancam.

Meniawab pertanyaan, memenempuh ujian sufisme.

(Nama Danarto segera mencuat setelah memunculkan cerpennya yang judulnya sebuah berupa gambar jantung terpanah di majalah "Horison", terpillih sebagai cerpen terbaik majalah sastra tersebut tahun 1968, cerpen itu kini menjadi salah satu cerpen dalam kumpulan *Godlob*. Kumpulan cerpen *Godlob* pertama kali terbit, pada tahun 1975, tiga tahun kemudian digariskan oleh Harry Aveling yang memberi julukan Danarto sebagai seorang "Master".

Burton Raffel — seorang pengamat sastra Amerika — dalam The Asian Wall Street Journal, 1980, memberi komentar, bahwa barangkali yang paling menarik adalah eksperimental Danarto. Cerpen-cerpennya mempersonakan dan melebihi cerpen-cerpen terbaik Eropa dan Amerika dewasa ini. Sedangkan Prof Dr A. Teeuw, dalam bukunya berjudul Modern Indonesia Literature II menulis, cerpen-cerpen Danarto mewakili jenis pembaharuan cerpen Indonesia.)

Bisa Anda ceritakan mengapa Anda menerjuni dunia sufistik ?

Di dalam sufisme itu, kita bisa menyelam alam spiritual yang dalam, sangat dalam. Itulah alam sumber ilmu pengetahuan. Kita bisa mengerti tentang suatu hal yang sebelumnya sangat pelik, untuk bisa dipahami.

Merdeka, 7 Mei 1995

Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono
Pengajar Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Banyak Buku yang Terlalu Jelek untuk Dibaca

Jadi, kalau ada pihak-pihak yang mengeluh tentang rendahnya minat baca anak, masalahnya bukan anak-anak yang tidak mau membaca buku. Barangkali persoalannya karena banyak buku yang diniatkan ditujukan pada mereka diproduksi sedemikian jeleknya sehingga anak-anak itu tidak tertarik.



Saat bicara tentang rendahnya tingkat baca di Indonesia, orang sering mengaitkannya dengan rendahnya budaya baca di masyarakat kita?

Yang sering dituding memang biasanya adalah budaya membaca buku yang dianggap belum menjadi bagian dari kehidupan sehar-hari. Sering dikatakan, sebelum kita sempat memiliki budaya baca, kita sudah harus menghadapi budaya lain, seperti budaya menonton tv.

Namun kita juga harus melihat kenyataan bahwa sebenarnya upaya mengembangkan budaya baca buku sudah dikembangkan sejak awal abad ini. Itu ditunjukkan dengan dibangunnya sekolah-sekolah formal di jaman Belanda, ataupun lahirnya penerbit-penerbit swasta di masa itu. Apalagi kemudian pemerintah Hindia Belanda pun mendirikan *Balai Pustaka*. Itu semua mengarah pada pembangunan budaya baca.

Saat ini pun kita melihat banyaknya anggota IKAPI. Itu menunjukkan bahwa buku tetap diproduksi dan dijual, dan itu berarti tetap ada pasar pembaca. Penerbitan tidak menjadi bisnis yang dihindari, namun terus dikembangkan. Artinya, memproduksi buku masih merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan.

Yang jadi masalah sekarang, bisnis buku itu tidak tersebar luas dan mungkin tidak berkembang seperti yang diharapkan. Tapi penyebabnya bisa beragam, dan bukan cuma soal ketiadaan budaya membaca buku. Mungkin itu berkaitan dengan kenyataan bahwa kita tak menguasai secara baik sistem penerbitan, sistem jaringan distribusi, sistem penyebarluasan buku, dan sebagainya. Barangkali juga ada soal kendala geografis negara kita. Itu semua turut mengkondisikan tingkat baca buku masyarakat.

Bagaimana dengan budaya membaca di kalangan anak-anak?

Sekarang kan bisnis buku anak-anak justru sering dianggap sebagai bisnis yang berhasil? Ini menyehatkan, karena yang menjadi sasaran ialah generasi yang potensial, yaitu anak-anak itu sendiri.

Jadi, kalau ada pihak-pihak yang mengeluh tentang rendahnya minat baca anak, masalahnya bukan anak-anak yang tidak mau membaca buku. Barangkali persoalannya karena banyak buku yang diniatkan ditujukan pada mereka diproduksi sedemikian jeleknya sehingga anak-anak itu tidak tertarik. Kita tahu anak-anak dan remaja tidak mau membaca buku yang tidak menarik mereka. Mereka harus digoda untuk berminat terhadap sesuatu. Ini bukan hanya berlaku pada buku tetapi juga pakaian, sepatu atau apa saja. Pada dasarnya, mereka itu suka mode. Kalau buku anak-anak dikemas secara baik, pasti anak-anak itu akan tertarik.

Mungkinkah membaca buku suatu saat menjadi budaya yang umum di Indonesia?

Saya kira bisa saja, asal kita berusaha dengan benar, menyadari profesionalisme di bidang itu. Jadi tidak gegabah dan mau untung secara cepat dalam waktu singkat. Buku komik anak-anak, misalnya, seringkali terjemahannya pun nggak keruan kok. Kasihan anak-anak sulit untuk memahaminya. Tujuannya cuma cepat-cepat cari untung sesaat.

Jadi penerbit seharusnya bersikap lebih profesional?

Ya, buku adalah komoditas, karena itu harus diperlakukan sebagaimana layaknya barang dagangan. Tapi mungkin masalahnya juga para produsen ini kurang modal, sumberdaya manusia, ketrampilan, dan sebagainya.

Peranan pemerintah dalam hal ini?

Memang susah. Pemerintah sendiri kan punya perusahaan penerbitan, Balai Pustaka. Tapi keadaannya sama saja dengan penerbitan yang lain. Mungkin profesionalisme kurang di situ. Jadi, pemerintah juga seharusnya memandang itu dalam kacamata bisnis. Karena bisnis, mereka harus mampu menolong dirinya sendiri.

Bagaimana dengan masuknya buku-buku impor?

Itu lagi-lagi menunjukkan persoalannya bukan pada budaya buku, melainkan pada bagaimana cara mengemas. Kita tidak mengemas buku kita dengan baik, sementara buku impor dikemas dengan baik: dari fisik sampai isi. Sampulnya menarik, ceritanya masuk akal, tidak sembarang tulis menarik dibaca, dan sebagainya. Itu suatu keharusan karena itu bisnis. Kalau tidak menarik, ya tidak laku.

Tidak perlu ada upaya agar konsumen Indonesia lebih mengutamakan karya dalam negeri?

Kalau buku karya bangsa sendiri jelek, buat apa ia baca? Apalagi sekarang ini, kalau buku memang menjadi kebutuhan, buku berbahasa Inggris pun akan kita cari.

Bagaimana pengaruh tv dalam hal ini?

TV bisa dikatakan saingan, tapi bisa juga saling mendukung. Contoh sederhana misalnya, orang jadi berniat membaca buku *Sitti Nurbaya*, setelah melihat sinetronnya di tv. Kemudian orang ingin membaca *Forrest Gump* karena filmnya mendapat hadiah Oscar. Sebaliknya, orang juga bisa menjadi ingin menonton film setelah membaca sebuah buku yang bagus.

Di pihak lain, tv bisa juga jadi saingan. Menonton tv memang jauh lebih mudah daripada membaca buku. Namun ingat, jika buku telah memasuki kehidupan kita, ia akan lebih berpengaruh daripada tv. Karena menonton tv adalah sebuah kegiatan yang tak sepenuhnya membutuhkan konsentrasi. Itu bisa dilakukan sambil makan, mengobrol, dan sebagainya.

Rendahnya tingkat baca buku kita juga berkaitan dengan harga buku?

Ini memang dianggap masalah, meskipun sebenarnya harga buku kita itu masih relatif murah. Maksud saya, harga buku terjemahan di sini bisa lebih murah dari buku aslinya di luar. Jadi soal harga hanya menjadi masalah bagi sebagian orang. Saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya.

Bagaimana budaya membaca buku di kalangan mahasiswa?

Saya kira masalahnya sama saja, baik di sini maupun di luar, apalagi di negara-negara yang sistem pendidikannya sudah maju. Mereka tidak punya waktu untuk membaca buku di luar bahan kuliahnya. Jadwal mereka ketat, sementara mereka juga tidak punya uang untuk membeli buku.

Selain itu, peran perpustakaan sangat penting. Di negara-negara maju, mahasiswa tidak membeli buku tetapi

membacanya di perpustakaan. Karena itu sangat sulit mengharapkan mahasiswa — di negara manapun — banyak membeli buku. Lihatlah, kalau ada buku *best seller*, kebanyakan yang membelinya bukan mahasiswa, tapi kalangan lain.

Bagaimana dengan mahasiswa Indonesia?

Masalahnya sekarang, apakah dosen-dosen di perguruan tinggi itu sudah memberikan tugas-tugas yang benar pada mahasiswa? Apa dosen-dosen itu sudah puas kalau mahasiswa hanya mendengar pidatonya, atau lebih menekankan pada bacaan yang ditugaskannya pada mahasiswa. Peran dosen atau pengajar dalam hal ini sangat penting. Bagi mahasiswa, kalau dengan cara begitu-begitu saja sudah bisa lulus, ya sudah. Dan dia tidak salah, karena memang dia sekolah untuk lulus.

Masalah lain ialah, apakah buku-buku memang sudah tersedia dengan baik. Misalnya, apakah buku-buku ilmu politik yang berbahasa Indonesia sudah memadai jumlahnya. Kalau kita memaksa mahasiswa membaca buku-buku berbahasa Inggris, itu impian di tengah hari bolong. Dosennya saja tidak mau membaca buku berbahasa Inggris, apalagi mahasiswanya.

Kalau hanya memarahi mahasiswa tidak ada gunanya. Sediakan perpustakaan yang cukup. Sadarkanlah universitas-universitas dan rektor-rektor untuk memikirkan perpustakaan. Jangan hanya mementingkan gedung dan ruang-ruang kuliah. Perpustakaan harus lebih besar dari gedung-gedung yang lain. Perpustakaan di kampus tampaknya tidak memberikan kemudahan, baik dalam hal jam bukanya, sistem peminjamannya, letaknya. Padahal jantung universitas ialah perpustakaan.

Bagaimana peran penulis buku?

Ini hal yang tak pernah dibicarakan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara mengenai minat membaca buku, kita juga harus bicara soal sumber dayanya. Yang menjual memang penerbit, tapi yang menghasilkan buku adalah penulis.

Penulis itu kan berada dalam suatu sistem yang besar. Pernahkah dilihat prosesnya seperti apa, kelemahannya di mana, cara merekrutnya bagaimana?. Apakah penerbit sudah mengatur sistem ini sehingga mereka bisa menghasilkan buku yang baik? Penulis tidak bisa diperas saja. Untuk menulis buku baik, diperlukan otak. Terus terang, ini yang absolut bagi saya. Untuk menghasilkan sebuah buku, dibutuhkan pemikiran, waktu, tenaga. Karena itu, kalau kita serius ingin menghasilkan buku-buku baik, setiap tahap pembuatannya harus dipersiapkan dengan baik.

■ Pewawancara: Karina Anom

Republika, 8 Mei 1995

Arief Budiman, Goenawan Mohamad dan Emha Bikin "Pernyataan Mei"

Jakarta, Jumat, Mdk

Puluhan seniman dan budayawan berkumpul di sebuah cafetaria di TIM (Taman Ismail Marzuki) Jakarta, Jumat siang (12/5) untuk mendengarkan "Pernyataan Mei." Pernyataan ini ditandatangani sekitar 42 orang dari berbagai kalangan yang bergerak di bidang seni dan budaya, dengan penggagas **Arief Budiman, Emha Ainun Nadjib, Goenawan Mohamad, dan WS Rendra.**

Penandatangan "Pernyataan Mei" itu, menurut catatan panitia ialah **AA Navis, AS Laksana, Afnan Malay, Andarmanik, Andreas Harsono, Arief A, Ariel Heryanto, Arifin C Noer, Bambang Isti Nugroho, Budiawan, Budiman S Hartoyo, Dadang Christanto, Dwi Kuncoro, Eko Winardi, Enin Supriyanto, Garin Nugroho, HB Jassin, Jajang Pamoncak, Leila Ch Budiman, M Fadjroel Rachman, M Faried Cahyono, Mahbub Junaedi, Mahfudz, Nirwan Dewanto, Otto Adi Yulianto, Prasojo, Ratna Sarumpaet, Restu Imansari K, Rustam F Mandayun, Satyagraha Hoerip, Sitok Srengenge, Soedjoko, Sori Siregar, Subagyo Sastrowardojo, Suprobo, TJ Wibowo, Toto Rahardjo, Ulil Absor Abdalla.**

Acaranya dibuka oleh moderator dialog, Sitok Srengenge. Setelah itu sang penyair WS Rendra langsung mengungkapkan berbagai hal dari permasalahan rakyat kecil hingga pemerintah.

WS Rendra yang biasa dipanggil Willy menerangkan akan hak bicara, berekpresi dan menampilkan karya-karya tanpa ada unsur penekanan dan pemaksaan dari aparat pemerintah. Karena dia

masih mengalami hal tersebut di beberapa tempat pada beberapa waktu lalu.

Seusai Willy berbicara panjang lebar, giliran Goenawan Mohamad yang tampil. Ia berbicara tentang keadaan pers di sini.

Goenawan yang akrab dipanggil GM ini menerangkan bahwa Pernyataan Mei ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan dengan manifestasi kebudayaan tahun 1964.

"Kita ingin mengeluarkan pendapat apa saja dengan merdeka dan sesuai aturan hukum yang berlaku," sambung Emha.

Pernyataan Mei itu, demikian disebutkan dalam tulisan yang disebarkan oleh panitia, dimaksudkan untuk mengimbau agar kita belajar dari suatu peristiwa yang terjadi lebih 30 tahun yang lalu. Pada tanggal 8 Mei 1964, pemerintah Indonesia melarang *Manifes Kebudayaan*, sebuah dokumen yang menekankan kemerdekaan mencipta.

Ditambahkannya bahwa pada masa itu suatu usaha pembersihan dilakukan terhadap para seniman dan cendekiawan Indonesia yang menandatangani *Manifes Kebudayaan* atau yang dikenal dengan Manikebu atas cemoohan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka yang menandatanganinya tidak boleh menerbitkan atau memamerkan karya-karyanya kepada masyarakat oleh penguasa saat itu. Malah mereka dipecat atau dipaksa untuk mengundurkan diri dari tempatnya bekerja.

Dengan adanya hal itu, bangsa Indonesia memasuki satu masa yang kehilangan toleransi untuk berbeda pendapat. Indonesia menyaksikan suatu hal yang justru tak tampak pada tahun awal Republik. Sejak Demokrasi terpimpin dipraktekan maka berkecamuklah semangat untuk melarang hal yang berlainan atau yang dianggap berlainan oleh penguasa.

Diceritakan pula bahwa pada masa itu kemerdekaan berekpresi pun dianggap berbahaya, keanekaragaman diharuskan mengikuti satu pola.

Dalam pelbagai segi, politik sebagai panglima diberlakukan. Kami menolak hal itu bukan berarti seniman dan intelektual harus tidak memperdulikan politik. Sebab dalam sejarah terbukti asas tersebut telah menyingkirkan dan menghabisi sumber-sumber artistik dan intelektual yang layaknya berkembang di suatu bangsa. Kita tidak ingin mengulangi hal itu.

Suasana Dialog

Suasana dialog yang dilakukan di salah satu Capetaria TIM tersebut menjadi hangat tatkala Emha mencontohkan dalam perjalanannya ke beberapa daerah di Indonesia tidak pernah menjumpai rakyat kecil merasa sebagai penguasa yang paling tinggi.

Rakyat itu, bila ditanya selalu menjawab dirinya adalah bawahan dari penguasa. Padahal rakyat harus menjadi lebih besar dan tinggi dari pejabat atau pemerintahan yang tengah berkuasa.

"Saya pernah mengajak Mas Goen (Goenawan Mohamad) ke Madura untuk bertemu dengan 5000 santri. Saya lontarkan pertanyaan pada mereka tentang siapa yang berkuasa antara rakyat dan Bupati," katanya.

Dari jawaban santri dari salah satu pesantren yang ada di Madura, mereka berteriak bahwa rakyatlah yang berkuasa bukan bupati.

Hal itu menunjukan kesadaran mereka, walaupun hanya sesaat. Setelah itu mereka kembali lagi menjadi bawahan dari para penguasa.

Para wartawan dan kalangan seniman yang hadir tersenyum. Tempat di Cafe tersebut tidak mampu menampung peserta yang hadir. Hingga mereka duduk di bawah dan di luar Cafe.

Senada dengan Emha, Goenawan menuturkan Pernyataan Mei ini tidak bersifat tetap. Dalam artian pernyataan tersebut merupakan salah satu pernyataan dari berbagai pernyataan yang akan muncul di kemudian hari. Serta para penggagas dan penandatangannya tidak ditekan untuk membuat pernyataan lain dari kelompok lainnya.

Sedangkan WS Rendra yang duduk di samping GM mengatakan bahwa pernyataan tersebut untuk mengatakan semua hal dengan sejujur-jujurnya sebatas tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

"Kita ingin mengatakan yang benar dan salah tanpa harus takut," tutur Rendra yang tetap berambut panjang sebatas bahu.

Rendra yang menyebut dirinya sebagai penyair ini menekankan akan pentingnya standar kolektif yang dipenuhi akal budi agar tetap dipertahankan. Oleh karenanya pernyataan Mei tersebut untuk mempertahankan standar kolektif yang berbudi agar tidak terjadi pengulangan sejarah di masa lalu. (GR/IWN)

Merdeka, 13 Mei 1995

Sastrawan dan Persoalan Sosial

SAAT itu, 29 April 1978, dia seorang diri berteriak, menuding, dan bahkan menggugat kemapanan negeri ini. Suaranya berat, bergema dengan olah vokal yang mantap memukau ribuan orang. Karya-karya puisinya mengalir begitu lancar, selancar hati nuraninya bertutur rentan tentang nasib orang-orang yang tersingkir, tertindas, dan sederet ketidakadilan yang selalu akrab dan tidak pernah beranjak dalam hidup mereka. Siapakah orang begitu simpatik membela kaum papa itu? Tidak lain adalah seorang sastrawan yang bernama W.S. Rendra.

Teriakan, tudingan, dan protesnya 'menampar' muka siapa saja serta sekaligus mengetuk kesadaran hati manusia yang terdalam. Sungguh sebuah penampilan yang menyentuh. Tapi, apa yang bakal terjadi setelah pementasannya itu, tidak seorang pun yang tahu dan bahkan Rendra sendiri juga tidak pernah tahu.

Nasib buruk memang selalu akrab hadir terhadap orang-orang yang lemah. Dan memang, setelah tiga hari pementasan baca puisi Rendra di TIM itu, dia ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sebelumnya, sebuah kejadian yang cukup menggetarkan dialaminya, Rendra menerima sepucuk surat tentang kelahiran anaknya yang kedua dari isterinya yang ketiga, Ken Zuraida. Rendra tidak terkejut, dia ditahan karena puisi-puisi yang dibacakannya di TIM itu mengandung muatan protes-protes sosial.

Ilustrasi di atas dapat ditambah dengan contoh-contoh yang lain. Sastrawan dan hasil proses renungannya yang kreatif yang gilirannya membuahkan beragam karya sastra, pada saat tertentu bisa saja bergesekan dengan hegemoni dan bersinggungan dalam kadar persepsi yang kadang-kadang terlalu jauh menyimpang serta kerap diinterpretasikan dengan bumbu kecurigaan yang berlebihan sehingga resepsi hegemoni terbaca seperti mengada-ada. Dan, di sisi inilah, tampak jelas seniman menempati posisi yang lemah dan rentan. Karena berbagai *pressure* oleh hegemoni terhadap sastrawan dan seniman sendiri tidak memiliki kekuasaan— maka sastrawan menjadi pihak yang kerapkali menerima perlakuan yang sewenang-wenang, yang pada gilirannya bisa saja terjadi seperti yang dialami Rendra di atas.

Mengantisipasi Gejala-gejala

Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985, Rendra diperkenankan naik pentas kembali di tempat yang sama —di mana dia terakhir kali memanggungkan karya-karyanya. Saat itu, hadirnya kembali Rendra disambut hangat berbagai kalangan masyarakat, khususnya seniman. Apa yang menjadi keistimewaan atas kehadiran Rendra saat itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah adanya semacam perubahan di negeri ini ke arah kemajuan. Pintu kebebasan dan keterbukaan yang selama ini tertutup rapat-rapat sedikit mulai terkuak. Secara esensial gejala-gejala semacam itulah yang banyak 'dibaca' dan diantisipasi, serta disambut dengan amat gembira oleh berbagai kalangan yang tersubordinasi dengan dunia kebebasan dan demokratisasi.

Konfigurasi kebebasan dan demokratisasi, serta keterbukaan, berkesan mulai membawa angin segar. Ini tentu bagi banyak kalangan diharapkkan mampu membawa manfaat demi langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh dan dijalani bangsa Indonesia. Diharapkan menjadi stimulan dan indikator yang kondusif dalam berbagai lintas sektoral pembangunan. Tapi, dalam rentang waktu setelah dibolehkannya Rendra kembali tampil di depan publik, banyak 'cacat' dan ketimpangan tentang kebebasan, demokratisasi dan keterbukaan yang kita temui dan rasakan. Kebebasan seperti direm dan dicekik, kran keterbukaan seakan diracik kembali, dan demokratisasi belum jelas menampakkan bentuk wujudnya yang hakiki.

Bukankah pelarangan pementasan Teater Koma beberapa tahun yang lalu membuktikan itu, atau tidak diizinkannya pemanggungan *Komunitas Pak Kanjeng*, pelarangan pembacaan puisi

penantian yang sia-sia. Menjadi hal yang diskursif, dan hanya boleh ditafsirkan secara bebas oleh hegemoni belaka.

Sosialisasi Sastrawan

Keterlibatan sastrawan dengan lingkungan, dan menyuarakan hati nuraninya dengan apa adanya serta menulis dan berkarya sesuai dengan realitas yang dialaminya secara objektif tanpa ada pemihakan dan perekayasaan, seperti disinggung di atas, kerapkali akan bersinggungan dan bergesekan dengan konsep-konsep dan ketentuan yang telah digariskan penguasa. Gesekan ini dapat saja melahirkan dan menerbitkan pertentangan yang sangat tajam sekali. Karena apa yang diucapkan sastrawan dalam karya-karyanya berkemungkinan memiliki muatan berkecenderungan tidak sejalan dengan garis-garis dan kenyataan-kenyataan yang diucapkan, dijanjikan, dan dilaksanakan oleh hegemoni.

Karya sastra sebagai kontrol sosial memang sudah jelas akan berpijak pada kenyataan di mana tempat karya sastra itu dilahirkan dan di tempat mana sastrawan itu dibesarkan oleh lingkungannya. Menjadi suatu yang naif bila karya sastra Indonesia, misalnya, membicarakan persoalan Hongkong, Amerika dan lain-lain. Tentu saja ada pihak-pihak yang terkena 'semprot' bila sebuah karya sastra menggambarkan apa adanya secara gamblang, dan sebaliknya pula ada pihak-pihak yang hati nu-

dan seminar, dan masih segar dalam ingatan kita yaitu pencabutan tiga buah SIUPP media massa baru-baru ini, apakah itu bukan memperlihatkan gejala-gejala dipersempitnya kebebasan, keterbukaan dan demokratisasi oleh hegemoni? Sepertinya harapan datangnya tiga kata di atas menjadi

raninya terucapkan dan terwakili dalam karya sastra yang demikian. Tapi inilah yang menjadi soal yang berkepanjangan, bila terjadi benturan-benturan antara sastrawan dan kekuasaan yang merasa posisinya digugat, ditodong, maka hegemoni selanjutnya akan menggunakan 'pisau' kekuasaan dan wewenangnya untuk meredam karya sastra itu. Dan, sudah jelas pada gilirannya, di sinilah tampak sastrawan atau seniman sebagai pihak yang tidak berdaya atau *powerless*. Karena walau bagaimanapun posisi pendistribusian kekuasaan dan wewenang yang diperoleh sastrawan sangatlah terbatas dan nyaris tidak ada sama sekali.

Maka, kitapun tidak perlu merasa heran, bila tidak ada sama sekali yang mampu menjadi 'malaikat' pembela kalau tiba-tiba saja pementasan sebuah grup teater, pembacaan puisi, seminar dan lain-lain dihentikan dan dilarang begitu saja oleh hegemoni tanpa mau mengindahkan alasan-alasan lain sekalipun? Dan, siapa pula yang mau menuntut kerugian yang diderita, baik moril maupun materil, kepada hegemoni, misalnya?

Barangkali, memang tidak semua sastrawan di negara ini yang bertingkah resistensif terhadap hegemoni, ada juga sebagian yang memilih jalur 'penyelamatan diri' dan melakukan *bargaining* terhadap penguasa. Hal ini kemungkinan dilakukan mengingat berbagai pertimbangan dan alas-

an lain, misalnya. Tapi, persoalan akan berbeda bila semua sastrawan di belahan negeri ini melakukan tawar-menawar dengan hegemoni serta memutuskan untuk berkompromi dengan penguasa. Dan, bila konstelasi semacam inf benar-benar terjadi di negeri ini, maka kondisi sastranya akan mengalami stagnasi dan kebutuan. Sastra akan menjadi alat propaganda, sastra akan dipenuhi muatan-muatan agitasi, jargon, dan nilai-nilai yang berisikan kadar rendahan dan imperatif.

Giliran selanjutnya, sastra dengan sendirinya melegitimasi ketidak-adilan, kesewenangan penguasa, dan memunggungi nilai-nilai kemanusian serta dengan sendirinya pula akan membangun kecempukan kursi-kursi kekuasaan dan menumbuhsuburkan stabilitas kenikmatan *status-quo* hegemoni. Pun tidak mustahil akan bermunculan dan bertaburan di sana-sini sastrawan-sastrawan yang berkarya dengan menunggu pesanan atau *order* yang datang dari hegemoni. Dan ini sudah jelas akan menjanjikan berlimpahnya material, dan pada skala ini, apakah ini mampu sebagai solusi mengubah nasib sastrawan Indonesia manusia yang kaya-kaya, kalau sekarang ini sastrawan Indonesia identik dengan kemiskinan. Nah, siapa yang berkeinginan *bargaining* dengan ketidakadilan dan sejenis ini?

■ *NASRUL AZWAR*
Pemerhati masalah sastra dan budaya

Pelita, 13 Mei 1995

"Palung-palung Kesusastraan"

HAMDY SALAD

DAN inilah barangkali yang lebih nyata, sebagaimana juga polemik itu, kesusastraan dapat hadir di tengah kita tanpa teks. Tanpa prosa dan puisi. Para sastrawan keluar dari kamar, meninggalkan mesin ketik, kertas dan kata-kata. Para pengamat dan inisiator-inisiator kesusastraan membiarkan teori, kritik dan analisa serta kemungkinan-kemungkinannya sebagai surat-surat dinas yang hanya menumpuk di atas meja. Maka terjadilah konflik batu, perang wacana, ide, gagasan dan konsep yang menyelusup ke dalam wilayah-wilayah primordialisme, ideologi, moral dan sosial.

Akan tetapi, sastra adalah dunia pecah belah. Dunia alternatif yang serba mungkin. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa pikiran atau dipikirkan, tanpa sengaja atau disengaja. Di luar teks atau dalam konteks, di luar kenyataan atau dalam kenyataan. Dan karena itu, siapapun orang yang berperan di dalamnya dapat juga menempatkan diri dalam berbagai ruang dan waktu sebagai pejuang atau penghianat, pahlawan atau penjahat, sebagai budiman atau penjilat. Seperti juga dalam dunia teater, semua tokoh dan peran dalam kesusastraan dapat dimasuki oleh siapa saja sesuai dengan intlektualitas dan kebodohannya. Sesuai dengan kehendaknya untuk menyelewengkan atau meluruskan, menghancurkan atau membangun kembali sebagaimana adanya.

Dengan demikian juga, makna kesusastraan dapat diwujudkan sebagai sesuatu yang remeh dan tidak berharga. Atau sebaliknya dapat hadir di tengah kita menjadi bagian penting dari kebudayaan manusia, yang perlu dirawat dan dipelihara sebagai mana orang menjaga dan mempertahankan hati nurani, nilai-nilai, status inti dan fungsi kemanusiaan.

Maka di ketika kita membicarakan tentang lembaga seni seperti Dewan Kesenian, Festival, Forum dan lain-lain yang semacam, kita pasti telah yakin bahwa semua jenis lembaga itu terbentuk karena didorong oleh sesuatu yang bersifat kultural. Sesuatu yang menunjuk pada karakter-karakter "adi luhung" yang bertujuan untuk melestarikan merekontruksi atau menumbuhkembangkan nilai-nilai, idealitas serta kualitas kebudayaan dan kesenian, sebatas apapun.

Oleh karena itu, keberadaan kesusastraan dalam konteks dan idealitas penyelenggaraan FKY yang telah berlangsung selama tujuh tahun itu, sudah barang tentu bukan merupakan permainan atau hiburan belaka. Tetapi sudah menjadi bagian penting dari festival itu sendiri, menjadi bagian dari fungsi dan tujuan-tujuan kulturalnya.

Berangkat dari alinea di atas, Minggu malam 23/4 kemarin, Panitia Seksi Sastra FKY VII melalui Ketua Umum Fred Wibowo (atau sebaliknya sama saja), mengadakan forum untuk melihat kembali berbagai kemungkinan penyelenggaraan antologi dan pergelaran sastra Indonesia di ruang teater Purna Budaya. Namun apa yang dihasilkan dari forum itu? Kita belum bisa melihatnya secara kongrit. Tetapi kita dapat meraba bahwa jika kesusastraan dalam FKY tahun ini tidak dapat mengakomodasi fungsi dan tujuan-tujuan lebih esensial seperti yang dikehendaki oleh FKY itu sendiri dan para sastrawan yang terlibat di dalamnya, maka Festival akan tetap berlangsung tanpa kehadiran sastra Indonesia.

Disamping itu, masih ada beberapa kemungkinan yang lebih mendekati kenyataan; merevisi konsep-konsep, menyelenggarakan pergelaran tanpa antologi, membiarkan sastra berlangsung apa adanya tanpa perbaikan atau perubahan serta mencabut SK dan menggantinya dengan SK yang baru. Namun, semua itu barulah kemungkinan. Segala sesuatu bisa terjadi seperti halnya dalam kesusastraan. Impian, cita-cita dan harapan dapat berubah begitu saja meninggalkannya kata-kata dan pernyataan di tengah lalu lintas jalan raya, di tengah politik dan kekuasaan, di tengah tumpukan prosa dan puisi yang telah menjadi bungkus di warung-warung.

Dan anda pun tidak perlu kecewa, jika ternyata parameter yang dipakai seksi sastra hanya bersifat partisipatif, yang mengajak semua sastrawan (yang masih hidup atau yang telah mati) untuk melakukan solidaritas dalam ruang, tidak terbatas pada jumlah dan tentu saja siapa saja yang mengaku dirinya sebagai sastrawan dapat mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi. Bahkan orang yang sudah lupa bahwa dirinya pernah disebut sebagai penyair atau cerpenis pun juga mendapat undangan.

Dengan begitu, palung kesusastraan dapat terjadi di manamana, dalam berbagai peristiwa, menenggelamkan siapa saja untuk menjadi mutiara atau lumpur. O-h.

Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1995

Sastrawan Mestilah Seorang Orator

Oleh Budi P Hatees

Dunia kesastraan kita, untuk dapat berkembang pesat, mestilah dimulai dari perluasan komunitasnya. Sebab realitas kini cenderung memiliki komunitas terbatas, sebagai implikasi fenomena kehadiran kantong-kantong sastra di daerah. Apa yang ditulis Harta Pinem (SKEM, 7 Mei 1995) tentang adanya pluralitas, adalah persoalan sastra sebenarnya, dan mestilah kita kembalikan menjadi "keekaan" dalam "kebhinnekaan".

Tawaran Harta Pinem, bahkan kita harus kembali pada pemikiran kebudayaan karena Allah, begitu juga halnya dalam dunia pemikiran kesatraan, pada akhirnya tetap akan menemui kesulitan sendiri. Sebab bagaimana untuk menjadi "rasul" bagi manusia Indonesia sedang karya sastra telah kehilangan / misinya. Artinya, pengarang sastra yang dalam banyak unsur punya kesamaan misi dengan "rasul", kurang menyadari masyarakat misionarisnya.

Jamal D Rahman mungkin yang paling memahami kegagalan misionaris itu dalam *Surat Tak Sampai 1*. Sebab misi yang hendak disampaikan "telah dikubur dan dibekukan dalam kalimat - kalimat panjang", bahkan "rangkaian huruf-huruf itu pun tak bisa mengungkapkannya sekarang".

Sebetulnya Jamal tidak sendiri dalam teks kesastraan kita, ada juga Radar Panca Dahana yang menulis sajak *Berlayar Menuju Adam* "... kalimat tidak lagi melahirkan kata..." Lantas bagaimana sebuah misi dapat disampaikan. Bagaimana pengarang meluruskan fungsinya sebagai pejuang kemanusiaan mewakili Allah di bumi serba tak sempurna ini, seperti yang ditulis Harta Pinem.

KALAU lebih kita kaji, persoalan di atas lebih terletak dan/atau sebagai konsekuensi dari penggunaan bahasa. Bahwa bahasa sastra, meminjam Radhar, tidak lagi melahirkan kata. Sedang kita tahu kata adalah "petanda" dan "penanda" dimana ia (kata) menyimpan pengertian (misi). Tapi sastra dengan bahasa tanpa pengertian ini bukan tanpa komunitas. Para pengarang, katakanlah sastrawan itu sendiri, adalah komunitas yang tak akan pernah hilang. Mereka (sastrawan) bisa memahami dan/atau memiliki cara pemahaman yang tersendiri terhadap karya tersebut, sehingga misi yang disampaikan, biarpun tersembunyi jauh, tetap memiliki pengertian.

Realitas inilah yang saya maksud dengan komunitas yang terbatas tadi. Sehingga masyarakat awam tidak merasa memiliki dan dimiliki dunia kesastraan, meskipun tema yang terkandung di dalamnya sangat kontekstual. Sedang karya sastra, meminjam Rabindranat Tagore, mengungkapkan dunia sebagaimana nampaknya kepada manusia. Ini untuk tujuan tadi, agar kesampaian misinya kepada masyarakat luas.

Kalau kita sekilas bicara tentang misi, berarti berbicara tentang hal yang sangat pribadi dari seorang pengarang. Pengarang sebagai manusia tidak terlepas dari

masyarakatnya, tapi juga seorang yang individualistis. Dan manusia pengarang itu paling menyadari keindividualistisannya, sehingga cenderung mengabaikan (kalaupun tetap memperhatikan) individualistis manusia lain.

Dalam hal inilah perlu adanya kesamaan pandangan. Bahwa seorang pengarang perlu mencari tahu bagaimana keindividualistisan masyarakat, karena hal itu merupakan dorongan pribadi yang terus diwujudkan. Dalam membaca karya sastra, dorongan itu pun sangat kuat. Bahwa masyarakat tidak akan pernah berusaha memahami hal-hal yang tidak disukainya.

Dari uraian di atas jelaslah persoalannya terletak dalam diri pengarang. Meluas atau menyempitnya wilayah komunitas itu adalah konsekuensi logis yang dapat direkayasa. Karena itu seorang pengarang punya kunci sendiri untuk memecahkan persoalan yang ada.

TAPI penyempitan wilayah komunitas kesastraan ini, juga merupakan konsekuensi logis kehadiran kantong-kangtong kesastraan di daerah. Gerakan revitalisasi sastra pedalaman, bukan sebuah gerakan penolakan terhadap dominasi pusat. Tapi juga bukan sebuah gerakan arus bawah, namun lebih dari itu merupakan suatu penunjukkan atas riak-riak kesastraan yang berkembang di daerah. Riak-riak yang akan menggelombang yang menunjuk segenap totalitas mempersentasikan komunitasnya, dan didukung dengan kegiatan-kegiatan pemacu proses kreatif dengan penerbitan jurnal kebudayaan.

Namun penerbitan jurnal-jurnal kebudayaan oleh kalangan kesastraan daerah itu, pada hemat saya mempersempit komunitas kesastraan kita. Gerakan RSP hanya sebagai "kambing hitam" atas usaha penyempitan itu. Karena jurnal RSP diterbitkan untuk kalangan yang sangat terbatas, sehingga harapan untuk dunia kesastraan yang lebih luas, tidak akan terealisasikan.

Sekian banyak karya sastra yang dipublikasikan di dalam jurnal RSP dan jurnal-jurnal lain seperti *Muara Sastra, Cak, Surat, Menyimak,* hanya dibaca oleh kalangan sastra daerah itu sendiri. Kalau pun jurnal-jurnal itu tiba di Jakarta, namun tetap pada masyarakat yang sangat sempit. Akibatnya, fenomena yang diulami Nurjanah Sutardji, Dingu Rilesta (kedua penyair ini berasal dari Tangerang), yang banyak menulis sajak untuk jurnal-jurnal daerah, kehilangan komunitas karyanya di Jakarta.

Nurjanah Sutardji menulis sajak yang merepresentasi kehidupan Jakarta dalam sajak *Ibu Kota (Muara Sastra,* Edisi Februari 1995), yang mestinya untuk komunitas sastra Jakarta, justru tidak dibaca komunitas itu. Begitu juga dengan Dingu Rilesta, yang menulis sajak *Silang Monas Menjelang Senja.* Tapi keduanya menjadi "rasul" bagi komunitas Muara Sastra (MS) untuk menyampaikan misi kemanusiaan tentang kebobrokan Jakarta.

DEMIKIANLAN dengan komunitas yang terbatas seperti itu, kesastraan dan karya-karya yang dihasilkan, meminjam Ahmad Syabudin Alwi, mengalami diskontinyuitas dengan dunia kreatif yang dijelajahinya. Dan juga, ini yang lebih penting, fenomena tidak didengar oleh siapa saja, akan tetap mengedapan seperti persoalan besar.

Lantas solusi apa yang dapat ditawarkan di sini. Mungkin harapan Arief Budiman tentang kesastraan haruslah kontekstual, bisa dipertimbangkan. Tapi bahwa karya sastra sangat "kosong" misi, karena ketakpahaman terhadap bahasa tanpa kata, tanpa pengertian itu, tetap menjadi kendala.

Untuk itulah saya kira kita perlu menjadi Wiji Thukul. Meminjam Arief Budiman, dalam kata pengantar sajak Wiji Thukul, *Mencari Tanah Lapang,* penyair mestilah manusia yang sederhana, yang bicara jujur dan polos, dengan bahasa yang memiliki massa arus bawah. Bukankah penyair dalam banyak hal sama dengan "rasul"; memperjuangkan kemanusiaan. Dan di dalam perjuangan itu, seorang "rasul" mestilah seorang komunikator yang handal. Yang tahu persis menggunakan bahasa yang memiliki massa. Atau, seorang sastrawan mestilah seorang orator, bukan seorang kreator. ***

Srengseng Sawah, 8 Mei 1995

Suara Karya, 14 Mei 1995

''Sastrawan Besar Tak Mewakili Kelas''

Sapardi Djoko Damono:

Menyambung oleh-oleh Budi Darma dari seminar di London yang dimuat Jawa Pos *beberapa waktu lalu, berikut ini diturunkan wawancara dengan penyair Sapardi Djoko Damono. Sapardi adalah penyair yang memiliki posisi tersendiri di republik ini, dan sudah melahirkan beberapa buku kumpulan puisi. Lahir di Solo, 20 Maret 1940, alumnus Universitas Gadjah Mada ini sekarang menjabat sebagai pembantu dekan 1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Berikut ini rangkuman wawancara dengan Henri Nurcahyo.*

Dalam seminar di London baru-baru ini dibahas soal kanon-kanon sastra di Asia Tenggara sebagai upaya untuk melacak jati diri suatu bangsa. Bagaimana pandangan Anda mengenai soal itu.

Ya memang begitu. Dalam karya seni itu terekam apa yang dimiliki oleh suatu bangsa, apa saja, bisa perangai bangsa itu atau apa pun. Jadi, kalau kita mau meneliti secara baik karya-karya sastra atau benda-benda budaya suatu bangsa, kita bisa melihat perjalanan spiritual atau kultural bangsa tersebut. Apakah hal itu dimaksudkan untuk mencari jati diri atau tidak, itu masalah kedua. Tetapi yang jelas kita memang harus mempelajarinya supaya kita tahu siapa kita itu. Tanpa tahu hasil budaya atau karya sastra yang pernah dihasilkan nenek moyang kita, kita boleh dikatakan tidak tahu mengenai diri kita sendiri. Kita *kan* mau menuju ke hari depan, nah hari depan itu *kan* ada kalau kita mempunyai masa lampau. Kita ini mau ke mana. Kita akan lebih mantap kalau kita tahu siapa kita ini sebenarnya, dan dalam situasi apa kita ini dulu digembleng, diciptakan, dilahirkan, dan dibesarkan. Kita bisa melihat kekuatan atau kelemahan apa yang kita miliki, sehingga kita bisa menentukan kita mau apa. Kita *kan* tidak lahir kemarin sore. Sebagai suatu bangsa kita sudah ada ratusan tahun yang lalu. Dan, semua itu direkam dalam karya sastra yang besar-besar itu. Jadi itulah sebenarnya pentingnya memberikan pada anak-anak di sekolah karya-karya sastra klasik itu. Dalam setiap pembicaraan saya mengenai karya sastra di sekolah, itulah yang saya tekankan, karena lebih penting dibanding harus memberikan karya-karya sastra yang sekarang. Bukan karena sastra modern tidak penting, tetapi sastra klasik lebih sulit didapat. Dan, kita harus menyiapkan betul untuk mengajarkan mengenai karya-karya sastra yang pernah dilahirkan oleh nenek moyang kita.



Sapardi Djoko Damono

Ada pendapat bahwa hanya orang-orang besar yang menciptakan sejarah atau dengan kata lain sejarah hanya menjadi milik penguasa. Pertanyaan saya, apakah dengan menelusuri jati diri bangsa lewat sastra itu berarti untuk melengkapi pendapat tersebut

Betul. Betul sekali. Memang barangkali karena metode yang digunakan selama ini menempatkan mereka dalam sejarah, karena memang orang-orang besar itu yang tercatat. Tetapi, karya sastra yang ditulis oleh sastrawan yang betul-betul punya wawasan, ia bisa menembus ke atas dan ke bawah. Sastrawan yang punya wawasan tidak akan hanya melihat suatu masalah di permukaan, melainkan sampai ke dasar-dasarnya. Karena itulah, sastrawan tidak harus bersesuaian pendapat dengan orang-orang besar itu. Dia tidak hanya menulis apa yang terjadi dengan orang-orang besar itu, melainkan terhadap orang-orang yang tidak terjaring.

Tetapi seberapa kuat komitmen sastrawan menghadapi penguasa saat dia menulis itu.

Itu *kan* masalah lain lagi. Taruhlah misalnya sebuah sastra klasik seperti Malin Kundang, itu mana orang besarnya. Mana? Malin Kundang itu menunjukkan suatu nilai yang sangat dahsyat bahwa apakah itu

orang kecil atau orang besar, paling rendah atau paling tinggi, tidak ada bedanya. Masalah moral, etika, kesetiaan, pengertian dan masalah pemahaman dibahas di situ.

Bagaimana dengan pujangga-pujangga yang menjadi sastrawan istana, bukankah mereka lebih dekat dengan penguasa. Ronggowarsito misalnya. Menurut Anda seberapa bisa dipercaya independensinya sebagai seorang sastrawan.

Sekarang, apakah kita bisa membuktikan bahwa karya-karya Ronggowarsito itu bergantung pada Raja. Apakah kalau dia bilang, misalnya, *amenangi jaman edan...dst,* itu bicara mengenai raja. *Kan* tidak. Jadi itulah yang saya katakan, karena justru sastrawan-sastrawan keraton itu mempunyai kedudukan yang unik. Di satu pihak dia barangkali secara finansial bergantung pada penguasa. Tetapi, sebenarnya dia itu *kan* dari segi kreativitas memiliki kemerdekaan. Seorang sastrawan keraton memang diangkat oleh penguasa, sehingga dia kalau menulis bisa sebebas-bebasnya dalam arti tidak harus memaksakan diri untuk mengikuti selera yang bukan seleranya. Orang yang diajak berkomunikasi itu bisa dianggap setara dengan dia. Dengan demikian, dia bisa menggunakan alat-alat sastra yang paling canggih. Dengan demikian, dia bisa menembus ke mana-mana. Kedua, apakah setiap karya Ronggowarsito itu betul-betul dibaca oleh penguasa. Bisa jadi yang membaca justru orang lain, bukan raja yang membiayai dia.

Barangkali semacam titip missi begitu...

Itu bisa saja terjadi, tetapi sebagai sastrawan besar dia bisa berbuat apa pun. Saya tidak mengatakan tak bisa dititipi, itu bisa saja, dia bisa mewakili pandangan yang lebih elite misalnya. Tetapi toh menurut beberapa teori yang dilontarkan orang, seorang sastrawan besar itu tidak hanya puas mewakili suatu kelas, melainkan mewakili kehidupan ini. Dia akan berbicara mengenai kehidupan ini seperti apa adanya. Jadi, seperti yang saya katakan, bisa menembus ke bawah dan ke atas, tidak terbatas pada suatu kelompok orang tertentu. Itu sebenarnya keunggulan sastra yang ditulis oleh sastrawan besar. Dia tidak berpihak.

Lalu bagaimana mungkin sampai ada sastrawan yang tergadaikan misinya oleh kepentingan politik.

Ya itulah, siapa pun bisa tergadai, kalau dia bukan seorang pujangga (dalam pengertian) yang besar itu tadi. Menggadaikan diri bukan hanya pada kepentingan politik, tetapi pada sebab atau alasan apa pun bisa terjadi. Misalnya saya hanya akan membela petani saja. Nah, apa petani itu musti menang terus. Atau saya hanya akan membela pegawai negeri. Ini *kan* sudah termasuk menggadaikan itu tadi. Kita juga bisa menggadaikan diri untuk raja tentu saja, tetapi yang kita bicarakan *kan* pengarang-pengarang besar. Akan terlihat bahwa dia tidak berpihak pada siapa pun. Kalau ada sastra yang berpihak, sebagai suatu masalah kalau dipelajari barangkali memang menarik. Tetapi apakah masyarakat hanya terdiri dari satu kelompok yang disoroti itu saja.

Dan, sastrawan yang seperti itu bisa dikatakan lebih rendah nilainya dibanding sastrawan yang universal.

Saya tidak mengatakan lebih rendah, untuk golongan tertentu barangkali memang lebih menarik. Tetapi dari segi... saya tidak mengatakan universal... untuk suatu masyarakat itu dia tidak bisa membela ini membela itu atau hanya menjadi corong tertentu, tetapi dia akan menyampaikan kehidupan itu seperti apa adanya. Saya tidak berbicara mengenai kelas....

Jawa Pos, 14 Mei 1995

Globalisasi Wacana Sastra

Oleh SUPRIYANTO EFZET

PADA penghujung tahun 1994 banyak penggiat sastra di daerah yang menulis pada koran atau media massa pusat (ibukota) tentang sastra pedalaman. Maka, tak memerlukan waktu lama, bagi *Revitalisasi Sastra Pedalaman* (RSP) untuk muncul ke permukaan sedemikian rupa sehingga ia menjadi tema menarik untuk diperbincangkan. Salah satu hal menariknya adalah: apakah gerakan RSP yang memancing polemik itu merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan sastra pedalaman atau sastrawan pedalaman? Hal inipun - secara tersirat - masih mengemuka dalam dialog seusai acara Baca Puisi Tegalan yang diselenggarakan oleh Forum Sastra Indramayu (FSI) di Saung Meeting Pendopo Kabupaten DT II Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu malam, 28 Januari 1995. Forum ini akhirnya menggugat keberadaan sastrawan daerah, wacana para sastrawan, revitalisasi sastra dan revitalisasi sastra pedalaman.

Dalam wujud kongkret RSP memang hampir menjadi suatu proses, suatu gugatan, suatu "perjuangan" untuk mengkatrol atau memperjuangkan para sastrawan pedalaman dari keberadaannya yang selama ini kurang (di) atau (me)-untungkan para sastrawan pedalaman itu sendiri, khususnya. Soal kualitas sastra pedalaman - tanpa asumsi bahwa kualitasnya rendah - akan dengan sendirinya menanjak naik bila para sastrawan pedalamannya sendiri telah menduduki status, posisi, yang besar, yang menguntungkan dan bisa memperjuangkan kualitas sastra pedalaman. Itu menurut sebagian penilai.

Dan sebaiknya siapapun tidak kontra dengan maksud-maksud baik untuk meningkatkan mutu sastra pedalaman. Namun, tidaklah terlalu salah kiranya, bila sementara kalangan menilai bahwa gerakan RSP merupakan upaya untuk memperjuangkan keberadaan para sastrawan pedalaman.

Marjinal, orbit dan pusat

Kebudayaan manusia itu, sejak sekian rentang waktu yang lampau, selalu berpusat di kota-kota, terutama kota-kota besar. Hal ini terjadi sebab di kota-kotalah sebagian besar manusia melalukan aktivitasnya secara masal. Kalau dihitung (bukan diukur) maka jumlah manusia penghuni desa atau pedalaman memang terbilang jauh lebih banyak ketimbang penghuni daerah perkotaan. Namun jumlah manusia yang lebih banyak di pedalaman itu menghuni lahan yang sangat luas. Sementara jumlah manusia kota yang kalah banyak dari total manusia penghuni pedalaman hanya menghuni wilayah yang relatif sangat kecil ketimbang wilayah pedalaman. Akibatnya, bila diperbandingkan, maka manusia lebih banyak terkumpul di tempat-tempat tertentu, di perkotaan. Suasananya tampak ramai. Sedangkan di pedesaan meskipun jumlah manusianya lebih banyak namun suasananya sunyi. Sebab, manusianya cenderung menempati tempat secara terpencil, terpisah-pisah.

Maka kota sering menjadi pusat. Sesuatu yang wajar. Ia menjadi pusat relatif hampir dalam segala segi aktivitas manusia. Salah satu di antaranya adalah aktivitas di bidang seni, khususnya bidang seni sastra. Kesusastraan lebih tumbuh subur di pusat-pusat kota ketimbang di pedalaman. Sebab sastra adalah bagian dari hidup keseharian manusia. Produk sastra yang memerlukan "pemasaran" atau setidak memerlukan untuk "dinikmati" oleh orang lain lebih banyak berkembang di perkotaan ketimbang di pedalaman. Dalam bidang-bidang lain, banyak bukti menunjukkan bahwa kota adalah pusat bagi berbagai kegiatan masyarakat.

Keadaan demikian menggiring bahkan memojokkan pedalaman sedemikian rupa sehingga daerah-daerah pedalaman mau tak mau berstatus sebagai orbit dari kota. Dalam banyak aktivitas, apa yang dilakukan di pedalaman akhirnya berposisi sebagai bagian-bagian marjinal alias pinggiran. Termasuk dalam kegiatan bersastra. Kegiatan sastra pedalaman tampaknya terkalahkan "dalam beberapa bidang" oleh kegiatan sastra pusat (kota). Keadaan ini semakin diperparah oleh situasi kehidupan politik dan ekonomi masyarakat yang lebih mementingkan kemajuan kota.

Pusat menjadi pedalaman

Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah - kita pelajari aspek sosial budaya masyarakat kita - maka puncak-puncak kebudayaan manusia selalu ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Puncak-puncak kemajuan kebudayaan itu disimpan di kota-kota. Perkembanan kebudayaan manusia semakin gencar dan berrevolusi setelah manusia berani untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penemuannya kepada manusia lain, di lain daerah. Dengan berbagai migrasi, saling kunjung-mengunjungi, maka pertukaran kebudayaan berlangsung antar manusia.

Pada masa-masa awal perkembangannya, yang menjadi pusat atau kota adalah daerah-daerah pesisir pantai (seperti Surabaya, Jakarta, Tuban, Tegal, Cirebon, Subang dan Indramayu). Daerah-daerah yang berada di pedalaman (di tengah pulau), di pegunungan, cenderung menjadi "orbit", "marjinal" atau "pedalaman". Hal itu disebabkan oleh sarana transportasi yang berupa kapal-kapal (perahu) masih jaya. Manusia dari manapun bisa berkunjung ke tempat lain di dunia internasional dengan perahu. Mereka akan mendarat di kota-kota. Di kota pesisir inilah kebudayaan dari manusia sejagat saling beralkulturasi. Akibatnya, jelas, kota-kota pesisir menjadi lebih maju ketimbang kota-kota di pedalaman pulau. Seiring dengan kemajuan iptek - di mana mobil dan kendaraan bermotor lainnya tercipta, juga kapal terbang - maka daerah-daerah tertentu yang secara geografis-sosiologis kurang menguntungkan berbalik menjadi "kota pedalaman" sementara yang semula menjadi kota pedalaman, kini berubah menjadi "pusat".

Pendekatan sejarah seperti itu tentunya memang memiliki kelemahan. Tapi setidaknya, ia diharapkan bisa menjelaskan satu aspek dari yang kita butuhkan untuk wacana esai ini. Yaitu bergesernya daerah tertentu dari asalnya pusat menjadi

pedalaman dan yang asalnya pedalaman menjadi pusat. Dan kini ketika perkembangan iptek kian menawarkan penemuan-penemuan baru lagi, batas-batas geografis menjadi transparan. Di planet bumi ini tak ada lagi wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia yang ingin mengunjunginya. Bumi ini menjadi sebuah kampung kecil kata futurolog Alvin toffler juga John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Akibatnya mana yang disebut pusat dan mana yang disebut pedalaman memerlukan pedekatan yang lain. Bila hal itu memang harus ada.

Wacana para sastrawan pedalaman

Sebelum arus globalisasi terjadi akibat pesatnya perkembangan iptek dalam menciptakan alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi dan alat-alat lainnya yang berfungsi menopang perkembangan serta distribusi informasi (dalam segala bentuknya) melanda masyarakat Indonesia dan dunia, secara tak sengaja (atau disengaja) telah tercipta kondisi pusat dan pedalaman. Bentuknya memang tidak formal. Hanya kenyataan yang bisa dirasakan. Termasuk di dalam bidang sastra.

Para penggiat sastra di pedalaman (termasuk para sastrawan pedalaman) bukan tak mampu berkarya bagus, bernilai dan "adiluhung". Kalau dinilai objektif, dalam titik acuan tertentu, karya-karya para sastrawan pedalaman boleh jadi sama atau lebih bernilai ketimbang karya sastra yang diciptakan para sastrawan pusat (kota). Namun karya yang diterbitkan (diumumkan) kepada khalayak di perkotaan akan lebih cepat terpublikasikan sebab kota memiliki alat-alat penyebar informasi yang lebih baik ketimbang daerah pedalaman.

Bahan-bahan bacaan (wacana) di pedalaman pun lebih banyak yang dihasilkan oleh orang-orang kota. Maka karya-karya sastra yang dinikmatinya pun lebih banyak dihasilkan oleh sastrawan kota ketimbang yang dihasilkan oleh sastrawan pedalaman sendiri. Akibatnya, sementara kalangan menilai karya sastrawan kota lebih baik, sebab para sastrawan kota memiliki tempat berkarya yang lebih konduksif ketimbang para sastrawan pedalaman. Ini bukan hasil penilaian mutlak. Sayangnya, telah telanjur tumbuh dan berkembang suatu fenomena di mana para sastrawan yang ingin maju. kemudian mesti hijrah dari pedalaman ke kota (pusat). Situasi sumpek di pedalaman, akhirnya malah cenderung melahirkan semangat untuk bersaing sambil saling "menenggelamkan", saling "menjegal".

Lihatlah dalam sejarah tumbuh membesarnya para penyair berkaliber nasional di negeri kita: mengapa mereka lebih memilih menghuni Jakarta ketimbang, misalnya memilih Bandung? Bukankah ketika di Bandung mereka telah mengeluarkan energi berlebihan dalam bidangnya? Boleh jadi, sebab Bandung untuk sekedar menjanjikan kemajuan pun bagi mereka, tidak. Contoh lain, beberapa orang-orang besar di wilayah sastra "menjadi besar" bukan di kota-kota kabupatennya sendiri, melainkan setelah hijrah ke misalnya, Bandung.

Hingga kini tak bisa dipungkiri rasanya, sastra(wan) pedalaman tetap harus mengorbitkan diri pada pusat (kota). Kalau mau jadi "besar" datanglah ke kota (pusat) atau - setidaknya - ikutilah perkembangan apa-apa yang dilakukan para sastrawan di pusat. Ini hukum alamiah. Sebab dalam ilmu Fisika - pun dalam Al-Qur'an seperti acapkali dikemukakan Ali Syari'ati, misalnya dalam buku "Islam, Mazhab dan Pemikiran" (Mizan, 1993) - benda-benda langit yang kecil harus mengorbit benda-benda langit yang lebih besar. Bulan mengorbit bumi, bumi dan planet lain mengorbiti galaksi yang lebih besar. Diorbiti atau tidaknya suatu benda langit bukanlah disebabkan oleh ukuran kebesaran benda langit tersebut, melainkan oleh besarnya massa (jumlah zat yang dikandungnya).

Pada diri para sastrawan, ukuran "massa" itu adalah tingkat kecendekiawanannya atau tingkat intelektualitasnya. Ukuran ini pula yang digunakan penyair Cirebon, Ahmad Syubanuddin alwy, ketika melakukan pembelaan atau sikapnya yang menolak arus "revitalisasi sastra pedalaman" (Alwy habis-habisan bicara tentang penolakannya atas RSP itu sehabis menjadi juri lomba baca puisi antologi "Kiser Pesisiran" pada suatu malam - sampai ketiduran - di rumah penyair Indramayu, Nurochman Sudibyo YS dan menantang penulis atau siapa saja untuk melanjutkan polemik tentang itu).

Jadi upaya mengorbit oleh sementara kalangan dinilai boleh-boleh saja. Hanya dalam prakteknya, mesti dilakukan dengan bijaksana. Jangan sampai, misalnya - seperti dikeluhkan esais dan cerpenis Hermawan Aksan - dibentuk sebuah Forum Sastra Indramayu namun karena yang berkumpul di dalamnya dominan para penyair maka kegiatannya hanya menggumuli atau berkutat dalam puisi melulu. Hak hidup wilayah sastra (yang luas) dipersempit oleh para penyair menjadi sekadar berarti wilayah puisi. Ini yang melemahkan kehidupan bidang sastra itu sendiri. Globalisasi wacana sastra, akibatnya, bisa jadi kerdil.

Banyak cara bisa dilakukan untuk menjadi yang "besar" atau "terbesar" dalam segala bidang. Termasuk barangkali di bidang sastra. Sutan Takdir Alisjahbana, misalnya, ketika masih muda mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru di Sumatera, lantas hijrah untuk kerja di sebuah penerbitan di Jakarta. Ia cerdik: memandang Jakarta cukup menjanjikan. Kecerdikannya membuahkan keberhasilan, ia menjadi besar. Kalau sudah besar obsesi apapun bisa dilakukan, syukur andai tergapai.

Para sastrawan pedalaman pun bisa menjadi besar kalau mau bijaksana mengorbit ke pusat - entah yang disebut pusat-itu sastra ibukota atau sastra dunia atau tingkat intelektualitas. Alhasil, marilah kita renungkan" mengapa dahulu banyak karya sastra berbahasa Sunda dan berbahasa Jawa (atau bahasa daerah lainnya) yang diterbitkan oleh penerbit bergengsi di Jakarta, sedangkan kini....? Tidak lagi *tuh!*

***

Pikiran Rakyat, 14 Mei 1995

Pernyataan Nostalgik di Bulan Mei

Inilah hajatan yang nostalgik. Digagas sejumlah seniman di antaranya Emha Ainun Nadjib dan WS Rendra, hajatan yang berlangsung di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin Jumat (12/5) malam, melahirkan ikrar *Pernyataan Mei*. Ada kaitannya dengan *Manifes Kebudayaan*?

Sekitar duaratus lebih pengunjung memadati ruang dokumentasi sastra tersebut. Selain seniman dan budayawan, sebagian besar pengunjung adalah generasi muda. Para penggagas pertemuan ini, Emha Ainun Nadjib, Goenawan Mohammad, WS Rendra, dan Arief Budiman (malam itu berhalangan hadir), tampil memaparkan pemikirannya terhadap kondisi kekinian.

Pertemuan ini menjadi menarik perhatian lantaran penggagas pertemuan mengaitkannya dengan *Manifes Kebudayaan*. Bahkan pada ikrar yang dibacakan Ratna Sarumpaet antara lain mengimbau agar becermin pada peristiwa Manifes Kebudayaan. Dilahirkan 24 Agustus 1963, Manifes Kebudayaan yang digagas sejumlah seniman di antaranya Wiratmo Soekito, Taufiq Ismail, Bur Rasuanto, dan Arief Budiman mencoba menentang kondisi kesenian yang diperunyam oleh organ PKI *Lekra*.

Tampil dengan panji "politik adalah panglima" — sehingga produk kesenian mesti mengacu pada kepentingan politik — seniman Lekra melakukan penekanan terhadap seniman pendukung Manifes Kebudayaan hingga akhirnya pemerintah melarang Manifes Kebudayaan pada 8 Mei 1964.

Peristiwa tersebut, agaknya, yang hendak dikenang. "Pernyataan Mei ini ingin mengimbau agar kita belajar dari satu peristiwa yang terjadi lebih 30 tahun yang lalu," demikian bunyi salah satu pernyataan itu.

Dalam diskusi tersebut, Rendra antara lain, memaparkan bahwa keinginan untuk merdeka merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan demikian, ia tak menyetujui, bila ada kekuatan yang mencoba membatasi kemerdekaan berpikir manusia.

Lantas, bagaimana dengan munculnya kekuatan yang mencoba membatasi? Rendra menyetujui bahwa selaiknya ada peraturan yang disepakati bersama demi mengatur manusia dalam kehidupan keseharian. Misalkan, katanya menyebutkan, contoh di Indonesia adalah Pancasila dan UUD '45. Bila ada kekuatan lain di luar peraturan formal tersebut yang mencoba membatasi kemerdekaan manusia, Rendra pun menudingnya sebagai kekuatan anarkis.

Di sisi lain, Rendra menyebutkan, *Pernyataan Meii* ini memiliki relevansi dengan kondisi kekinian. Alasannya? Ia menilai, melembaga pengaturan dan pembatasan masyarakat untuk bersoal-jawab. Masyarakat pun menurutnya, masih dipandang hanya dari satu sisi, seperti *nyamperin* matahari yang hanya bisa dipandang dari satu sisi itu. "Kita harus secara rajin mempertahankan standar akal sehat," katanya.

Menanggapi kelahiran Pernyataan Mei, Emha yang turut menggagasnya, mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut merupakan bukti, masih ada sumber-sumber cahaya yang masih bisa digali. "Setiap zaman punya penyakit dan sehatnya sendiri. Dan orang berhak menyelamatkan dari kumankuman dan memperlihatkan kesehatannya," ujarnya.

Selain melansir pernyataan tersebut, pertemuan itu pun diwarnai dengan penandatanganan Pernyataan Mei. Menyinggung soal penandatanganan ini, Rendra mengatakan bahwa penandatangan Pernyataan Mei itu bukan sebuah kelompok atau partai tertentu yang terikat. "Ini semacam lingkaran kesadaran, dan tak akan sampai mengorganisir diri," tambah Emha.

Mereka yang meneken pernyataan itu antara lain Arif Budiman, Emha Ainun Najib, Goenawan Mohamad, Rendra, HB Jasin, Subagyo Sastrowardoyo, AA Navis, Budiman S. Hartoyo, Mahbub Junaedi, Nirwan Dewanto, Arifin C. Noer, Sitok Srengenge, Ariel Heryanto, Satyagraha Hoerip dan Garin Nugroho.

Mengapa pernyataan itu baru sekarang dikeluarkan? "Kita sebetulnya tak ingin mengingat masa lalu, tapi sekarang *kepingin*. Barangkali ini wangsit," kata Goenawan Mohamad tertawa, sambil menjelaskan bahwa ide pernyataan itu lahir dari Arif Budiman yang kemudian dikomunikasikan lewat faximile. ■ zal/rys

Republika, 14 Mei 1995

BINGKAI

Sastra Profetik, Sastra yang Dilakoni

Ernest Hemingway, novelis dan cerpenis Amerika yang banyak menimba pengalaman hidup di Eropa sekitar Perang Dunia I berpendapat, bahwa dia harus menulis dari apa yang dilakoninya. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa novelnya "Farewell To Arms" (yang telah diterjemahkan oleh Toto Sudarto Bachtiar ke dalam bahasa Indonesia"), "The Sun Also Rises' (yang memunculkan kesadaran tentang "the lost generation"), adalah gambaran yang sangat dekat sekali dengan pengalaman pengarangnya. Kecintaannya untuk hidup di laut menghasilkan 'The Old man and the Sea', novel pendek yang mengangkat pertarungan 'si tua' di atas perahu nelayannya.

Pengarang tidak bisa menulis dari vakum, dari kekosongan, mungkin itu yang ingin dikatakannya. Walaupun unsur imajinasi merupakan unsur penting di dalam proses kreatif, pijakan bagi imajinasi seorang sastrawan niscaya harus kehidupan yang konkret.

Yang menjadi masalah bukan sekadar bagaimana seorang sastrawan melihat hidup, tetapi juga bagaimana dia menjalaninya. Dia tidak hanya dituntut untuk merenungkan, menganalisis, dan menjungkirbalikkan kehiudpan supaya dapat melihat segala sisisnya dalam pemikiran, tetapi juga jungkir-balik di dalam, bersentuhan, dan menjadi satu dengan kehidupan itu sendiri.

Tanpa melakoni seperti itu, mungkin saja dia dapat menghasilkan karya yang memberi keesan sebagai hasil perjalanan pemikiran, tetapi bukan suatu karya utuh sebagai keterpaduan antara pengalaman dan pemikiran.

Di dalam kaitannya dengan masalah sastra profetik yang digulirkan (kembali) oleh redaktur *Republika*, aktifitas melakoni hidup itu tetap merupakan syarat yang tak boleh ditawar.

Menangkap sosok Tuhan dan mengekspresikan ke Segala Maha-anNya tidaklah cukup berdasarkan pengetahuan dari buku, apalagi hanya dari mengintip karya-karya lain yang sudah dianggap sebagai karya yang mampu menghadirkan dzat Maha Tak Terbatas itu. Karya itu pada akhirnya dapat diraba sebagai karya yang cacat, lantaran unsur penting, persentuhan langsung dengan jejaknya tidak dilakoni.

Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya dengan kesempurnaan luar biasa, lengkap dengan hukum-hukumnya, yang harus ditangkap oleh manusia, agar mereka 'mengerti dan tidak menjadi orang yang merugi'. Namun, dalam banyak kesempatan, pesan yang tertulis dengan demikian jelas, yakni pesan untuk

Oleh **Sunaryono Basuki Ks**

mematuhi hukum yang telah digariskan oleh Tuhan itu, hanya diulang-ulang di dalam bentuk kata-kata tak bermakna.

Tuhan tidak akan pernah tidak adil, dan itu ditunjukkan-Nya pada manusia pada hukum yang telah digariskannya di dalam alam semesta ini. Walaupun manusia pada suatu saat atau pada suatu bagian dari alam dapat menjungkir-balikkan hukum alam dan hukum kehidupan, yang adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan, sebenarnya hukum itu tetap berjalan sesuai yang digariskan oleh Sang Penciptanya. Penyimpangan yang bersifat sementara sering tidak mampu dilihat oleh manusia yang tidak mau melihatnya.

Pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad sebagai utusanNya, merupakan kunci pembuka untuk jalan yang harus dilakoni selanjutnya, yang justru oleh kebanyakan orang dilakukannya sebagai sekadar suatu seremoni. Mengambil air wudhu sebelum melakukan salat merupakan perintah yang luar biasa tingginya bagi manusia, karena manusia diperintahkan untuk pertama dengan mengucap basmalah, membersihkan seluruh organ tubuhnya dari debu duniawi, bukan hanya sekadar dari kuman penyakit yang dapat disembuhkan oleh dokter.

Tak terbayangkan bagaimana bagusnya hidup di dunia ini bilamana semua orang menghayati arti wudhu, dan berwudhu sepanjang hari dan malam, tak henti-hentinya, membersihkan tangan dari pegang yang nista, mulut dari dengki dan iri, hidung dari mencium bau bangkai, sampai kaki dari tempat-tempat kotor. Lalu, di-

ikuti dengan salat, yang ditunjukkan sebagai lima waktu, tetapi seharusnya disadari sebagai upaya tak putus-putusnya berhubungan dengan Sang Pencipta dua puluh empat jam sehari.

Puasa yang merupakan rahmat tertinggi karena dilakukan manusia hanya untuk Allah, diformalkan selama bulan Ramadhan, tetapi dijalankan dua puluh empat jam selama setahun penuh dan tahun-tahun berikutnya, sambil memberikan zakat, dan akhirnya cukup mampu kita untuk menghadap Tuhan.

Memang, sastrawan pun hanyalah manusia biasa, yang lemah, sebagaimana kebanyakan kita semua, yang mungkin sudah mampu melihat hukum Allah itu, tetapi belum mampu untuk melakoni hidup sesuai dengan hukum itu. Jadi, sastra profetik mungkin memang hak harus menjadi karya semua sastrawan, tetapi hanya mereka yang dikasihi Allah. Dan itu adalah tipan yang sewaktu-waktu dapat dicabut.■

Penulis staf pengajar STKIP Singaraja dan Novelis

Republika, 14 Mei 1995

H.B. Jassin:

"Pernyataan Mei" Mewakili Hati Nurani dengan Catatan

Jakarta, Kompas

Mirip dengan Manifes Kebudayaan, yang dicetuskan 17 Agustus 1963, Pernyataan Mei, yang diumumkan oleh para seniman dan budayawan Jumat (12/5) pekan lalu di Jakarta, juga bisa dianggap mewakili sebuah hati nurani.

Namun sebuah catatan perlu diberikan untuk Pernyataan Mei itu, yaitu bahwa hendaknya mereka yang mendukungnya juga tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain sambil berusaha mencoba menggabungnya dalam sebuah jalan bersama, demikian pandangan H.B.Jassin, kritikus sastra terkemuka, ketika ditemui *Kompas* di Jakarta hari Selasa (16/5).

"Seperti dulu juga, meskipun mereka tidak memberi tanda tangan, tapi Manifes Kebudayaan (telah) mewakili hati nurani. Seperti dulu juga hati nurani itu diucapkan dan disambut oleh mereka dengan pernyataan setuju dan senang," begitu penjelasan H.B. Jassin di rumahnya Jl. Arimbi 21 B, Tanah Tinggi.

"(Waktu itu) kami juga mengumpulkan tanda tangan.... barangkali sama banyak dengan yang sekarang. Bahkan mahasiswa-mahasaiswa di luar negeri juga berkirim surat (menyatakan) ikut dalam gerakan yang dicetuskan dalam Manifes Kebudayaan,", begitu tambahnya.

Pandangan yang disampaikan oleh tokoh sastra Indonesia berusia 78 tahun itu berkaitan dengan Pernyataan Mei, yang dibacakan oleh penyair Sitok Srengenge dalam jumpa pers di Gedung HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat lalu (*Kompas*, 14/5).

Dalam pernyataan, yang sampai hari Jumat itu sudah ditandatangani oleh 42 seniman dan budayawan, diungkapkan sebuah kecemasan mengenai gejala "politik sebagai panglima" dan bahwa "akhirnya yang berlaku adalah yang kuat itulah yang benar". Bila hal itu terjadi, maka "bangsa pun akan menanggung hilangnya tenaga-tenaga yang kreatif dan mampu, sementara kemerdekaan dan keadilan mati, atau hampir mati, dicekik," demikian kesimpulan Pernyataan Mei. Karena itulah maka para penandatangan pernyataan tersebut mengimbau "agar kita perlu belajar dari sebuah peristiwa lebih 30 tahun yang lalu — sesuatu yang tidak boleh kita ulangi lagi kini."

Peristiwa yang dimaksudkan oleh Pernyataan Mei itu adalah larangan dari pemerintah Presiden Soekarno pada 8 Mei 1964 terhadap Manifes Kebudayaan - sebuah dokumen yang menekankan kemerdekaan hak mencipta. H.B. Jassin bersama dengan beberapa budayawan lainnya merupakan pencetus dan penggagas utama manifes tersebut.

Reaksi dan catatan

Pernyataan Mei sendiri sudah mulai mendapat banyak reaksi di kalangan media massa. HB Jassin melihatnya mirip dengan ketika untuk pertama kalinya Manifes Kebudayaan dicetuskan lebih dari 31 tahun yang lalu.

"Pada waktu kami mencetuskan Manifes Kebudayaan, kami tidak bermaksud untuk mencari lawan apa-apa. Kami berpegang pada Pancasila dan kami rasa Pancasila itu mencakup semuanya. Tapi waktu itu ada Nasakom dan ... lalu ada reaksi politik (terhadap Manifes Kebudayaan)," demikian keterangan HB Jassin mengenai reaksi terhadap manifes tersebut.

"Pada awalnya (Manifes Kebudayaan) adalah sebuah sikap kebudayaan. Tapi karena lalu disambut dengan sikap politik maka ya lalu mendapat sifat politik juga, dan itu tidak dimaksudkan sama sekali," tambahnya.

Dalam kaitan dengan reaksi-reaksi, yang kemungkinan besar bakal banyak dilontarkan pada Pernyataan Mei, HB Jassin minta agar selalu memperhatikan perkembangan-perkembangan pemikiran yang ada.

"Ini sebuah catatan (terhadap reaksi dan tanggapan atas Pernyataan Mei). Saya sangat menghadapkan satu dunia yang terang benderang, (yang) tidak ada bayangan, juga bayangan kita sendiri tidak ada. Yang ada ya cuma terang, muka kita terang, hingga begitu orang mau mengritik sesuatu, misalnya, dia tahu efeknya yaitu bahwa di samping kebenaran (yang) kita yakini ada kebenaran yang lain juga. Semua orang mempunyai kebenaran. Bagaimana menggabungkan kebenaran-kebenaran itu (menjadi) sejalan, itulah yang perlu diusahakan," begitu pendapat HB Jassin.

Apa yang dinyatakan oleh kritikus sastra Indonesia terkemuka itu, memang sudah pula menjadi bahan pembicaraan di kalangan para budayawan. Dalam acara pernikahan penulis sastra dan cerpen Radhar Panca Dahana di Jakarta hari Minggu lalu, misalnya, sutradara Boedi S. Otong begitu mengharapkan agar Pernyataan Mei tersebut hendaknya lebih menjadi pergulatan refleksi yang selalu didiskusikan dan bukan menjadi sebuah 'pengajaran' untuk massa.

Pernyataan Mei bukan untuk menjadi sebuah monolog tapi menjadi sebuah dialog, kata Boedi S. Otong. **(wit)**

Kompas,
17 Mei 1995

Walisongo, Mitos atau Realitas?

JAKARTA (Media): Seminar di Fakultas Sastra UI kemarin memperdebatkan keagungan cerita Walisongo hanya terbatas pada mitos atau benar-benar pernah terjadi dalam sejarah penyebaran agama Islam.

Untuk membedah persoalan itu, KH Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU), Dr Simuh (Rektor IAIN Sunan Kalijaga), Dr PA Purwadaksi (Ketua Jurusan Asia Barat FSUI), Nurcholish Madjid (dosen IAIN) dan Emha Ainun Nadjib (budayawan) hadir dan menyampaikan buah pemikiran dalam seminar itu.

Dr Simuh yang mendalami masalah kejawen itu sebelum masuk ke persoalan ini, terlebih dulu memaparkan kebudayaan Jawa dan pesantren khususnya dalam menanggapi segala hal yang bersifat imanen dan transendental. Telaah terhadap cara orang Jawa dalam menghayati keimanenan dan hubungan transendental itu, kata Simuh, merupakan kerangka paling unggul untuk bisa mengkaji keberadaan Walisongo di zamannya.

Simuh mengatakan, penyebaran Islam di Jawa segera berbenturan dan berhadapan dengan tradisi Hindu-Kejawen yang merupakan tradisi besar dan mengakar dalam pusat-pusat kerajaan yang umumnya berkembang di daerah-daerah pedalaman. "Maka pengembangan Islam terpaksa harus merangkak dari bawah, yakni melalui daerah-daerah pesisiran pulau Jawa yang belum banyak terjamah oleh tradisi budaya Hindu-Kejawan," katanya.

Menurut Simuh, di daerah pedesaan sepanjang pesisiran itu Islam diterima dengan penuh antusias sebagai peningkatan agama dan sastra budaya. Bahkan Islam segera mampu menyulap daerah-daerah pedesaan menjadi pusat tradisi sastra budya pesantrenan yang merupakan tradisi besar baru sebagai tandingan sastra budaya Jawa-Hindu keratonan yang berpusat di kerajaan Majapahit.

Menurut Simuh, ketegangan dan polemik terselubung antara Islam dan tradisi Kejawen nampak sekali bahwa pihak Kejawen yang lebih aktif untuk bertahan dan berkutat. Sedang santri (Islam) sebagai paham baru yang didukung oleh kepustakaan kitab-kitab kuning, tidak banyak menghiraukan dan tidak tertarik untuk mempelajari dan mendalami khazanah budaya kejawen.

"Mungkin karena mereka di atas angin, atau *ya* memang tidak sempat, lantaran menekuni bahasa Arab dan kitab-kitab kuning saja sudah menyita seluruh tenaga mereka. Lagipula memang amat sulit memahami sastra budaya Kejawen, lantaran banyaknya perbendaharaan Jawa kuno dan kata-kata Sansekertanya."

Dalam konteks pemikiran itu, Simuh mengatakan, konsep Walisongo memang berasal dari ajaran tasawuf di pesantren. Na-

nun bilangan *sanga* dan tokoh-tokoh wali yang digambarkan adalah dari alam pikiran Kejawen. "Jadi bisa dimengerti bahwa bagian besar dari kesembilan wali yang dalam sastra serta Babad itu berserta alur ceritanya, adalah rekaan menurut selera Kejawen, bukan dari tradisi pesantren." (Edi)

Media Indonesia, 19 Mei 1995

Menuju Dunia Sastra yang Demokratis dan Kompetitif

Oleh Puja Sutrisna

DISKUSI publik tentang RSP (Revitalisasi Sastra Pedalaman) begitu mengemuka setelah Kuspriyanto Namma dan Beno Siang Pamungkas keduanya mengaku sebagai Kepala Suku RSP — menggugat kembali tatanan sastra yang telah mapan.

Dalam sebuah presentasinya di surat kabar, Kuspriyanto Namma lagi-lagi mempertanyakan: kenapa karya-karya RSP tidak ter-*cover* oleh media massa yang memiliki skala nasional? Padahal — begitu argumen Kuspriyanto — karya-karya sastrawan dari "pedalaman", dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, melebihi karya-karya sastrawan Jakarta.

Senada dengan "keprihatinan" Kus, Beno Siang Pamungkas pada kesempatan lain dengan lantangnya "menerjang" barisan sastrawan dan pemerhati sastra di Auditorium Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Di sana, Beno "menghujat" publik sastra dengan menuding telah terjadi "persekongkolan Jakarta" dalam dunia sastra kita.

Tentu saja "tudingan" yang naif itu menyulut perdebatan sengit di antara sejumlah pemerhati sastra. Nirwan Dewanto, misalnya, menuduh Beno dkk sebagai 'seekor katak yang bernyanyi dalam tempurung'. Sementara salah seorang peminat sastra, Afnan Malay, berteriak-teriak bahwa RSP hanya sebagai perampok yang berhasil "merampok" isu sastra.

Demikianlah "polemik" itu semakin seru setelah Afrizal Malna, Beni Setia, Radhar Panca Dahana, Sitok Srengenge, Nor Pid Binarto, dan Paruk Ht melibatkan diri ke dalam perdebatan dengan "kaca mata" pengamatan mereka masing-masing. Terakhir Ahmad Syubbaiddin Alwy berkomentar, bahwa RSP tidak lebih dari sekadar menandai betapa di dalam wacana kesusastraan kita telah tumbuh *gap* (MI, 23 April 1995).

Pertanyaan mendasar

Mencermati diskusi yang berlangsung di media surat kabar sejak paruh akhir tahun 1994 sampai hari ini (Mei 1995), saya menangkap adanya semacam "pengulangan" dari debat-debat tentang tema yang sama sebelumnya, terutama pada dasa warsa delapanpuluhan ke belakang.

Saya teringat kepada Gerakan Puisi Mbeling di majalah *Aktuil* pimpinan Remy Sylado (1972-1973), Pengadilan Puisi di Bandung (1974), Proklamasi Puisi Bebas oleh Grup Apresiasi Sastra ITB (1979),

dan Perdebatan Sastra Kontekstual di Solo (1984). Semuanya, dengan pengetahuan yang luas dan argumentasi yang kokoh, menggugat tatanan sastra yang telah mapan. Namun, seperti biasanya, hasil diskusi itu selalu saja berhenti pada "hitam di atas putih"; berhenti pada kesimpulan hasil pembicaraan dan hujatan belaka. Sementara "rumah tangga" yang diperdebatkan justru dibiarkan tetap buram.

Salah satu pertanyaan mendasar yang luput dari segala macam perdebatan itu adalah: benarkah "perubahan" tatanan sastra kita bakal mampu menjadi obat yang mujarab bagi kehidupan "rumah tangga" sastra? Benarkah dunia sastra kita sudah membuat pemisahan antara sastrawan "pedalaman" dengan sastrawan "pusat"? Benarkah RSP selama ini "dipinggirkan" dari panggung sastra kita?

Pertama-tama tampaknya perlu dipahami, bahwa terminologi sastra sebagaimana dipahami dalam diskusi selama ini - sebetulnya merupakan dunia yang bersahaja dan sederhana: cukup demokratis dan tidak memilah-milah antara "pusat" dan "pedalaman". Ini berarti, baik yang mengaku sebagai kelompok RSP ataupun kelompok Jakarta, sejauh ini telah salah "memotret" keberadaan dunia sastra kita. Sistem sastra kita adalah merupakan "dunia" yang utuh, tidak terpecah-pecah.

Dalam konteks pemahaman seperti ini - dalam kerangka memperbaiki "rumah tangga" sastra - kiranya lebih pokok dan mendasar untuk mencari bentuk paket integral kegiatan sastra yang demokratis dan kompetitif, daripada sekadar melangsungkan diskusi tudingmenuding tanpa berkesudahan. Bagi saya, pencarian ini lebih penting. "Bentrokan" di kalangan sastrawan bisa dihindari. Bersamaan dengan itu, dengan pencarian tersebut, saran yang tepat untuk membangun "rumah tangga" sastra yang "berwibawa", juga bisa diketemukan.

Demokratis dan kompetitif

Dalam tataran yang ideal, "rumah tangga" sastra diperuntukkan guna menciptakan *representative publics*. Ia menjadi sebuah ekspresi, yang bisa diidentifikasi, dari "pertarungan" antar kelompok sastrawan. Sebagai sebuah eskpresi, ia mewakili ciri kompetitif dunia sastra. Dan manakala ciri kompetitif itu hilang, maka dunia sastra menjadi "dunia" yang semu. Ia hanya menjadi sebuah nama untuk mencari legalitas semata. Sebab, hakikat dunia sastra adalah kompetisi di antara para pekerjanya. Tidak boleh tidak!

Untuk menuju sebuah "rumah tangga" sastra yang demokratis dan kompetitif, maka setidaknya diperlukan sejumlah persyaratan-persyaratan.

Pertama, ada pengakuan dari poros-poros publik terhadap semua sastrawan - baik yang di "pedalaman" maupun yang di "pusat" - dalam berkarya, tanpa terkecuali. Semua diberi keleluasaan untuk membentuk "tempat penampungan" karya-karya mereka sendiri, dengan menyingkirkan prasangka bahwa "itu" karya sastra pinggiran atau "sastra arus bawah" atau "sastra pedalaman", dan lain sebagainya.

Kedua, ada kebebasan bagi masyarakat sastra untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan terhadap karya-karya sastra. Tentu saja, keleluasaan dan kebebasan itu harus dilengkapi dengan itikad baik media massa untuk memberanikan diri keluar dari tokoh-tokoh publik yang selama ini diakuinya. Tanpa adanya langkah ini, bukan tidak mungkin dunia sastra kita terjebak ke dalam pepatah: *witing tresna jalaran saka kulina*, artinya, hanya mengulang-ulang semua yang telah dan pernah terjadi.

Ketiga netralitas publik. Dalam hal ini media massa harus netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan dari salah satu "kelompok" yang berkompetisi di dalam "rumah tangga" sastra. Adalah percuma jika persyaratan di atas dipenuhi, namun pada akhirnya tidak ada kejujuran dan keobjektivan dari media massa dalam menilai kualitas sebuah karya sastra.

Kebutuhan implikatif

Memahami paparan di atas berarti memahami bahwa "menuju dunia sastra yang demokratis dan kompetitif" membawa sejumlah kebutuhan implikatif di belakangnya. Dalam konteks seperti ini, upaya perbaikan "rumah tangga" sastra akan sia-sia jika tidak diupayakan sebuah "dukungan" dari semua pihak.

Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP), yang sejak pasca "angkatan 66" dikomandani oleh Beno Siang Pamungkas, adalah sangat tidak kondusif bagi agenda perbaikan kesastraan kita. Perjalanan RSP - yang selalu mempermasalahkan "dominasi pusat" sulit untuk dijadikan arena bagi "pertarungan yang demokratis dan kompetitif".

Setidaknya ada dua hambatan yang menghadang perjalanan dunia sastra kita. Hambatan pertama bersifat subyektivitas media-massa, yaitu suatu kecenderungan untuk *"mengamin-i"* tokoh-tokoh publik dengan membesar-besarkan pemberitaannya. Munculnya nama-nama "yang itu-itu" saja, adalah wujud konkret keberadaan hambatan ini di dalam pengembangan "rumah tangga" sastra.

Hambatan kedua bersifat kultural, yaitu tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kecerdasan publik sastra yang belum memadai. Untuk menuju dunia sastra yang demokratis dan kompetitif, diperlukan seperangkat pengetahuan dan pemikiran yang luas serta kesadaran yang tinggi di antara pekerja-pekerjanya. Ini berarti baik hambatan subyektivitas maupun kultural perlu segera disingkirkan dari "panggung" sastra kita. Dan ini agaknya sudah mulai tertandai.***

*) **Puja Sutrisna.** *pekerja sastra dan budaya.*

Kompas, 21 Mei 1995

Sastra Baru: Metafiksi

Istilah 'metafiksi' (*metafiction*) yang kemudian menjadi aliran baru dalam sastra kontemporer, baru muncul pada tahun 1970, oleh kritikus William H. Gass dalam karyanya *Fiction and the Figures of Life*. Dalam hemat saya, aliran ini belum pernah dibicarakan secara khusus dan panjang-lebar oleh kritikus sastra di tanah air kita. Sementara dalam literatur Barat, aliran ini sudah begitu nyaring bergema sekalipun buku yang secara komprehensif membahasnya masih langka. Hingga kini, karya Patricia Waugh, *Metafiction, the Theory and Practice of Self-Concious Fiction*, tahun 1984, masih dianggap sebagai pengantar pada metafiksi yang paling memadai.

Metafiksi muncul dalam sejarah yang panjang dari sastra Barat, dan pemunculannya berdasarkan suatu reaksi terhadap sastra modern ala James dan aliran struktural-formalisme warisan Roman Jakobson. Namun sebenarnya, ia bersumber dari strukturalisme bahasa Ferdinand de Saussure, yang lalu 'murtad'.

Istilah 'meta' itu sendiri bukanlah baru, khususnya di dalam sejarah filsafat Barat. Sudah sejak filsafat Yunani Kuno, istilah itu sudah digunakan sebagai metafisika (*metaphisics*). "Meta" artinya "di balik" atau "melampaui". Metafisika dalam pengertian filosofis merupakan refleksi terhadap hal-hal di balik alam fisik, yang berupa konsep-konsep abstrak, rasional, sistematik, dan logis, yang tak berkaitan dengan istilah metafisika dalam pengertian "paranormal".

Istilah metafiksi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian filosofis di atas. Artinya, ia merupakan kajian sastra terhadap hal-hal atau realitas yang ada di balik fiksi itu sendiri. Apa maksudnya? Jenis kajian apa yang digunakan di sini, dan kriteria macam apakah yang membuatnya memadai sebagai sebuah kajian sastra? Karya-karya yang manakah sebagai objek kajiannya?

Seorang strukturalis bahasa bernama L. Hjelmslev disebut-sebut sebagai orang yang menginspirasi munculnya aliran metafiksi ketika ia mengembangkan teori linguistik struktural yang disebutnya sebagai "metalanguage". Jika kita mencari kriteria dasar yang digunakan oleh metafiksi, maka kriteriarya adalah pada model bahasa yang akarnya diberi oleh bapak aliran strukturalisme, Ferdinand de Saussure.

●●●

Persoalan dasar yang diajukan oleh aliran metafiksi ialah mempertanyakan konsep "realita" dalam karya sastra. Kajian awalnya sebenarnya terbatas pada novel-novel kontemporer, namun sekarang mulai meluas hingga ke analisa puisi dan teater.

Penggunaan konsep realitas memang cukup mengherankan di dalam wacana sastra atau fiksional. Bagaimana mungkin ketika kita membaca karya fiksi lalu pada saat yang sama kita harus mempersoalkan realitas di luarnya sebagai realitas non-fiksi? Kritisisme modern telah berusaha mengatasi problematika ini berdasarkan argumentasi abstraktif-apriori dengan asumsi-asumsi filosofis. Sedang bagi metafiksi persoalannya bukan pada asumsi-asumsi seperti itu melainkan pada asumsi filosofis bahasa yang dalam hal ini memandang karya sastra sebagai "teks". Sebagai sebuah teks, karya sastra tidak pernah menampilkan kesatuan makna (*unity*) sebagai realitas yang referensial. Sadar atau tidak, penulis sebelumnya telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa tertentu di dalam proses pergaulan sosialnya. Dengan alasan inilah bagi metafiksi, bahwa penulis dianggap tidak mungkin merepresentasikan makna atau prinsip yang utuh ke dalam karya sastranya.

Bahasa itu sendiri sudah merupakan substansi yang kompleks. Demikian halnya bahwa di dalam sebuah karya sastra selalu besar kemungkinannya berbagai aspek bahasa terdapat di dalamnya apakah bahasa fiksi itu sendiri, bahasa sejarah, bahasa jurnalistik, bahasa filsafat, bahasa antropologi, ideologi, dan lain sebagainya. Jadi, bahasa sastra tidak pernah muncul secara otonom fiksional dan karenanya butuh acuan di luar dirinya. Antara unsur satu dengan lainnya pasti ada relasi sekalipun tidak pernah menjadi satu kesatuan yang identik sebagai hukum kausal.

Dalam kritik dan karya sastra modern, bahasa sebagai representasi realitas sosial sangat menyolok tampil. Para penulis dianggap sebagai sosok jenius yang mampu menulis mewakili realitas tersebut. Dengan begitu sastrawan modern senantiasa mengidentikkan diri mereka dengan karyanya, yang secara logis pula identik dengan kenyataan yang mereka wakilkan itu. Paham seperti ini kita kenal dengan sebutan realisme-kritis sastra modern.

Berbeda dengan pandangan metafiksi, hubungan realitas di luar dan bahasa sastra sebagai ekspresi dari penulis dilihat tidak memiliki hukum identitas. Bahasa sekalipun masih dapat diterima sebagai gambaran realitas, namun tidak berarti identik dengan realitas. Hubungan bahasa dan realitas senantiasa ditandai oleh hukum perbedaan, di mana bahasa

itu sendiri tercipta dari kesepakatan tertentu yang di dalam dirinya sendiri telah mengandung potensi "penjustifikasian-diri" (*self-justification*).

Dalam sastra modern, karena ekspresi bahasa penulis dianggap representasi dari realitas, maka tokoh-tokoh di dalamnya pun digambarkan sebagai figur-figur yanag berkarakter prinsipil, apakah dengan sikap-sikap oposisi yang teralienasi dari sistem atau tokoh-tokoh yang menarik diri dari realitas untuk mencari kesendirian dalam perjalanan mencari jati-diri, seperti halnya Robinson Cruso.

Analisa metafiksi sebaliknya memperlihatkan hubungan dengan sifat perbedaan atau keretakan antara bahasa dan realitas, maka karakter yang pasti dan stabil pada dasarnya hanyalah sebuah usaha pemistifikasian gagasan. Maksudnya, penulis sebenarnya hanya sekadar mau menggambarkan demikian menyatunya (*familiar*) karakter tokoh-tokoh dengan realitas, kendati pada kenyataannya tidak pernah terjadi pada dunia nyata.

●●●

Ada baiknya kalau kita mencoba melihat bagaimana gambaran metafiksi di atas pada contoh novel *Para Priyayi*-nya Umar Kayam, misalnya. Dari sudut semiotik, novel ini langsung mengundang problematika bahasa; sebagai sebuah fiksi, tapi di lain pihak, dari judulnya saja telah mengandung sebuah makna bahasa yang denotatif, yang kemungkinan ingin bercerita mengenai sebuah masyarakat yang hadir dengan kultur dalam ruang dan waktu tertentu.

Sebagai karya fiksi, tentu saja novel itu bisa dibaca dengan sepenuhnya imajinatif. Namun hal itu dengan sendirinya segera terganggu oleh permainan bahasa yang dipakai di sana, yang tidak sepenuhnya bahasa fiksi. Ada struktur bahasa tertentu yang digunakan oleh penulis yang hanya mungkin dapat kita mengerti dengan mencarinya di luar bahasa novel tersebut. Jadi, novel itu serta merta mengisyaratkan tampilnya relasi-relasi yang beroposisi (*binaray-opposition*) antara bahasa fiksi dan non-fiksi. Kalau kita tidak membacanya sebagai sebuah "teks" dalam logika berbahasa, maka bagi metafiksi, novel tersebut segera saja gagal kita ikuti.

Hal yang sama dapat kita lihat pada "permainan bahasa" puisi-puisi Darmanto Jatman. Sebagian besar puisinya ditulis dengan campuran bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Jelas penulisan tersebut bukan hanya sekadar gaya. Puisi-puisinya tidak lain adalah permainan antara bahasa fiksi dan realitas, sehingga tidak akan kita temukan di sana bahasa yang terstruktur dengan referensi pada sebuah kesatuan makna. Ia menjauhkan kita (defamiliarisasi) dari hukum identitas antara bahasa dan realitas sehingga terkesan puisi pun menjadi sebuah "permainan" mengenai realitas yang tak pernah stabil.

Dalam karya-karya sastra seperti itu jelas menggambarkan bahwa sastra bukan saja ekspresi penulis untuk mewakili hukum identitas antara bahasa fiksi dan non-fiksi, tapi lewat pembahasannya tersirat bahwa dunia di baliknya pun sebenarnya merupakan sebuah konstruksi bahasa. Jadi, antara bahasa fiksi dan realitas bisa saja sama-sama hadir di dalam usaha konstruksi gagasan maupun imajinasi-imajinasi manusia. Dengan perkataan lain, dalam sastra, tidak ada unsur yang otonom. Dunia kehidupan itu sendiri tak lain adalah gambaran mengenai konstruksi antara fiksi dan non-fiksi lewat proses berbahasa.

Konstruksi dunia kehidupan berlangsung menurut model bahasa yang tercipta dan sistem tanda-tanda. Tanda-tanda fiksional hadir di dalam imajinasi-imajinasi manusia, tapi imajinasi pun bukanlah substansi yang mandiri. Berimajinasi bukan berarti terlepas dari realitas. Sama halnya, gagasan tidak pernah jatuh begitu saja dari langit. Jelasnya, sebagaimana bahasa hasil dari kesepakatan antara "penanda" (*sound-image*) dan "petanda" (*mental-image*), begitu pula kehidupan sehari-hari kita hadir.

Dari kesepakatan bahasa tersebut, muncul dua aspek bahasa, yang satu tersistem dengan sifat komunikasinya berlaku umum (*langue*), dan yang lainnya tak tersistem karena tak bisa lepas dari kemampuan pribadi atau individu manusia berbahasa (*parole*). Bahasa yang tersistem dianggap stabil, sistematik, dan rasional, sedangkan bahasa individual tidak stabil tapi lebih kreatif di dalam memunculkan persoalan-persoalan baru. Hubungan keduanya pun hanya mungkin serba kesepakatan sekalipun tidak berarti harus ada pemaksaan ke serbatunggal suara, sebab cara itu anarki dan menghancurkan bahasa di realitas manusia itu sendiri.

Menurut penilaian metafiksi, keserbatunggalan suara itu diwakili oleh sastra yang berorientasi pada subjek (*author*) sebab mereka menganggap penulis adalah person-person yang jenius, rasional dan sistematik sebagai wakil sekaligus mewakili zamannya kendati pun itu nyatanya cuma mistifikasi. Logikanya, untuk memahami karya sastra, pembaca haruslah berorientasi pada gagasan penulis yang jenius itu. Tapi dalam metafiksi, karya sastra sebagai teks dilepaskan dari subjek untuk menghindari apriori bahasa. Jadi metafiksi sekalipun sebuah analisa yang mengacu pada dunia di luar karya, tapi bukan berarti sebuah dunia "ontologis" (dua yang sudah ada dengan sendirinya) melainkan pada dunia yang terkonstruksi oleh bahasa. Dan di dalam bahasa itu sendiri yang lebih ditekankan ialah pada

kreativitas individual (bukan individualisme) ketimbang bahasa sebagai sistem (*langue*).

●●●

Gagasan metafiksi akan sangat jelas jika kita membaca karya-karya yang memang ini telah menjadi objek kajian metafiksi, seperti novel-novel John Fowles, John Gardner, Borges, Barthelme, Umberto Eco, Tony Marrison, puisi-puisi Walcott, dan lain-lainnya. Kekhasan dari karya-karya mereka ialah lebih berpihak pada bahasa *parole* yang selama ini dianggap *the other* atau marjinal. Jadi, metafiksi pada awalnya diturunkan dari strukturalisme tapi sekaligus mendekonstruksinya.

■ Penulis adalah Dosen Filsafat di FSUI, Ketua Lembaga Studi Filsafat (LSF) Jakarta

Republika, 21 Mei 1995

Kritik Apresiatif, Kritik Palsu

Tanggapan Untuk Nyoman Tusthi Eddy

Oleh Nigar Pandrianto

Cukup menarik apa yang dikemukakan oleh Nyoman Tusthi Eddy pada *Suara Karya Edisi Minggu*, 30 April lalu, tentang *kritikk apresiatif*. Nyoman Tusthi mengemukakan bahwa *kritik apresiatif* merupakan alternatif terbaik untuk menggerakkan masyarakat konvensional menuju masyarakat sastra yang cukup matang. Meskipun Nyoman Tusthi sendiri tidak lebih menjelaskan arti term tersebut. Namun, disampaikannya selintas bahwa *kritik apresiatif* adalah kritik yang ditulis berdasarkan kesan serta tanggapan kritikus terhadap karya sastra yang dikritiknya. Dengan demikian, terciptalah sebuah "jembatan" antara karya sastra dengan pembacanya.

Adalah sebuah pendapat yang lumayan ekstrim yang dikemukakan oleh Sapardi Djoko Damono, bahwa sebuah sajak (atau novel, cerpen dan naskah drama) tidaklah membutuhkan perantara. Karena sebuah sajak yang baik akan mampu berdialog dengan pembacanya, tanpa ada orang lain yang memperantarainya. Akan tetapi persoalan akan muncul manakala sebuah karya tidak lagi mampu berdialog dengan pembacanya. Dalam perspektif komunikasi, ini jelas sebuah kegagalan.

Yang kemudian mungkin menjadi pertanyaan, apakah *kritik apresiatif* memungkinkan untuk menggali kekayaan makna yang tersimpan dalam sebuah karya? Apakah *kritik apresiatif* cukup mampu dijadikan alat bantu untuk mengeluarkan fenomena yang terkandung dalam sebuah karya?

Ketika hendak menyelami sebuah karya sastra, dan mencoba untuk mengungkapkan makna di dalamnya, kita selalu membutuhkan perangkat, tidak sekadar naluri atau perasaan untuk menghasilkan "kesan". Sebab, "kesan" bukanlah "isi" apalagi "obyek", tetapi sekadar skematisasi kenyataan yang lebih bersifat individual, yang hanya merupakan hasil perjumpaan dengan karya pada tahap paling awal. Untuk mengeluarkan kekayaan makna lewat proses *eksegesis*, kita memerlukan pisau analis yang memadai. Di sinilah berbagai pendekatan sampai model analisis dibutuhkan.

Ketika berhadapan dengan sebuah karya, sudah seharusnya kita tahu bahwa karya tersebut tidak begitu saja hadir sebagaimana adanya, tetapi ada semacam dinamika yang melatarbelakanginya, ada sesuatu yang mengarusinya. Sekaitan dengan itu, untuk mencapai pemahaman yang utuh, perlulah kita memperhitungkan konteks karya -- sebagai ekspresi -- itu dilahirkan, baik konteks eksistensial, fungsional atau historikal.

Dengan memahami konteks - konteks tersebut, kita akan mempunyai ancang - ancang dalam menyikapi sebuah karya, meski ini

bukan berarti kita harus bersikap *apriori* ketika hendak mendekati sebuah karya. Kita tidak bisa berangkat untuk memahami sebuah karya dengan keadaan *blank* (kosong), sebab hal ini hanya mengakibatkan *deformasi*. *Deformasi* tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah pencermatan yang seksama, dan ini artinya ketidakmunculan makna dalam sebuah karya. *Deformasi* tidak bisa memunculkan informasi (makna), sebaliknya, informasi yang minim hanya mengakibatkan *deformasi*.

Jelas, sebuah karya tidak bisa dihampiri secara semena-mena. Ada hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti halnya *konteks ekspresi* bahkan sampai lacakan "roh zaman", *zeitgeist* karya yang dilahirkan. Ini penting dalam kerja pemaknaan sebuah karya, dan bukan sekadar untuk memperoleh semacam predikat ilmiah. Bahkan, Hans Robert Jausz mengutarakan apa yang disebutnya sebagai *rezeptionsasthetik* (estetika penerimaan). Ini menandakan bahwa sesungguhnya kita harus cukup bijak memperlakukan sebuah karya. Apalagi jika sadar bahwa sebuah karya tidak lahir, dalam istilah Dick Hartoko, dalam keadaan suci hama, melainkan tumbuh dalam arus sejarah dan konteks sosial budaya tertentu. Betapa pun, pendekatan sampai model analisis, masih diperlukan, sebagai alat dalam mengungkapkan realitas atau pun fenomena, dalam tingkat atau kadar seminim apa pun.

Disertakannya alat bantu dalam penelusuran makna sebuah karya, akan semakin mengungkap obyektivitas dari karya tersebut. Bahkan mungkin akan membawa kita pada kenyataan - kenyataan yang tidak bisa ditangkap atau dicapai oleh sekadar intuisi belaka, dan bukan tidak mungkin pula pemahaman - pemahaman pada dimensi lain. Jika kita lihat, ternyata sebuah karya bisa lebih bermakna lewat pemahaman konteks dalam esainya yang berjudul *Nyanyian Sunyi Kedua*, yang merupakan analisa terhadap kumpulan sejak Sapardi Djoko Damono, *DakuMu Abadi* (Seno Gumira Adjidarma, *Basis*, Februari 1995). Hal yang sama bukan tidak mungkin kita coba pada kumpulan *Sanksi Mata*-nya Seno Gumira A, meskipun sudah menjadi rahasia umum apa sebenarnya yang dicoba untuk diungkapkan oleh Seno dalam cerpen - cerpennya.

Juga ketika kita membaca *Wacana Sastra dan Ideologi* dari Kris Budiman, kita, minimal saya, akan menyaksikan bagaimana pendekatan pada karya justru mengatakan nuansa lain yang belum tersentuh. Misalnya saja pendekatan atau model *proses ritual* dari Victor W Turner pada puisi Rendra *Nyanyian Angsa*. Juga perihal *sudut pandang ideologis* pada cerpen Umar Kayam *Sri Sumarah*. Alat bantu yang dikemukakan di atas, yang digunakan oleh Kris Budiman dalam buku tersebut, sanggup menyatakan kenyataan lain, mempresentasikan sisi lain yang lebih dalam dari karya Umar Kayam (cerpen *Sri Sumarah)* dan Rendra (sajak *Nyanyian Angsa)*.

Kritik, dalam kenyataannya adalah suatu usaha untuk memperantarai pembaca dengan karya sang kreator seperti yang ditulis oleh Nyoman Tusthi. Namun, selain itu, kritik pun merupakan sebuah usaha untuk menyampaikan, mengkatakan semesta sebuah karya kepada pembacanya. Di sini, proses interpretasi satu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, pun metode yang bisa membuat sebuah karya lebih "bergema". Jika kritik melibatkan interpretasi, yang menjadi pertanyaan, interpretasi yang seperti apakah yang bisa membantu pencarian makna dan kedalaman arti.

Ukuran kebenaran interpretasi adalah manakala interpretasi bertumpu pada evidensi - evidensi obyektif, yang dapat diidentifikasikan sebagai kata realitas, yang terbukti dapat dikenali dalam realitas itu sendiri, dan bukan interpretasi yang "mengigau", yang hanya menurut selera sang interpretator. Interpretasi bukan hal *like or dislike*, suka atau tidak suka *(Interpretasi,* Dr W Poespoprodjo LPh, SH).

Metode atau model analisis adalah interpretasi, yang lebih memiliki nilai praktis dalam pemahaman sebuah teks. Di sini, metode atau model analisis pun adalah salah satu dimensi dalam interpretasi. Dalam kaitannya dengan *kritik apresiatif*, saya khawatir kritik ini hanya melibatkan *situasi interpretasi (vorhabe, vorgriff, vorsicht)* yang hanya akan membawa kita pada tingkat *prapemahaman* sebuah teks atau realitas. *Vorhabe, vorgriff* dan *vorsicht* (apa yang pernah dimiliki sebelumnya, apa yang pernah ditangkap atau dipikirkan sebelumnya, dan

apa yang pernah terlihat sebelumnya), sebenarnya belum membawa kita pada pemahaman sebuah teks, sebab pada tingkat *prapemahaman* masih terjadi proses resiprositas. Di sini ada semacam dialog dengan teks untuk mencapai pemahaman yang sesungguhnya, *nachbildung*. Ini berarti, sebuah kritik yang hanya melibatkan *situasi interpretasi, prapemahaman,* belum bisa sepenuhnya dikatakan bisa memberikan sesuatu pada pembaca atau penikmat karya.

Jika kita hendak memberikan aksentuasi pada fungsi kritik sebagai jembatan penghubung antara pembaca dan karya sastra, kritik yang hanya bergerak di tingkat *prapemahaman,* tidak akan pernah sungguh - sungguh mempertemukan di pihak tersebut. Karya sastra hanya menjadi sesuatu yang tidak punya arti apa-apa. Mungkin bisa, akan tetapi sangat mungkin tidak akan memunculkan makna yang seharusnya teridentifikasi dalam karya tersebut. Jika ini dibiarkan dan terus dipaksakan, maka yang terjadi adalah pendistorsian arti dan makna, sekaligus manipulasi dari interpretasi, sehingga kritik tak lebih dari pemalsuan. Kritik pada tingkat *pra-pemahaman* hanya sebuah simplifikasi dari kritik yang sesungguhnya, yang dari situ sangat potensial pula muncul penghakiman - penghakiman pada sebuah karya yang tidak berdasar. Dan jika kita masih percaya pada idiom "sastra yang membebaskan", kenyataan ini tidak akan pernah sepenuhnya memberikan pembebasan atau bahkan "pencerahan".

Dengan demikian, apakah kita masih bisa mengatakan kritik sastra yang tengah kita bicarakan ini merupakan alternatif terbaik untuk menggerakkan masyarakat sastra yang konvensional menuju masyarakat yang memiliki kemampuan apresiasi yang lebih mapan.

Kritik sastra, harus diakui, adalah satu proses atau usaha untuk menerangkan kompleksitas sebuah karya. Dengan demikian sebuah karya tidak gelap lagi di hadapan calon pembaca atau penikmatnya. Tapi manakala kritik tidak dapat memenuhi itu semua, maka bahaya yang mungkin hadir adalah terlahirnya makna palsu yang memperdayakan pembaca, dan pembaca tidak akan pernah bisa keluar dari penjara konvensional. Karenanya, pembaca akan terus mengalami keterasingan *(alienasi)* dalam atmosfer kesusastraan. Ia tidak akan pernah keluar dari belenggu "kultural" yang terus menghimpitnya. Ini yang sepatutnya dihindari.

Sekali lagi, kritik sastra tidak hanya bisa bersandar pada *situasi interpretasi* saja, sebab ini bisa menampilkan kenyataan yang sesungguhnya, tetapi seyogyanya dijalin dengan alat lain, bisa norma linguistik, semantik, flologis atau historis. Juga pendekatan yang relevan dengan karya sastra, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, struktural sampai semiotik. Dengan cara seperti itu, kritik sastra tidak hanya merupakan jembatan penghubung, tetapi sekaligus usaha terbukanya pembaca pada kepingan - kepingan kekayaan lain yang dicoba untuk dikomunikasikan lewat sastra. Dan ini akan lebih memastikan bahwa sastra memang bisa dijadikan satu saluran komunikasi lain yang lebih bisa "diharapkan" setelah jurnalisme.

Suara Karya, 21 Mei 1995

Menuju Dunia Sastra yang Demokratis dan Kompetitif

Oleh Puja Sutrisna

DISKUSI publik tentang RSP (Revitalisasi Sastra Pedalaman) begitu mengemuka setelah Kuspriyanto Namma dan Beno Siang Pamungkas keduanya mengaku sebagai Kepala Suku RSP — menggugat kembali tatanan sastra yang telah mapan.

Dalam sebuah presentasinya di surat kabar, Kuspriyanto Namma lagi-lagi mempertanyakan: kenapa karya-karya RSP tidak ter-*cover* oleh media massa yang memiliki skala nasional? Padahal — begitu argumen Kuspriyanto — karya-karya sastrawan dari "pedalaman", dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, melebihi karya-karya sastrawan Jakarta.

Senada dengan "keprihatinan" Kus, Beno Siang Pamungkas pada kesempatan lain dengan lantangnya "menerjang" barisan sastrawan dan pemerhati sastra di Auditorium Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Di sana, Beno "menghujat" publik sastra dengan menuding telah terjadi "persekongkolan Jakarta" dalam dunia sastra kita.

Tentu saja "tudingan" yang naif itu menyulut perdebatan sengit di antara sejumlah pemerhati sastra. Nirwan Dewanto, misalnya, menuduh Beno dkk sebagai "seekor katak yang bernyanyi dalam tempurung". Sementara salah seorang peminat sastra, Afnan Malay, berteriak-teriak bahwa RSP hanya sebagai perampok yang berhasil "merampok" isu sastra.

Demikianlah "polemik" itu semakin seru setelah Afrizal Malna, Beni Setia, Radhar Panca Dahana, Sitok Srengenge, Nor Pid Binarto, dan Paruk Ht melibatkan diri ke dalam perdebatan dengan "kaca mata" pengamatan mereka masing-masing. Terakhir Ahmad Syubbaiddin Alwy berkomentar, bahwa RSP tidak lebih dari sekadar menandai betapa di dalam wacana kesusastraan kita telah tumbuh *gap* (MI, 23 April 1995).

Pertanyaan mendasar

Mencermati diskusi yang berlangsung di media surat kabar sejak paruh akhir tahun 1994 sampai hari ini (Mei 1995), saya menangkap adanya semacam "pengulangan" dari debat-debat tentang tema yang sama sebelumnya, terutama pada dasawarsa delapanpuluhan ke belakang.

Saya teringat kepada Gerakan Puisi Mbeling di majalah *Aktuil* pimpinan Remy Sylado (1972-1973), Pengadilan Puisi di Bandung (1974), Proklamasi Puisi Bebas oleh Grup Apresiasi Sastra ITB (1979), dan Perdebatan Sastra Kontekstual di Solo (1984). Semuanya, dengan pengetahuan yang luas dan argumentasi yang kokoh, menggugat tatanan sastra yang telah mapan. Namun, seperti biasanya, hasil diskusi itu selalu saja berhenti pada "hitam di atas putih", berhenti pada kesimpulan hasil pembicaraan dan hujatan belaka. Sementara "rumah tangga" yang diperdebatkan justru dibiarkan tetap buram.

Salah satu pertanyaan mendasar yang luput dari segala macam perdebatan itu adalah: benarkah "perubahan" tatanan sastra kita bakal mampu menjadi obat yang mujarab bagi kehidupan "rumah tangga" sastra? Benarkah dunia sastra kita sudah membuat pemisahan antara sastrawan "pedalaman" dengan sastrawan "pusat"? Benarkah RSP selama ini "dipinggirkan" dari panggung sastra kita?

Pertama-tama tampaknya perlu dipahami, bahwa terminologi sastra sebagaimana dipahami dalam diskusi selama ini - sebetulnya merupakan dunia yang bersahaja dan sederhana: cukup demokratis dan tidak memilah-milah antara "pusat" dan "pedalaman". Ini berarti, baik yang mengaku sebagai kelompok RSP ataupun kelompok Jakarta, sejauh ini telah salah "memotret" keberadaan dunia sastra kita. Sistem sastra kita adalah merupakan "dunia" yang utuh, tidak terpecah-pecah.

Dalam konteks pemahaman seperti ini - dalam kerangka memperbaiki "rumah tangga", sastra - kiranya lebih pokok dan mendasar untuk mencari bentuk paket integral kegiatan sastra yang demokratis dan kompetitif, daripada sekadar melangsungkan diskusi tuding-menuding tanpa berkesudahan. Bagi saya, pencarian ini lebih penting. "Bentrokan" di kalangan sastrawan bisa dihindari. Bersamaan dengan itu, dengan pencarian tersebut, saluran yang tepat untuk membangun "rumah tangga" sastra yang "berbudaya" juga bisa diketemukan.

Demokratis dan kompetitif

Dalam tataran yang ideal, "rumah tangga" sastra diperuntukkan guna menciptakan *representative publics*. Ia menjadi sebuah ekspresi, yang bisa diidentifikasi, dari "pertarungan" antar kelompok sastrawan. Sebagai sebuah eskpresi, ia mewakili ciri kompetitif dunia sastra. Dan manakala ciri kompetitif itu hilang, maka dunia sastra menjadi "dunia" yang semu. Ia hanya menjadi sebuah nama untuk mencari legalitas semata. Sebab, hakikat dunia sastra adalah kompetisi di antara para pekerjanya. Tidak boleh tidak!

Untuk menuju sebuah "rumah tangga" sastra yang demokratis dan kompetitif, maka setidaknya diperlukan sejum-

lah persyaratan-persyaratan.

Pertama, ada pengakuan dari poros-poros publik terhadap semua sastrawan - baik yang di "pedalaman" maupun yang di "pusat" - dalam berkarya, tanpa terkecuali. Semua diberi keleluasaan untuk membentuk "tempat penampungan" karya-karya mereka sendiri, dengan menyingkirkan prasangka bahwa "itu" karya sastra pinggiran atau "sastra arus bawah" atau "sastra pedalaman", dan lain sebagainya.

Kedua, ada kebebasan bagi masyarakat sastra untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan terhadap karya-karya sastra. Tentu saja, keleluasaan dan kebebasan itu harus dilengkapi dengan itikad baik media massa untuk memberanikan diri keluar dari tokoh-tokoh publik yang selama ini diakuinya. Tanpa adanya langkah ini, bukan tidak mungkin dunia sastra kita terjebak ke dalam pepatah: *witing tresna jalaran saka kulina*, artinya, hanya mengulang-ulang semua yang telah dan pernah terjadi.

Ketiga netralitas publik. Dalam hal ini media massa harus netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan dari salah satu "kelompok" yang berkompetisi di dalam "rumah tangga" sastra. Adalah percuma jika persyaratan di atas dipenuhi, namun pada akhirnya tidak ada kejujuran dan keobjektivan dari media massa dalam menilai kualitas sebuah karya sastra.

Kebutuhan implikatif

Memahami paparan di atas berarti memahami bahwa "menuju dunia sastra yang demokratis dan kompetitif" membawa sejumlah kebutuhan implikatif di belakangnya. Dalam konteks seperti ini, upaya perbaikan "rumah tangga" sastra akan sia-sia jika tidak diupayakan sebuah "dukungan" dari semua pihak.

Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP), yang sejak pasca "angkatan 66" dikomandani oleh Beno Siang Pamungkas, adalah sangat tidak kondusif bagi agenda perbaikan kesastraan kita. Perjalanan RSP - yang selalu mempermasalahkan "dominasi pusat" sulit untuk dijadikan arena bagi "pertarungan yang demokratis dan kompetitif".

Setidaknya ada dua hambatan yang menghadang perjalanan dunia sastra kita. Hambatan pertama bersifat subyektivitas media-massa, yaitu suatu kecenderungan untuk *"mengamin-i"* tokoh-tokoh publik dengan membesar-besarkan pemberitaannya. Munculnya nama-nama "yang itu-itu" saja, adalah wujud konkret keberadaan hambatan ini di dalam pengembangan "rumah tangga" sastra.

Hambatan kedua bersifat kultural, yaitu tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kecerdasan publik sastra yang belum memadai. Untuk menuju dunia sastra yang demokratis dan kompetitif, diperlukan seperangkat pengetahuan dan pemikiran yang luas serta kesadaran yang tinggi di antara pekerja-pekerjanya. Ini berarti baik hambatan subyektivitas maupun kultural perlu segera disingkirkan dari "panggung" sastra kita. Dan ini agaknya sudah mulai tertandai.***

*) **Puja Sutrisna**, *pekerja sastra dan budaya.*

Kompas, 21 Mei 1995

Sastra dalam Kesetaraan Dunia

Oleh Nor Pud Binarto T

SELANG sepuluh tahun terakhir muncul keinginan kuat memasukkan khazanah sastra Indonesia ke dalam rotasi sastra dunia. Optimisme itu, seperti diterakan Nirwan Dewanto, merupakan upaya mencapai "kewajaran dan kesehatan tindak sastra itu sendiri" (*Kompas*, 29/1/1995).

Memang, cara pandang Barat mulai bergeser. Ini terutama ditandai dengan pengakuan atas karya sastra Afro dan berjangkitnya kekuatan kesastraan Hispanik. Akibatnya, cetak biru kebudayaan kontemporer itu lalu melahirkan apologia ambang, seperti yang dipaparkan Nirwan Dewanto sebelumnya.

Namun — betapa pun paranoidnya — sejarah sendiri juga mencatat banyak kemuslihatan. Itulah mengapa selayaknya semua harus ditanggapi lebih kritis. Apakah pengakuan atas karya sastra Afro, misalnya, cukup mengikis anggapan Barat tidak menindas, tidak keras kepala? Pada tingkat operasional hal ini masih harus dibuktikan. Khusus untuk Indonesia, juga harus dibuktikan, misalnya, bagaimana tingkat keterhubungan antara kolonialisme dengan nasib buruk pergaulan sastra modern Indonesia dalam melakukan kontak dengan sastra dunia.

***

SEBELUM memasuki landas anggapan, ada baiknya penulis mulai dengan menempatkan hipotesis multikultural sebagai bagian dari kecenderungan ilmu sosial pada umumnya. Artinya, secara simplistis, pengertian dan pengakuan multikulturalisme itu harus beranjak dari pemahaman dasar terhadap genre kultur itu sendiri.

Dalam kaitan dengan pengakuan terhadap sastra Dunia Ketiga, terdapat tiga kemungkinan yang tidak terluputkan. Pertama, adanya kesadaran masyarakat pascakolonial dalam menjawab perubahan dunia. Kedua, kecenderungan mere-

mehkan karya sastra pascakolonial — yang terimplementasi melalui filsafat modernisme — ternyata merupakan bagian takterpisahkan dari semangat kolonialisme itu sendiri. Dan ketiga, bentuk penolakan Barat terhadap karya sastra pascakolonial seringkali dijadikan alasan bahwa dalam konteks sastra modern hanya berlaku satu kebudayaan tunggal.

Dari sini, penulis lalu bertanya, apakah pengakuan atas konsep multi-kulturalis itu sama dan sebangun dengan tuntutan kesetaraan masyarakat sastra pascakolonial?

Jika konsep pluralistik hendak dijadikan alasan, maka perlu diperdebatkan ulang apakah karya yang disebutkan Nirwan menjawab banyak keinginan mendasar itu?

Sejauh yang penulis ketahui, nama-nama penting seperti Gabriel Marques, Vargas Llosa, Ben Jelloun, atau Manuel Puig, tidak luput dari perputaran kepentingan Barat untuk menguasai pasar kesastraan internasional. Ibarat AS menawarkan pertemuan APEC dan Indonesia menjalankan deregulasi, itu semua tidak dengan sendirinya berarti peluang yang sama diberikan kepada para anggotanya.

Di sinilah tidak menjadi relevan lagi bila seseorang pernah membaca berbagai karya sastra Dunia Ketiga, lalu dengan sama mudahnya segera mengatakan Barat tidak lagi keras kepala, tidak lagi menindas, dan seterusnya.

Buat penulis, pengakuan terhadap karya sastra Dunia Ketiga (masyarakat pascakolonial), tidak begitu saja bisa diasumsikan sebagai "sejarah yang bisa diterima begitu rupa" (*accepted history*). Banyak kemungkinan dapat dijadikan asumsi, misalnya, dengan menguji kembali tingkat kemampuan (sastra Indonesia) dan tingkat harapan yang dimilikinya.

***

BETUL tata politik-ekonomi global katanya sudah bergeser ke Timur. Inilah *Pasific Rim Decade*. Dari sini lalu dapat mengasumsikan, pergeseran tersebut juga turut mempengaruhi pengakuan Barat terhadap sastra Dunia Ketiga. Ada pendekatan yang mirip koeksistensi baru, atau seperti dinyatakan Edward Said inilah *the culture of global colonialism*. Hipotesis Said ini mungkin ada benarnya. Setidaknya, apa yang dibayangkan sebagai pengakuan, tidak selalu mengandung arti adanya transformasi atau semacam "usaha melakukan perpindahan sistem nilai".

Betapa pun penulis membaca karya-karya Bessie Head, Alex de Guma, Wole Soyinka, atau Nadine Gordimer, itu tidak berarti menunjukkan kebudayaan Barat berbaik budi. Saya tidak berani mengatakan melalui karya-karya berlatar belakang Afro yang naik ke pentas dunia itu, lalu ada anggapan sastra Afrika bangkit secara independen. Orang masih melihat bagaimana orang-orang seperti Anta Diop, Paulin Hountodjii, VY Mudimbe atau Ali Mazrui, begitu "lelah" melakukan pencarian orbit pengakuan di lingkaran internasional.

Ada baiknya, apa yang lazim disebut sebagai "kanon sastra Barat mengarah ke Timur" dilihat lebih cermat. Hendaknya para kritisi sastra Indonesia tidak mudah percaya bahwa setiap tindakan pengakuan itu tidak dapat dilepaskan dari hipotesis Said mengenai *spiral away* dan *extrapolation* budaya Barat dalam usaha memeriksa proses kreatif budaya Timur.

Pra-asumsi tersebut akan lebih mantap jika orang berani mengungkapkan tesis Samuel Huntington mengenai benturan peradaban. Secara lugas, Huntington mencerminkan kekhawatiran budaya Barat terhadap budaya Timur. Dilihat dari kerangka ini, maka jangan terlalu berharap kebangkitan yang terjadi saat ini dapat mengatrol posisi Seno Gumira, Armyn Pane, bahkan Pramudya, ke tingkat paling tinggi dalam percaturan sastra dunia.

Menyangkut kemiskinan Indonesia dalam memasuki tahap orbit pergaulan sastra dunia, tidak terdapat bukti langsung ada keterkaitan antara kolonialisme dengan pengakuan karya sastra. Kalaupun ada, kemungkinan besar itu hanya dalam konteks penguasaan bahasa. Karya Ben Jelloun, Wole Soyinka, atau Milan Kundera, dapat cepat diketahui masyarakat sastra dunia karena cepatnya proses penerjemahan dan penguasaan bahasa.

Apakah karya sastra Indonesia memang laik memasuki khazanah sastra dunia, itu semua ditentukan kualitas sastra itu sendiri. Titik persoalannya adalah kualitas itu justru luput dari kajian para kritisi sastra, termasuk juga luput dari proses penelitian, karena terjerembab pada kilau kemilau yang memabukkan.***

*) *Nor Pud Binarto T, Kepala Lembaga Studi Semiotika Berempat, Jakarta*

Kompas, 28 Mei 1995

Mungkin Kita cuma Butuh 'Sastra tak Senonoh'

POLEMIK

Oleh Beni Setia

Emha Ainun Nadjib sedang membaca sajak-sajak sosial di TIM. Sajak-sajak sufistik maupun sajak-sajak sosialnya, menurut Dr. Damardjati Supadjar, tetap dibutuhkan untuk masa depan. Tapi, Dr. Simuh bilang masa depan lebih membutuhkan sastra realis-idealis semacam *Layar Terkembang*-nya Sutan Takdir Alisjahbana. Mungkin ini penting untuk diperdebatkan.

Sampai dengan transkripsi wawancara *Republika* dengan Budi Darma, polemik tentang kebudayaan di milenium ketiga itu belum saling bersinggungan dan hanya melahirkan kolam dengan sekian puluh arca yang menyemburkan air mancur sendiri-sendiri. Mungkin ini risiko forum dengan teramat banyak prasaran dan pemrasaran tanpa janji terlebih dulu.

Gagasan Arief Budiman pun sebenarnya nyaris asbun meski tampaknya bersemangat melakukan desentralisasi sastra. Sebuah masa depan sastra yang pluralistik — sebuah gagasan tentang politik-sastra. Tapi itu cuma *wishful thinking* — yang satu sisi lainnya, dari mata uang yang sama, disinggung Budi Darma dari keyakinan pada etos kreatif sejati seorang kreator murni.

Sama *wishful thingking*-nya adalah pembicaraan Damardjati Supadjar yang — secara simbolik — bicara tentang adanya kekuatan yang mengotori dunia dan harus dikalahkan dengan kekuatan yang membersihkan dunia dan bersifat amat persuatif dan tidak konfrontatif. Ini impian Ratu Adil, impinan Iman Mahdi, dengan buru-buru melengos pada kenyataan bahwa kini kita hidup — dalam perlambang Jawa — di sebuah "zaman edan", dengan orang yang tak lagi tahu kewarasan dan keedanan dan karenanya merasa waras sendiri dan melihat yang lain sebagai edan dan karenanya ikut edan dalam perasaan warasnya yang teramat pseudo.

Saya pikir gagasan tentang sastra profetik atau sosok waras dalam simbol Khidir adalah cara untuk "tidur" dalam memahami masa kita dan sekaligus jaga di masa depan. Dengan kata lain, kita setengah tidur dalam sebuah chaos, yang bernama (gua) *Ashabul Kahfi*, dan terjaga di masa depan. Akan ada Khidir. Akan ada jaga bagi orang yang *eling lan waspada*. Tapi apa itu?

Damardjati Supadjar sesungguhnya tak berbicara apa-apa —mungkin karena kita dipaksa hidup di masa depan karena masa kini, saat ini di sini, mungkin dengan satu misteri suksesi yang mengerikan menggantung di atasnya, tak bisa dipikirkan dan tak ingin dipikirkan. Tapi Permadi terpeleset karena hidup di masa depan, dan dengan masa lalu mencoba membentuk masa depan dengan mengotak-atik masa kini. Jadi, kita berbicara terus tentang masa depan sambil lari dari masa kini?

Lalu adakah kebudayaan dan peradaban milenium ketiga bila kita tak menganalisis masa kini? Bila kita tak memahami dan mengakrabi masa kini? Saya pikir, dari sekian pemimpi, hanya Umar Khayam saja yang melihat pentingnya masa kini dan menganalisis masa kini. Terbukti bahwa, jangankan mereka masa depan karena dengan masa kini pun kita masih gamang, masih cakar ayam.

Itu persis dengan mistifikasi kapal terbang produksi Nurtanio sebagai Jabang Tetuko, lalu yang akan diluncurkan di 17 Agustus mendatang sebagai Gatutkoco — mungkin sepuluh tahun lagi, setelah terbukti perkasa, akan jatuh oleh permainan teknologi serta persekongkolan bisnis global, yang kemudian disimbolkan sebagai Konta yang tak terhindarkan. Dengan kata lain, kita bukan saja gamang memasuki masa kini, yang tak terbayangkan sebagai jajahan, tapi juga kita belum benar-benar bisa melepaskan diri dari masa lalu.

Lalu adakah masa depan bila kita memasuki masa kini sambil menengok ke masa lalu? Bila segala langkah dilihat dengan kaca mata masa lalu dan perangkap penghukuman yang bernama "kepribadian nasional"?

Tak akan ada sastra profetik, tak akan ada pencapaian estetik yang tahan uji dari seorang kreator yang percaya pada kebesaran etos kreatif dan kebesaran seni, tak ada sastra yang menjamur karena pengayoman kebijakan politik kesenian dan kebudayaan yang polisentris: yang ada adalah kebudayaan realisme yang berawal pada kenyataan keseharian kini dan bermuara pada kenyataan keseharian kini. Menganalisis, melakukan praksis untuk koreksi, dan membiarkannya untuk dikoreksi lagi. Mungkin juga keserentakan untuk menganalisis dan mengeluarkan kritik, memperdebatkan kriteria koreksi ideal pada kenyataan kebudayaan kini, sebuah perbantahan model zaman liberal dari dekade 50-an kita.

Mungkin juga sebuah kesusastraan yang merupakan catatan pinggir pada kebudayaan yang tidak digerakkan oleh partisipasi yang ribut liberal dan karenanya terkendali dan terkontrol oleh Yang Berwenang dan karenanya selalu berhasil dengan menyembunyikan korbannya; sebuah kesusastraan — mengutip Simuh — yang *realis*. Sebuah pamflet model yang ditulis Rendra. Mungkin juga sebuah novel semi-biografi yang ditulis seorang tokoh yang pernah hidup dalam hiruk-pikuk pengendalian keputusan agar laju pembangunan selalu ke muka. Mungkin juga novel-sejarah dengan tokoh fiktif tapi bergerak dalam beberapa fakta sejarah yang real — dan karenanya sejarah di sana lebih pantas disebut "sejarah" — macam yang telah ditulis oleh YB Mangunwijaya atau juga Mochtar Lubis.

Dengan kata lain, bukan melamunkan

masa depan tapi memahami masa kini — dan adakah pemahaman akan masa kini tanpa pisau analisis dan kaca mata analisis yang bersifat kritis. Tak ada milenium ketiga karena baru akan ada milenium ketiga dengan kita di sini yang diminta untuk menciptakan milenium ketiga. Tapi bisakah kita masuk ke masa kini, bisakah kita punya pendapat sendiri yang otonom tentang masa kini, tapi beranikah kita menyimpulkan masa kini bila kekinian itu bermakna kelokalan dan bukan sebuah ruang yang terbuka pada riak perubahan global dan puas dirubah oleh perubahan global dengan terus-terusan menjaga stabilitas kelokalan yang tanpa riak?

Semua itu menarik kita pada dua hal. *Pertama*, kita harus berpartisipasi secara politik dan bertindak secara politik — konstitusional-lah. *Kedua*, omongan itu akan jadi sebuah kenikmatan menara gading di level mahir dan cuma memuaskan para peserta yang merasa terdidik mahir. Itu celakanya. Banyak dari kita berkutetan di tingkat ide, di tingkat teoritik yang dijabarkan dalam instruksi abstrak yang membuat rakyat merasa terhukum untuk berpartisipasi, dan karenanya makin meninggalkan banyak orang yang tidak mengerti apa-apa dan dibiarkan tak mengerti agar tak ingin ikut-ikutan dalam diskursus tingkat tinggi.

Sayang saya belum melihat tibanya masa sastra profetik dan cuma melihat masanya sastra yang anarkis dari potret masyarakat yang amburadul. Kita sedang menunggu realisme baru — mungkin realisme magis atau realisme bertendens religi. Mungkin juga cuma butuh sastra tak senonoh.

■ Penulis adalah penyair, cerpenis dan eseis. Tinggal di Caruban, Jawa Timur.

Republika, 28 Mei 1995

Setiap Orang adalah Penyair

Oleh Halim H.D.

KENANGAN dan membaca zaman, tampaknya lahan subur bagi kehidupan dunia kepenyairan. Mungkin banyak orang yang *nggak* setuju dengan saya, misalnya tentang "kepenyairan", di mana orang dituntut oleh sejumlah, katakanlah "konsep" dan kemampuannya untuk bercanggih-canggih dalam berbahasa. Saya tak perduli dengan itu. Saya pikir, setiap orang adalah penyair, seperti juga setiap orang adalah filsuf.

Soal ini perlu saya sampaikan lantaran, bagi saya, yang penting adalah bagaimana "bersuara", dan "suara" ini bakalan ditentukan bukan oleh kesepakatan sekelompok kritisi atau penulis, tetapi oleh zaman. Mungkin yang tadinya menulis puisi, lalu sirna, *nggak* ketahuan rimbanya, sementara yang lain terus menulis dan menulis dengan risiko apa pun yang dihadapinya. Saya menghadapi mereka yang berpuisi, seperti menghadapi sesama warga pembayar pajak, yang wajib menyuarakan dirinya. Soal dia bicara tentang rembulan, embun atau percintaan, bukan masalah. Jadi kalau ada penyair yang sekaligus tukang kritik yang selalu bilang, *kok cuman* menulis bulan, embun dan percintaan, dan kenapa *nggak* masalah sosial politik, rasanya saya bisa menanggapi dengan sebuah komentar, hak hidup dan menyuarakan diri bisa menyiratkan dan menyuratkan apa saja.

"Apa saja" ini penting, ketika warga atau seseorang yang selalu dikemplang oleh instruksi dan sejumlah peraturan yang merasa sepolah-olah paling benar masuk dalam kehidupan pribadi, maka suara yang *nongol* dari bagian-dalam, perlu dilampiaskan. Dan, barangkali dasawarsa inilah yang paling menarik, ketika kita menyaksikan begitu antusiasnya orang menulis puisi dan membacakannya. Menurut saya, puisi memang merupakan salah satu cara untuk membuka masalah dari satu dunia ke dunia lain. Dan, setiap orang bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadinya melalui puisi.

Gejala yang terjadi di wilayah Solo mungkin menunjukkan suatu pertanda zaman. Ketika orang diberi kesempatan untuk membacakan puisi orang lain atau puisinya sendiri, teater arena TBS dipenuhi oleh pengunjung melebihi acara pembacaan puisi penyair "prof", dan sambutannya melebihi acara sastra di lingkungan penyair sendiri. Bahwa puisi yang dibacakan kebanyakan soal keadaan zaman, tentu akan kelihatan sebagai pertanda juga. Ini mungkin lantaran suara yang *nggak* tersalur, wakil rakyat yang cuma acc dan main mata dengan para eksekutif serta para investor yang dari hulu sampai hilir menguasai aliran.

Nggak salah, rasanya kalau ada yang bilang di Indonesia paling banyak penyairnya. Dan di Jawa Tengah, menurut seorang rekan, ada sekitar setengah ribu penyair! Di Semarang saja ada 170-an penyair. Jumlah yang sama juga ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Belum lagi yang bisa ditemukan di Kedu, Magelang, Purwokerto dan Solo sendiri, lalu Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, dan lain-lain. Ini fenomena apa?

Jadi kalau ada orang yang bertanya kenapa begitu banyak orang menulis puisi, saya kira jawabannya *nggak* terlalu sulit. Menulis puisi itu gampang ketimbang menulis novel. Orang yang "marah-marah" atau "maki-maki" saja bisa jadi puisi *kok*, kenapa *nggak* sekalian jadi penyair. Yang lucu-lucu juga boleh, dan bakalan mendapatkan sambutan pendengarnya. Fenomena tadi juga membuat saya bertanya, apa sebetulnya yang bisa disampaikan oleh sebuah puisi. Barangkali kita bisa mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Robert Frost, ketika situasi sudah keruh puisi bisa memberikan kejernihan.

Barangkali lantas muncul pertanyaan, kalau semua adalah penyair

dan begitu gampang membuat puisi, lantas apa sebenarnya batasan atau definisi puisi itu sendiri. Saya teringat kejadian sekitar 40 tahun lalu. Ada catatan di depan pintu rumah Sitor Situmorang, bertulis *"Bulan di Atas Kuburan Malam Lebaran"*. Catatan itu lantas dimasukkan dalam buku kumpulan puisi, padahal oleh Sitor sendiri bukan dimaksudkan sebagai karya puisi. Tapi H.B. Yassin memasukkannya dalam kumpulan puisi, dan jadilah itu puisi. Jadi batasannya di mana?

Kalau kita mengambil ilustrasi semasa masih SMP atau SMA, kenapa pada tahun 70-an kata "sajak" lebih banyak digunakan dibanding kata "puisi". Dan, saya yakin yang dinamakan sajak itu adalah sebuah rumusan formal, sementara puisi bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab suci yang memang sangat inspiratif dalam penciptaan puisi. Kitab suci apa saja, *toh* kita tidak menamakan puisi. Nah, saya tidak ingin menjawab persoalan itu. Bagi saya, dalam dunia kesusasteraan dan kesenian yang penting bukan definisi tapi bagaimana sebuah karya bisa sampai kepada orang lain.

Melihat karya-karya Murtijono, kalau boleh mengambil contoh, saya lihat ada unsur main-main yang saya senangi, ada keliaran, ada anarkis. Karena kalau kita lihat apa yang ditulis Murtijono, ada struktur bahasa Indonesia yang kacau balau, campur sana sini, saya kira ini mengingatkan puisi-puisi Afro-Amerikan yang juga mencampurbaurkan bahasa-bahasa sehari-hari, sampai bahasa remaja sekalipun. Demikian juga Darmanto Jatman, dia campur bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Indonesia, Jawa, dengan struktur yang kita tidak bisa mengikuti. Dalam hal ini dia juga sangat anarkis.

Hal yang sama saya temui ketika tahun 1985—1986 ketika seorang Wiji Thukul masih polos menulis puisi tanpa pretensi. Dia tulis tentang tukang becak, penjual sayur, tentang gelandangan dan hal-hal yang memang menjadi lingkungannya sehari-hari. Dia tuliskan dengan sebatas kemampuannya waktu itu.

Mungkin tidak bisa dibayangkan ketika ada seorang sarjana sastra Indonesia berkebangsaan asing dan sangat menguasai bahasa Indonesia, ternyata dia mengaku bisa memahami puisi Wiji Thukul, namun tidak bisa menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Karena Wiji Thukul menggunakan bahasa Indonesia dengan struktur Jawa yang campur aduk. Ini suatu unikum tersendiri.

Dan yang menarik, dalam perkembangannya, karya-karya Thukul ternyata sangat sadar akan bahasa. Dan terus terang, hal ini mengurangi minat saya pada karya-karya dia dibanding periode 85-86 yang bagi saya merupakan periode yang sangat menarik. Saya tidak tahu apakah hal ini disebabkan karena intelektualisme, karena banyak seminar yang diikuti, karena pergaulan-pergaulan dan sebagainya. Hal ini menjadi sangat berbeda dengan karya-karya dulu ketika dia masih menggunakan bahasa lingkungannya.

Jawa Pos, 28 Mei 1995

Wacana

(Ke)-Wanita-(an) dalam Kesusastraan

KONFLIK antara kepribadian yang cenderung mementingkan nilai human daripada kemanusiaannya sendiri, adalah pemantik yang acapkali muncul dalam kepribadian tokoh-tokoh wanita dalam novel Indonesia. Misalnya sikap mereka dalam menerima 'penindasan-penindasan', seperti kawin paksa yang diterima bukan karena alasan kemanusiaannya sendiri, tetapi karena rasa iba dan sayang pada orang lain (seperti orangtua).

Keterbelengguan wanita yang muncul akibat konflik seperti di-atas, antaralain tampak pada simbol wanita bernama Siti Nurbaya dalam roman klasik Marah Rusli. Hingga kini, karya sastra itu banyak diakui sebagai cermin jamannya, yang mengangkat 'pemberontakan' eksistensial kaum hawa, dengan sikap 'penyerahan' yang getir.

***

PERSOALAN eksistensial dari para kaum wanita ini juga pernah diangkat dalam berbagai novel penting. Dalam roman *Belenggu* karya Armijn Pane, kegelisahan identitas yang mirip dengan pemberontakan atas nilai-nilai dan pengkultusan kodrat itu misalnya muncul dari sosok Tini, tokoh perempuan dalam roman tersebut.

Namun, penggugatan yang muncul dari latar belakang sosiologis dan psikologis yang kemudian mengangkat fenomena moral menunjukkan bahwa kegelisahan demikian itu muncul pula di dalam sejarah yang lebih maju. Novel *Madame Bovary* karya Gustave Flaubert atau *Lady*

Chatterley Lover D.H. Lawrence, dan banyak lagi. Kaum wanita berangkat dari satu konsep yang sama, yakni keterkungkungannya oleh ruang-ruang kodrati dan tata-nilai sosial.

Karya sastra, dalam konteks di atas, menjelma lompatan ideologis, ketika sastrawan melalui simbol tokoh yang menjadi teropong kenyataan sosial jaman itu, dianggap sebagai pendobrak norma-norma sosial, hukum, atau bahkan moral. Karya sastra menjadi suatu kekuatan yang mampu menggugat kenyataan jamannya.

Karya sastra akhirnya menjadi sebuah kekuatan ideal, dan ketika ia menjadi cermin jamannya, maka karya sastra akan menjadi kekuatan pendobrak nilai-nilai. Dan apakah roman Siti Nurbaya telah melakukan itu? Hingga sekarang, setidaknya Marah Rusli telah membuat suatu monumen yang tak mati-mati. Bahwa gerakan kaum wanita untuk menyetarakan derajat dengan kaum pria, dalam segala tata nilai yang diyakini masyarakat, sudah dimulai sejak pertama sekali kaum wanita masuk dalam bilik-bilik nilai yang memurukkan kederajatannya.

***

APAKAH sastra yang 'memperjuangkan' kesetaraan derajat itu sekarang masih dibutuhkan? Dalam berbagai sistem nilai laku yang menentukan tempat berdiri kaum wanita dalam kehidupan sehari-hari, puing-puing dari monumen jaman tersebut masih menunjukkan berbagai kenyataan yang menyudutkan. Akan tetapi setidaknya, perjalanan waktu membawa optimisme baru bahwa zaman telah membawa perubahan-perubahan yang juga membawa pergeseran-pergeseran dalam berbagai hal.

Akan tetapi benarkah dalam konteks keseimbangan wanita telah terbebas dari belenggu-belenggu. Mereka sudah mengalami demikian banyak perubahan : dalam hal kesempatan pendidikan, peluang kerja, peranan sebagai subyek dalam pergaulan antar manusia, mobilitas sosial, serta pencerapan mereka terhadap kebudayaan modern.

Kemajuan-kemajuan seperti di atas dimungkinkan oleh berbagai kondisi yang menyebabkan adanya perluasan kesempatan-kesempatan. Perubahan sistem kehidupan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri juga memberi luang-luang lebar bagi pengembangan citra diri kaum wanita. Tetapi terlepas dari itu, jauh sebelum perubahan sistem ini arus pemahaman wanita dalam konteks "ke arah obsesi" sudah mulai tercetus.

Muara itu kemudian makin dipertajam lagi oleh isyarat-isyarat yang dilontarkan kalangan-kalangan yang memiliki jangkauan pemikiran lebih tajam. Misalnya apa yang diramalkan John Naisbitt, yang melihat peluang pada wanita untuk semakin memantapkan diri pada industri masa depan.

Terlebih dari itu, konsep pemahaman wanita tidak lagi diberangkatkan pada "kodrat", tetapi seperti pernah dikemukakan Toety Heraty, lebih ke "martabat". Sejauh mana masyarakat kita menempatkan diri wanita sesuai dengan luang-luang lebarnya itu? Mungkinkah masih berupa garis horisontal antara konsepsi ke obsesi?

Namun secara transparan agaknya dapat kita tangkap suatu keinginan beberapa 'juru bicara' wanita untuk menghapus pandangan kaum pria atau suami dalam melihat peran yang harus dimainkan oleh kaum wanita atau istri, dan faktor budaya atau tradisi yang menempatkan wanita hanya sebagai pengurus rumah tangga saja.

Karena itu, wanita harus diletakkan dalam satu garis lurus dalam skala kederajatannya dengan pria. Dalam tuntutan jaman dan kondisi saat ini tak ada kedudukan yang lebih rendah atau lebih tinggi antara pria dan wanita. Meskipun dengan demikian masih sering kita tangkap kesan bahwa dalam konsep persamaan hak ini berhenti pada bentuk luar : pada kewajiban antara pria dan wanita dalam tugas-tugas sosial.

Pemahaman bentuk luar ini akan memerosokkan pemahaman nilai yang justru akan menjadi perangkap yang buruk. Misalnya dalam tata nilai moral, ketika suami serong, karena tuntutan persamaan hak, istri juga merasa tak berdosa untuk melakukan hal yang sama.

Simbol-simbol yang muncul dari wacana perempuan dalam karya sastra yang mengangkat pergulatan wanita itu jangan-jangan memang masih sekedar memberangkatkan persoalan dari nilai-nilai material. Barangkali pergulatan nilai-nilai itu juga masih berpusar dari sini.

(Dorothea Rosa Herliany)-b

Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 1995

NOVEL-ULASAN

KONTEKS TEMA NOVEL INDONESIA (3)

Kritik Sosial di Zaman Kolonial Belanda Kian Tajam

Oleh JAKOB SUMARDJO

MENGINJAK dasawarsa 1930-an, yang merupakan "zaman emas" novel Indonesia lantaran banyaknya penerbitan novel oleh Balai Pustaka dan penerbit swasta, disamping setting novel yang juga semakin meluas (tujuh daerah) oleh penulis-penulis yang beragam suku, tema sosial masih belum jauh beranjak dari tahun 1920-an.

Meskipun secara keseluruhan novel yang menggarap tema sosial secara eksplisit hanya ada 8 dari sebanyak 33 novel, namun novel-novel bertema batin (psikologis) yang juga menyangkut masalah perbedaan tingkat sosial cukup banyak (ada 6 novel). Dengan demikian sekitar 45% novel membahas persoalan sikap masyarakat dalam plot kisah percintaan.

Jumlah penulis asal Sumatra Barat amat dominan dalam tahun 30-an ini, yakni 20 orang dari jumlah 51 penulis yang tercatat. Setting cerita juga dominan di Sumatra Barat, dan merupakan pencapaian paling tinggi dalam pemilihan setting cerita di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa dasawarsa 1930-an merupakan "masa Sumatra Barat" dalam novel berbahasa Indonesia. Dalam pengamatan ini tercatat novel yang ditulis oleh pengarang asal Sumatra meliputi 24 novel dari jumlah contoh 33 novel, sedangkan 9 novel yang lain ditulis (atau terjemahan) oleh pengarang asal Sulawesi Utara (M.R. Dayoh, Paulus Supit), Jawa (Imam Supardi, Asmawinangun), Sunda (Ardisoma, Memed Sastrahadiprawira), Bali (Panji Tisna), dan Maluku (Wairata). Memang tidak semua penulis asal Sumatra mengambil setting cerita di Sumatra, banyak yang mengambil setting Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Kandasnya percintaan akibat hambatan orang tua yang menginginkan anaknya menikah dengan orang kaya dan berpangkat (dalam arti sederajat atau lebih meningkat martabat sosialnya), seperti ditunjukkan dalam *Azab dan Sengsara serta Jeumpa Aceh* pada kurun 20-an, menjadi tema favorit dalam tahun 30-an. Setidak-tidaknya ada 7 novel dari 33 novel yang berbicara masalah ini, baik dalam penerbitan resmi Balai Pustaka maupun penerbit "picisan Medan" *(Sampaikan Salamku Kepadanya)*. Ambisi orang tua untuk mengawinkan anak gadisnya yang cantik dengan orang kaya ini kebanyakan dilakukan dengan apa yang dikenal sebagai "kawin paksa". Memang ada pihak yang kaya adalah si jejaka *(Pertemuan Jodoh)* namun jumlahnya terlalu sedikit. Dan dalam banyak novel digambarkan bahwa "kawin paksa" ini akhirnya gagal karena watak jahat dari suami kaya atau dari keluarga kaya ini. Jarang novel yang menunjukkan bahwa suami kaya (dan tua) merupakan suami yang baik, kebanyakan gemar main perempuan, terlibat judi dsb. Namun sudah terdapat optimisme dalam menangani masalah ini pada tahun 30-an, tidak seperti tahun 20-an yang selalu berakhir dengan penderitaan dan kematian si gadis. Dalam tahun '30-an "kawin paksa" ini (bukan oleh dorongan adat tetapi dorongan materialistis orang tua dan gengsi orang tua) akhirnya gagal, dan si janda kembali kepada kekasih lama, kecuali *Di Bawah Lindungan Kaabah*. Novel-novel yang bertema "kawin paksa" ini adalah *Dian Yang Tak Kunjung Padam, Mencari Pencuri Anak Perawan, Kasih Tak Terlarai, Di bawah Lindunga Kaabah, Pertemuan Jodoh dan Sampaikan Salamku Kepadanya*, yang dari judul-judulnya saja telah menunjukkan kuatnya percintaan dalam menghadapi kemauan materialistis dan gengsi sosial orang tua. Dan satu novel lagi (terjemahan?) dari Sunda, *Cincin Stempel*. Setting cerita bukan hanya di Sumatra Barat, tetapi juga di Riau, Jawa Barat, Palembang. Jadi jelas tema "kawin paksa" ini tak ada hubungannya dengan adat Sumatra Barat. Ini persoalan umum orang tua terhadap bakal jodoh anak gadisnya (mendapatkan jaminan kebahagiaan-kekayaan) yang terdapat di sembarang tempat dan sembarang waktu. Ambisi orang tua miskin yang menghendaki anak gadisnya dipersunting oleh pemuda kebangsaan kaya, digambarkan dalam *Si Cebol Merin-dukan Bulan*, yang berakhir dengan kematian si gadis akibat merana diputuskan dari kekasihnya (dipenjara). Ini juga menjelaskan bahwa ambisi orang kebanyakan lampir sama dengan ambisi orang kaya dan bangsawan, yakni menginginkan naik status dan ketakutan turun status.

Pandangan kaum muda yang mengecam ambisi orang tua yang demikian itu cukup kuat dalam beberapa novel Sumatra. Menarik untuk membandingkan hal ini dengan novel yang bersetting di daerah lain. Dua novel yang bersetting di Jawa Barat, tapi ditulis oleh pengarang asal Sumatra *(Pertemuan Jodoh* oleh Abdul Muis dan *Katak Hendak Menjadi Lembu* oleh Nur Sutan Iskandar) masih mirip semangat kecaman-

nya terhadap ambisi orang tua yang materialistis itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan novel-novel yang ditulis oleh pengarang asal Jawa dan Bali, kecaman itu justru ditujukan kepada si orang kaya. Bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan perkawinan. Tema ini seolah ingin memberikan jawaban terhadap tema kecaman yang dilancarkan oleh rekan pengarang mereka asal Sumatra. Dalam novel Imam Supardi, *Kintamani*, gadis Bali Luh Lentari tak bahagia menjadi isteri bangsawan Solo yang banyak selir, dan akhirnya kembali kepada cinta murni pelukis Sudarto yang pas-pasan.

Dalam *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* ditunjukkan bagaimana si kaya hanya mengumbar nafsu seksualnya untuk mendapatkan cinta si gadis dengan menghamburkan banyak uang. Begitu pula novel *Merak Kena Jebak* oleh Asmawinangun melukiskan ketidak bahagiaan kekayaan suami kalau si isteri hanya dijadikan gundik permainan. Warsiah, tokoh novel ini, melarikan diri dari suami Belandanya yang kaya, karena isu masyarakat bahwa Belanda suka menganggap isteri pribumi sebagai gundiknya belaka. Novel-novel "luar Sumatra" tahun 30-an ini seolah-olah memperkuat kritik pengarang Sumatra, bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan perkawinan. Justru kekayaan sering membentuk karakter kurang terpuji bagi pemiliknya. Cinta murni yang merdeka dan suka rela itulah nilai tertinggi kaum pengarang muda ini dalam membentuk rumah tangga. Pertentangan generasi tua dan generasi muda dalam pandangan kebahagiaan perkawinan ini adalah universal. Generasi tua selalu berpedoman bahwa perkawinan tak cukup cumaberbekalkan cinta belaka tanpa ditunjang harta. Sebaliknya generasi muda yakin bahwa modal utama perkawinan adalah cinta, dan harta itu dapat dicari setelah perkawinan. Hal ini dapat dimaklumi karena pengarang tahun 30-an sekitar 60% berusia antara 20 sampai 29 tahun waktu menerbitkan novel mereka.

Sedangkan novel yang mengangkat kritik terhadap adat justru sedikit. *Rusmala Dewi* masih melarang terjadinya perkawinan antar suku, karena adanya anggapan lebih baik menikah dengan kerabat. Dalam novel ini pemuda Jawa yang mencintai Rusmala adalah keluarga terpandang dan sederajat dengan keluarga Minang tersebut. Namun novel ini memenangkan semangat kaum muda, dua kekasih itu akhirnya membina rumah tangga, meskipun Rusmala sudah janda. Inilah rupanya pemecahan "kompromi", masih menghormati adat tetapi menunjukkan kegagalan pandangan adat tersebut dan mengawinkan jandanya dengan pemuda idaman. Novel *Memutuskan Pertalian* menunjukkan kritik terhadap kekuasaan isteri yang lebih besar pada suami Minang.

Persoalan sosial lain yang digarap novel 1930-an adalah dampak pandangan hidup modern itu sendiri di kalangan anak muda. *Kehilangan Mestika* yang ditulis pengarang wanita, mempersoalkan kesulitan seorang gadis berpendidikan modern yang cukup tinggi dalam pergaulan dengan lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Ada semacam keengganan untuk menerima "gadis modern" ini dalam pergaulan dengan wanita tradisional. *Layar Terkembang* dengan jelas mempersoalkan kedudukan wanita modern (wanita karier) yang dikhawatirkan akan kehilangan naluri kewanitaannya. Dua novel ini seolah mempertanyakan munculnya peranan kaum wanita yang berpendidikan modern pada tahun 30-an. Benarkah pendidikan modern ini berdampak sosial dan psikologis yang baik terhadap kaum wanita dalam masyarakatnya? Akibat buruk pendidikan modern ini telah pernah dikupas dalam *Salah Asuhan* tahun 1920-an, dan masalah itu diulang lagi dalam novel *Tidak Membalas Guna* pada tahun 1930-an, yang mengisahkan penyelewengan seorang suami yang diberi tugas belajar di Jakarta. Pemuda Sumatra Barat ini meninggalkan isterinya di kampung dan kawin dengan wanita sekolahan lain di tempat belajarnya.

Tema lain yang digarap novel tahun 30-an adalah non-sosial. Kebanyakan bersifat didaktis, seperti *Neraka Dunia* yang memperingatkan bahayanya sakit siplis dalam perkawinan. Nilai pendidikannya adalah agar kaum lelaki hati-hati semasa bujang, jangan main hantam kromo dengan wanita tuna susila. *Katak Hendak Menjadi Lembu* dari pengarang yang sama, Nur Sutan Iskandar, juga punya misi pendidikan terhadap kaum pegawai kolonial, agar dapat menerima kenyataan seperti apa adanya. Jangan sok ambisius memaksa diri mencapai gengsi pegawai tinggi, yang akhirnya hanya berujung pada kehancuran dan kemelaratan. *Karena Mertua* juga berisi peringatan terhadap kaum mertua yang amat menguasai hidup rumah tangga anak dan menantunya, terutama dalam ambisi kekayaan. Ini bisa berakibat fatal: hancurnya keluarga si anak sendiri. *Kasih Ibu* menunjukkan nilai perjuangan seorang ibu untuk berkorban demi kemajuan dan kebahagiaan si anak kelak. Dan *Kalau Tak Untung*, seperti tersirat dari judulnya, menunjukkan bahwa ketidak beruntungan nasib manusia bisa terjadi, meskipun dua kekasih, Rasmani dan Masrul berusaha "menaklukkan nasib" keberuntungannya.

Novel psikologis yang berhasil adalah *Tenggelamnya Kapal v.der Wijck*, yang mengambil tema konflik antara hati nurani (cinta sejati) dan gengsi harga diri. Nafsu manusia untuk kepala batu pura-pura menjaga harga diri dapat menghancurkan dirinya sendiri maupun gadis yang dicintainya.

Novel-novel lain bersifat detektif dan kesejarahan. Tetapi yang kesejarahan ini pun, saya kira, masih dalam lingkup kategori novel didaktis, yang kebanyakan menunjukkan nilai kesetiaan seorang abdi negara kepada atasannya *(Hulubalang Raja, Pangeran Kornel, I Swasta Setahun di Bedahulu, Pahlawan Minahasa)*.

***

NOVEL-NOVEL dalam masa kolonial Belanda amat menonjol dalam mengambil tema kritik sosial. Dari penerbitan resmi pemerintah kolonial sendiri, Balai Pustaka, kritik sosial itu terutama ditujukan kepada generasi tua yang menganggap masih "menguasai" anak-anaknya yang berangkat dewasa, untuk menikah dengan orang yang dapat menjamin keperluan materi anaknya (harta kekayaan) dan menaikkan gengsi keluarga. Atau orang tua kaya menginginkan anaknya menikah dengan pasangan dari kelas sosial yang setingkat. Kritik para pengarang ditunjukkan dengan memperlakukan para gadis ini "kawin

paksa" dengan orang kaya yang rata-rata bertabiat jahat (banyak isteri, penjudi, periba) dan lebih tua, dan akhirnya perkawinan idaman golongan tua ini kandas, entah si anak meninggal atau menjadi janda-dan menemukan kembali kekasihnya yang setia. Para pengarang yang lebih pesimis mematikan si gadis dalam kepedihan percintaan..

Pengarang asal Sumatra cenderung mengecam sikap kolot-materialistis orang tua, sedangkan pengarang di luar Sumatra cenderung mengecam penggunaan kekayaan untuk "membeli" cinta gadis pujaannya.

Masalah kekayaan, pangkat, jaminan hidup, yang rupanya mulai menjadi nilai material penting dalam hidup masyarakat modern, yang tumbuh tahun 1920-an dan 1930-an, tercermin dalam ungkapan intelektual para pengarang Indonesia.

Baik novel Balai Pustaka maupun "picisan Medan" tak berbeda jauh dalam menggarap tema ini. Hanya penerbitan swasta di Jawa, terutama pada karya-karya Mas Marco, kritik sosial muncul lebih galak dan tajam. Ia tidak mempermasalahkan sikap generasi tua modern yang "borjuistis" atau generasi tua yang "gila pangkat", tetapi lebih pada sistem kolonial yang kapitalistik dan borjuistik. Tak heran kalau novel-novel begini kurang berkembang dan digolongkan "bacaan liar" oleh aparat kolonial.

Selebihnya adalah novel dengan misi didaktis, novel bertendens, yang cocok untuk alat pendidikan kaum sekolahan, kepada golongan mana novel-novel itu diterbitkan.

(Bersambung

Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1995

KONTEKS TEMA NOVEL INDONESIA (4)

Terbitnya Naskah-naskah 'Sisa' Zaman Kolonial

Oleh JAKOB SUMARDJO

SEJAK tahun 1942, ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, sampai bulan November 1949, Indonesia penuh dengan perubahan sosial-politik yang terjadi secara cepat. Tahun 1942 sampai 1945 adalah zaman pendudukan Jepang, sedang tahun 1945-1949 adalah zaman perang kemerdekaan melawan Belanda. Selama dua zaman itu masih tetap terbit karya-karya sastra dari penerbit "resmi" (subsidi pemerintah) Balai Pustaka, dan penerbitan swasta di Medan dan Sumatra Barat.

Pada zaman penuh pergolakan ini, ternyata penulisan sastra kebanyakan berupa penerbitan "sisa-sisa" naskah zaman kolonial. Ini dapat dilihat dari tema-tema yang digarap tahun 1940-an tak berbeda jauh dengan tahun 1930-an. Terdapat novel-novel kesejarahan, seperti *Putera Budiman, Surapati, Mutiara, Tambera dan Di pinggir Krueng Sampoynit* dari penerbitan swasta Medan. Sisanya berupa novel didaktis dan problematik adat, seperti *Cinta dan Kewajiban, Merantau ke Deli, Andang Taruna dan Nusa Penida*. Novel-novel problematik kejiwaan yang dikerjakan dengan amat serius adalah *Belenggu* (yang tertunda penerbitannya sejak tahun 1930-an), *Atheis dan Aki*. Dan ada dua novel propaganda Jepang, yakni *Cinta Tanah Air dan Palawija*.

Diktum bahwa novel mencerminkan kondisi zamannya, kiranya agak meleset untuk tahun 1940-an. Novel-novel yang boleh dikatakan murni berasal dari kondisi tahun 1940-an adalah *Atheis dan Aki, serta Cinta Tanah Air dan Palawija*, yaitu hanya 4 dari jumlah 15 novel contoh. Ini semua karena kondisi penerbitan Balai Pustaka yang menunda tulisan-tulisan tahun 1930-an. Penundaan ini disebabkan karena keadaan sosial-politik kolonial tak mengizinkan karya-karya semacam itu terbit, yakni *Belenggu* yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, serta novel-novel sejarah yang membangkitkan rasa kebangsaan, seperti *Surapati dan Mutiara*.

Jadi sebenarnya hanya ada dua novel yang dapat dikatakan mewakili tahun 1940-an, yakni *Atheis dan Aki*. Dan karena Aki (novelet) lebih bersifat tema batin, maka hanya *Atheis* yang "mencermin kan" kondisi manusia Indonesia zaman itu. Boleh dikatakan masyarakat tahun 1940-an hanya menghasilkan dua novel propaganda Jepang, dan dua novel yang terbit dan mewakili manusia Indonesia di zaman setelah kemerdekaan.

Pertama akan dibicarakan tema novel yang merupakan "penerbitan sisa" dari masa kolonial. Novel-novel tipe Balai Pustaka tahun 1930-an itu adalah *Merantau ke Deli, Cinta dan Kewajiban, Putera Budiman, Andang Tetuna, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Nusa Penida, Mutiara dan Surapati*.

Novel *Merantau ke Deli* karangan Hamka, masih mempermasalahkan adat Minangkabau dalam perbandingannya dengan modernitas, dalam hal ini perkawinan antar suku. Perkawinan antar suku (lelaki Minang dengan wanita Jawa) yang semula berjalan mulus, kemudian menuju kebang

krutan karena perkawinan sesuku yang penuh dengan belitan adat.

Sedangkan *Cinta dan Kewajiban* karangan L Wairata bersifat didaktis dengan mengolah tema kebaktian seorang anak kepada orang tua. Tokoh Annie menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal untuk tetap "membimbing" ayahnya yang pemabuk di jalan yang benar. Kemuliaan hati seorang anak gadis dalam membela nama baik keluarga menjadi pokok pembicaraan novel ini. Rupanya masalah di Maluku agak berbeda dengan masalah lokal di Sumatra dan Jawa. Dalam novel ini bukan soal materialisme atau adat yang jadi masalah, tetapi martabat keluarga yang cukup terpelajar yang harus dijaga (memberantas sifat kebiasaan mabuk).

Andang Teruna karangan Soetomo Djauhar Arifin juga bersifat tema internal, yakni kejiwaan. Tema pokoknya adalah keteguhan cinta dan kesetiaan cinta seorang gadis Jawa, Hartini, kepada lelaki yang amat dicintainya, Goenadi. Setelah kegagalan percintaan Goenadi yang bertubi-tubi, akhirnya Hartini mendapatkan kekasihnya sebagai suami. Di sini tidak muncul kritik sosial terhadap masyarakat golongan terpelajar Jawa.

Sedangkan *Belenggu* dari Armijn Pane sebenarnya telah dipublisir tahun 1930-an dan menimbulkan polemik hebat tentang temanya. Baik secara teknis maupun isi, novel ini amat menonjol mutunya. Kalau mau dikategorikan temanya, cenderung untuk dikelompokkan ke dalam masalah sosial, terutama mengenai kedudukan dan peran wanita dalam zaman modern (pendidikan Belanda). Tema ini satu kelompok dengan novel *Layar Terkembang* oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Meskipun tak dapat diingkari bahwa permasalahan psikologis amat dominan pula dalam novel-novel ini.

Anak Perawan Di Sarang Penyamun sebenarnya hasil tahun 1920-an. Dan novel ini jelas masih merupakan produk zaman Balai Pustaka. Temanya tentang kemurnian jiwa manusia masih bersifat romantik idealistik. Selebihnya adalah novel-novel sejarah yang berkisah tentang perlawanan putera-putera Indonesia melawan penjajahan Belanda. Tema demikian ini tak mungkin diterbitkan pada zaman kolonial. Yang patut dicatat adalah novel *Surapati* karangan Abdul Muis yang memiliki mutu sastra dan amanat nasionalisme yang mencukupi.

Tema sosial yang agak lain adalah *Nusa Penida* karangan Andjar Asmara dari lingkungan swasta luar Balai Pustaka. Kritiknya terhadap perbedaan kasta dalam percintaan dan perkawinan di Bali, dipandang dari sudut orang di luar masyarakat itu. Kalau tentang masyarakat Bali (*setting* novel) biasanya dikerjakan oleh pengarang dari lingkungan Bali sendiri (Pandji Tisna), dan *setting* Minang oleh pengarang Minangkabau sendiri, maka novel ini ditulis oleh orang dari lingkungan budaya kota modern yang nasional. Pada zamannya novel ini tidak menimbulkan masalah, tetapi ketika difilmkan pada tahun 1990-an, ternyata ada suara keberatan dari masyarakat Bali sendiri, yang bukan hanya menyangkut tema saja. Adapun novel *Tambera* karangan Utuy Tatang Sontani semula ditulis dalam bahasa Sunda. Ini juga kisah sejarah yang mempunyai dampak rasa kebangsaan.

Setelah pembicaraan mengenai "novel-novel sisa" yang lahir terlambat di luar zamannya ini, maka pada zaman pendudukan Jepang diterbitkan dua novel propaganda yakni *Cinta Tanah Air* oleh Nur Sutan Iskandar dan *Palawija* oleh Karim Halim. Novel-novel ini mengajak masyarakat Indonesia untuk siap mengabdikan jiwa raganya demi kepentingan tanah air dan menggalang persatuan antara etnik dan ras Indonesia demi tanah air pula. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan demi pemerintahan Jepang, namun secara implisit pembaca akan mengetahui bahwa itu semua ajakan untuk membela tanah air bersama pemerintah militer Jepang (dari serangan Sekutu). Karena niat novel ini memang propaganda, maka pembaca di luar zaman itu tentu tidak segera menangkap maksud sejatinya, kecuali sebagai kisah percintaan biasa saja.

Novel yang paling penting berbicara tentang kondisi masyarakat zamannya adalah *Atheis* karangan Achdiat Kartamihardja. *Setting* novel ini memang zaman pendudukan militer Jepang, namun yang dipermasalahkan adalah haru biru perubahan mental, sosial, politik dan nilai-nilai religi yang terjadi pada tahun 1940-an itu. Tokoh Hasan yang semula mewakili mental-spiritual "tradisional" dalam novel ini diserbu dan ditantang oleh aliran-aliran pemikiran baru bersifat sosialis, dan mengakibatkan runtuhnya pemikiran tradisional ini. Hasan sempat "murtad" dalam pengertian harafiah keagamaan maupun secara budaya, namun akhirnya menyesali sikapnya ini.

Novel ini dengan amat kuat melukiskan kondisi manusia Indonesia tahun 1940-an yang tengah berhadapan dengan berbagai macam paham modern dan mengalami goncangan-goncangan sikap hidup. Dalam zaman kolonial masih terdapat "sensor" atau saringan terhadap masuknya faham-faham di lingkungan kaum terdidik. Tetapi sejak zaman Jepang, kontrol itu sudah tak ada lagi, sehingga dengan bebas paham-paham modern masuk dan diterima manusia Indonesia.

Sebenarnya masih dapat dibicarakan novel-novel lain yang terbit tahun 1940-an, di antaranya *Perempuan dan Kebangsaan* oleh Idrus yang diterbitkan dalam nomor majalah *Indonesia*. Begitu pula masih ada novel-novel "sisa" Balai Pustaka tahun 1940-an seperti *Karena Kerendahan Budi* oleh HSD Moentoe, *Jangir Bali* oleh Sutan Iskandar, *Adat Muda Menanggung Rindu* oleh Bagindo Saleh dll. Tetapi semua itu di luar sampel yang diambil.

(Bersambung Minggu Depan)-k.

Kedaulatan Rakyat, 21 Mei 1995

KONTEKS TEMA NOVEL INDONESIA (5)

Isu Revolusi Justru Merebak Pasca Kemerdekaan

Oleh JAKOB SUMARDJO

YANG segera mencolok dari tema novel setelah kemerdekaan (pengakuan kedaulatan oleh Belanda) adalah terbitnya novel-novel dengan tema revolusi pada tahun-tahun 1950, 1951 dan 1952. Dalam pengamatan ini ada 36 novel yang dipelajari, dan 11 novel bertema revolusi. Sebagian besar dari novel-novel itu diterbitkan pada tahun 1950, yakni *Tak Ada Esok, Dokter Haslinda, Dia yang Menyerah, Keluarga Gerilya, Yogya Diduduki, Kejatuhan dan Hati*, dan selebihnya terbit tahun 1951 (*Di Tepi Kali Bekasi, Mereka yang Dilumpuhkan*) serta *Jalan Tak Ada Ujung* tahun 1952. Nyata bahwa persoalan revolusi baru dibicarakan ramai segera setelah revolusi itu sendiri usai. Dan lima novel revolusi ditulis oleh Pramudya Ananta Toer. Memang tidak sepenuhnya membicarakan revolusi, seperti misalnya *Kejatuhan dan Hati* serta *Perburuan*.

Setelah itu baru terbit novel-novel dan novelet yang berbicara tentang masyarakat dan manusia Indonesia tahun 1950-an sendiri, seperti *Bukan Pasar Malam, Jayawijaya, Korupsi, Midah Si Manis Bergigi Emas, Kubur Tak Bertanda, Tanah Gersang, Sekali Peristiwa di Banten Selatan, Perjalanan Penganten, Mekar Karena Memar*. Novel-novel ini berkategori tema sosial dan batin.

Tahun 1950-an juga masa berkembangnya novel-novel Medan yang merupakan kelanjutan dari penerbitan penghujung tahun 1930-an. Dalam pengamatan ini diambil 7 contoh novel-novel tersebut, yakni *Sorotan Mata Perawan Luwu* oleh M Jassin Arief, *Nafsu Durjana* oleh Gubalo SA, *Telaga Darah* oleh A Damhuri, *Dukun Mistik* oleh pengarang yang sama, *Karam Di Tengah Samodra* oleh Supomo, *Menanti Kekasih Dari Mekah* oleh Merayu Sukma, *Kasih Tak Putus* oleh Abas Hassan. Selebihnya adalah novel-novel Balai Pustaka yang "terlambat" terbit, seperti *La Hami* oleh Marah Rusli, *Nasib* oleh Habib St Maradjo. Dan dua novel dari seri penerbitan Gapura, *Pujani* dan *Bengawan Solo*.

Dengan demikian persoalan penting yang diperbincangkan dalam novel-novel tahun 1950-an, segera setelah revolusi berakhir, adalah masalah revolusi itu sendiri, dan kemudian persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan pada zaman itu. Seperti diketahui dalam deskripsi tokoh dan *setting* cerita, novel 1950-an bertokoh lelaki dari golongan sosial menengah-bawah dan mengambil tempat kejadian cerita di Jakarta. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengambilan tema revolusi dan sosial tahun 1950-an yang belum memungkinkan timbulnya kemapanan dari golongan atas (yang baru). Dan Jakarta adalah pusat dari segala kegiatan yang akan melaksanakan semua impian kaum nasionalis di zaman kolonial dan para pejuang di zaman revolusi.

Apa yang dikategorikan sebagai "cerita-cerita revolusi" tidak sepenuhnya bercerita tentang zaman perang kemerdekaan belaka (1945-1949) tetapi sudah dimulai sejak zaman Jepang atau permulaan kisah sudah dimulai sejak zaman Jepang. Namun terdapat satu suasana dan semangat dalam cerita-cerita itu, yakni perjuangan fisik bersenjata melawan penjajahan. Kenyataan bahwa novel-novel semacam itu baru terbit antara tahun 1950 sampai 1952 menunjukkan bahwa penulisannya telah dilakukan sebelumnya, yakni sekitar tahun 1940-an akhir.

Kisah-kisah revolusi dalam novel 1950-an kebanyakan tidak mempermasalahkan revolusi itu sendiri sebagai gejala sosial-politik. Revolusi telah diterima sebagai peristiwa bersejarah yang semestinya dan dikehendaki. Persoalan yang diangkat dalam novel kebanyakan berupa pengaruh revolusi itu terhadap manusia Indonesia. Jadi tema yang digarap tetap tema kedalaman, kemanusiaan atau batin manusia, bukan tema sosial. Pada novel-novel revolusi yang ditulis Pramoedya Ananta Toer dapat dilihat nilai pengorbanan pahlawan-pahlawannya. Dalam *Perburuan*: yang terjadi pada zaman Jepang, protagonis Hardo yang memberontak terhadap Jepang menyeret ayah dan keluarganya yang lurah ke dalam pemecatan dan penghinaan masyarakat. Keluarga Hardo hancur (ada yang gila) karena perubahan dari hidup enak dan terhormat sebagai lurah menjadi keluarga yang miskin tak terhormat.

Keluarga Gerilya yang bersetting zaman revolusi mengisahkan keluarga gerilya Saaman yang juga hancur akibat perjuangannya. Namun nilai tema novel ini lebih dalam dan filosofis karena Saaman merasa dirinya telah terlalu jauh dalam membela bangsa dan negaranya, antara lain dengan mengeksekusi ayahnya sendiri yang dianggapnya khianat. Maka ia menerima hukuman matinya oleh regu penembak Belanda, karena gejolak batinnya telah tak dapat menguasai badan dan raganya. Raga harus sirna.

di Tepi Kali Bekasi mengisahkan perjuangan pemuda Farid yang menyaksikan pengorbanan kawan-kawan dekatnya dan gadis Indo-Perancis yang pro Indonesia. *Dia yang Menyerah* bukan tentang revolusi tetapi terjadi pada zaman itu, yakni pemberontakan kaum komunis yang gagal dan pengejaran sisa-sisanya yang mengakibatkan penderitaan dan tragedi di kalangan rakyat biasa. *Mereka yang Dilumpuhkan* adalah catatan-catatan berbagai watak yang muncul dalam zaman revolusi yang dipertemukan di dalam penjara.

Begitu pula dua novel revolusi

Mochtar Lubis, *Tidak Ada Esok* dan *Jalan Tak Ada Ujung* juga mencatat akibat-akibat perang kemerdekaan itu pada masyarakat kota dan desa, bahkan novelnya yang terakhir itu merupakan studi tentang ketakutan manusia dalam menghadapi ancaman-ancaman kebengisan tentara Belanda. *Dokter Haslinda* mengisahkan korupsi dan perjuangan sejati dalam revolusi.

Sudah barang tentu dipermasalahkan pula tentang makna revolusi dalam novel-novel tersebut, namun plotnya sendiri tidak mengangkut permasalahan itu. Persoalan-persoalan demikian muncul sebagai anak-anak tema. Novel *Kejatuhan dan Hati* oleh S Rukiah sebenarnya bertema krisis kejiwaan seorang gadis dalam menentukan sikap hidup dan masa depannya, tetapi karena bersetting zaman revolusi juga, maka dapat dibicarakan dalam kategori ini. Apalagi kisah novel ini kemudian menyangkut lahirnya tokoh-tokoh komunis dalam tahun 1950-an dan 1960-an. Dapat diduga novel ini semi otobiografis. Persoalan revolusi ini menarik untuk diteliti lebih jauh, lantaran banyaknya karya-karya sastra berbentuk cerita pendek dan drama yang juga membicarakan zaman itu. Dan belum semua novel tentang revolusi Indonesia dibicarakan di sini.

Novel-novel yang dapat dikatakan "cermin dari zamannya" adalah novel-novel Pramoedya, *Bukan Pasar Malam, Korupsi, Midah Si Manis Bergigi Emas* dan *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*. Tiga novelnya yang pertama boleh dikatakan bertema kejiwaan. Yang pertama menggambarkan keadaan keluarga menengah-bawah sehabis revolusi yang hidup menderita karena kemiskinan, lebih bersifat studi psikologis-filosofis hidup manusia di dunia ini. Novelnya yang kedua juga studi psikologis pelaku korupsi di lingkungan pegawai negeri. Digambarkan bagaimana masyarakat yang miskin masih menghargai kejujuran, ketulusan, kesejatian diri dari pada kekayaan yang diperoleh dengan korupsi. Dan novel Pram yang ketiga bercerita tentang rombongan pengamen yang menjelajahi kehidupan kaum bawah masyarakat Indonesia tahun 1950-an. Sedangkan novelnya yang keempat agak bersifat sosial, yakni kesaksian kebengisan gerombolan DI di Jawa Barat dan peranan seorang lurah yang berhasil "menyembuhkan" masyarakatnya dari trauma politik ini.

Novel-novel lainnya, yakni *Jaya Wijaya* oleh S Mundingsari jelas psikologis, tentang ambisi seseorang menjadi pengarang besar di Indonesia. *Perjalanan Pengantin* oleh Ayip Rosidi, meskipun psikologis semi-otobiografis, namun melukiskan dengan baik situasi kehidupan sosial masyarakat menengah-bawah tahun 1950-an. Begitu pula *Mekar Karena Memar* bertema psikologi di lingkungan kedokteran. Novel yang dapat dikategorikan bertema sosial adalah *Tanah Gersang* oleh Mochtar Lubis yang mempertontonkan bagan sosial masyarakat Indonesia tahun 1950-an, terutama "dunia kejahatan bawah tanah".

Novel-novel di atas melukiskan kondisi manusia tahun 1950-an yang sarat dengan penderitaan kemiskinan yang merata dan usaha manusia untuk keluar dari kemelut zaman tersebut, yakni dengan kerja apa adanya (*Midah Si Manis*), jadi pegawai negeri (*Kubur Tak Bertanda*), korupsi (*Korupsi*), merampok (*Tanah Gersang*), menjadi terkenal (*Jaya Wijaya*), bergotong royong (*Sekali Peristiwa*).

Nampak bahwa potret kehidupan masyarakat bawah dan menengah yang masih serba kekurangan secara ekonomis menjadi tema utama novel. Kehidupan kelas menengah-atas masih asing dalam sastra. Kalau itu digambarkan, hanya sekilas dan dari sudut pandang "luar pagar". Inilah sebenarnya potret kelas menengah terpelajar dari negara yang baru saja merdeka itu.

(Bersambung Minggu

Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 1995

PUISI-ULASAN

Bila Dua Wanita Melahirkan Puisi

RESENSI BUKU

Judul Buku : Sunting, Kumpulan Sajak Berdua
Pengarang : Upita Agustine dan Yvonne de Fretes
Kata Pengantar : Mursal Esten
Penerbit : Puisi Indonesia Jakarta

ADA tamsil, bila dua pakar hukum bertemu, maka akan lahir sepuluh pendapat. Lalu, bila dua wanita bertemu mereka akan membuat seribu satu gunjingan.

Untuk yang terakhir ini tak selamanya benar. Pertemuan dua wanita penyair ini melahirkan kumpulan puisi berdua yang mereka beri nama *Sunting*.

Adalah Upita Agustin dan Ivonne de Fretes, dua sosok penyair wanita Indonesia yang menerbitkan buku kumpulan puisi itu. Peluncuran buku kumpulan puisi *Sunting* pada hari Sabtu (22/4) malam di Gedung Genta Budaya Abdullah Kamil, Padang, diselaraskan dengan peringatan hari Kartini serta 50 Tahun Indonesia Merdeka.

Agaknya itu pula, bila keduanya memanfaatkan momentum dengan memuat 50 buah puisi — masing-masing penyair 25 puisi — pilihan yang banyak berkisah tentang sosok emansipasi liwat visi seorang ibu, dari dua latar budaya daerah kelahiran yang berbeda.

Upita Agustin atau yang bernama lengkap Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib, istri dramawan Wisran Hadi ini adalah keturunan Daulat Yang Dipertuan Raja Paguruyung.

Sarjana pertanian yang kini menjadi dosen di almamaternya, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, sudah lama dikenal sebagai penyair wanita.

Beberapa kumpulan puisinya telah terbit, seperti *Bianglala* (1973), *Dua Warna* (bersama Hamid Jabbar, 1975), dan *Terlupa dalam Mimpi* (1980). Selain itu, beberapa puisinya dimuat pula dalam buku *Laut Biru Langit Biru*, *Tonggak 3*, *Perisai*, serta majalan *Horison*.

Sedang Ivonne de Fretes, pada awalnya memang lebih banyak berkecimpung di dunia jurnalistik. Ibu tiga putera, Sarjana Ekonomi berdarah Maluku yang lahir di Singaraja, Bali, 10 Oktober 1947, ini pada semula lebih banyak menulis masalah kewanitaan di sejumlah media ibukota. Ia juga pernah menjadi penanggungjawab rubrik sebuah harian di Ibukota.

Beberapa waktu kemudian, setelah mengikuti tugas suaminya sebagai Kepala Jaksa Tinggi dengan berpindah-pindah dari satu propinsi ke propinsi lainnya, ia menemukan nuansa baru dalam dunia kepenulisan dan melukis.

Untuk pertama kali, puisinya dibukukan oleh Forum Sastra Bengkulu dalam Antologi Puisi *Monolog* (1994) oleh Forum Sastra Bengkulu.

Kendati lahir dari dua latar belakang budaya yang berbeda, kedua penyair mencoba untuk mengangkat persoalan yang terasa dalam intuisi mereka. Melalui emosi jiwa mereka, mereka mencoba untuk mengangkat keterbenaman dan ketidakberdayaan sosok wanita liwat sajak-sajak mereka yang feminin.

***

Lihatlah, misalnya, sajak *Seekor Rama-rama* Upita Agustin yang dituju-



kan kepada RA Kartini: *Seekor r a m a - r a m a / Membuka jendela/ Robek sayapnya/ Ditiup nafas yang tertahan/ Dalam luka yang pedih/ Luka kita/ Sampai kini.*

Atau *Sajak Buat Mama* Ivonne de Fretes ini : *...../gadis kecilmu dulu/ elok, pintar, pemalu (kata Mama kan?)/ gemar m e n y e n d i r i/ melamun/ menatap/ menanya/ tentang apa di balik kaki langit/ tentang bulan pucat/ tentang Gamalama yang marah/ tentang mimpi-mimpi/ tentang cinta/ tentang .....*

Dari kedua sajak yang mereka tulis tampak bagaimana keduanya menggambarkan ketidakberdayaan seorang wanita. Upita Agustin menggambarkan liwat perasaan seekor kupu-kupu. Sedang Ivonne de Fretes melukiskannya liwat rahasia alam.

Menurut Prof Dr Mursal Esten yang memberikan kata pengantar dalam buku Sunting *terbitan Puisi Indonesia Jakarta ini, sajak yang mereka tulis berdua lebih menggambarkan tentang kehormatan dan kemuliaan wanita.*

Sebagaimana namanya, Sunting, *merupakan kehormatan bagi wanita di Minangkabau manakala mereka memasuki jenjang perkawinan. Dengan judul itu, kata Mursal, mereka ingin menggambarkan bahwa karya-karya mereka adalah merupakan mahkota. Di dalamnya tersembunyi impian, obsesi, mimpi, visi dan naluri seorang ibu yang dalam dan penuh misteri.*

Di samping itu, idiom-idiom yang digunakan dan imaji-imaji yang dibentuk dalam kumpulan puisi berdua ini terlihat lembut dan teduh.

Menyimaki 50 puisi dalam buku Sunting *ini terasa ada rahasia di balik sosok mereka yang tersimpan rapi. Liwat puisi, kata-kata pilihan mereka, mereka mencoba untuk membangun kesadaran pembaca.*

Peluncuran buku kumpulan puisi berdua Sunting *dilakukan oleh Ny Zuraida Hasan Basri Durin dengan penuh harapan; kiranya mampu membangkitkan kembali gairah kesusasteraan di Ranah Minang yang dulunya pernah berkibar.*

Berkaitan hal itu, Ketua Harian Peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka Sumatera Barat, Prof Ir Muchlis Muchtar, menyebutkan penerbitan buku itu untuk memberi arti tentang sosok wanita penyair. Juga untuk menambah khazanah kesusasteraan Indonesia. ■ *INDRA SAKTI NAULI*

Pelita, 7 Mei 1995

Memaknai Cinta Tuhan Melalui 'Angin'

(Sajak 'Dengan Engkau' Karya D Zawawi Imron)

KK. 141/5-95

AL-QUR'AN mengatakan, *"Akan kami unjukkan alamat-alamat (ayat) Kami di cakrawala dan dalam diri mereka sehingga menjadi terang bahwa Tuhan adalah Hak (yang benar)"*. Kata ayat (alamat) juga berarti ayat Al-Qur'an, atau manusia yang merupakan cermin tentang Tuhan, atau juga realitas alam. Tidak ada sesuatu pun yang *real* jika ia tidak ilahiah. Yang tidak *real* ialah segala sesuatu yang dipahamkan dan dipikirkan di luar hubungannya dengan Tuhan.

D Zawawi Imron adalah seorang penyair yang sadar benar akan pentingnya hubungan antara alam, manusia dengan Tuhan.

Dalam tulisan ini, penulis akan menampilkan satu sajak yang menarik berjudul 'Dengan Engkau' (*Bulan Tertusuk Lalang*, 1982:29). Menarik karena sajak ini relatif berhasil mencitrakan soal eksistensi manusia di tengah realitas alam yang telah tergeser oleh realitas budaya secara besar-besaran.

Dengan Engkau

kusambut anginmu setelah
berhasil melacak jiwaku yang
penasaran di
terjal bukit-bukit batu.
sementara mawar mengeringkan embun, matahari
yang bengis tak
kuasa menyadap cintamu
hanya aku yang bisu, tegak tapi
agak ragu pada harum jejakmu.
dan kalau langit bermendung
di ujung kemarau, tangis pun
adalah lagu keimanan,
Senyummu membias
di linang hatiku.

Dalam sajak ini, aku-lirik adalah tokoh yang diceritakan dalam dunia imaji sajak. Namun demikian, bukan sebagai subjek tunggal sebab eksistensinya justru ditegakkan oleh alam seperti angin dan semacamnya. Karena pemikiran terhadap realitas alam itulah, maka tumbuh pertanyaan-pertanyaan eksistensialnya. Baris *kusambut anginmu setelah berhasil melacak jiwaku yang penasaran di / terjal bukit-bukit batu* adalah kata kunci, yang mempresentasikan alam yang telah berhasil dimaknai.

Pertama, aku-lirik dicitrakan sebagai orang yang suka memikirkan realitas alam ini datang dari realitas budaya. Realitas budaya ialah realitas yang disesaki ciptaan manusia dalam rangka meningkatkan harkat hidupnya, sedangkan realitas alam ialah realitas yang belum dicampurtangani manusia. Sebelum manusia turun dari surga, realitas alam telah ada. Masuknya aku-lirik dalam realitas alam, yang dilakukan seperti menyambut angin, merenungi mawar, matahari, membuatnya tumbuh sadar diri sehingga peka bahwa adanya alam itu menunjukkan ada-Nya sebagai sumber penciptaan. Karenanya; hal demikian dilakukannya sebagai upaya 'menyadap cintamu' (Tuhan). Sebelumnya, dalam realitas budaya 'jiwaku penasaran', ada 'dimensi kedalaman' yang hilang sebab manusia mencipta jarak (bahkan mengeksploitasi) terhadap alam sehingga yang tersisa hanya 'terjal bukit-bukit batu'.

Kedua, dalam sajak ini aku-lirik datang dari realitas budaya biasa terakui eksistensinya jika berpikirm, semacam *cognito ergo sum*. Maka, ketika aku-lirik sadar diri terhadap daya cipta Tuhan atas alam, justru mempertanyakan dan menginginkan jawaban empiris tentang-Nya. Benarkah alamat ada-Nya dengan melihat ciptaan-Nya. Dengan tanya ekstrem, jika Tuhan ada, di manakah Dia?

Ketiga, segala pertanyaan bersifat eksistensial itu justru terjawab setelah melalui 'proses berpikir aku-lirik. Ketika aku-lirik memahami 'langit bermendung di ujung kemarau' yang bermakna hujan akan mengakhiri kemarau, maka berakhir pula keraguannya. Makna cinta Tuhan turun dalam ujud hujan yang diharapkan bagi kehidupan sekitar yang gersang. Daur hujan dapat berlangsung sebab faktor utamanya sinar matahari dan uap air, maka tak terbayangkan jika tak ada sinar matahari, sekalipun dalam sajak dikatakan 'matahari yang bengis'.

(Abdul Wachid BS, *penyair*)

Pikiran Rakyat, 14 Mei 1995

Theomorphic Being Puisi-Puisi Emha Ainun Nadjib

THEOMORPHIC BEING sering diartikan sebagai "citra keilahian". Dalam diri seseorang, *theomorphic being* mendorong dirinya untuk bukan sekadar meletakkan pada satu posisi secara dikotomis; secara vertikal *ansich* atau hanya horizontal. Sebab, *theomorphic being* itulah yang secara konsekuensi sosiologis dan teologis menjadi tumpuhan yang menyatu dalam menghasilkan karya- karya *sufistik* yang mengandung nilai-nilai religiusitas maupun sosial.

Ketika membaca karya-karya puisi Emha Ainun Nadjib, seperti kumpulan puisi *99 Untuk Tuhanku, Lautan Jilbab, Cahaya Maha Cahaya*, dan *Seribu Masjid Satu Jumlahnya*, kita akan menemukan kecenderungan *theomorphic being* yang kental. Membaca karya-karya Emha tersebut, membangkitkan lipatan-lipatan ingatan pada penyair lama seperti Rabiah Al-Adawiyah; Sana'i, Hafiz, Hamzah Fansuri, Muhammad Iqbal serta Amir Hamzah. Mereka adalah penyair yang gemar menyenandungkan cinta kepada Tuhan dalam puisi- puisi nya dengan berbagai cara dan pesona, yang sanggup mengantar pembacanya pada hakikat kehidupan dan mengenal atawa merasakan lebih dekat dengan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan.

Meskipun Kuntowijoyo lebih cenderung menilai karya-karya puisi Emha sebagai karya profetik (nubuwwah, komitmen sosial sebagai titik pijak), namun secara umum karya-karya puisi Emha dapat dipastikan sebagai karya yang memiliki latar belakang dimensi sufisme. Misalnya, pandangan-pandangan sufisme.

Pandangan sufisme yang terdapat dalam karya puisi Emha antara lain: Pertama, pandangan terhadap manusia secara personal. Dalam puisi *Badan Hanya Alatku* (Lautan Jilbab) tergambarkan diri manusia personal yang mengandung berbagai rahasia. *Aku Sir, rahasia/Aku Jufi, rongga/Aku Shudur, dada/Aku Qalbi/Aku Fuad/Aku Syaqafa/Aku Insa/.* Di sini tampak *Aku* dimanfaatkan sebagai fokus pembicaraan. Pembicaraan yang mengarah pada (untuk menemukan) siapa 'Aku' yang sebenarnya. Bahkan pembicaraan tentang *Aku* dalam puisi tersebut tidak hanya berhenti dan terbatas pada hal-hal semacam, tetapi masih berlanjut hingga pembicaraan tentang *khafi, akhfa, nathiqa, kullujasad, dan nurullah.* Kesemuanya merupakan gambaran sifat-sifat kemanusiaan manusia secara personal.

Kata-kata *Sir, Jufi, Muthmainnah, amanah, dan lawwamah*, mewakili gambaran tentang-karateristik manusia secara personal. *Sir* yang bermakna rahasia misalnya. Kerahasiaan yang ada pada diri manusia merupakan kodrat Tuhan. Hanya Tuhan pulalah yang mengetahui atas kerahasiaan itu.

Dalam *puisi 90* (99 untuk Tuhanku) Emha bergumam *Tuhanku/ di dalam diriku ada ruang/amat luas tak terbatas/fajar hari melemparinya dengan batu/tapi tak bergeming ia, karena tak berdinding/.*

Betapa diri manusia sangat sederhana, tetapi sekaligus sangat tidak sederhana. *Aku* dalam puisi-puisi di atas merupakan penggambaran tentang jarak antara realitas sejati manusia dengan realitas palsu atau semua realitas, yang bila saatnya tiba dibutuhkan sebagai kepastian, yakni tatkala menyebut orang lain sebagai *engkau*, atau *ia*.

Kedua, pandangan terhadap manusia secara universal. Universalitas manusia tdak bisa lepas dari perannya di muka bumi. Baik ketika menyelenggarakan hubungan horizontal maupun ketika memupuk hubungan vertikalnya. Hubungan horizontal manusia dilakukan Emha seperti tebersit dalam kalimat-kalimat puisi *Menangis* (Seribu Masjid Satu Jumlahnya): *masuklah ke urusan-urusan manusia di sekitarmu,/pergilah ke pasar, ke kantor-kantor, ke panggung-panggung dunia yang luas:/.* Sedangkan hubungan vertikal dibangun Emha lewat kalimat: *Anak-anakku, pergilah masuk ke dalam dirimu sendiri,/telusurilah perbuatan-perbuatanmu sendiri,/.*

Ketiga, pandangan terhadap kehidupan dunia. Bagi kaum sufi, rangkaian kehidupan yang berputar melalui poros waktu tidak lebih dari sekadar benda makro yang bersifat remanen yang pada suatu saat akan menemui kehancuran. Pernyataan yang mencerminkan sebuah penolakan terhadap kehidupan dunia juga tampak dalam puisi Emha: Coba simak apa kata Emha: *Tuhanku/jangan katakan dunia ini/ ialah tempat kediamanku/.*

Memang, bagi kaum sufi kehidupan dunia yang fana ini bukanlah meruakan tempat kediamannya. Karena kehidupan dunia yang fana ini baginya, lebih bersifat kamuflase, bukan merupakan tempat segala-segalanya. Kehidupan dunia yang fana ini tak ubahnya hanya sebuah tempat untuk mampir minum (mampir 'ngombe'). Tempat yang hanya sementara, tidak hakiki.

Di samping gambaran ke-*nubuwwah*-an, dari puisi Emha juga bisa ditemukan pandangan terhadap Tuhan. *Aku ruh tunggal/ Namaku beragam/Petakku tiga puluh enam/.* Tampak dalam puisi yang berjudul *Aku Ruh Tunggal* (lautan Jilbab) itu, sebagaimana sikap kaum sufi, Emha juga memandang zat Tuhan sebagai zat tunggal yang di dalamnya terdapat beragam nama. Nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki. **(ozai durani)**

Jawa Pos, 14 Mei 1995

Apa dengan Sajak Protes saja Kita Bicara?

POLEMIK

Sastra itu ungkapan diri. Apa yang dikemukakan adalah apa yang ada pada diri sendiri. Bagaimana, misalnya, kita bereaksi terhadap lingkungan, persoalan keseharian, sejarah, atau apa saja yang membuat penulis sastra itu terusik.

Persoalan globalisasi memang membuat kita harus mawas diri, menilai diri. Kita perlu pula melihat seberapa besar potensi yang kita miliki itu. Apalagi jika kita ingin memasuki abad 21, jelas kita memerlukan persiapan-persiapan untuk menyosongnya. Karena kita akan mengalami banyak ujian dalam hal ini. Kita, misalnya, dituntut untuk bisa mengorganisasikan diri.

Tapi, sastra tak harus bereaksi terhadap penetrasi global itu. Bisa saja di tengah riuhnya produk teknologi, seorang penyair menulis sajak-sajak cinta. Boleh saja, karena yang sedang ia alami adalah perasaan itu. Bisa pula ia menulis sajak-sajak sepi. Karena teknologi ternyata kemudian membuat banyak jiwa mengalami kesunyian.

Ungkapan diri itu kemudian ditulis bukan untuk menyadarkan orang. Penyair bukanlah guru dan kehadirannya bukan untuk menjadi guru bagi yang lain. Ia tidak mengajarkan nilai-nilai moral, baik buruk, ini tak baik itu baik dan semacam itu pada pembacanya. Ia hanya menyampaikan reaksi jiwa yang ia alami. Bentuknya bisa apa saja, sajak profetik, sajak protes sosial, realis, puisi mantra atau apa saja.

Apa ia mesti memberi gambaran masa depan? Abdul Hadi WM pernah mengatakan itu. Yaitu, bahwa penyair seolah-olah memberi gambaran bagi masa depan kehidupan, juga terhadap masa depan puisi. Kemudian Abdul Hadi membuat semacam program untuk itu. Ia membuat 'program' sajak-sajak sufistik. Tapi, saya lihat dengan program puisi sufistik itu ia justru hanya melahirkan beberapa sajak yang bagus. Dulu ketika tanpa program, sajaknya banyak yang bagus.

Sebuah sajak kalau penciptaannya terikat dengan program biasanya akan tak berhasil. Karena ia tak timbul dari kebutuhan untuk menyatakan diri. Saya kira di sinilah dulu Lekra gagal. Karena ia memaksakan bentuk realis pada karya-karya budaya.

Jadi tak bisa diprediksi puisi apa yang bakal lahir pada waktu yang akan datang. Siapa, misalnya, bisa memprediksi lahirnya Chairil Anwar pada masa-masa itu. Juga bagaimana kita bisa memprediksi Sutardji Calzoum Bachri yang tiba-tiba keluar dari sajak mantranya. Semuanya tergantung dialog, proses aksi reaksi yang nyata antara penyair dengan lingkungan atau dengan dirinya sendiri. Tergantung pengaruh. Dan pengaruh itu bisa datang dari mana saja atau dicari sendiri. Bisa mendadak atau terpengaruh satu genre, satu ragam bicara. Semuanya tergantung perkembangan masing-masing.

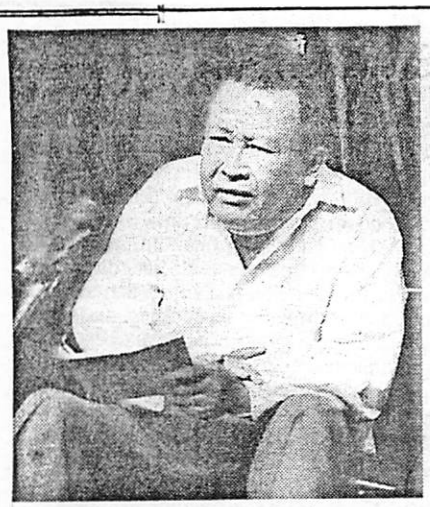
Globalisasi juga begitu. Ia tak bisa diprediksi akibat dan produk-produk yang akan lahir. Bisa saja kemudian lahir perang suku di abad yang justru kesadaran terhadap perdamaian cepat diinformasikan dengan bantuan teknologi. Tak mungkin membayangkan, dengan globalisasi itu, abad mendatang akan begitu saja uniform, bahwa desa di sini, misalnya, akan sama dengan desa di Amerika. Saya kira keterikatan terhadap teknologi dan matematik itu justru malah akan menimbulkan reaksi. Di AS sendiri pada tahun 1930-an muncul *new critisism* sebuah reaksi atas teknologi. Sekarang saja mengemuka peran agama, yang secara kuat memberikan reaksi terhadap teknologi itu.

Menurut saya sastra pun tak memerlukan program dan keterikatan-keterikatan terhadap sebuah zaman. Ia hanya berkepentingan menghunjamkan pada jiwa. Ia menyuguhkan reaksi jiwa dan nilai-nilai. Dan syukur pembacanya sampai pada pengertian-pengertian.

Karena itu saya kira sastra perlu menyentuh dan memasuki nilai kemanusiaan yang luas dan dalam. Karena itu pula di dalam karya sastra terlibat nilai-nilai yang universal. Sastra itu mencari nilai yang kekal.

Untuk sebuah sajak, misalnya, nilainya akan benar-benar bisa ditemukan kalau sajak itu memiliki dorongan mencari yang kekal itu. Orang baru tahu sajak Sutardji Calzoum Bachri bernilai atau tidak, kalau sajak itu berlaku untuk satu zaman yang panjang. Yaitu, ketika orang itu menemukan nilai-nilai yang bisa didalami dan menyentuh rasa kemanusiaannya.

Ciri kekal dalam hal ini memang relatif. Di situ terlibat unsur-unsur kemanusiaan, perenungan dan hal-hal menyinggung aspek-aspek universal. Dalam posisi demikian, penyair dihadapkan pada pertanyaan tentang



Oleh **Subagio Sastrowardoyo**

kepujanggaannya. Apa kepujanggaannya itu memberinya *wisdom*, kebijakan hidup atau sebaliknya. Apa ia menjadi penyair hanya untuk *dikeploki* atau menghunjam dalam pada kebajikan nurani.

Sajak protes

Dalam kaitan ini saya ingin bicara sajak-sajak protes. Penciptaan sajak-sajak protes itu bagus memang. Ada yang menulis tentang kepedihan rakyat, ketimpangan, ketidakadilan. Ungkapan itu ditulis dengan kalimat-kalimat protes. Dan saya amati banyak yang membuat puisi-puisi protes itu.

Tapi, apa sampai di situ saja kita bicara? Sajak protes oke, tapi saya kira kita tidak bisa terus menerus begitu. Mengapa kita tidak masuk ke dalam sisi ketidakadilan yang lain, yang lebih mendalam dan menyentuh kehidupan ini. Yang menukik kepada soal manusia. Bagaimana, misalnya, ternyata kita tak bersikap adil terhadap lingkungan kita, terhadap anak kita, atau terhadap diri sendiri.

Yang saya maksudkan adalah bahwa ada aspek-aspek yang lebih mendalam, yang menyentuh kehidupan ini, yang tidak harus didekati dengan semangat pamflet. Bahwa perlu pula kita menunjukkan kelengkapan diri kita yang bersegi. Kita adalah manusia yang memiliki banyak segi yang bisa dijelajahi.

Dalam soal ini, saya pernah mengkritik sajak-sajak perlawanan Taufiq Ismail. Atau juga Trisno Sumardjo yang menulis sajak-sajak perjuangan. Aku yang tampak dalam sajak itu adalah aku yang berani. Sastra itu memang pernyataan diri, tapi kalau pernyataan itu membusung terus, atau seolah-olah yang di luar dirinya jelek, ya saya kira sajak itu tak bisa berumur untuk satu zaman yang panjang.

Persoalan kontektualitas dalam hal ini menjadi penting. Tapi, kontekstualitas sajak tidak mesti diletakkan dalam arti politik. Selama ini, kontekstual tidaknya sebuah sajak masih sering diletakkan dalam pengertian itu, yaitu bahwa sajak-sajak kontekstual mesti berarti kontekstual pada penderitaan rakyat. Padahal, sebuah sajak bisa pula kontekstual dalam arti budaya.

Bagaimana, misalnya, sebuah sajak bertutur dengan sangat personal problem-problem kantoran, masalah rumah tangga atau hal-hal yang dialami sendiri oleh penyairnya. Bagaimana seorang penyair menuliskan apa yang dihayatinya secara intens dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai orang biasa, bukan sebagai penyair. Pengalaman itu begitu mengharukan dan bisa saja terasa personal. Dan ia mengungkapkannya jauh dari permainan kata dan slogan. Kalau ia menulis sajak dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, saya kira sajak tersebut akan bernilai.

Lepaskan irama dalam sajak. Bunyi sajak dan simbol-simbol dihilangkan. Secara bentuk bisa saja tak beda dengan prosa. Tapi, kalau sajak itu menyentuh nilai-nilai dasar yang dialami semua orang, saya kira sajak tersebut akan berhasil.

Sebuah sajak, menurut saya, tak perlu mencari hiasan kalimat, tapi ia tetap saja bisa puitis. Puitis tidaknya akan terkandung dalam pernyataan yang dialami itu. Puisi itu memiliki inti pada kesederhanaan menyatakan diri, tanpa membutuhkan hiasan agar ungkapan itu indah atau terdengar indah.

Tapi tentu ia berbeda dengan buku harian. Buku harian sekadar sebagai kumpulan pengalaman, mencatat peristiwa sehari-hari atau semacam biografi. Di sana tidak ada imajinasi. Dalam puisi ada pengalaman, imajinasi dan menyentuh inti-inti kemanusiaan. Yang penting puisi itu menyentuh inti-inti dan hasrat yang didamba banyak orang.

Pengamat sastra

Sejarah sastra modern Indonesia mengenal periode-periode perkembangan. Dan pada tiap perkembangan itu masing-masing memiliki pengamatnya. Pada tiap generasi baru akan muncul pengamat-pengamat itu. HB Jassin, misalnya, ia sangat intens mengamati perkembangan sastra dari masa Balai Pustaka-Pujangga Baru-1945. Ia betul-betul membaca setiap roman.

Begitu pula tahun-tahun perkembangan sastra berikutnya: angkatan 1950-an, angkatan 66, puisi tahun 1980-an dan perkembangan puisi mutakhir. Pada periode-periode perkembangan tersebut memerlukan pengamatnya masing-masing. Dan setiap ahli itu harus melihat produk penulisan sastra yang lahir pada waktu itu dan secara mendalam membaca, mengamati perkembangan sastra.

Terus terang kita kekurangan orang seperti HB Jassin, yang mau membaca setiap karya yang terbit. Orang-orang dulu jelas tak bisa untuk mengamati perkembangan sekarang. Untuk mendalami karya-karya sastra yang hidup pada setiap kurun zaman memerlukan orang-orang zamannya masing-masing. Sejarah perhatian budaya itu pada dasarnya melibatkan suasana berpikir, suasana merasa, dan tingkah lakunya sendiri-sendiri. Dan itu bisa dipenuhi oleh orang yang hidup pada zaman itu. Pengamat sastra pun harus bisa membaca kemauan zaman itu.

Tahun 1950-an, misalnya, tak bisa dipenuhi sajak-sajak Sutan Takdir Alisyahbana. Cita rasanya berbeda. Takdir hanya bisa menyelami zamannya sendiri. Ia tidak bisa menilai begitu saja karya-karya untuk zaman berikutnya. Untuk menilai karya sastra harus melihat konteks zamannya itu. Bila kritik tak memperhatikan konteks zaman, kritik akan tidak utuh.

Karena itu sebenarnya, untuk memberikan pengamatan sajak-sajak mutakhir, saya jelas memiliki banyak keterbatasan. Zamannya sudah lain. Saya hanya berbicara umum dan melihat dari kecenderungan-kecenderungan perkembangan yang telah terjadi.

Untuk zaman sekarang, misalnya, saya melihat ada perkembangan kematangan. Muncul banyak penyair yang bagus. Tapi, banyak juga yang masuk ke dalam dorongan yang keliru. Mereka ini lebih banyak terdorong oleh pencarian popularitas, layaknya penyanyi. Ini harus disayangkan. ■

wawancara dan transkrip oleh yos rizal suriaji

Republika, 14 Mei 1995

Jujuk di Gelar Puisi Multimedia

Surabaya, JP.-

Jujuk Srimulat tampaknya kian melebarkan sayap. Setelah turut membintangi pentas teater di Taman Budaya Surakarta beberapa waktu lalu, pukul 19.30 nanti Jujuk turut tampil pada Pergelaran dan Diskusi Sastra *Umpatan Tujul* di Gedung Cak Doerasim Taman Budaya Jatim, Jalan Gentengkali Surabaya.

"Pergelaran ini dikemas dalam pentas multimedia yang merupakan fenomena lain dalam menyosialisasikan karya puisi kepada masyarakat penikmat seni," kata Henri Nurcahyo dari Forum Kerja Seni Surabaya yang memprakarsai acara ini bekerja sama dengan Taman Budaya Jatim dan *Jawa Pos*.

Umpatan Tuyul, kata dia, merupakan kumpulan puisi dua penyair Surakarta, yakni Raden Tumenggung Sudjono (Moertijono) dan Sosiawan Leak. Moertijono sehari-harinya dikenal sebagai kepala Taman Budaya Jateng di Surakarta. Sedangkan Sosiawan Leak yang penyair muda alumnus UNS itu dikenal sebagai aktivis Revitalisasi Sastra Pedalaman.

Selain Jujuk Srimulat, gelar puisi multimedia ini juga menampilkan Meong Purwanto, Gigok Anurogo, Wiyono, Jarot, Nana Primadono Gidak Gidik (pembaca), Bambang Sunarto, dan Muhamad (pemusik), Cunong Indrawati (penari), serta Moertijono dan Sosiawan Leak sendiri. Sedangkan dalam diskusi antara lain tampil pengamat seni Halim H.D. yang juga menulis pengantar *Umpatan Tuyul*.

Peminat acara ini dikenai tiket seharga Rp 1.000. Namun, bagi yang membeli buku *Umpatan Tuyul* seharga Rp 3.000, diberikan sebuah tiket gratis. Tiket bisa diperoleh di kompleks Balai Pemuda Surabaya (sebelah perpustakaan Kodya Surabaya), Jalan Pemuda 15 Surabaya.(soe)

Jawa Pos, 16 Mei 1995

Mencari Makna Puisi di Tengah Modernisasi

Di bawah cahaya lampu yang temaram, mereka menyimak pembacaan puisi bernafaskan religius, sosial, dan kebebasan sebagai refleksi Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh 20 Mei ini.

Tidak ada yang istimewa, tapi terasa suasana persaudaraan di tengah gebalau modernisme yang hiruk-pikuk di Jakarta.

Para penyair yang tampil malam itu M Fadjroel Rachman, Sitok Srengenge, Jamal D Rahman, Herdi SRS dan Ramdansyah. Dan di hadapan mereka para aktivis dari Kelompok Cipayung dan Yayasan Lima Agustus ITB. Pembacaan puisi dan dialog kebudayaan ini diselenggarakan oleh Forum Humanika, Formaci, FMI, dan FKPMJ, kesemuanya bertemu dalam suatu kaukus in-formal kaum muda yang mencintai kebudayaan dan ke-manusiaan.

Di antara yang hadir, tampak Amarsyah, Arnold Purba, Didi Yakub, Stephanus Ondos, Bursa Zamubi, Ketua Formaci Imam Abdurahman, Bob R Randilawe dan Ulil Abshar Abdalla.

M Fadjroel Rachman membacakan sajaknya untuk mendiang Soe Hok Gie, Ahmad Wahib dan Nike Ardila, mereka yang mati muda. Demikian larik puisinya,"*Bukankah hidup berjalan pada kehendaknya sendiri, ataukah melayang tanpa arah di kegelapan malam: sepi dan rapuh. Langit yang patah, hidup yang kandas dan kematian yang datang, berjubah darah*".

Dan Fadjroel Rachman, penyair yang pernah ditahan tiga tahun karena aktivitas kemahasiswaannya di ITB itu, membacakan puisinya dengan suara yang tenang dan mencoba mengingatkan eksistensi manusia di dalam puisi tersebut.

Bosnia

Sementara Jamal D Rahman, editor jurnal *Islamika* dan *Horison* membacakan puisinya mengenai suara-suara yang gaduh, suatu puisi yang bertemakan isu kemasyarakatan sebagai artikulasi kaum yang ditekan oleh ketidakdilan dan ketidakbebasan. Demikian larik puisinya,"*Hari demi hari, mereka menggelar spanduk dengan huruf huruf yang gaduh. Seperti papan papan iklan yang setiap kali berputar. Tak ada pijakan bagi hujan atau gerimis: aspal, beton, atau batako. Wajah kita saling berganti juga. Tetapi suaramu selalu menjelma huruf huruf yang gaduh itu.*"

Jamal, penyair alumnus IAIN Jakarta, membacakan puisinya dengan nuansa religi, meski tema sosial merupakan hal yang sentral dalam sajak tadi. Demikian halnya Sitok Srengenge, penggerak Gorong-Gorong Budaya yang dikenal sebagai penyair garda depan ini, mengingatkan tentang pendidikan di Indonesia yang monoton dan monolitik sehingga tidak merangsang anak didik untuk kreatif melalui cerita dan puisinya. Sajaknya *Obituari Bulan* merefleksikan hal itu, yakni mengisahkan bagaimana seorang guru memaksa muridnya untuk menuruti perintahnya secara disiplin mati. Sementara berbeda dengan para penyair yang membacakan puisi dengan tema mengenai kondisi sosial di Indonesia, maka Herdi SRS berbicara mengenai Bosnia dan keadaan sosial di Eropa, yang tengah dilanda perubahan.

Dan Sitok malam itu mengisahkan cerita mengenai refleksi budaya kekuasaan Jawa dengan simbolisme di dalamnya.

Menurut dia, puisi dan dongeng atau cerita rakyat merupakan bagian dari artikulasi simbolik untuk mengingatkan para pemegang pemerintahan agar tidak melupakan mandat rakyat yang diembannya. "Meski puisi tidak selalu efektif, seperti juga cerita-cerita rakyat, namun semua itu dimaksudkan sebagai artikulasi masyarakat untuk mengingatkan para pemegang pemerintahan agar selalu mempedulikan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran," katanya.

Pembacaan puisi dan dialog budaya kali ini merupakan rangkaian silaturahmi kaum muda dalam merespon perkembangan masyarakat dan zaman yang ditandai dengan ketidakpastian masa depan, kata Fadjroel Rachman. (Fdl)

Media Indonesia, 16 Mei 1995

Sajak-Sajak Azwina Aziz Miraza

Oleh Korrie Layun Rampan

Tipikal wanita penyair Indonesia, Azwina Aziz Miraza lama tenggelam setelah mempublikasi puisi-puisinya pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Bersama Hendry Ch. Bangun ia pernah menerbitkan kumpulan puisi **Tango Kota Air** yang memperlihat jejak awal kepenyairannya. Tahun 1995 ia muncul secara solo dalam **Pesta Duka Malam Menagih Janji** berisi sajak-sajak yang ditulisnya dari 1976 sampai 1994 berisi 41 puisi. Merupakan puisi-puisi yang lebih menekankan pada nalar ketimbang perasaan, sebagaimana lazimnya sajak-sajak kaum wanita. Pola pengucapannya dekat pada penyair Toeti Heraty yang juga bersajak dalam pada rendah tentang dunia keseharian, baik itu mengenai angan-angan, impian, cita-cita, persoalan keluarga, suami, anak, pacar, kemarian, duka, Tuhan dan sebagainya. Hal yang demikian diungkapkan Azwina Aziz Miraza di dalam beberapa sajak, misalnya dalam "Sekali Waktu, Enak Juga" yang berupa pengembaraan angan-angan, suatu ungkapan yang khas wanita.

Sekali waktu, enak juga jadi janda
peduli amat dicemooh orang
Jangan coba mengerti arti turunan
Mereka cuma punya pesan
yang usang dalam bentuk iklan,
"Tak enak pilihanmu,
biar matang pikirkan."
Muak!
hardikku malah dipergunjingkan.

Sekali waktu di waktu yang lain
enak juga jadi pelacur
Bagi seorang kekasih saja
lantas hanyut main dokter-dokteran,
"Apa sih arti aturan?"
Jalan buntu bila ke luar
dan mereka membungkus dengan kesumat
Aku murung karena iman

Berkali-kali aku melamun saja
Sekali waktu, enak juga!

Sebagai puisi-puisi yang ditulis dalam pola lisan, pengucapan Azwina kurang jernih, terutama karena image yang dibangunnya sering kurang terurai membuat raha pemikirkannya keberanian. Namun di dalam beberapa sajak yang berhubungan dengan realitas keseharian ia mampu menggiring pengucapannya pada fakus yang jelas sehingga sajak subtil dalam pilihan kata dan image, sebagaimana suatu momen peristiwa yang dipotret dalam sajak "Catatan X" yang kontekstual, terasa sajak jadi gempal, karena memiliki kesatuan, meskipun kata-kata di jejalkan dalam beberapa enjambemen yang memberi kesan bahasa lisan yang tidak memperhitungkan gramatika, namun imagenya jadi hidup kerana persilangan pikirannya begitu cepat, dan kadang menggelikan karena ungkapannya yang tidak membedakan antara benda, binatang, manusia, sehingga muncul sifat antropomorfisme, seperti "oplet mengembik," serta berbagai penanda yang menunjukkan hal-hal khusus, seperti "warna pelangi melingkar di matanya" yang dapat ditafsirkan aneke macam. Coba perhatikan sajaknya "Catatan X" berikut ini.

Di halte Kampung Melayu yang
sesak dengan nyawa
hidup dan semu, ia masih,
bisa tertawa dan bicara
Soal kredit rumah!
Tapi kini di atas oplet yang
jalannya terseok-seok,
ia mencibir, merengut, dan gusar.
Anak kecil di hadapannya
muntah-muntah,
warna pelangi melingkar
di matanya.
Di daerah yang banyak copet,
oplet mengembi seorang penumpang,
dibiarkannya berbagai
kemungkinan menjelma,
melibatkan orang-orang sekitarnya,
tentang sore yang menjadi tua
dalam pandangannya, tentang janji
yang nyinyir menimpalinya.

Sebagai sajak yang mengungkapkan persoalan keseharian dengan bahasa yang juga keseharian, sajak-sajak Azwina mencerminkan suatu pola pengucapan puisi yang sahaja dalam pilihan kata. Ia menulis realitas secara realis, beberapa sajaknya yang melukiskan perjalanan waktu yang diarungi para pelakunya. Sajak "Kota Tua Milik Emak" merupakan tipe sajak yang demikian: ia bercerita tentang masa lalu yang dibawa kepada masa kini, dan masa kini itu adalah suatu museum, tempat ia melihat lagi kenyataan hidup yang pernah dilaluinya. Seperti juga sajak "Selubung Langit Hitam" yang membawa persoalan perorangan menjadi persoalan universal, sementara sebaliknya "Mimpi Putih" membawa persoalannya universal menjadi persoalan setiap pribadi. Sementara sajak "Sulap" dan "O Zaman" menukilkan kesaksian tntang suatu zaman, yang membiaskan nuansa kontekstual zaman kita, seperti ditulisnya, "Mana kejujuran yang kau elukan dulu, sobat?/Dunia yang lapar, korupsi yang ingar-bingar/dan kebobrokan yang semakin mekar/kemunafikan yang berputar melingkar/kau balut puisi dan lagu kebebasa/dengan uang terkepal di tangan/dan jemarimu sibuk menghitung laba./Tiga orang anakmu berlarian/acungkan mainan canggih dalam genggaman. "Inilah harga kejujuran Bapak!"/gembira dan senang/Kau pun tertawa dengan napas sesak/asap rokok terus menyulut gelora khayal/Di sampingmu/istri tercinta mainkan berlian tiruan/di jari manisnya/aku pun terlupakan/ /Mana kejujuran itu, sobat?/Bila sirna mata gelap/hilang meluntur dililit kebutuhan/aku terluka/benar katamu, yang kupunya cuma duka" (sajak "Sulap"), "O, zaman yang meningkah banyak peran/kelu lidah kami terpasak perdebatan/undang-undang/yang kerap dipilih tanpa pilihan/Berkobar api amarah/tiupan angin surga/Engkau terpaku beku/memilih napas kebebasan dalam sebuah catatan/terperah emosi tanpa strategi,/'Darah kami terkuras dalam botol-botol pena/yang pertaruhkan hidup bagi para kolega/Keriput kulit kami/yang terbakar legam panas petang/adalah kertas-kertas ketebelece/yang terserak di laci meja/dan tulang kami yang putih/terkumpul di karung goni/itulah sarapan bagi anak bini kami.'/ /O, zaman yang menggilas tubuh-tubuh/berwarna keadilan/kami lengkapi hidup tanpa referensi/ dan tulang-tulang yang terkumpul pagi ini" (Sajak "O, Zaman").

Dari sejumlah sajak ini ada beberapa pikiran yang dapat dirangkum sebagai inti kumpulan ini. **Pertama**, sebagai sajak-sajak keakuan yang menampilkan personalitas, sajak-sajak Azwina menampakkan pelepasan situasi batin yang kalut, sehingga sajak lebih berupa lengkingan suara wanita yang ingin "merdeka" dari kungkungan lingkungan yang membelenggunya. Sajak-sajak ini lebih berupa gerbang ke luar keterpenjaraan rohani. Kedua, lukisannya para dunia yang kontekstual memperlihatkan bahwa ia memiliki solidaritas sosial terhadap manusia dan lingkungan hidup, dan di dalamnya ia bersuara dengan nada protes yang tidak melengking. **Ketiga**, beberapa sajaknya menunjukan bahwa ia juga seorang futuris, karena ia selalu mempertanyakan masa depan, dan memperkirakan kemungkinan kehidupan manusia di waktu-waktu. **Keempat**, pada beberapa segi, Azwina juga menyair dengan nuansa religius dengan mengambil tema kisah-kisah keagamaan yang memperlihatkan cerita para pahlawan iman. Beberapa sajaknya mengesankan nuansa religiositas. **Kelima**, beberapa sajak menunjukkan peran pengalaman empiris, khususnya pengalaman masa kanak dan remaja yang hendak diulang dalam manifestasi kisahan yang komis sebagai segi rekreatif untuk melawan kejenuhan terhadap gencetan kehidupan yang begitu keras dan kejam. **Keenam**, sebagai penyair yang akan terus berkembang, Azwina Aziz Miraza memperlihatkan sumbangannya pada dunia perpuisian Indonesia, khususnya dari kalangan wanita. Secara estafet, sejak Siti Nuraini, Toeti Heraty, Isma Sawitri, dan Rayani Sriwidodo, tradisi sajak-sajak pikiran sampai pada Azwina. Penyair ini lebih banyak menulis letupan-letupan pikirannya ketimbang ia menayang pembaca dengan ayunan perasaan, sebagai-

mana banyak dilakukan wanita penyair yang menulis secara romantik dan melankolis. Azwina lebih banyak mengajak berpikir, memecahkan persoalan, atau mengajukan persoalan alternatif yang harus dipecahkan secara individual. Di sinilah sebenarnya harga kumpulan sajak **Pesta Duka Malam Menagih Janji** ini, sebuah judul yang sebenarnya abstrak! ***

Pelita, 20/21 Mei 1995

Puisi, Satu Kata, Kata Berikutnya

KETIKA menulis puisi, dan penemuan suatu kata memberikan energi untuk menemukan kata-kata berikutnya adakah teknik khusus yang Anda gunakan? Begitu pertanyaan pernah diajukan. Ataukah itu adalah keahlian sebagaimana kaitan tukang kayu dengan martil dan pisau pemotong?

Jika Anda memotong kayu, maka Anda harus melakukannya sampai batas pinggir yang Anda potong. Artinya, saat menulis puisi, Anda tahu persis "garis pinggir"-nya. Di antara saat itu dan akhir "garis pinggir" tadi, ada semacam "kepanikan yang menyenangkan." Keindahan konstruksi puisi terletak pada kenikmatan untuk mempertahan disiplin puisi tersebut. Jika Anda menjelaskan "etika" tentang estetika puisi ini kepada etika masyarakat, maka tanggung jawab untuk mempertahankan tatanan semacam itu—bukan dalam pengertian hukum dan tatanan Nixonian, tetapi menurut ide tentang tatanan yang diciptakan—sangat esensial bagi peradaban.

Itulah yang saya maksud ketika mengatakan penyair berupaya keras "menciptakan tatanan yang jauh dari situasi kekacauan". Namun, apa sebenarnya hakikat *khaos* itu sendiri.

Khaos bisa mencakup kebingungan, ambiguitas, dan kebohongan yang terkandung dalam kata-kata. Pada hakikatnya, kata-kata merupakan kebohongan—kebohongan. Kebenaran kata-kata itu masih diragukan sampai mereka menemukan makna mereka sendiri. Sebuah lampu tidak bisa disebut lampu, kecuali ia memang layak disebut begitu. Sejauh ini kamera agaknya merupakan instrumen terbaik yang mampu merepresentasikan realitas. Tetapi kamera tak bisa berperan sebagai metafor, meski kamera bisa dipakai sebagai kiasan. Kamera sekadar dapat mengangkat satu *frame* di sampingnya. Dengan kata lain, Anda bisa memberikan sekuntum bunga lili kepada seorang gadis, dan mengatakan gadis itu sesegar bunga lili. Itulah satu *frame* yang disejajarkan dengan *frame* lainnya. Dalam film, Anda tak mungkin menempatkan seorang gadis secara sendirian untuk memperoleh metafora di luar objek tunggal tersebut. Kiasan merupakan metafor yang bersifat sekunder. Jika kiasan merupakan "seperti itu," maka metafor merepresentasikan "ini sebagai itu". Keduanya memang bisa menjadi satu. Meskipun orang bilang puisi tak bakal bisa menghidupkan kritik sebuah media, tak ada instrumen lain yang mampu menciptakan suatu metafor.

Kamera mungkin bisa sangat membantu pekerjaan kita. Ada citra tertentu yang ditampilkannya, dan kita menerimanya sebagaimana yang kita saksikan. Puisi justru memerlukan ketrampilan atau keahlian kita untuk menciptakan kembali citra atau imaji itu di dalam benak kita.

Ibaratnya pembaca puisi itu "menciptakan" puisi bersama dengan si penyair. Mereka berbagi tugas untuk menciptakan wujud instan puisi tersebut. Tentu saja penonton tidak ikut serta dalam pembentukan citra atau imaji tersebut. Mereka hanya berperan sebagai resipien dari imaji itu.

Televisi juga sangat berarti bagi kita, begitu pula halnya dengan puisi. Dalam beberapa puisi dan salah satu karya drama, kisah Robinson Crusoe terus dimunculkan. Sebenarnya, banyak penulis abad 20 tertarik terhadap kisah tersebut, terutama karena Crusoe menyimbolisasikan Kristenisasi orang-orang kanibal dan pengentasan nasib rakyat dari perbudakan. Itulah aspek dramatik dari kisah itu. Ada juga beberapa aspek lainnya yang bisa menyentuh perasaan. Di antaranya: bagaimana perasaan Crusoe? Bagaimana perjalanan nasibnya, yang terisolasi dari negeri dan bahasanya? Bagaimana riwayatnya, sehingga kisahnya terus hidup? Apa pula makna hari Jumat baginya?

Kepatuhan terhadap hari Jumat bukanlah "penyerahan diri", tetapi justru semacam sikap "berbagi nasib". Para penulis dari dunia ketiga agaknya kurang begitu tertarik terhadap ketergantungan pada Jumat ini. Mereka umumnya lebih suka pada pengembangan gagasan "apa makna koloni bagi suatu imperium?" ketimbang pada "apa yang harus diperbuat imperium bagi koloninya?"

Kita tahu apa saja yang telah diperbuat semua imperium terhadap koloni-koloni mereka. Saya me-

ngerti. Salah satu hal yang harus dihadapi Amerika adalah realitasnya sebagai suatu imperium. Tampaknya orang-orang Amerika sangat sulit menerima kenyataan tersebut.

Keraguan kita untuk menggambarkan imperium ini sebagai imperium dalam sebagian hal memang bisa dimaklumi, karena umumnya orang-orang demokratik selalu bilang, "saya tidak suka dengan keberadaan imperium." Tetapi sejarah, tanpa bisa dibantah, telah menempatkan Amerika sebagai imperium, sehingga tanggung jawab sebagai imperium berada di pundak Amerika. Malasahnya, bagaimana Anda bisa menjadi imperium yang demokratis? Anda bisa saja menjadi imperium deemokratis semacam itu, asalkan imperium tersebut sadar bahwa secara kultural dan spiritual, ia bisa diperkaya dengan negara-negara lain. Sebagai misal, Amerika bisa diperkaya dengan kultur dan spirit Nikaragua. Wilayah-wilayah luar bisa menyuburkan dan membangkitkan kembali ide tentang republik ini. Itu yang saya maksudkan bahwa hari Jumat merupakan Nikaragua, sedang Robinson Crusoe mewakili simbol Amerika.

Keberadaan orang-orang negro bukan dipandang sebagai problem di Karibia. Seorang negro tak bakal berdiri sambil mengatakan, "Ya, Tuhan. Saya ini ternyata semacam penyakit." Tetapi jika Anda berdiri di negeri ini, Anda bisa bilang, "Masya Allah, ternyata saya bagian dari penyakit yang disebut orang negro di Amerika." Jika Crusoe melihat hari Jumat sebagai masalah, maka dia justru akan lebih banyak berbuat amal —misalnya, beri dia topi dan sebagainya. Menurut saya, itulah sikap yang sedang menjadi perbincangan orang-orang.

Tetapi, jika kata-kata bahasa Inggris ditempatkan dalam *frame* Jumat, ia akan nampak seperti citra atau imaji yang stereotipikal. Karya terbaik dalam kumpulan puisi *The Tempest* pernah dibicarakan Caliban secara apa adanya. Di situlah letak kehebatan Shakespeare. Shakespeare tak pernah mengajak Caliban bicara seperti Tarzan atau kera. Yang disajikannya justru bahasa yang kaya musik. Caliban bilang, "Ajari saya bahasa, maka saya akan memperoleh manfaatnya. Pernahkah saya tahu kata-kata umpatan?" Agaknya dia tak hanya sulit mengumpat, tetapi bahasanya juga begitu bagus seperti "Jangan cemas sama sekali; pulau kecil itu begitu membisingkan." Itulah perkataannya. Penulis besar sama sekali tak menyimpan prasangka, tetapi bukan kebencian. Dante justru penuh kebencian. Prasangka jarang "mengisi" emosi Dante. Prasangka merupakan wujud pikiran yang inferior.

Negara-negara lain di dunia tahu bahwa Amerika merupakan imperium. Mereka juga mengerti betapa kebijakan luar negeri Amerika penuh permusuhan, dan begitu pula betapa keras kepalanya mereka.

(satriagraha)

Jawa Pos, 21 Mei 1995

BINGKAI

Puisi Indonesia, Sejarah yang Terputus

Oleh Dorothea Rosa Herliany

Pada dasawarsa 90-an, kepenyairan Indonesia nyaris kehilangan jejak ketika muncul isu betapa kepenyairan dekade 80-an dan dasawarsa terakhir hanya berupa 'reproduksi' generasi. Setelah masa imperium Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum Bachri yang disebut sebagai pembaharu kepenyairan Indonesia, peta kepenyairan Indonesia sudah berhenti. Isu-isu itu kemudian dipertegas dengan pernyataan Nirwan Dewanto yang secara kritis menilai periode kepenyairan setelah itu adalah periode penjenuhan. Secara sederhana bisa ditafsirkan sebagai kurun hilangnya mata rantai sejarah kepenyairan Indonesia yang membutuhkan para penanda pembaharuan. Di kurun ini disebut hanya lahir penyair-penyair reinkarnasi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Sutarji Calzoum Bachri, Goenawan Mohamad, dan seterusnya.

Era penjenuhan itu ditandai dengan adanya krisis legitimasi dan kebimbangan periodisasi. Hal ini seolah dipertegas oleh beberapa peristiwa menarik. Seperti peristiwa Hadiah Buku Puisi Utama DKJ yang diberikan untuk buku puisi terbaik tahun 1977. Kala itu Yudhistira Ardi Nugraha dengan buku kumpulan puisi *Sajak Sikat Gigi*, dari golongan penyair muda, bersama Sutardji, Sitor, dan Abdul Hadi WM berhak atas penghargaan itu. Namun beberapa penyair menolak menerima, dan kemenangan buku *Sajak Sikat Gigi* dianggap sebagai suatu kegagalan menempatkan kepenyairan Indonesia dalam derajat yang diakui.

Gejala ini seolah berlanjut pada penyerahan hadiah buku utama kumpulan puisi terbaik DKJ pada kurun waktu berikutnya (1984), yang tak diberikan pada seorang penyair pun. Eka Budianta dengan kumpulan sajaknya *Sejuta Milyar Satu* dan Afrizal Malna dengan buku puisinya *Abad yang Berlari*, hanya berhak atas hadiah khusus, dan ini terkesan sebagai upaya pelipur duka saja.

Setelah itu, tradisi penobatan buku puisi terbaik lenyap sudah. Beberapa penyair generasi sesudah itu, seperti Beni Setia, Acep Zamzam Noor, Sitok Srengenge, Ahmadun Y. Herfanda, Djamal D. Rahman, Radhar Panca Dahana, Ahmad Syubanuddin, dan puluhan penyair lainnya seperti tak punya kesempatan untuk memiliki buku puisi "terbaik di Indonesia", dan menjadi penyair utama di jamannya.

Maka, pada periode terakhir, kepenyairan Indonesia modern memunculkan kekaburan periodisasi. Pada kurun waktu tersebut dilihat tidak muncul seorang penyair pun yang mampu tampil dengan perangkat penanda peralihan dari generasi sebelumnya. Maka, para pengamat sastra menyebutnya sebagai krisis kepenyairan Indonesia.

Buku puisi

Kurun itu pula sangat langka terbit kumpulan puisi penyair muda yang tampil secara "pantas". Baik secara kelembagaan diterbitkan oleh penerbit terkenal, dicetak dalam buku yang bagus, atau target eksemplar yang memberi gambaran pemilikan apresian yang memadai. Dan seterusnya.

Maka, sejumlah penyair muda Indonesia kemudian bergumul dengan buku-buku puisi kelas cetak menengah ke bawah, dengan biaya swadaya, atau dengan sponsor rela hati. Kalaupun diterbitkan oleh beberapa penerbit, masih dengan motivasi "berpartisipasi memasyarakatkan karya sastra".

Dalam kenyataan demikian ini, sebagian besar penyair Indonesia masih menganggap ada dua kepentingan dalam penerbitan buku kumpulan puisi. Yaitu, kepentingan legitimasi dan kepentingan sejarah.

Kesadaran demikian agaknya juga melatari beberapa penerbitan buku puisi para penyair generasi baru seperti Sitok Srengenge, Afrizal, Djaman D. Rahman, Acep Zamzam Noor, Soni Farid Maulana dan Radhar Panca Dahana. Sebab, buku kumpulan puisi tidak mandek sebagai sekadar pekerjaan dokumentasi. Ia akan berbicara tentang pensyahan, bahwa karya puisi secara utuh akan hadir bersamaan dengan sosok kepenyairan dan kualitas kepenyairan.

Sebagian besar penyair dari generasi kini, seolah melakukan pencarian demikian. Dan agaknya upaya seperti ini yang lalu menjebak orang menangkap adanya kesan keseragaman.

Tapi penerbitan buku puisi bagi mereka tidak lagi sekadar kerja dokumentasi, sehingga kelayakan fisik menjadi pertimbangan yang tak diabaikan. Sebab pada akhirnya, sebuah kumpulan puisi akan menampilkan secara utuh kualitas kepenyairan penyairnya pada kurun waktu tertentu atau pada waktu yang lebih panjang lagi.

Mungkin pencapaian seperti ini tidak sepenuhnya bisa dipakai sebagai ukuran bahwa derajat kepenyairan Indonesia dari generasi terakhir ini harus diletakkan sejajar dengan kerinduan akan munculnya pembaharu seperti Chairil Anwar. ■ Penulis seorang penyair, tinggal di Magelang.

Kompas, 21 Mei 1995

Sajak-sajak Yvone De Fretes

Agak mengejutkan kehadiran Yvonne de Fretes, wanita penyair yang kurang publikatif, dan tiba-tiba muncul lewat *Sunting* (bersama Upita Agustine, Puisi Indonesia, 1995) yang menghimpun 25 puisi yang ditulisnya di berbagai kota, tempat ia mengikuti suaminya bertugas. Oleh karena itu nada dasar utama sajak - sajak Yvonne adalah berupa sajak-sajak perjalanan -- secara sesungguhnya maupun perjalanan rohani. Bahkan sajak pertamanya yang ditulis di Ambon, berjudul "Sebuah Perjalanan di Negeri Leluhur" yang melukiskan panorama Kepulauan Maluku di mana di-akhir sajak penyair memberi aksentuasi pada makna perjalanan, "dan di pasir pantai seputih salju / kembali kita mengangguk / dan berlabuh / kucium lehermu dengan gairah / ini memang milik kita / bila tahu mempermainkan matahari / asalnya cinta / yang dipasrahkan dalam - dalam". Dan logika prosa yang dinukilkan dalam sajak perjalanan itu sangat kentara di dalam hampir semua sajaknya; pada alam dan situasi momental penyair membawa pengalaman empiris pada pengalaman rohani sebagaimana sajak "Pantai Losari" yang memadukan antara fakta fisikal dengan image perjalanan yang dipenuhi angan-angan dan impian. Sebagaimana analogi waktu dalam "Perjalanan Hari" atau analogi alam pada "Gerimis Itu" yang menciptakan suasana melankolis seperti ditulis Yvonne pada baris-baris:

tetes-tetes amsal yang masih saja di sana
kukira
mungkin serpihan cinta yang koyak
dari sudut sebuah lukisan biru
dan bukan harapan yang berjaga
menanti waktu
atas sepotong tanya yang menggantung

aku
menatap jatuhnya
gerimis itu

genangan
kenangan
saling meremas dalam ketelanjangannya
lirih, di antara daun-daun gugur

sementara
jejakmu makin pudar
semakin pudar ... pudar

Dunia yang diciptakan Yvonne de Fretes adalah dunia yang bergerak, sebagaimana hidup bergerak dari ketakkekalan kepada keabadian. Di dalam gerak kehidupan itu manusia bereksistensi: bertemu, berpisah, atau saling menemukan, karena, "sejak cinta pertama di firdaus / hilang / timbul / datang / pergi ... // sunyi / jalan tak berujung ... / kau ke

Oleh Korrie Layun Rampan

mana ... aku di mana ..." ("Episode Terakhir"). Bahwa sebenarnya, "tak ada keabadian di jagat..." ("Flamboyan Gugur di Tepi Campuhan"). Karena itu hal yang romantis dibangun, sebagaimana mimpi dan perkembalian pada dunia kanak - kanak yang membiaskan image dongeng, sebagai suatu pose pelarian dari kerasnya kehidupan, seperti potongan "Bulan di Atas Lovina":

pernah kubilang aku suka mimpi-mimpi?
tentang biara cinta
istana perak
sejuta bunga rumput
dan peri manis bertakhta?

Di dalam narasi yang puitis, Yvonne de Fretes sebenarnya mempersoalkan hubungan antarmanusia yang melahirkan suasana romantik yang dipertalikan oleh dua insan di dalam perjalanan usia di dalam ruang kehidupan. Baris-baris "Sebuah Episode" menunjukkan suatu episode dari hidup "aku lirik" sebagai suatu pengalaman yang memberi nuansa pada sebuah perjalanan kehidupan, "...aku yakin / kebahagiaan itu keseimbangan. Dan kau...? // Di tengah sunyi yang tak berakar telah kita soalkan dengan kenes, / "Sampai di manakah gerangan jalan kita?" // Meniti jembatan yang rapuh, hari - hari berpasir yang kadang berbalik ke arah titik awal dan mengembara dalam catatan - catatan yang tak lagi pasti // Pernah kuingin singgah pada saat yang / tepat / mengenalmu, mengajakmu menerobos sunyi dan berbisik tentang / pusaran ombak yang bisa ditetap lewat jendelamu, / dan ombak di hatiku / Lalu bersama-sama menantikan akhir senja, rasakanlah ... / resapkanlah, semuanya, segalanya, sampai / pori terakhir tubuh kita. Sebab kemudian, cuma tinggal sepi yang tertitip pada kata // Padahal, / aku mencintai hidup ini / betapa pun retak dan tercabik / karena kupunya bilik pribadi / tempat aku bernyanyi. Tempat / 'kubersedan."

Pengalaman - pengalaman perjalanan yang dilafaskan dalam potongan - potongan renungan di dalam lirik romantik yang terpola dalam nuansa prosa membuat sajak - sajak Yvonne tidak obskur. Pengucapannya jernih karena ia tidak mendayagunakan metafor tetapi menempatkan kata - kata lugas sebagai dasar ekspresi saja. Beberapa sajak yang berhubungan dengan keluarga membiaskan suasana keakraban

dan nostalgia di dalam romantik kehidupan yang dijalani para penghuni rumah, seperti "Sajak buat Mama", "Buat Ketiga Putra Tercinta" dan "Jalan Tidak Selalu" yang berhubungan dengan pengalaman - pengalaman pribadi secara subtil. Beberapa baris "Jalan Tidak Selalu ..." menunjukkan nuansa rumah tangga dalam renungan "aku lirik" yang lebih membiaskan sifat otobiografis secara romantik.

jendela tetah menutup
padahal di langkannya banyak mimpi pernah singgah
mesin tik berhenti berdenting
padahal kisah belum lagi usai
naungan yang tak nyata
padahal di situ kita bersilang dan bersulang
di situ kita bercumbu dan bercanda
dengan langit
dengan api
dengan angin
bumi
malam
matahari
ke semua arah mata angin

Sajak-sajak Yvonne ditulis di berbagai kota dengan pengalaman yang aneka ragam, namun pola pengucapannya stabil yang menandai ia tidak terombang - ambing oleh bentuk. Pola puisi kalimat yang lebih memprosa membuat sajak - sajak penyair ini mirip potongan kalimat yang disusun secara puitis, dan pola menyatu dalam ekspresitas yang lembut namun menyimpan renungan. Kebanyakan sajaknya memiliki subjek khusus, apakah keluarga, teman, kekasih, suami, ibu, anak, atau subjek alam, kota, lingkungan hidup, Tuhan, atau hal-hal yang supranatural. Semuanya diucapkannya dengan pola yang khas, sebagaimana sajaknya "Kegelisahan di Garis Pantai" yang membiaskan subjek "engkau-manusia" yang ditulis dalam pola ekspresionistis.

engkau berlari mengejar cakrawala?
padahal hari punya lagu,
sebuah sonata dalam lukisan

laut punya tepi
di mana ombak bebas menghempas

dan kegelisahan yang tertitip pada awan dan gerimis yang lewat

punya jiwa
punya roh
punya makna

engkau berlari mengejar cakrawala?
bagaikan layar yang berabad-abad mencarinya?

padahal hari juga punya
cinta di sudut hatimu, di duniamu yang sembunyi

Kelahiran Singaraja, Bali, 10 Oktober 1947, Yvonne de Fretes sebenarnya sudah lama menekuni profesi kewartawanan, dan bias kerja kewartawanan itu tampak juga dalam sajak - sajaknya yang kebanyakan mengambil pengalaman empiris. Puisinya disertakan dalam antologi *Monolog* (Forum Sastra Bengkulu, 1994) dan dalam *Sunting* yang merupakan sepilihan puisinya yang kebanyakan ditulis paling akhir, saat mengikuti tugas suaminya – Jaksa Tinggi – di Bengkulu dan Padang. Meskipun tidak mengejutkan secara literer kehadiran penyair ini memberi nuansa lain dari dunia persajakan yang ditulis oleh wanita penyair Indonesia bahwa pengalaman perjalanan dapat juga disajakkan secara mengesankan – seperti dulu pernah dilakukan oleh Rendra, Ajip Rosidi, Taufiq Ismail, dan Surachman R.M. Yvonne juga menerbitkan satu kumpulan cerpen *Bulan di Atas Lovina,* juga merupakan himpunan cerpen tentang perjalanan di berbagai tempat di Tanah Air dengan pusat perjalanan di Bali.

Suara Karya, 28 Mei 1995

Puisi, Menoleransi juga Menyerap

BANYAK yang tahu bahwa Amerika Serikat adalah sebuah imperium. Mereka juga mengerti betapa kebijakan luar negeri Amerika penuh permusuhan, dan begitu pula betapa keras kepalanya mereka. Tetapi ada Amerika yang lain, yang datang ke sini sebagai imigran. Tidak sulit bagi mereka untuk menerima *power* Amerika, namun ketika tahu bahwa Amerika berpura-pura seolah tak memiliki *power*, mereka tercengang dengan kemunafikan itu.

Saya membayangkan diri berada dalam situasi kolonial yang begitu "halus". Orang bisa bilang, "bagaimana kamu bisa ngomong begitu ketika perbudakan dan eksploitasi justru yang menjadi latar belakang?" Dalam pengalaman pribadi, saya tak pernah merasakan hukuman apa pun sebagai kolonial. Padahal, kebalikannya yang justru terjadi. Secara politis saya tak pernah menganggap diri saya berbeda dengan anak sekolahan di Inggris. Saya justru mempelajari bahkan lebih intensif, sejarah Latin dan klasik serta merasa sepenuhnya bebas, karena polisi di Karibia tidak bersenjata. Kali pertama saya melihat polisi bersenjata, ketika mengunjungi kepulauan Martinique yang merupakan koloni Prancis. Polisi-polisi itu berkulit putih. dari mulut saya lantas terucap, "Beginikah undang-undang Prancis?" Saya memang sempat dibuat kaget, karena saya tak terbiasa dengan ide tentang undang-undang itu. Sebagai putra kolonial, saya hanya merasa bahwa saya orang Inggris. Bahasa saya serupa dengan bahasa yang digunakan Shakespeare. Sulit bagi saya untuk secara estetik memusuhi bahasa negara itu — dan itu jauh lebih penting dibanding jalannya sejarah itu sendiri. Sejarah dilihat oleh banyak orang —kecuali penyair— sebagai kelanjutan peristiwa. Tetapi, karena tak terikat dengan waktu, puisi menjadi tak banyak berpengaruh dalam rentetan waktu itu. Puisi memang tak hanya menoleransi, tetapi juga menyerap banyak hal. Jadi, meski pengalaman sejarah perbudakan bukan merupakan ide sangat bagus, pengalaman itu malah merupa-

kan ide yang dramatik. Tentu saja pengalaman itu bisa dieksploitasi dengan banyak cara, baik dari sudut kesalahan si penindas maupun dari sisi kemarahan sang korban.

Tampaknya pengalaman perbudakan di Karibia sama persis dengan pengalaman perbudakan di Amerika. Tetapi ketika memasuki kawasan permukiman kumuh di 125th Street, saya menjadi ngeri dengan kondisi koloni ini yang berada di dalam suatu imperium. Kenapa Amerika harus campur tangan di Nikaragua, jika Anda sudah menyaksikan kondisi di 125th Street? Tak ada kehidupan seperti itu di Nikaragua. Keadaan ini agaknya bertentangan dengan orang-orang yang melihat dari luar. Keraguan Amerika untuk mengambil tanggung jawab merupakan bagian dari problema secara keseluruhan.

Ada yang bilang, saat menyimak salah satu buku kumpulan puisi saya, bahwa perkawinan campuran merupakan kunci bagi terciptanya dunia modern —keturunan campuran, ras campuran, dan bahasa Inggris campuran. Istilah "perkawinan campuran" mengandung suatu pengertian yang secara genetik keliru. Konsep itu tak manusiawi, karena dua orang dari ras yang berbeda diikat oleh komitmen "penggabungan". Perkawinan campuran antarras bukan gagasan yang terjadi di Karibia. Setiap orang punya hak untuk menikahi orang lain. Pasangan hitam dan putih mungkin saja membuat Anda kaget, tetapi itu bukan hal yang menjijikkan. Perkawinan itu bukanlah hal yang keliru. Yang "manusiawi" adalah hibridisasi atau kreolisasi, karena setiap kultur terwakili. Pengalaman sehari-hari telah menjadi semacam kebiasaan, sehingga orang sulit membedakan. Tak ada yang bilang, "Oh, ini orang Cina". Dengan demikian, konsep perkawinan campuran antarras itu tidak ada. Orang bisa bilang, "Afrika sudah tak memiliki identitas lagi, karena sudah bercampur dengan orang-orang Cina. Identitas Cina pun sudah tiada." Tetapi, apa sebenarnya identitas itu? Identitas berada dalam persilangan berbagai macam kultur di tengah-tengah satu kota yang padat. Port-of-Spain merupakan salah satu kota paling menarik di dunia. Orang mungkin bertanya, "Apa *sih* kultur Port-of-Spain?" Kultur Port-of-Spain terletak pada masyarakat kota itu. Tak pelak, jika semua orang Asia, Afrika, dan Mediterania mengalir, muncul "endapan" baru yang sangat subur.

Ada yang menyatakan kepada saya bahwa itu kisah saya sendiri yang seringkali terangkat sebagai suatu metafora. Sebagai keturunan campuran Afrika, Belanda, dan Inggris, sepertinya posisi saya mengalami tarik ulur antara Port-of-Spain di Trinidad dan AS. Ada yang bilang, saya mewakili setiap tempat, tetapi sekaligus tak punya asal. "Anda tak punya tempat tinggal, namun bisa pula menetap di mana saja. Terkadang pernahkah anda merasa menjadi metafora itu dan tak mewakili tempat asal manapun?" Begitu pertanyaannya.

Saya tahu persis tempat yang paling saya senangi, yakni St. Lucia. Jika muncul keinginan untuk melepaskan diri, itu terjadi ketika saya mengidentifikasikan diri sendiri dengan ketidakberakaran masyarakat Karibia —realitas ketidakpuasan untuk terus bertahan hidup di Karibia dan fakta bahwa mereka harus beremigrasi. Mimpi imigran tak bisa diganggu gugat tentang Amerika. Semestinya mimpi seorang negro di sana juga tak bisa diganggu gugat. Kenyataannya tidak begitu. Yang dirasakan, mimpi itu justru tak terpenuhi.

Lalu, apakah mimpi orang kulit hitam berbeda dengan mimpi kulit putih? Mimpi itu justru sengaja diciptakan secara berbeda oleh kekuatan-kekuatan yang ingin mempertahankan keberadaan si warga kulit hitam tadi pada posisinya. Setiap kerja kerasnya juga akan mendapat batasan-batasan tertentu.

Kalau begitu, rasisme itu merupakan sikap ataukah struktur sosial? Dalam perjalanan di Melville beberapa waktu lalu, saya menjumpai pengalaman yang agak mengejutkan. Ikan-ikan paus putih diperlakukan sebegitu baiknya, sehingga kesannya ras putih lebih superior ketimbang saudara-saudaranya yang berkulit gelap.

Sulit sekali memahami hal itu di Melville. Terus, apakah anda berkomentar, "Itu rasis"? Kata rasis tak ingin saya pergunakan, karena terlalu mudah untuk mengemukakan rasis. Ada hal yang jauh lebih mendalam daripada rasisme. Ini bisa diandaikan dengan sebuah pemikiran besar: Bagaimana mungkin pemikiran seperti itu memandang bagian dunia atau ras lain secara miring? Jika anda menyebut "suku berkulit gelap," maka anda mereduksi Melville sebagai aspek terburuk dari Kipling. Oleh karena itu, secara langsung dia menjadi penulis inferior. Ini semacam kemalasan dalam sebuah pemikiran besar. Kini anda bisa berucap, "Oh, dia itu penulis dari abad sembilanbelas." Tulisan-tulisan Shakespeare itu sendiri juga tidak berlangsung pada abad duapuluh. Jika orang-orang negro dari belahan dunia lain tahu bahwa di sini ada dua mimpi—yakni, mimpi Amerika dan mimpi si orang negro—dan mimpi si negro tadi tak bakal dibiarkan menjadi mimpi Amerika, kenapa mereka bersikukuh datang ke Amerika? Apa yang menarik mereka ke posisi kontradiksi seperti ini? Mereka datang, karena Amerika menjadi idealisasi. Tak ada negeri lain dalam sejarah dunia yang membuat orang sebegitu antusias untuk mendatanginya dengan segenap belahan jiwa. Alasannya bukan berkaitan dengan uang, tetapi karena pandangan bahwa setiap orang diciptakan sederajat.

Bicara soal kebijakan Amerika, bisa dibilang belum cukup matang, kurang bertanggung jawab, dan impulsif. AS tak pernah mau mendengar dan memahami bahwa Amerika Latin bukan satu negara, tetapi benua kecil yang rumit dengan berbagai persoalannya. Bahasa Inggris sangat otoritatif, dan agak merendahkan bahasa Spanyol atau bahasa Prancis. Ada superioritas yang inheren dalam bahasa Inggris, sehingga bahasa lain dianggap tak bisa menyamainya. Sebagian besar imperium juga berpikiran seperti itu. Tetapi, jika pendekatan demokratik anda pergunakan dalam pembicaraan, anda tak sungguh-sungguh mendengarkan bahasa orang lain, karena anda beranggapan berbicara dengan cara umum. Jika anda mendengar bahasa Spanyol, pikiran anda langsung keluar, "Itu *lho* masyarakat inferior. Mereka tidak bisa berbincang-bincang dalam bahasa Inggris." Maka, orang menyebut mereka "*spics*". Seseorang disebut *spics*, karena dia tak dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Ini sikap terhadap bahasa. Jika saya berbicara dalam bahasa superior itu, dan jika Anda ingin mengakomodasikan diri Anda, Anda sebaiknya belajar bahasa saya.

Kita memang perlu berbicara dalam suatu bahasa yang demokratik. Orang tentu berpendapat segala hal yang demokratik tidak perlu diandaikan dengan superioritas ini.

Jika ada orang bilang, "Tak bakal ada hal mustahil yang akan kami lakukan," maka dia sebenarnya tidak berbicara dalam gaya bahasa seorang diktator. Bahasanya justru seperti kebanyakan bahasa Amerika pada umumnya yang menggunakan silaba tunggal. Tetapi, bahasa yang sebenarnya seharusnya mengandung kekuatan banyak silaba. Hanya saja, ada tameng berupa keterbatasan silaba tunggal yang membuatnya bisa saling dipertukarkan. Kita mesti mampu mengarakterisasikan seorang kandidat melalui kehebatan retorikanya, bukan karena akomodasi retorikanya. Kehebatan tersebut menyimpan kekuatan banyak silaba. Tidak demikian halnya dengan "Saya ingin menyumbangkan yang terbaik bagi negeri ini," karena ungkapan itu tak mengandung makna sama sekali.

Lalu, apa kira-kira tepatnya yang akan dikatakan seorang diktator? Mungkin begini, "Ayo, kita ganyang rejim Sandinista" atau "Mari, gerilayawan Kontra kita enyahkan dari sini." Begitu kira-kira ucapan seorang diktator. Seorang raja juga berbicara dengan gaya seperti itu. Tetapi, kandidat pemimpin Amerika tak boleh berbicara seperti itu, karena ada semacam pembicaraan silaba tunggal bersifat universal yang mesti dimengerti setiap orang dan netral. Sandaran bahasa riil terletak kehebatan banyak silabanya. Jika Hitler bangkit dan berucap, "Semua musuh akan kami hancurkan,"

maka ucapan itu mengandung banyak silaba. Jika anda seorang Nazi, Anda akan bilang, "Siap, Hitler." Kalau tidak, maka anda akan bilang, "Orang ini sudah gila." Tetapi, setidaknya, dia telah berbicara tentang kebenaran yang dirasakannya, sehingga Anda bisa membuat penilaian. Dalam hal ini, bahasa menjadi seragam, sehingga setiap orang seolah-olah membicarakan kebenaran itu. Ambillah contoh Nikaragua.

Reagan jelas-jelas tidak menyukai Nikaragua. Dia justru berambisi mengenyahkan pemerintahan Sandinista. Sayangnya, dia tidak mengungkapkannya dalam bahasa seperti itu. Yang dipergunakannya justru bahasa yang bisa dipertukarkan dengan iklan McDonald. Jika Amerika terlihat keji terhadap sekutu-sekutunya atau musuh-musuhnya, dan jika kekejiannya dituliskan dalam bahasa yang menyerupai semangat berapi-api, maka hal itu akan lebih jelas dimengerti. Yang membingungkan, muncul fakta bahwa bahasa itu telah dikerangkeng dalam uniformitas yang tak punya makna apa-apa.

Mungkinkah bahasa Inggris telah kehilangan kekuatannya? Tidak begitu. Kehebatan bahasa itu seperti tecermin dalam jurnalisme di negara ini tidak sampai hilang. Kehebatan bahasa para penyair di negeri ini juga tidak pudar. Ada memang bahasa yang bisa menimbulkan "daya hebat". Puisi Ginsberg, misalnya, begitu bagus menggambarkan penyimpangan perilaku masyarakat yang menganggap korupsi sebagai visi Amerika. Prosa Mailer juga hebat, karena bisa mendeskripsikan kemarahan dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahasa Amerika telah hilang dan tak mengandung arti lagi.

Tetapi, dalam politik, kenapa bahasa itu menjadi "lunak" dan penuh kebohongan. Masalahnya terletak pada sikap, yakni imperium yang belum berkembang secara matang. Pikir saja para ahli retorika Victorian. Gaya bicara Perdana Menteri Disraeli persis seperti tulisan Macaulay.

Kita bisa mendengar nada kontradiksi di situ. Beberapa waktu lalu kita berbicara tentang keramahan imperium Inggris, tetapi lantas kinni menulis dan berbicara tentang cacat imperium ini. Namun itu bukan maksud saya. Sama sekali bukan. Saya hanya berbicara tentang pengalaman saya sendiri. Saya tak banyak tahu tentang berbagai hal, namun itu tak membuat saya melengos untuk tidak melihat kemiskinan. Karena melihat itulah, saya jadi tahu bahwa ada kesalahan sejarah di balik apa yang saya lihat. Seandainya saya bertambah tua, maka tanggung jawab historis saya sebagai penyair gaek semakin bertambah. **(walcott/moyers)**

Jawa Pos, 28 Mei 1995

SASTRA-Biografi

Arifin C. Noer Telah Tiada

Jakarta, Kompas

Arifin C. Noer (54), salah satu tokoh terpenting dalam dunia teater Indonesia, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta karena penyakit kanker hati, Minggu (28/5) pagi pukul 06.25 WIB. Sebelum dirawat di Rumah Sakit Medistra sejak 23 Mei 1995, Arifin telah menjalani operasi kanker di Singapura. Jenazah sutradara kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 10 Maret 1941 yang dari jalan kesenimanannya telah menjadi budayawan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat luas lebih dari dunia yang digelutinya itu dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut Jakarta Selatan, Minggu sore kemarin.

Didampingi terus-menerus oleh istrinya, Jajang Pamontjak yang dinikahinya tahun 1979 (mereka tidak pernah bercerai seperti ditulis *Kompas*, Minggu (28/5) — Red), rumah duka mereka di bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemarin dipenuhi pelayat dari berbagai kalangan dari seniman, politisi, sampai diplomatik. Bersama Jajang, Arifin dikaruniai dua anak, Nita Nazira dan Marah Laut. Sedang bersama istri pertama, Nurul Aini, ia juga dikaruniai dua anak, Vita Ariavita dan Veda Amritha.

Hampir semua nama di dunia teater, film, tumpah di rumah duka, bercampur dengan nama-nama dari dunia profesi yang lain. Beragamnya latar belakang pelayat seperti menggambarkan bukan saja signifikansi posisi Arifin C. Noer dalan dunia teater di mana dia pantas disebut sebagai "perintis teater Indonesia", tetapi juga keluwesan, kehangatan, keakraban pribadi Arifin C. Noer.

Ladang baru

Perintis teater Indonesia, titik. Begitulah barangkali untuk menggambarkan sekaligus menghormati posisi kesenimanan Arifin C. Noer. Berbagai pendapat yang dihimpun *Kompas* sebenarnya menegaskan itu.

Nama Arifin tidak bisa dipisahkan dengan Teater Ketjil yang didirikannya sekitar tahun 1967 dan melakukan pentas perdana Februari 1968 di Balai Budaya Jakarta. Ikranagara yang tengah melakukan penelitian mengenai teater Indonesia dan ikut merintis berdirinya Teater Ketjil mengatakan, Arifin dan Rendra adalah pendobrak stagnasi dunia teater di tahun 60-an.

"Sebelum itu patokannya adalah realisme. Arifin melakukan pendobrakan dalam hal pengadeganan, akting, penulisan naskah — hal-hal yang menjadi pilar utama teater," kata Ikranagara. Setelah itu, mengutip perkataan dramawan Wahyu Sihombing (alm), Ikra mengatakan, "Mereka (maksudnya Arifin dan Rendra) telah membuka ladang baru untuk kita eksplorasi."

Ketua Dewan Kesenian Jakarta Salim Said yang juga ikut merintis Teater Ketjil, mengenang saat permulaan Arifin di Jakarta dan saat-saat awal Teater Ketjil. Waktu itu, katanya Arifin menumpang di tempat tinggal Salim di bilangan Tegalan, Jakarta. Nama Teater Ketjil itu sendiri kata Salim mengingat sebelum itu ada kelompok orang asing di Jakarta yang memiliki grup Little Theatre. "Kelompok orang asing itu waktu itu tak aktif lagi, lalu saya katakan pada Arifin mengapa tidak menggunakan nama itu," kata Salim.

Arifin sendiri dalam acara ulang tahun ke-25 Teater Ketjil di kediamannya dua tahun lalu, mengatakan nama "Ketjil" yang dipakai teater ini dipilih dengan sebuah semangat "tahu diri".

"Kelompok ini kan mengandalkan pada eksperimentasi. Kami tahu, penontonnya akan terbatas, hanya sejumlah kecil saja," ucap Arifin waktu itu.

Tradisi

Gaya merendah dan bersahaja itu memang bagian dari Arifin. Padahal, sumbangan Arifin bersama Teater Ketjil-nya terhadap dunia teater di Indonesia sungguh bukan main-main. Waktu itu, ada tiga kelompok teater yang boleh dikata penting, yakni Bengkel Teater pimpinan Rendra, Teater Ketjil pimpinan Arifin C. Noer, dan Teater Populer pimpinan Teguh Karya.

Kalau mau disederhanakan, Arifin-lah yang pertama-tama melakukan pengucapan masalah-masalah modern dalam teater Indonesia lewat kekayaan tradisi yang ada, lewat pengungkapan teater rakyat. Karyanya yang sangat penting adalah *Kapai-Kapai* dan *Mega-Mega*. Dua naskah itu bukan saja terus dimainkan di Indonesia sampai kini oleh berbagai kelompok, tetapi juga dimainkan oleh beberapa kelompok teater di luar negeri dalam berbagai bahasa.

Dalam dunia penulisan naskah itu, Arifin memang lagi-lagi harus disebut salah satu yang terpenting. Pasti ini tak melupakan Rendra dan juga Putu Wijaya yang sangat produktif menghasilkan naskah drama dan juga melahirkan mazhab tersendiri yang diikuti banyak orang. Mengenai naskah drama itu, barangkali juga tak bisa dipisahkan dari pergulatan Arifin untuk memberi warna Indonesia pada teater Indonesia. "Tak ada teater Indonesia tanpa karya asli Indonesia," kata Arifin C. Noer suatu saat seperti dikutip Ikranagara.

Di dunia teater itu, Arifin menghasilkan tak kurang dari 20 naskah, dari *Bulan Pada Suatu Malam* (1961) sampai *Orkes Madun IV* (1989).

Terjun ke film

Yang harus ditulis mengenai Arifin yang juga dikenal sebagai penyair ini, termasuk terjunnya dia ke dunia film. Pada dunia film, dia pernah menyentak dengan karyanya *Suci Sang Primadona* (1977) di mana dia menjadi sutradara dan penulis skenario.

"Itu adalah film dia yang terbagus. Semangat pembaruan Arifin terasa di situ. Dulu saya bahkan pernah berharap akan lahirnya Fellini Indonesia, tetapi kemudian dia mencoba mendekati pasar, meski usaha dia untuk tetap otentik selalu kelihatan," kata Salim Said, doktor ilmu politik yang banyak bicara mengenai masalah film.

Pandangan Salim Said tak terlalu meleset. Selain karya-karya yang banyak dikenang orang seperti *Suci* tadi, Arifin terlibat sedikitnya dalam 44 film, baik sebagai sutradara maupun yang terbanyak dalam penulisan skenario. Begitu beragam skenario yang pernah ditulis Arifin, untuk menyebut beberapa saja, dari *Badai Pasti Berlalu* (1977), sampai misalnya *Akibat Godaan* (1978). Dia sudah ikut berputar bersama film Indonesia saat film Indonesia mengalami masa emasnya di

awal tahun 70-an, misalnya dengan menulis skenario *Sanrego*, *Bengawan Solo*, *Senyum di Pagi Bulan Desember*, dan lain-lain.

Pergulatan Arifin untuk "mengkompromikan" berbagai kepentingan film — baik kepentingan pasar, politik, dan lain-lain — betapa pun telah menghasilkan beberapa karya yang terbukti selain cukup bermutu juga laku di pasar. Sebutlah misalnya selain *Suci* sendiri, juga *Harmonikaku* (1979) dan *Taksi* (1990).

Sate kambing

Perjalanan karier kesenimannya, jalin-menjalin dengan hidup pribadinya yang cukup unik. Lahir dari keluarga penjual sate kambing di Cirebon, sebelum hijrah ke Jakarta, Arifin pernah menjadi sutradara Teater Muslim di Solo dan anggota Studi Grup Drama Yogyakarta.

Ketika memperingati 25 tahun Teater Ketjil dua tahun lalu, Arifin bercerita antara lain bagaimana dia menyelenggarakan pentas Teater Ketjil pertama kali. Pentas di Balai Budaya itu, katanya, dibiayai dengan ongkos Rp 1.500, berasal dari honor Arifin yang diperoleh dari tulisannya yang dimuat di Harian *KAMI*. Katanya, uang itu diserahkan Arifin kepada penyair LK Ara yang bertugas mencetak undangan.

"Untuk mengedarkan undangan, kita mengerahkan semua pemain, sebagian dengan berjalan kaki. Boleh pilih, apa mau berjalan kaki dengan minum es, atau mau naik bus namun tidak punya kesempatan lagi untuk minum es," cerita Arifin waktu itu.

Lalu, ketika Taman Ismail Marzuki (TIM) dibuka tahun 1968, Arifin dan beberapa temannya sering tidur di TIM, yang dilakukannya dengan mengendap-endap agar tak ketahuan petugas keamanan dan badan pengelola TIM. "Kami tidur berpindah-pindah, kadang-kadang di ruang pameran, terkadang di Teater Tertutup, atau Teater Arena."

Dari pribadi semacam inilah kemudian publik teater Indonesia mengenal lingkaran Arifin yang terdiri dari para anak buahnya seperti Ratna Riantiarno, Cini Goenarwan, Lucy Andalusia, Dorman Borisman, Jajang yang kemudian diperistrinya, dan lain-lain.

Banyak orang bisa menenangkan apa yang telah diberikan Arifin. Misalnya pimpinan Teater Koma, N. Riantiarno, yang beberapa saat sebelum bergabung dengan Teater Populer pimpinan Teguh Karya dulu, pernah bergabung dengan Arifin C. Noer. Melalui Riantiarno itulah terjadi "pertalian keluarga" antara Teater Populer dan Teater Ketjil.

"*Besanan* Teater Populer dan Teater Ketjil sebenarnya bukan hanya fisik, antara saya dengan Ratna, tetapi juga antara gagasan-gagasan teater itu sendiri. Lewat Teguh Karya saya belajar hal-hal teknis, masalah-masalah artistik, lewat Arifin saya belajar pemikiran," kata Riantiarno mengenai Teater Koma yang kemudian didirikannya.

Arifin yang sangat luas pergaulannya dan sikapnya yang supel, menjadikan dia nara sumber pertama kalau ada hal-hal khusus terjadi pada seniman di Indonesia. Arifin yang bersuara serak itu, sangat artikulatif dan bisa menjelaskan posisi beberapa seniman Indonesia dalam peta kesenian di Indonesia. Itulah sebabnya, beberapa kali *Kompas* memintanya untuk menulis obituari beberapa tokoh yang meninggal dunia. Dia pernah membikin tulisan yang mengesankan ketika Tuti Indra Malaon meninggal tahun 1990, dengan tulisan *Tuti Itu Indah*.

Kini, Arifin C. Noer sendiri telah berpulang. Kehilangan ini, benar-benar terasa... (xjb/bre)

Kompas, 29 Mei 1995

In Memoriam Arifin C Noer:

Kekuatannya tak Tertandingi sebagai Penulis Naskah Drama

DUNIA kesenian Indonesia kembali dirundung duka. Salah seorang seniman terbaiknya, Arifin C Noer, kemarin pukul 06.25 WIB meninggal dunia di usianya yang ke-54.

Almarhum yang dikenal sebagai sastrawan, sutradara teater, film, dan sinetron itu, meninggal setelah dirawat selama lima hari — sejak 24 Mei— di ICCU RS Medistra, Jakarta, karena mengidap kanker perut dan hati yang tak pernah dirasakannya. Sebelumnya, Arifin yang amat khas dengan kepala plontosnya, sempat menjalani operasi di Singapura untuk pengambilan kanker di perutnya.

"Sehari setelah masuk RS Medistra, Mas Arifin langsung mengalami masa krisis hingga tak bisa lagi mengenali orang lain yang menjenguknya. Kondisinya semakin parah ketika pada Sabtu malam (pukul 23.00 WIB) ia mengalami koma hingga menghembuskan nafasnya yang terkahir pukul 06.25 WIB," tutur bekas istrinya, Jajang Pamontjak.

Jenazah almarhum pada sore harinya, pukul 16.00 WIB, langsung dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jaksel, setelah disemayamkan di kediamannya di Jl H Saidi Guru 1/B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ratusan pelayat mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Di antara para pelayat tampak sutradara Teguh Karya, WS Rendra, Putu Wijaya, N Riantarno, Amaroso Katamsi, Ikranagara, Salim Said, Ishadi SK, dan mantan Menpen H Boediardjo.

Arifin yang dilahirkan di Cerebon, 10 Maret 1941 sebagai anak kedua dari delapan bersaudara, meninggalkan dua orang istri dan empat anak. Istri pertamanya, Nurul Aini, yang diceraikan pada 1979, membuahkan dua anak Vita Ariavita, 23, dan Veda Amrita, 18. Sedangkan dari istri terakhirnya, Jajang Pamontjak, Arifin memperoleh keturunan Nita Nazyra, 16, dan Marah Laut, 15.

Semasa hidupnya, almarhum yang belakangan aktif membuat sinetron televisi, dikenal sebagai pekerja dan pemikir seni yang tak kenal henti berkarya. Sejumlah karya besar pernah dilahirkan dari hasil kerja kreatifnya.

Naskah dramanya, *Sumur Tanpa Dasar*, *Megamega*, dan *Kapai-kapai* yang menjadi karyanya di kurun 1960-1970-an, merupakan sebagian dari banyak karyanya yang dianggap banyak kalangan sebagai karya 'pendobrak' bagi dunia teater modern Indonesia yang pada masa itu tengah mengalami stagnasi. Lakon *Kapai-kapai*, bahkan pernah dipentaskan orang di New York, Australia, dan Belgia dalam bahasa Inggeris dan Belanda.

"Saya rasa hingga saat ini tak ada karya drama modern Indonesia yang 'kekuatannya' sama dengan naskah-naskah Arifin itu," tutur sutradara teater Koma N Riantiarno yang mengaku sangat kehilangan Arifin sebagai teman diskusinya sesama pekerja teater.

"Saya sangat sedih kehilangan teman seperjuangan saya yang satu ini," tutur Rendra yang pernah menjadi guru Arifin di Bengkel Teater Yogyakarta.

Karya drama Arifin yang diselesaikannya pada kurun 1980-an juga cukup banyak yang mendapat pujian dari kalangan dramawan dan sastrawan di Tanah Air. Beberapa dia antaranya, *Interogasi*, *Nomor 1-Dalam Bayangan Tuhan (1984)*, *Interogasi 2-Dalam Bayangan (1989)*, dan *Ozone atawa Orkes Madun IV (1989)*, yang pernah ia pentaskan bersama Teater Kecil.

Pementasan terakhirnya bersama Teater Kecil —yang didirikannya bersama Amak Baldjun, Ikranagara, dan Amoroso Katamsi di Jakarta 1968— Arifin melakonkan *Kunjungan Nyonya Tua* yang dibintangi mendiang Tarida Gloria (Desember 1991). Sedangkan film terakhirnya adalah *Bibir Mer* yang dibintangi Bela Esparance Lee.

Di bidang film Arifin juga termasuk penulis cerita dan sutradara yang produktif dan berbobot. Dari sejumlah film yang digarapnya, ia telah meraih sembilan Piala Citra.

Menjelang akhir hayatnya, Arifin baru saja menyelesaikan produksi sinetronnya berjudul *Keris* yang siap ditayangkan SCTV pada Juni mendatang. Sedangkan sinetron yang sedang ia persiapkan, *Bukan Perempuan Biasa* diproduksi bersama PT Multi Vision. (Ags)

Media Indonesia, 29 Mei 1995